PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR 105 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

WALI KOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dalam tahun berjalan, ditemukan adanya ketidaksesuaian yang mencakup penghapusan, penambahan, maupun pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, dengan penyesuaian kerangka ekonomi daerah yang berdampak pada penambahan atau pengurangan pagu anggaran kegiatan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah ditetapkan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran...

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daeah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);

5. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

6. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan, dan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
a. dinas pendidikan dan kebudayaan;
b. dinas kesehatan;
c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. dinas perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
f. dinas sosial, pengendalian penduduk dan keluarga

berencana...

berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
g. dinas pangan dan pertanian;
h. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
i. dinas perhubungan;
j. dinas komunikasi dan informatika;
k. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
l. dinas perpustakaan dan kearsipan;
m. dinas pemuda, olahraga dan pariwisata;
n. dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
o. inspektorat;
p. badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
q. badan pengelola keuangan daerah;
r. badan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
s. sekretariat daerah;
t. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
u. kecamatan padang panjang timur;
v. kecamatan padang panjang barat; dan
w. badan penanggulangan bencana daerah, kesatuan bangsa dan politik.

KEEMPAT : Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:
a. bab I memuat pendahuluan;
b. bab II memuat hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah Triwulan I;
c. bab III memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
d. bab IV memuat penutup

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 30 juni 2025

WALI KOTA PADANG PANJANG,

HENDRI ARNIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 105 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA NO 10 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA TRIWULAN 1 6

2.1 Evaluasi Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sampai dengan Triwulan 1 tahun 2025 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 20

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD 23

2.4 Penelahaan usulan program dan kegiatan Masyarakat 39

2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 41

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 43

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 43

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 46

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .. 51

BAB IV 69

PENUTUP 69

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini menguraikan penyusunan program kegiatan dan anggaran/pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang kedepannya dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana kerja ini juga merupakan salah satu perwujudan dari komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Perubahan Renja Tahun 2025 ini kami sajikan secara objektif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Padang Panjang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan rencana kerja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD). Oleh karena itu, penyusunan rencana kerja dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai TW 1 Tahun 2025 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari rancangan awal Renstra Dinas Pendidikan 2025-2029 dan Rancangan awal RPJMD 2025-2029. Dalam penyusunan juga mengutamakan penyelesaian program/kegiatan strategis Tahun Anggaran 2024 yang perlu ditindaklanjuti, mengintegrasikan pencapaian target kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait. Program prioritas berdasarkan rumusan permasalahan prioritas dari isu

strategis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing dan mengakomodir hasil pelaksanaan kegiatan sampai triwulan 1 tahun 2025. Perubahan rencana kerja dengan memperhatikan skala prioritas dan Program Kepala Daerah terpilih. Disamping itu Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan paparan di atas, maka perubahan renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang yang merupakan salah satu penyelenggara urusan wajib Pemerintah Daerah perlu dilakukan. Perubahan ini adalah sebagai dasar untuk melaksanakan urusan Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum

Secara legalitas formal, penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2024 menggunakan dasar hukum/regulasi diantaranya:

a. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
g. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
h. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
i. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerj Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
j. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor....)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah:

a. Menjabarkan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara teknis sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
b. Mengakomodir Program dan kegiatan kepala daerah terpilih;
c. Menyediakan suatu acuan dan pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk tahun 2025.
d. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah :

a. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (pimpinan dan staf), khususnya penanggungjawab kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2025.
b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan kepala daerah terpilih sesuai kewenangan dan tupoksi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2025.
c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2025.
d. Menetapkan kegiatan prioritas berdasarkan isu dan masalah yang mendesak agar lebih terarah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SAMPAI TRIWULAN I TAHUN 2025

Mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 dan capaian Renstra Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan, Analisis kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 dan Perkiraan Maju tahun 2026

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KABUDAYAAN

SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sampai dengan Triwulan 1 tahun 2025

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pencapaian Renstra Dinas Pendidikan s/d TW 1 tahun 2025 Kota Padang Panjang

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025
Kota Padang Panjang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2024-2026)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2026	
				Target Renja OPD tahun 2025	Realisasi Renja OPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 6/5*	*8*	*9 =8*	*10*
5 01 01	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**								100%
5 01 01 2.02	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								100%
5 01 01 2.02 0001	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								100%
5 01 01 2.05	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan**	**100.00%**	**100 Persen**	**25 Persen**	25%	**100 Persen**	**100 Persen**	100%
5 01 01 2.05 0002	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	100%	**100 Persen**	**25 Persen**	250%	**90 Persen**	**90 Persen**	100%
5 01 01 2.06	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	583 orang	583 Orang/ ulan	583 Orang/ bulan	25%	583 Orang/ ulan	583 Orang/ bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2024-2026)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2026	
				Target Renja OPD tahun 2025	Realisasi Renja OPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi (%)
5 01 01 2.06 0001	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**	100%	**100 Persen**	**25 Persen**	25%	**100 Persen**	**100 Persen**	100%
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Julmah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	580 paket	580 paket	0	0%	**0**	**0**	0
5 01 01 2.06 0005	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**90 Persen**	**100 Persen**	**25 Persen**	25%	**90 Persen**	**90 Persen**	100%
5 01 01 2.06 0009	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	1 Paket	50%	4 Paket	4 Paket	100%
5 01 01 2.07	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2 Paket	1 Paket	50%	4 Paket	4 Paket	100%
5 01 01 2.07 0004	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	2 Paket	1 Paket	50%	5 Paket	5 Paket	100%
5 01 01 2.07 0005	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	30 Laporan	30 Laporan	100%
5 01 01 2.08	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	100%	**100 Persen**	**25 Persen**	25%	**100 Persen**	**100 Persen**	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2024-2026)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2026	
				Target Renja OPD tahun 2025	Realisasi Renja OPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi (%)
5 01 01 2.08 0001	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	0 Unit	0%	9 Unit	9 Unit	100%
5 01 01 2.08 0002	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	0 Unit	0%	5 Unit	5 Unit	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0Unit	0%	1 Unit	1 Unit	100%
5 01 01 2.09 0001	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**	**10 Persen**	**25 Persen**	25%	**100 Persen**	**100 Persen**	100%
5 01 01 2.09 0006	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
5 01 01 2.09 0009	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	25%	3 Laporan	3 Laporan	100%
5 01 02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25%	12 Laporan	12 Laporan	100%
5 01 02 2.01	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**25 Persen**	**25 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
5 01 02 2.01 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	17 Unit	5 Unit	0 Unit	0%	17 Unit	17 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2024-2026)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2026	
				Target Renja OPD tahun 2025	Realisasi Renja OPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya							
5 01 02 2.01 0007	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	5 Unit	0 Unit	0%	13 Unit	13 Unit	100%
5 01 02 2.02 0001	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	1 Unit	0 Unit	0%	10 Unit	10 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0	0	0	0	0	0
5 01 02 2.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**25 Persen**	25%	**100 Persen**	**100 Persen**	100%
5 01 02 2.03 0003	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola**	**38 Satuan Pendidikan**	**38 Satuan Pendidikan**	**38 Satuan Pendidikan**	100%	**38 Satuan Pendidikan**	**38 Satuan Pendidikan**	100%
5 01 02 2.04	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0	2 Unit	2 Unit	100%
5 01 02 2.04 0001	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 paket	0 paket	0 paket	0%	2 paket	2 paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2024-2026)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2026	
				Target Renja OPD tahun 2025	Realisasi Renja OPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi (%)
5 01 03	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 paket	0 paket	0 paket	0%	2 paket	2 paket	100%
5 01 03 2.01	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	32 unit	32 unit	32 unit	100%	32 unit	32 unit	100%
5 01 03 2.01 0007	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	380 peserta didik	0 peserta didik	0 peserta didik	0%	380 peserta didik	380 peserta didik	100%
5 01 03 2.01 0008	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	0 peserta didik	0 peserta didik	0%	1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	100%
5 01 03 2.02	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	104 Orang	104 Orang/ bulan	104 Orang	25%	104 Orang	104 Orang	100%
5 01 03 2.03	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Peserta Didik	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	25%	1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	100%
5 01 03 2.03 0008	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	38 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0%	38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2024-2026)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2026	
				Target Renja OPD tahun 2025	Realisasi Renja OPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi (%)
5 05	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	32 Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	25%	32 Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	100%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	190 Orang	190 Orang	190 Orang	25%	190 Orang	190 Orang	100%
5 05 02 2.01	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	25%	38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	100%
5 05 02 2.01 0002	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 unit	0 unit	0 unit	0%	3 unit	3 unit	100%
5 05 02 2.02	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	25%	38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	100%
5 05 02 2.02 0003	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola**	**13 Satuan Pendidikan**	**13 Satuan Pendidikan**	**13 Satuan Pendidikan**	100%	**13 Satuan Pendidikan**	**13 Satuan Pendidikan**	100%
5 05 02 2.03	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0	2 Unit	2 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2024-2026)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2026	
				Target Renja OPD tahun 2025	Realisasi Renja OPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	1 Unit	100%
5 05 02 2.03 0002	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	3 Paket	3 Paket	100%
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit	6 Unit	Unit	0%	6 Unit	6 Unit	100%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	100%
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	50 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0%	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	100%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	56 Orang	56 Orang	56 Orang	250%	56 Orang	56 Orang	100%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	350 Orang	350 Orang	10 Orang	25%	350 Orang	350 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2024-2026)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2026	
				Target Renja OPD tahun 2025	Realisasi Renja OPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang mengelola dana Bos	6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	100%	6 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	100%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	75 Orang	75 Orang	75 Orang	100%	75 Orang	75 Orang	100%
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14 Dokumen	14 Dokumen	0 Dokumen	0%	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
	pengadaan Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	500 Paket	500 Paket	100%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	2 Paket	2 Paket	100%
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	62 Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	100%	62 Satuan Pendidikan	62 Satuan Pendidikan	100%
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	13 Paket	0 Paket	0 Paket	0 %	13 Paket	13 Paket	100%
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12 orang	0 orang	0 orang	0	12 orang	12 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2024-2026)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2026	
				Target Renja OPD tahun 2025	Realisasi Renja OPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	250 Orang	250 Orang	250 Orang	25%	250 Orang	250 Orang	100%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	325 Orang	25 Orang	0 Orang	0%	325 Orang	325 Orang	100%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	61 Satuan Pendidikan	61 Satuan Pendidikan	61 Satuan Pendidikan	100%	61 Satuan Pendidikan	61 Satuan Pendidikan	100%
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah sekolah yang mengelola dana Bos	58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	100%	58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	100%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	120 orang	120 orang	120 orang	100%	120 orang	120 orang	100%
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	61 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0%	61 dokumen	61 dokumen	100%
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	150 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	150 Paket	150 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2024-2026)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2026	
				Target Renja OPD tahun 2025	Realisasi Renja OPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0%	2 Unit	2 Unit	100%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2 Paket	0 Paket	0 Paket	0%	2 Paket	2 Paket	100%
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	500 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0%	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	100%
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	100%	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	100%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Orang	5 Orang	0 Orang	0%	5 Orang	5 Orang	100%
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	0 Orang	0 Orang	0	30 Orang	30 Orang	100%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	100%	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2024-2026)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2026	
				Target Renja OPD tahun 2025	Realisasi Renja OPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	jumlah satuan pendidikan yang mengelola dana BOP	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	100%	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	100%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	30 Orang	100%
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14 dokumen	14 dokumen	0 dokumen	0%	14 dokumen	14 dokumen	100%
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas yang bertambah	6 ruang	0 ruang	0 ruang	0%	6 ruang	6 ruang	100%
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	100%	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	100%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	4 Objek	0 Objek	0 Objek	0%	4 Objek	4 Objek	100%
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebudayaan dengan masyarakat pelakunya yang dikelola	4 Objek	0 Objek	0 Objek	0%	4 Objek	4 Objek	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2024-2026)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2026	
				Target Renja OPD tahun 2025	Realisasi Renja OPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	0 Objek	0 Objek	0%	4 Objek	4 Objek	100%
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional dengan masyarakat pelakunya yang dilestarikan	**3 Objek**	0 Objek	0 Objek	0%	**3 Objek**	**3 Objek**	100%
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	**3 Objek**	0 Objek	0 Objek	0%	**3 Objek**	**3 Objek**	100%
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina	3 lembaga	0 lembaga	0 lembaga	0	3 lembaga	3 lembaga	100%
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	**3 Objek**	**0 Objek**	**0 Objek**	**0**	**3 Objek**	**3 Objek**	100%
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	60 Orang	0 Orang	0 Orang	0	60 Orang	60 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2024-2026)	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2025 (n)			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2026	
				Target Renja OPD tahun 2025	Realisasi Renja OPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi (%)

Dari tabel diatas terlihat bahwa pendidikan SD dan SMP ditargetkan akan mencapai standard nasional pendidikan yang baik. Program prioritas kepala daerah terpilih secara langsung telah mendukung urusan bidang pendidikan di kota Padang Panjang. Persentase objek pemajuan diperkirakan sama dengan tahun sebelumnya. Pada Program dan kegiatan diatas persentase realisasi masih 25 %. Ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana karena akan dikerjakan sesudah TW 1 Tahun 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada umumnya capaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meningkat setiap tahunnya sesuai target yang sudah ditetapkan pada Renstra 2025 – 2029. Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan dengan format Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang dibawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Padang Panjang

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	7	8	7	9	11	10	13
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD sederajat			99,6%	-	-	99.05%	-	-	
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP sederajat			97,4%	-	-	98.52%	-	-	
3	Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD			60%	-	-	62.94%	-	-	
4	APK PAUD (3-6 tahun)			48%	-	-	48%	-	-	
5	APK SD sederajat			106,20%	-	-	105,49%	-	-	
6	APK SMP sederajat			107,5%	-	-	109.30%	-	-	
7	Literasi dan Numerasi SD sederajat			89.11 dan 71.56	92.11 dan 75.56	93.11 dan 76.56	89,34 dan 78.56	92.11 dan 75.56	93.11 dan 76.56	
8	Literasi dan Numerasi SMP sederajat			79.30 dan 56.78	82.30 dan 62.25	83.30 dan 63.25	91.09 dan 67.79	82.30 dan 62.25	83.30 dan 63.25	
9	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SD sederajat			a.73.91 b.72.41 c.58.13	76.91 dan 76.41 dan 61.13	77.91 dan 77.41 dan	a.77.29 b.75.37 c.60.71	76.91 dan 76.41 dan 61.13	77.91 dan 77.41 dan 62.13	

						62.13				
10	Keamanan, kebhinekaan dan inklusifitas SMP sederajat			a.71.43 b.69.45 c.56.72	74.43 dan 72.45 dan 59.72	75.43 dan 73.45 dan 60.72	a.74.17 b.74.70 c.60.82	74.43 dan 72.45 dan 59.72	75.43 dan 73.45 dan 60.72	
11	Persentase Standar Sarana Prasarana Satuan Pendidikan			0	55	56	0	55	56	
12	Persentase warisan budaya yang dilestarikan			49%	-	-	49%	-	-	
13	Persentase pelestarian kebudayaan berbasis nagari			60%	-	-	60%	-	-	
15	Persentase cagar budaya yang dilestarikan			50%	-	-	50%	-	-	
15	Persentase kelompok seni/komunitas budaya yang diberdayakan			54%	-	-	54%	-	-	
16	Persentase Pelestarian objek pemajuan kebudayaan			-	67,60	68,22	-	67,60	68,22	

Pada table diatas ada 10 indikator yang berubah pada renstra 2025-2029. Indikator no 1 s/d 6 dan 12 s/d 15 tidak dipakai lagi. Indikator pada renstra baru ini menambah 2 indikator, satu indikator pada urusan pendidikan dan satu indikator pada urusan kebudayaan.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun dengan mengacu pada rancangan awal Perubahan RKPD kota Padang Panjang tahun 2025. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan kota Padang Panjang pada rancangan awal perubahan RKPD, maka ada beberapa program dan kegiatan pada Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan diperbaiki. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal perubahan RKPD Tahun 2025 Kota Padang Panjang seperti table 2.3. di bawah ini.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025

Dengan Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISIH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Kota Padang Panjang	**Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan**	**100%**	**34.465.663.506**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Kota Padang Panjang	**Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Kependidikan**	**100%**	**31,405,788,702**		
1	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Kota Padang Panjang	**Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola**	38 satuan pendidikan	**17,571,646,800**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Kota Padang Panjang	**Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola**	38 satuan pendidikan	**14,399,903,402**		
1.01	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	3,239,443,900	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	2,435,900,000		
X.XX.01	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 paket	290,000,000	Pengadaan Mebel Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 paket	120,000,000		
X.XX.01.2.02	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0	**-**	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	2 paket	250,000,000		

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISIH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
X.XX.01.2.02.0001	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	32 unit	305,000,000	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	32 unit	305,000,000		
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Padang Panjang	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	380 peserta didik	400,930,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kota Padang Panjang	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	380 peserta didik	401,930,000		
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Padang Panjang	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	114,782,000	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Padang Panjang	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1000 Peserta Didik	150,000,000		
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Padang Panjang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	104 Orang	2,856,504,000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Padang Panjang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	104 Orang	2,856,504,000	-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISIH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Padang Panjang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Peserta Didik	479,161,900	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Padang Panjang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Peserta Didik	527,288,000	-	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	38 Satuan Pendidikan	30,000,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	38 Satuan Pendidikan	30,000,000	-	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Padang Panjang	jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	32 Satuan Pendidikan	5,618,000,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Padang Panjang	jumlah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	32 Satuan Pendidikan	5,618,000,000	-	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Padang Panjang	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	190 Orang	20,000,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kota Padang Panjang	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	190 Orang	30,000,000	-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISIH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	20,000,000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	20,000,000		
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Padang Panjang	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 paket	300,000,000	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Padang Panjang	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 paket	300,000,000		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 unit	3,810,100,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 unit	1,255,281,402	-	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kota Padang Panjang	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	38 Satuan Pendidikan	87,725,000.00	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Kota Padang Panjang	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	38 Satuan Pendidikan	100,000,000	0	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISIH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Padang Panjang	**Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola**	**13 Satuan Pendidikan**	**8,064,664,700**	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Kota Padang Panjang	**Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah menengah pertama yang dikelola**	**13 Satuan Pendidikan**	**7,838,668,400**	**-**	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	122,705,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	123,305,000		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	1,235,520,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	560,180,000		
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	153,400,000	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket	450,000,000	-	
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit	300,000,000	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Unit	300,000,000	-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISIH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Padang Panjang	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta Didik	200,490,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kota Padang Panjang	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta Didik	200,490,000		
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Padang Panjang	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	120,662,500	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kota Padang Panjang	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	160,000,000		
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Padang Panjang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	56 Orang	1,369,418,400	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Padang Panjang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	56 Orang	1,369,418,400		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Padang Panjang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	350 Orang	243,228,800	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Padang Panjang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	350 Orang	300,000,000		

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISIH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
			Kualifikasi					Kualifikasi				
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Padang Panjang	Jumlah sekolah yang mengelola dana Bos	6 Satuan Pendidikan	3,865,275,000	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Padang Panjang	Jumlah sekolah yang mengelola dana Bos	6 Satuan Pendidikan	3,865,275,000		
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Padang Panjang	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	75 Orang	13,965,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kota Padang Panjang	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	75 Orang	30,000,000		
	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		-	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 unit	40,000,000		
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14 Dokumen	20,000,000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14 Dokumen	20,000,000		

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISIH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
	pengadaan Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Kota Padang Panjang	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 Paket	390,000,000	pengadaan Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Kota Padang Panjang	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 Paket	390,000,000		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Padang Panjang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	30,000,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kota Padang Panjang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket	30,000,000		
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Padang Panjang	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	62 Satuan Pendidikan	**6,754,554,026**	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Kota Padang Panjang	Jumlah Satuan Pendidikan anak usia dini yang dikelola	62 Satuan Pendidikan	6,916,579,000		
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Padang Panjang	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	13 Paket	669,099,000	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kota Padang Panjang	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	13 Paket	669,099,000		
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Padang Panjang	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12 orang	1,000,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kota Padang Panjang	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	12 orang	40,000,000		
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kota Padang Panjang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	250 Orang	4,021,200,000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kota Padang Panjang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	250 Orang	4,021,200,000		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kota Padang Panjang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan	325 Orang	168,776,200	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kota Padang Panjang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan	325 Orang	251,480,000		

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISIH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
			Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi					Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Padang Panjang	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	61 Satuan Pendidikan	49,870,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kota Padang Panjang	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	61 Satuan Pendidikan	75,000,000		
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Padang Panjang	Jumlah sekolah yang mengelola dana Bos	58 Satuan Pendidikan	1,363,800,000	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Padang Panjang	Jumlah sekolah yang mengelola dana Bos	58 Satuan Pendidikan	1,363,800,000		
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Padang Panjang	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	120 orang	14,115,000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kota Padang Panjang	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	120 orang	15,000,000		
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	61 dokumen	15,760,000	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	61 dokumen	30,000,000		

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISIH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Padang Panjang	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	150 Paket	19,944,496	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Kota Padang Panjang	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	150 Paket	20,000,000		
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	331,000,000	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	331,000,000		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kota Padang Panjang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2 Paket	20,000,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Kota Padang Panjang	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2 Paket	20,000,000		
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Padang Panjang	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	500 Peserta Didik	79,989,330	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kota Padang Panjang	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	500 Peserta Didik	80,000,000		
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Padang Panjang	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola	3 Satuan Pendidikan	**2,074,797,980**	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keseteraan**	Kota Padang Panjang	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/kesetaraan yang dikelola	3 Satuan Pendidikan	2,250,637,900		

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISIH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Padang Panjang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Orang	94,466,300	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Padang Panjang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Orang	112,000,000		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Padang Panjang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	34,651,500	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Padang Panjang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	62,000,000		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Padang Panjang	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	3 Satuan Pendidikan	12,197,800	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Padang Panjang	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	3 Satuan Pendidikan	15,000,000		

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISIH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Padang Panjang	jumlah satuan pendidikan yang mengelola dana BOP	3 Satuan Pendidikan	437,900,000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Padang Panjang	jumlah satuan pendidikan yang mengelola dana BOP	3 Satuan Pendidikan	437,900,000		
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Padang Panjang	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30 Orang	7,677,850	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kota Padang Panjang	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	30 Orang	15,000,000		
1.01.02.2.02.0012	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14 dokumen	12,143,850	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14 dokumen	20,000,000		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kota Padang Panjang	Jumlah Ruang Kelas yang bertambah	6 ruang	1,408,906,400	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kota Padang Panjang	Jumlah Ruang Kelas yang bertambah	6 ruang	1,457,737,900		
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Padang Panjang	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses	3 Satuan Pendidikan	66,854,280	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kota Padang Panjang	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses	3 Satuan Pendidikan	131,000,000		

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISIH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
			Belajar					Belajar				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kota Padang Panjang	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	4 Objek	**736,776,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Kota Padang Panjang	Persentase pelestarian objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	4 Objek	**736,776,000**		
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah kebudayaan dengan masyarakat pelakunya yang dikelola	4 Objek	175,000,000	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Padang Panjang	Jumlah kebudayaan dengan masyarakat pelakunya yang dikelola	4 Objek	175,000,000		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	175,000,000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	175,000,000		
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah kesenian tradisional dengan masyarakat pelakunya yang dilestarikan	**3 Objek**	**132,000,000**	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Padang Panjang	Jumlah kesenian tradisional dengan masyarakat pelakunya yang dilestarikan	**3 Objek**	**132,000,000**		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Kota Padang Panjan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya	**3 Objek**	41,000,000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Kota Padang Panjan	Jumlah Objek Pemajuan	**3 Objek**			

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISIH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
	Pemajuan Tradisi Budaya	g	yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			Objek Pemajuan Tradisi Budaya	g	Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		41,000,000		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	91,000,000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	91,000,000		
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah lembaga adat yang dibina	3 lembaga	**429,776,000**	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Padang Panjang	Jumlah lembaga adat yang dibina	3 lembaga	**429,776,000**		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kota Padang Panjang	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	**3 Objek**	365,000,000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Kota Padang Panjang	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	**3 Objek**	365,000,000		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan	Kota Padang Panjan	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan	60 Orang	45,000,000	Pembinaan Sumber Daya Manusia,	Kota Padang Panjan	Jumlah Sumber Daya Manusia,	60 Orang	45,000,000		

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISIH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
	Pranata Adat	g	Pranata Adat yang Dibina			Lembaga, dan Pranata Adat	g	Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	3 Unit	19,776,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	3 Unit	19,776,000		

Dari tabel diatas focus pendidikan adalah pada program pengelolaan Pendidikan dasar yaitu Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan pada urusan kebudayaan terus melanjutkan program pengembangan kebudayaan yang ada di kota Padang Panjang.

2.4 Penelahaan usulan program dan kegiatan Masyarakat

Berdasarkan telaahan program/kegiatan usulan dari berbagai pihak (*stake holder*) mengenai berbagai isu pendidikan dan kebudayaan, maka program peningkatan mutu pendidikan dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan menjadi perioritas utama disamping program fisik. Hal ini didasarkan dari kualitas mutu pendidikan yang belum merata pada setiap sekolah.

Mengingat terbatasnya sumber daya daerah, maka penetapan agenda dan prioritas pembangunan daerah di dalam perubahan rencana kerja Tahun 2025, harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya (resources) yang ada untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahun 2025 disusun dengan beberapa pertimbangan berikut:

a. Memiliki dampak yang signifikan, terukur dan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat;
b. Mekanisme dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 seperti pada tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Pada Perubahan Renja Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume Catatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**Program Pengelolaan Pendidikan**	Padang Panjang			
	a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
	Sub Kegiatan Penyediaan infrastruktur TIK	Padang Panjang	32 paket	93.886.000	Imbral
	Sub Kegiatan : Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		1000 buku	170.000.000	Imbral
	b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
	Sub Kegiatan Penyediaan infrastruktur TIK		56 paket	119.860.000	Imbral
	Sub Kegiatan : Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		1000 buku	115.254.000	Imbral
	Sub Kegiatan :Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		350 orang	120.000.000	Imbral
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		2 paket	255.000.000	Herman dan Nasrul Efendi.
	Program Pengembangan Kebudayaan	Padang Panjang			
	c. Kegiatan :Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Sug Keg: Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		4 objek	151,860,000	Idris

Pada Tabel diatas usulan masyarakat maupun pokok pikiran anggota DPRD kota Padang Panjang akan membantu peningkatan pendidikan bagi masyarakat secara umum. Peningkatan akses pendidikan akan dirasakan oleh masyarakat dengan adanya bantuan biaya pendidikan.

2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kependidikan dan Kebudayaan, OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan memenuhi Standar pelayanan minimal pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Untuk perencanaan program/kegiatan akan datang, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan masih menjadi skala prioritas untuk memperbaiki kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

   Program prioritas pendidikan dan kebudayaan dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu strategis. Berkaitan dengan hal itu, maka identifikasi dan rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis sangat memperhatikan cakupan efek dari masalah, intensitas kemunculan masalah dalam masyarakat dari efek beruntun yang berpengaruh pada kinerja sektor lain, dan adanya kecenderungan untuk meningkatkan pembangunan tapi menimbulkan dampak negative pada pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang.

   Meskipun Kota Padang Panjang sudah sejak lama dijuluki sebagai kota Pendidikan dan angka Wajar Sembilan Tahun sudah dapat dipenuhi, akan tetapi permasalahan pokok pada urusan pendidikan adalah belum meratanya kualitas pendidikan dan belum terpenuhinya kebutuhan dunia kerja. Belum maksimalnya pemerataan pendidikan disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat untuk masuk sekolah dengan kualitas bagus dan berlokasi di pusat kota, sedangkan di sisi lain masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan siswa terutama sekolah swasta dan sekolah yang berada di lingkup Kementerian Agama.

Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan diperlukan tidak hanya untuk sekolah negeri tetapi juga untuk pendidikan swasta terutama pendidikan swasta agama, sehingga pelayanan pendidikan terlihat tidak diskriminatif.

b. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tantangan Dan Peluang yang dihadapi dan Kebudayaan dalam meningkatkan pelayanan, yaitu:

1) Paradigma Pendidikan yang harus disikapi setiap saat;
2) Kebijakan pemerintah yang berubah termasuk di bidang pendidikan;
3) Tingkat selektifitas masyarakat yang masih rendah terhadap dampak globalisasi;
4) Kemajuan IPTEK yang begitu pesat;
5) Belum optimalnya kepedulian terhadap Kebudayaan daerah;
6) Untuk mengakomodir program dan kegiatan walikota terpilih.

c. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Berdasarkan analisis pengelolaan pendidikan kota Padang Panjang dapat diidentifikasi berbagai Isu strategis yang menjadi tantangan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Menekankan keseimbangan antara pengembangan kecerdasan Akademis, Spiritual dan Emosional;
2) Menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan, yang diperlukan dalam pengembangan sikap dan jiwa enterpreunership peserta didik;
3) Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan Satuan Perangkat Daerah Kota dan Propinsi, Kementerian/Lembaga lain;
4) Menata, memperbaiki dan meningkatkan kredibilitas Sistem Penilaian dan Evaluasi dalam urusan pendidikan, dan kebudayaan,

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, melaksanakan urusan yang berkaitan dengan Urusan Pendidikan dan urusan Kebudayaan. Urusan Pendidikan dan kebudayaan merupakan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai Kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global".

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
b. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
c. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Perumusan tujuan Kemendikbud ditujukan untuk menggambarkan ukuran ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Kemendikbud menetapkan lima tujuan sebagai berikut:

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif.
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik.
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter.
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus- utamaannya dalam pendidikan.
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan.

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2025.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama — Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua — Penguatan mutu dan relevans pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat — Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan

berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan

5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima — Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan mengacu kepada Renstra Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
S1.1 : Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	Meningkatnya kualitas, akses pendidikan dan		Harapan Lama Sekolah	15.67	15.85	16.02	16.19	16.37	16.54	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
S4.3 : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat	pengamalan nilai-nilai agama serta adat dalam kehidupan masyarakat		Rata-Rata lama Sekolah	12.16	12.30	12.43	12.57	12.70	12.84	
			Persentase pemenuhan SPM urusan pendidikan	100	100	100	100	100	100	
			Persentase objek pemajuan kebudayaan	66,60	67,22	67,84	68,46	69,08	69,70	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		1. Meningkatnya akses, kualitas dan daya saing pendidikan	Literasi SD sederajat	75.56	76.56	77.56	78.56	79.56	79.60	
			Numerasi SD sederajat	75.56	76.56	77.56	78.56	79.56	79.60	
			Literasi SMP sederajat	82.30	83.30	84.30	85.30	86.30	86.35	
			Numerasi SMP sederajat	62.25	63.25	64.25	65.25	66.25	66.30	
			Keamanan SD	76.91	77.91	78.91	79.91	79.93	79.95	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sederajat							
			Kebhinekaan SD sederajat	76.41	77.41	78.41	79.41	79.43	79.45	
			Inklusifitas SD sederajat	61.13	62.13	63.13	64.13	64.14	64.15	
			Keamanan SMP sederajat	74.43	75.43	76.43	77.43	77.45	77.46	
			Kebhinekaan SMP sederajat	72.45	73.45	74.45	75.45	75.46	75.47	
			Inklusifitas SMP sederajat	59.72	60.72	61.72	62.72	62.74	62.75	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Persentase Standar Sarana Prasarana Satuan Pendidikan	55	56	57	58	60	60	
		2. Meningkatnya aktivitas adat dan budaya di masyarakat	Persentase Pelestarian objek pemajuan kebudayaan	67,60	68,22	69,84	70,46	71,08	72,70	
		3.Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	67.50	68.92	71.68	74.48	77.27	79.67	

Tabel diatas menggambarkan tujuan yang akan dicapai tahun 2025 s/d 2029 yang sesuai dengan tujuan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang tahun 2025-2029.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 antara lain adalah:

a) Rancangan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2025 – 2029;
b) Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Pendidikan sampai dengan TW 1 Tahun 2025;
c) Tema dan prioritas pembangunan kepala daerah terpilih tahun 2025;
d) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
e) Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.
f) Program Unggulan Kepala Daerah terpilih.

Rumusan perubahan Rencana Program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang untuk tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**81.012.889.798**	**109.991.348.959**	**112.768.706.654**							**67.911.294.911**	
	1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**79.909.337.798**	**108.537.572.959**	**112.135.194.654**							**67.461.518.911**	
	1.01.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**79.909.337.798**	**108.537.572.959**	**112.135.194.654**							**67.461.518.911**	
1	**1.01.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**59.829.093.798**	**77.131.784.257**	**74.503.344.278**							**53.664.042.911**	
	1.01.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**56.904.044.448**	**74.166.140.209**	**71.889.079.380**			-	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	**-**		**51.403.305.561**	**Disdikbud**
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3480 Orang/bulan		580 Orang/bulan	580 Orang/bulan	580 Orang/bulan	56.904.044.448	74.166.140.209	71.889.079.380	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			51.403.305.561	Disdikbud
	1.01.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**464.000.000**	**494.530.000**	**494.530.000**			-	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	**-**		**0**	**Disdikbud**
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2320 Paket		0 Paket	580 Paket	580 Paket	464.000.000	494.530.000	494.530.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**526.707.350**	**526.696.464**	**305.433.322**			-	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	**-**		**526.707.350**	**Disdikbud**
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	20.670.650	20.663.500	12.397.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			20.670.650	Disdikbud
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	129.050.000	129.047.314	65.218.622	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			129.050.000	Disdikbud
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket		5 Paket	5 Paket	5 Paket	76.986.700	76.986.650	38.453.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			76.986.700	Disdikbud
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	300.000.000	299.999.000	189.364.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			300.000.000	Disdikbud
	1.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**170.000.000**	**169.540.300**	**162.101.800**			-	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	**-**		**370.000.000**	**Disdikbud**
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			200.000.000	Disdikbud
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	360 Unit		0 Unit	10 Unit	10 Unit	100.000.000	99.680.000	66.680.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			100.000.000	Disdikbud
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	65 Unit		0 Unit	5 Unit	5 Unit	50.000.000	49.931.800	49.931.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			50.000.000	Disdikbud

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	22 Unit		0 Unit	1 Unit	6 Unit	20.000.000	19.928.500	45.490.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			20.000.000	Disdikbud
	1.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.039.342.000**	**1.050.191.284**	**1.028.499.776**			-	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	**-**		**1.039.030.000**	**Disdikbud**
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	6.030.000	6.023.700	3.005.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			6.030.000	Disdikbud
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	150.000.000	149.999.584	131.385.976	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			150.000.000	Disdikbud
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	883.312.000	894.168.000	894.108.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			883.000.000	Disdikbud
	1.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**725.000.000**	**724.686.000**	**623.700.000**			-	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	**-**		**325.000.000**	**Disdikbud**
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		17 Unit	17 Unit	17 Unit	190.000.000	189.992.000	189.288.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			190.000.000	Disdikbud
	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		0 Unit	10 Unit	10 Unit	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			25.000.000	Disdikbud
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		13 Unit	13 Unit	13 Unit	10.000.000	9.740.000	9.740.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			10.000.000	Disdikbud
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	500.000.000	499.954.000	399.672.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			100.000.000	Disdikbud
2	**1.01.02.**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APS PAUD (5-6 tahun)**	**71 Angka**		**62 Angka**	**63 Angka**	**63 Angka**	**20.080.244.000**	**31.405.788.702**	**37.631.850.376**							**13.797.476.000**	
			APS SD sederajat	**99,76 Angka**		**99,7 Angka**	**99,71 Angka**	**99,71 Angka**										
			APS SMP sederajat	**97,57 Angka**		**97,5 Angka**	**97,51 Angka**	**97,51 Angka**										
			APK Paud (3-6 tahun)	**59,05 Angka**		**50 Angka**	**51 Angka**	**51 Angka**										
			APK SD sederajat	**106,92 Angka**		**106 Angka**	**106,1 Angka**	**106,1 Angka**										
			APK SMP sederajat	**107,5 Angka**		**107 Angka**	**107,1 Angka**	**107,1 Angka**										
	1.01.02.2.01.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar**	**99.75 %**		**99.70 %**	**%**	**99.71 %**	**8.206.128.000**	**14.399.903.402**	**18.190.998.823**			-	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	**-**		**5.844.840.000**	**Disdikbud**
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang		0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			500.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	227.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			100.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		0 Ruang	0 Ruang	0 Ruang	450.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	18 Unit		2 Unit	2 Unit	6 Unit	1.401.000.000	2.435.900.000	3.299.443.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			534.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	16 Paket		14 Paket	2 Paket	2 Paket	120.000.000	120.000.000	290.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			120.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	35 Paket		2 Paket	2 Paket	2 Paket	250.000.000	250.000.000	165.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	192 Unit		32 Unit	32 Unit	32 Unit	305.000.000	305.000.000	305.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			300.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	6000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	1000 Orang	150.000.000	150.000.000	114.782.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			150.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	502 Orang		104 Orang	104 Orang	104 Orang	3.054.840.000	2.856.504.000	2.856.504.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			3.054.840.000	Disdikbud
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2313 Orang		400 Orang	350 Orang	350 Orang	527.288.000	527.288.000	479.161.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			150.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	228 Satuan Pendidikan		38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			30.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	160 Satuan Pendidikan		32 Satuan Pendidikan	- Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	-	5.618.000.000	5.748.466.023	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1064 Orang		190 Orang	190 Orang	190 Orang	30.000.000	30.000.000	20.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			30.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	43 Dokumen		38 Dokumen	38 Dokumen	38 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			20.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	570 Paket		0 Paket	0 Paket	0 Paket	-	-	93.886.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	9735 Buku		0 Buku	- Buku	1983 Buku	-	-	170.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2969 Paket		273 Paket	1000 Paket	1000 Paket	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			300.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Unit		3 Unit	3 Unit	4 Unit	400.000.000	1.255.281.402	3.810.100.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	228 Satuan Pendidikan		38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	100.000.000	100.000.000	87.725.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			100.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2184 Peserta Didik		380 Peserta Didik	380 Peserta Didik	380 Peserta Didik	841.000.000	401.930.000	400.930.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			456.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.02.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar**	**97.55 %**		**97.50 %**	**97.51 %**	**97.51 %**	**6.227.436.000**	**7.838.668.400**	**10.376.499.547**			-	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	-		**3.517.436.000**	**Disdikbud**
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	0 Ruang	400.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	0 Ruang	600.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit		0 Unit	2 Unit	1 Unit	500.000.000	123.305.000	152.705.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Ruang		0 Ruang	3 Ruang	0 Ruang	335.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			300.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Unit		0 Unit	1 Unit	5 Unit	600.000.000	560.180.000	1.738.283.001	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket		0 Paket	2 Paket	5 Paket	300.000.000	-	568.150.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			300.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	11 Paket		0 Paket	3 Paket	7 Paket	300.000.000	450.000.000	617.400.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	36 Unit		0 Unit	6 Unit	6 Unit	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			300.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	752 Peserta Didik		0 Peserta Didik	50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	215.000.000	200.490.000	200.490.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			30.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2820 Peserta Didik		0 Peserta Didik	500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	160.000.000	160.000.000	120.662.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			160.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	246 Orang		0 Orang	56 Orang	56 Orang	1.707.436.000	1.369.418.400	1.369.418.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			1.707.436.000	Disdikbud
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1620 Orang		0 Orang	350 Orang	350 Orang	300.000.000	300.000.000	363.228.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			300.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	58 Satuan Pendidikan		13 Satuan Pendidikan	- Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	-	3.865.275.000	3.987.082.846	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	270 Orang		75 Orang	75 Orang	75 Orang	30.000.000	30.000.000	13.965.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			30.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1000 Unit		0 Unit	6 Unit	0 Unit	40.000.000	40.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			40.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	19 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			20.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	66 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan	- Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	-	-	270.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	40988 Buku		0 Buku	- Buku	988 Buku	-	-	115.254.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2480 Paket		0 Paket	500 Paket	500 Paket	390.000.000	390.000.000	390.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			300.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket		0 Paket	2 Paket	2 Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			30.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	130 Paket		0 Paket	- Paket	130 Paket	-	-	119.860.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.02.03.	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B**	**65 %**		**61.02 %**	**61.02 %**	**61.02 %**	**5.099.680.000**	**6.916.579.000**	**6.989.554.026**			-	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	**-**		**4.186.200.000**	**Disdikbud**
	1.01.02.2.02.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	3 Paket		0 Paket	2 Paket	2 Paket	20.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.02.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	33 Paket		0 Paket	2 Paket	13 Paket	97.000.000	669.099.000	910.099.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			20.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.02.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	107 Peserta Didik		0 Peserta Didik	12 Peserta Didik	12 Peserta Didik	39.000.000	40.000.000	1.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0	Disdikbud
	1.01.02.2.02.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1600 Orang		250 Orang	250 Orang	250 Orang	4.021.200.000	4.021.200.000	4.021.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			4.021.200.000	Disdikbud
	1.01.02.2.02.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1825 Orang		0 Orang	325 Orang	325 Orang	251.480.000	251.480.000	168.776.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			35.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.02.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	359 Satuan Pendidikan		61 Satuan Pendidikan	61 Satuan Pendidikan	61 Satuan Pendidikan	75.000.000	75.000.000	49.870.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.02.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	290 Satuan Pendidikan		58 Satuan Pendidikan	- Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	-	1.363.800.000	1.363.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP PAUD	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	720 Orang		0 Orang	120 Orang	120 Orang	15.000.000	15.000.000	14.115.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	4 Unit		Unit	2 Unit	0 Unit	30.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	102 Dokumen		61 Dokumen	61 Dokumen	61 Dokumen	30.000.000	30.000.000	15.760.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	900 Paket/Unit		0 Paket/Unit	150 Paket/Unit	150 Paket/Unit	20.000.000	20.000.000	19.944.496	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	4 Unit		0 Unit	2 Unit	0 Unit	331.000.000	331.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			30.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit		0 Unit	- Unit	2 Unit	-	-	325.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	6 Paket		0 Paket	2 Paket	2 Paket	40.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	290 Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	80.000.000	80.000.000	79.989.330	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			80.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang		0 Ruang	2 Ruang	0 Ruang	50.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.04.	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 thn yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpatisipasi dalam pendidikan kesetaraan**	**70 %**		**55.26 %**	**55.26 %**	**55.26 %**	**547.000.000**	**2.250.637.900**	**2.074.797.980**			-	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	**-**		**249.000.000**	**Disdikbud**
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	70 Orang		0 Orang	5 Orang	5 Orang	112.000.000	112.000.000	94.466.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			112.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	255 Orang		0 Orang	30 Orang	30 Orang	62.000.000	62.000.000	34.651.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			62.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	18 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	15.000.000	15.000.000	12.197.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			15.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	15 Satuan Pendidikan		0 Satuan Pendidikan	- Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	-	437.900.000	437.900.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	255 Orang		0 Orang	30 Orang	30 Orang	15.000.000	15.000.000	7.677.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			15.000.000	Disdikbud

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	26 Dokumen		0 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	20.000.000	20.000.000	12.143.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			20.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	7 Ruang		0 Ruang	0 Ruang	3 Ruang	-	1.457.737.900	1.408.906.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		0 Paket	2 Paket	0 Paket	60.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	685 Peserta Didik		0 Peserta Didik	3 Peserta Didik	3 Peserta Didik	113.000.000	131.000.000	66.854.280	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			25.000.000	Disdikbud
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	11 Paket		0 Paket	6 Paket	0 Paket	150.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0	Disdikbud
	2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**551.776.000**	**736.776.000**	**633.512.000**							**449.776.000**	
	2.22.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**551.776.000**	**736.776.000**	**633.512.000**							**449.776.000**	
3	**2.22.02.**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase partisipasi masyarakat terhadap pengembagan kebudayaan**	**75,57 %**		**66,16 %**	**75 %**	**75 %**	**551.776.000**	**736.776.000**	**633.512.000**							**449.776.000**	
	2.22.02.2.01.	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokmen Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola**	**10 Dokumen**		**0 Dokumen**	**- Dokumen**	4 Dokumen	**175.000.000**	**175.000.000**	**338.707.000**			-	**Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis**	**-**		**175.000.000**	**Disdikbud**
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	14 Objek		0 Objek	4 Objek	4 Objek	175.000.000	175.000.000	338.707.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			175.000.000	Disdikbud
	2.22.02.2.02.	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilestarikan**	**3 Objek**		**0 Objek**	**3 Objek**	**3 Objek**	**132.000.000**	**132.000.000**	**96.869.000**			-	**Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis**	**-**		**60.000.000**	**Disdikbud**
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	18 Objek		0 Objek	3 Objek	3 Objek	41.000.000	41.000.000	26.621.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			30.000.000	Disdikbud
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	7 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	91.000.000	91.000.000	70.248.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			30.000.000	Disdikbud
	2.22.02.2.03.	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dibina**	**3 Lembaga**		**3 Lembaga**	**3 Lembaga**	**3 Lembaga**	**244.776.000**	**429.776.000**	**197.936.000**			-	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	**-**		**214.776.000**	**Disdikbud**
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	15 Objek		0 Objek	3 Objek	3 Objek	180.000.000	365.000.000	178.436.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			150.000.000	Disdikbud
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	400 Orang		0 Orang	60 Orang	0 Orang	45.000.000	45.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			45.000.000	Disdikbud
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	18 Unit		0 Unit	3 Unit	3 Unit	19.776.000	19.776.000	19.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			19.776.000	Disdikbud

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan diatas akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana kerja dan Anggaran perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang tahun 2025. Sub kegiatan yang ada, telah mengakomodir urusan pendidikan dan urusan kebudayaan. Dengan adanya rumusan ini akan memberikan gambaran pendanaan pada perubahan rencana kerja dinas pendidikan untuk tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang selama tahun sebelumnya. Terlaksananya Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, 30 Juni 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PADANG PANJANG ,

Nasrul, SH. M.Si
NIP 196910151989031003

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Sampul Depan 1

Daftar Isi…… 2

Daftar Tabel …… 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang …… 4

1.2 Landasan Hukum …… 6

1.3 Maksud dan Tujuan ……. 8

1.4 Sistematika Penulisan …… 8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Terhadap hasil Renja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang 9

2.2 Analis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang 38

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 43

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD……. 48

2.5 Penelaahan Usulan Progaram dan Kegiatan Masyarakat……. 75

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

3.1 Telaahana Terhadap Kebijakan Nasional …… 76

3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 76

3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Prov Sumbar Tahun 78

3.4 Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2025 81

3.5 Program dan Kegiatan 105

BAB IV PENUTUP

PENUTUP…… 122

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Kesehatan
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang s.d Tahun 2024
Tabel 2.3	Pemetaan dan permasalahan
Tabel 2.4	Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang
Tabel 3.1	Hubungan antara visi,misi, tujuan dan sasaran RPJMD
Tabel 3.2	Tujuan sasaran Dinas Kesehatan
Tabel 3.3	Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Tabel 3.4	Rencana Program dan Kegiatan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Dinas Kesehatan menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan, hasil evaluasi hasil Renja Dinas Kesehatan tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Dinas Kesehatan tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Dinas Kesehatan ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Proses penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025 didasarkan adanya inpres No

1 Tahun 2025 adalah instruksi presiden yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengakomodir program unggulan kepala Daerah terpilih dalam pelaksanaan kegiatan Golden age, PKG, RS Rujukan Jantung dan penanganan Stunting dan evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke satu tahun 2025. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dan alasan perlu dilakukan Perubahan Renja Organisasi Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2025. Sehubungan dengan hal di atas maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2025. Di dalam perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang mengacu kepada kebijakan di tingkat pusat,propinsi dan daerah serta prioritas pembangunan 2025 yang digunakan sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam penentuan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2025. bahwasanya perubahan RKPD dan Renja Dinas Kesehatan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, telah ditemukan beberapa kondisi yang dapat dijadikan dasar/pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2025. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan pertama dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2025.

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan serta sejalan dengan tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing l”. (sesuaikan dengan tujuan Organisasi Dinas Kesehatan dalam RPJMD)

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan dilakukan melalui tahapan, meliputi :

1. Persiapan penyusunan

   Meliputi pembentukan tim penyusun Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025, Pengumpulan hasil evaluasi renja 2024, pengendalian kegiatan tahun 2025.
2. Tahap perumusan rancangan Renja Dinas Kesehatan, meliputi :
   a. Pengolahan data dan informasi
   b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Kesehatan
   c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan
   d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan
   e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
   f. Perumusan tujuan dan sasaran
3. Penyusunan rancangan

Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025, Masukan dari pelaksana kegiatan pembahasan oleh tim Dinas Kesehatan

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025-2029
18. Peraturan Walikota Kota Padang Panjang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah :

1. Untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.
2) sebagai upaya memenuhi kebutuhan untuk menyesuaikan dengankondisi keadaan dalam tahun berjalan
3) Sebagai penjabaran dari rencana strategis Dinas Kesehatan.

4) Sebagai acuan untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan.
5) Merumuskan prioritas dan sasaran dari Dinas Kesehatan Tahun 2025
6) Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025.

.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I **Pendahuluan**

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II **Hasil Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Kota**

2.1 Evaluasi Perubahan Renja Renja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2025 sd Triwulan I
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perubahan Renja Dinas Kesehatan
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perubahan Renja Dinas Kesehatan
2.4 Review tehadap Rancangan awal RKPD Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2025
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III **RENCANA KERJA PENDANAAN DINAS KESEHATAN KOTA**

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional/Provinsi PD serta narasinya
3.2 Tujuan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan serta narasinya
3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV **PENUTUP**

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN PADA TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 Pada Triwulan I

Kualitas Renja- Dinas Kesehatan yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dikaitkan dengan pencapaian Renstra-Dinas Kesehatan. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025, perlu diperhatikan hasil evaluasi Renja Tahun 2024 terhadap capaian Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Kesehatan sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2025 terhadap target kinerja Tahun 2025. Hal ini juga perlu dilihat hasil evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 dengan kinerja Tahun 2024 (tahun ke-satu).

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5					6		7		8		9		14		11			12		13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**424,196,712,407**		**167,223,826,920**		**164,982,580,049**		**35,751,775,052**		-		-		-			-			-			-		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi**	**100**	**%**	**375,598,432,916**		**143,288,401,649**		**143,208,949,110**		**31,129,879,902**																	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian dan Ikhtisar Realisasi kinerja Dinkes																										
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**170,454,745,206**		**75,989,283,794**		**71,437,345,942**		**18,722,372,668**																	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	467	orang	170,454,745,206	487 orang	75,989,283,794	493 Orang	71,437,345,942	493 Orang	18,722,372,668																	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5				6		7		8		9		14		11			12		13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.			K	Rp.		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun Dinkes																									
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan bulanan ,triwulan dan semester Dinkes																									
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yg tersedia																									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Terlaksanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 Tahun**	**450,000,000**		**237,695,000**		**-**		**-**																	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 paket	450,000,000		237,695,000																					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1 Tahun**	**1,363,549,000**		**395,753,575**		**358,848,603**		**32,842,791**																	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
											I		II		III		IV														
1	2	3	4	5					6		7		8		9		14		11			12		13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	15	paket	87,222,900		16,307,523	5 Paket	7,995,700	1 Paket																			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	13	paket	302,668,000		87,522,955	5 Paket	38,607,091	1 Paket	4,945,000																		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	13	paket	123,658,100		30,205,867	5 Paket	24,999,550	1 Paket	125,000																		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah lapran peneyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	300	Laporan	850,000,000		261,717,230	100 Laporan	287,246,262	20 Laporan	27,772,791																		
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti																											
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase penyediaan sarana dan prasaran aparatur yang memadai**	85	%	**560,000,000**		**1,392,920,000**		**169,099,500**		**5,000,000**																		

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
											I		II		III		IV															
1	2	3	4	5					6		7		8		9		14		11			12		13 = 6+12			14 =13/5X100%			
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.				
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraanPerorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1	Unit	350,000,000		86,400,000	1 Unit	90,000,000	1 Unit																				
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangannya	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1		-	1 Unit	863,970,000																						
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20	Unit	210,000,000		442,550,000	9 Unit	79,099,500	2 Unit	5,000,000																		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**3,374,388,659**		**1,268,428,239**		**1,372,315,028**		**254,556,925**																		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	36	laporan	18,290,000		5,380,000	12 Laporan	2,000,000	3 Laporan	-																		

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5				6		7		8		9		14		11		12		13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
			Jumlah pembelian materai, jumlah dokumen yang dicetak/ digandakan dan alat tulis kantor yang disediakan																								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan lstrik yang disediakan	36 Laporan	661,530,339		179,732,076	12 Laporan	234,226,228	3 Laporan	36,105,849																
			Jumlah tagihan rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan serta jumlah komponen listrik yang disediakan																								
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 Laporan	2,694,568,320		1,083,316,163	12 Laporan	1,136,088,800	3 Laporan	218,451,076																

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5				6		7		8		9		14		11		12		13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**1,904,188,474**		**858,075,181**		**567,802,800**		**61,327,941**																
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	105,000,000		11,527,200	1 Unit	17,008,000	1 Unit	1,552,500																
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibaayrkan pajak perizinannya	76 unit	1,464,188,474		328,378,667	75 Unit	450,794,800	25 Unit	49,565,441																
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (DKK)	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	7 Gedung	220,000,000		18,255,000	3 Unit	50,000,000	1 Unit	3,525,000																

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5					6		7		8		9		14		11			12		13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya Lainnya yang dipelihar	50	Unit	115,000,000		499,914,314	50 Unit	50,000,000	10 Unit	6,685,000																		
		Peningkatan Pelayanan BLUD	**Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan**	**1**	**Blud**	**197,491,561,577**		**63,146,245,860**		**69,303,537,237**		**12,053,779,577**																		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pemenuhan operasional pelayanan rumah sakit			197,491,561,577		63,146,245,860	5 Blud	69,303,537,237	5 Blud	12,053,779,577																		
	Meningkatnya Angka Harapan Hidup			73,6																										
	Prevalensi stunting			9,01																										
Meningkatkan Status Kesehatan Keluarga	Persentase penurunan Kematian Ibu			25	%																									

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
											I		II		III		IV														
1	2	3	4	5					6		7		8		9		14		11			12		13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		
	Persenatase penurunan Kematian Bayi			20	%																								
	Indeks Kelufffffarga Sehat			0,51		-																							
	Presentase UHC			99.30	%	-																							
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP	**94**	**%**	**47,231,279,491**		**22,301,989,309**		**20,603,765,889**		**4,612,295,150**																	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)**	**85**	**%**	**2,560,000,000**		**8,067,459,319**		**6,151,685,000**		**150,606,100**																	
		Pembangunan Puskesmas	Jumlah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang dibangun	1	Unit	-		9,421,400	1 Unit	936,000,000	1 Unit	-																
			Jumlah Pembangunan Labkes			-																						

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5				6		7		8		9		14		11		12		13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan		600,000,000																						
		Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya					22,888,000	2 Unit		2 Unit																	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan diadakan	3 Paket	300,000,000		624,100,000	2 Unit		2 Unit																	
		Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan					80,995,000																				
		Pengembangan Rumah Sakit					5,985,997,500		4,261,349,000																		

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5				6		7		8		9		14		11		12		13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Pengadaan Oabat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan minuman di Fasilitas Kesehatan					1,326,579,569	4 Paket	954,336,000	1 Paket	150,606,100																
		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah prasarana pelayanan kesehatan yang disediakan	3 paket	820,000,000																					
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	3 paket	600,000,000																					
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Baha Habis Pakai ,Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan minuman di Fasilitas Kesehatan					17,477,850																			
		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yg terpelihara	4 Puskesmas	240,000,000				-																	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	82 %	**44,671,279,491**		**14,234,529,990**		**14,431,880,889**		**4,461,689,050**																

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
											I		II		III		IV														
1	2	3	4	5					6		7		8		9		14		11			12		13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1129	orang	100,731,250		14,437,050	935	208,839,800	84 Orang																			
			Jumlah Pesrta Kegiatan																											
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1077	orang	83,838,800		15,827,500	935	20,000,100	86 Orang																			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1026	orang	132,860,900		25,447,000	822	20,000,000	74 Orang																			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3957	orang	94,845,000		14,904,000	3501	19,999,700	298 Orang																			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12241	Org	104,845,000		20,335,450	12975	166,450,000	396 Orang																			

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5				6		7		8		9		14		11		12		13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41185	orang	91,341,300		12,590,000	21274	29,979,000	980 Orang																	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4928	orang	1,168,144,524		410,254,300	5890	381,320,100	633 Orang	38,200,000																
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan Kesehatan Sesuai standar	12234	orang	120,000,000		30,616,500	5904	34,998,800	474 Orang																	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan Kesehatan Sesuai standar	950	Orang	105,000,000		76,839,190	1160	19,997,100	137 Orang																	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapat pelayanan Kesehatan orang gangguan jiwa berat Sesuai standar	117	orang	53,000,000		8,036,100	128	42,594,600	101 Orang																	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
											I		II		III		IV														
1	2	3	4	5					6		7		8		9		14		11			12		13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan Sesuai standar	2,331	Orang	105,000,000		204,221,750	1400	60,198,100	412 Orang																			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1533	Orang	105,000,000		22,352,300	1533	25,381,800	353 Orang																			
		pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	36	Dokumen	60,000,000		-	12 Dokumen	10,556,400	3 Dokumen																			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	180	Dokumen	910,000,000		873,402,953	60 Dokumen	1,370,638,150	12 Dokumen	67,952,250																		
			Jumlah Balita Gizi Kurang dan Ibu hamil KEK dan Anemi yg diberikan PMT	180	Orang																									

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
										I		II		III		IV												
1	2	3	4	5				6		7		8		9		14		11		12		13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Surveliens GiziGizi	12	Kali																						
			Jumlah Kader Pendamping balita/ Bumil KEK																								
			JumlahPeserta Pelatihan Program Gizi																								
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	6	Dokumen	60,000,000		16,009,200	4 Dokumen	99,898,400	4 Dokumen																
			Jumlah Perja Informal yang terpantau Kesehatan	300	Orang	-																					
			Jumlah peserta sosialisasi dan pemeriksaan kebugaran ASN																								
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	6	Dokumen	155,530,000		212,223,838	12 Dokumen	97,550,000	12 Dokumen	1,010,000															
			Jumlah Sampah Medis dan Obat Kadaluarsa yg di musnahkan	3000	kg																						

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5				6		7		8		9		14		11			12		13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
			Jumlah Pelaksanaan Fogging	150 Kali																							
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					100,327,600		117,156,000	3 Dokumen																	
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	24 Dokumen	1,440,192,900																						
			Jumlah pelaksanaan pembinaan jemaah haji	15 Kegiatan	-																						
			Jumlah pelaksanaan kegiatan P3K	15 kegiatan																							
			Persentase masyarakat yang terlayani oleh dokter warga dan pengaduan yang tertangani	100 %																							
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan					8,114,700	12 Dokumen	70,110,000	3 Dokumen																	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5				6		7		8		9		14		11		12		13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Pengelolaan pelayana kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa						12 Dokumen	25,600,000	3 Dokumen																	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	36 Dokumen	1,223,200,000		663,798,720	12 Dokumen	694,005,600	3 Dokumen	21,000,000																
			Jumlah peserta sosialisasi penyakit menular, dan Penyakit tidak menular	360 Orang	-																						
			Jumlah Pelaksanaan Posbindu PTM	27 Posbindu																							
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	45 Dokumen	34,590,504,120		8,419,583,216	15 Dokumen	8,631,176,692	4 Dokumen	4,196,686,800																
			Jumlah Masayarakat yg diberikan jaminan pelayanan kesehatan	22000 Orang	-																						
		Penganbilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/ Nasional					779,380		5,380,000	3 Dokumen																	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5				6		7		8		9		14		11		12		13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah peserta sosialisasi (Anak Sekolah)tentang penyalahgunaan Napza																								
			Jumlah Masyarakat yang yg dilakukan deteksi dini penyalahgunaan Napza																								
		Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan penelitian kesehatan	3	Dokumen	75,000,000		27,054,838		1 Dokumen	50,000,000																
			Jumlah tatanan dan kelembagaan kota sehat																								
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit	36	Dokumen	300,000,000																					
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	144	Dokumen	720,000,000		2,065,033,275		48 Dokumen	715,796,000	12 Dokumen															
		Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya						65,917,250		8 Dokumen	132,272,000	2 Dkumen	1,819,000														
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota	4	Puskesmas	149,998,000		34,633,150		12 Faskes	10,000,100	12 Faskes															

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5				6		7		8		9		14		11		12		13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.		
		Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)						7,900,000																		
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	PSCC	2,722,247,697		849,893,480	1 Unit	918,691,447	1 Unit psc	135,021,000															
			Persetase Masyakarat yang tertangani	100	%																					
		Pengelola pelayanan kesehatan reproduksi							60 Dokumen	40,576,000	12 Dokumen															
		Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria						1,704,000																		
		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak						32,293,250	60 Dokumen	280,415,000	12 Dokumen															

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5				6		7		8		9		14		11		12		13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan						60 Dokumen	37,000,000	12 Dokumen																	
		pengelolaan layanan imunisasi						60	95,300,000	12 Dokumen																	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			-		-		20,200,000		-																
		Pengelolaan Siatem Informasi Kesehatan						1 Dokumen	20,200,000																		
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Indeks Peningkatan Kapasitas SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	72.5	**196,000,000**		**921,366,912**		**380,252,800**		**-**																
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase pemberian rekomendasi izin praktik Tenaga Kesehatan**	**95 %**	**56,000,000**		**1,188,600**		**10,000,300**		**-**																

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5				6		7		8		9		14		11		12		13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Kesehatan	35 (Puskesmas, 4 Klinik, 2 RS, 25 Praktek mandiri) Dokumen	56,000,000		1,188,600	37 (Puskesmas, 6 Klinik, 2 RS, 25 Praktek mandiri)	10,000,300																	
				35 (Puskesmas, 4 Klinik, 2 RS, 25 Praktek mandiri) sarana																						
		Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/ kota			-		38,351,300		-		-															

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5					6		7		8		9		14		11			12		13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K		Rp.		
		Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan						38,351,300																					
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**50**	**%**	**140,000,000**		**881,827,012**		**370,252,500**		**-**																
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	270	orang	140,000,000		881,827,012	80 Orang	370,252,500																		
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Persentase pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum**	**90.0**		**126,000,000**		**347,799,550**		**415,250,250**		**-**																

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5					6		7		8		9		14		11			12			13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.			
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Persentase pemberian rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**95**	**%**	45,000,000		48,417,650		70,641,300		-																	
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**92**	**dokumen**	45,000,000		48,417,650	80 Sarana	70,641,300																			
			Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dilakukan dan pengawasan	**22**	Sarana	-																							

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
											I		II		III		IV														
1	2	3	4	5					6		7		8		9		14		11			12			13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.			
			Jumlah Petugas Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan sosialisai	22	orang	-																								
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Persentase Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga**	**85**	**%**	**36,000,000**		**144,944,700**		**132,963,500**		**-**																	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
											I		II		III		IV														
1	2	3	4	5					6		7		8		9		14		11			12			13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.				
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	92	Dokumen	36,000,000		144,944,700	70 P-IRT	132,963,500																				
			Jumlah pengawasan penerbitan Sertfikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRTP)	30	P-IRT	-																								
			Jumlah Pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRTP)																											

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
											I		II		III		IV													
1	2	3	4	5					6		7		8		9		14		11			12			13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.		K	Rp.			
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan Produk dan Sarana Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**90**	**%**	**45,000,000**		**154,437,200**		**211,645,450**		**-**																
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan					154,437,200	30 Sampel , 70 sasaran	211,645,450	30 Sampel , 70 sasaran																	
			Jumlah Sampel makanan dan minuman yang diuji	0	sampel	45,000,000																						
			Jumlah Sarana IRTP yang diawasi	0	sarana IRTP	-																						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**persentasi upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif**	**100**	**%**	1,045,000,000		364,269,500		374,362,000		9,600,000																

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025			KETERANGAN	
											I		II		III		IV														
1	2	3	4	5					6		7		8		9		14		11			12			13 = 6+12			14 =13/5X100%	
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.		
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	JumlahKegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota	15		940,000,000		256,466,450		238,400,000		9,600,000																	
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokuemen Promosi Kesehatan, Advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	36	Dokumen	940,000,000		256,466,450	12 Dokumen	238,400,000	3 Dokumen	9,600,000		-														
			Jumlah sekolah yang dilatih SBH	90	Orang	-																						
			Jumlah kelurahan yang dilakukan monev	48	Kelurahan	-																						
			Jumlah lembaga yang penerima hibah	6	lembaga	-																						
			Jumlah Masyarakat yang diberi KIE Pangan			-																						
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas			105,000,000		12,513,050		25,000,000		-																

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2024-2026 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAEARAH TAHUN BERJALAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025		KETERANGAN	
											I		II		III		IV										
1	2	3	4	5					6		7		8		9		14		11		12		13 = 6+12		14 =13/5X100%	
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan promosi kesehatan dab gerakan hidup bersih dan sehat	3	Dokumen	105,000,000		12,513,050	1 Dokumen	25,000,000																
	1.02.05.2.03	**pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten / kota**				0		95,290,000		110962000		-													
	1.02.05.2.02.01	bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)						95,290,000		110,962,000		-													

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2024 diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan melaksanakan 5 Program Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dengan indicator Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi capaian target kierja capaian kinerja terdiri dari 5 kegiatan dan 6 sub kegiatan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan dengan indicator Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program Triwulan I UKM dan UKP target 100 % capaian kinerja TW I 2025 sebesar 25% persentasenya 25%, program ini terdiri dari 12 kegiatan dan 35 sub kegiatan
3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN indikator Cakupan Peningkatan Kapasitas SDMK Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan target kinerja tahun 2025 sebesar 68 % dengan capaian TW I 10% persentase capaian 10%, program ini terdiri dari 2 Kegiatan dengan 2 sub kegiatan .
4. Program PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN dengan indikator Persentase pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum dengan target 49,3% dan capaiannya TW I 10%. Program ini terdiri dari 2 kegiatan dengan 2 sub kegiatan .
5. Program PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN indikator persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif target tahun 2025 sebesar 96% dengan capaian TW I 20 % dan persentase capaiannya Program ini terdiri dari 3 kegiatan dengan 2 sub kegiatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan adalah melaksanakan fungsi sebagai menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, promosi dan sumber daya kesehatan di Kota Padang Panjang, yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Kesehatan

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kesehatan , mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi

indikator Tujuan dan Sasaran, target evaluasi capaian kinerja sasaran “meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk semua ” dengan indikator kinerja sasaran yakni, “Usia harapan hidup ketercapaian sasaran daerah untuk tahun 2025 dengan target UHH sebesar 74,51 dengan capaian sampai TW I 74,48. Disamping itu juga dilakukan pengukuran terhadap capaian indicator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Kota Padang Panjang

		Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun			Realisasi Cpaian			Proyeksi	
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2025	2026
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	2.81	3,03	3.03	3.03				3.03	3.03
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100				100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	83,31	100	100				100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	83,91	100	100				100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	84,65	100	100				100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	75,65	100	100				100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	142.42	82,59	100	100				100	100
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	118.56	64,32	100	100				100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	94,56	100	100				100	100

		Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun			Realisasi Cpaian			Proyeksi	
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2025	2026
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100				100	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	108.7	100	100	100				100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	108.59	100	100	100				100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	116	100	100	100				100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	127.53	87,87	100	100				100	100
15	Prevalensi Stunting	%	9.49	11,05	9.39	9	10,57			9.39	9
16	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.46	0,47	0.48*	0.50	0,46			0.48	0.50
17	Presentase UHC	%	100.35	99,28	99.2	99.3				99.2	99.3
18	Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	%	88	100	100	100				100	100
19	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk	%	0.02	0,26	0,27	0,27	0,04			0,27	0,27
20	Rasio dokter persatuan penduduk	%	0.25	0,84	0,84	0,84	2,05			0,84	0,84
21	Rasio tenagapara medis per satuan penduduk	%	1.12	1,47	1,47	1,47	3,95			1,47	1,47

		Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun			Realisasi Cpaian			Proyeksi	
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2025	2026
	IKK DIAMBIL DARI RIBK 2025-2029										
22	UsiaHarapan Hidup	Tahun	74,48		74.51	74.73	74,48			74.51	74.73
23	Prevalensi Stunting	Persentase	9.49		9.39	9	10,57			9.39	9
24	Jumlah Kematian Ibu	orang	0		3	3	0			3	3
25	Jumlah Kematian Balita	orang	1		1	1	1			1	1
26	Cakupan Kepesertaan JKN	Persentase	0.99		0.99	0.99				0.99	0.99
27	Angka Kelahiran Total (Total Fetility Rate)	per 1000 kelahiran pada wanita usia 15-49 tahun	Indikator Baru								
28	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	Indikator Baru		0.36	0.45				0.36	0.45
29	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase	0.51		0.6	0.68	51,3			0.6	0.68
30	Angka Keberhasilan pengobatan TB (%)	Persentase	0.88		0.9	0.9				0.9	0.9
31	Persentase hipertensi dalam pengendalian	Persentase	Indikator Baru		0.05	0.13				0.05	0.13
32	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persentase	Indikator Baru		0.65	0.68				0.65	0.68
33	Insiden tuberkulosis	per 100.000 penduduk	4.27		288	248				288	248

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Tujuan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan 2 saaran yaitu :

Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) dari target 74.44 dengan realisasi 74.84 (100,5 %) dan Prevalensi Stunting dari target 14 dengan realisasi capaian 9,49 (132,32)

Sedangkan Indikator sasaran Dinas Keseharan ada 4 Indikator yaitu :

1. Indek Keluarga Sehat Pada tahun 2024 , realisasi dari indikator ini adalah dari target 0,47 dengan capaian 0,46 atau sebesar 97,87 %, capaian ini sama dengan tahun 2023 yakni sebesar 0,46
2. Persentase penurunan Kematian Ibu, pada tahun 2024 jumlah kematian 0 dapat mempertahankan dimana sama dengan capaian tahun 2023 dimana tidak ada kematian ibu hami dan melahirkan.
3. Kematian bayi meningkat dari tahun sebelumnya (-389)
4. Presentase UHC Pada tahun 2024, realisasi dari indikator ini dari target 98,98 dengan realisasi sebesar 100,35 (100,37 %) , capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yakni sebesar 98,91 %

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas kesehatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, promosi dan sumber daya kesehatan.

Belum terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Kesehatan secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah	Ket
1	Masih adanya Kematian Ibu saat hamil, melahirkan, dan masa nifas	1. Komplikasi kehamilan dan persalinan (perdarahan, infeksi, tekanan darah tinggi) 2. Kurangnya akses pelayanan kesehatan (jarak jauh, tenaga medis terbatas) 3. Keterlambatan penanganan medis (terlambat mengenali tanda bahaya dan rujukan) 4. Kondisi kesehatan ibu kurang baik (anemia, gizi buruk) 5. Kurangnya pemeriksaan kehamilan rutin	1. Rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang kehamilan sehat 2. Faktor ekonomi (biaya layanan kesehatan terbatas)	
2	Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) yaitu kematian bayi usia 0–1 tahun	1. Bayi lahir prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR) 2. Infeksi pada bayi (sepsis, pneumonia, diare) 3. Asfiksia (gangguan pernapasan saat lahir) 4. Kurangnya perawatan bayi baru lahir	1.Kurangnya pengetahuan orang tua tentang perawatan bayi 2. Kondisi kesehatan ibu selama kehamilan kurang baik 3. Faktor ekonomi yang rendah 4. Lingkungan yang kurang sehat dan sanitasi buruk	
3	Tingginya angka gizi buruk dan stunting pada balita	1. Asupan gizi tidak seimbang dan tidak cukup 2. Penyakit infeksi berulang (diare, ISPA)	1. Rendahnya pengetahuan orang tua tentang gizi seimbang 2. Faktor ekonomi keluarga yang rendah	

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah	Ket
		3. Pola asuh dan pemberian makan yang kurang tepat 4. Kurangnya pemantauan pertumbuhan anak 5. Akses terhadap makanan bergizi terbatas	3. Sanitasi dan lingkungan yang kurang bersih 4. Kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan belum merata 5. Kurangnya edukasi dan program gizi dari lingkungan dan pemerintah	
4	Belum semua masyarakat Kota Padang Panjang memiliki jaminan kesehatan	1. Sebagian masyarakat belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan 2.Masyarakat masih membayar biaya kesehatan secara mandiri	kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftar sebagai pesertapeserta JKN	
5	Masih belum terkendalinya penyakit menular seperti DBD, HIV/AIDS, TB Paru, dan penyakit menular lainnya	1. Tingginya angka penularan dan kasus baru penyakit menular 2. Lingkungan yang kurang bersih dan sanitasi buruk 3. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) belum optimal 4. Deteksi dini dan pengobatan belum maksimal 5. Mobilitas penduduk yang tinggi	1. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan penyakit menular 2. Keterbatasan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3. Stigma dan diskriminasi terhadap penderita penyakit tertentu (HIV/AIDS, TB) 4. Pengawasan dan pengendalian lingkungan belum optimal	
6	Masih rendahnya pelayanan penderitapenyakit tidak menular (Hipertensi,DM,	1. Cakupan skrining dan deteksi dini PTM masih rendah 2. Kepatuhan penderita terhadap pengobatan dan	1. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang PTM 2. Kurangnya edukasi dan promosi	

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah	Ket
		kontrol kesehatan kurang 3. Fasilitas dan tenaga kesehatan untuk pelayanan PTM terbatas 4. Sistem rujukan dan pemantauan penderita belum optimal 5. Pola hidup masyarakat kurang sehat (kurang aktivitas fisik, pola makan tidak seimbang)	kesehatan yang berkelanjutan 4. Faktor sosial dan ekonomi penderita 5. Dukungan kebijakan dan program pengendalian PTM belum maksimal	
8	Masih rendahnya Indeks Keluarga Sehat (IKS)	1. Banyak keluarga belum memenuhi indikator keluarga sehat 2. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam keluarga belum optimal 3. Pemanfaatan fasilitas dan pelayanan kesehatan masih rendah 4. Pengelolaan penyakit dalam keluarga belum baik 5. Lingkungan rumah dan sanitasi kurang sehat	1. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran keluarga tentang indikator keluarga sehat 2. Sosialisasi dan pendampingan dari petugas kesehatan belum merata 3. Faktor sosial dan ekonomi keluarga 4. Akses terhadap sarana air bersih dan sanitasi terbatas 5. Koordinasi lintas sektor dalam pembinaan keluarga sehat belum optimal	

Berdasarkan analisis situasi kesehatan di Kota Padang Panjang, terdapat beberapa permasalahan prioritas yang perlu penanganan terpadu:

1. **Kematian Ibu** masih terjadi akibat komplikasi kehamilan dan persalinan, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, keterlambatan penanganan medis, kondisi

kesehatan ibu kurang baik, dan rendahnya pemeriksaan kehamilan. Akar masalah utama adalah rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga serta keterbatasan ekonomi.

2. **Angka Kematian Bayi (AKB)** tinggi karena kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, infeksi, asfiksia, dan kurang optimalnya perawatan bayi baru lahir. Faktor mendasar meliputi pengetahuan orang tua yang rendah, kondisi kesehatan ibu, keterbatasan ekonomi, serta lingkungan dan sanitasi yang kurang sehat.
3. **Gizi Buruk dan Stunting Balita** masih tinggi, dipengaruhi oleh asupan gizi tidak seimbang, penyakit infeksi berulang, pola asuh kurang tepat, kurangnya pemantauan pertumbuhan, dan keterbatasan akses pangan bergizi. Akar masalah adalah pengetahuan orang tua yang rendah, ekonomi keluarga terbatas, sanitasi kurang bersih, dan pelayanan kesehatan belum merata.
4. **Cakupan Jaminan Kesehatan** belum optimal, karena sebagian masyarakat belum terdaftar dan masih membayar biaya mandiri, disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat.
5. **Penyakit Menular** (DBD, HIV/AIDS, TB Paru, dll.) belum terkendali akibat tingginya penularan, lingkungan kurang sehat, PHBS rendah, deteksi dini dan pengobatan belum maksimal, serta mobilitas penduduk tinggi. Akar masalah meliputi pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang rendah, keterbatasan pelayanan, stigma, dan pengawasan lingkungan belum optimal.
6. **Pelayanan Penyakit Tidak Menular (PTM)**, seperti hipertensi dan diabetes, masih rendah karena cakupan skrining terbatas, kepatuhan pasien rendah, fasilitas dan tenaga kesehatan terbatas, serta pola hidup masyarakat kurang sehat. Akar masalahnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat, edukasi kesehatan belum berkelanjutan, faktor sosial ekonomi, dan dukungan kebijakan belum maksimal.
7. **Indeks Keluarga Sehat (IKS)** masih rendah, ditandai dengan belum optimalnya PHBS dalam keluarga, pemanfaatan fasilitas kesehatan terbatas, pengelolaan penyakit dalam keluarga kurang baik, serta lingkungan rumah dan sanitasi belum sehat. Faktor penyebab utamanya adalah rendahnya pengetahuan dan kesadaran keluarga, sosialisasi petugas kesehatan belum merata, keterbatasan sarana air bersih dan sanitasi, serta koordinasi lintas sektor belum optimal.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Dinas Kesehatan disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Rumusan program dan kegiatan yang diusulkan pada RKPD tahun 2025 sudah menuangkan fungsi dan tugas Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai tujuan indikator sasaran, indikator program yang tertuang dalam RPJMD tahun 2025- 2029

Secara garis besar program dan kegiatan sama dengan tahun sebelumnya tetapi ada program dan kegiatan yang baru menggunakan selain APBD. Ada perubahan jumlah anggaran dibandingkan dengan rancangan awal RKPD karena dimasing-masing program & kegiatan telah menyesuaikan kebutuhan yang direncanakan.dapat dijelaskan melalui Tabel 2.4.

TABEL T.C. 2.4
REVIEW TERHADAP PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS KESEHATAN				**98,829,387,586**	**DINAS KESEHATAN**				**98,829,340,686**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**90,740,092,566**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**90,741,645,061**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**90,740,092,566**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**90,741,645,061**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi**		**72,497,463,857**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi**		**72,499,016,452**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**-**		**71,437,345,942**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**-**		**71,437,345,942**	**Usulan pendapata BLUD**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		71,437,345,942	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		71,437,345,942	**Belanja belum disesuaikan**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah Terlaksanya Administrasi umum Perangkat Daerah**		**180,399,615**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah Terlaksanya Administrasi umum Perangkat Daerah**		**180,292,410**	Progul sudah masuk pada pergeserantambah darah Vitamin D
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4,797,420	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4,797,420	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		19,603,545	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		26,388,340	Penambahan pembelian ATK 6.000.000 diambil dari Pengadaan kendaraan dinas
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12,499,650	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		13,199,650	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		143,499,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		135,907,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**		**107,015,800**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**		**30,725,600**	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		90,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		17,015,800	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		30,725,600	Pengadaan CCTV sebesar 12.500.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		**478,161,100**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		**478,161,100**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		997,900	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		997,900	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		40,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		40,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		437,163,200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		437,163,200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**		**294,541,400**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**		**372,491,400**	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		11,905,600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		11,905,600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		221,965,800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		294,115,800	Pemindahan dari Pengadaan Kendaraan Dinas 68.000.000 untuk sewa kendaraan Kadis
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		35,670,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		41,470,000	Penambahan modem/router WIFI sebesar 1.250.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		25,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		25,000,000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan**		**17,042,550,159**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Angka Kematian Ibu**	**315/100.000 Kh**	**17,042,550,159**	
								Prevalensi stunting	**9,39**		
								Angka Kematian Bayi	**10,93**		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)**		**5,292,335,320**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)**		**5,292,335,320**	
	Pembangunan Puskesmas		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun		936,000,000	Pembangunan Puskesmas		Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun		936,000,000	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		1,396,317,920	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		1,396,317,920	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		322,910,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		322,910,000	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		1,180,500,000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		1,180,500,000	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		103,982,400	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		103,982,400	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		1,352,625,000	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		1,352,625,000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**		**11,730,014,839**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**		**11,730,014,839**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		19,999,800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		19,999,800	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		20,000,100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		20,000,100	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		20,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		20,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		19,999,700	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		19,999,700	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		35,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		35,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		89,490,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		89,490,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		60,320,100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		60,320,100	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		34,998,800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		34,998,800	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		218,177,100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		218,177,100	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		14,994,600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		14,994,600	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		67,106,800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		67,106,800	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		41,103,800	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		41,103,800	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		198,480,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		198,480,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		67,898,400	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		67,898,400	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		112,800,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		112,800,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		117,156,000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		117,156,000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		17,640,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		17,640,000	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		277,428,500	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		277,428,500	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		8,631,176,692	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		8,631,176,692	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		5,380,000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		5,380,000	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		54,200,000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		54,200,000	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		132,272,000	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		132,272,000	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		10,000,100	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		10,000,100	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		918,691,447	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		918,691,447	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		267,940,900	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		267,940,900	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		277,760,000	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		277,760,000	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				**20,200,000**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**				**20,200,000**	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		20,200,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		20,200,000	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		**Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasia Kesehatan**		**380,252,800**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**		**Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasia Kesehatan**		**384,083,150**	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		**Persentase pemberian rekomendasi izin praktik Tenaga Kesehatan**		**10,000,300**	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**		**Persentase pemberian rekomendasi izin praktik Tenaga Kesehatan**		**10,000,300**	
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		10,000,300	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		10,000,300	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan**		**370,252,500**	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan**		**374,082,850**	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		370,252,500	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		374,082,850	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		**Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum**		**501,480,150**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**		**Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum**		**497,649,700**	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		**Persentase pemberian rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**		**70,641,300**	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**		**Persentase pemberian rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**		**66,810,850**	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		70,641,300	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		66,810,850	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		**Persentase Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga**		**132,963,500**	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**		**Persentase Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga**		**132,963,500**	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		132,963,500	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		132,963,500	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		**Persentase Pelakasanaan Pemeriksaan Produk dan Sarana Produk Makanan minuman Industri Rumah Tangga**		**297,875,350**	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**		**Persentase Pelakasanaan Pemeriksaan Produk dan Sarana Produk Makanan minuman Industri Rumah Tangga**		**297,875,350**	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		297,875,350	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		297,875,350	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		**persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif**		**318,345,600**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif**		**318,345,600**	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota**		**150,000,000**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota**		**150,000,000**	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		150,000,000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		150,000,000	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas**		**25,000,000**	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas**		**25,000,000**	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		25,000,000	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		25,000,000	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**143,345,600**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**143,345,600**	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		143,345,600	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		143,345,600	
	PUSKESMAS KOTO KATIK				**1,720,202,040**	**PUSKESMAS KOTO KATIK**				**1,720,202,040**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**1,720,202,040**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1,720,202,040**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**1,703,026,040**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1,703,026,040**	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**		**822,674,840**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**		**822,674,840**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		**157,554,300**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		**157,554,300**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		46,239,100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		46,239,100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		111,315,200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		111,315,200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**		**40,120,540**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**		**40,120,540**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		40,120,540	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		40,120,540	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**		**625,000,000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**		**625,000,000**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		625,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		625,000,000	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan**		**855,351,200**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan**		**855,351,200**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**		**855,351,200**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**		**855,351,200**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		37,184,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		37,184,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		51,400,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		51,400,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		67,193,100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		67,193,100	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		6,600,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		6,600,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		21,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		21,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		268,247,100	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		268,247,100	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		4,500,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		4,500,000	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		11,550,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		11,550,000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		16,900,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		16,900,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		9,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		9,000,000	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		119,265,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		119,265,000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		175,776,000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		175,776,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		12,636,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		12,636,000	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		500,000	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		500,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		4,800,000	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		4,800,000	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		48,800,000	Pengelolaan Layanan Imunisasi		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		48,800,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		**persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif**		**42,176,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif**		**42,176,000**	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota**		**25,000,000**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota**		**25,000,000**	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		25,000,000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Puskeskel	25,000,000	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**17,176,000**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**17,176,000**	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		17,176,000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		17,176,000	
	PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS				**2,536,691,730**	**PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS**				**2,536,691,730**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**2,536,691,730**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2,536,691,730**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**2,536,691,730**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2,536,691,730**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**		**1,564,121,730**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**		**1,570,321,730**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		**258,419,390**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		**257,719,390**	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48,400,190	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		48,400,190	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		210,019,200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		209,319,200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**		**40,500,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**		**47,400,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		40,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		47,400,000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**		**1,265,202,340**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**		**1,265,202,340**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1,265,202,340	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1,265,202,340	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan**		**929,091,000**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan**		**922,891,000**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**		**929,091,000**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**		**922,891,000**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		52,928,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		52,928,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		25,600,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		25,600,000	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		76,800,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		71,500,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		9,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		9,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		3,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		3,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		385,973,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		391,273,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		16,400,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		16,400,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		18,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		18,000,000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		7,710,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		8,410,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		8,800,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		8,800,000	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		105,160,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		98,260,000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		185,420,000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		185,420,000	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		9,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		9,000,000	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		600,000	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		600,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		3,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		3,000,000	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		21,700,000	Pengelolaan Layanan Imunisasi		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		21,700,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		**persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif**		**43,479,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif**		**43,479,000**	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota**		**25,000,000**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota**		**25,000,000**	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		25,000,000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		25,000,000	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**18,479,000**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**18,479,000**	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		18,479,000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		18,479,000	
	PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN				**2,064,807,550**	**PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN**				**2,064,807,550**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**2,064,807,550**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2,064,807,550**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**2,064,807,550**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2,064,807,550**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**		**1,118,469,780**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**		**276,023,980**	**Pengurangan dana BOK Puskesmas Busur sebesar 33.569.115. Saat ini diinputkan di rincian objek saldo**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		**222,935,980**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		**222,935,980**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		43,997,580	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		43,997,580	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		178,938,400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		178,938,400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**		**45,533,800**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**		**53,088,000**	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		45,533,800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	53,088,000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**		**850,000,000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**		**850,000,000**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		850,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		850,000,000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan**		**924,737,770**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan**	**100 91 % Persen**	**917,183,570**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**		**924,737,770**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**		**917,183,570**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		35,600,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		35,600,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		40,250,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		40,250,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		89,759,920	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		80,555,720	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		7,200,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		7,200,000	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		3,600,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		3,600,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		341,219,850	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		341,219,850	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		8,700,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		8,700,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		10,300,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		10,300,000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		20,020,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		20,020,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		3,800,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		3,800,000	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		117,764,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		119,414,000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		221,393,000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		221,393,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		5,200,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		5,200,000	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		631,000	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		631,000	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		10,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		10,000,000	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		9,300,000	Pengelolaan Layanan Imunisasi		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		9,300,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		**persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif**		**21,600,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif**		**21,600,000**	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota**		**19,200,000**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota**		**19,200,000**	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		19,200,000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		19,200,000	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**2,400,000**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**2,400,000**	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		2,400,000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		2,400,000	
	PUSKESMAS GUNUNG				**1,767,593,700**	**PUSKESMAS GUNUNG**				**1,765,994,305**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**1,767,593,700**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1,765,994,305**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**1,767,593,700**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1,765,994,305**	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**		**922,222,700**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**		**949,623,305**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		**240,527,700**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		**253,688,305**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		41,912,500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		50,073,105	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		198,615,200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		203,615,200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**		**31,695,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**		**45,935,000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		31,695,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		45,935,000	
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**-**		**650,000,000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**-**		**650,000,000**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		650,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		650,000,000	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		**Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan**		**785,667,000**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Program UKM dan UKP Capaian Kinerja UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan**		**761,467,000**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**		**558,491,000**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**		**534,291,000**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		26,880,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		26,880,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		20,200,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		20,200,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		105,600,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		81,400,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		4,800,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		4,800,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		6,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		6,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		327,732,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		327,732,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		2,350,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		2,350,000	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		8,200,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		8,200,000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		8,340,000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		8,340,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		2,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		2,000,000	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		93,469,000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		93,469,000	
	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		140,996,000	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		140,996,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		3,800,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		3,800,000	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		600,000	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		600,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		19,200,000	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		19,200,000	
	Pengelolaan Layanan Imunisasi		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		15,500,000	Pengelolaan Layanan Imunisasi		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		15,500,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		**persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif**		**59,704,000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**		**persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif**		**54,904,000**	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota**		**24,000,000**	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota**		**19,200,000**	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		24,000,000	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		19,200,000	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**35,704,000**	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**35,704,000**	
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		35,704,000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		35,704,000	
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				**70,174,683,897**	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**				**70,174,683,897**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**70,174,683,897**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**70,174,683,897**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**70,174,683,897**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**70,174,683,897**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**		**65,913,334,897**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**		**65,913,334,897**	

	REVIEW PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	TARGET CAPAIAN	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	LOKASI	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Pelayanan BLUD		**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**		**65,913,334,897**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**		**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**		**65,913,334,897**	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		65,913,334,897	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		65,913,334,897	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**4,261,349,000**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**4,261,349,000**	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**4,261,349,000**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**4,261,349,000**	
	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		4,261,349,000	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		4,261,349,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kesehatan dalam proses penyusunan perencanaan telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan.

Pada Musrenbang Kelurahan ada beberapa usulan yang dtujukan kepada Dinas Kesehatan selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan usulan tersebut berupa pengadaan peralatan untuk Pos yandu, yang pengadaan oleh kelurahan masing-masing.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Arah kebijakan dan strategi Kementeriaan Kesehatan didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan memperhatikan permasalahan kesehatan.

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
2. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intrevensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.

4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya dengan didukung inovasi teknologi.
5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program.

Kelima arah kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut digunakan sebagai pemandu dalam menyusun Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024.

Sasaran strategis Kementerian kesehatan adalah :

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu
3. Meningkatnya pencegahan danpengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
4. Meningkatnya akses, kemandirian
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar.
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
7. Meningatnya sinergisme pusat dandaerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaanlitbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terdapat 12 indikator yang harus dicapai Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamilsebesar 100%.
2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinansebesar 100%.
3. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanankesehatan bayi baru lahir sebesar 100%.
4. Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkanpelayanan kesehatan balita sesuai standar sebesar 100%
5. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar 100%.

6. Persentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkanskrining kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
7. Persentase warga negara usia 60 tahun keatasmendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar100%.
8. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanankesehatan sesuai standar sebesar 100%.
9. Persentase penyandang Diabetis Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar100%.
10. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) beratyang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sebesar 100%..
11. Persentase orang dengan Tuberculosa (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar sebesar 100%
12. Persentase orang beresiko terinveksi HIV mendapatkanpemeriksaan HIV sesuai standar sebesar 100% :

Tingkat keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah sangat tergantung pada perangkat daerah. Untuk itu, Perangkat Daerah harus konsisten dengan target capaian kinerja dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai untuk penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2025 dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 diselaraskan dengan arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi.

3.3 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu ***"Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan"***, dengan penjabaran misi, tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi sebagai berikut:

Tabel 3.1

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD 2025-2029

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran
Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas	Misi 1 : Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Tujuan utama dari misi ini adalah terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing, sebagaimana tercermin dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index). IPM memberikan gambaran mengenai tingkat kemajuan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak, sementara Indeks Modal Manusia menekankan pada kualitas sumber daya manusia dalam menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan manusia menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

Adapaun sasaran Pembangunan bidang kesehatan yakni meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas. Indikator kinerja sasaran ini meliputi Usia Harapan Hidup (UHH); Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup; Prevalensi stunting pada balita; Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage); Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate); Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional.

Sasaran Pembangunan ini memiliki ikhtisar pencapaian bahwa kualitas kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung produktivitas dan kesejahteraan. Peningkatan UHH menjadi indikator umum keberhasilan pembangunan kesehatan, sementara penurunan angka kematian ibu dan prevalensi stunting mencerminkan efektivitas intervensi kesehatan ibu-anak serta gizi masyarakat. Upaya pengendalian penyakit menular, seperti tuberkulosis, juga menjadi prioritas penting, mengingat penyakit ini masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah. Peningkatan cakupan penemuan kasus, keberhasilan pengobatan, serta perluasan akses jaminan kesehatan nasional menjadi bagian dari strategi untuk memastikan kesehatan masyarakat lebih terjamin. Target pembangunan diarahkan pada penurunan stunting

sesuai target nasional, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan cakupan layanan kesehatan dasar yang bermutu. Ke depan, perhatian juga diberikan pada penguatan layanan kesehatan rujukan, penyediaan tenaga kesehatan yang merata, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.

Program Unggulan Kepala daerah di bidang kesehatan Tahun 2025-2029 yaitu:

1) Program Unggulan Pemerataan Akses Kesehatan (Sumbar Universal Health Coverage),
2) Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Kesehatan terutama Pencegahan Stunting dan Penyakit Menular

Program Unggulan ini berorientasi pada upaya untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Sumatera Barat, di mana seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu dan terjangkau. Fokus utama diarahkan pada peningkatan layanan kesehatan dasar, penguatan peran puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta upaya pencegahan stunting dan pengendalian penyakit menular yang masih menjadi ancaman utama. Intervensi pada program unggulan ini antara lain yakni perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penguatan kapasitas layanan Puskesmas dan Posyandu di daerah terpencil, peningkatan kualitas SDM kesehatan dan distribusi tenaga medis secara merata, kampanye edukasi gizi dan intervensi sensitif-spesifik untuk pencegahan stunting, penanggulangan penyakit menular seperti TBC, HIV, dan DBD melalui deteksi dini dan pengobatan tuntas.

Adapun tujuan yang ingin dicapai antara lain yakni tercapainya cakupan UHC di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat, menurunnya prevalensi stunting sesuai target nasional (<14%), meningkatnya akses layanan kesehatan dasar yang merata dan berkualitas, meningkatnya harapan hidup dan produktivitas penduduk Sumatera Barat serta terkendalinya penyebaran penyakit menular melalui upaya pencegahan dan pengobatan yang efektif.

Rumusan tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk sejalan dengan komitmen nasional. Visi yang terdapat pada RIBK (Rencana Induk Bidang Kesehatan) "**Kesehatan untuk Semua**" dengan fokus pada enam aspek utama, termasuk peningkatan layanan kesehatan primer, penguatan akses layanan kesehatan rujukan, peningkatan ketahanan sistem kesehatan, tata kelola dan pembiayaan kesehatan, serta penguatan SDM dan teknologi kesehatan serta peran Rumah Sakit Daerah sebagai pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan

perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotf, preventif, kuratif, rehabilitative dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 2025-2029 yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera barat Tahun 2025-2029 serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.. Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, maka ditetapkan Tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yaitu "**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**" yang dinilai melalui indikator "**UHH dan IKS***",*

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang , Lebih lanjut pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran Dinas Kesehatan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:.

3.4 Tujuan Dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan serta nantinya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD K Tahun 2025 mengacu pada RPJMD 2025-2029.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah maupun Dinas Kesehatan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Dinas Kesehatan.

Target dari tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2025 dirumuskan dengan berdasarkan sasaran RPJMD 2025-2029, hasil evaluasi pembangunan tahun 2024, serta kebijakan pembangunan nasional tahun 2025. Berikut dijelaskan penjabaran Tujuan dan Sasaran Dians Kesehatan Tahun 2025.

Tabel. 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

No	Sasaran RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Kondisi 2024	Renstra 2025	P Renja 2025
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat untuk semua	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat untuk semua		Usia Harapan Hidup		74.48	76,17	76,17
			Tercapainya masyarakat yang sehat dan produktif sesuai siklus hidup	1 Indeks Keluarga Sehat	Angka	0.46	0.48	0.48
				2 Angka Keberhasilan pengobatan TB (%)	Persentase	78,62	80%	80%
				3 Cakupan Kepesertaan Aktif JKN	Persentase	92.69%	93%	93%
			Meningkatnya kinerja perangkat daerah	4 Nilai AKIP Dinas Kesehatan	Angka	63	64	64

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah, Dinas Kesehatan berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan yang ada dalam RPJMD yaitu tujuan 2 (dua). yaitu **"Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing",** Indikatornya *Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat untuk semua "*

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029. Dengan adanya kontribusi tersebut diharapkan dari aspek Kesehatan dapat diwujudkan bersama seluruh *stakeholder*.

Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kesehatan yang rencanakan anaggaran perubahan Tahun 2025 beserta prognosisnya yang terdapat pada perubahan Renja dapat dilihat pada

tabel di bawah ini

TABEL 3.3
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2025
Dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Dinas Kesehatan

			RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Nilai AKIP Dinas ZKesehatan		6467.03	163,272,878,270			67.03	169,642,168,444
	DKK				80,132,347,525				90,741,645,061
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				80,132,347,525				90,741,645,061
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				80,132,347,525				90,741,645,061
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi		100 %	61,889,689,116			100 %	72,499,016,452
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			60,855,176,550				71,437,345,942
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		579 orang	60,855,176,550			579 orang	71,437,345,942
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah Terlaksanya Administrasi umum Perangkat Daerah		1 Tahun	179,793,666			1 Tahun	180,292,410
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3 Paket	4,907,820			3 Paket	4,797,420

			RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026		
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN		Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	26,219,146			2	Paket	26,388,340
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	13,299,700			1	paket	13,199,650
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60 Laporan	135,367,000			60	Laporan	135,907,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**		**80 Persen**	**30,725,600**			**80**	**Persen**	**30,725,600**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0 unit	-			0	unit	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 Unit	30,725,600			6	Unit	30,725,600
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		**100 Persen**	**451,501,900**			**100**	**Persen**	**478,161,100** ######
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	997,900			12	Laporan	997,900
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	40,000,000			12	Laporan	40,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	410,504,000			12	Laporan	437,163,200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**		**95 Persen**	**372,491,400**			**95**	**Persen**	**372,491,400**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 unit	11,905,600			1	unit	11,905,600
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		9 unit	294,115,800			9	unit	294,115,800
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50 unit	41,470,000			50	unit	41,470,000

			RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 unit	25,000,000			3 unit	25,000,000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Jumlah Kematian Ibu**		**1**	**17,042,549,959**			**1**	**17,042,550,159**
		Prevalensi stunting		**17.08**				**15.17**	
		Jumlah Kematian Bayi		**5**				**4**	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)**		**80 %**	**5,292,335,320**			**80 %**	**5,292,335,320**
	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun		1 unit	936,000,000			1 unit	936,000,000
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		2 unit	1,396,317,920			2 unit	1,396,317,920
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		2 unit	322,910,000			2 unit	322,910,000
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		4 unit	1,180,500,000			4 unit	1,180,500,000
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		200 unit	103,982,400			200 unit	103,982,400
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			1,352,625,000				1,352,625,000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**		**82 %**	**11,730,014,639**			**82 %**	**11,730,014,839**

			RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		913 orang	19,999,800			913 orang	19,999,800
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		935 orang	20,000,100			935 orang	20,000,100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		823 orang	20,000,000			823 orang	20,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3743 orang	19,999,700			3743 orang	19,999,700
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		10326 orang	35,000,000			10326 orang	35,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		28308 orang	89,490,000			28308 orang	89,490,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		5889 orang	60,320,100			5889 orang	60,320,100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		8147 orang	34,998,800			8147 orang	34,998,800
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1043 orang	218,177,100			1043 orang	218,177,100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		150 orang	14,994,600			150 orang	14,994,600
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		1510 orang	67,106,800			1510 orang	67,106,800
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		12 Dokumen	41,103,800			12 Dokumen	41,103,800

			RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		12 Dokumen	198,480,000			12 Dokumen	198,480,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		3 Dokumen	67,898,400			3 Dokumen	67,898,400
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12 Dokumen	112,800,000			12 Dokumen	112,800,000
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		12 Dokumen	117,156,000			12 Dokumen	117,156,000
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12 Dokumen	17,640,000			12 Dokumen	17,640,000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		12 Dokumen	277,428,500			12 Dokumen	277,428,500
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		15 Dokumen	8,631,176,692			15 Dokumen	8,631,176,692
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		0 Paket	5,380,000			0 Paket	5,380,000
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		1 Dokumen	54,200,000			1 Dokumen	54,200,000
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		12 Dokumen	132,272,000			12 Dokumen	132,272,000
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		4 Unit	10,000,100			4 Unit	10,000,100

			RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		1 Unit	918,691,247			1 Unit	918,691,447
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		1400 Orang	267,940,900			1400 Orang	267,940,900
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		12 Dokumen	277,760,000			12 Dokumen	277,760,000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				**20,200,000**				**20,200,000**
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1 Dokumen	20,200,000			1 Dokumen	20,200,000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Indeks Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manuasia Kesehatan**		**68,75 %**	**384,083,150**			**68,75 %**	**384,083,150**
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase pemberian rekomendasi izin praktik Tenaga Kesehatan**		**92,5 %**	**10,000,300**			**92,5 %**	**10,000,300**
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		37 Dokumen	10,000,300			37 Dokumen	10,000,300
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan**		**45 %**	**374,082,850**			**45 %**	**374,082,850**
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		80 Orang	374,082,850			80 Orang	374,082,850

			RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**Indeks pembinaan dan pengawasan izin dan sertifikasi sediaan Farmasi alat kesehatan dan makan minum**		**83,3 %**	**497,679,700**			**83,3 %**	**497,649,700**
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**Persentase pemberian rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**		**90 %**	**66,840,850**			**90 %**	**66,810,850**
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		30 Dokumen	66,840,850			30 Dokumen	66,810,850
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	**Persentase Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga**		**85 %**	**132,963,500**			**85 %**	**132,963,500**
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		102 Dokumen	132,963,500			102 Dokumen	132,963,500
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	**Persentase Pelakasanaan Pemeriksaan Produk dan Sarana Produk Makanan minuman Industri Rumah Tangga**		**80 %**	**297,875,350**			**80 %**	**297,875,350**
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		30 Unit	297,875,350			30 Unit	297,875,350
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif**		**98,13 %**	**318,345,600**			**98,13 %**	**318,345,600**

			RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota**		**3 Dokumen**	**150,000,000**			**3 Dokumen**	**150,000,000**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		3 Dokumen	150,000,000			3 Dokumen	150,000,000
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kelurahan yg mengikuti Germas**		**16 Kelurahan**	**25,000,000**			**16 Kelurahan**	**25,000,000**
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		1 Dokumen	25,000,000			1 Dokumen	25,000,000
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**143,345,600**				**143,345,600**
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		12 Dokumen	143,345,600			12 Dokumen	143,345,600
	PUSKESMAS KOTO KATIK				**1,827,682,040**				**1,845,202,040**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**1,827,682,040**				**1,845,202,040**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**1,827,682,040**				**1,845,202,040**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**		**100 %**	**930,154,840**			**100 %**	**947,674,840**

			RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		**100 %**	**140,034,300**			**100 %**	**157,554,300**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	46,239,100			12 Laporan	46,239,100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	93,795,200			12 Laporan	111,315,200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**		**95 %**	**40,120,540**			**95 %**	**40,120,540**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11 Unit	40,120,540			11 Unit	40,120,540
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**		**1 BLUD**	**750,000,000**			**1 BLUD**	**750,000,000**
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Blud	750,000,000			1 Blud	750,000,000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**855,351,200**				**855,351,200**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**		**91 %**	**855,351,200**			**91 %**	**855,351,200**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		186 **Orang**	37,184,000			186 **Orang**	37,184,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1654 Orang	51,400,000			1654 Orang	51,400,000

			RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1237 Orang	67,193,100			1237 Orang	67,193,100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		44 Orang	6,600,000			44 Orang	6,600,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		343 Orang	21,000,000			343 Orang	21,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		12 Dokumen	268,247,100			12 Dokumen	268,247,100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		12 Dokumen	4,500,000			12 Dokumen	4,500,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12 Dokumen	11,550,000			12 Dokumen	11,550,000
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12 Dokumen	16,900,000			12 Dokumen	16,900,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		41 Org	9,000,000			41 Org	9,000,000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		12 Dokumen	119,265,000			12 Dokumen	119,265,000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	175,776,000			12 Dokumen	175,776,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		12 Dokumen	12,636,000			12 Dokumen	12,636,000
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		12 Dokumen	500,000			12 Dokumen	500,000

			RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		12 Dokumen	4,800,000			12 Dokumen	4,800,000
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		12 Dokumen	48,800,000			12 Dokumen	48,800,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif**			**42,176,000**				**42,176,000**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota**			**25,000,000**				**25,000,000**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		12 Dokumen	25,000,000			12 Dokumen	25,000,000
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**17,176,000**				**17,176,000**
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		12 Dokumen	17,176,000			12 Dokumen	17,176,000

	PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS				**2,813,393,436**				**2,536,691,730**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**2,813,393,436**				**2,536,691,730**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**2,813,393,436**				**2,536,691,730**

			RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan** **Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**		**100 %**	**1,847,023,436**				**1,570,321,730**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		**100 %**	**257,719,390**				**257,719,390**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	48,400,190			12 Laporan	48,400,190
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	209,319,200			12 Laporan	209,319,200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**		**95 %**	**47,400,000**				**47,400,000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		11 Unit	47,400,000			11 Unit	47,400,000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**		**1 Blud**	**1,541,904,046**			**1 Blud**	**1,265,202,340**
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 BLUD	1,541,904,046			1 BLUD	1,265,202,340
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**922,891,000**				**922,891,000**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**		**82 %**	**922,891,000**				**922,891,000**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		343 Orang	52,928,000			343 Orang	52,928,000

			RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1844 Orang	25,600,000			1844	25,600,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2151 Orang	71,500,000			2151	71,500,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		40 Orang	9,000,000			40	9,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		443 Orang	3,000,000			443	3,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		12 Dokumen	391,273,000			12 Dokumen	391,273,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		12 Dokumen	16,400,000			12 Dokumen	16,400,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12 Dokumen	18,000,000			12 Dokumen	18,000,000
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12 Dokumen	8,410,000			12 Dokumen	8,410,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		12 Dokumen	8,800,000			12	8,800,000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		12 Dokumen	98,260,000			12 Dokumen	98,260,000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	185,420,000			12 Dokumen	185,420,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		12 Dokumen	9,000,000			12 Dokumen	9,000,000

			RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		12 Dokumen	600,000			12 Dokumen	600,000
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		12 Dokumen	3,000,000			12 Dokumen	3,000,000
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		12 Dokumen	21,700,000			12 Dokumen	21,700,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif**		**98,13 %**	**43,479,000**				**43,479,000**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota**			**25,000,000**				**25,000,000**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		12 Dokumen	25,000,000			12 Dokumen	25,000,000
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**18,479,000**				**18,479,000**
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		12 Dokumen	18,479,000			12 Dokumen	18,479,000
	PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN				**2,285,906,211**				**2,289,951,411**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**2,285,906,211**				**2,289,951,411**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**2,285,906,211**				**2,289,951,411**

			RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**		**100 %**	**1,347,122,641**				**1,351,167,841**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		**100 %**	**222,935,980**				**222,935,980**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	43,997,580			12 Laporan	43,997,580
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	178,938,400			12 Laporan	178,938,400
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**		**95 %**	**49,042,800**				**53,088,000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12 Unit	49,042,800			12 Unit	53,088,000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**		**1 Unit**	**1,075,143,861**			**1**	**1,075,143,861**
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Blud	1,075,143,861			1	1,075,143,861
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**917,183,570**				**917,183,570** ######
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**		**82 %**	**917,183,570**				**917,183,570**

			RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		218 orang	35,600,000			218 orang	35,600,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1558 orang	40,250,000			1558	40,250,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1162 orang	80,555,720			1162	80,555,720
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		33 orang	7,200,000			33	7,200,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		357 orang	3,600,000			357	3,600,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		12 Dokumen	341,219,850			12 Dokumen	341,219,850
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		12 Dokumen	8,700,000			12	8,700,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12 Dokumen	10,300,000			12 Dokumen	10,300,000
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12 Dokumen	20,020,000			12 Dokumen	20,020,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		12 Dokumen	3,800,000			12 Dokumen	3,800,000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		12 Dokumen	119,414,000			12 Dokumen	119,414,000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	221,393,000			12 Dokumen	221,393,000

			RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		12 Dokumen	5,200,000			12 Dokumen	5,200,000
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		12 Dokumen	631,000			12 Dokumen	631,000
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		12 Dokumen	10,000,000			12 Dokumen	10,000,000
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		12 Dokumen	9,300,000			12 Dokumen	9,300,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif**		**98,13 %**	**21,600,000**				**21,600,000**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota			**19,200,000**				**19,200,000**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		12 Dokumen	19,200,000			12 Dokumen	19,200,000
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**2,400,000**				**2,400,000**
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		12 Dokumen	2,400,000			12 Dokumen	2,400,000
	PUSKESMAS GUNUNG				**2,053,994,305**				**2,053,994,305**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**2,053,994,305**				**2,053,994,305**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**2,053,994,305**				**2,053,994,305**

			RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**		**100 %**	**1,237,623,305**				**1,237,623,305**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		**100 %**	**251,688,305**				**251,688,305**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	50,073,105			12 Laporan	50,073,105
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	201,615,200			12 Laporan	201,615,200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**		**95 %**	**45,935,000**				**45,935,000**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12 Unit	45,935,000			12 Unit	45,935,000
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**-**			**940,000,000**				**940,000,000**
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 BLUD	940,000,000			1 BLUD	940,000,000
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**761,467,000**				**761,467,000**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**			**761,467,000**				**761,467,000**
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		166 orang	26,880,000			166	26,880,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		2090 orang	20,200,000			2090	20,200,000

			RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		1139 orang	81,400,000			1139	81,400,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		33 orang	4,800,000			33 orang	4,800,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		257 orang	6,000,000			257	6,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		12 Dokumen	327,732,000			12 Dokumen	327,732,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		12 Dokumen	2,350,000			12 Dokumen	2,350,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12 Dokumen	8,200,000			12 Dokumen	8,200,000
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		12 Dokumen	8,340,000			12 Dokumen	8,340,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		12 Dokumen	2,000,000			12 Dokumen	2,000,000
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		12 Dokumen	93,469,000			12 Dokumen	93,469,000
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	140,996,000			12 Dokumen	140,996,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		12 Dokumen	3,800,000			12 Dokumen	3,800,000
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		12 Dokumen	600,000			12 Dokumen	600,000
	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		12 Dokumen	19,200,000			12 Dokumen	19,200,000

			RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi		12 Dokumen	15,500,000			12 Dokumen	15,500,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**persentase upaya kesehatan bersumber masyarakat yang aktif**		**98,13 %**	**54,904,000**				**54,904,000**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota**		**5 Keg**	**19,200,000**				**19,200,000**
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		12 Dokumen	19,200,000			12 Dokumen	19,200,000
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**35,704,000**				**35,704,000**
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		12 Dokumen	35,704,000			12 Dokumen	35,704,000
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				**74,159,554,753**				**70,174,683,897**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**74,159,554,753**				**70,174,683,897**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				**74,159,554,753**				**70,174,683,897**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**		**100 %**	**65,947,503,253**				**65,913,334,897**
	Peningkatan Pelayanan BLUD	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**		**1 BLUD**	**65,947,503,253**			**1 BLUD**	**65,913,334,897**

			RENCANA TAHUN 2025				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	
	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 BLUD	65,947,503,252.88			1 BLUD	65,913,334,897
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				**8,212,051,500**				**4,261,349,000**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				**8,212,051,500**				**4,261,349,000**
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		1 Unit	8,212,051,500			1 Unit	

3.5 Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

1. Penetapan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2025-2029
2. Evaluasi Pelaksanaan Renstra tahun pertama, serta Renja Dinas Kesehatan sampai dengan Tahun 2024.
3. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Dinas Kesehatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   a. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
   a) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
      1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
      2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
      3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir

4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
13) pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi kejadian Luar Biasa (KLB)
14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatankerja dan olah raga
16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
17) Operasional Pelayanan Fasilitas kesehatan lainnya
18) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
19) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
20) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
21) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
22) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

3) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

a) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
   1) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

b) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4) PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

a) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, saha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

b) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

c) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

5) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

a) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/ Kota

1) Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.

b) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Tabel 3.4 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Dinas kesehatan Tahun 2025

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KESEHATAN							**82.062.385.291**	**84.205.596.539**	**89.113.323.517**							**77.789.316.585**	
	1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**82.062.385.291**	**84.205.596.539**	**89.113.323.517**							**77.789.316.585**	
	1.02.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**82.062.385.291**	**84.205.596.539**	**80.132.347.525**							**77.789.316.585**	
4	**1.02.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**71.870.355.599**	**71.870.355.600**	**61.889.689.116**							**62.188.875.995**	
	1.02.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**70.264.031.611**	**70.264.031.612**	**60.855.176.550**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**56.818.248.402**	**Dinkes**
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3474 Orang/bulan		493 Orang/bulan	493 Orang/bulan	579 Orang/bulan	70.264.031.611	70.264.031.612	60.855.176.550	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			56.818.248.402	Dinkes
	1.02.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**485.613.550**	**485.613.550**	**179.793.666**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**478.225.900**	**Dinkes**
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		5 Paket	3 Paket	3 Paket	8.000.000	8.000.000	4.907.820	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			29.074.300	Dinkes
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		5 Paket	2 Paket	2 Paket	38.614.000	38.614.000	26.219.146	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			103.151.600	Dinkes
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		4 Paket	5 Paket	1 Paket	24.999.550	24.999.550	13.299.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			46.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	60 Laporan	320.000.000	320.000.000	135.367.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			300.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**94.000.000**	**94.000.000**	**30.725.600**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**90.000.000**	**Dinkes**
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit		0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			90.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit		3 Unit	10 Unit	4 Unit	94.000.000	94.000.000	30.725.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**707.717.838**	**707.717.838**	**451.501.900**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**1.078.199.553**	**Dinkes**
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	2.000.000	997.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			600.000	Dinkes
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	58.376.238	58.376.238	40.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			60.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	647.341.600	647.341.600	410.504.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			347.089.440	Dinkes
	1.02.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**412.992.600**	**412.992.600**	**372.491.400**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**645.000.000**	**Dinkes**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	33.008.000	33.008.000	11.905.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			35.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	55 Unit		55 Unit	26 Unit	55 Unit	279.984.600	279.984.600	294.115.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			320.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	50 Unit	50.000.000	50.000.000	41.470.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			50.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**3 Unit**		3 Unit	3 Unit	3 Unit	50.000.000	50.000.000	25.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			60.000.000	Dinkes
5	**1.02.02.**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**9.882.027.642**	**11.320.737.889**	**17.042.549.959**							**15.090.440.590**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	**Jumlah Kematian Ibu**	**1 Kasus**		**0 Kasus**	**1 Kasus**	**1 Kasus**											
			Jumlah Kematian Bayi	**2 Kasus**		**8 Kasus**	**5 Kasus**	**5 Kasus**											
			Prevalensi stunting	**7.50 %**		**19 %**	**17,08 %**	**17,08 %**											
	1.02.02.2.01.	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)**	**84 %**		**77 %**	**80 %**	**80 %**	**400.000.000**	**400.000.000**	**5.292.335.320**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**450.000.000**	**Dinkes**
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	4 Unit		0 Unit	0 Unit	1 Unit	-	-	936.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	7 Unit		0 Unit	0 Unit	2 Unit	-	-	1.396.317.920	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	-			0	Dinkes
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Unit		0 Unit	0 Unit	2 Unit	-	-	322.910.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-			0	Dinkes
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	9 Unit		5 Unit	0 Unit	4 Unit	-	-	1.180.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	-			0	Dinkes
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	600 Unit		114 Unit	0 Unit	200 Unit	-	-	103.982.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-			0	Dinkes

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	24 Paket		4 Paket	3 Paket	4 Paket	400.000.000	400.000.000	1.352.625.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			450.000.000	Dinkes
	1.02.02.2.02.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**9.482.027.642**	**10.900.537.889**	**11.730.014.639**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**14.640.440.590**	**Dinkes**
			Persentase fasilitas Pelayanan kesehatan degan akreditasi paripurna	**75 %**		**60 %**	**60 %**	**60 %**											
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5478 Orang		918 Orang	985 Orang	913 Orang	19.999.800	19.999.800	19.999.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5454 Orang		893 Orang	935 Orang	909 Orang	20.000.100	20.000.100	20.000.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4938 Orang		848 Orang	935 Orang	823 Orang	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21402 Orang		3053 Orang	3743 Orang	3567 Orang	19.999.700	19.999.700	19.999.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42876 Orang		10478 Orang	10326 Orang	7146 Orang	35.000.000	35.000.000	35.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	134442 Orang		25256 Orang	28308 Orang	22407 Orang	29.979.000	29.979.000	89.490.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34134 Orang		4650 Orang	0 Orang	5689 Orang	20.000.100	38.720.100	60.320.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36882 orang		3757 orang	7411 Orang	6147 orang	34.998.800	34.998.800	34.998.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6258 Orang		775 Orang	676 Orang	1043 Orang	19.997.100	19.997.100	218.177.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	900 orang		119 orang	128 Orang	150 orang	14.994.600	14.994.600	14.994.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7000 Orang		1406 Orang	1496 Orang	0 Orang	34.998.100	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9060 Orang		1344 Orang	1533 Orang	1510 Orang	25.381.800	25.381.800	67.106.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	72 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	10.556.400	10.556.400	41.103.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	360 Dokumen		60 Dokumen	1 Dokumen	60 Dokumen	35.000.150	35.000.150	198.480.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	300 Dokumen		50 Dokumen	3 Dokumen	50 Dokumen	22.134.000	67.898.400	67.898.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	360 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	60 Dokumen	52.800.000	52.800.000	112.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen		1 dokumen	-	12 dokumen	-	117.156.000	117.156.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	252 dokumen		12 dokumen	-	12 dokumen	-	17.640.000	17.640.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	360 Dokumen		60 Dokumen	1 Dokumen	60 Dokumen	29.995.600	260.137.600	277.428.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	90 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	7.896.192.292	8.631.176.692	8.631.176.692	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 paket		1 paket	-	1 paket	-	5.380.000	5.380.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	54.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	30 Dokumen		5 Dokumen	12 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000	132.272.000	132.272.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	24 unit		4 unit	4 Unit	4 unit	10.000.100	10.000.100	10.000.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	980.000.000	918.691.447	918.691.247	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	864 Orang		1400 Orang	-	864 Orang	-	34.998.100	267.940.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			35.000.000	Dinkes
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		60 Dokumen	-	12 Dokumen	-	277.760.000	277.760.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.03.	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Persentase Puskesmas ygmenyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**100 %**		**NA**	**-**	**100 %**	**-**	**20.200.000**	**20.200.000**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**0**	**Dinkes**
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	20.200.000	20.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
6	**1.02.03.**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase peningkatan Kopetensi SDM Bidang Kesehatan**	**76 %**		**50 %**	**NA**	**68 %**	**110.000.800**	**380.252.800**	**384.083.150**	-						**32.000.000**	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.02.03.2.01.	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tenaga medis dan Tenaga Kesehatan mempunyai perizinan praktek kesehatan**	**85 %**		**80 %**	**NA**	**80 %**	**10.000.300**	**10.000.300**	**10.000.300**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**12.000.000**	**Dinkes**
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	222 Dokumen		61 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen	10.000.300	10.000.300	10.000.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			12.000.000	Dinkes
	1.02.03.2.03.	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**49 %**		**0 %**	**45 %**	**45 %**	**100.000.500**	**370.252.500**	**374.082.850**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**20.000.000**	**Dinkes**
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	480 Orang		51 Orang	80 Orang	80 Orang	100.000.500	370.252.500	374.082.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			20.000.000	Dinkes
7	**1.02.04.**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**56.0 %**		**NA**	**49.3 %**	**49.3 %**	**25.001.250**	**415.250.250**	**497.679.700**							**38.000.000**	
	1.02.04.2.01.	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**88 %**		**85 %**	**88 %**	**88 %**	**10.000.500**	**70.641.300**	**66.840.850**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**15.000.000**	**Dinkes**
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	150 dokumen		80 dokumen	30 Dokumen	30 dokumen	10.000.500	70.641.300	66.840.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			15.000.000	Dinkes
	1.02.04.2.03.	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dengan pemenuhan komitmen**	**30 %**		**28 %**	**85%**	**85 %**	**5.000.500**	**132.963.500**	**132.963.500**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**8.000.000**	**Dinkes**
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	150 dokumen		45 dokumen	30 Dokumen	102 dokumen	5.000.500	132.963.500	132.963.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			8.000.000	Dinkes
	1.02.04.2.06.	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Persenta Saran Industri Rumah Tangga Pangan dengan Penerapan CPPOB (cara produksi pangan olahan yang baik)**	**30 %**		**28 %**	**70 %**	**70 %**	**10.000.250**	**211.645.450**	**297.875.350**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**15.000.000**	**Dinkes**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	250 Unit		68 Unit	30 Unit	50 Unit	10.000.250	211.645.450	297.875.350	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			15.000.000	Dinkes
8	**1.02.05.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan**	**67,5 %**		**NA**	**57,5 %**	**57,5 %**	**175.000.000**	**219.000.000**	**318.345.600**							**440.000.000**	
	1.02.05.2.01.	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota**	**70 %**		**NA**	**70 %**	**70 %**	**150.000.000**	**150.000.000**	**150.000.000**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**415.000.000**	**Dinkes**
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	312 Dokumen		12 Dokumen	3 Dokumen	52 Dokumen	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			326.600.000	Dinkes
	1.02.05.2.02.	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Proporsi penduduk dengan aktifitas cukup**	**45 %**		**NA**	**NA**	**45 %**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**25.000.000**	**Dinkes**
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			25.000.000	Dinkes
	1.02.05.2.03.	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelurahan yang memiliki UKBM**	**16 Kelurahan**		**16 Kelurahan**	**-**	**16 Kelurahan**	**-**	**44.000.000**	**143.345.600**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**0**	**Dinkes**
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	-	44.000.000	143.345.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
		PUSKESMAS KOTO KATIK							**1.034.821.500**	**1.721.962.500**	**1.827.682.040**							**77.789.316.585**	
	1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.034.821.500**	**1.721.962.500**	**1.827.682.040**							**77.789.316.585**	
	1.02.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.034.821.500**	**1.721.962.500**	**1.827.682.040**							**77.789.316.585**	
9	**1.02.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**824.421.500**	**824.421.500**	**930.154.840**							**62.188.875.995**	
	1.02.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100 persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**154.421.500**	**157.554.300**	**140.034.300**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**1.078.199.553**	**Dinkes**
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	46.239.100	46.239.100	46.239.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			40.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	108.182.400	111.315.200	93.795.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			80.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**45.000.000**	**41.867.200**	**40.120.540**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**645.000.000**	**Dinkes**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		11 Unit	11 Unit	11 Unit	45.000.000	41.867.200	40.120.540	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			45.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.10.	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**	**1 BLUD**		**1 BLUD**	**1 BLUD**	**1 BLUD**	**625.000.000**	**625.000.000**	**750.000.000**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**3.079.202.140**	**Dinkes**
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	625.000.000	625.000.000	750.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			563.999.800	Dinkes
10	**1.02.02.**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu**	**1 Kasus**		**0 Kasus**	**1 Kasus**	**1 Kasus**	**185.400.000**	**870.541.000**	**855.351.200**							**15.090.440.590**	
			Jumlah Kematian Bayi	**4 Kasus**		**8 Kasus**	**5 Kasus**	**5 Kasus**											
			Prevalensi stunting	**15.17 %**		**19 %**	**17,08 %**	**17,08 %**											
	1.02.02.2.02.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**185.400.000**	**870.541.000**	**855.351.200**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**14.640.440.590**	**Dinkes**
			Persentase fasilitas Pelayanan kesehatan degan akreditasi paripurna	**75 %**		**60 %**	**0%**	**60 %**											
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	186 Orang		124 Orang	-	186 Orang	-	71.632.000	37.184.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1654 Orang		4607 Orang	-	1654 Orang	-	51.400.000	51.400.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1237 Orang		994 Orang	1292 Orang	1237 Orang	67.200.000	67.200.000	67.193.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			67.200.000	Dinkes
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	44 Orang		31 Orang	-	44 Orang	-	6.600.000	6.600.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	343 Orang		64 Orang	-	343 Orang	-	12.600.000	21.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000	253.314.000	268.247.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			75.000.000	Dinkes
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	4.550.000	4.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	8.250.000	11.550.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	16.000.000	16.900.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	41 Orang		41 Orang	-	41 Orang	-	11.000.000	9.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	43.200.000	113.965.000	119.265.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			43.200.000	Dinkes
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	187.294.000	175.776.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	12.636.000	12.636.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		NA Dokumen	-	12 Dokumen	-	500.000	500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		NA Dokumen	-	12 Dokumen	-	4.800.000	4.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		NA Dokumen	-	12 Dokumen	-	48.800.000	48.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
11	**1.02.05.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan**	**57,5 persen**		**NA**	**NA**	**57,5 persen**	**25.000.000**	**27.000.000**	**42.176.000**							**440.000.000**	
	1.02.05.2.01.	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota**	**70 %**		**NA**	**NA**	**70 %**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**415.000.000**	**Dinkes**
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	24 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			25.000.000	Dinkes
	1.02.05.2.03.	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelurahan yang memiliki UKBM**	**4**		**NA**	**-**	**4**	**-**	**2.000.000**	**17.176.000**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**0**	**Dinkes**
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	2.000.000	17.176.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
		PUSKESMAS KEBUN SIKOLOS							**1.795.821.730**	**2.652.198.730**	**2.813.393.436**							**77.789.316.585**	
	1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.568.621.730**	**1.568.621.730**	**1.847.023.436**							**77.789.316.585**	
	1.02.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1.568.621.730**	**1.568.621.730**	**1.847.023.436**							**77.789.316.585**	
12	**1.02.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.568.621.730**	**1.568.621.730**	**1.847.023.436**							**62.188.875.995**	
	1.02.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**258.419.390**	**258.419.390**	**257.719.390**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**1.078.199.553**	**Dinkes**
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	48.400.190	48.400.190	48.400.190	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			40.510.113	Dinkes

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	210.019.200	210.019.200	209.319.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			175.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**0**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**45.000.000**	**45.000.000**	**47.400.000**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**645.000.000**	**Dinkes**
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	11 Unit	45.000.000	45.000.000	47.400.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			45.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.10.	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**	**1 BLUD**		**1 BLUD**	**1 BLUD**	**1 BLUD**	**1.265.202.340**	**1.265.202.340**	**1.541.904.046**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**3.079.202.140**	**Dinkes**
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.265.202.340	1.265.202.340	1.541.904.046	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.015.202.340	Dinkes
13	**1.02.02.**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu**	**1 Kasus**		**0 Kasus**	**1 Kasus**	**1 Kasus**	**202.200.000**	**929.136.000**	**922.891.000**							**15.090.440.590**	
			Jumlah Kematian Bayi	**4 Kasus**		**8 Kasus**	**5 Kasus**	**5 Kasus**											
			Prevalensi stunting	**15.17 %**		**19 %**	**17,08 %**	**17,08 %**											
	1.02.02.2.02.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**	**100 persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**202.200.000**	**929.136.000**	**922.891.000**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**14.640.440.590**	**Dinkes**
			Persentase fasilitas Pelayanan kesehatan degan akreditasi paripurna	**75 %**		**60 %**	**0%**	**60 %**											
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	343 Orang		300 Orang	-	343 Orang	-	52.928.000	52.928.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1844 Orang		2486 Orang	-	1844 Orang	-	25.600.000	25.600.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2151 Orang		1966 Orang	1342 Orang	2151 Orang	76.800.000	76.800.000	71.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			76.800.000	Dinkes
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40 Orang		40 Orang	-	40 Orang	-	9.000.000	9.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	443 Orang		124 Orang	-	443 Orang	-	3.000.000	3.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000	386.018.000	391.273.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			75.000.000	Dinkes
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	16.400.000	16.400.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	18.000.000	18.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	7.710.000	8.410.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	12 Orang		NA Orang	-	12 Orang	-	8.800.000	8.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50.400.000	105.160.000	98.260.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			50.400.000	Dinkes
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	185.420.000	185.420.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	9.000.000	9.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	600.000	600.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	3.000.000	3.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	21.700.000	21.700.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
14	**1.02.05.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan**	**57,5**		**NA**	**NA**	**57,5**	**25.000.000**	**154.441.000**	**43.479.000**							**440.000.000**	
	1.02.05.2.01.	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota**	**70 %**		**NA**	**NA**	**70 %**	**25.000.000**	**154.441.000**	**25.000.000**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**415.000.000**	**Dinkes**
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	24 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000	25.000.000	25.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			25.000.000	Dinkes
	1.02.05.2.03.	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelurahan yang memiliki UKBM**	**4 Kelurahan**		**4 Kelurahan**	**-**	**4 Kelurahan**	**-**	**110.962.000**	**18.479.000**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**0**	**Dinkes**
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	18.479.000	18.479.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
		PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN							**1.960.083.800**	**2.074.952.200**	**2.285.906.211**							**77.789.316.585**	
	1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**865.283.800**	**275.374.200**	**271.978.780**							**77.789.316.585**	
	1.02.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**865.283.800**	**275.374.200**	**271.978.780**							**77.789.316.585**	
15	**1.02.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**865.283.800**	**275.374.200**	**271.978.780**							**62.188.875.995**	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.02.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100 persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**258.076.200**	**224.574.200**	**222.935.980**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**1.078.199.553**	**Dinkes**
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	45.598.200	45.598.200	43.997.580	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			40.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	212.478.000	178.976.000	178.938.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			175.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**607.207.600**	**50.800.000**	**49.042.800**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**645.000.000**	**Dinkes**
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		12 Unit	12 Unit	12 Unit	-	50.800.000	49.042.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			45.000.000	Dinkes
	1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**850.000.000**	**850.000.000**	**2.013.927.431**							**77.789.316.585**	
	1.02.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**850.000.000**	**850.000.000**	**2.013.927.431**							**77.789.316.585**	
17	**1.02.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**850.000.000**	**850.000.000**	**1.075.143.861**							**62.188.875.995**	
	1.02.01.2.10.	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**	**1 BLUD**		**1 BLUD**	**1 BLUD**	**1 BLUD**	**850.000.000**	**850.000.000**	**1.075.143.861**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**3.079.202.140**	**Dinkes**
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	850.000.000	850.000.000	1.075.143.861	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			850.000.000	Dinkes
18	**1.02.02.**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu**	**1 Kasus**		**0 Kasus**	**1 Kasus**	**1 Kasus**	**225.600.000**	**919.599.000**	**917.183.570**							**15.090.440.590**	
			Jumlah Kematian Bayi	**4 Kasus**		**8 Kasus**	**5 Kasus**	**5 Kasus**											
			Prevalensi stunting	**15.17 %**		**19 %**	**17,08 %**	**17,08 %**											
	1.02.02.2.02.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**225.600.000**	**919.599.000**	**917.183.570**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**14.640.440.590**	**Dinkes**
			Persentase fasilitas Pelayanan kesehatan degan akreditasi paripurna	**75 %**		**60 %**	**0%**	**60 %**											
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	218 Orang		188 Orang	-	218 Orang	-	37.400.000	35.600.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1558 Orang		3948 Orang	-	1558 Orang	-	34.250.000	40.250.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1162 Orang		863 Orang	1162 Orang	1162 Orang	93.000.000	93.000.000	80.555.720	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			93.000.000	Dinkes
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	33 Orang		33 Orang	-	33 Orang	-	7.200.000	7.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	357 Orang		357 Orang	-	357 Orang	-	3.600.000	3.600.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000	342.174.000	341.219.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			75.000.000	Dinkes
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	8.700.000	8.700.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	10.300.000	10.300.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	20.420.000	20.020.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4 Orang		NA Orang	-	4 Orang	-	3.800.000	3.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	57.600.000	121.274.000	119.414.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			57.600.000	Dinkes
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	202.086.000	221.393.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	15.140.000	5.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	955.000	631.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	10.000.000	10.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	9.300.000	9.300.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
19	**1.02.05.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan**	**57,5 %**		**NA**	**NA**	**57,5 %**	**19.200.000**	**29.979.000**	**21.600.000**							**440.000.000**	
	1.02.05.2.01.	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota**	**70 %**		**NA**	**NA**	**70 %**	**19.200.000**	**19.200.000**	**19.200.000**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**415.000.000**	**Dinkes**
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	24 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	19.200.000	19.200.000	19.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			19.200.000	Dinkes
	1.02.05.2.03.	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelurahan yang memiliki UKBM**	**4 Kelurahan**		**4 Kelurahan**	**-**	**4 Kelurahan**	**-**	**10.779.000**	**2.400.000**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**0**	**Dinkes**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	10.779.000	2.400.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
		PUSKESMAS GUNUNG							**1.087.881.100**	**1.436.509.700**	**2.053.994.305**							**77.789.316.585**	
	1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**1.087.881.100**	**1.436.509.700**	**2.053.994.305**							**77.789.316.585**	
	1.02.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**919.881.100**	**923.670.700**	**2.053.994.305**							**77.789.316.585**	
20	**1.02.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**919.881.100**	**923.670.700**	**1.237.623.305**							**62.188.875.995**	
	1.02.1.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100 persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**216.466.100**	**240.527.700**	**251.688.305**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**1.078.199.553**	**Dinkes**
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	41.912.500	41.912.500	50.073.105	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			40.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	174.553.600	198.615.200	201.615.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			80.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**53.415.000**	**33.143.000**	**45.935.000**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**645.000.000**	**Dinkes**
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		12 Unit	15 Unit	12 Unit	53.415.000	33.143.000	45.935.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			45.000.000	Dinkes
	1.02.01.2.10.	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**	**1 BLUD**		**1 BLUD**	**1 BLUD**	**1 BLUD**	**650.000.000**	**650.000.000**	**940.000.000**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**3.079.202.140**	**Dinkes**
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	650.000.000	650.000.000	940.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			650.000.000	Dinkes
21	**1.02.02.**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu**	**1 Kasus**		**0 Kasus**	**1 Kasus**	**1 Kasus**	**148.800.000**	**457.935.000**	**761.467.000**							**15.090.440.590**	
			Jumlah Kematian Bayi	**4 Kasus**		**8 Kasus**	**5 Kasus**	**5 Kasus**											
			Prevalensi stunting	**15.17 %**		**19 %**	**17,08 %**	**17,08 %**											
	1.02.02.2.02.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**	**100 persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**148.800.000**	**457.935.000**	**761.467.000**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**14.640.440.590**	**Dinkes**
			Persentase fasilitas Pelayanan kesehatan degan akreditasi paripurna	**75 %**		**60 %**	**0%**	**60 %**											
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	**166 Orang**		153 Orang	-	166 Orang	-	26.880.000	26.880.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	**2090 Orang**		1934 Orang	-	2090 Orang	-	20.200.000	20.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	**1139 Orang**		872 Orang	1171 Orang	1139 Orang	105.600.000	105.600.000	81.400.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			105.600.000	Dinkes

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	**33 Orang**		24 Orang	-	33 Orang	-	4.800.000	4.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	**257 Orang**		82 Orang	-	257 Orang	-	6.000.000	6.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	**24 Dokumen**		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	354.132.000,00	327.732.000								
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	**12 Dokumen**		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	2.350.000	2.350.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	**12 Dokumen**		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	8.200.000	8.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	**12 Dokumen**		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	8.340.000	8.340.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	**8 Orang**		8 Orang	-	8 Orang	-	2.000.000	2.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	**12 Dokumen**		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	43.200.000	93.469.000	93.469.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			43.200.000	Dinkes
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	**12 Dokumen**		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	140.996.000	140.996.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	**12 Dokumen**		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	3.800.000	3.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	**12 Dokumen**		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	600.000	600.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	**12 Dokumen**		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	19.200.000	19.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	**12 Dokumen**		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	15.500.000	15.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
22	**1.02.05.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan**	**57,5 %**		**NA**	**NA**	**57,5 %**	**19.200.000**	**54.904.000**	**54.904.000**							**440.000.000**	
	1.02.05.2.01.	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kota**	**70 %**		**NA**	**NA**	**70 %**	**19.200.000**	**19.200.000**	**19.200.000**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**415.000.000**	**Dinkes**
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	24 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	19.200.000	19.200.000	19.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			19.200.000	Dinkes

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.02.05.2.03.	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelurahan yang memiliki UKBM**	**4 Kelurahan**		**NA**	**-**	**4 Kelurahan**	**-**	**35.704.000**	**35.704.000**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**-**		**0**	**Dinkes**
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	35.704.000	35.704.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes
	....	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**							**65.913.334.897**	**70.174.683.897**	**74.159.554.752**							**65.913.334.897**	
	1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**65.913.334.897**	**70.174.683.897**	**74.159.554.752**							**65.913.334.897**	
	1.02.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**65.913.334.897**	**70.174.683.897**	**74.159.554.752**							**65.913.334.897**	
23	**1.02.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kesehatan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**65.913.334.897**	**65.913.334.897**	**65.947.503.252**							**65.913.334.897**	
	1.02.01.2.10.	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan**	**1 BLUD**		**1 BLUD**	**1 BLUD**	**1 BLUD**	**65.913.334.897**	**65.913.334.897**	**65.947.503.252**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**null**		**65.913.334.897**	**Dinkes**
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	2 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	65.913.334.897	65.913.334.897	65.947.503.252	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			65.913.334.897	Dinkes
24	**1.02.02.**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Kematian Ibu**	**1 Kasus**		**0 Kasus**	**1 Kasus**	**1 Kasus**	**-**	**4.261.349.000**	**8.212.051.500**							**0**	
			Jumlah Kematian Bayi	**4 Kasus**		**8 Kasus**	**5 Kasus**	**5 Kasus**											
			Prevalensi stunting	**15.17 %**		**19 %**	**17,08 %**	**17,08 %**											
	1.02.02.2.01.	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA)**	**100 persen**		**100 persen**	**-**	**100 persen**	**-**	**4.261.349.000**	**8.212.051.500**			-	**Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**		**0**	**Dinkes**
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				-	1 Unit	-	4.261.349.000	8.212.051.500	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Ganting	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	-	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat			0	Dinkes

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan masalah kesehatan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(stakeholders)* dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran perubahan 2025. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2025 yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan selama tahun 2025. Terlaksananya Renja Perubahan Dinas Kesehatan sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait pada Dinas Kesehatan .

Padang Panjang, 30 Juni 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Padang Panjang

dr.FAIZAH .
NIP.196710142002122001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

			Hal
DAFTAR ISI			i
DAFTAR TABEL			ii
BAB I	**PENDAHULUAN**		
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan	1
	1.3	Maksud dan Tujuan	3
	1.4	Sistematika Penulisan	3
BAB II	**HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		
	2.1	Hasil Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 sd Triwulan I	5
	2.2	Analisis capaian Standar Pelayanan Minimal	13
	2.3	Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD	15
	2.4	Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat	22
	2.5	Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		
	3.1	Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi	28
	3.2	Telahaan Terhadap RPJMN	29
	3.3	Tujuan Sasaran Renja Perangkat Daerah	30
	3.4	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	31
BAB IV	**PENUTUP**		44

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Hal
Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 sd Triwulan I	6
Tabel 2.2	Capaian pelaksanaan SPM urusan pekerjaan umum Kota Padang Panjang s/d Triwulan I 2025	14
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Dengan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025	16
Tabel 2.4	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Padang Panjang	22
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31
Tabel 3.2	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2025	32
Tabel 3.3	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2025 (SIPD-RI)	38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan dokumen Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama satu tahun. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan RKPD Kota Padang Panjang. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangann Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap OPD dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan dengan merujuk pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian rencana kerja dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta kebijakan nasional maupun provinsi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
10. Perda No. 4 tahun 2024 tentang RPJPD Kota padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4;

11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 19);
13. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 105 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 105).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 adalah sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana Perubahan Kegiatan dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025.
2. Menjaga integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program kegiatan agar selaran dengan program tahunan daerah
3. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan orgranisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta perubahan teknis lainnya seperti penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran sub kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU
2.1 Hasil Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 sd Triwulan I
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD
2.4 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat
2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BAB III RENCANA KERJA PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi
3.2 Tujuan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan
BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.1 Hasil Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 sd Triwulan I

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kota Padang Panjang merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang. Rencana Kerja juga merupakan alat ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiata yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan OPD melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan I, sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 sd Triwulan I

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)		Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
									I		II		III		IV								
			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)=(5) + (11)		(13)=(12)/(4)		(14)
(1)	(2)	(3)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**81.926.147.175**		**21.368.287.487,47**		**23.519.841.379,00**		**2.041.928.615**								**2.041.928.615**		**2.041.928.615**			
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																						
1 03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**81.926.147.175**		**21.368.287.487**		**23.469.841.379,00**		**2.041.928.615**						-		**2.041.928.615**		**2.041.928.615**		2,49%	
1 03 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**%tase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**100 %**	**18.954.939.375**	100 %	**7.523.111.575,00**	**100 %**	**7.163.538.129,00**		**1.777.911.115**						-	24,82 %	**1.777.911.115**	24,82 %	**1.777.911.115**	24,82%	9,38%	**Sekretariat**
1 03 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%tase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**16.050.000.000**	100 %	**6.446.985.362,00**	**100 %**	**5.928.038.129,00**	**22,34 %**	**1.596.911.855**						-	26,94 %	**1.596.911.855**	26,94 %	**1.596.911.855**	26,94%	9,95%	**sda**
1 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1974 orang/ bln	16.050.000.000	658 Orang/ bulan	6.446.985.362,00	658 Orang/ bulan	5.928.038.129,00	147 Orang/ bulan	1.596.911.855							147 Orang/ bulan	1.596.911.855	147,00 Orang/ bulan	1.596.911.855	7,45%	9,95%	
1 03 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%tase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 %**	**93.076.900**	100 %	**20.650.000,00**	**100 %**	-		-							0,00 %	-	0,00 %	-	0,00%	0,00%	**sda**
1 03 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	141 paket	93.076.900	59 Paket	20.650.000,00	0 Paket	-									0 Paket	0	0,00 Paket	-	0,00%	0,00%	
1 03 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%tase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**520.248.100**	100 %	**237.071.034,00**	**100 %**	**327.000.000,00**		**49.819.972**							15,24 %	**49.819.972**	15,24 %	**49.819.972**	15,24%	9,58%	**sda**
1 03 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	19.500.000	4 Paket	3.252.100,00	4 Paket	6.500.000,00	1 Paket	0							1 Paket	0	1,00 Paket	-	8,33%	0,00%	
1 03 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	140.000.000	4 Paket	34.545.400,00	4 Paket	50.000.000,00	1 Paket	170.000							1 Paket	170.000	1,00 Paket	170.000	8,33%	0,12%	
1 03 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 paket	61.512.500	12 Paket	9.813.900,00	12 Paket	20.500.000,00	0 Paket	180.000							0 Paket	180.000	0,00 Paket	180.000	0,00%	0,29%	
1 03 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 laporan	520.248.100	24 Laporan	237.071.034,00	24 Laporan	250.000.000,00	0 Laporan	49.469.972							0 Laporan	49.469.972	0,00 Laporan	49.469.972	0,00%	9,51%	

Tujuan 1	**Meningkatkan Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas**	**IKLI KePUan**	**91,00 %**		0,9671 0		**90,53 %**										96,71%		0,97	0,00%		1,06%	#DIV/0!	
Sasaran 1	**Meningkatnya infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas**	**Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik**	**76,11 %**		0,78956 0		**72,88 %**										78,96%		0,79	0,00%		1,04%	#DIV/0!	
1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**%tase panjang sungai yang dikonservasi**	**23,61 %**	**1.350.000.000**	0,2243 %	**3.679.252.978,65**	**22,82 %**	**3.474.435.000,00**		**43.859.000,00**							22,43% %	**43.859.000**	0,22 %	**43.859.000**	0,95%	3,25%	**Bidang Bina Marga**
		%tase jaringan irigasi dengan kondisi baik	**75,52 %**		0,8131 %		**72,96 %**										81,31% %		0,81 %		1,08%	#DIV/0!	
1 03 02 2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi**	**0,45 km**	**550.000.000**	0,72 km	**242.919.100,00**	**0,2 km**	**1.014.435.000,00**		**-**							0 km	**-**	0,00 km	**-**	0,00%	0,00%	**sda**
1 03 02 2.01 0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,45 km	530.000.000	0,72 KM	242.919.100,00	1,2 KM	1.014.435.000,00	0,00	0							0 KM	0	0,00 KM	-	0,00%	0,00%	
1 03 02 2.01 128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dokume n	20.000.000	0 0	-	0	-									0 0	0	0,00 0,00%	-	0,00%	0,00%	
1 03 02 2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah panjang Irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara**	**7,5 km**	**750.000.000**	1,2922 km	**3.355.666.128,65**	**2,5 km**	**2.460.000.000,00**		**43.859.000,00**							0 km	**43.859.000,00**	0,00 km	**43.859.000,00**	0,00%	5,85%	**sda**
1 03 02 2.02 0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,5 km	150.000.000	0,6122 KM	1.634.791.272,65	0,6 KM	565.000.000,00	0	0							0 KM	0	0,00 KM	-	0,00%	0,00%	
1 03 02 2.02 0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6 km	600.000.000	0,68 KM	1.720.874.856,00	0,8 KM	1.895.000.000,00	0	43.859.000							0 KM	43.859.000	0,00 KM	43.859.000	0,00%	7,31%	
1 03 02 2.02 0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokume n	50.000.000	1 Dokumen	80.667.750,00	0 Dokumen	-	0	0							0 Dokumen	0	0,00 Dokumen	-	0,00%	0,00%	
1 03 03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**%tase Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak**	**87,72 %**	**650.000.000**	1 %	**156.821.000,00**	**87,15 %**	**150.000.000,00**		**-**							- %	**-**	0,00 %	**-**	0,00%	0,00%	**Bidang CK**
1 03 03 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sambungan Rumah Tangga dari Unit Spam yang dibangun**	**300 SR**	**650.000.000**	68 SR	**156.821.000,00**	**100 SR**	**150.000.000,00**		**-**							0 SR	**-**	0,00 SR	**-**	0,00%	0,00%	**sda**
1 03 03 2.01 0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 dokume n	200.000.000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0	0							0 Dokumen	0	0,00 Dokumen	-	0,00%	0,00%	
1 03 03 2.01 0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	300 SR	450.000.000	68 SR	156.821.000,00	100 SR	150.000.000,00	0	0							0 SR	0	0,00 SR	-	0,00%	0,00%	

1 03 05		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**%tase Rumah Tinggal dengan Bersanitasi Layak**	**91,3 %**	**1.497.355.500**	0,99097 %	**418.292.450,00**	**90,70**	**%**	**596.407.200,00**		**20.218.500,00**							3,39 %	**20.218.500,00**	3,39	%	**20.218.500,00**	3,71%	1,35%	**sda**
1 03 05 2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sambungan rumah Dilayani dengan sistem pengelolaan air limbah domestik**	**60 rumah tangga**	**1.497.355.500**	20 rumah tangga	**418.292.450,00**	**20**	**rumah tangga**	**596.407.200,00**		**20.218.500,00**							0 rumah tangga	**20.218.500,00**	0,00	rumah tangga	**20.218.500,00**	0,00%	1,35%	**sda**
1 03 05 2.01 0021		Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang Ditingkatkan	15 m3/hari	300.000.000	0 m3/hari	-	**0**	M³/Hari	5.000.000,00	-								0 M³/Hari	0	0,00	M³/Hari	-	0,00%	0,00%	
1 03 05 2.01 0022		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	7,5 m3/hari	548.133.900	5 m3/hari	223.231.400,00	2,5	M³/Hari	275.000.000,00	0	0							0 M³/Hari	0	0,00	M³/Hari	-	0,00%	0,00%	
1 03 05 2.01 0036		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	2,5 M³/Hari	100.000.000	2,5 M³/Hari	97.122.000,00	0	M³/Hari	-	0	0							0 M³/Hari	0	0,00	M³/Hari	-	0,00%	0,00%	
1 03 05 2.01 0038		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 unit	499.221.600	1 unit	97.939.050,00	1	Unit	316.407.200,00	0	20.218.500							0 Unit	20.218.500	0,00	Unit	20.218.500	0,00%	4,05%	
1 03 05 2.01 0041		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 m3/hari	50.000.000	0 Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0							0 Dokumen	0	0,00	Dokumen	-	0,00%	0,00%	
1 03 06		**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**%tase Drainase Dalam Kondisi Baik**	**90,26 %**	**9.670.424.650**	0,93195 %	**3.078.503.638,00**	**87,92**	**%**	**2.483.461.050,00**		**105.082.000,00**							4,23 %	**105.082.000,00**	4,23	%	**105.082.000,00**	4,69%	1,09%	**sda**
1 03 06 2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Panjang drainase perkotaan yang ditingkatkan dan dipelihara**	**4000 meter**	**9.670.424.650**	2100 Sistem Drainase	**3.078.503.638,00**	**2**	**Sistem Drainase**	**2.483.461.050,00**		**105.082.000,00**							0 Sistem Drainase	**105.082.000,00**	0,00	Sistem Drainase	**105.082.000,00**	0,00%	1,09%	**sda**
1 03 06 2.01 0023		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	0							0 Dokumen	0	0,00	Dokumen	-	0,00%	0,00%	
1 03 06 2.01 0024		Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	3 Sistem Drainase	8.240.776.650	1 Sistem Drainase	1.424.649.275,00	6	Sistem Drainase	1.910.000.000,00	0	0							0 Sistem Drainase	0	0,00	Sistem Drainase	-	0,00%	0,00%	
1 03 06 2.01 0031		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	3 Sistem Drainase	1.329.648.000	1 Sistem Drainase	1.653.854.363,00	1	Sistem Drainase	573.461.050,00	0	105.082.000							0 Sistem Drainase	105.082.000	0,00	Sistem Drainase	105.082.000	0,00%	7,90%	
1 03 08		**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**%tase Bangunan Ber IMB**	**46,67 %**	**27.300.000.000**	0,46798 %	**447.303.000,00**	**46,39**	**%**	**1.050.000.000,00**		**-**							46,80% %	**-**	0,47	%	**-**	1,00%	0,00%	**sda**
1 03 08 2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Pemberian PBG sesuai dengan standar yang berlaku**	**150 unit**	**27.300.000.000**	39 unit	**447.303.000,00**	**50**	**unit**	**1.050.000.000,00**		**-**							0 unit	**-**	0,00	unit	**-**	0,00%	0,00%	
1 03 08 2.01 0018		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	6 bangunan gedung	140.000.000	2 bangunan gedung	436.605.000,00	2	Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	0	0							0 Bangunan Gedung	0	0,00	Bangunan Gedung	-	0,00%	0,00%	
1 03 08 2.01 21		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	27.020.000.000	0 dokumen	-				0	0							0 0	0	0,00	0,00%	-	0,00%	0,00%	

1 03 08 2.01 0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	150 dokumen	140.000.000	39 Dokumen	10.698.000,00	50	Dokumen	50.000.000,00	0	0							0	Dokumen	0	0,00	Dokumen	-	0,00%	0,00%	
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**%tase infrastruktur trotoar dalam kondisi baik**	**98 %**	**21.221.025.000**	1 %	**5.571.916.026**	**90,33**	**%**	**7.910.000.000,00**		**94.858.000,00**							1,20	%	**94.858.000**	1,20	%	**94.858.000**	1,22%	0,45%	**Bidang Bina Marga**
		%tase jalan dan jembatan dalam kondisi baik	**0,95 %**	**-**	0,88817 %	**-**	**95,87**	**%**	**-**		**-**							0,00%	%	**-**	0,00	%	**-**	0,00%	#DIV/0!	
1 03 10 2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Panjang Jalan dan Trotoar yang Dibangun dan Dipelihara**	**7,3 km**	**21.221.025.000**	1761 km	**5.571.916.026**	**2,1**	**km**	**7.910.000.000,00**		**94.858.000,00**							-	km	**94.858.000**	0,00	km	**94.858.000**	0,00%	0,45%	**sda**
1 03 10 2.01 0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	82.369.250,00	0	Dokumen	-	0	0							0	Dokumen	0	0,00	Dokumen	-	0,00%	0,00%	
1 03 10 2.01 32	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	2,3 km	2,3 km	18.500.000.000	0 km	-	1	km	5.000.000.000,00								0	km	0	0,00	km	-	#VALUE!	0,00%	
1 03 10 2.01 0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0,3 km	1.313.650.000	1755 KM	4.525.518.491,81	2	KM	1.000.000.000,00	0	0							0	KM	0	0,00	KM	-	0,00%	0,00%	
1 03 10 2.01 0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	6 km	1.357.375.000	6 KM	964.028.284,00	2	KM	1.910.000.000,00	0	94.858.000							0	KM	94.858.000	0,00	KM	94.858.000	0,00%	6,99%	
1 03 11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**%tase Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikat**	**71 %**	**202.000.000**	0,61 %	**46.338.500**	**66**	**%**	**242.000.000,00**		**-**							0,00%	%	**-**	0,00	%	**-**	0,00%	0,00%	**Bidang PRC Bina Jasa Konstruksi**
1 03 11 2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah tenaga kerja konstruksi dan Lembaga Konstruksi yang Mengikuti Pelatihan**	**96 orang**	**111.000.000**	0 orang	**8.670.000**	**33**	**orang**	**200.000.000,00**		**-**							0	orang	**-**	0,00	orang	**-**	0,00%	0,00%	
1 03 11 2.01 0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	30 Orang	61.000.000	0 Orang	8.670.000,00	30	Orang	150.000.000,00	0	0							0	Orang	0	0,00	Orang	-	0,00%	0,00%	
1 03 11 2.01 11	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah lembaga Jasa Konstruksi yang Dibinaan dan Ditingkatan Kapasitasnya	6 lembaga	50.000.000	0 Lembaga	-	3	Lembaga	50.000.000,00									0	Lembaga	0	0,00	Lembaga	-	0,00%	0,00%	
1 03 11 02.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi**	**85** dokumen	**64.000.000**	0 dokumen	**28.878.100**	**45**	**dokumen**	**30.000.000,00**		**-**							0	dokumen	**-**	0,00	dokumen	**-**	0,00%	0,00%	**sda**
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	2 perangkat pendukung	10.000.000	2 perangkat pendukung	28.878.100,00	1	perangkat pendukung	5.000.000,00									0	perangkat pendukung	0	0,00	perangkat pendukung	-	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	85 dokumen	54.000.000	0 dokumen	-	40	dokumen	25.000.000,00									0	dokumen	0	0,00	dokumen	-	0,00%	0,00%	

1 03 11 2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Jumlah Dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi**	**90 dokumen**	**27.000.000**	16 Paket Pekerjaan	**8.790.400**	**8 Paket Pekerjaan**	**12.000.000,00**		-							0 Paket Pekerjaan	-	0,00 Paket Pekerjaan	-	0,00%	0,00%	**sda**
1 03 11 2.04 0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	90 Paket Pekerjaan	27.000.000	16 Paket Pekerjaan	8.790.400,00	30 Paket Pekerjaan	12.000.000,00	0	0							0 Paket Pekerjaan	0	0,00 Paket Pekerjaan	-	0,00%	0,00%	
Tujuan 2	Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	84 %		0,83 %		83 %										0,00% %		0,00 %		0,00%	#DIV/0!	
Sasaran 2	**Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang**	**Indeks penilaian pemanfaatan ruang**	**3**		3 0		3										0		0,00 0,00%		0,00%	#DIV/0!	
1 03 12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Rasio ketaatan terhadap RTRW per tahun**	**0,25 %**	**980.402.650**	0,00248 %	**446.748.320**	**0,23 %**	**400.000.000,00**		-							0,00% %	-	0,00 %	-	0,00%	0,00%	**Bidang Tata Ruang**
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen dalam rangka per Substansi RTRW dan RRTR ke KemenATR**	**5 dokumen**	**325.402.650**	1 dokumen	-	**2 dokumen**	-		-							0 dokumen	-	0,00 dokumen	-	0,00%	0,00%	**sda**
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	3 dokumen	220.000.000	0 0	-											0 0	0	0,00 0,00%	-	0,00%	0,00%	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	2 dokumen	105.402.650	0 0	-											0 0	0	0,00 0,00%	-	0,00%	0,00%	
1 03 12 2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen RRTR yang disusun**	**1 dokumen**	**250.000.000**	1 dokumen	**360.158.995**	**1 dokumen**	**200.000.000,00**		-							0 dokumen	-	0,00 dokumen	-	0,00%	0,00%	**sda**
1 03 12 2.02 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		50.000.000	1 Dokumen	360.158.995,01	0 Dokumen	-	0	0							0 Dokumen	0	0,00 Dokumen	-	#DIV/0!	0,00%	
1 03 12 2.02 3	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	1 dokumen	200.000.000	0 dokumen	-	1 dokumen	200.000.000,00									0 dokumen	0	0,00 dokumen	-	0,00%	0,00%	
1 03 12 2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang**	**4 dokumen**	**155.000.000**	2 dokumen	**79.242.450**	**1 dokumen**	**100.000.000,00**		-							0 dokumen	-	0,00 dokumen	-	0,00%	0,00%	**sda**
1 03 12 2.03 0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	16.425.350,00	0 Dokumen	-	0	0							0 Dokumen	0	0,00 Dokumen	-	0,00%	0,00%	
1 03 12 2.03 0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	3 dokumen	150.000.000	1 sistem informasi	62.817.100,00	1 sistem informasi	100.000.000,00	0	0							0 sistem informasi	0	0,00 sistem informasi	-	0,00%	0,00%	
1 03 12 2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan**	**9 dokumen**	**250.000.000**	1 dokumen	**7.346.875**	**1 dokumen**	**100.000.000,00**		-							0 dokumen	-	0,00 dokumen	-	0,00%	0,00%	**sda**
1 03 12 2.04 0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0 dokumen	-	1 Dokumen	7.346.875,00	0 Dokumen	-	0	0							0 Dokumen	0	0,00 Dokumen	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
1 03 12 2.04 9	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	6 laporan	120.000.000	2 laporan	-	2 laporan	50.000.000,00									0 laporan	0	0,00 laporan	-	0,00%	0,00%	
1 03 12 2.04 11	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil penilaian kinerja pengaturan,pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang dan penilaian kinerja fungsi dan manfaat	3 dokumen	130.000.000	1 dokumen	-	1 dokumen	50.000.000,00									0 dokumen	0	0,00 dokumen	-	0,00%	0,00%	

	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	**%tase sertifikat aset tanah dan bangunan pemerintah kota**	**87 %**	**100.000.000**	0 %	-	85 %	**50.000.000**		-							0 %		0,00 %		0,00%	0,00%	sda
	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah sertifikat infrastruktur ke-PU an yang diterbitkan**	**100 sertifikat**	**100.000.000**	0 sertifikat	-	50 sertifikat	**50.000.000**		-							0 sertifikat		0,00 sertifikat		0,00%	0,00%	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 laporan	100.000.000	0 laporan	-	5 laporan	50.000.000,00									0 laporan	0	0,00 laporan	-	0,00%	0,00%	

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 23.519.841.379,00,- telah terealisasi sebesar Rp.2.041.928.615,- atau sebesar 8,70 % dengan kinerja sebesar 6,72%. Dari 10 program yang direncanakan terealisasi 5 (lima) program sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Rencana kerja untuk tahun 2025 sebesar Rp. 7.163.538.129,00 terealisasi sebesar Rp. 1.777.911.115 atau 24,82%. Terdiri dari kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

   Rencana kerja untuk tahun 2025 sebesar Rp. 3.474.435.000,00 terealisasi sebesar Rp. 43.859.000 atau 0,013%. Terdiri dari kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sementara untuk kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi masih nol.

3. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

   Rencana kerja untuk tahun 2025 sebesar Rp. 596.407.200,00 terealisasi sebesar Rp. 20.218.500,00 atau 0,034%. Terdiri dari kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

4. **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**

   Rencana kerja untuk tahun 2025 sebesar Rp.2.483.461.050,00 terealisasi sebesar Rp. 105.082.000,00 atau 0,042%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan.

5. Program Penyelenggaraan Jalan

Rencana kerja untuk tahun 2025 sebesar Rp. 7.910.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 94.858.000 atau 0,012%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemeliharaan rutin jalan.

Rendahnya capaian renja triwulan 1 tahun 2025 disebabkan terjadinya pergeseran anggaran yang cukup besar dibeberapa program kegiatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang konkrit dalam upaya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2025, antara lain sebagai berikut :

1. Perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa serta optimalisasi koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait agar dapat mengejar keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga sesuai dengan target perencanaan untuk menghasilkan output dan outcome yang berkualitas.
2. Melalukan pergeseran/penyesuian beberapa rekening belanja dan analisa target capaian yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2 Analisis capaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu berupa:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari. Adapun target dari kegiatan ini adalah Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum;
2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah Warga Negara Yang

Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Adapun target dari kegiatan ini adalah Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area berisiko pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Tabel 2.2 Capaian pelaksanaan SPM urusan pekerjaan umum Kota Padang Panjang s/d Triwulan I 2025

No	Indikator	Periode Renstra (2026)	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8=6/4	9=7/5
1.	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Taerhadap Air Minum Layak	87,72	87,15	150.000.000,00	96,34	-	110,55	0,00
2	Persentase Rumah Tinggal dengan Sanitasi Layak	91,3	90,70	596.407.200,00	95,48	20.218.500,00	105,27	3,39

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa secara umum pencapaian SPM urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

   Target capaian untuk tahun 2025 sebesar 87,15% tercapai 96,34% dengan kenaikan sebesar 1,1055% dari total jumlah rumah 17425 dengan cakupan layanan air minum 15.123.

3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

   Dengan indikator kinerja Persentase Rumah Tinggal dengan bersanitasi Layak target 90,70% realisasi 95,48% dengan realisasi 95,48%. Menunjukkan dari 17837 rumah tangga, 17676 rumah tangga bersanitasi layak.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dengan mengacu pada rancangan awal Perubahan RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan awal RKPD, maka ada beberapa program dan kegiatan pada Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijadikan program dan kegiatan prioritas kedua. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2025. Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Dengan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan 2025					Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026	
								Sebelum	Sesudah	RKPD Tahun 2025	APBD Tahun 2025	Pagu Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	8		9	7	9	11	11	11	11	11	7	9
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**23.519.841.379**	**18.920.888.286**	**25.656.747.752**	**Padang Panjang**						**11.310.480.391**
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**23.469.841.379**	**18.908.238.286**	**25.656.747.752**							**11.306.430.391**
1	**1**	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	**7.163.538.129**	**7.420.743.606**	**7.052.109.106**		PAD				**100 %**	**7.071.300.000**
	1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah Persentase Terpenuhinya Urusan Penunjang Pemerintah**	**100%**	**100%**	**5.928.038.129**	**6.187.243.606**	**6.252.256.757**						**100 %**	**6.230.000.000**
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	658 Orang/bulan	686 Orang/bulan	5.928.038.129	6.187.243.606	6.252.256.757						686 orang/tahun	6.230.000.000
	1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	**327.000.000**	**327.000.000**	**174.194.233**						**100 %**	**173.300.000**
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	6.500.000	6.500.000	2.550.000						4 paket	2.550.000
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	50.000.000	50.000.000	25.499.533						4 paket	25.500.000
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.500.000	20.500.000	10.249.700						4 paket	10.250.000
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	30 Laporan	250.000.000	250.000.000	135.895.000						100 laporan	135.000.000

	1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**100%**	**324.500.000**	**317.000.000**	**314.999.116**						**100 %**	**315.000.000**
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.000.000	4.000.000	2.000.000						12 laporan	2.000.000
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	36 Laporan	36 Laporan	20.500.000	20.500.000	20.499.116						36 laporan	20.500.000
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	300.000.000	292.500.000	292.500.000						13 laporan	292.500.000
	1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**90%**	**90%**	**584.000.000**	**589.500.000**	**310.659.000**						**90 %**	**353.000.000**
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	40.000.000	45.500.000	34.196.000						1 unit	35.000.000
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	250.000.000	250.000.000	230.368.000						30 unit	230.000.000
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	40.000.000	40.000.000	35.935.000						6 unit	35.000.000
	1	03	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	4.000.000	4.000.000	4.000.000						1 unit	3.000.000
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	250.000.000	250.000.000	6.160.000						1 unit	50.000.000
2	**1**	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi**	**72,96 %**	**89,04**	**3.474.435.000**	**2.491.358.910**	**3.556.611.630**						**75,52 %**	**470.000.000**
	1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi**	**0,2 km**	**1,2 km**	**1.014.435.000**	**935.000.000**	**1.525.000.000**						**0,03 km**	**220.000.000**
	1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1.2 KM	1.2 KM	1.014.435.000	935.000.000	1.525.000.000		PAD				0,03 km	220.000.000
	1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Panjang Irigasi yang ditingkatkan dan dipelihara**	**2,5 km**	**0,6 km**	**2.460.000.000**	**1.556.358.910**	**2.031.611.630**						**0,03 km**	**250.000.000**
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,6 KM	0 KM	565.000.000	-	-						0 km	-
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,8 KM	0,6 KM	1.895.000.000	1.556.358.910	2.031.611.630		PAD -DAK Fisik Bidang Irigasi-Penugasan				1,5 km	250.000.000

3	**1**	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (Aman)**	**87,15%**	**87,15%**	**150.000.000**	**200.500.000**	**373.936.340**						**87,72 %**	**250.000.000**
	1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sambungan Rumah Tangga dari Unit Spam yang dibangun**	**100 SR**	**100 SR**	**150.000.000**	**200.500.000**	**373.936.340**						**100 SR**	**250.000.000**
	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100 SR	75 SR	150.000.000	200.500.000	373.936.340		PAD -DAK Fisik Bidang Air Minum-Reguler				100 SR	100.000.000
4	**1**	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**	**90,70%**	**90,70%**	**596.407.200**	**872.731.600**	**841.951.100**						**91,3 %**	**500.000.000**
	1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sambungan rumah Dilayani dengan sistem pengelolaan air limbah domestik**	**20 RUMAH TANGGA**	**20 RUMAH TANGGA**	**596.407.200**	**872.731.600**	**841.951.100**						**20 rumah tangga**	**500.000.000**
	1	03	05	2.01	0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	0 M^3/Hari	5 M^3/Hari	5.000.000	177.500.000	214.389.500		PAD(Pajak Air Tanah) -DAK Fisik Bidang sanitasi-Reguler				5 m3/hari	150.000.000
	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	2.5 M^3/Hari	5 M^3/Hari	275.000.000	411.920.000	345.000.000		PAD				2 m3/hari	150.000.000
	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	1 Unit	316.407.200	283.311.600	282.561.600		PAD				1 unit	200.000.000
5	**1**	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Cakupan drainase dalam kondisi baik**	**87,92 %**	**87,92 %**	**2.483.461.050**	**3.940.773.850**	**3.862.186.850**						**90,26 %**	**1.104.180.391**
	1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan dan Dipelihara**	**2 Sistem Drainase**	**2 Sistem Drainase**	**2.483.461.050**	**3.940.773.850**	**3.862.186.850**						**2 Sistem Drainase**	**1.104.180.391**
	1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	6 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1.910.000.000	2.157.224.600	1.591.844.000		PAD -DAU				1 Sistem Drainase	500.000.000
	1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	573.461.050	1.783.549.250	2.270.342.850		PAD, DAU				1 Sistem Drainase	554.180.391

6	**1**	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Presentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik**	**46,39%**	**46,39%**	**1.050.000.000**	**557.500.000**	**3.146.577.000**		0				**46,67 %**	**630.000.000**
	1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Pemberian PBG sesuai dengan standar yang berlaku**	**50 unit**	**50 unit**	**1.050.000.000**	**557.500.000**	**3.146.577.000**						**50 unit**	**630.000.000**
	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2 Bangunan Gedung	3 Bangunan Gedung	1.000.000.000	507.500.000	1.611.737.000		PAD-DAU				2 bangunan gedung	300.000.000
	1	03	08	2.01	21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		3 Dokumen			1.470.010.000		PAD-DAU				2 bangunan gedung	300.000.000
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	50 Dokumen	30 Dokumen	50.000.000	50.000.000	64.830.000		-PAD				40 dokumen	30.000.000
7	**1**	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan**	**90,33 %**	**90,33 %**	**7.910.000.000**	**2.762.428.370**	**6.125.934.826**						**98,00 %**	**1.000.000.000**
	1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Panjang Jalan dan Trotoar yang Dibangun dan Dipelihara**	**2,1 km**	**5,5 km**	**7.910.000.000**	**2.762.428.370**	**6.125.934.826**						**3,1 km**	**1.000.000.000**
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1 KM	0,5 KM	5.000.000.000	703.683.000	1.057.363.008		PAD - Dana bagi hasil (DBH) - DBH sawit Lanjutan				0 km	-
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2 KM	3 KM	1.000.000.000	1.132.250.000	3.477.281.818		Opsen PKB - DAK fisik bidang jalan-reguler jalan				0,1 km	500.000.000
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2 KM	2 KM	1.910.000.000	926.495.370	1.591.290.000		Opsen PKB - PAD				2 km	500.000.000

8	**1**	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase sumber daya manusia konstruksi yang bersertifikasi**	**66 %**	**66 %**	**242.000.000**	**267.000.000**	**61.460.900**		-PAD				**71 %**	**60.000.000**
	1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah tenaga kerja konstruksi dan Lembaga Konstruksi yang mengikuti Pelatihan**	**33 orang**	**30 orang**	**200.000.000**	**200.000.000**	**25.778.000**						**33 orang**	**35.000.000**
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	30 Orang	30 Orang	150.000.000	150.000.000	25.778.000						**30 orang**	**25.000.000**
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	0 Lembaga	50.000.000	50.000.000	-						**3 lembaga**	**10.000.000**
	1	**03**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi**	**40 dokumen**	**40 dokumen**	**30.000.000**	**55.000.000**	**29.752.900**						**40 dokumen**	**15.000.000**
	1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	5.000.000	5.000.000	2.289.900						**1 perangkat pendukung**	**5.000.000**
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	40 Dokumen	40 Dokumen	25.000.000	50.000.000	27.463.000						**40 dokumen**	**10.000.000**
	1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Jumlah Dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi**	**30 dokumen**	**30 dokumen**	**12.000.000**	**12.000.000**	**5.930.000**						**30 dokumen**	**10.000.000**
	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	30 Paket Pekerjaan	30 Paket Pekerjaan	12.000.000	12.000.000	5.930.000						**30 Paket Pekerjaan**	**10.000.000**
9	**1**	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Presentase Penyelesaian kasus Pelanggaran**	**0,23%**	**75,00%**	**400.000.000**	**395.201.950**	**631.930.000**		-PAD				**0,25 %**	**220.950.000**
	1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen RRTR yang disusun**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**200.000.000**	**303.164.000**	**187.050.000**							**-**
	1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	303.164.000	187.050.000							
	1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**100.000.000**	**52.900.000**	**35.800.000**						**1 dokumen**	**50.000.000**
	1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100.000.000	52.900.000	35.800.000						**1 dokumen**	**50.000.000**

	1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan**	**3 dokumen**	**3 dokumen**	**100.000.000**	**39.137.950**	**409.080.000**						**3 dokumen**	**95.950.000**
	1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000	16.827.950	400.500.000						2 laporan	50.000.000
	1	03	12	2.04	0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	22.310.000	8.580.000						1 dokumen	45.950.000
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**50.000.000**	**12.650.000**	**4.050.000**							**4.050.000**
	2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**50.000.000**	**12.650.000**	**4.050.000**							**4.050.000**
10	**2**	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Presentase Rencana Luas Penggunaan Tanah**	**85 %**		**50.000.000**	**12.650.000**	**4.050.000**		-PAD				**0 0**	**4.050.000**
	2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Penetapan tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum**	**50 Sertifikat**		**50.000.000**	**12.650.000**	**4.050.000**						**50 sertifikat**	**4.050.000**
	2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	50.000.000	12.650.000	4.050.000						5 laporan	4.050.000

2.4 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi, perguruan tinggi melalui pelaksanaan musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, Forum SKPD dan musrenbang RKPD Kota. Usulan Musrenbang yang diakomodir dalam rancangan Perubahan Renja Akhir Tahun 2025 adalah usulan yang verifikasi di tingkat kecamatan dan Bappeda serta telah melalui proses investigasi (penelitian lapangan) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Selain usulan Musrenbang, Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 juga mengakomodir hasil reses DPRD berupa pokok-pokok pikiran Anggota DPRD tersebut sesuai dengan tupoksi yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 2.4 Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Padang Panjang

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran	Catatan
i	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**				
1	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				
a.	Normalisasi/Restorasi Sungai	Dari MCK bawah jembatan sampai depan rumah buk Darmayanti RT. 001 Solok Batuang (sepanjang 75 meter), Kota Padang Panjang Sigando	Sudah banyaknya DAM Daerah Aliran Sungai yang telah patah dan rusak, maka dibutuhkan perbaikan DAM dengan anggaran 150jt (P1)	160.000.000	Musrenbang EROSEN ADERA, ST
		Dari RT. 4 sampai pertemuan banda TPL dan RT. 18 (sepanjang 100 meter), Kota Padang Panjang	tergerusnya DAS yang memungkinkan rumah penduduk dan sawah terbawa longsoran tanah maka dibutuhkan pembuatan DAM Daerah Aliran Sungai Batang sitabak (sekitar 100 Juta) (P1)	200.000.000	Musrenbang WIRA JAYA SEPTIKHA, S. STP

2	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				
a.	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jl. Syekh M. Jamil RT. 001 (Depan PAUD Koto Katik) (sepanjang 35 meter), Kota Padang Panjang	Sudah banyaknya DAM irigasi yang rusak di sepanjang jalan Depan PAUD sampai simpang Puskesmas Kelurahan Koto Katik sehingga menyebabkan aliran air ke lahan pertanian tidak optimal , maka dibutuhkan lanjutan pembangunan DAM Tebing dengan anggaran 90 juta (P1)	90.000.000	Musrenbang EMRIANIS, SE
		Parak bangka hamparan Sawah Baukue RT 07 sepanjang 250 Meter, Kota Padang Panjang	Masih belum selesainya irigasi Sawah Baukue dan adanya saluran yang rusak sampai ke kampung Bukit yang menyebabkan tidak lancarnya aliran air ke hamparan Sawah Baukue, maka dibutuhkan lanjutan pembangunan dan rahap saluran irigasi Sawah Baukue dengan anggran 250.000.000 (P1)	275.000.000	Musrenbang ANDRA DASWARA, S.IP
		Dari belakang rumah Buk Rice sampai depan Puskesmas Koto Katik RT. 001 (sepanjang 300 meter), Kota Padang Panjang	Sudah rusaknya saluran irigasi Guguak Lado Bawah sehingga tidak optimalnya pengairan ke lahan pertanian, maka dibutuhkan rehab irigasi dengan anggaran 150 juta. (P1)	190.000.000	Musrenbang EMRIANIS, SE
		RT. 09 Kubu Gadang, Kel. Ekor Lubuk , Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang	Perbaikan dan Penambahan Tali Bandar di RT. 09 Kubu Gadang, Kel. Ekor Lubuk yang apabila Hujan Deras ini Sering Terjadi Banjir (Lahan Sudah Di Bebaskan dan Telah Mendapat Izin oleh si Pemilik)	30.000.000	Pokok Pikiran Drs. ADITIAWARMAN
b.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Hamparan Sawah Sigata Rt 01 sepanjang 200 Meter, Kota Padang Panjang	Banyaknya saluran irigasi yang rusak untuk Sawah Sapuluah, maka dibutuhkan perbaikan saluran irigasi hamparan Sawah Sapuluah dengan anggran 175.000.000 (P1)	185.000.000	Musrenbang ANDRA DASWARA, S.IP
		Sawah Solok Panjang RT 06, sepanjang 150 Meter, Kota Padang Panjang	Banyaknya saluran irigasi yang rusak untuk Sawah Solok Panjang , maka dibutuhkan perbaikan saluran irigasi Sawah Solok Panjang dengan anggran 100.000.000 (P1)	160.000.000	Musrenbang ANDRA DASWARA, S.IP
		RT 1 Dibelakang Rumah Tek Nani Sampai Rel Kereta Api sepanjang 200 M, Kota Padang Panjang	Saluran Irigasi Sekarang Sudah Banyak Yang Bocor Dan Runtuh Sehingga Berpengaruh Terhadap Produksi Pangan Karna Kurangnya Pasokan Air Kesawah. Selain Untuk Pengairan Sawah , Airnya Juga Dimanfaatkan Untuk Kolam Masyarakat, Maka perlu dilakukan Rehap Saluran Irigasi Kubang Laweh, dengan anggaran Rp. 150.000.000 (P1)	150.000.000	Musrenbang AKBAR SYAH, S.H
		RT 06 Kampung Manggis, Kota Padang Panjang	Sudah Rusaknya Saluran Irigasi & Kepala Banda Kariang maka perlu dilakukan perbaikan irigasi yang di pergunakan oleh kelompok tani makmur batu batirai 1 Dari kepala Bandar pincuran kariang ke area persawahan dekat rumah Rini (dengan volume 60 m² dan anggaran Rp. 75.000.000) (P1)	85.000.000	Musrenbang AKBAR SYAH, S.H
		RT 3 Dibelakang Kantor Lurah Menuju Jalan Ahmad Yani Samping Gang Smp Gunung sepanjnag 150 M, Kota Padang Panjang	Irigasi Sudah Banyak Yang Rusak, Lantainya Berlubang, maka diperlukan Rehab Irigasi dan Crossing, dengan anggaran Rp. 200.000.000 (P1)	130.000.000	Musrenbang AKBAR SYAH, S.H

		Pembuatan Irigasi RT 24 Kelurahan Kampung Manggis		150.000.000	Pokir Perubahan	YUDHA PRASETIA
		Pembuatan Irigasi RT 8 Kelurahan Kampung Manggis		140.000.000	Pokir Perubahan	YUDHA PRASETIA
		Pembuatan Irigasi RT 9 Kelurahan Kampung Manggis		170.000.000	Pokir Perubahan	YUDHA PRASETIA
		Pembuatan Irigasi Sigata Kelurahan Ganting		116.180.000	Pokir Perubahan	KIKI ANUGERAH DIA, SE
II	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH**					
1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**					
b.	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Belakang Mushala Nur Sa'adah RT 20 (sepanjang 40 meter) , Kota Padang Panjang	Saluran IPAL saat ini sudah banyak yang rusak / Paralon pecah maka di perlukan perbaikan saluran IPAL (Sekitar 25 Juta) (Prioritas 1)	25.000.000	Musrenbang	ILHAM KUSUMA RY, S.STP
		Dekat Mesjid Nurul Iman RT. III Kelurahan Silaing Atas , Kota Padang Panjang	Belum Adanya IPAL di Mesjid Nurul Iman sehingga pembuangan limbah WC langsung ke drainase yang berada di pemukiman warga untuk itu diperlukan pembuatan IPAL KOMUNAL (V: 100m2 ; Biaya: 50 juta) 'P1'	50.000.000	Musrenbang	SAZALI, S.Sos
		Jl. Ahmad Karim RT 11, Kel. Koto Panjang, Kota Padang Panjang	Pembuatan MCK di pemukiman warga	100.000.000	Pokok Pikiran	YULIUS KAISAR
III	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**					
1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**					
a.	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Depan Rumah Pak Asymuraal dan datuk Novi RT 22 (sepanjang 6 x 2 meter), Kota Padang Panjang	Gorong-gorong saat ini kecil tapi volume air besar maka di perlukan pengantian gorong-gorong menjadi Plat Duiker (sekitar 50 juta) (Prioritas 1)	50.000.000	Musrenbang	ILHAM KUSUMA RY, S.STP
		Asrama Secata B RT.10, (sepanjang 400 x 1 meter), Kota Padang Panjang	Kondisi Drainase / Riol yang rusak sehingga menyebabkan bahu jalan turun maka diperlukan perbaikan drainase (Sekitar 200 Juta) (Prioritas 1)	200.000.000	Musrenbang	ILHAM KUSUMA RY, S.STP
		RT 08 (Jalan depan Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang) (sepanjang 100 Meter) , Kota Padang Panjang	Meluapnya resapan air tanah ke jalan sehingga menyebabkan genangan serta gangguan bagi pengguna jalan, maka perlunya pembuatan drainase jalan (sekitar 100 jt) (P1)	100.000.000	Musrenbang	DEDDY ANDRIAN, SH
		RT 2 Dan 3 Jl Sheik Ibrahim Musa Mulai Dari Depan Rumah Buk Rakena Sampai Depan Kantor Kelurahan Ekor Lubuk, sepanjang 80 M, Kota Padang Panjang	Riol / Drainase Tersebut Sudah Banyak Yang Yang Bocor Dan Airnya Melimpah Ke Jalan Sehingga Jalan Syeik Ibrahim Musa Banyak Yang Berlubang / Rusak,maka diperlukan Rehab Riol dengan jumlah anggaran Rp.80.000.000 (P2)	80.000.000	Musrenbang	AKBAR SYAH, S.H
		RT 8 Jl. Urip Sumoharjo dari Rumah Dt. Itam sampai simpang gereja sepanjang 100 Meter, Kota Padang Panjang	terganggunya aktifitas pejalan kaki di Jl. Urip Sumoharjo RT 8 sebelum rumah DT. Itam sampai sesudah simpang gereja sampai sesudah simpang gereja maka diperlukan peningkatan kapasitas dari drainase kota dengan anggaran sekitar 150.000.000 : 100 Meter (P1)	150.000.000	Musrenbang	TEDRYON, S.A.P
		JALAN ABDUL HAMID HAKIM KEL PASAR USANG , Kota Padang Panjang	permohonan bantuan REHAB DRAINASE DI JALAN ABDUL HAMID HAKIM	50.000.000	Pokok Pikiran	HERMAN
		Kel. Koto Panjang, Kec. Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang	rehap/pembuatan drainase bancah laweh	225.000.000	Pokok Pikiran	ZULFIKRI, SE
		RT. 1 Kel. Sigando, Kec. Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang	Pembuatan Drainase RT1 Kel. Sigando	225.000.000	Pokok Pikiran	ZULFIKRI, SE

b,	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Depan rumah Syahrial sampai bandar padang RT 17 (sepanjang 20 x 1,5 meter), Kota Padang Panjang	Drainase yang ada sudah banyak yang rusak sehingga di perlukan perbaikan / rehab drainase (sekitar 20 juta) (Prioritas 1)	20.000.000	Musrenbang	ILHAM KUSUMA RY, S.STP
		Desa Baru RT 14 (Depan rumah Ibuk Noviarti sampai simpang Tugu Tanah Hitam, sepanjang 45x06 meter), Kota Padang Panjang	Karena kecilnya saluran air yang tidak dapat menampung debit air hujan dan drainase yang terbuka menyebabkan bau tidak sedap di sekitaran lokasi pemukiman, maka kami mengusulkan Pembangunan/Perbaikan Drainase Lingkungan dengan Anggaran sebesar Rp.85.000.000 (Prioritas I)	250.000.000	Musrenbang	WETRIKO B, S.Sos
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN**					
1	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**					
a.	Pemeliharaan Berkala Jalan	Sepanjang Jalan Pemuda, sisi kiri RT.1 (Sepanjang 100 meter) , Kota Padang Panjang	Banyaknya keramaian yg membutuhkan areal pejalan kaki dari mesjid Ilham sampai depan kantor KAN Lareh Nan Panjang(sekitar 100 Juta) (P1)	150.000.000	Musrenbang	WIRA JAYA SEPTIKHA, S. STP
		Jalan Bagindo Aziz dari batas Kel.tanah hitam sampai SD. 11 PPT (RT. 8, RT. 17, Rt. 9 & RT. 13) (Sepanjang 500 Meter), Kota Padang Panjang	Jalan yang kecil dan banyak dilewati kendaraan besar seperti truk maka dibutuhkan pengecoran bahu jalan sebagai alternatif sebagai alternatif pelebaran jalan (sekitar 100 juta) (P 1)	100.000.000	Musrenbang	WIRA JAYA SEPTIKHA, S. STP
		dari dekat depan SMP N 4 sampai dekat warung yufrizal RT. III , Kota Padang Panjang	sudah terjadi kerusakan trotoar di beberapa titik sehinga menyebabkan rawan kecelakaan bagi pejalan kaki untuk itu dibutuhkan perbaikan trotoar (V: 150m x 1.2m ; Biaya 170 juta) 'P 1'	190.000.000	Musrenbang	SAZALI, S.Sos
		RT. 005 Kelurahan Pasar Usang, Kota Padang Panjang	Karena telah rusaknya trotoar dan paving blok yang telah pecah menyebabkan terganggunya pejalan kaki dalam menggunakan trotoar tersebut maka dibutuhkan perbaikan trotoar yang berlokasi di dekat gerbang Bank Nagari sampai dengan dekat Jembatan Gatangan RT. 005 Kelurahan Pasar Usang sepanjang ± 100 m dengan anggaran biaya Rp. 110.000.000,- (Prioritas 1).	140.000.000	Musrenbang	DODI AFRIANDI, SKM
		RT.09 Kelurahan Silaing Bawah , Kota Padang Panjang	Pengerjaan trotoar yang terbengkalai sehingga perlu dilanjutkan untuk penyeragaman dan keindahan trotoar, dengan usulan lanjutan pembangunan/perbaikan trotoar jalan RPH dengan volume 150 meter, anggaran 135.000.0000 , Prioritas 1 (P1)	135.000.000	Musrenbang	YOHANES ALATUMAHU, SH
		Jl. Lubuk Mata Kucing, RT 17 Kel. Pasar Usang, Kota Padang Panjang	Pengedaman pinggir jalan,pengecoran bahu jalan dan pembuatan trotoar	195.000.000	Pokok Pikiran	YULIUS KAISAR

2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Secara umum isu utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah dengan Tata Kelola Pemerintahan khususnya terkait Implementasi 5 Area Layanan infrastruktur dasar dan kesesuaian pemanfaatan ruang.

1. Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar Infrastruktur kota

dalam konteks ini adalah segala struktur yang berwujud fisik yang digunakan untuk menopang kegiatan masyarakat Kota Padang Panjang sehingga dapat menekan inefisiensi dari aktivitas masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tersedianya infrastruktur kota yang baik diharapkan mampu untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga sekaligus juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Padang Panjang. Kondisi saat ini sebagian infrastuktur Kota Padang Panjang belum sesuai dengan harapan misalnya dalam layanan infrastruktur drainase masih terdapat beberapa titik yang mengalami kerusakan sehingga terdapat genangan air jika terjadi hujan yang cukup lama dan berdampak terhadap pemukiman masyarakat, oleh sebab itu perlu penanganan secara tuntas, layanan infrastruktur jalan dimana pembangunan trotoar yang belum tuntas dan belum ramah disabilitas, fasilitas keselamatan lalu lintas, lampu jalan, pembukaan akses jalan lingkar selatan, layanan infrastruktur SDA dilihat dari beberapa irigasi yang mengalami kerusakan di beberapa titik, layanan infrastruktur air minum dimana cakupan layan penduduk terhadap air bersih Kota Padang Panjang baru mencapai 85,88 persen tahun 2021 sedangkan target nasional 100 persen di tahun 2024, layanan infrastruktur air limbah dengan cakupan pelayanan baru mencapai 87,87%, target dalam SSK yang harus dicapai 90 persen tahun 2027. Peningkatan layanan infrastruktur dasar merupakan isu strategis yang perlu diatasi oleh Pemerintah bersama seluruh stakeholder di Kota Padang Panjang. Pemerintah kota berkewajiban untuk senantiasa meningkatkan layanan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Sebagai kota yang cukup strategis dan terletak di jalur perlintasan, namun dibatasi oleh luas wilayah yang sangat kecil, pertambahan penduduk adalah

sesuatu yang sulit dihindari. Untuk menyikapi hal ini, tentu saja diperlukan kebijakan penataan ruang kota yang mampu mengakomodir kebutuhan seluruh stakeholder kota. Pemerintah Kota Padang Panjang harus menyediakan sarana dan prasarana perkotaan dan aksesibilitas yang merata ke seluruh wilayah kota. Oleh sebab itu, kedepan diperlukan Langkah-langkah sebagai berikut: IV-43 1) Percepatan penyelesaian Revisi Perda RTRW; 2) Pengembangan ruang kota yang dapat menampung fungsi kota sekaligus mampu menjadi ciri khas Kota Padang Panjang, baik untuk fungsi pendidikan, perdagangan, pariwisata, industri, pemerintahan maupun permukiman, serta penyusunan RDTR;

Adapun isu-isu strategis yang diinventarisir dalam Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2025 terkait realisasi program kegiatan Dinas PUPR yang masih rendah baik realisasi fisik maupun keuangan serta penambahan pekerjaan untuk rehabilitasi pasca bencana gunung marapi .

Alokasi dan APBN berupa dana DBH Sawit, opsen PKB dan DAK yang dialokasikan pada program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dan Program Penyelenggaraan Jalan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam meyelenggarakan pemerintahan lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai.

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera memiliki 4 (empat) tujuan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja organisasi melalui tata kelola Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang yang baik, bersih dan profesional;
2. Meningkatkan konektivitas dan aksebilitas wilayah;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Gedung Strategis dan Penataan Bangunan; dan
4. Mewujudkan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan.

Adapun sasaran yang perlu dicapai demi tercapainya tujuan tersebut antara lain:

a) Meningkatnya tata kelola organisasi

   Adapun tata kelola organisasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan, dan pengawasan internal organisasi Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Strategis

b) Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah

   Salah satu indikator dalam tercapainya konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah meningkatnya kemantapan jalan. Kemantapan jalan merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik

dan layanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

c) Meningkatnya ketersediaan bangunan gedung dan penataan bangunan pada kawasan strategis

   Adapun prasarana umum pada kawasan permukiman/perumahan, bangunan dan lingkungan meliputi penyediaan bangunan gedung pemerintah, rumah negara dan bangunan strategis lainnya yang aman dan nyaman serta untuk meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi

d) Meningkatnya infrastruktur air minum dan penyehatan lingkungan regional.
e) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian penataan ruang.

3.2 Telahaan Terhadap RPJMN

RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN Tahun 2025–2045. RPJMN menjadi dasar hukum dalam penyusunan Renstra K/L dan RKP serta RPJMD wajib selaras dengan RPJMN. RPJMN juga menjadi acuan Badan Usaha/Non State Actors.

Cita-cita besar Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan termuat dalam Undang–Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025–2045. Keberhasilan pencapaian cita-cita tersebut direpresentasikan melalui indikator Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045. RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025–2045, yang berfokus pada perkuatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025–2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025–2045. Selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025–2029 disusun dengan

mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden.

3.3 Tujuan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang yaitu **Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah**. dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang termasuk dalam Misi ke-5 yakni **Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup untuk menjadikan Padang Panjang Kota hijau Berkelanjutan**.

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Walikota Padang Panjang dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Rumusan tujuan dan sasaran dan indikator penilaian ketercapaiannya digambarkan pada Tabel 3.1 :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2025		Ket.
				Renja	Renstra	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur tangguh bencana serta peningkatan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur serta Hunian Layak		IKLI KePUan	96,71	96,81	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Persentase sarana infrastruktur dasar perkotaan dalam kondisi baik	79,16	79,16	
		Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	83,20	83,20	
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68,75	68,75	

3.4 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Penyusunan dokumen Renja Perubahan Dinas PUPR Kota Padang Panjang Tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja s/d Triwulan I Tahun 2025 serta dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu strategis yang mempengaruhi proses pelaksanaan program kegiatan Dinas PUPR pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa isu strategis, Perubahan Renja Dinas PUPR Kota Padang Panjang Tahun 2025 mengakomodir pergeseran anggaran akibat adanya perubahan volume kegiatan maupun optimalisasi pemanfaatan sisa anggaran kegiatan/sub kegiatan yang ada serta penambahan dana rehabilitasi pasca bencana gunung merapi.

Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Dinas PUPR Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**23.919.841.379**	**19.316.090.236**	**25.806.747.752**							**16.936.075.100**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**23.869.841.379**	**19.303.440.236**	**25.802.697.752**							**16.886.075.100**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**23.869.841.379**	**19.303.440.236**	**25.802.697.752**							**16.886.075.100**	
25	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**7.163.538.129**	**7.420.743.606**	**6.909.310.356**							**6.203.060.000**	
	1.03.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**5.928.038.129**	**6.187.243.606**	**6.061.483.456**			-	-	-		**5.350.000.000**	**PUPR**
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3948 Orang/bulan		658 Orang/bulan	658 Orang/bulan	658 Orang/bulan	5.928.038.129	6.187.243.606	6.061.483.456	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.350.000.000	PUPR
	1.03.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**	100 %		100 %	100 %	**0 %**	-	-	-			-	-	-		46.575.000	PUPR
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	59 Paket		59 Paket	47 Paket	0 Paket	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			46.575.000	PUPR
	1.03.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**327.000.000**	**327.000.000**	**174.194.233**			-	-	-		**231.262.500**	**PUPR**
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	6.500.000	6.500.000	2.550.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			6.500.000	PUPR
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	50.000.000	50.000.000	25.499.533	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	PUPR
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	12 Paket	4 Paket	20.500.000	20.500.000	10.249.700	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.012.500	PUPR
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan		50 Laporan	24 Laporan	50 Laporan	250.000.000	250.000.000	135.895.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			153.750.000	PUPR
	1.03.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**324.500.000**	**317.000.000**	**314.999.116**			-	-	-		**290.372.500**	**PUPR**
	1.3.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32 Laporan		4 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4.000.000	4.000.000	2.000.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.000.000	PUPR
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	56 Laporan		4 Laporan	36 Laporan	4 Laporan	20.500.000	20.500.000	20.499.116	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			21.012.500	PUPR
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	78 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	300.000.000	292.500.000	292.500.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			265.360.000	PUPR
	1.03.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**584.000.000**	**589.500.000**	**358.633.551**			-	-	-		**284.850.000**	**PUPR**
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	40.000.000	45.500.000	34.196.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.750.000	PUPR

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit		30 Unit	30 Unit	30 Unit	250.000.000	250.000.000	230.368.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			208.075.000	PUPR
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	6 Unit	6 Unit	40.000.000	40.000.000	35.935.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000	PUPR
	1.03.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.000.000	PUPR
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	250.000.000	250.000.000	54.134.551	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.025.000	PUPR
26	**1.03.02..**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi**	**90,04 %**		**88,84 %**	**89,04 %**	**89,04 %**	**3.474.435.000**	**2.491.358.910**	**3.581.611.630**							**500.000.000**	
	1.03.02.2.01.	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi**	**7 km**		**11,327 km**	**0,2 km**	**1,2 km**	**1.014.435.000**	**935.000.000**	**1.550.000.000**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	-		**250.000.000**	**PUPR**
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	7 KM		11,327 KM	1.2 KM	1,2 Km	1.014.435.000	935.000.000	1.550.000.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			250.000.000	PUPR
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	PUPR
	1.03.02.2.02.	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah panjang Irigasi dalam kondisi baik**	**80,33 Km**		**76,23 Km**	**2,5 km**	**77,43 Km**	**2.460.000.000**	**1.556.358.910**	**2.031.611.630**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	-		**250.000.000**	**PUPR**
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	1,45 KM		76,23 Km	0.6 KM	0 KM	565.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			-	PUPR
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2,65 KM		76,23 Km	0.8 KM	1,2 KM	1.895.000.000	1.556.358.910	2.031.611.630	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			250.000.000	PUPR
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	PUPR
27	**1.03.03..**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (Aman)**	**89,6 %**		**88,4 %**	**88,6 %**	**88,6 %**	**150.000.000**	**200.500.000**	**373.936.340**							**150.000.000**	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.03.2.01.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di kota**	**15982 Rumah Tangga**		**15767 Rumah Tangga**	**100 Rumah Tangga**	**15804 Rumah Tangga**	**150.000.000**	**200.500.000**	**373.936.340**			-	-	-		**150.000.000**	**PUPR**
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	PUPR
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	450 SR		15767 SR	100 SR	100 SR	150.000.000	200.500.000	373.936.340	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	-	-			150.000.000	PUPR
28	**1.03.05..**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**	**90,8 %**		**89,6 %**	**89,8 %**	**89,8 %**	**596.407.200**	**872.731.600**	**841.951.100**							**664.541.100**	
	1.03.05.2.01.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rumah Tinggal bersanitasi Layak terhadap seluruh rumah tangga di kota**	**16196 Rumah Tangga**		**15981 Rumah Tangga**	**20 Rumah Tangga**	**16018 Rumah Tangga**	**596.407.200**	**872.731.600**	**841.951.100**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	-		**664.541.100**	**PUPR**
	1.03.05.2.01.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	12,5 M³/Hari		2,5 M³/Hari	2,5 M³/Hari	2,5 M³/Hari	5.000.000	177.500.000	214.389.500	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Air Tanah DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			150.000.000	PUPR
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	12,5 M³/Hari		2,5 M³/Hari	2.5 M³/Hari	2,5 M³/Hari	275.000.000	411.920.000	345.000.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			348.133.900	PUPR
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	0 M³/Hari			0 M³/Hari	0 M³/Hari	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	PUPR
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	6 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	316.407.200	283.311.600	282.561.600	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			166.407.200	PUPR
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	0 Dokumen			0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	PUPR
29	**1.03.06..**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Cakupan drainase dalam kondisi baik**	**94,39 %**		**93,19 %**	**87,92 %**	**93,39 %**	**2.483.461.050**	**3.940.773.850**	**3.862.186.850**							**3.189.824.000**	
	1.03.06.2.01.	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik**	**532108,5 meter**		**88028 meter**	**2 Sistem Drainase**	**88212,5 meter**	**2.483.461.050**	**3.940.773.850**	**3.862.186.850**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	-		**3.189.824.000**	**PUPR**
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	11 Sistem Drainase Perkotaan		1 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	1.910.000.000	2.157.224.600	1.591.844.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			3.000.000.000	PUPR

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	5 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	PUPR
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	6 Sistem Drainase Perkotaan		1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	573.461.050	1.783.549.250	2.270.342.850	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			189.824.000	PUPR
30	**1.03.08..**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Presentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik**	**48 %**		**46,8 %**	**47 %**	**47 %**	**1.050.000.000**	**557.500.000**	**3.296.577.000**							**150.000.000**	
	1.03.08.2.01.	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Pemberian PBG sesuai dengan standar yang berlaku**	**75 unit**		**41 unit**	**50 unit**	**50 unit**	**1.050.000.000**	**557.500.000**	**3.296.577.000**			-	-	-		**150.000.000**	**PUPR**
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	12 Bangunan Gedung		2 Bangunan Gedung	2 Bangunan Gedung	2 Bangunan Gedung	1.000.000.000	507.500.000	1.995.000.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			50.000.000	PUPR
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen		1 Dokumen	-	3 Dokumen	-	-	1.266.747.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			50.000.000	PUPR
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	375 Dokumen		39 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50.000.000	50.000.000	34.830.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	PUPR
31	**1.03.10..**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan**	**90,54 %**		**89,34 %**	**89,54 %**	**89,54 %**	**7.910.000.000**	**2.762.428.370**	**6.393.694.826**							**5.713.650.000**	
	1.03.10.2.01.	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap**	**93,58%**		**92,92%**		**93,03%**	**7.910.000.000**	**2.762.428.370**	**6.393.694.826**			-	-	-		**5.713.650.000**	**PUPR**
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	PUPR
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2 Km		0 Km	1 KM	1 Km	5.000.000.000	703.683.000	1.057.363.008	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Sawit	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			4.500.000.000	PUPR
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	10,5 Km		1,755 Km	2 KM	3 Km	1.000.000.000	1.132.250.000	3.710.041.818	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan Opsen PKB	-	-			713.650.000	PUPR
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	7 Km		6 Km	2 KM	1,5 Km	1.910.000.000	926.495.370	1.626.290.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Opsen PKB	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			500.000.000	PUPR

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
32	**1.03.11..**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase sumber daya manusia konstruksi yang bersertifikasi**	**60 %**		**21 %**	**28 %**	**28 %**	**242.000.000**	**267.000.000**	**61.460.900**							**90.000.000**	
	1.03.11.2.01.	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah tenaga kerja terampil konstruksi tersertifikasi**	**1218 orang**		**0 orang**	**33 orang**	**126 orang**	**200.000.000**	**200.000.000**	**25.778.000**			-	-	-		**50.000.000**	**PUPR**
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	1218 Orang		0 Orang	30 Orang	126 Orang	150.000.000	150.000.000	25.778.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000	PUPR
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Lembaga		0 Lembaga	3 Lembaga	0 Lembaga	50.000.000	50.000.000	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000	PUPR
	1.03.11.2.02.	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi**	**6 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**	**30.000.000**	**55.000.000**	**29.752.900**			-	-	-		**30.000.000**	**PUPR**
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	6 Perangkat Pendukung		1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	5.000.000	5.000.000	2.289.900	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000	PUPR
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	240 Dokumen		0 Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	25.000.000	50.000.000	27.463.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000	PUPR
	1.03.11.2.04.	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggara an, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**80 dokumen**		**10 dokumen**	**30 dokumen**	**30 dokumen**	**12.000.000**	**12.000.000**	**5.930.000**			-	-	-		**10.000.000**	**PUPR**
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	130 Paket Pekerjaan		20 Paket Pekerjaan	30 Paket Pekerjaan	30 Paket Pekerjaan	12.000.000	12.000.000	5.930.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000	PUPR
33	**1.03.12..**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Presentase Penyelesaian kasus Pelanggaran**	**100 %**		**72,5 %**	**75 %**	**75 %**	**400.000.000**	**395.201.950**	**481.968.750**							**225.000.000**	
	1.03.12.2.01.	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen dalam rangka per Substansi RTRW dan RDTR ke KemenATR**	**4 dokumen**		**0 dokumen**	**0 dokumen**	0 dokumen	**-**	**-**	**-**			-	-	-		**75.000.000**	**PUPR**
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	4 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			75.000.000	PUPR
	1.03.12.2.02.	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen RDTR yang disusun**	**3 dokumen**		**0 dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**200.000.000**	**303.164.000**	**187.050.000**			-	-	-		**-**	**PUPR**
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	5 Dokumen		0 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	200.000.000	303.164.000	187.050.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	PUPR
	1.03.12.2.03.	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah dokumen data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi tata ruang**	**6 Laporan**		**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**100.000.000**	**52.900.000**	**35.800.000**			-	-	-		**50.000.000**	**PUPR**
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	0 Dokumen			0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			-	PUPR

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	6 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	100.000.000	52.900.000	35.800.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	PUPR
	1.03.12.2.04.	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen penertiban dan penegakan hukum bidang tata ruang yang dilaksanakan**	**6 dokumen**		**1 dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**100.000.000**	**39.137.950**	**259.118.750**			-	-	-		**100.000.000**	**PUPR**
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50.000.000	16.827.950	250.538.750	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	PUPR
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	22.310.000	8.580.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	PUPR
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**50.000.000**	**12.650.000**	**4.050.000**							**50.000.000**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**50.000.000**	**12.650.000**	**4.050.000**							**50.000.000**	
34	**2.10.10..**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase sertifikat aset tanah dan bangunan pemko**	**70 %**		**NA %**	**40 %**	**40 %**	**50.000.000**	**12.650.000**	**4.050.000**							**50.000.000**	
	2.10.10.2.01.	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sertifikat infrastruktur ke-PU an yang diterbitkan Jumlah sertifikat infrastruktur kePUan yang diterbitkan**	**315 sertifikat**		**48 sertifikat**	**0 Sertifikat 50 Sertifikat**	**50 sertifikat**	**50.000.000**	**12.650.000**	**4.050.000**			-	-	-		**50.000.000**	**PUPR**
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	6 Laporan		1 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	50.000.000	12.650.000	4.050.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Bukit Surungan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000	PUPR

BAB IV
PENUTUP

Pada dasarnya perubahan Renja Dinas PUPR Kota Padang Panjang Tahun 2025 dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan fungsi Dinas PUPR Kota Padang Panjang pada urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Perubahan Renja Dinas PUPR Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini telah disusun dengan merujuk pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025, yang telah disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan Program Kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan agar seluruh isu dan permasalahan Kota Padang Panjang secara umum dapat diselesaikan dan seluruh target yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik.

Untuk itu, besar harapan kami agar Perubahan Renja Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya pelayanan prima di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Juni 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehinggga Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat disusun. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan suatu bentuk tanggungjawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang untuk melaksanakan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan acuan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahunan yang merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan serta rumusan indikator kinerja yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan dan terukur secara kuantitatif. Dengan demikian pelaksanaan Program kegiatan yang selama ini berorientasi pada indikator kinerja output dan realisasi keuangan sudah lebih diarahkan kepada pencapaian-pencapaian target kinerja hasil yang terukur dan mempunyai dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya besar harapan Kami penyusunan Rencana Kerja ini bisa bermanfaat sebagai acuan bagi seluruh Aparatur Dinas dalam melaksanakan tugas-tugas pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Padang Panjang, Juni 2025

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

ALVI SENA, ST. MT

NIP. 19750825 2002121 004

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II 6

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 s.d Triwulan I 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 21

Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang 21

2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025 24

2.4 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat 38

2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 39

BAB III 43

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 43

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi 43

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 43

3.1.2 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 44

3.1.3 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025 46

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang 49

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 50

BAB IV 65

PENUTUP 65

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang s/d Triwulan I Tahun 2025 7
Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 23
Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kota Padang Panjang 25
Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang Tahun 2025 38
Tabel 2. 5 Pemetaan Permasalahan Renstra 2025-2029..... 40

Tabel 3. 1 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat..... 45
Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025..... 47
Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025..... 50
Tabel 3. 4 Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang 55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Perubahan Renja (Rencana Kerja) diperlukan karena adanya perubahan atau penyesuaian terhadap rencana kerja awal yang telah disusun. Hal ini terjadi karena berbagai faktor seperti perubahan kondisi, kebijakan baru atau munculnya kebutuhan baru yang belum tercover dalam rencana awal. Beberapa faktor Perubahan Renja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah:

1. Adanya refocusing anggaran dalam rangka melaksanakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

2. Mengakomodir kegiatan yang termasuk kedalam Program Unggulan Kepala Daerah terpilih 2025-2029.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun kedua perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang yang berpedoman pada RPD 2024-2026. Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta sejalan dengan tujuan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu "Terwujudnya Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang berkualitas" serta "Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan"

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006)
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembar Daerah tahun 2013 Nomor 08);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kota Padang panjang tahun 2019 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Kota Padang panjang tahun 2024 Nomor 4);
28. Peraturan Wali Kota Nomor 29 tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Padang Panjang delam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah Rumah tangga (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 29);
29. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6)
30. Peraturan Wali kota No 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 5)
31. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 9);
32. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 45).
33. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 105 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025.
2. Sebagai salah satu dokumen acuan dalam penyusunan perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Perumahan, Kawsan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I **Pendahuluan**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II **Hasil Evaluasi Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025**

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja s/d triwulan I Tahun 2025 serta keterkaitan dengan pencapaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

Bab III **Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup**

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta program, kegiatan dan sub kegiatan.

Bab IV **Penutup**

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 s.d Triwulan I

Evaluasi Renja Tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada prinsipnya merupakan evaluasi untuk melihat tingkat capaian target sampai dengan Triwulan I program dan kegiatan Tahun 2025 yang telah direalisasikan, apakah memenuhi target atau tidak, serta faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat capaian tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diputuskan apakah program kegiatan dimaksud perlu dilakukan perubahan/penyesuaian, baik dalam bentuk kegiatan, target dan anggaran yang dibutuhkan. Selanjutnya perlu diperhitungkan apakah kebutuhan tersebut dapat terpenuhi oleh kemampuan keuangan daerah yang ada saat ini. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun berkenaan dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang s/d Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2. 1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang s/d Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Iindikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13=(6+12)		14=(13/5*100%)		15
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			**45.072.024.928**		**28.988.237.175,00**		**27.186.922.319**		**3.929.768.339**								**3.929.768.339**		**32.918.005.514**		**73%**	
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			**19.666.913.105**		**15.021.916.288**		**13.156.855.777**		**1.742.965.634**								**1.742.965.634**		**16.764.881.922**		**85%**	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup**	**90%**	**17.865.567.265**		**7.747.048.145**	**90%**	**7.409.333.081**	**22%**	**1.697.658.012**							**90%**	**1.697.658.012**		**9.444.706.157**		**53%**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu**	**100 persen**	**14.120.714.185**	**100 persen**	**6.286.406.537**	**100 persen**	**5.856.711.547**	**25 persen**	**1.505.234.765**							**25 persen**	**1.505.234.765**		**7.791.641.302**		**55%**	Dinas PerkimLH
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2016 **Orang** /bulan	14.120.714.185	658 Orang / bulan	6.286.406.537	658 Orang bulan	5.856.711.547	188 Orang /bulan	1.505.234.765							188 Orang /bulan	1.505.234.765		7.791.641.302		55%	Dinas PerkimLH
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**23.000.000**	**100 persen**	**23.500.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**23.500.000**		**102%**	Dinas PerkimLH
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket	23.000.000	47 Paket	23.500.000		-		-		-		-		-		-		23.500.000		102%	Dinas PerkimLH
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**90 persen**	**905.107.500**	**90 persen**	**515.247.389**	**90 persen**	**479.642.034**	**25 persen**	**46.087.283**							**25 persen**	**46.087.283**		**561.334.672**		**62%**	Dinas PerkimLH
		Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	24 Paket	32.257.500	21 Paket	7.308.300	8 Paket	8.632.700	0 Paket	-		-		-		-	0 Paket	-		7.308.300		23%	Dinas PerkimLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13=(6+12)		14=(13/5*100%)		15
		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan																					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	265.650.000	60 Paket	69.595.745	14 Paket	82.782.684	3 Paket	10.712.200		-		-		-	3 Paket	10.712.200		80.307.945		30%	Dinas PerkimLH
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket	37.950.000	15 Paket	17.623.650	24 Paket	21.372.650	6 Paket	2.565.950		-		-		-	6 Paket	2.565.950		20.189.600		53%	Dinas PerkimLH
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	569.250.000	1 Laporan	420.719.694	24 Laporan	366.854.000	6 Laporan	32.809.133		-		-		-	6 Laporan	32.809.133		453.528.827		80%	Dinas PerkimLH
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan**	**90** persen	**588.343.180**	**90** persen	**133.575.000**	**90** persen	**118.483.400**	**0** persen	**-**							**0** persen	**-**		**133.575.000**		**23%**	Dinas PerkimLH
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	100.000.000		-		-		-		-		-		-		-		-		0%	Dinas PerkimLH
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	298.343.180		-		-		-		-		-		-		-		-		0%	Dinas PerkimLH
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	90.000.000	3 Unit	133.575.000	7 Unit	118.483.400	0 Unit	-							0 Unit	-		133.575.000		148%	Dinas PerkimLH
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	100.000.000		-		-		-		-		-		-		-		-		0%	Dinas PerkimLH
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**90 persen**	**1.534.116.000**	**90 persen**	**555.244.426**	**90 persen**	**629.065.100**	**25 persen**	**119.146.964**		**-**		**-**		**-**	**25 persen**	**119.146.964**		**674.391.390**		**81%**	Dinas PerkimLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I						II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13=(6+12)		14=(13/5*100%)		15
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan	154.596.000	1 Laporan	42.362.979	60 Laporan	60.587.500	15 Laporan	13.681.603		-		-		-	15 Laporan	13.681.603		56.044.582		36%	Dinas PerkimLH
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	1.379.520.000	1 Laporan	512.881.447	24 Laporan	568.477.600	6 Laporan	105.465.361		-		-		-	6 Laporan	105.465.361		618.346.808		45%	Dinas PerkimLH
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**90 persen**	**694.286.400**	**90 persen**	**233.074.793**	**95 persen**	**325.431.000**	**25 persen**	**27.189.000**							**25 persen**	**27.189.000**		**260.263.793**		**37%**	Dinas PerkimLH
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	34.286.400	1 Unit	28.310.400	1 Unit	41.690.000	1 Unit	3.690.900							1 Unit	3.690.900		32.001.300		93%	Dinas PerkimLH
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	300.000.000	12 Unit	121.124.800	14 Unit	173.525.000	14 Unit	22.506.700							14 Unit	22.506.700		143.631.500		48%	Dinas PerkimLH
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	60.000.000	5 Unit	9.500.660	65 Unit	35.320.000	4 Unit	991.400							4 Unit	991.400		10.492.060		17%	Dinas PerkimLH
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	300.000.000	2 Unit	74.138.933	3 Unit	74.896.000	0 Unit	-							0 Unit	-		74.138.933		25%	Dinas PerkimLH
	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani**	**100,00%**	**901.305.840**		**435.172.992**	**100,00%**	**438.265.500**	**25%**	**45.307.622**							**25%**	**45.307.622**		**480.480.614**		**53%**	

No	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13=(6+12)		14=(13/5*100%)		15
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah**	**6 dokumen**	**30.000.000**		**-**	**2 dokumen**	**51.723.450**	**0 dokumen**	**-**							**0 dokumen**	**-**		**-**		**0%**	Dinas PerkimLH
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	3 Dokumen	15.000.000		-		-		-								-		-		0%	Dinas PerkimLH
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	3 Dokumen	15.000.000		-	1 Dokumen	51.723.450	0 Dokumen	-							0 Dokumen	-		-		0%	Dinas PerkimLH
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah**	**12 Unit**	**270.000.000**		**-**	**4 Unit**	**43.030.000**	**0 Unit Rumah**	**-**							**0 Unit Rumah**	**-**		**-**		**0%**	Dinas PerkimLH
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	6 Unit Rumah	120.000.000		-	2 Unit Rumah	43.030.000	0 Unit Rumah	-							0 Unit Rumah	-		-		0%	Dinas PerkimLH
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	6 Unit Rumah	150.000.000		-		-		-								-		-		0%	Dinas PerkimLH
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	**Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun**	**3 Laporan**	**601.305.840**	**1 Dokumen**	**435.172.992**	**1 Dokumen**	**343.512.050**	**0 Dokumen**	**45.307.622**							**0 Dokumen**	**45.307.622**		**480.480.614**		**80%**	Dinas PerkimLH
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3 Laporan	601.305.840	1 Laporan	435.172.992	1 Laporan	343.512.050	0 Laporan	45.307.622							0 Laporan	45.307.622		480.480.614		80%	Dinas PerkimLH
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Persentase pengurangan kawasan kumuh**	**100,00%**	**405.000.000**	**95,52 %**	**81.462.350**		**-**		**-**								**-**		**81.462.350**		**20%**	
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan	**Jumlah dokumen kebijakan**	**1 Dokumen**	**75.000.000**	**1 Dokumen**	**81.462.350**		**-**		**-**								-		**81.462.350**		**109%**	Dinas PerkimLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13=(6+12)		14=(13/5*100%)		15
		Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**kawasan kumuh yang tersedia**																					
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	81.462.350		-		-								-		81.462.350		163%	Dinas PerkimLH
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	25.000.000		-		-		-								-		-		0%	Dinas PerkimLH
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh**	**3 laporan**	**330.000.000**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**0%**	Dinas PerkimLH
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	3 Laporan	330.000.000		-		-		-								-		-		0%	Dinas PerkimLH
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik**	**87.98 %**	**495.040.000**		**6.758.232.801**	**87.11 %**	**5.309.257.196**	**0,00%**	**-**							**0,00%**	**-**		**6.758.232.801**		**1365 %**	
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menuunjang fungsi hunian**	**6 kecamatan**	**495.040.000**	**2 kecamatan**	**6.758.232.801**	**2 kecamatan**	**5.309.257.196**	**0 kecamatan**	**-**							**0 kecamatan**	**-**		**6.758.232.801**		1365 %	Dinas PerkimLH
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	6 Lokasi	495.040.000	2 Lokasi	6.758.232.801	2 Lokasi	5.309.257.196	0 Lokasi	-							0 Lokasi	-		6.758.232.801		1365 %	Dinas PerkimLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13=(6+12)		14=(13/5*100%)		15
	Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**97,90 %**	**150.000.000**	**92,25 %**	**3.001.712.900**	**97,26 %**	**2.678.231.920**	**0,00%**	**-**							**0,00%**	**-**		**3.001.712.900**		**2001 %**	
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab**	**210 Unit Rumah**	**150.000.000**	**144 unit rumah**	**3.001.712.900**	**70 Unit Rumah**	**2.678.231.920**	**0 unit**	**-**							**0 unit**	**-**		**3.001.712.900**		2001 %	Dinas PerkimLH
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	210 Unit Rumah	150.000.000	144 unit rumah	3.001.712.900	70 Unit Rumah	2.678.231.920	0 Unit Rumah	-							0 Unit Rumah	-		3.001.712.900		2001 %	Dinas PerkimLH
	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase dokumen perencanaan lingkungan**	**100,00%**	**350.000.000**	**100,00%**	**116.392.730**	**100,00%**	**221.840.500**		**-**		**-**		**-**		**-**		**-**		**116.392.730**		**33%**	
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen KLHS yang disusun**	**3 dokumen**	**350.000.000**	**1 Dokumen**	**116.392.730**	**1 Dokumen**	**221.840.500**	**0 Dokumen**	**-**							**0 Dokumen**	**-**		**116.392.730**		**33%**	Dinas PerkimLH
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	116.392.730		-		-								-		116.392.730		83%	Dinas PerkimLH
		Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	1 Dokumen	210.000.000		-	1 Dokumen	221.840.500	0 Dokumen	-							0 Dokumen	-		-		0%	Dinas PerkimLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13=(6+12)		14=(13/5*100%)		15
			Kabupaten/Kota yang Disusun																					
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	**Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup**	**100,00 %**	**1.036.592.120**	**100,00%**	**357.068.145**	**100,00%**	**474.432.800**	**25,00 %**	**48.923.335**							**25,00 %**	**48.923.335**		**405.991.480**		**39%**	
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	**Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan**	**2 jenis**	**966.592.120**	**2 jenis**	**337.379.345**	**2 jenis**	**444.433.000**	**2 jenis**	**48.923.335**							**2 jenis**	**48.923.335**		**386.302.680**		**40%**	Dinas PerkimLH
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	16.010.300	1 Dokumen	8.468.550		-		-								-		8.468.550		53%	Dinas PerkimLH
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	2 Dokumen	50.000.000		-		-		-								-		-		0%	Dinas PerkimLH
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	98.989.700	1 Dokumen	15.072.945	1 Dokumen	29.990.000	0 Dokumen	1.250.550							0 Dokumen	1.250.550		16.323.495		16%	Dinas PerkimLH
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	6 Dokumen	801.592.120	2 Dokumen	313.837.850	2 Dokumen	414.443.000	1 Dokumen	47.672.785							1 Dokumen	47.672.785		361.510.635		45%	UPTD Laboratorium LH
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	**Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan**	**1 jenis**	**70.000.000**	**1 jenis**	**19.688.800**	**1 jenis**	**29.999.800**	**0 jenis**	**-**							**0 jenis**	**-**		**19.688.800**		**28%**	Dinas PerkimLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13=(6+12)		14=(13/5*100%)		15
		Hidup Kabupaten/Kota	**lingkungan hidup yang dilakukan**																					
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten Kota yang Dilaksanakan	12 Laporan	70.000.000	4 Laporan	19.688.800	4 Laporan	29.999.800	0 Laporan	-							0 Laporan	-		19.688.800		28%	Dinas PerkimLH
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	**Persentase luas RTH Publik**	**4,23%**	**5.339.634.303**	**4,19%**	**1.999.651.732**	**4,23%**	**2.000.506.370**		**348.152.627**								**348.152.627**		**2.347.804.359**		**44%**	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	**Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola**	**2 kecamatan**	**5.339.634.303**	**2 kecamatan**	**1.999.651.732**	**2 kecamatan**	**2.000.506.370**	**2 kecamatan**	**348.152.627**							**2 kecamatan**	**348.152.627**		**2.347.804.359**		**44%**	Dinas PerkimLH
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	159 Ha	5.279.634.303	53 Ha	1.975.310.537	53 Ha	2.000.506.370	53 Ha	348.152.627							53 Ha	348.152.627		2.323.463.164		44%	Dinas PerkimLH
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	120 Orang	60.000.000	40 orang	24.341.195		-		-								-		24.341.195		41%	Dinas PerkimLH
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3**	**35,00 %**	**125.000.000**	**32,00 %**	**15.782.375**	**32,00 %**	**31.197.760**	**0,00%**	**-**							**0,00%**	**-**		**15.782.375**		**13%**	
		Penyimpanan sementara Limbah B3	**Jumlah penghasil limbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan**	**74 fasyankes**	**50.000.000**	**24 fasyankes**	**7.432.500**	**24 fasyankes**	**14.791.310**	**0 fasyankes**	**-**							**0 fasyankes**	**-**		**7.432.500**		**15%**	Dinas PerkimLH
		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen	3 Laporan	50.000.000	1 Laporan	7.432.500	1 Laporan	14.791.310	0 Laporan	-							0 Laporan	-		7.432.500		15%	Dinas PerkimLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13=(6+12)		14=(13/5*100%)		15
		Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3																					
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3**	**6 kali**	**75.000.000**	**2 kali**	**8.349.875**	**2 kali**	**16.406.450**	**0 kali**	**-**							**0 kali**	**-**		**8.349.875**		**11%**	Dinas PerkimLH
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	3 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	8.349.875	1 Dokumen	16.406.450	0 Dokumen	-							0 Dokumen	-		8.349.875		11%	Dinas PerkimLH
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	**Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan**	**65,00 %**	**90.000.000**	**55,17 %**	**16.738.805**	**60,00 %**	**22.543.250**	**0,00%**	**-**							**0,00%**	**-**		**16.738.805**		**19%**	
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH	**Persentase usaha/kegiatan yang diawasi**	**100 persen**	**90.000.000**	**100 persen**	**16.738.805**	**100 persen**	**22.543.250**	**6 persen**	**-**							**6 persen**	**-**		**16.738.805**		**19%**	Dinas PerkimLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13=(6+12)		14=(13/5*100%)		15
		Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																						
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	105 Badan Usaha	90.000.000	35 Badan Usaha	16.738.805	35 Badan Usaha	22.543.250	2 Badan Usaha	-							2 Badan Usaha	-		16.738.805		19%	Dinas PerkimLH
		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	11 Orang	-		-		-		-								-		-		0%	Dinas PerkimLH
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	**Persentase Cakupan Fasilitasi MHA terkait PPLH**	**100,00%**	**100.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**		**0%**	
		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	**Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional da hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH**	**3 dokumen**	**60.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**		**0%**	Dinas PerkimLH
		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data	3 Dokumen	60.000.000		-		-		-								-		-		0%	Dinas PerkimLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13=(6+12)		14=(13/5*100%)		15
		Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																					
		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	**Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan**	**2 dokumen**	**40.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**		**0%**		Dinas PerkimLH
		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	2 Dokumen	40.000.000		-		-		-								-		-		0%		Dinas PerkimLH
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**100,00%**	**240.000.000**	**100,00%**	**131.700.525**	**100,00%**	**154.416.800**	**25,00%**	**2.663.050**							**25,00%**	**2.663.050**		**134.363.575**		**56%**		
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	**Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan**	**9 jenis kegiatan**	**240.000.000**	**3 jenis kegiatan**	**131.700.525**	**3 jenis kegiatan**	**154.416.800**	**1 jenis kegiatan**	**2.663.050**							**1 jenis kegiatan**	**2.663.050**		**134.363.575**		**56%**		Dinas PerkimLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13=(6+12)		14=(13/5*100%)		15
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana**																					
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	9 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	11.352.825	3 Dokumen	19.999.850	0 Dokumen	-							0 Dokumen	-		11.352.825		16%	Dinas PerkimLH
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	48 Orang	50.000.000	16 Orang	9.827.600	16 Orang	9.999.400	0 Orang	-							0 Orang	-		9.827.600		20%	Dinas PerkimLH
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 Lembaga	120.000.000	1 Lembaga	110.520.100	1 Lembaga	124.417.550	1 Lembaga	2.663.050							1 Lembaga	2.663.050		113.183.150		94%	Dinas PerkimLH
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	**Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**3 Jenis**	**122.400.000**	**1 Jenis**	**70.875.750**	**1 Jenis**	**93.300.000**	**1 Jenis**	**-**							**1 Jenis**	**-**		**70.875.750**		**58%**	
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha /dunia pendidikan /filantropi yang dinilai kinerjanya**	**3 kelompok**	**122.400.000**	**1 kelompok**	**70.875.750**	**1 kelompok**	**93.300.000**	**1 kelompok**	**-**							**1 kelompok**	**-**		**70.875.750**		**58%**	Dinas PerkimLH
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha /Dunia Pendidikan /Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	3 Entitas	122.400.000	1 Entitas	70.875.750	1 Entitas	93.300.000	1 Entitas	-							1 Entitas	-		70.875.750		58%	Dinas PerkimLH
		PROGRAM PENANGANAN	**Persentase pengaduan**	**100,00%**	**135.000.000**	**100,00%**	**427.000**	**100,00%**	**12.679.950**	**20,00%**	**323.820**							**20,00%**	**323.820**		**750.820**		**1%**	

No	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13=(6+12)		14=(13/5*100%)		15
		PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	**masyarakat terhadap PPLH yang tertangani**																					
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)**	**15 dokumen**	**135.000.000**	**3 dokumen**	**427.000**	**5 dokumen**	**12.679.950**	**1 dokumen**	**323.820**							**1 dokumen**	**323.820**		**750.820**		**1%**	Dinas PerkimLH
		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	15 Dokumen	60.000.000	3 Pengaduan	427.000	5 Pengaduan	12.679.950	1 Pengaduan	323.820							1 Pengaduan	323.820		750.820		1%	Dinas PerkimLH
		Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	15 Dokumen	75.000.000		-		-		-								-		-		0%	Dinas PerkimLH
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	**Persentase** pengelolaan **sampah**	**98,00 %**	**17.716.485.400**	**99,19 %**	**8.255.970.925**	**98,00 %**	**8.340.917.192**		**1.786.739.873**								**1.786.**739.**873**		**10.042.710.798**		**57%**	
		Pengelolaan Sampah	**Persentase** penanganan **sampah**	**78 persen**	**17.651.485.400**	**81,32 persen**	**8.255.970.925**	**79 persen**	**8.340.917.192**	**persen**	**1.786.739.873**							**persen**	**1.786.739.873**		**10.042.710.798**		**57%**	Dinas PerkimLH
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	21 Kelompok	60.000.000	7 Kelompok	35.118.935	7 Kelompok	45.202.500	0 Kelompok	-							0 **Kelompok**	-		35.118.935		59%	Dinas PerkimLH
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk	3 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	8.750.595		-		-								-		8.750.595		9%	Dinas PerkimLH

No	Sasaran	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13=(6+12)		14=(13/5*100%)		15
			Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada																					
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	67 Unit	2.950.000.000	22 Unit	2.223.900.616	22 Unit	2.487.731.452	22 Unit	472.448.724							22 Unit	472.448.724		2.696.349.340		91%	Dinas PerkimLH
		Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15000 - 20000 Ton	14.541.485.400	15000 - 20000 Ton	5.988.200.779	15000 - 20000 Ton	5.807.983.240	3722,94 Ton	1.314.291.149							3722,94 Ton	1.314.291.149		7.302.491.928		50%	Dinas PerkimLH
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	**Jumlah pihak swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi**	**3 pihak swasta**	**65.000.000**		**-**		**-**		**-**								**-**		**-**		**0%**	Dinas PerkimLH
		Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	3 Laporan	65.000.000		-		-		-								-		-		0%	Dinas PerkimLH
					45.072.024.928		**28.988.237.175**		**27.186.922.319**		**3.929.768.339**		**-**		**-**		**-**		**3.929.768.339**		**32.918.005.514**			
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA %																							
	PREDIKET KINERJA									**14,45%**	**3.929.768.339**							**14,45%**	**3.929.768.339**					

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa Sub Kegiatan yang belum terlaksana sesuai dengan target, diantaranya :

1. Pengadan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, belum dilaksananakan karena memenuhi amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
2. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota, belum bisa dilaksanakan karena belum adanya bencana sesuai dengan juknis pelaksanaan kegiatan. Pada perubahan renja terdapat refocusing anggaran.
3. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana, belum bisa dilaksanakan karena belum adanya bencana sesuai dengan juknis pelaksanaan kegiatan.
4. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, belum bisa dilaksanakan karena KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) mengkaji Kebijakan, Rencana dan Program dari dokumen RDTR yamg disusun oleh Dinas PUPR. Namun sampai saat ini dokumen RDTR tersebut belum disusun oleh Dinas PUPR karena revisi RTRW belum disahkan.
5. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup, belum bisa dilaksanakan karena anggaran di refocusing dan kegiatan dihilangkan.
6. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup, belum bisa dilaksanakan karena anggaran di refocusing dan kegiatan dihilangkan.

Tabel diatas juga menggambarkan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, sampai dengan triwulan I Tahun 2025. Untuk indikator Sasaran dan Program, sebagian besar baru dapat dihitung pada akhir Tahun 2025, sementara untuk indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah mulai dilakukan pada triwulan I namun sebagian besar baru akan terealisasi sepenuhnya pada triwulan II, III dan IV.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup kota Padang Panjang adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

Ditinjau dari jenis urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, terdapat dua urusan wajib yaitu urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan lingkungan hidup. Urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan wajib dengan kategori pelayanan dasar. Pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh suatu kabupaten/kota pada urusan ini terdiri dari dua bidang yaitu bidang perumahan rakyat dan bidang pekerjaan umum.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan minimal di Bidang Perumahan Rakyat adalah:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Masing-masing pelayanan diatas harus dilaksanakan setiap tahunnya dengan target capaian 100% per tahun.

Pembiayaan untuk pelaksanaan SPM diatas telah diakomodir melalui Renstra Dinas Perkim LH Tahun 2024-2026 dan Rancangan Awal Renja setiap tahunnya. Untuk Tahun 2025 sesuai dengan Renstra 2024-2026 diusulkan 1 Program, 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan untuk memfasilitasi pelaksanaan SPM. Sub Kegiatan tersebut berupa Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencan dan Rehab rumah bagi korban bencana.

Sementara itu untuk kinerja pelayanan urusan lingkungan hidup, tidak ada ketentuan pelaksanaan SPM tertentu semenjak Tahun 2014. Namun layanan informasi kualitas lingkungan sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM sebelumnya tetap disediakan melalui berbagai kegiatan terkait.

Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

(berdasarkan Renstra 2024-2026)

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian (Tahun)	Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	Presentase permukiman layak huni	√	√	98,80%	99,52%	100%	99,48%	99,52%	100%	
a.	Persentase pengurangan kawasan kumuh			89,36%	95,74%	100%	95,52%	95,74%	100%	
b.	Presentase Ketersediaan PSU Kawasan Permukiman dalam Kondisi baik			86,24%	87,11%	87,98%	79,31%	87,11%	87,98%	
c.	Presentase rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Persentase Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup yang dilakukan		√	85%	90%	90%	85%	90%	90%	
a.	Presentase dokumen perencanan lingkungan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
b.	Presentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
c.	Presentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan			55%	60%	65%	55,17%	60%	65%	
d.	Persentase cakupan fasilitasi MHA tekait PPLH (Pendataan pendampingan)			50%	100%	100%	0%	0%	0%	
e.	Persentase penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat			100%	100%	100%	100%	0%	100%	
f.	Jumlah Jenis Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat			1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	
g.	Persentase kegiatan pencegahan penggulangan pencemaran dan garing atau kerusakan lingkungan hidup			100%	100%	100%	100%	100%	100%	
h.	Persentase luas RTH Publik			4,23%	4,23%	4,23%	4,19%	4,23%	4,23%	
i.	Persentase Pembinaan/Verifikasi Lapangan Terhadap Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan pengmpulan limbah B3			32%	32%	35%	32%	32%	32%	
j.	Persentase Penggelolaan Sampah			98%	98%	98%	99,19%	98%	98%	
3.	Presentase permukiman layak huni	√	√	98,80%	99,52%	100%	99,48%	99,52%	100%	
a.	Persentase Rumah Layak Huni			96,62%	97,26%	97,90%	92,25%	97,26%	97,90%	

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang tahun 2024 dan proyeksi target dua tahun berikutnya. Capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang tahun 2024 pada umumnya telah memenuhi target. Namun pada Triwulan I Tahun 2025 pada umumnya semua indikator belum memenuhi target karena penundaan beberapa kegiatan akibat refocusing dan penundaan belanja memenuhi amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025

Pada awal Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 terdiri dari 13 program, 21 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 27.186.922.319,-. Sedangkan pada Renja Perubahan Tahun 2025 ini terdiri dari 13 Program, 21 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 26.632.345.834,-. Sehingga terdapat pengurangan anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sebesar Rp. 554.576.485,-.

Pengurangan ini untuk mengakomodir Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada Renja Perubahan 2025 ini terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang direkofusing yaitu:

1. Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup;
2. Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup.

Untuk lebih jelasnya perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2. 3 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kota Padang Panjang

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				**14.857.561.416**	**27.186.922.319**				**27.186.922.319**	**26.632.345.834**	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi**	90%	**5.830.422.195**	**7.409.333.081**		**Persentase pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi**	90%	**7.409.333.081**	**7.013.006.956**	
1	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		***Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu***	100%	**4.707.571.395**	**5.856.711.547**		***Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu***	100%	**5.856.711.547**	**5.856.711.547**	
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang	4.707.571.395	5.856.711.547	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	658 orang	5.856.711.547	5.856.711.547	
2	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		**Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**-**	**-**		**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	**0%**	**-**	**-**	
1)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 orang	-	-	Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0%	-	-	
3	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		***Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran***	90%	**310.050.000**	**479.642.034**		***Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran***	90%	**479.642.034**	**193.220.109**	
1)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	91.000.000	82.782.684	Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 paket	82.782.684	37.301.959	
2)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	11.050.000	8.632.700	Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8.632.700	5.463.200	
3)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	13.000.000	21.372.650	Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 paket	21.372.650	11.216.950	
4)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	24 Laporan	195.000.000	366.854.000	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	24 laporan	366.854.000	139.238.000	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
4	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur***	90%	**70.000.000**	**118.483.400**		***Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur***	90%	**118.483.400**	**64.011.200**	
1)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.000.000	118.483.400	Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	118.483.400	64.011.200	
2)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	50.000.000							
5	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah***	90%	**511.372.000**	**629.065.100**		***Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah***	90%	**629.065.100**	**613.065.100**	
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	51.532.000	60.587.500	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	60.587.500	60.587.500	
2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	459.840.000	568.477.600	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	568.477.600	552.477.600	
6	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		***Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah***	90%	**231.428.800**	**325.431.000**		***Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah***	95%	**325.431.000**	**285.999.000**	
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	11.428.800	41.690.000	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	41.690.000	41.690.000	
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	100.000.000	173.525.000	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	173.525.000	173.525.000	
3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 jenis	20.000.000	35.320.000	Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 unit	35.320.000	35.320.000	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Catatan Penting
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	100.000.000	74.896.000	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	74.896.000	35.464.000	
II	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		**Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani**	**100%**	**300.435.280**	**438.265.500**		**Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani**	**100%**	**438.265.500**	**355.287.830**	
1	***Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program***		**Jumlah data penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program**	**2 dokumen**	**10.000.000**	**51.723.450**		**Jumlah data penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program**	**2 dokumen**	**51.723.450**	**51.723.450**	
1)	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 dokumen	5.000.000	-	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus		-	-	
2)	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Data Rumah di lokasi rawan Bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	5.000.000	51.723.450	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Data Rumah di lokasi rawan Bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	51.723.450	51.723.450	
2	***Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota***		**Jumlah rumah korban bencana dan terkena reloksi program pemerintah**	**4 unit**	**90.000.000**	**43.030.000**		**Jumlah rumah korban bencana dan terkena reloksi program pemerintah**	**4 unit**	**43.030.000**	**2.508.000**	
1)	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Padang Panjang	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 unit	40.000.000	43.030.000	Padang Panjang	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 unit rumah	43.030.000	2.508.000	
2)	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 unit	50.000.000	-	Padang Panjang	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun		-	-	
3	***Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus***		**Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi**	**1 dokumen**	**200.435.280**	**343.512.050**		**Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi**	**1 dokumen**	**343.512.050**	**301.056.380**	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025							Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Catatan Penting
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Pemilik/Penghuni RumahSusun					**Pemilik/Penghuni RumahSusun**				
1)	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 dokumen	200.435.280	343.512.050	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 laporan	343.512.050	301.056.380	
III	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		**Persentase pengurangan kawasan kumuh**	**89,36**	**110.000.000**	**-**		**Persentase pengurangan kawasan kumuh**		**-**	**-**	
1	***Penataan dan Peningkatan Kulaitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha***		**Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia**	**2 dokumen**	**-**	**-**		**Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia**		**-**	**-**	
1)	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi			-	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi		-	-	
2)	Survei dan penetapan lokasi Perumahan dan permukiman kumuh	Padang Panjang	Jumlah hasil survey dan penetapan lokasi Perumahan dan permukiman kumuh			-	Padang Panjang	Jumlah hasil survey dan penetapan lokasi Perumahan dan permukiman kumuh		-	-	
2	***Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha***		**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh**	1 laporan	**110.000.000**	**-**		**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh**		**-**	**-**	
1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 laporan	110.000.000	-	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		-	-	
IV	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**		**Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard**	**69,85**	**200.000.000**	**5.309.257.196**		**Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard**	**87,11%**	**5.309.257.196**	**5.880.575.196**	
1	***Penyelenggaraan PSU Permukiman***		**Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan**	**2 kecamatan**	**200.000.000**	**5.309.257.196**		**Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana,**	**2 kecamatan**	**5.309.257.196**	**5.880.575.196**	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Catatan Penting
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian					**Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian**				
1)	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi	200.000.000	5.309.257.196	Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 lokasi	5.309.257.196	5.880.575.196	
V	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**	Padang Panjang	Persentase Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	16,91	**50.000.000**	**2.678.231.920**	Padang Panjang	Persentase Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	**97,26%**	**2.678.231.920**	**2.567.765.960**	
1	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**	**70 unit**	**50.000.000**	**2.678.231.920**		**Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**	**70 unit rumah**	**2.678.231.920**	**2.567.765.960**	
1)	Perbaikan Rumah tidak layak huni untuk Pecegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 Ha	Padang Panjang	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	70 unit	50.000.000	2.678.231.920	Padang Panjang	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	70 unit rumah	2.678.231.920	2.567.765.960	
VI	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase dokumen perencanaan lingkungan**	**100%**	**70.000.000**	**221.840.500**		**Persentase dokumen perencanaan lingkungan**	**100%**	**221.840.500**	**66.067.400**	
1	***Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota***		**Jumlah dokumen KLHS yang disusun**	**2 dokumen**	**70.000.000**	**221.840.500**		**Jumlah dokumen KLHS yang disusun**	**1 dokumen**	**221.840.500**	**66.067.400**	
1)	Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Padang Panjang	Jumlah dokumen KLHS RDTR yang disusun	1 dokumen	70.000.000	221.840.500	Padang Panjang	Jumlah dokumen KLHS RDTR yang disusun	1 dokumen	221.840.500	66.067.400	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Catatan Penting
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2)	Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Padang Panjang	Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang disusun			-	Padang Panjang	Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang disusun		-	-	
VII	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani**	**100%**	**45.000.000**	**12.679.950**		**Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani**	**100%**	**12.679.950**	**8.536.700**	
1	***Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota***		**Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**5 dokumen**	**45.000.000**	**12.679.950**		**Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**5 dokumen**	**12.679.950**	**8.536.700**	
1)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)	5 Dokumen	20.000.000	12.679.950	Padang Panjang	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)	5 dokumen	12.679.950	8.536.700	
2)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan			-	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan		-	-	
3)	Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Padang Panjang	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan/kota	5 Dokumen	25.000.000	-	Padang Panjang	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan/kota		-	-	
VIII	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		**Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan**	**55%**	**60.000.000**	**22.543.250**		**Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan**	**60%**	**22.543.250**	**17.987.420**	
1	***Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh***		**Persentase usaha/kegiatan yang diawasi**	**100%**	**60.000.000**	**22.543.250**		**Persentase usaha/kegiatan yang diawasi**	**100%**	**22.543.250**	**17.987.420**	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Catatan Penting
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
1)	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Padang Panjang	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsinal PPLHD	4 Orang	30.000.000	-	Padang Panjang	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsinal PPLHD		-	-	
2)	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35 Badan Usaha	30.000.000	22.543.250	Padang Panjang	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35 badan usaha	22.543.250	17.987.420	
3)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH			-	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	5 dokumen	-	-	
IX	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**		**Jumlah jenis koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan MHA**	**3 jenis**	**40.000.000**	**-**		**Jumlah jenis koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan MHA**		**-**	**-**	
1	***Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH***		**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)**	**1 Dokumen**	**20.000.000**	**-**		**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)**		**-**	**-**	
1)	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	1 Dokumen	20.000.000	-	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,		-	-	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025							Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH		Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)					Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)				
2	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**		**Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan**	**1 dokumen**	**20.000.000**							
1)	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH		Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	20.000.000							
X	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**100**	**70.000.000**	**154.416.800**		**Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**100**	**154.416.800**	**117.395.900**	
1	***Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota***		**Jumlah jenis Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota yang terlaksana**	**3 jenis kegiatan**	**70.000.000**	**154.416.800**		**Jumlah jenis Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota yang terlaksana**	**3 jenis kegiatan**	**154.416.800**	**117.395.900**	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025							Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1)	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Padang Panjang	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH (Lembaga)	1 kelompok masyarakat	40.000.000	124.417.550	Padang Panjang	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH (Lembaga)	1 lembaga	124.417.550	117.395.900	
2)	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Padang Panjang	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	3 Dokumen	20.000.000	19.999.850	Padang Panjang	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	3 dokumen	19.999.850	-	
3)	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Padang Panjang	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	16 Orang	10.000.000	9.999.400	Padang Panjang	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	16 orang	9.999.400	-	
XI	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**1 jenis**	**40.800.000**	**93.300.000**		**Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat**	**1 jenis**	**93.300.000**	**78.454.650**	
1	***Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***		**Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerja**	**1 kelompok**	**40.800.000**	**93.300.000**		**Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerja**	**1 kelompok**	**93.300.000**	**78.454.650**	
1)	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Padang Panjang	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerja	1 kelompok	40.800.000	93.300.000	Padang Panjang	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerja	1 entitas	93.300.000	78.454.650	
XII	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**		**Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**100%**	**338.864.040**	**474.432.800**		**Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**100%**	**474.432.800**	**474.432.800**	
1	***Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***		***Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara, tanah yang dilakukan***	**2 jenis**	**308.864.040**	**444.433.000**		***Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara, tanah yang dilakukan***	**2 jenis**	**444.433.000**	**444.433.000**	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025							Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Catatan Penting
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara,dan Laut	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	25.000.000	-	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		-	-	
2)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	30.000.000	29.990.000	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	29.990.000	29.990.000	
3)	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 Dokumen	253.864.040	414.443.000	Padang Panjang	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 dokumen	414.443.000	414.443.000	
2	***Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***		***Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan***	**1 jenis**	**30.000.000**	**29.999.800**		***Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan***	**1 jenis**	**29.999.800**	**29.999.800**	
1)	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Padang Panjang	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 Laporan	30.000.000	29.999.800	Padang Panjang	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 laporan	29.999.800	29.999.800	
XIII	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		**Persentase pengelolaan RTH Publik**	**100%**	**1.779.878.101**	**2.000.506.370**		**Persentase pengelolaan RTH Publik**	**4,23%**	**2.000.506.370**	**1.842.175.970**	
1	***Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota***		**Jumlah lokasi RTH Publik yang dikelola**	**2 kecamatan**	**1.779.878.101**	**2.000.506.370**		**Jumlah lokasi RTH Publik yang dikelola**	**2 kecamatan**	**2.000.506.370**	**1.842.175.970**	
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Padang Panjang	Luas RTH Publik yang dikelola	53 Ha	1.759.878.101	2.000.506.370	Padang Panjang	Luas RTH Publik yang dikelola	53 Ha	2.000.506.370	1.842.175.970	
2)	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 orang	20.000.000	-	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		-	-	
XIV	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN**		**Persentase pembinaan/verifikasi**	**32%**	**45.000.000**	**31.197.760**		**Persentase pembinaan/verifikasi**	**32%**	**31.197.760**	**31.197.760**	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025							Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		**lapangan terhadap Pemenuhan komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3**					**lapangan terhadap Pemenuhan komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3**				
1	***Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***		***Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3***	**2 kali**	**25.000.000**	**16.406.450**		***Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3***	**2 kali**	**16.406.450**	**16.406.450**	
1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 dokumen	25.000.000	16.406.450	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 dokumen	16.406.450	16.406.450	
2	***Penyimpanan sementara Limbah B3***		***Jumlah penghasil Limbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan***	**24**	**20.000.000**	**14.791.310**		***Jumlah penghasil Limbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan***	**24 fasyankes**	**14.791.310**	**14.791.310**	
1)	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Padang Panjang	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	20.000.000	14.791.310	Padang Panjang	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 laporan	14.791.310	14.791.310	
XV	**PROGRAM PENGOLAHAN PERSAMPAHAN**		**Persentase pengelolaan sampah**	**98**	**5.877.161.800**	**8.340.917.192**		**Persentase pengelolaan sampah**	**98%**	**8.340.917.192**	**8.179.461.292**	
1	***Pengelolaan Sampah***		***Persentase penanganan sampah***	**80**	**5.852.161.800**	**8.340.917.192**		***Persentase penanganan sampah***	**79%**	**8.340.917.192**	**8.179.461.292**	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Catatan Penting
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1)	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	15.000 - 20.000 ton/tahun	4.847.161.800	5.807.983.240	Padang Panjang	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	15.000 - 20.000 ton/tahun	5.807.983.240	5.681.703.440	
2)	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Padang Panjang	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 bank sampah	20.000.000	45.202.500	Padang Panjang	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 kelompok	45.202.500	45.202.500	
3)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 dokumen	35.000.000	-	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		-	-	
4)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	21 sarpras (TPA, 2 alat berat, 11 truk sampah,6 betor, 1 pic up sampah, mesin pyrolisis)	950.000.000	2.487.731.452	Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	22 unit	2.487.731.452	2.452.555.352	

No	Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	***Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta***		***Jumlah pihak swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi***		**25.000.000**	**-**		***Jumlah pihak swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi***		**-**	**-**	
1)	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		25.000.000	-	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		-	-	

Dari Tabel diatas dapat dilihat perbandingan pagu anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja 2025 mengalami refokusing yang semula pagu anggaran Rp. 27.186.922.319,-. menjadi Rp. 26.632.345.834,-. Sehingga terdapat pengurangan anggaran pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sebesar Rp. 554.576.485,-. Dengan pengurangan 2 (dua) sub kegiatan yang semula 32 sub kegiatan menjadi 30 sub kegiatan.

2.4 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi maupun perguruan tinggi. Usulan tersebut berupa usulan Musrenbang dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Usulan ini ditampung dalam beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Usulan Program dan Kegiatan masyarakat yang diakomodir dalam kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiaman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 4 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Sebelum Perubahan		Sebelum Perubahan	
		Jumlah	Anggaran	Jumlah	Anggaran
1	*2*	*3*	*4*		*5*
1	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**				
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Menunjang Fungsi Hunian	36 paket pekerjaan	Rp. 5.309.257.196,-	37 paket pekerjaan	Rp. 5.880.575.196,-
2	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**				
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	122 unit rumah	Rp. 2.678.231.920,-	122 unit rumah	Rp. 2.567.765.960,-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat penambahan paket pekerjaan pada kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Menunjang Fungsi Hunian sebanyak 1 (satu) paket pekerjaan dengan anggaran awal Rp. 5.309.257.196,- mejadi Rp. 5.880.575.196,- atau mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 571.318.000,- .

2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai OPD yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal koordinator Pelaksana Urusan Pemerintah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Lingkungan Hidup disadari bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Adapun Pelaksanaan Urusan Pemerintah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan terkait dengan bidang tersebut, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, perencanaan skala kota, maupun perencanaan OPD di Lingkup Pemerintah Kota Padang Panjang.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang cukup Strategis dalam melaksanakan kebijakan program pembangunan daerah untuk urusan Perumahan Rakyat dan urusan Lingkungan Hidup Namun pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut belum terlaksana secara menyeluruh dan optimal.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 5 Pemetaan Permasalahan Renstra 2025-2029

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pengelolaan kawasan permukiman dan perumahan layak huni	Belum optimalnya pemenuhan ketersediaan rumah layak huni	Belum optimalnya informasi kondisi perumahan;
			Belum adanya bank data perumahan yang komprehensif
			Belum optimalnya bantuan rumah layak huni bagi masyarakat;
			Masih adanya usulan objek penerima bantuan RTLH yang belum memenuhi kriteria;
			Belum bertambahnya rumah susun sewa layak huni
		Belum optimalnya Penataan kawasan permukiman	Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh;
			Kurang optimalnya pendataan kawasan permukiman;
			Kurangnya kuantitas SDM teknis
		Belum optimalnya penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan permukiman	Belum optimalnya pendataan objek pekerjaan penyediaan PSU;
			Kurangnya kuantitas SDM teknis;
			Belum optimalnya perangkuman informasi dan data objek pekerjaan penyediaan PSU
2	Belum tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik	Masih Rendahnya Indeks kualitas air	Belum optimalnya penanganan pencemaran air ;
			Masih terjadinya pembuangan limbah cair dan padat secara sembarangan ke badan sungai ;
			Sudah tingginya tingkat cemaran air sungai dari daerah tetangga ;
			Kurangnya Pengenceran Air Sungai karena debit dan dimensi sungai kota padang panjang yang kecil
		Masih rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha akan	Masih banyaknya usaha/kegiatan yang tidak mengelola dampak lingkungan;

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		pentingnya upaya mencegah pencemaran air dan lingkungan	Masih banyaknya usaha/kegiatan yang belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan ;
			Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha
3	Sudah Hampir Penuhnya Tempat Pembuangan Akhir Sampah	Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan dan TPA Sungai Andok yang sudah penuh	Belum ditemukannya calon lahan untuk TPA yang baru maupun TPA regional ;
			belum terealisasinya metode penanganan sampah alternatif (pendirian TPST, pengadaan mesin pengolahan sampah dan kerjasama dengan pihak ke tiga)
			Belum optimalnya upaya pengurangan sampah,
			masih kurangnya kampanye, sosialisasi dan edukasi pengurangan sampah ke masyarakat
4	Tidak terjadinya peningkatan Kualitas tutupan lahan	Belum Optimalnya Pengelolaan keanekaragaman Hayati	Belum optimalnya peningkatan jumlah RTH ;
			belum adanya penambahan luasan taman kota
			Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi keaneka ragaman hayati kota ;
			Tidak terdistribusikannya dokumen keanekaragaman hayati ke masyarakat secara merata ;
			belum adanya regulasi kota dalam untuk melindungi keanekaragaman hayati

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, 2025


POHON MASALAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Belum optimalnya pengelolaan kawasan permukiman dan perumahan layak huni
Belum optimalnya pemenuhan ketersediaan rumah layak huni
Belum optimalnya informasi kondisi perumahan
Belum adanya bank data perumahan yang komprehensif
Belum optimalnya bantuan rumah layak huni bagi masyarakat
Masih adanya usulan objek penerima bantuan RTLH yang belum memenuhi kriteria
Belum bertambahnya rumah susun sewa layak huni
Belum optimalnya Penataan kawasan permukiman
Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh
Kurang optimalnya pendataan kawasan permukiman
Kurangnya kuantitas SDM teknis
Belum optimalnya penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dilingkungan permukiman
Belum Optimalnya pendataan objek pekerjaan penyediaan PSU
Kurangnya kuantitas SDM teknis
Belum optimalnya perangkuman informasi dan data objek pekerjaan penyediaan PSU
Belum tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik
Masih Rendahnya Indeks kualitas air
Belum optimalnya penanganan pencemaran air
Masih terjadinya pembuangan limbah cair dan padat secara sembarangan ke badan sungai
Sudah tingginya tingkat cemaran air sungai dari daerah tetangga
Kurangnya Pengenceran Air Sungai karena debit dan dimensi sungai kota padang panjang yang kecil
Masih rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha akan pentingnya upaya mencegah pencemaran air dan lingkungan
Masih banyaknya usaha/kegiatan yang tidak mengelola dampak lingkungan
Masih banyaknya usaha/kegiatan yang belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan
Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha
Sudah Hampir Penuhnya Tempat Pembuangan Akhir Sampah
Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan dan TPA Sungai Andok yang sudah penuh
Belum ditemukannya calon lahan untuk TPA yang baru maupun TPA regional
belum terealisasinya metode penanganan sampah alternatif (pendirian TPST, pengadaan mesin pengolahan sampah dan kerjasama dengan pihak ke tiga)
Belum optimalnya upaya pengurangan sampah,
masih kurangnya kampanye, sosialisasi dan edukasi pengurangan sampah ke masyarakat
Tidak terjadinya peningkatan Kualitas tutupan lahan
Belum Optimalnya Pengelolaan keanekaragaman Hayati
Belum optimalnya peningkatan jumlah RTH
belum adanya penambahan luasan taman kota
Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi keaneka ragaman hayati kota
Tidak terdistribusikannya dokumen keanekaragaman hayati ke masyarakat secara merata
belum adanya regulasi kota dalam untuk melindungi keanekaragaman hayati

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2025 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2025 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2025-2029, maka tema pembangunan RKP Tahun 2025 ditetapkan yaitu ***"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".*** Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2025 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025 Kedudukan RKP Tahun 2025 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2025- 2029 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian targettarget pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh

penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2025-2029, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

Sasaran pembangunan tahun 2025 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024.

3.1.2 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu ***"Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan",*** dengan penjabaran misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara'–Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan Investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing;

2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu: ***"Peningkatan Daya Saing Daerah".***

3.1.3 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta nantinya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 mengacu pada RPD Kota Padang Panjang 2024-2026.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah maupun perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Target dari tujuan dan sasaran pembangunan perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 dirumuskan dengan berdasarkan sasaran RPD 2024-2026, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, serta kebijakan pembangunan nasional tahun 2025. Berikut dijelaskan penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
1	**Terwujudnya sumber daya manusia yangberdaya saing**			**Indeks Pembangunan Manusia**	**78,78**	**78,97**	**79,02**	**79,38**	**79,73**	**79,73**
		1	Meningkatnya kualitas pendidikanmasyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	11,92	11,93	11,94	11,96	11,98	11,98
				Harapan Lama Sekolah	15,07	15,08	15,09	15,10	15,11	15,11
		2	Meningkatnya derajatkesehatan masyarakat	Umur HarapanHidup	73,02	73,03	73,04	73,05	73,06	73,06
				Prevelansi Stunting	16,80	15,40	14,00	12,60	11,20	11,20
		3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan gender	69,44	70,84	71,44	73,05	74,06	74,06
				Predikat Kota Layak Anak	nindya	nindya	utama	utama	utama	utama
		4	Meningkatnya daya saingk kepemudaan dan keolahragaan	Status Kota layak pemuda	-	-	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Pratama	Pratama
				Rasio daya saing keolahragaan	-	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30
2	**Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel**			**Indeks ReformasiBirokrasi**	**59,40**	**56,42**	**57,62**	**58,82**	**60,02**	**60,02**
		5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	62,91	63,10	63,98	64,86	65,74	65,74
				IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	70,61	70,85	71,00	71,50	72,00	72
				Nilai Sistem Merit	Sangat Baik (325)	Sangat Baik (328)	Sangat Baik (330)	Sangat Baik (335)	Sangat Baik (340)	Sangat Baik (340)
				Maturitas SPIP	2+	2+	3 (3.1)	3 (3.2)	3 (3.3)	3 (3.3)
				Nilai penyelenggaraanpelayanan publik	85	88	90	93	95	95
				Indeks SPBE	2,09	2,40	2,70	2,85	3,00	3,00
3	**Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan**			**Laju PertumbuhanEkonomi**	**4,39**	**4,79**	**5,20**	**5,60**	**6,00**	**6,00**
		6	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	LPE sektorPerdagangan	5,28	5,82	6,36	6,90	7,44	7,44
				LPE sektor pertanian	5,54	5,59	5,64	5,69	5,74	5,74
				LPE sektor akomodasi makandan minum	10,47	10,71	10,95	11,19	11,43	11,43
		7	Meningkatnyainvestasi	Persentase pertumbuhan nilai investasi	6	6	6	6	100	100
		8		Tingkat kemiskinan	5,14	4,69	4,24	3,79	3,34	3,34

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
			Menurunnya tingkat kemiskinan danpengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,84	4,72	4,60	4,48	4,36	4,36
		9	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran per Kapita	11,15	11,228	11,328	11,378	11,453	11,453
				Indeks Gini	0,296	0,294	0,292	0,290	0,288	0,288
4	**Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentramdan agamis**			**Indeks Rasa Aman**	**Aman (86,04)**	**Aman (86,20)**	**Aman (86,39)**	**Aman (89,09)**	**Aman (91,78)**	**Aman (91,78)**
		10	Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase Pemajuan Kebudayaan	65,42	68,00	71,00	74,00	77,00	77,00
				Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	75	80	85	90	95	95
		11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase enyelesaian Pelanggaran	100	100	100	100	100	100
				Ketentraman danKetertiban Umum						
		12	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	Angka PPKS	5,68	4,87	4,68	4,49	4,30	4,30
5	**Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas**			**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)**	**90,96**	**91,16**	**91,36**	**91,56**	**91,76**	**91,76**
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**66,61**	**66,80**	**67-68**	**66,76**	**69-70**	**69-70**
		13	Terbangunnya Infrastruktur LayananDasar Perkotaan yang Berkualitas	IKLI kePUan	89,66	89,86	90,06	90,26	90,46	90,46
				IKLI perkim	96,8	96,85	96,90	96,92	96,95	96,95
				IKLI perhubungan	96,62	96,69	96,76	96,83	96,90	96,90
		14	Meningkatnya konsistensi penataan ruang	Persentasekesesuaian pemanfaatan ruang	82	82,5	83	83,5	84	84
		15	Meningkatnya kualitas air, udara dantutupan lahan	Indeks Kualitas Air	46,07	46,5	45,75	46,5	47,25	47,25
				Indeks Kualitas Udara	91,29	91,5	90,05	90,10	90,15	90,15
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,18	56,18	57,00	57,50	58,00	58,0

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Padang Panjang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan yang ada dalam RPD yaitu tujuan 5 (lima). yaitu "Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas", Indikatornya Indeks Kualitas Layanan (IKLI) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan sasaran Terbangunnya Insfratruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas dan Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan, dengan indikator yang akan dicapai: Nilai IKLI dan NILai IKLH

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai lembaga teknis Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Dengan adanya kontribusi tersebut, diharapkan Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang yaitu **"Padang Panjang, Kota Serambi Mekah Yang Maju, Sejahtera Dan Bermarwah"**. dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang termasuk dalam Misi ke-5 yakni "**Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk Menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan"**.

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Walikota Padang Panjang dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN,SASARAN	SATUAN	TARGET RENSTRA TAHUN I (2025)	TARGET PERUBAHAN RENJA 2025
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Hunian Layak dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		**IKLI Perkim**	**Angka**	**96,92**	**96,92**
		Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau dan berkelanjutan	**%**	**73,63**	**73,63**
		Indeks Kualitas Udara	**Angka**	**78,68**	**78,68**
		Indeks Kualitas Air	**Angka**	**72,47**	**72,47**
		Indeks Kualitas Lahan	**Angka**	**69,51**	**69,51**
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Angka	69,90	69,90
	Meningkatnya hunian layak yang terjangkau dan berkelanjutan	Angka Backlog Perumahan	Unit	8133	8133
	Meningkatnya Layanan dan Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase kawasan pemukiman yang memiliki infrastruktur dalam kondisi baik	%	88	88
	Meningkatnya Kinerja Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Angka	71,60	71,60
		Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	%	90	90

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.
2. Penetapan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029
3. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   a. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Lapangan
      3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana

Program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :
   a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
      1) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
   b. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

1) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

c. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

1) Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun

2. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

a. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

1) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

3. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)

a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

4. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

a. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

1) Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang

5. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

2) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota

b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

7. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbahn Bahan Berhahaya dan Beracun (Limbah B3)

a. Penyimpanan sementara Limbah B3.

1) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi

dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3

b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

8. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

9. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
3) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat

10. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

11. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.

1) Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota

12. Program Pengelolaan Persampahan

a. Pengelolaan Sampah
    1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
    2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
    3) Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

Tabel 3. 4 Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP							**27.754.924.838**	**27.186.922.319**	**29.041.667.667**							**14.665.068.916,00**	
	1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**16.161.755.752**	**15.576.491.241**	**29.041.667.667**							**6.393.364.975,00**	
	1.04.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**16.161.755.752**	**15.576.491.241**	**18.044.293.765**							**6.393.364.975,00**	
35	**1.04.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup**	**90 %**		**90 %**	**90 %**	**90 % %**	**7.237.977.127**	**7.150.736.625**	**6.727.830.379**							**5.847.929.695,00**	
	1.04.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**5.961.557.320**	**5.856.711.547**	**5.815.585.223**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**OPD**		**4.728.571.395,00**	**Perkim LH**
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4088 Orang/bulan		672 Orang/bulan	658 Orang/bulan	658 Orang/bulan	5.961.557.320	5.856.711.547	5.815.585.223	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			4.728.571.395,00	Perkim LH
	1.04.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**90 %**		**90 %**	**90 %**	**90 %**	**433.152.205**	**435.742.678**	**172.417.156**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**OPD**		**356.557.500,00**	**Perkim LH**
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	6.104.800	6.092.800	4.006.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			7.624.500,00	Perkim LH
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	72.215.600	72.218.728	29.762.006	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			90.184.350,00	Perkim LH
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket	20.438.805	20.438.150	14.645.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			13.075.000,00	Perkim LH
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	334.393.000	336.993.000	124.003.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			207.475.000,00	Perkim LH
	1.04.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100 %**		**100 %**	**90%**	**100%**	**114.949.602**	**118.483.400**	**92.119.100**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**OPD**		**20.000.000,00**	**Perkim LH**
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit		3 Unit	7 Unit	7 Unit	114.949.602	118.483.400	92.119.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			20.000.000,00	Perkim LH
	1.04.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**90 %**		**90 %**	**90%**	**90%**	**470.930.000**	**482.411.000**	**429.752.900**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**OPD**		**511.372.000,00**	**Perkim LH**
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	29.454.000	26.055.000	28.222.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			29.605.000,00	Perkim LH
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	441.476.000	456.356.000	401.530.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			369.188.000,00	Perkim LH
	1.04.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**95 %**		**95 %**	**95 %**	**95 %**	**257.388.000**	**257.388.000**	**217.956.000**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**OPD**		**231.428.800,00**	**Perkim LH**
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	41.690.000	41.690.000	41.690.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			11.428.800,00	Perkim LH

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	12 Unit	139.480.000	139.480.000	139.480.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			80.380.000,00	Perkim LH
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit		30 Unit	51 Unit	51 Unit	31.330.000	31.330.000	31.330.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			17.425.000,00	Perkim LH
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2 Unit	44.888.000	44.888.000	5.456.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			86.897.000,00	Perkim LH
36	**1.04.02.**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**428.584.230**	**438.265.500**	**310.942.230**							**295.435.280,00**	
	1.04.02.2.01.	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah**	**10 dokumen**		**0 dokumen**	**2 dokumen**	**1 dokumen**	**51.723.650**	**51.723.450**	**51.723.450**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**Masyarakat**		**5.000.000,00**	**Perkim LH**
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	6 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	51.723.650	51.723.450	51.723.450	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			5.000.000,00	Perkim LH
	1.04.02.2.03.	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah**	**16 unit**		**0 unit**	**4 unit**	**2 unit**	**43.030.000**	**43.030.000**	**2.508.000**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**Masyarakat berpenghasilan rendah**		**90.000.000,00**	**Perkim LH**
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	12 Unit Rumah		0 Unit Rumah	2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	43.030.000	43.030.000	2.508.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			40.000.000,00	Perkim LH
	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4 Unit Rumah		0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			50.000.000,00	Perkim LH
	1.04.02.2.05.	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun**	**1 Laporan**		**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**333.830.580**	**343.512.050**	**256.710.780**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**Masyarakat**		**200.435.280,00**	**Perkim LH**
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	333.830.580	343.512.050	256.710.780	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			200.435.280,00	Perkim LH
37	**1.04.04.**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Rumah Layak Huni**	**93,99 %**		**87,29 %**	**97,26 %**	**88,48 %**	**3.382.858.400**	**2.678.231.920**	**2.667.765.960**							**50.000.000,00**	
	1.04.04.2.01.	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab**	**340 unit**		**144 unit**	**70 unit**	**122 unit**	**3.382.858.400**	**2.678.231.920**	**2.667.765.960**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**Masyarakat**		**50.000.000,00**	**Perkim LH**
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	516 Unit Rumah		144 Unit Rumah	70 Unit Rumah	122 Unit Rumah	3.382.858.400	2.678.231.920	2.667.765.960	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			50.000.000,00	Perkim LH
38	**1.04.05.**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**	**89,5 %**		**79,31 %**	**87,11 %**	**87,11 %**	**5.112.335.995**	**5.309.257.196**	**8.337.755.196**							**200.000.000,00**	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.05.2.01.	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menuunjang fungsi hunian**	**2 Kecamatan**		**2 Kecamatan**	**2 kecamatan**	**2 Kecamatan**	**5.112.335.995**	**5.309.257.196**	**8.337.755.196**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**Masyarakat**		**200.000.000,00**	**Perkim LH**
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 Lokasi		2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	5.112.335.995	5.309.257.196	8.337.755.196	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			200.000.000,00	Perkim LH
	2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**10.929.584.876**	**10.937.391.622**	**10.425.711.349**							**8.271.703.941,00**	
	2.11.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**10.929.584.876**	**10.937.391.622**	**10.425.711.349**							**8.271.703.941,00**	
39	**2.11.02.**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang tersedia**	**100 %**		**NA %**	**100 %**	**40 %**	**196.841.000**	**221.840.500**	**111.067.200**							**0,00**	
	2.11.02.2.02.	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen KLHS yang disusun**	**10 dokumen**		**1 dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**196.841.000**	**221.840.500**	**111.067.200**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**Masyarakat**		**0,00**	**Perkim LH**
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	6 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	196.841.000	221.840.500	111.067.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	Perkim LH
40	**2.11.03.**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**59.990.400**	**59.989.800**	**50.382.100**							**368.864.040,00**	
	2.11.03.2.01.	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan**	**4 jenis**		**2 jenis**	**2 jenis**	**2 jenis**	**29.990.600**	**29.990.000**	**17.425.000**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**Masyarakat**		**348.864.040,00**	**Perkim LH**
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			0,00	Perkim LH
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29.990.600	29.990.000	17.425.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			50.000.000,00	Perkim LH
	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	4 Kegiatan		0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			25.000.000,00	Perkim LH
	2.11.03.2.02.	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan**	**1 jenis**		**1 jenis**	**1 jenis**	**1 jenis**	**29.999.800**	**29.999.800**	**32.957.100**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**Masyarakat**		**20.000.000,00**	**Perkim LH**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	24 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	29.999.800	29.999.800	32.957.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			20.000.000,00	Perkim LH
41	**2.11.04.**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase RTH Kota**	**10,66 %**		**4,19 %**	**4,23 %**	**10,45 %**	**1.995.234.750**	**2.000.506.370**	**1.870.363.570**							**1.779.878.101,00**	
	2.11.04.2.01.	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Jumlah lokasi RTH yang dikelola**	**53 Lokasi**		**42 Lokasi**	**2 kecamatan**	**43 Lokasi**	**1.995.234.750**	**2.000.506.370**	**1.870.363.570**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**Masyarakat**		**1.779.878.101,00**	**Perkim LH**
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	318 Ha		53 Ha	53 Ha	53 Ha	1.995.234.750	2.000.506.370	1.870.363.570	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			1.759.878.101,00	Perkim LH
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	160 Orang		40 Orang	40 Orang	0 Orang	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			20.000.000,00	Perkim LH
42	**2.11.05.**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 yang Terkelola**	**32 %**		**32 %**	**32 %**	**32 %**	**31.197.900**	**31.197.760**	**28.218.360**							**45.000.000,00**	
	2.11.05.2.01.	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Jumlah penghasil limbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan**	**0 fasyankes**		**24 fasyankes**	**24 fasyankes**	**24 fasyankes**	**14.791.400**	**14.791.310**	**11.415.560**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**Masyarakat**		**20.000.000,00**	**Perkim LH**
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	14.791.400	14.791.310	11.415.560	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			20.000.000,00	Perkim LH
	2.11.05.2.02.	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3**	**2 kali**		**2 kali**	**2 kali**	**2 kali**	**16.406.500**	**16.406.450**	**16.802.800**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**OPD**		**25.000.000,00**	**Perkim LH**
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	16.406.500	16.406.450	16.802.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			25.000.000,00	Perkim LH
43	**2.11.06.**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap, persetujuan lingkungan PPLH dan PUULH**	**65 %**		**55,17 %**	**60 %**	**60 %**	**22.543.500**	**22.543.250**	**17.987.420**							**30.000.000,00**	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.06.2.01.	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase usaha/kegiatan yang memiliki dokumen izin lingkungan yang diawasi**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**22.543.500**	**22.543.250**	**17.987.420**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**Masyarakat**		**30.000.000,00**	**Perkim LH**
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	167 Badan Usaha		30 Badan Usaha	35 Badan Usaha	35 Badan Usaha	22.543.500	22.543.250	17.987.420	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			30.000.000,00	Perkim LH
44	**2.11.07.**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Persentase Cakupan Fasilitasi MHA terkait PPLH**	**60 %**		**10 %**		**10 %**	**-**	**-**	**-**							**20.000.000,00**	
	2.11.07.2.01.	**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional da hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH**	**1 dokumen**		**0 dokumen**	**1 dokumen**	**0 dokumen**	**-**	**-**	**-**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**Masyarakat**		**20.000.000,00**	**Perkim LH**
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			20.000.000,00	Perkim LH
45	**2.11.08.**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup /Kader Lingkungan yang ditingkatkan Kopetensinya**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**154.417.600**	**154.416.800**	**117.395.900**							**70.000.000,00**	
	2.11.08.2.01.	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana**	**3 jenis kegiatan**		**3 jenis kegiatan**	**3 jenis kegiatan**	**3 jenis kegiatan**	**154.417.600**	**154.416.800**	**117.395.900**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**Masyarakat**		**70.000.000,00**	**Perkim LH**
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	18 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	19.999.950	19.999.850	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			20.000.000,00	Perkim LH
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	96 Orang		16 Orang	16 Orang	16 Orang	10.000.000	9.999.400	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			10.000.000,00	Perkim LH

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	6 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	124.417.650	124.417.550	117.395.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			40.000.000,00	Perkim LH
46	**2.11.09.**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Partisipasi Masyarakat / Dunia Pendidikan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**90 %**		**45 %**	**50 %**	**50 %**	**93.300.200**	**93.300.000**	**78.454.650**							**40.800.000,00**	
	2.11.09.2.01.	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerja nya**	**1 kelompok**		**1 kelompok**	**1 kelompok**	**1 kelompok**	**93.300.200**	**93.300.000**	**78.454.650**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**Masyarakat**		**40.800.000,00**	**Perkim LH**
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	6 Entitas		1 Entitas	1 Entitas	1 Entitas	93.300.200	93.300.000	78.454.650	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			40.800.000,00	Perkim LH
47	**2.11.10.**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**12.680.000**	**12.679.950**	**8.536.700**							**50.000.000,00**	
	2.11.10.2.01.	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)**	**5 dokumen**		**3 dokumen**	**5 dokumen**	**5 dokumen**	**12.680.000**	**12.679.950**	**8.536.700**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**Masyarakat**		**50.000.000,00**	**Perkim LH**
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	0 Pengaduan		3 Pengadua	5 Pengaduan	5 Pengadua	12.680.000	12.679.950	8.536.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			20.000.000,00	Perkim LH
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	20 Perkara		3 Perkara	5 Perkara	0 Perkara	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			30.000.000,00	Perkim LH
48	**2.11.11.**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase pengelolaan sampah**	**99,49 %**		**99,19 %**	**98 %**	**99,24 %**	**8.363.379.526**	**8.340.917.192**	**8.143.305.449**							**5.867.161.800,00**	
	2.11.11.2.01.	**Pengelolaan Sampah**	**Persentase penanganan sampah**	**93,5 %**		**NA %**	**79%**	**96 %**	**8.363.379.526**	**8.340.917.192**	**8.143.305.449**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**Masyarakat**		**5.867.161.800,00**	**Perkim LH**
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	42 Kelompok		7 Kelompok	7 Kelompok	7 Kelompok	45.203.900	45.202.500	45.202.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			20.000.000,00	Perkim LH
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	145 Unit		21 Unit	22 Unit	22 Unit	2.487.735.236	2.487.731.452	4.318.899.509	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			1.000.000.000,00	Perkim LH

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	15000-20000 Ton		18508,71 Ton	22 Unit	15000-20000 Ton Ton	5.830.440.390	5.807.983.240	3.779.203.440	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			4.847.161.800,00	Perkim LH
		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup							**254.899.400**	**258.596.456**	**201.565.153**							**14.665.068.916,00**	
	1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**254.899.400**	**258.596.456**	**201.565.153**							**6.393.364.975,00**	
	1.04.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**254.899.400**	**258.596.456**	**201.565.153**							**6.393.364.975,00**	
49	**1.04.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup**	**90 %**		**90 %**	**90 %**	**90 %**	**254.899.400**	**258.596.456**	**201.565.153**							**5.847.929.695,00**	
	1.04.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**90 %**		**90 %**	**90%**	**90 %**	**43.922.300**	**43.899.356**	**24.154.453**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**OPD**		**356.557.500,00**	**Perkim LH**
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	2.548.500	2.539.900	1.456.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			5.083.000,00	Perkim LH
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket		10 Paket	10 Paket	10 Paket	10.564.300	10.563.956	7.004.153	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			14.465.650,00	Perkim LH
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		3 Paket	12 Paket	12 Paket	934.500	934.500	458.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			1.875.000,00	Perkim LH
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	29.875.000	29.861.000	15.235.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			16.775.000,00	Perkim LH
	1.04.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**90 %**		**90 %**	**90%**	**90 %**	**142.934.100**	**146.654.100**	**109.367.700**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**OPD**		**511.372.000,00**	**Perkim LH**
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan		36 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	34.532.500	34.532.500	34.532.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			21.927.000,00	Perkim LH
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	108.401.600	112.121.600	74.835.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			90.652.000,00	Perkim LH
	1.04.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**95 %**		**95 %**	**95%**	**95 %**	**68.043.000**	**68.043.000**	**68.043.000**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**-**		**231.428.800,00**	**Perkim LH**
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		2 Unit	2 Unit	2 Unit	34.045.000	34.045.000	34.045.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			19.620.000,00	Perkim LH
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit		14 Unit	14 Unit	14 Unit	3.990.000	3.990.000	3.990.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			2.575.000,00	Perkim LH
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	30.008.000	30.008.000	30.008.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			13.103.000,00	Perkim LH
	2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**408.684.810**	**414.443.000**	**370.097.400**							**8.271.703.941,00**	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**408.684.810**	**414.443.000**	**370.097.400**							**8.271.703.941,00**	
50	**2.11.03.**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**408.684.810**	**414.443.000**	**370.097.400**							**368.864.040,00**	
	2.11.03.2.01.	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan**	**2 jenis**		**2 jenis**	**2 jenis**	**2 jenis**	**408.684.810**	**414.443.000**	**370.097.400**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**Masyarakat**		**348.864.040,00**	**Perkim LH**
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	408.684.810	414.443.000	370.097.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			273.864.040,00	Perkim LH

Dari Tabel diatas dapat dilihat jumlah program yang diajukan dalam Renja Perubahan 2025 sebanyak 13 program yang terdiri dari 1 program rutin kesekretariatan, 3 program teknis urusan perumahan rakyat dan 9 program yang terkait urusan lingkungan hidup 21 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan.

Program-program tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
9. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
10. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
11. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
12. Program Penanganan Pengaduan
13. Program Pengolahan Persampahan.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Selain itu Perubahan Renja Tahun 2025 telah secara penuh menerapkan klasifikasi dan nomenklatur baru sesuai ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan dapat lebih optimal, terarah, serta responsif terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan pembangunan daerah. Perubahan Renja ini merupakan hasil penyesuaian terhadap perkembangan kondisi aktual, kebijakan pemerintah, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja sebelumnya.

Dokumen Perubahan Renja ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat dan unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan masing-masing, serta sebagai dasar dalam pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini memerlukan komitmen, sinergi, dan koordinasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Padang Panjang, Juni 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

ALVI SENA, ST, MT
NIP. 19750825 200212 1 004

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, berkat karunia serta Ridho-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 telah dapat tersusun. Penyusunan dokumen Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini merupakan gambaran yang akan dijadikan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam menjalankan program kerja selama 1 (satu) tahun, sehingga apa yang direncanakan dapat terwujud.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan dokumen Renja ini serta besar harapan kami semoga Dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun rangkaian pekerjaan selanjutnya. Semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami sehingga tersusunnya Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Padang Panjang, Juni 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

BENNY, SSTP
Pembina Tk I/ NIP. 19840402 20021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		**i**
DAFTAR ISI		**ii**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	4
BAB II	**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN**	**6**
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan I	6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
BAB III	**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**	**21**
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	21
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	26
3.3	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	27
BAB IV	**PENUTUP**	**38**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Renja-PD merupakan acuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah dan merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) OPD. Renja-PD Perubahan memuat hasil evaluasi Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan I, dan memuat tujuan dan sasaran Renja-PD serta program dan kegiatan perubahan pada tahun berkenaan.

Dengan demikian Renja-PD Perubahan pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra dan merupakan salah satu dari komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja-PD Perubahan dalam tahun berkenaan dilakukan pengukuran kinerja triwulan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD sebagaimana diamanatkan dalam pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja-PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berkenaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi : (a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD dan/atau (b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berkenaan, maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 ini didasarkan atas hasil

evaluasi Renja-PD pada Triwulan I yang meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dan menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi terkait pelaksanaan program/kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 2);
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Negara Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 9);
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 10).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun berkenaan, guna menyikapi perkembangan keadaan yang yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD sesuai dengan Renja sebelumnya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah guna mengarahkan kembali seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2025 dapat terencana dan berkenaan dengan baik sesuai dengan perkembangan keadaan yang terjadi, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan I dengan menjelaskan penyebab program/kegian/subkegiatan yang tidak mencapai target dan melebihi target serta faktor penghambat dan faktor pendorong.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional/provinsi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, kegiatan dan sub kegiatan.

Bab IV Penutup

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh OPD dan permasalahan permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun berkenaan adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi pada tahun 2025.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan.

Kualitas Renja-PD yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dikaitkan dengan pencapaian Renstra-PD. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sudah disusun berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan keuangan daerah. Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang tahun anggaran 2025 terdiri dari 3 (Tiga) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapai/terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran akuntabilitas mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Program Kegiatan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang pada periode Renstra Tahun 2025 -2029 memiliki 3 sasaran strategis, dengan capaian kinerja secara umum baik, dengan capaian kinerja 100%.

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja ini dapat tercapai dengan beberapa langkah yang dilaksanakan:

1. Pelaksanaan operasi tim gabungan Penegakkan Perda berupa tim SK4 yang melibatkan unsur TNI Polri dan instansi vertikal lainnya
2. Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat yang diikuti oleh tokoh masyarakat dan pelajar
3. Perekrutan tenaga harian lepas (THL) untuk Banpol PP dan Petugas Pemadam Kebakaran yang membantu dalam pelaksanaan operasional lapangan
4. Kesiapsiagaan dari anggota operasional pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugas

Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang Tahun bekenaan 2025 meliputi indikator program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian Program/Kegiatan dan realisasi pelaksanaan. Untuk mengetahui pelaksanaan Renja tahun 2025 berjalan maka dilakukan pengukuran dan evaluasi Renja dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yang tergambar dalam Tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakakaran Kota Padang Panjang

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D RENJA TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2025 YANG DIEVALUASI)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DI EVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8=5+7		9	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			**29.364.777.780**		**11.932.322.299**		**11.973.657.998**		**2.606.147.309**		**14.538.469.608**		**49,51%**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	**100 Persen**	**15.729.618.580**	**100 Persen**	**6.595.194.649**	**100%**	**6.841.281.698**	**35%**	**1.690.653.509**	**100 Persen**	**8.285.848.158**	100 Persen	52,68%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**90 Persen**	**13.165.485.990**	**82 Persen**	**5.654.678.751**	**90%**	**5.333.431.498**	**35%**	**1.564.864.772**	**82 Persen**	**7.219.543.523**	**82 Persen**	**54,84%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1722 Orang/bulan	13.165.485.990	688 Orang/bulan	5.654.678.751	574 Orang/bulan	5.333.431.498	242 Orang/bulan	1.564.864.772	930 Orang/bulan	7.219.543.523	930 Orang/bulan	54,84%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 Persen**	**60.000.000**	**100 Persen**	**98.685.000**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**100 Persen**	**98.685.000**	**100 Persen**	**164,48%**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	60.000.000	221 Paket	98.685.000	174 Paket	-	-	-	221 Paket	98.685.000	221 Paket	164,48%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**90 Persen**	**570.819.950**	**88 Persen**	**238.345.864**	**90%**	**242.195.200**	**30%**	**40.008.762**	**88 Persen**	**278.354.626**	**88 Persen**	**48,76%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	10.069.950	4 paket	2.968.400	4 paket	3.162.000	1 paket	315.900	5 paket	3.284.300	5 paket	32,61%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	120.000.000	4 paket	16.748.500	12 paket	23.966.700	1 paket	2.622.000	5 paket	19.370.500	5 paket	16,14%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 paket	40.000.000	5 paket	11.110.300	5 paket	15.079.500	1 paket	2.436.100	6 paket	13.546.400	6 paket	33,87%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 laporan	400.750.000	62 laporan	207.518.664	15 laporan	199.987.000	16 laporan	34.634.762	78 laporan	242.153.426	78 laporan	60,43%

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D RENJA TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2025 YANG DIEVALUASI)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DI EVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan barang milik daerah**	**90%**	**110.000.000**	**-**	**-**	**90%**	**Rp141.872.600**	**-**	**Rp -**	**-**	**-**		**0,00%**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	9 unit	110.000.000	-	-	2 unit	141.872.600	-	-	-	-		0,00%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**90 Persen**	**324.640.240**	**90 Persen**	**120.838.284**	**90%**	**132.432.000**	**30%**	**24.415.475**	**90 Persen**	**145.253.759**	**90 Persen**	**44,74%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	16.000.000	7 Laporan	2.950.000	12 Laporan	4.148.000	-	-	7 Laporan	2.950.000	7 Laporan	18,44%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan	89.760.240	36 Laporan	20.560.076	36 Laporan	35.384.000	9 Laporan	4.549.675	45 Laporan	25.109.751	45 Laporan	27,97%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	218.880.000	14 Laporan	97.328.208	12 Laporan	92.900.000	3 Laporan	19.865.800	17 Laporan	117.194.008	17 Laporan	53,54%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**90 Persen**	**1.498.672.400**	**90 Persen**	**482.646.750**	**90%**	**991.350.400**	**30%**	**61.364.500**	**90 Persen**	**544.011.250**	**90 Persen**	**36,30%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	78 Unit	1.138.036.400	26 Unit	397.602.750	26 Unit	762.915.000	7 Unit	50.465.500	33 Unit	448.068.250	33 Unit	39,37%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	150.000.000	30 Unit	13.909.000	30 Unit	27.557.200	6 Unit	2.000.000	36 Unit	15.909.000	36 Unit	10,61%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	210.636.000	2 Unit	71.135.000	2 Unit	200.878.200	2 Unit	8.899.000	4 Unit	80.034.000	4 Unit	38,00%
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum**	**100 Persen**	**9.476.818.000**	**100 Persen**	**4.252.673.364**	**100%**	**4.161.774.000**	**30%**	**815.530.600**	**100 Persen**	**5.068.203.964**	**100 Persen**	**53,48%**
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah operasi pencegahan dan penanganan gangguan trantibum**	**8 operasi**	**9.121.520.000**	**3 operasi**	**4.024.098.364**	**3 operasi**	**3.881.788.800**	**3 operasi**	**786.545.600**	**3 operasi**	**4.810.643.964**	**3 operasi**	**52,74%**

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D RENJA TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2025 YANG DIEVALUASI)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DI EVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	297.663.230	0	-	0	-	2 Dokumen	297.663.230	2 Dokumen	74,42%
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	165 laporan	8.411.520.000	102 laporan	3.726.435.134	55 laporan	3.796.248.800	18 laporan	786.545.600	120 laporan	4.512.980.734	120 laporan	53,65%
	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga yang terdampak Penegakan Perda dan Perkada	24 laporan	90.000.000	-	-	8 laporan	15.000.000	2 laporan	-	2 laporan	-	2 laporan	0,00%
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	3 unit	90.000.000	-	-	5 unit	70.540.000	-	-	-	-	-	0,00%
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 kasus	130.000.000	-	-			-	-	-	-	-	0,00%
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**Jumlah operasi penegakan Perda**	**4 operasi**	**295.298.000**	**4 operasi**	**228.575.000**	**2 operasi**	**279.985.200**	**1 operasi**	**28.985.000**	**4 operasi**	**257.560.000**	**4 operasi**	**87,22%**
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 Laporan	60.000.000	-	-	1 Laporan	10.045.200	-	-	-	-	-	0,00%
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	20 Laporan	235.298.000	8 Laporan	228.575.000	8 Laporan	269.940.000	2 Laporan	28.985.000	10 Laporan	257.560.000	10 Laporan	109,46%

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D RENJA TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2025 YANG DIEVALUASI)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DI EVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**3 kegiatan**	**60.000.000**	-	**-**	**2 operasi**	**970.602.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan	60.000.000	-	-	1 Laporan		-	-	-	**-**	-	0,00%
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah**	**10 Menit**	**4.158.341.200**	**4 Menit**	**1.084.454.286**	**10 Menit**	**970.602.300**	**4 Menit**	**99.963.200**	**4 Menit**	**1.184.417.486**	**4 Menit**	**28,48%**
Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan bahaya kebakaran	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Jenis kegiatan pencegahan pengendalian pemadaman kebakaran**	**11 kegiatan**	**3.801.341.200**	**1 kegiatan**	**1.028.429.136**	**2 kegiatan**	**773.182.800**	**1 kegiatan**	**99.963.200**	**1 kegiatan**	**1.128.392.336**	**1 kegiatan**	**29,68%**
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	45 Laporan	3.416.341.200	12 Laporan	1.028.429.136	15 Laporan	682.052.800	4 Laporan	99.963.200	16 Laporan	1.128.392.336	16 Laporan	33,03%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	18 Unit	185.000.000	-	-	15 unit	91.130.000	-	-	-	**-**	-	0,00%
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	6 orang	100.000.000	-	-			-	-	-	**-**	-	0,00%
	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	80 keluarga	100.000.000	-	-			-	-	-	**-**	-	0,00%

SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA S/D RENJA TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN 2025 YANG DIEVALUASI)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DI EVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	**Jumlah kegiatan pemberdayaan**	**3 kegiatan**	**205.000.000**	**1 kegiatan**	**49.586.100**	**2 kegiatan**	**105.239.500**	-	**-**	**1 kegiatan**	**49.586.100**	**1 kegiatan**	**24,19%**
	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	100 orang	70.000.000	-	-	50 orang	60.008.000	-	-	-	**-**	-	0,00%
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	48 kelurahan	135.000.000	16 kelurahan	49.586.100	16 kelurahan	45.231.500	-	-	16 kelurahan	49.586.100	16 kelurahan	36,73%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	**Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia**	**100 Persen**	**152.000.000**	**100 Persen**	**6.439.050**	**100%**	**92.180.000**	**25%**	**-**	**100 Persen**	**6.439.050**	**100 Persen**	**4,24%**
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	36 Laporan	77.000.000	134 Laporan	6.439.050	12 Laporan	25.000.000	3 Laporan	-	137 Laporan	6.439.050	137 Laporan	8,36%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	5 unit	75.000.000	-	-	5 unit	67.180.000	-	-	-	**-**	-	0,00%
				29.364.777.780		**11.932.322.299**		**11.973.657.998**		**2.606.147.309**		**14.538.469.608**		**49,51%**

Berdasarkan tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan ke I Tahun 2025, berikut analisis dari tabel tersebut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, beberapa kegiatan yang menunjang sasaran kinerja telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai anggaran kas. Terdapat beberapa sub kegiatan yang masih belum atau tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan ini dampak pengurangan anggaran atas direfocusing.
2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, beberapa kegiatan yang menunjang sasaran kinerja telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai anggaran kas. Terdapat 3 sub kegiatan yang masih belum atau tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan ini kena dampak pengurangan anggaran atas direfocusing.
3. Program Pencegahan, Penaggulangan, Penyelamata Kebakaran dan Penelamatan Non Kebakaran beberapa kegiatan yang menunjang sasaran kinerja telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai anggaran kas. Terdapat 3 sub kegiatan yang masih belum atau tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan ini kena dampak pengurangan anggaran atas direfocusing

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seluruh program kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang untuk Tahun 2024-2026 (Berdasarkan Renstra 2024-2026) dicapai dengan sasaran yakni :

1. Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan pencegahan perda
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran

Sedangkan untuk tahun 2025 (Berdasarkan Renstra 2025-2029) dicapai dengan sasaran yakni :

1. Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum linmas) serta penegakan peraturan daerah (Perda).
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran
3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Target evaluasi capaian kinerja untuk 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang s.d Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Renstra Perubahan 2018-2023										
1	Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum				100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penegakkan Perda				100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK				100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah				10 menit	3 menit	100%	10 menit	2 menit	100%
Renstra RPD 2024-2026										
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%						
2	Persentase Penegakkan Perda	100%	100%	100%						
3	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK	100%	100%	100%						
4	Waktu tanggap (Respon Time Rate) Daerah	10 menit	4 menit	100%						

Sumber:.. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

Dari tabel 2.2 dapat dilihat capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam rentang 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2022 s/d 2024. Pada urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat terdapat beberapa indikator yang menggambarkan pelayanan terkait urusan tersebut. Diantaranya adalah indikator Persentase warga negara yang terlindungi dari dampak pelanggaran perda dan trantibum dicapai melalui penanganan atas pengadun pelanggaran yang ditangani, dimana untuk Tahun 2020-2023 dapat diselesaikan sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100% dari jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk. Begitu juga Tahun 2024 indikator urusan ketentraman dan ketertiban umum ada perubahan indikator kinerja berdasarkan Renstra PD 2022-2024 yaitu indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketentraman

dan Ketertiban Umum dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%. Artinya seluruh pengaduan atau pelanggaran yang masuk dapat ditangani atau ditanggulangi 100% dari jumlah pelanggaran atau gangguan Trantibum yang terjadi. Hal ini menunjukkan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam menanggulangi berbagai gangguan trantibum yang terjadi di daerah. Beberapa faktor yang mendukung capaian ini antara lain peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, peningkatan patroli dan pengawasan, dan tokoh masyarakat membantu dalam pengumpulan informasi, penanganan kasus, serta sosialisasi peraturan daerah terkait trantibum serta penggunaan teknologi dalam penanganan kasus trantibum.

Hal ini beriringan dengan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan telah sesuai dengan target, realisasi dan capaian kinerja 100%. Artinya seluruh masyarakat kota Padang Panjang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum Perda dan Perkada. Dari jumlah kejadian pelanggaran Perda dan Perkada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 semuanya terlayani sesuai target. Indikator ini merupakan pemenuhan SPM terkait bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Untuk indikator Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dari Tahun 2022 s/d 2024 sebesar 100% dari jumlah layanan pemadaman penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kota Padang Panjang dalam tingkat waktu tanggap oleh Satpol PP dan Damkar ditambah jumlah layanan pemadaman di Kota Padang Panjang dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan Satpol PP dan Damkar dari jumlah jumlah kejdian kebakaran di Kota Padang Panjang.

Untuk indikator waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran, yang ditargetkan 10 menit tercapai 3 menit dari rata-rata waktu tanggap penanganan kebakaran, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadam kebakaran dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Dari indikator waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal berupa: layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi semuanya telaksana dengan baik

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bahaya kebakaran berdasarkan kebijakan yang ditetapkan.

1. Upaya-upaya yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pengawasan, penertiban dan penindakan sehingga terwujud peningkatan kesadaran masyarakat untuk mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Dalam pencapaian suasana tentram dan tertib di masyarakat ada beberapa kendala antara lain :
    a. Peran serta dan pemberdayaan masyarakat perlu dioptimalkan termasuk lembaga adat guna terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum.
    b. Masih adanya pelanggaran di fasilitas umum dan fasilitas sosial terutama pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang bermobil, gepeng, anak jalanan, kelompok funck, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.
    c. Pesatnya perkembangan pembangunan dan peningkatan penduduk di Kota Padang Panjang sudah barang tentu positif dan negatif termasuk berakibat kepada penyediaan perumahan, jaminan kelayakan berusaha yang menimbulkan dampak masalah sosial yang memungkinkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, apalagi seringnya berpindah – pindah tempat .
    d. Fungsi pembinaan dan pemberdayagunaan masyarakat terutama lembaga-lembaga adat belum mendukung ketentraman dan ketertiban secara optimal.
    e. Wilayah Kota Padang panjang yang termasuk kepada wilayah dengan kategori rawan bencana alam.

Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sumber daya manusia aparatur.
2. Masih belum mencukupi sarana dan prasarana.
3. Masih perlunya penambahan anggaran.

Permasalahan yang ada perlu ditindak lanjuti dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang sebelumnya responsive menjadi preventif, untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pelayanan bahaya kebakaran. Adapun tantangan dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yaitu :

1. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia.
2. Belum adanya peta rawan bencana
3. Jumlah penduduk yang heterogen berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Sedangkan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pemadam Kebakaran, yaitu :

1. Koordinasi yang baik antar instansi dimana dengan terjalinnya koordinasi yang baik antar dinas/badan/kantor/bagian di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Pemanfaatan teknologi informasi.
   Perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanankepada masyarakat.
3. Kerjasama dengan pihak luar.
   Adanya kerjasama dengan pihak luar merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Padang Panjang.
4. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung tupoksi.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemadam Kebakaran. Dalam pelaksanaannya terdapat isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian, isu-isu strategis yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat:

1. Penyempurnaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus menjadi perhatian khusus, karena Perda dan Perkada adalah landasan yang menjadi titik tolak Polisi Pamong Praja menentukan arah bertindak.;
2. Perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur Satuan Polisi Pamong Praja terutama PPNS dan peningkatan sumber daya manusia aparatur pemadam kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dan Pemadam Kebakaran;
3. Letak geografis Kota Padang Panjang yang berada diperlintasan didukung dengan potensi wisata yang ada di Kota Padang Panjang meningkatkan geliat perekonomian masyarakat disertai bertambahnya jumlah pengunjung ke Kota Padang Panjang berbanding lurus dengan potensi pelanggaran Perda dan trantibum.
4. Perlindungan masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan..
5. Tingkat waktu tanggap daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), merupakan salah satu indikator pada standar pelayanan minimal. Kepadatan dan kerapatan rumah penduduk dapat memperlambat waktu tanggap layanan WMK, walaupun jarak tempuh tergolong dekat;

Dukungan peralatan pemadam kebakaran yang memadai dan memenuhi syarat akan sangat berpengaruh kepada tingkat keberhasilan upaya pemadaman dan sekaligus mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja bagi petugas pemadam kebakaran yang sedang bertugas dalam proses pemadaman.

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, trantibum, dan perlindungan masyarakat	Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Kurangnya kualitas dan kuantitas personil Satpol PP dan satlinmas

			Kurangnya sarana dan prasarana Satpol PP
			Rendahnya pemahaman masyarakat tentang penegakan perda
			Kurangnya komitmen mitra kerja tentang trantibum
			Kurangnya komitmen penggagas perda
		Respon time yang masih tinggi	Jalan yang kecil dan sulit untuk di akses oleh kendaraan pemadam
			Padatnya perumahan
			Kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran & rescue
			Kurangnya keterampilan teknis personil pemadam kebakaran & rescue
			Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan instansi/lembaga tentang penanggulangan dan pencegahan kebakaran dan non kebakaran
			Belum optimalnya koordinasi antar lembaga/OPD

Sumber:.. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

Kebijakan Nasional Satpol PP dan Damkar yang tertuang dalam Renstra 2025-2029 diarahkan untuk meningkatkan peran strategis kedua lembaga ini dalam mendukung ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Kebutuhan untuk merespons tantangan yang semakin kompleks, seperti peningkatan konflik sosial, urbanisasi, risiko bencana, dan tuntutan terhadap pelayanan publik yang lebih profesional dan humanis. Secara umum, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), mendorong digitalisasi layanan, serta membangun sistem kolaboratif antara pusat dan daerah.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran dan infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil. Masih banyak satuan Satpol PP dan Damkar yang kekurangan personel terlatih serta minim peralatan standar. Selain itu, lemahnya koordinasi lintas sektor dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi kendala dalam mewujudkan sistem penanganan ketertiban dan kebencanaan yang efektif. Di sisi lain, kritik terhadap pendekatan Satpol PP yang cenderung represif dalam menangani

pelanggaran, seperti penertiban pedagang kaki lima, menunjukkan perlunya perubahan paradigma ke arah yang lebih humanis dan berbasis hak asasi manusia.

3.1.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam 2025-2029 dirancang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Ditetapkan visi Tahun 2025-2029 yaitu :

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan delapan misi strategis sebagai arah pembangunan jangka menengah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu visi ke 2 Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Kemudian faktor-faktor penghambat pelayanan perangkat daerah yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yaitu: kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur, belum

memadainya anggaran, sarana dan prasarana, masih kurangnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran. Sedangkan faktor pendorongnya, keberadaraan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

3.1.2. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029; telah ditetapkan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2025-2029 menjadi Visi, Misi, dan Program Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Visi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah :

“SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN”

Visi ini memuat tiga kata kunci utama yang menjadi dasar pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan, yaitu Madani, Maju, dan Berkeadilan. Ketiga kata ini memiliki makna strategis dan nilai filosofis yang kuat sebagai refleksi dari identitas, potensi, dan harapan masyarakat Sumatera Barat di masa depan.

MADANI

Dalam konteks pembangunan “madani” mencerminkan masyarakat berperadaban tinggi, menjunjung nilai-nilai etika, moral, dan spiritual, serta menjaga harmoni sosial, hidup dalam keteraturan, menghargai hak dan kewajiban, dan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat.

Selain itu, madani juga mencerminkan bahwa masyarakat hidup dengan berbasiskan pada kearifan lokal, yakni masyarakat yang memelihara adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi “Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK)”.

Madani juga menunjukkan kondisi masyarakat yang maju secara sosial dan spiritual, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian, Sumatera Barat Madani adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai keagamaan dan adat sebagai fondasi kehidupan sosial dan pemerintahan yang adil, beretika, dan bermartabat.

MAJU

Kata maju dalam visi ini dimaknai sebagai kondisi pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan infrastruktur. Maju juga menunjukkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat.

Maju juga mencerminkan modern namun tetap berakar pada nilai tradisional, yang berarti tidak meninggalkan identitas lokal dalam proses pembangunan. Sehingga kemajuan pembangunan diharapkan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kapasitas daya saing daerah di berbagai bidang strategis.

BERKEADILAN

Keadilan dalam konteks pembangunan tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup terjadinya **Pemerataan hasil pembangunan** antar wilayah, antar kelompok sosial, dan antar sektor, sehingga tidak ada daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal, terjadinya **Kesempatan yang setara** dalam mengakses pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta terwujudnya **Pemberdayaan kelompok rentan**, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Berkeadilan juga mencerminkan semangat inklusivitas dan keberpihakan terhadap kelompok marjinal, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan prinsip *no one left behind*.

Sedangkan Misi pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1) Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas
2) Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan
3) Misi 3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan
4) Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat
5) Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana
6) Misi 6.Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas

7) Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM
8) Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

Berdasarkan visi dan misi diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban berdasarkan visi dan misi diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang mempunyai tugas pokok yaitu membantu Walikota melaksanankan urusan pemerintah daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat akan melaksanakan **misi keenam**, yaitu: ***Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas***. Dengan tujuan, yaitu: Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas. Selanjutnya sasarannya yaitu: Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas.

Sehubungan hal diatas, maka pelayanan perangkat daerah yang terkait yaitu upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat, pembinaan pemadamaan kebakaran, pemenuhan standar pelayanan minimal urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta tata pemerintahan yang baik dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Faktor-faktor penghambat pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu: kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur, masih kurangnya kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta masih terjadinya pelanggaran norma agama, adat dan budaya kemudian adanya potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat serta penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran di tingkat kabupaten/kota belum terpenuhi. Sedangkan faktor pendorongnya, keberadaraan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi membantu Walikota melaksanakan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Tujuan pelayanan yang ditetapkan oleh pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dalam Renstra Tahun 2025-2029 adalah mengacu pada tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029.

Penjabaran tujuan dan sasaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: "***meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum***".

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan dan sasaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
   Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah :
   a. Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda.
   b. Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Sasarannya "Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah".

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang
Tahun 2025

No.	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Renstra 2025	Target Renja Perubahan 2025
1	NSPK tentang Satpol PP (PP No.16 Tahun 2018 dan tentang SPM PP No.2 Tahun 2018 dan Permendagri No.114 Tahun 2018	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase penurunan pelanggaran Perda	2,5%	2,5%
			1. Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan trantibum linmas dan penegakan perda	Persentase Penyelenggaraan Tratibumlinmas	100%	100%
2	Sasaran 4.1 RPJMD : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		2. Meningkatnya kualitas pelayanan pemadam kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan WMK	100%	100%
			3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	65,30	65,30

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program adalah instrumen kebijakan dari beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan:

- Pencapaian visi misi kepala daerah apabila dikaitkan dengan visi dan misi Walikota Padang Panjang, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi Perangkat Daerah pendukung dalam pencapaian misi 4 *"Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat"* Tujuan ke 4 yaitu *"Terwujudnya keamanan masyarakat, perlindungan sosial, Internalisasi serta Aktualisasi Nilai Nilai Agama dan Budaya dalam kehidupan masyarakat"* dan Sasaran ke 13 yaitu *"Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum"* dari RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang berperan untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong

Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi dengan strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Arah kebijakan yang ditentukan Gerakan Sadar dan Taat Aturan dengan indikator kinerja sasaran Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan meliputi :

1. Jumlah Program dan kegiatan :

   Adapun jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebanyak 3 program dan sebanyak 10 kegiatan serta 19 sub kegiatan.

2. Penyebaran lokasi program dan kegiatan :

   Semua program dan kegiatan tersebut berada dilingkungan wilayah Kota Padang Panjang

3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber pendanaannya (APBD/APBN)

b. Penjelasan jika rumusan program kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025 awal yang meliputi 3 (Tiga) program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan sebab :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
   a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
      1) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
      2) Penyediaan Layanan Dasar dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan Kepala Daerah
   b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
      1) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
   a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
      1) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
      2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
   b. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
      1) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
      2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berkenaan dalam

hal ini terkait realisasi dan capaian pada triwulan I, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan diperkirakan akan berpengaruh terhadap realisasi target pelaksanaan program/kegiatan dan berakibat terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran. .

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN								**12.202.093.398**	**12.367.084.245**	**11.484.539.832**							**8.921.977.195**	**SATPOL PP**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								**12.202.093.398**	**12.367.084.245**	**11.484.539.832**							**8.921.977.195**	**SATPOL PP**
	1.05.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								**12.202.093.398**	**12.367.084.245**	**11.484.539.832**							**8.921.977.195**	**SATPOL PP**
51	**1.05.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	**%**	**100**		**100**	**100**	**100**	**6.841.281.698**	**7.461.124.345**	**6.585.717.232**							**5.764.488.195**	**SATPOL PP**
	1.05.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**		**100**	**90**	**100**	**5.333.431.498**	**6.029.567.805**	**5.839.973.852**			**-**	**Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis**	**ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**		**4.714.389.175**	**SATPOL PP**
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	4128		688	574	688	5.333.431.498	6.029.567.805	5.839.973.852	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			4.714.389.175	SATPOL PP
	1.05.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**%**	**100**		**100**	**0**	**0**			**-**			**-**	**Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis**	**-**		**30.750.000**	**SATPOL PP**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	852		221	174	0			-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			30.750.000	SATPOL PP
	1.05.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100**		**100**	**90**	**100**	**242.195.200**	**280.704.740**	**142.716.340**			**-**	**Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis**	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**		**223.356.650**	**SATPOL PP**
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24		4	1	4	3.162.000	2.715.400	4.287.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			3.356.650	SATPOL PP
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24		4	12	4	23.966.700	14.739.340	23.828.940	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			40.000.000	SATPOL PP
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	25		5	5	5	15.079.500	15.007.000	14.769.660	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			15.000.000	SATPOL PP
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	144		24	15	24	199.987.000	248.243.000	99.830.440	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			165.000.000	SATPOL PP
	1.05.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan**	**%**	**100**		**100**	**90**	**100**	**141.872.600**	**149.349.600**	**35.593.900**			**-**	**Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis**	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**		**40.000.000**	**SATPOL PP**
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	32		0	2	4	141.872.600	149.349.600	35.593.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			40.000.000	SATPOL PP
	1.05.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi**	**%**	**100**		**100**	**90**	**100**	**132.432.000**	**136.655.200**	**119.102.140**			**-**	**Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis**	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**		**98.516.800**	**SATPOL PP**
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	72		12	12	12	4.148.000	3.880.000	1.843.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			5.000.000	SATPOL PP

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	216		36	36	36	35.384.000	35.384.000	19.867.240	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			0,00	SATPOL PP
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	72		12	12	12	92.900.000	97.391.200	97.391.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			93.516.800	SATPOL PP
	1.05.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik**	**%**	**100**		**100**	**90**	**100**	**991.350.400**	**864.847.000**	**515.911.400**			**-**	**Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis**	**Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**		**657.475.570**	**SATPOL PP**
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	156		26	26	26		864.847.000	448.331.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			587.263.570	SATPOL PP
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	180		30	30	30	27.557.200	29.252.800	16.508.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			0,00	SATPOL PP
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10		1	2	1	200.878.200	48.160.000	51.072.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			70.212.000	SATPOL PP
54	**1.05.02.**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkaan**	**%**	**100**		**100**	**100**	**100**	**4.161.774.000**	**3.888.261.100**	**3.977.263.900**							**3.006.489.000**	**SATPOL PP**
			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	**%**	**80**		**74**	**0**	**75**											**SATPOL PP**
			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	**%**	**70**		**0**	**0**	**0**											**SATPOL PP**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.05.02.2.01.	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Operasi Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum**	**Operasi**	**35**		**2**	**3**	**2**	**3.881.788.800**	**3.670.296.300**	**3.643.226.400**			**-**	**Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis**	**Bidang Trantibum dan Penegakkan Perda**		**2.873.840.000**	**SATPOL PP**
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	330		102	55	55	3.796.248.800	3.605.527.400	3.639.726.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis			2.803.840.000	SATPOL PP
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	18		8	8	8	15.000.000	5.432.400	3.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis			30.000.000	SATPOL PP
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	52		0	5	0	70.540.000	59.336.500	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis			40.000.000	SATPOL PP
	1.05.02.2.02.	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Jumlah Operasi Penegakan Perda**	**Operasi**	**17**		**1**	**1**	**2**	**279.985.200**	**217.964.800**	**334.037.500**			**-**	**Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis**	**Masyarakat dan/atau objek pelanggar Perda dan Perkada**		**132.649.000**	**SATPOL PP**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	5		0	1	0	10.045.200	27.504.800	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis			25.000.000	SATPOL PP
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	34		8	8	2	269.940.000	190.460.000	334.037.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis			107.649.000	SATPOL PP
55	**1.05.04.**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran**	**%**	**100**		**0**	**0**	**10**	**970.602.300**	**940.286.000**	**853.978.300**							**151.000.000**	**SATPOL PP**
			Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	**%**	**100**		**0**	**0**	**100**											**SATPOL PP**
	1.05.04.2.01.	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Jenis kegiatan Pencegahan Pengendalian Pemadaman Kebakaran**	**Jenis Kegiatan**	**26**		**1**	**2**	**2**	**773.182.800**	**789.346.600**	**799.524.700**			**-**	**Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis**	**Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat**		**80.000.000**	**SATPOL PP**
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	75		12	15	15	682.052.800	537.876.600	520.349.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis			0,00	SATPOL PP
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	13		0	0	0			-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis			40.000.000	SATPOL PP

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	36		0	15	4	91.130.000	251.470.000	279.175.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis				40.000.000	SATPOL PP
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Keluarga	58		0	0	0			-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis				0,00	SATPOL PP
	1.05.04.2.04.	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan**	**Kegiatan**	**11**		**0**	**2**	**1**	**105.239.500**	**66.515.150**	**40.832.100**			**-**	**Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis**	**Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat**		**45.000.000**	**SATPOL PP**
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	250		0	50	0	60.008.000	25.728.350	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis				0,00	SATPOL PP
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Kelurahan	16		0	16	16	45.231.500	40.786.800	40.832.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis				45.000.000	SATPOL PP
	1.05.04.2.05.	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Persentase pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia**	**Persen**	**100**		**100**	**100**	**100**	**92.180.000**	**84.424.250**	**13.621.500**			**-**	**Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis**	**Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat**		**26.000.000**	**SATPOL PP**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	72		134	12	12	25.000.000	17.740.000	5.259.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis			0,00	SATPOL PP
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	42		0	5	1	67.180.000	66.684.250	8.362.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang entram dan agamis			26.000.000	SATPOL PP

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2025. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Renja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang selama tahun 2025. Terlaksananya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Juni 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

BENNY, SSTP
Pembina Tk I/ NIP. 19840402 20021

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025

DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang.....3
1.2 Landasan Hukum.....4
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan.....6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN ANAK

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Triwulan I 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....43
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....50
2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD 2025.....55
2.5 Penelahaan usulan program dan kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat 68

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 69

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 69
3.2 Tujuan dan Sasaran.....69
3.3 Program dan Kegiatan 85

BAB V PENUTUP 133

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d Tahun 2024
Tabel 2.3	Capaian Indicator Kinerja Kunci KeluaranDinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 2.4	Target pencapaian SPM sampai dengan triwulan I tahun 2025
Tabel. 2.5	Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 2.6	Usulan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Para Pemangku kepentingan Tahun 2025
Tabel 3.1	Rekap Jumlah Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tabel 3.2	Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik.

Melalui Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan direncanakan dan ditentukan kemana Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Dengan demikian dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat penting untuk disusun sehingga dapat dipastikan adanya sinergitas dan konsistensi antara rencana kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan perencanaan diatasnya serta peraturan perundangan yang berlaku.

Terkait hal tersebut, maka Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu merancang pelaksanaan tugas-tugasnya agar lebih jelas dan terukur. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun sebagai wujud penjabaran / pelaksanaan dari RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan digunakan sebagai dasar pemikiran perencanaan kinerja maupun anggaran pada tahun-tahun mendatang. Dengan adanya program kerja yang selaras, serta didukung oleh kesamaan referensi dan persepsi dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , maka diharapkan ini bisa menjadi acuan dan referensi bagi pengembangan rencana kerja operasional dari seluruh komponen penyelenggara fungsi pembinaan kesatuan bangsa dan pembangunan politik.

Sehingga nantinya dapat diterima sebagai pedoman untuk penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pemerintah.

Panjang.Padang Panjang, 30 Juni 2025

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Drs. OSMAN BIN NUR, M,Si

Penata Muda Utama NIP 196901201989021001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat dan daerah serta antar lembaga apemerintah di daerah, maka dalam system perencanaan pembangunan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). SPPN mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan secara terintegrasi yang saling terkait antara perencanaan ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Permendagri No. 77 T ahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD maka diamanatkan bagi daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) untuk mampu melakukan perencanaan dan penganggaran sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki dalam upaya pengembangan potensi sumberdaya daerah untuk pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.

Pembangunan pada dasarnya merupakan implementasi dari suatu perencanaan, baik perencanaan yang bersifat jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM) maupun yang bersifat perencanaan tahunan (RKP). Berkaitan dengan perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD

serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD mengamanatkan Bupati/Walikota mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahannya menyusun Rancangan RPJMD yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program prioritas yang disampaikan/disosialisasikan pada waktu menjadi Calon Walikota serta paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik, Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota harus sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah menjadi pedoman penetapan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Perubahan RKPD dan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Berkenaan dengan amanat tersebut Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra yang dituangkan dalam setiap tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik yang dilaksanakan dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Perubahan Renja Tahun 2025 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian rencana kerja dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta kebijakan nasional maupun provinsi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksnaan program kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Melalui Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

akan direncanakan dan ditentukan kemana Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Dengan demikian dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat penting untuk disusun sehingga dapat dipastikan adanya sinergitas dan konsistensi antara rencana kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan perencanaan diatasnya serta peraturan perundangan yang berlaku.

1.2. Landasan Hukum

Secara legalitas formal, penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 ini didasarkan antara lain kepada :

a. Undang-undang (UU) Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat;
b. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi/Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminaif Terhadap Wanita (CEDAW);
d. Undang Undang Nomor 68 tahun 1985 tentang Hak-Hak Politik Perempuan;
e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
h. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
i. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;

j. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin;
k. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
l. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
m. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
n. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
o. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
p. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
s. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);

t. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
u. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 umumnya mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045
v. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang ;
w. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
x. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana Perubahan Kegiatan dan anggaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025.
2. Menjaga integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program kegiatan agar selaran dengan program tahunan daerah
3. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan orgranisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta perubahan teknis lainnya seperti penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran sub kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 disusun dengan sistematika berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN ANAK
- 2.1 Evaluasi Perubahan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD tahun 2025
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN ANAK

3.1 Telahan terhadap kebijakan Nasional/

3.2 Tujuan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta narasinya

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUGAN ANAK

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2025 pada Triwulan I

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai Triwulan I tahun 2025 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja sampai Triwulan I tahun 2025 yang dikaitkan dengan pencapaian target Tahun 2025 berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksankan.

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang melaksanakan 3 (tiga) urusan Wajib yang terdiri dari Urusan Sosial, Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan struktur organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari empat bidang dan satu secretariat..

Rata-rata capaian kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai triwulan I Tahun 2025 adalah 26 % dengan target 17 % Namun masih terdapat beberapa subkegiatan dengan realisasi keuangan dibawah dibawah target. Realisasi pelaksanaan rencana kerja per urusan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KET
										I		II		III		IV									
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13	14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**	**100 %**	**15.901.884.786**	**100 %**	**6.707.350.978**	**100**		**100**	**5.204.350.724**							**100**	**5.204.350.724**	100	33	**100 %**	**5.142.969.762**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**12.167.792.646**	**100 %**	**5.486.289.035**	**100**		**100**	**-**							**100**	**-**	100	-	**100 %**	**4.055.930.882**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	1554 Orang/bulan	12.167.792.646	**560 Orang/bulan**	**5.486.289.035**	144	1.489.412.197	144	**1.229.496.302**							**144**	**1.229.496.302**	144	10	518 Orang/ bulan	4.055.930.882	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 %**	**36.500.000**	**100 %**	**17.850.000**	**100**		**100**	**-**							**100**	**-**	100	-	**0 %**	**-**	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	74 Paket	36.500.000	**40**	**17.850.000**	0	-	0	**-**							**-**	**-**	-	-	0 Paket	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**898.224.100**	**100 %**	**290.706.177**	**100**		**100**	**898.224.100**							**100**	**898.224.100**	100	100	**100 %**	**333.916.200**	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KET
										I		II		III		IV								
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13	14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalsi listrik/penerangan bangunankantor yang disediakn	15 Jenis	16.175.100	**4 Jenis**	**5.354.000**	4	1.000.000	4	**255.000**							**4**	**255.000**	4	2	5 Jenis	5.391.700	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 Paket	195.000.000	**4 Paket**	**42.705.250**	4	29.000.000	4	**4.572.000**							**4**	**4.572.000**	4	2	7 Paket	65.000.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	58.999.000	**12 Paket**	**7.951.100**	1	7.000.000	1	**2.969.800**							**1**	**2.969.800**	1	5	4 Paket	24.499.500	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	616.050.000	**24 Laporan**	**234.695.827**	3	98.250.000	3	**47.396.392**							**3**	**47.396.392**	3	8	24 Laporan	233.025.000	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	2 Dokumen	12.000.000	**-**	**67.046.000**	0		0	**-**							**-**	**-**	-	-	1 Dokumen	6.000.000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100 %**	**600.000.000**	**100 %**	**67.046.000**	**100**		**100**	**600.000.000**							**100**	**600.000.000**	100	100	**100 %**	**20.000.000**	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	0 Unit	100.000.000	**13 Unit**	**67.046.000**	13	18.549.000	13	**-**							**13**	**-**	13	-	5 Unit	20.000.000	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	**0 Unit**					**-**							**-**	**-**	-		0 Unit	-	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	500.000.000	**-**					**-**							**-**	**-**	-	-	0 Unit	-	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	0 Unit	-	**0 Unit**					**-**							**-**	**-**	-		1 Unit	-	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KET
										I		II		III		IV								
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13	14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Lainnya yang Disediakan																					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**1.566.545.040**	**100 persen**	**674.145.930**	**100**		**100**	**1.566.545.040**							**100**	**1.566.545.040**	100	100	**100 %**	**522.181.680**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	161.681.040	**36 Laporan**	**30.612.930**	3	11.400.000	3	**7.723.901**							**3**	**7.723.901**	3	5	3 Laporan	53.893.680	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.404.864.000	**12 Laporan**	**643.533.000**	3	196.450.000	3	**184.132.000**							**3**	**184.132.000**	3	13	4 Laporan	468.288.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 %**	**632.823.000**	**100 %**	**171.313.836**	**100**		**100**	**632.823.000**							**100**	**632.823.000**	100	100	**100 %**	**210.941.000**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	63 Unit	334.575.000	**21 Unit**	**109.757.436**	21	34.065.600	21	**20.105.689**							**21**	**20.105.689**	21	6	21 Unit	111.525.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81 Unit	106.548.000	**27 Unit**	**33.299.400**	27	51.400.000	27	**5.727.500**							**27**	**5.727.500**	27	5	27 Unit	35.516.000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	165 Unit	71.700.000	**55 Unit**	**8.790.000**	55	6.000.000	55	**4.030.000**							**55**	**4.030.000**	55	6	55 Unit	23.900.000	
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	18 Unit	120.000.000	**6 unit**	**19.467.000**	6	20.142.000	6	**350.000**							**6**	**350.000**	6	0	6 Unit	40.000.000	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KET
										I		II		III		IV								
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13	14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		
			Dipelihara/Direhabilitasi																					
	Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif**	**85 %**	**3.609.039.100**	**75 Persen**	**1.363.089.575**	**75**		**75**	**110.686.453**							**75**	**110.686.453**	75	3	**80 %**	**1.269.679.700**	
		Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	**Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina**	**444 Lembaga**	**3.609.039.100**	**60 Lembaga**	**1.363.089.575**	**60**		**60**	**-**							**60**	**-**	60	-	**148 Lembaga**	**1.269.679.700**	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	276 Orang	801.668.400	**92 Orang**	**279.579.650**	92	61.241.300	92	**47.520.000**							**92**	**47.520.000**	92	6	92 Orang	267.222.800	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Orang	25.920.000	**2 Orang**	**4.800.000**	2	1.600.000	2	**-**							**2**	**-**	2	-	2 Orang	8.640.000	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Lembaga	2.500.000.000	**60 Lembaga**	**981.356.148**	60	127.896.000	60	**45.666.453**							**60**	**45.666.453**	60	2	60 Lembaga	900.000.000	
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan	15 Sertifikat	281.450.700	**2 Sertifikat**	**97.353.777**	2	29.808.300	2	**17.500.000**							**2**	**17.500.000**	2	6	5 Sertifikat	93.816.900	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KET
										I		II		III		IV								
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13	14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Sertifikat)																					
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase PPKS yang Tertangani**	**90 %**	**2.620.675.456**	**90 %**	**800.960.807**	**90**		**90**	**297.553.126**							**90**	**297.553.126**	90	11	**90 %**	**873.711.400**	
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Jumlah penyandang disablitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**	**2250 Orang**	**1.499.541.256**	**500**	**492.033.690**				**-**							**-**	**-**	-	-	**750 Orang**	**500.000.000**	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1377 Orang	600.000.000	**285**	**144.729.544**	210	199.930.450	210	**121.847.626**							**210**	**121.847.626**	210	20	459 Orang	200.000.000	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	225 Orang	450.000.000	**499**	**216.659.600**	210	145.680.000	210	**84.646.500**							**210**	**84.646.500**	210	19	75 Orang	150.000.000	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan	66 Orang	240.000.000	**15**	**62.906.500**	9	12.882.000	9	**22.590.750**							**9**	**22.590.750**	9	9	22 Orang	80.000.000	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KET
										I		II		III		IV								
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13	14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Kabupaten/Kota (Orang)																					
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	149.541.256	**50 Orang**	**25.683.796**	7	19.206.666	7	**2.159.500**							**7**	**2.159.500**	7	1	50 Orang	50.000.000	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150 Orang	60.000.000	**50 Orang**	**42.054.250**	63	11.000.000	63	**5.475.000**							**63**	**5.475.000**	63	9	50 Orang	20.000.000	
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	**Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**	**2792 Orang**	**1.121.134.200**	**100**	**308.927.117**	**100**		**100**	**-**							**100**	**-**	100	-	**2710 Orang**	**373.711.400**	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	225 Orang	225.000.000	**400**	**26.213.713**	25	11.600.000	25	**13.493.750**							**25**	**13.493.750**	25	6	75 Orang	75.000.000	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun	225 Orang	225.000.000	**400**	**49.342.179**	19	6.260.000	19	**12.320.000**							**19**	**12.320.000**	19	5	75 Orang	75.000.000	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KET
										I		II		III		IV								
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13	14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			Kewenangan Kabupaten/Kota																					
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	30.000.000	**5**	**7.847.000**	4	6.170.000	4	**5.700.000**							**4**	**5.700.000**	4	19	5 Orang	10.000.000	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang	360.000.000	**25**	**134.072.525**	150	6.850.000	150	**6.590.000**							**150**	**6.590.000**	150	2	30 Orang	120.000.000	
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	12 Dokumen	281.134.200	**2**	**91.451.700**	0	20.569.870	0	**22.730.000**							**-**	**22.730.000**	-	8	10 Dokumen	93.711.400	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	**90 %**	**684.088.800**	**86,98 Persen**	**463.563.903**				**16.789.000**							**-**	**16.789.000**	-	2	**87,97 %**	**228.029.600**	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota**	**42 Layanan**	**684.088.800**	**8 layanan**	**463.563.903**				**-**							**-**	**-**	-	-	**17 Layanan**	**228.029.600**	
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	6357 Orang	237.960.000	**1749 orang**	**79.548.600**		40.435.600		**3.037.000**							**-**	**3.037.000**	-	1	2119 Orang	79.320.000	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan	3605 Keluarga	401.128.800	**1142 Keluarga**	**384.015.303**	1142	16.264.600	1142	**13.752.000**							**1.142**	**13.752.000**	1.142	3	1271 Keluarga	133.709.600	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KET
										I		II		III		IV									
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13	14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		
			Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																					
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	390 Orang	45.000.000	**0 Orang**	**-**	0	-	0	**-**							**-**	**-**	-	-	130 Orang	15.000.000	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase korban bencana yang tertangani**	**100 %**	**460.509.957**	**100 %**	**165.138.000**				**10.566.250**							**-**	**10.566.250**	-	2	**100 %**	**153.503.319**	
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana**	**100 %**	**240.000.000**	**100 %**	**165.138.000**				**-**							**-**	**-**	-	-	**100 %**	**80.000.000**	
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	900 Orang	90.000.000	**500**	**15.218.950**	0	-	0	**-**							**-**	**-**	-	-	300 Orang	30.000.000	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	900 Orang	90.000.000	**200**	**6.096.000**	0	10.000.000	0	**6.400.000**							**-**	**6.400.000**	-	7	300 Orang	30.000.000	
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang	900 Orang	60.000.000	**150**	**4.468.000**	0	-	0	**-**							**-**	**-**	-	-	300 Orang	20.000.000	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KET
										I		II		III		IV								
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13	14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		
			Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																					
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Jumlah anggota TAGANA yang dibina**	**90 Orang**	**220.509.957**	**30 Orang**	**139.355.050**				**-**							**-**	**-**	-	-	**30 Orang**	**73.503.319**	
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	90 Orang	220.509.957	**30 Orang**	**139.355.050**	30	22.218.000	30	**4.166.250**							**30**	**4.166.250**	30	2	30 Orang	73.503.319	
			Pemeliharaan dan rehap bangunan markas komando TAGANA	1 Unit		**1 Unit**	**-**				**-**							**-**	**-**	-		0 Unit		
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Persentase TMP yang dipelihara**	**100 %**	**75.000.000**	**100 %**	**24.542.000**				**-**							**-**	**-**	-	-	**100 %**	**25.000.000**	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	**Jumlah makam yang dipelihara**	**294 Makam**	**75.000.000**	**98 Makam**	**24.542.000**				**-**							**-**	**-**	-	-	**98 Makam**	**25.000.000**	
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	294 Makam	75.000.000	**98 Makam**	**24.542.000**	98	508.600	98	-							**98**	-	98	-	98 Makam	25.000.000	
						-	-				-							-	-	-			**219.580.000**	
	Meningkatkan					-	-				-							-	-	-				

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KET
										I		II		III		IV									
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13	14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase organisasi perempuan yang aktif**	**100 Persen**	**648.740.000**	**100 Persen**	**161.100.162**				**11.297.850**							**-**	**11.297.850**	-	2	**100 Persen**	**40.000.000**	
			Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	**20 Persen**		**20 Persen**	**-**				**-**							**-**	**-**	-		**20 Persen**		
		Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	**Jumlah OPD yang memiliki data terpilah**	**69 OPD**	**110.000.000**	**23 OPD**	**53.069.251**				**-**							**-**	**-**	-	-	**23 OPD**	40.000.000	
			Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS	69 OPD		**23 OPD**	**-**				**-**							**-**	**-**	-		**23 OPD**	**30.000.000**	
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	**69 Perangkat Daerah**	**110.000.000**	**23 Perangkat Daerah**	**53.069.251**	**23**	**26.861.400**	**23**	**9.795.350**							**23**	**9.795.350**	23	9	23 Perangkat Daerah	30.000.000	
		Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakat kewenangan kabupaten/kota	**Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisapasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan**	50 %	90.000.000	**50 %**	**6.759.200**	50			**-**							**-**	**-**	-	-	**50 %**	**149.580.000**	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KET
										I		II		III		IV								
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13	14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		
			ekonomi kewenangan kabupaten/kota																					
		Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	**78 Lembaga**	**90.000.000**	**26 Lembaga**	**6.759.200**	**26**	**1.271.150**		**-**							**-**	**-**	-	-	26 Lembaga		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus**	100 persen	448.740.000	**100 Persen**	**101.271.711**				**-**							**-**	**-**	-	-	**100 persen**	149.580.000	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi danPendampingan (Lembaga)	12 Lembaga	-	**15 Dokumen**	**-**		-		**-**							**-**	**-**	-		12 Lembaga	**149.532.000**	
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	**45 Dokumen**	**448.740.000**	**15**	**101.271.711**	**3**	**19.400.000**	**3**	**1.502.500**							**3**	**1.502.500**	3	0	15 Dokumen	**30.000.000**	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KET
										I		II		III		IV								
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13	14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalm unit pelayanan terpadu**	**100 BTJ**	**463.566.000**	**1**	**262.779.926**				**18.172.500**							**-**	**18.172.500**	-	4	**100 BTJ**	30.000.000	
		Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	**Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan**	24 Lembaga	100.000.000	**8 Lembaga**	**60.142.125**				**-**							**-**	**-**	-	-	**8 Lembaga**	**104.502.000**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**18 Dokumen**	**100.000.000**	**6 Dokumen**	**60.142.125**	**1**	**5.071.200**		**-**							**-**	**-**	-	-	6 Dokumen	104.502.000	
		Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenanganan kabupaten/kota	**Persentase kasus yang ditindaklanjuti**	100 %	313.506.000	**100 Persen**	**83.717.801**				**-**							**-**	**-**	-	-	**100 %**	**15.030.000**	
		Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan	**34 layanan**	**313.506.000**	**10 Layanan**	**83.717.801**	**12**	**34.993.750**	**12**	**18.172.500**							**12**	**18.172.500**	12	6	12 layanan	15.030.000	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KET
										I		II		III		IV									
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13	14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		
			kewenangan kabupaten/kota																					
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah	**Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/ Kota**	30 Layanan	50.060.000	**10 Layanan**	**118.920.000**				**-**							**-**	**-**	-	-	**10 Layanan**	**120.620.000**	
	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	**45 Dokumen**	**50.060.000**	**15 Dokumen**	**83.791.500**				**-**							**-**	**-**	-	-	15 Dokumen	**43.855.000**	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Persentase indikator KLA yang terpenuhi**	**85 %**	**353.005.000**	**80 Persen**	**141.884.885**				**36.539.000**							**-**	**36.539.000**	-	10	**83 %**	43.855.000	
		Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	**Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA**	105 Lembaga	122.710.000	**30 Lembaga**	**49.428.250**				**-**							**-**	**-**	-	-	**35 Lembaga**		
		Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	45 Dokumen	122.710.000	**15 Dokumen**	**49.428.250**	1	737.700		**-**							**-**	**-**	-	-	15 Dokumen	**76.765.000**	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non	**90 Organisasi**	**-**	**30 Organisasi**	**-**				**-**							**-**	**-**	-	-	30 Organisasi		

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KET
										I		II		III		IV								
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13	14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		
			Pemerintah, Media dan Dunia Usaha																					
		penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	**Persentase forum anak aktif**	**80 persen**	**230.295.000**	**50 Persen**	**92.456.635**				**-**							**-**	**-**	-	-	**70%**		
			Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA	**100 Persen**		**100 Persen**	**-**				**-**							**-**	**-**	-		**100 Persen**	76.765.000	
			Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA	100 Persen		**100 Persen**					**-**							**-**	**-**	-		**100 Persen**		
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	105 Orang	230.295.000	**35 Orang**	**92.456.635**				**-**							**-**	**-**	-	-	35 Orang	**262.137.000**	
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	-	**1 Dokumen**	**-**	1	37.182.100	1	**36.539.000**							**1**	**36.539.000**	1		1 Dokumen	**62.137.000**	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan**	**100 BTJ**	**823.836.000**	**1**	**257.745.387**				**21.852.570**							**-**	**21.852.570**	-	3	**100 BTJ**	22.137.000	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KET
										I		II		III		IV								
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13	14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		
			pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu																					
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase kasus yang ditindaklanjuti**	30 Lembaga	186.411.000	**100 persen**	**117.395.340**				**-**						**-**	**-**	-	-	**30 Lembaga**	40.000.000	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	66.411.000	**10 Orang**	**87.593.790**	5	16.391.600		**4.843.320**							**-**	**4.843.320**	-	7	10 Orang	**160.000.000**	
		Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	**4 Dokumen**	**120.000.000**	**-**	**29.801.550**	**1**	**6.862.500**	**1**	**1.532.000**							**1**	**1.532.000**	1	1	6 Dokumen	40.000.000	
		Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/ kota	**Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani**	100 %	472.425.000	**100 %**	**98.449.300**				**-**							**-**	**-**	-	-	**100 %**	120.000.000	
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	34 Orang	107.125.000	**10 Orang**	**26.256.000**	12	12.390.000	10	**-**							**10**	**-**	10	-	12 Orang	**40.000.000**	
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	**34 Orang**	**365.300.000**	**12 Orang**	**72.193.300**		**46.278.250**		**15.477.250**							**-**	**15.477.250**	-	4	12 Orang	40.000.000	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KET
										I		II		III		IV								
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13	14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga layanan yang mengikuti penguatan dan pengembangan kapasitas**	24 Lembaga	165.000.000	**8 Lembaga**	**41.900.747**				**-**							**-**	**-**	-	-	**8 Lembaga**	**78.000.000**	
		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 Orang	165.000.000	**10 Orang**	**41.900.747**	5		5	**-**							**5**	**-**	5	-	10 Orang	**28.000.000**	
						-	-				-							-	-	-			23.000.000	
	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana					-	-				-							-	-	-			-	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	**Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan**	**100 %**	**387.100.000**	**100 %**	**86.664.235**				**3.193.500**							**-**	**3.193.500**	-	1	**100 %**	5.000.000	
		Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah/Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan**	1 Dokumen	111.000.000	**1 Dokumen**	**15.279.950**				**-**							**-**	**-**	-	-	**1 Dokumen**	**50.000.000**	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KET
										I		II		III		IV								
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13	14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		
		Implementasi Pendidikan Kependukkan jalur pendidikan formal dan Non Formal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	75 Kegiatan	66.000.000	**1 kegiaan**	**15.279.950**	1			-							-	-	-	-	25 Kegiatan	-	
		Sosialisasi tentang Pemanfaatan kajian tentang dampak kependudukkan beserta model solusi strategi sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan.	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	40 Organisasi	-	-	-	40			-							-	-	-		40 Organisasi	30.000.000	
		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	**60 Satuan Pendidikan**	**45.000.000**	-	-	**20**			-							-	-	-	-	12 Dokumen	20.000.000	
		Pemetaan Perkiraan pengendalian Penduduk cakupan daerah Kabuapten/kota	**Jumlah rumah dataku yang dikembangkan**	48 Unit	276.100.000	**16 unit**	**71.384.285**				-							-	-	-	-	16 Unit	**745.440.001**	
		pengolahan dan pelaporan Data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian	36 Dokumen	126.100.000	**12 Dokumen**	**23.925.480**	3	3.859.200	3	**3.193.500**							**3**	**3.193.500**	3	3		**55.000.000**	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KET
										I		II		III		IV								
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13	14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		
			Lapangan dan Pelayanan KB																					
		Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) diSektor Lain yang Dibentuk	48 Unit	90.000.000	**16 Unit**	**30.928.565**	16		16	-							**16**	-	16	-		**0**	
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan PengumpulanData Keluarga	12 Laporan	60.000.000	**12 Laporan**	**19.400.000**	3	2.400.000	3	-							**3**	-	3	-	12 Laporan	40.000.000	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	**Persentase CPR**	**67 %**	**1.856.568.250**	**62 Persen**	**1.171.506.159**	**50**			**8.942.520**							**-**	**8.942.520**	-	0	**65 %**	15.000.000	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya Lokal	**Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif**	**2434 Orang**	182.900.000	**2287 orang**	**479.389.112**	1050			**-**							**-**	**-**	-	-	**2450 Orang**	**167.880.000**	
		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	17.900.000	**4 Laporan**	**139.779.915**	1	19.275.815	1	**8.942.520**							**1**	**8.942.520**	1	50	4 Laporan	30.000.000	
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	21 Dokumen	120.000.000	-	-		8.470.000		-							-	-	-	-	7 Dokumen	137.880.000	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KET
										I		II		III		IV									
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13	14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		
			dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan																					
		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	90 Organisasi	45.000.000	-	**151.742.420**	30			-							-	-	-	-	30 Organisasi	**56.000.000**	
		Pendayaangunaan Tenaga Penyuluh KB (Petugas Lapangan KB)	**Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina**	297 Orang	503.640.000	-	**250.449.997**	99			-							-	-	-	-	**99 Orang**	56.000.000	
		Penggerakan Kader Institusi masyarakat	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	264 Orang	90.000.000	-	**46.200.000**	88	12.800.000		-							-	-	-	-	88 Orang	**1.095.120.001**	
		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan olehPKB/PLKB	**40 Organisasi**	**413.640.000**	-	**204.249.997**	**40**	**37.720.000**		-							-	-	-	-	40 Organisasi	**552.560.001**	
		Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakat tingkat Daerah Kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan	**Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB**	50 persen	166.908.250	**50 persen**	-	50			-							-	-	-	-	**50 %**	30.000.000	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KET
										I		II		III		IV									
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13	14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		pembinaan kesertaan ber KB.																						
		Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	9 Organisasi	166.908.250	-	-		15.530.000		-							-	-	-	-	3 Organisasi	522.560.000	
	Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stuntin	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga**	**67 %**	**3.462.414.000**	**62 Persen**	**1.018.190.811**				**40.563.175**							**-**	**40.563.175**	-	1	**65 %**	1	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	**Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina**	**342 Kelompok**	**1.772.680.000**	**102 kelompok**	**274.456.812**	**114**			**-**							**-**	**-**	-	-	**114 Kelompok**	-	
		Promosi dan sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	9 Laporan	205.000.000	**3 Laporan**	**122.620.812**	1			**-**							**-**	**-**	-	-	3 Laporan	**542.560.000**	

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KET
										I		II		III		IV								
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13	14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,,PIK R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Orang)	669 Kader	1.567.680.000	-	-	223	93.660.000		-							-	-	-	-	223 Kader	522.560.000	
		Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pelaksana/Kader Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	4 Laporan	-	-	-	1			-							-	-	-		4 Laporan	20.000.000	
		Pengadaan Sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			**Unit**	**151.836.000**				-							-	-	-		Unit		
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	**Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB**	**100 %**	**1.689.734.000**	**366.428.000**	**743.733.999**				-							-	-	-	-	**100 %**		

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME/ KEGIATAN OUTPUT)	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025-2029 (S/D AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (TARGET S/D TRIWULAN YANG DI EVALUASI) 2025		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2025) TW 1,2,3,4		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025			TARGET CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2025	KET
										I		II		III		IV								
1	2	3	4					6		7		8		9		14		11		12			13	14
						K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Kesejahteraan Keluarga																						
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	69 Organisasi	1.629.734.000	**23 Organisasi**	**492.733.999**	23	101.234.400		**40.563.175**							**-**	**40.563.175**	-	2	23 Organisasi		
		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargabagi Mitra Kerja	1 Laporan	60.000.000	-	-		-		-							-	-	-	-	1 Laporan		

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan I Tahun 2025 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas kegiatan :
    a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi keuangan: 24 % realisasi fisik : 24 %
    b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi keuangan: 0 % realisasi fisik : 0 %
    c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi keuangan: 16 % realisasi fisik : 16 %
    d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi keuangan: 16 % realisasi fisik : 16 %
2. Program Pemberdayaan Masyarakat
    a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 9% realisasi fisik : 9%
3. Program Rehabilitasi Sosial
    a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan realisasi keuangan: 37 % realisasi fisik : 37%
    b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan realisasi keuangan: 14 % realisasi fisik : 14 %
    c.
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
    a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 8 % realisasi fisik : 8%
5. Program Penanganan Bencana
    a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 40 % realisasi fisik : 40 %
    b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap

Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 0-% realisasi fisik : 0%

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
    a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 0-% realisasi fisik : 0-%
7. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
    a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 13 % realisasi fisik : 13%
    b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 0 % realisasi fisik : 0%
    c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 1% realisasi fisik : 1%
8. Program Perlindungan Perempuan
    a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%
    b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 19% realisasi fisik : 19%
    c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%
9. Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
    a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%
    b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 27% realisasi fisik : 27%
10. Program Perlindungan Khusus Anak
    a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para

Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 4 % realisasi fisik : 4%

b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%

11. Program Pengendalian Penduduk
    a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%
    b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 4% realisasi fisik : 4%
12. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
    a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan realisasi keuangan: 6% realisasi fisik : 6%
    b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%
    c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan: 3% realisasi fisik : 3%
    d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan
    e. Ber-KB dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%
13. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
    a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan realisasi keuangan: 0% realisasi fisik : 0%
    b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan realisasi keuangan: 13% realisasi fisik : 13%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) Tahun 2024 Di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LPPD) merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka pencapaian tujuan serta sasaran yang dirumuskan di dalam Rencana Strategis (renstra) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025-2029. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan Pemerinta nmor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evalusasi penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Dalam LPPD, akuntabilitas yang dijabarkan terdiri dari hasil pelaksanaan perjanjian kinerja yang berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, capaian kinerja dari 24 indikator kinerja yang diukur, 12 indikator melebihi target yaitu, Prevalensi *Stunting*, Angka PPKS, sementara masih ada 1 indikator yang belum bisa diukur karena belum diketahui realisasinya. Indikator yang belum bisa diukur dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), nilai ini baru dirilis dalam portal BPS Provinsi Sumatera Barat setelah Laporan Kinerja Tahun 2022 dikirimkan. Nilai IDG Kota Padang Panjang Tahun 2022 adalah 67,82 masih kurang 1,62 dari target dengan capaian 97,67%. Dari 24 indikator kinerja pada tahun 2022, sebanyak 11 indikator capaiannya telah melebihi target akhir RPJMD yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif, capaiannya tidak hanya melebihi target yang ditetapkan tahun 2022 saja, bahkan telah melebihi target akhir RPJMD.

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan Pemerintahan Daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing Urusan Pemerintahan dan Urusan

Penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh Pemerintah Daerah secara lengkap. Pada Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibagi menjadi 3 indikator, yaitu:

1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (merupakan Indikator Kinerja Kunci Output yang berasal dari indikator Kinerja Kunci Outcome pada masing-masing urusan);
2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (merupakan Indikator Kinerja Kunci Outcome pada masing-masing urusan), dan
3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Untuk melihat pencapaian dari masing-masing indikator (Indikator Kinerja Kunci Keluaran, Indikator Kinerja Kunci Hasil dan Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan) Pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang s.d Tahun 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian Tahun ke-			Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2025	2026	
1	Angka PPKS		IKK	4.68	4.49	4.30	3,69			4.49	4.30	
2	Persentase PPKS yang tertangani		IKK	80	82.5	85	97			82.5	85	
3	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif		IKK	100	100	100	100			100	100	
4	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Kelembagaan sosial yang aktif		IKK	100	100	100	100			100	100	
5	Persentase lansia terlantar yang tertangani	SPM		100	100	100	100			100	100	
6	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tertangani	SPM		100	100	100	100			100	100	
7	Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan	SPM		100	100	100	100			100	100	
8	Persentase pelayanan penanganan gelandangan, pengemis, PSK dan korban penyalahgunaan NAPZA	SPM		100	100	100	100			100	100	
9	Persentase penurunan KK miskin		IKK									
10	Persentase korban bencana yang tertangani	SPM		100	100	100	100			100	100	
11	Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara		IKK	100	100	100	100			100	100	
12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		IKK	71.44	73.05	75.06	75,62			73.05	75.06	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian Tahun ke-			Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2025	2026	
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		IKK				98,23					
14	Predikat APE		IKK	Madya	Nindya	Nindya				Nindya	Nindya	
15	Persentase ARG terhadap APBD		IKK				15.38					
16	Persentase organisasi perempuan aktif		IKK	100	100	100	100			100	100	
17	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih		IKK	100	100	100	100			100	100	
18	Tingkat capaian Kota Layak Anak		IKK	Utama	Utama	Utama				Utama	Utama	
19	Persentase indikator KLA yang tepenuhi sesuai standar		IKK	83.5	87	90	80			87	90	
20	Persentase forum anak yang aktif		IKK	83,5	87	90	80			87	90	
21	Persentase kasus anak korban kekerasan yang terselesaikan		IKK	100	100	100	100			100	100	
22	TFR (Total Fertility Rate)		IKK	2,35	2,3	2,25	2,43			2,3	2,25	
23	Rata-rata jumlah anak perkeluarga		IKK	2,35	2,3	2,25	2,43			2,3	2,25	
24	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk		IKK	100	100	100	100			100	100	
25	Unmeet Need		IKK	22,5	22,3	22				22,3	22	
26	Prevalensi Stunting		IKK	14,00	12,60	11,20	9,49			12,60	11,20	
27	Persentase keluarga sasaran tribina yang ber KB		IKK	70.75	70.80	70.90	61			70.80	70.90	
28	Persentase kelompok PIK R yang aktif		IKK	75	75	75	75			75	75	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian Tahun ke-			Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2025	2026	
29	Persentase PUS keluarga sasaran BKB yang memperoleh pendampingan 1000 HP kelahiran		IKK	70	72.5	75	74			72.5	75	
30	Persentase kelompok PIK Remaja yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu		IKK	100	100	100	90			100	100	

Tabel, 2.3
Capaian Indicator Kinerja Kunci Keluaran
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	NO IKK	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN	KETERANGAN
URUSAN	OUTCOME			KINERJA	
1		Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki	**1**		-
2		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjur usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	**1**		-
3		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	**0**		-
4		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	**410**		-
5		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	**2**		-
6		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket	**410**		-
	1.f.1	permakanan sesuai standar gizi			
7		Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	**1**		-
8		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	**379**		-
9		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	**35**		-
10		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	**0**		-
11		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	**1**		-
12		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	**0**		-
13		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	**0**		-
14		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	**2**		-
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan	**143**		-
15		bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial			

NO	NO IKK	IKK OUTPUT	NILAI	CAPAIAN	KETERANGAN
URUSAN	OUTCOME			KINERJA	
16		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	**33**		-
17		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	**1**		-
18		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	**7**		-
19		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	**5**		-
20		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan Keluarga	**16**		-
21		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	**8**		-
1		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	**217**		-
2		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	**60**		-
3	1.f.2	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	**1**		-
4		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	**11**		-
5		Jumlah korban bencana yang meneriman pelayanan dukungan psikososial	**18**		-
6		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	**28**		-

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Di pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai implemetasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah masalah kesejahteraan sosial yang di tetapkan oleh Kementrian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapainnya.

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah di tetapkan oleh Kementrian Sosial RI berdasarkan Peraturan Kementrian Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial untuk Tahun 2025 tertuang dalam program Rehabilitasi Sosial meliputi Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Program Penangan Bencana dengan kegiatan Kegiatan Penyelanggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota. SPM Bidang Urusan Sosial mencakup Pelayanan dasar yaitu :

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan sub Kegiatan :
    a. Penyediaan Permakanan
    b. Penyediaan Sandang
    c. Penyediaan Alat Bantu
    d. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
    e. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
2. Kegiatan Penyelanggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota
    a. Penyediaan Permakanan
    b. Penyediaan Sandang
    c. Pelayanan Dukungan Psikososial
    d. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Target pencapaian SPM sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Target pencapaian SPM sampai dengan triwulan I tahun 2025

No	Sub kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode Renstra (2026)	Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja s.d Triwulan I 2025		Persentase Tingkat Capaian	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
1.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Jumlah penyandang disablitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	750 Orang	750	646.099.545	499	236.719.376	66,53	36,64
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	459 Orang	459	376.199.545	210	121.847.626	45,75	32,39
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	75 Orang	75	150.000.000	210	84.646.500	280,00	56,43
3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	22 Orang	22	55.900.000	9	22.590.750	40,91	40,41
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50	44.000.000	7	2.159.500	14,00	4,91
5	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50 Orang	50	20.000.000	63	5.475.000	126,00	27,38

No	Sub kegiatan	Indikator	Target Akhir Periode Renstra (2026)	Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja s.d Triwulan I 2025		Persentase Tingkat Capaian	
				Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
2	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 %	100	26.500.000	0	6.400.000	0,00	24,15
1.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300 Orang	300	20.000.000	0	6.400.000	0,00	32,00
2	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300 Orang	300	6.500.000	0	-	0,00	0,00
3	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah anggota TAGANA yang dibina	30 Orang	30	73.499.719	0	4.166.250	0,00	5,67
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30 Orang	30	73.499.719	0	4.166.250	0,00	5,67

2.3 Isu-isu Penting peyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program sosial, pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa isu penting yang perlu diperhatikan adalah :

1. Belum Optimalnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender
   Upaya pembangunan dan pengarusutamaan gender (PUG) masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi kelembagaan, perencanaan, maupun implementasi di lapangan. Masih terdapat kesenjangan akses dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan perlindungan sosial. Indikator-indikator seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan capaian yang belum merata antar wilayah maupun kelompok penduduk. Kelembagaan PUG, termasuk kapasitas SDM, komitmen Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pelaksanaan Analisis Gender (ARG) dan Gender Budget Statement (GBS), juga belum sepenuhnya berjalan optimal. Kondisi ini menyebabkan program-program pembangunan belum sepenuhnya responsif gender dan belum mampu mengatasi ketimpangan yang ada.
2. Belum Optimalnya capaian indikator Kota Layak Anak (KLA)
   Penyelenggaraan Kota Layak Anak memerlukan keterpaduan lintas sektor dan pemenuhan hak anak dalam lima klaster, mulai dari hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan khusus. Meskipun berbagai program sudah dilaksanakan, pemenuhan indikator KLA masih belum mencapai skor optimal. Beberapa faktor penyebabnya antara lain ketersediaan data yang belum terintegrasi, sarana dan prasarana ramah anak yang belum merata, masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak, serta belum maksimalnya peran

masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi anak. Selain itu, kapasitas kelembagaan UPTD PPA dan sistem rujukan kasus masih perlu diperkuat untuk memastikan perlindungan anak berjalan efektif.

3. Belum Optimalnya pelayanan kependudukan dan keluarga berencana

   Pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menghadapi tantangan pada aspek akses layanan, kualitas data, dan cakupan peserta KB modern. Perubahan struktur umur penduduk, tingginya persentase usia produktif, serta masih adanya disparitas angka kelahiran menurut wilayah menunjukkan bahwa program KB belum sepenuhnya merata. Pemanfaatan data kependudukan juga belum optimal dalam perencanaan pembangunan, sementara layanan KB masih menghadapi keterbatasan fasilitas, distribusi tenaga, dan ketersediaan alat/obat kontrasepsi. Sosialisasi dan edukasi mengenai keluarga berencana, Generasi Berencana (Genre), dan pengasuhan remaja juga masih perlu diperkuat untuk mengurangi risiko kehamilan tidak diinginkan, pernikahan usia anak, serta persoalan kesehatan reproduksi remaja.

4. Belum Optimalnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting

   Upaya percepatan penanganan stunting memerlukan kolaborasi lintas OPD, namun implementasi di tingkat lapangan masih belum konsisten. Identifikasi keluarga risiko stunting, pendampingan oleh TPPS, intervensi spesifik dan sensitif, serta pelaporan masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian keluarga masih kesulitan mengakses layanan gizi, kesehatan ibu dan anak, sanitasi, pendidikan pengasuhan, serta layanan KB pascapersalinan. Selain itu, pemanfaatan data keluarga risiko stunting melalui SIGA, atau aplikasi pendukung lainnya belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar perencanaan dan pemantauan. Kondisi ini menyebabkan penanganan tidak selalu tepat sasaran dan capaian prevalensi stunting bergerak lambat menuju target.

5. Belum Optimalnya akses layanan sosial bagi PPKS

   Cakupan dan kualitas layanan sosial bagi PPKS seperti lansia terlantar, penyandang disabilitas, anak terlantar, korban kekerasan, fakir miskin,

dan kelompok rentan lainnya masih belum memenuhi kebutuhan di lapangan. Tantangan yang dihadapi mencakup keterbatasan data PPKS yang mutakhir dan terintegrasi, minimnya jejaring layanan dengan lembaga non-pemerintah, serta keterbatasan sumber daya manusia pekerja sosial, TKSK, dan relawan lainnya. Sarana layanan seperti rumah singgah, balai rehabilitasi, dan layanan berbasis komunitas masih belum memadai, sehingga tidak seluruh PPKS mendapatkan layanan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan penanganan masalah sosial tidak selalu efektif, dan risiko kerentanan sosial tetap tinggi di Masyarakat

Permasalahan belum terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara optimal menitik beratkan pada peningkatan pelayanan sosial yang difokuskan pada 6 kelompok sasaran permasalahan yaitu kemiskinana, ketelantaran, kedisabilitasan, korban bencana, tuna sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial.

Tabel 2.5

Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan sosial belum menjangkau seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. (PPKS)	Bagaimana meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan sosial bagi kelompok rentan seperti fakir miskin, lansia, disabilitas, dan anak terlantar?	Data PPKS belum mutakhir dan belum terintegrasi
2	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program Keluarga Berencana	Mengapa partisipasi Pasangan Usia Subur dalam program KB masih rendah, terutama di wilayah pinggiran?	Masih adanya stigma terhadap KB
3	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Bagaimana meningkatkan efektivitas perlindungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak?	Sarana dan prasaran Kelembagaan UPTD PPA masih kurang
4	Rendahnya partisipasi perempuan dalam	Mengapa keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan	Masih ada ketimpangan gender

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	pembangunan dan ekonomi produktif	pengambilan keputusan publik masih rendah?	dalam akses pelatihan dan modal usaha
5	Kualitas tata kelola pelayanan publik belum optimal	Bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan Dinsos PPKBPPPA?	- Kapasitas aparatur belum merata

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih menghadapi beberapa permasalahan mendasar yang berpengaruh terhadap capaian sasaran pembangunan sosial, kependudukan, keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Secara umum, permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelayanan sosial belum menjangkau seluruh Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. (PPKS)
2. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program Keluarga Berencana
3. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan ekonomi produktif
5. Kualitas tata kelola pelayanan publik belum optimal

2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ialah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun.

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah,

rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Dinas Sosial Pegendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD); Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawab masing-masing kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Dinas Sosial Pegendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Reviu RKPD-P sebagai salah satu bentuk quality assurance sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan. Diharapkan dengan adanya Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah dapat meningkatkan kualitas APBD dan/atau Perubahan APBD dengan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahannya.

Reviu dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas kesesuaian informasi dalam rencana kerja Perubahan dengan informasi dalam Perubahan RKPD dan kesesuaian perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan pembangunan.

Reviu terhadap RKPD 2025 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja sasaran dan program dalam RKPD telah sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Pegendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKPD telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pencantuman indicator program kegiatan dan target dalam RKPD telah sesuai dengan pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri teknis yang terkait yang mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Kinerja kegiatan/sub kegiatan mendukung kinerja program pada RKPD
5. Program prioritas pembangunan pada RKPD di dasarkan pada hasil identifikasi permasalahan.
6. Program prioritas pembangunan pada RKPD di dasarkan pada isu strategis dan permasalahan.

Tabel. 2.6
Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Padang Panjang

Nomor	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan awal RKPD Perubahan 2025		Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)				
				Target Capain	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
	INAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				**############**	**INAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**############**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**############**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**############**
1.06.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**############**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**############**
1.06.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**100 %**	**############**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**100 %**	**############**
1.06.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**############**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**############**
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504 Orang/bulan	4.675.865.490	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504 Orang/bulan	4.675.865.490
1.06.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100 Persen**	**154.313.392**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100 Persen**	**154.313.392**
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.391.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.391.700
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	11.520.170	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	11.520.170
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	42.645.522	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	42.645.522
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	94.756.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	94.756.000
1.06.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100 Persen**	**22.184.500**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100 Persen**	**22.184.500**
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	22.184.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	22.184.500
1.06.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**	**688.164.840**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**	**688.164.840**
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.244.840	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.244.840
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	644.920.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	644.920.000
1.06.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 persen**	**251.829.950**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 persen**	**251.829.950**
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	121.830.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	121.830.000
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	59.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	59.200.000
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	20.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	20.800.000
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	49.999.950	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	49.999.950

Nomor	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan awal RKPD Perubahan 2025		Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)				
				Target Capain	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1.06.02.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		**Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial**	**100 %**	**############**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		**Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial**	**100 %**	**############**
			Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	**100 %**				**Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial**	**100 %**	
1.06.02.2.03.	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase lembaga sosial yang aktif**	**100 Persen**	**############**	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase lembaga sosial yang aktif**	**100 Persen**	**############**
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Lembaga	279.110.300	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Lembaga	279.110.300
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	2.850.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	2.850.000
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lembaga	683.206.150	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lembaga	683.206.150
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Sertifikat	90.543.600	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Sertifikat	90.543.600
1.06.04.	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**	**100 %**	**############**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**		**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**	**100 %**	**############**
			Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	**100 %**				**Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**	**100 %**	
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	**100 %**				**Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**	**100 %**	
			Persentas Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	**100 %**				**Persentas Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**	**100 %**	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	**100 %**				**Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**	**100 %**	
1.06.04.2.01.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**Jumlah paket kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis diluar panti**	**750 Paket**	**660.942.450**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**Jumlah paket kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis diluar panti**	**750 Paket**	**660.942.450**
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	163 Orang	488.018.450	Penyediaan Permakanan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	163 Orang	488.018.450
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	98.365.000	Penyediaan Sandang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	33 Orang	98.365.000
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35.186.000	Penyediaan Alat Bantu	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	35.186.000
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	28.974.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	28.974.000
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	10.399.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	10.399.000
1.06.04.2.02.	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		**Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**	**2710 Orang**	**354.358.134**	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**		**Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**	**2710 Orang**	**354.358.134**
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	47.300.000	Penyediaan Permakanan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	47.300.000
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	44.000.000	Penyediaan Sandang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 orang	44.000.000
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	7.500.000	Penyediaan Alat Bantu	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	7.500.000
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	166.756.330	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	166.756.330
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	88.801.804	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	88.801.804
1.06.05.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar**	**100 %**	**75.977.750**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**		**Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar**	**100 %**	**75.977.750**
			Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	**100 %**				**Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar**	**100 %**	

Nomor	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan awal RKPD Perubahan 2025		Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)				
				Target Capain	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	**7.3 %**				**Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi**	**7.3 %**	
			Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	**100 %**				**Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin**	**100 %**	
			Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	**7.3 %**				**Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan**	**7.3 %**	
1.06.05.2.02.	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota**	**17 layanan**	**75.977.750**	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota**	**17 layanan**	**75.977.750**
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2119 Orang	12.509.900	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2119 Orang	12.509.900
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1271 Keluarga	63.467.850	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1271 Keluarga	63.467.850
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	-	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	-
1.06.06.	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana**	**100 %**	**90.912.037**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**		**Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana**	**100 %**	**90.912.037**
			Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	**100 %**				**Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya**	**100 %**	
			Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	**100 %**				**Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial**	**100 %**	
1.06.06.2.01.	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana**	**100 Persen**	**14.543.000**	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana**	**100 Persen**	**14.543.000**
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	13.100.000	Penyediaan Sandang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	13.100.000
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	1.443.000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	1.443.000
1.06.06.2.02.	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		**Jumlah anggota TAGANA yang dibina**	30 Orang	**76.369.037**	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**		**Jumlah anggota TAGANA yang dibina**	30 Orang	**76.369.037**
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	76.369.037	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	76.369.037
1.06.07.	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik**	**100 %**	**114.617.500**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**		**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik**	**100 %**	**114.617.500**
1.06.07.2.01.	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**		**Jumlah makam pahlawan yang dipelihara**	**98 makam**	**114.617.500**	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**		**Jumlah makam pahlawan yang dipelihara**	**98 makam**	**114.617.500**
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	98 Makam	114.617.500	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	98 Makam	114.617.500
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**819.009.181**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**819.009.181**
2.08.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**819.009.181**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**819.009.181**
2.08.02.	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)**	**15,4 Persen**	**263.935.440**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**		**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)**	**15,4 Persen**	**263.935.440**
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	**66.37 Persen**				**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan**	**66.37 Persen**	
2.08.02.2.01.	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah OPD yang memiliki data terpilah**	**23 OPD**	**33.368.100**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah OPD yang memiliki data terpilah**	**23 OPD**	**33.368.100**
			Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GAB	**23 OPD**				**Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GAB**	**23 OPD**	
2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	23 Orang	33.368.100	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	23 Orang	33.368.100
2.08.02.2.02.	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Persentase perempuan partai politik yang memperoleh adavokasi dan pendampingan kebijakan partisapasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota**	**0 Persen**	-	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Persentase perempuan partai politik yang memperoleh adavokasi dan pendampingan kebijakan partisapasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota**	**0 Persen**	-

Nomor	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan awal RKPD Perubahan 2025		Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)				
				Target Capain	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	0 Organisasi	-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	0 Organisasi	-
2.08.02.2.03.	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina**	**26 organisasi**	**230.567.340**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina**	**26 organisasi**	**230.567.340**
			Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	**100 Persen**				**Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus**	**100 Persen**	
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen	230.567.340	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen	230.567.340
2.08.03.	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**	**100 %**	**147.632.000**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**		**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**	**100 %**	**147.632.000**
2.08.03.2.01.	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Laporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan**	**12 Laporan**	**50.000.000**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Laporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan**	**12 Laporan**	**50.000.000**
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	50.000.000
2.08.03.2.02.	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah lembaga/instansi yang terlibat dalam mekanisme rujukan**	**3 Lembaga**	**68.587.000**	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah lembaga/instansi yang terlibat dalam mekanisme rujukan**	**3 Lembaga**	**68.587.000**
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 layanan	68.587.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 layanan	68.587.000
2.08.03.2.03.	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah produk hukum yang diterbitkan**	**1 Dokumen**	**29.045.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah produk hukum yang diterbitkan**	**1 Dokumen**	**29.045.000**
			Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	**100 Persen**				**Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus**	**100 Persen**	
			Jumlah layanan perlindungan perempuan tinngkat kab/kota	**10 layanan**				**Jumlah layanan perlindungan perempuan tinngkat kab/kota**	**10 layanan**	
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	3 lembaga	29.045.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	3 lembaga	29.045.000
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-
2.08.06.	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**	**64,08 Angka**	**86.291.041**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**		**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**	**64,08 Angka**	**86.291.041**
2.08.06.2.01.	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA**	**4 Lembaga**	**26.310.400**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA**	**4 Lembaga**	**26.310.400**
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	26.310.400	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	26.310.400
2.08.06.2.02.	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**		**- Persentase forum anak aktif**	**70 Persen**	**59.980.641**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**		**- Persentase forum anak aktif**	**70 Persen**	**59.980.641**
			Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan Sekolah Ramah Anak (SRA)					**Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan Sekolah Ramah Anak (SRA)**		
			Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan Puskesmas Rumah Anak					**Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan Puskesmas Rumah Anak**		
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	59.980.641	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	59.980.641
2.08.07.	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**	**100 %**	**321.150.700**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**		**Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**	**100 %**	**321.150.700**
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	**85,8 Angka**				**Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)**	**85,8 Angka**	
2.08.07.2.01.	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase kasus yang ditindak lanjuti**	**100 persen**	**103.224.800**	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase kasus yang ditindak lanjuti**	**100 persen**	**103.224.800**
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	57.000.000	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	57.000.000
2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	6 Dokumen	46.224.800	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	6 Dokumen	46.224.800

Nomor	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan awal RKPD Perubahan 2025		Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)				
				Target Capain	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2.08.07.2.02.	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani**	**100 Persen**	**177.950.900**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani**	**100 Persen**	**177.950.900**
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang	7.810.900	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang	7.810.900
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	43 orang	170.140.000	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	43 orang	170.140.000
2.08.07.2.03.	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah anak yang mendapatkan layanan dari lembaga AMPK yang difasilitasi**	**10 orang**	**39.975.000**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah anak yang mendapatkan layanan dari lembaga AMPK yang difasilitasi**	**10 orang**	**39.975.000**
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	**10 orang**	39.975.000	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	**10 orang**	39.975.000
2.14.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**############**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**############**
2.14.02.	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		**Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR)**	**2,39 Angka**	**73.344.600**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**		**Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR)**	**2,39 Angka**	**73.344.600**
			Angka Kelahiran remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specific fertility Rate /ASFR 15 - 19)	**6,1 Angka**				**Angka Kelahiran remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specific fertility Rate /ASFR 15 - 19)**	**6,1 Angka**	
			Rate Nett Recent Migrasi (per 100 atau per 1000 penduduk)	**0,89 %**				**Rate Nett Recent Migrasi (per 100 atau per 1000 penduduk)**	**0,89 %**	
2.14.02.2.01.	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**		**Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan**	**1 Dokumen**	**7.358.800**	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**		**Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan**	**1 Dokumen**	**7.358.800**
2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	0 Kegiatan	-	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	0 Kegiatan	-
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan	7.358.800	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan	7.358.800
2.14.02.2.02.	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah rumah dataku yang dikembangkan**	**16 Unit**	**65.985.800**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah rumah dataku yang dikembangkan**	**16 Unit**	**65.985.800**
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 laporan	19.200.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 laporan	19.200.000
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	24.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	24.000.000
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	16 Unit	22.785.800	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	16 Unit	22.785.800
2.14.03.	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		**Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)**	**62, 25 %**	**############**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**		**Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)**	**62, 25 %**	**############**
			Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	**13, 7 %**				**Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)**	**13, 7 %**	
			Rasio akseptor KB	**74,45 %**				**Rasio akseptor KB**	**74,45 %**	
			Proporsi Kebutuhan Kb Yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb Modern (Demand Satisfied)	**66 %**				**Proporsi Kebutuhan Kb Yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb Modern (Demand Satisfied)**	**66 %**	
			Persentase Kampung Keluarga Berkulitas Mandiri	**100 %**				**Persentase Kampung Keluarga Berkulitas Mandiri**	**100 %**	
2.14.03.2.01.	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**		Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	**4734 orang**	428.975.465	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**		Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	**4734 orang**	428.975.465
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	60.000.000	Pengendalian Program KKBPK	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan	60.000.000
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Laporan	97.997.465	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Laporan	97.997.465
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	40.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan	40.000.000
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	125.000.000	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	125.000.000

Nomor	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan awal RKPD Perubahan 2025		Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)				
				Target Capain	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	7 Dokumen	-	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	7 Dokumen	-
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	105.978.000	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	105.978.000
2.14.03.2.02.	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		**Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina**	**86 orang**	**344.000.000**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**		**Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina**	**86 orang**	**344.000.000**
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	86 orang	128.000.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	86 orang	128.000.000
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 organisasi	216.000.000	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 organisasi	216.000.000
2.14.03.2.03.	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya**	**12 Laporan**	**127.940.000**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya**	**12 Laporan**	**127.940.000**
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan	7.184.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 laporan	7.184.000
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2161 Orang	103.659.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2161 Orang	103.659.000
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	17.097.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	17.097.000
2.14.03.2.04.	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		**Jumlah kegiatan edukasi/sosialisasi KB yang dilaksanakan oleh atau bersama organisasi kemasyarakatan**	**1 kegiatan**	**104.115.000**	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**		**Jumlah kegiatan edukasi/sosialisasi KB yang dilaksanakan oleh atau bersama organisasi kemasyarakatan**	**1 kegiatan**	**104.115.000**
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	14.515.000	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	14.515.000
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12 Dokumen	13.300.000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12 Dokumen	13.300.000
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Kampung	76.300.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Kampung	76.300.000
2.14.04.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		**Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga**	**62,25 %**	**############**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**		**Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga**	**62,25 %**	**############**
			Indeks Lansia Berdaya	**59,4 Angka**				**Indeks Lansia Berdaya**	**59,4 Angka**	
			Indeks Pengasuhan Keluarga yang mempunyai remaja	**86,96 Angka**				**Indeks Pengasuhan Keluarga yang mempunyai remaja**	**86,96 Angka**	
2.14.04.2.01.	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina**	**64 Kelompok**	**775.558.000**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina**	**64 Kelompok**	**775.558.000**
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan	74.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan	74.000.000
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	12 Laporan	9.598.000	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	12 Laporan	9.598.000
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	130.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit	130.000.000
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	223 Orang	561.960.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	223 Orang	561.960.000
2.14.04.2.02.	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Jumlah kegiatan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan**	**1 kegiatan**	**459.246.000**	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**		**Jumlah kegiatan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan**	**1 kegiatan**	**459.246.000**
			Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	**54 persen**				**Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB**	**54 persen**	
2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	23 organisasi	185.666.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	23 organisasi	185.666.000
2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	9.580.000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	9.580.000
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 Laporan	120.000.000	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 Laporan	120.000.000

Nomor	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rancangan awal RKPD Perubahan 2025		Hasil Analisis Kebutuhan (Sesuai PI yang telah dibagikan)				
				Target Capain	Pagu Indikatif	Program dan kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 Laporan	144.000.000	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 Laporan	144.000.000

2.5 Penelahaan Usulan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Masyarakat

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam proses penyusunan perencanaan telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Pada Musrenbang Perubahan RKPD tidak adanya usulan musrembang yang ditujukan kepada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang dan terdapat 12 Pokok Pikiran Anggota Dewan DPRD Kota Padang Panjang yang telah di akomodir pada tahun 2025.Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.6
Usulan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Para Pemangku kepentingan Tahun 2025 Kota Padang Panjang

No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
I	**PROGRAM REHABILITAS SOSIAL**					
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan					
1		JL. SYECH M JAMIL RT 5 KELURAHAN KOTO PANJANG, Kota Padang Panjang	Persentase PPKS yang tertangani	1 Orang	15.000.000	
2		KAMPUNG TELENG NO 35 RT 12 KEL KAMPUNG MANGGIS, Kota Padang Panjang	Jumlah penyandang disablitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	1 Orang	17.450.000	
3		jl. anas karim sungai andok, RT.006, kel, kamoung manggis, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	7.499.995	
4		Jl. H. Sumanik RT.1 Kel. Ganting, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.000.000	

No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
5		Bukit kandung RT.9, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.000.000	
6		Solok batuang RT.9 kel. Sigando, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.250.000	
7		Jl/ Muchtar Luthfi No.25 RT.11 Kel. Ngalau, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.000.000	
8		Jl. Syech Ibrahim Musa RT.2 kel. ganting, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.000.000	
9		Bukit Kandung RT.9 kel. ganting, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.000.000	
10		tabek gadang RT.8 Kel. Ganting, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.000.000	
11		Jl. Syech Ibrahim Musa No.31 RT.2 Kel. Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang		1 Orang	17.000.000	
II	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**		Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif			
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina			
12	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	40.000.000	
	JUMLAH				**216.199.995**	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2025–2030 berpedoman pada arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030. Kebijakan nasional tersebut menempatkan pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, serta perlindungan sosial sebagai prioritas utama dalam mewujudkan *Indonesia Emas 2045*. Dalam kerangka tersebut, terdapat beberapa agenda nasional yang menjadi acuan utama bagi Pemerintah Kota Padang Panjang, khususnya bidang sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yaitu:

1. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial Nasional

   Kebijakan nasional menekankan pentingnya reformasi sistem perlindungan sosial agar lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat. Hal ini meliputi pemutakhiran data kemiskinan dan kerentanan sosial melalui PPKS, peningkatan efektivitas bantuan sosial, serta perluasan akses layanan sosial bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak, dan perempuan korban kekerasan. Bagi Kota Padang Panjang, kebijakan ini menjadi landasan dalam meningkatkan cakupan dan kualitas layanan sosial, serta mendorong sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan sosial
2. Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga

   Dalam RPJMN 2025–2030, kebijakan pengendalian penduduk diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan, serta mewujudkan keluarga yang

berkualitas. Pemerintah nasional mendorong pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB), peningkatan ketahanan keluarga, dan penanganan keluarga berisiko stunting. Kota Padang Panjang mengadaptasi kebijakan ini melalui penguatan pelayanan KB, pembinaan pasangan usia subur, edukasi kesehatan reproduksi remaja, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan keluarga yang berketahanan, bahagia, dan produktif.

3. Peningkatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
   emerintah pusat menegaskan pentingnya pengarusutamaan gender dalam seluruh sektor pembangunan untuk menghapus ketimpangan dan diskriminasi terhadap perempuan. Kebijakan ini diwujudkan melalui penguatan kelembagaan PUG, peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi, politik, dan pendidikan, serta perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Kebijakan nasional tersebut menjadi acuan bagi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memperluas partisipasi perempuan di bidang publik, meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan, serta memperkuat mekanisme layanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender.
4. Perlindungan Anak dan Peningkatan Kualitas Tumbuh Kembang Anak
   RPJMN menekankan pentingnya pembangunan anak sebagai investasi masa depan bangsa melalui penguatan sistem Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan pengembangan Kota Layak Anak (KLA). Kota Padang Panjang mengadopsi kebijakan ini dengan memperkuat koordinasi lintas sektor, memperluas layanan ramah anak, serta memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.
5. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
   Kebijakan nasional juga menekankan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ,menindaklanjuti kebijakan ini melalui peningkatan nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), penguatan sistem perencanaan dan pelaporan berbasis

elektronik, serta peningkatan kompetensi aparatur dalam pelayanan publik yang responsif gender dan inklusif

Dengan mengacu pada arah kebijakan nasional tersebut, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menegaskan komitmennya untuk:

- Meningkatkan efektivitas perlindungan sosial bagi masyarakat rentan,
- Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat ketahanan keluarga,
- Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,
- Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, serta
- Memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas

Dengan keselarasan terhadap kebijakan nasional tersebut, arah pembangunan sosial diharapkan mampu berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta nantinya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2026 mengacu pada RPJMD 2025 - 2030.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah maupun Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .

Target dari tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2026 dirumuskan dengan berdasarkan sasaran RPJMD 2025 - 2030, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, serta kebijakan pembangunan nasional tahun 2026. Berikut dijelaskan penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 - 2030.

Tujuan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai Rencana Startegis tahun 2025 – 2030 yang ditetapkan yaitu dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran Perubahan Rencana Kerja
Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran	Satuan	Renstra 2025	P-Renja 2025
Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui peningkatan upaya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penurunan tingkat kemiskinan daerah serta peningkatan perlindungan sosial terhadap masyarakat		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	70	70
		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	66,56	66,56
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	98,25	98,25
		Jumlah penduduk miskin	ribu orang	2714	2714
		Angka PPKS	Angka	3,34	3,34
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Angka	70.00	70.00
	Meningkatnya Layanan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	%	97,5	97,5
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	66,33	66,33
	Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender	Penganugrahan Parahita Ekapraya (PPE)	Predikat	Pratama	Pratama

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran	Satuan	Renstra 2025	P-Renja 2025
	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Predikat	Nindya	Nindya
	Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Angka	2,39	2,39
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	6,10	6,10
	Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	Persentase Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan	%	75	75

Tujuan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai Rencana Startegis tahun 2025 - 2029 yang ditetapkan yaitu : Meningkatnya kesejahteraan sosial melalui peningkatan upaya pembangunan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, penurunan tingkat kemiskinan daerah serta peningkatan perlindungan sosial terhadap Masyarakat, dengan indicator dan target perubahan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA) , dengan target pada angka 70
2. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) , dengan target pada angka 66,56
3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) , dengan target pada angka 98,25
4. Jumlah penduduk miskin, dengan target 2714 orang ribu
5. Angka PPKS, dengan target pada angka 70

Sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 - 2029, untuk mendukung capaian tujuan Dinas Sosial Pegendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan beberapa sasaran strategis, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja Dinas Sosial Pegendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan indicator Nilai AKIP Dinas Sosial Pegendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan target pada angka 70 ;

2. Meningkatnya Layanan sosial bagi PPKS, dengan indicator Persentase PPKS yang tertangani dan target 97,5 % dan indicator Indeks Kesejahteraan Sosial dengan target pada indeks 66.33 ;
3. Meningkatnya Upaya pembangunan dan kesetaraan gender, dengan indicator Predikat Penganugran Parahita Ekapraya (PPE) dan target pada indeks Pratama;
4. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak , dengan indicator Tingkat Capaian Kota Layak Anak dan target pada prediket Nindya;
5. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana, dengan indicator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) target pada angka 2,39 dan Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) target pada angka 6,1;
6. Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting, dengan indicator Persentasi Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan dan target 75 %;

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan sosial, Dinas Sosial melakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Pegendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perubahan ini dilakukan sebagai respon terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, perubahan regulasi, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan sosial. Berdasarkan hasil evaluasi internal, ditemukan bahwa beberapa tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan sebelumnya belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan isu sosial. Selain itu, adanya kebijakan nasional terkait penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, disabilitas, lansia, dan perlindungan anak, menuntut Dinas Sosial Pegendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan penyesuaian arah kebijakan.

Oleh karena itu, tujuan dan sasaran Dinas Sosial disempurnakan agar lebih terukur, relevan, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah maupun nasional. Perubahan tujuan difokuskan pada orientasi peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh, bukan hanya penyediaan layanan dasar.

Dalam rangka memperkuat arah pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan, dan keluarga berencana, dilakukan penyesuaian terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi capaian kinerja sebelumnya, penyesuaian terhadap kebijakan nasional, serta kebutuhan untuk menghasilkan ukuran kinerja yang lebih relevan, terukur, dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

Penyesuaian Sasaran Layanan Sosial bagi PPKS

Sebelumnya, sasaran *"Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan"* difokuskan pada jumlah penerima layanan. Pada perubahan sasaran, orientasi diperluas menjadi *"Meningkatnya layanan sosial* yang menekankan kualitas dan keberlanjutan layanan. Indikator tetap menggunakan persentase PPKS tertangani, namun target ditingkatkan dari 97% menjadi 97,5%, mencerminkan komitmen peningkatan efektivitas layanan.

Penyesuaian Sasaran Pemenuhan Hak Anak

Sasaran *"Meningkatkan pemenuhan hak anak"* mengalami penajaman indikator. Awalnya indikator menggunakan *Persentase indikator KLA yang terpenuhi*, kini disempurnakan menggunakan indikator *Tingkat Capaian Kota Layak Anak* yang mengacu pada standar nasional. Target meningkat dari pemenuhan indikator menjadi pencapaian KLA kategori NINDYA, sehingga lebih sesuai dengan arah kebijakan perlindungan anak.

Penajaman Sasaran Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Sebelumnya, sasaran diberi judul *"Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak"* dengan indikator *Predikat APE*. Setelah perubahan, sasaran diperjelas menjadi *"Meningkatnya upaya pembangunan dan kesetaraan gender"*, yang menekankan aspek pengarusutamaan gender. Indikator disesuaikan menjadi *Predikat Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE)* dengan target Pratama, sesuai regulasi terbaru tentang evaluasi PUG.

Dalam rangka menyesuaikan dengan kebijakan nasional terkait evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), indikator kinerja *Anugerah Parahita Ekapraya (APE)* mengalami perubahan nomenklatur menjadi *Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE)*. Perubahan ini dilakukan karena

pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melakukan penyesuaian terminologi dan tata penilaian untuk memperkuat akurasi pengukuran capaian kinerja PUG di daerah.

Indikator APE yang sebelumnya digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan kini diperbarui menjadi PPE untuk mencerminkan cakupan penilaian yang lebih komprehensif, tidak hanya pada aspek pemberdayaan perempuan, tetapi juga menyangkut integrasi perspektif gender dalam kebijakan, program, dan pelayanan publik. Pergeseran istilah ini sekaligus menekankan bahwa penilaian tidak sekadar fokus pada penghargaan, tetapi pada peningkatan kualitas implementasi PUG secara nyata dan berkelanjutan.

Perubahan indikator ini bertujuan untuk:

1) Menyeragamkan indikator daerah dengan standar nasional yang berlaku saat ini.
2) Meningkatkan ketepatan pengukuran kinerja, terutama terkait perencanaan dan penganggaran responsif gender.
3) Memperkuat akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Pegendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena PPE mencakup aspek kelembagaan, pelaksanaan, serta keberlanjutan PUG.
4) Memberikan gambaran capaian yang lebih jelas terhadap upaya kesetaraan gender di daerah.

Perubahan Sasaran Pelayanan Kependudukan dan KB

Sasaran *"Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana"* tetap dipertahankan namun indikator kinerja diperbarui agar sesuai standar indikator nasional (BKKBN). Indikator sebelumnya menggunakan *Rata-rata jumlah anak per keluarga*, kini diganti menjadi:

1) Angka Kelahiran Total (TFR) dengan target 2,39
2) Angka Kelahiran Remaja 15–19 tahun (ASFR) dengan target 6,1

Perubahan ini memperkuat relevansi pengukuran kinerja sesuai indikator demografi yang diakui secara nasional.

TFR adalah Angka Kelahiran Total, yaitu rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15–49 tahun) apabila pola fertilitas pada tahun tertentu tetap sama. ASFR adalah Angka

Kelahiran Menurut Kelompok Umur, yaitu jumlah kelahiran per 1.000 perempuan pada kelompok umur tertentu dalam usia reproduksi (misal 15–19 tahun, 20–24 tahun, dst.).

3.3. Program dan Kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Untuk mendukung pembangunan serta untuk memenuhi target SPM dan IKK pada Tahun 2025, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan Program dan Kegiatan perubahan sesuai dengan urusan wajib yang diemban, sesuia dengan tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Rekap Jumlah Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	URAIAN	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025
1	Jumlah Program	13	13	13
2	Jumlah Kegiatan	31	31	31
3	Jumlah Sub Kegiatan	59	75	70

Jumlah Program di RKPD Perubahan Tahun 2025 sebanyak 13 prorgam sesuai dengnan jumlah pada APBD serta RKPD Perubahan Tahun 2025. Jumlah kegiatan pada RKPD Perubahan 2025 sebanyak 31 kegiatan sedangkan pada

APBD dan RKPD Perubahan 2025 ada 31 kegiatan. Begitu juga dengan jumlah sub kegiatan pada RKPD 2025 sebanyak 59 sub kegitaan pada APBD berkurang menjadi 75 sub kegiatan dan pada RKPD Perubahan 2025 berkurang lagi menjasi 70 sub kegiatan. Terjadi pengurangan jumlah pada kegiatan dan sub kegiatan, hal ini terjadi karena ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang di akomodir oleh dana DAK dan juga dikarenakan efisiensi anggaran atau refocusing anggaran sehingga ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang dihilangkan dari rencana RKPD awal tahun 2025.

Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025 beserta prognosisnya yang terdapat pada Renja sipd-ri.kemedagri.go.id dapat dilihat pada **tabel di bawah ini :**

Tabel 3.2 Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang
Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**11.468.551.090**	**13.248.272.999**	**11.277.064.339**							**9.392.184.781,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.325.682.090**	**9.774.726.188**	**8.144.876.093**							**6.795.533.781,00**	
	1.06.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**9.325.682.090**	**9.774.726.188**	**8.144.876.093**							**6.795.533.781,00**	
56	**1.06.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**6.568.934.322**	**6.464.715.625**	**5.792.358.172**							**5.166.969.762,00**	
	1.06.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 persen**	**100 Persen**	**5.179.297.765**	**5.115.796.725**	**4.675.865.490**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**4.055.930.882,00**	**Dinsos P2KBP3A**
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3024 Orang/bulan		504 Orang/bulan	560 Orang/bulan	504 Orang/bulan	5.179.297.765	5.115.796.725	4.675.865.490	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			4.055.930.882,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 persen**	**100 Persen**	**336.075.545**	**287.592.235**	**154.313.392**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**327.916.200,00**	**Dinsos P2KBP3A**
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	29 Paket		5 Paket	4 Paket	4 Paket	5.391.700	5.391.700	5.391.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			5.391.700,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket		7 Paket	7 Paket	7 Paket	73.159.345	73.132.145	11.520.170	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			65.000.000,00	Dinsos P2KBP3A

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	24.499.500	20.013.390	42.645.522	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			24.499.500,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	233.025.000	189.055.000	94.756.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			233.025.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**0 Persen**		**100 Persen**	**100 persen**	**100 Persen**	**110.000.000**	**38.742.100**	**22.184.500**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**50.000.000,00**	**Dinsos P2KBP3A**
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit		13 Unit	5 Unit	2 Unit	110.000.000	38.742.100	22.184.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			50.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**468.288.000**	**711.000.000**	**688.164.840**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**522.181.680,00**	**Dinsos P2KBP3A**
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	53.893.680	47.893.165	43.244.840	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			53.893.680,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	468.288.000	711.000.000	644.920.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			468.288.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 persen**	**100 persen**	**421.379.332**	**263.691.400**	**251.829.950**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**210.941.000,00**	**Dinsos P2KBP3A**
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit		21 Unit	21 Unit	21 Unit	256.379.332	125.685.600	121.830.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			111.525.000,00	Dinsos P2KBP3A

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	202 Unit		27 Unit	27 Unit	27 Unit	75.000.000	77.205.800	59.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				35.516.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	330 Unit		55 Unit	55 Unit	55 Unit	50.000.000	20.800.000	20.800.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				23.900.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit		6 Unit	6 Unit	6 Unit	40.000.000	40.000.000	49.999.950	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				40.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
57	**1.06.02.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial**	**100 %**		**100 %**		**100 %**	**1.299.684.600**	**1.210.700.100**	**1.055.710.050**								**378.319.700,00**	
			Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	**100 %**		**100 %**		**100 %**												
	1.06.02.2.03.	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga sosial yang aktif**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.299.684.600**	**1.210.700.100**	**1.055.710.050**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-			**378.319.700,00**	**Dinsos P2KBP3A**
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Lembaga		92 Lembaga	92 Orang	92 Lembaga	297.222.800	315.404.300	279.110.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				267.222.800,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang		2 Orang	2 Orang	2 Orang	8.650.000	5.700.000	2.850.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				8.640.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	360 Lembaga		60 Lembaga	60 Lembaga	60 Lembaga	900.000.000	791.207.500	683.206.150	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				8.640.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Sertifikat		3 Sertifikat	5 Sertifikat	3 Sertifikat	93.811.800	98.388.300	90.543.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				93.816.900,00	Dinsos P2KBP3A

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
58	**1.06.04.**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.049.911.249**	**1.725.910.794**	**1.015.300.584**							**873.711.400,00**	
			Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**											
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**											
			Persentas Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**											
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**											
	1.06.04.2.01.	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah paket kebutuhan dasar bagi penyandang disablitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis diluar panti**	**3057 Paket**		**750 Paket**	**750 Paket**	**750 Paket**	**676.199.545**	**646.099.545**	**660.942.450**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**500.000.000,00**	**Dinsos P2KBP3A**
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	570 Orang		459 Orang	459 Orang	163 Orang	376.199.545	376.199.545	488.018.450	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			200.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	190 Orang		459 Orang	75 Orang	33 Orang	150.000.000	150.000.000	98.365.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			150.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Orang		22 Orang	22 Orang	35 Orang	80.000.000	55.900.000	35.186.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			80.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50.000.000	44.000.000	28.974.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			50.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1300 Orang		50 Orang	20 Orang	50 Orang	20.000.000	20.000.000	10.399.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			20.000.000,00	Dinsos P2KBP3A

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.02.	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**	**2792 Orang**		**2792 Orang**	**2710 orang**	**2710 Orang**	**373.711.704**	**433.711.704**	**354.358.134**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-			**373.711.400,00**	**Dinsos P2KBP3A**
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	310 Orang		75 Orang	75 Orang	75 Orang	75.000.000	55.000.000	47.300.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			75.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	310 orang		75 orang	75 Orang	75 orang	75.000.000	55.000.000	44.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			75.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		5 Orang	5 Orang	5 Orang	10.000.000	10.000.000	7.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			10.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	1060 Orang		30 Orang	30 Orang	30 Orang	120.000.000	220.000.000	166.756.330	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			120.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	68 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	93.711.704	93.711.704	88.801.804	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			93.711.400,00	Dinsos P2KBP3A
59	**1.06.05.**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**228.648.600**	**221.614.050**	**75.977.750**							**228.029.600,00**	
			Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**											
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	**7.55 %**		**7 %**	**7.3 %**	**7.3 %**											
			Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	**100 %**		**100 %**		**100 %**											
			Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	**7.55 %**		**7 %**		**7.3 %**											

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.05.2.02.	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota**	**17 layanan**		**17 layanan**	**17 layanan**	**17 layanan**	**228.648.600**	**221.614.050**	**75.977.750**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**228.029.600,00**	**Dinsos P2KBP3A**
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	11714 Orang		2119 Orang	2119 Orang	2119 Orang	79.939.000	79.895.000	12.509.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			79.320.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6355 Keluarga		1271 Keluarga	1271 Keluarga	1271 Keluarga	133.709.600	133.709.600	63.467.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			133.709.600,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang		0 Orang		0 Orang	15.000.000	8.009.450	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			15.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
60	**1.06.06.**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**153.503.319**	**99.999.719**	**90.912.037**							**123.503.319,00**	
			Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**											
			Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**											
	1.06.06.2.01.	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 persen**	**100 Persen**	**50.000.000**	**26.500.000**	**14.543.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**50.000.000,00**	**Dinsos P2KBP3A**
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1800 Orang		300 Orang	300 Orang	300 Orang	30.000.000	20.000.000	13.100.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			30.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	1800 Orang		300 Orang	300 Orang	300 Orang	20.000.000	6.500.000	1.443.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			20.000.000,00	Dinsos P2KBP3A

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.06.2.02.	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah anggota TAGANA yang dibina**	**30 Orang**		**30 Orang**	**30 orang**	30 Orang	**103.503.319**	**73.499.719**	**76.369.037**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**73.503.319,00**	**Dinsos P2KBP3A**
	1.06.06.2.02. 0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang		30 Orang	30 Orang	30 Orang	103.503.319	73.499.719	76.369.037	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			73.503.319,00	Dinsos P2KBP3A
61	**1.06.07.**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**25.000.000**	**51.785.900**	**114.617.500**							**25.000.000,00**	
	1.06.07.2.01.	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Jumlah makam pahlawan yang dipelihara**	**98 makam**		**98 makam**	**98 Makam**	**98 makam**	**25.000.000**	**51.785.900**	**114.617.500**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**25.000.000,00**	**Dinsos P2KBP3A**
	1.06.07.2.01. 0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	588 Makam		98 Makam	98 Makam	98 Makam	25.000.000	51.785.900	114.617.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			25.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**745.869.000**	**1.124.318.200**	**819.009.181**							**2.596.651.000,00**	
	2.08.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**745.869.000**	**1.124.318.200**	**819.009.181**							**711.869.000,00**	
62	**2.08.02.**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)**	**15,5 Persen**		**15,38 Persen**	**15,4 Persen**	**15,4 Persen**	**253.580.000**	**253.580.000**	**263.935.440**							**219.580.000,00**	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	**66.47 Persen**		**66.33 Persen**	**66.37 Persen**	**66.37 Persen**											
	2.08.02.2.01.	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah OPD yang memiliki data terpilah**	**23 OPD**		**23 OPD**	**23 OPD**	**23 OPD**	**74.000.000**	**74.000.000**	**33.368.100**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif**	-		**40.000.000,00**	**Dinsos P2KBP3A**
			Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GAB	**23 OPD**		**23 OPD**	**23 OPD**	**23 OPD**											
	2.08.02.2.01. 0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	23 Orang		23 Orang	23 Orang	23 Orang	74.000.000	74.000.000	33.368.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			40.000.000,00	Dinsos P2KBP3A

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.2.02.	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase perempuan partai politik yang memperoleh adavokasi dan pendampingan kebijakan partisapasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota**	**0 Persen**		**20 Persen**	**50 Persen**	**0 Persen**	**30.000.000**	**30.000.000**	**-**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**30.000.000,00**	**Dinsos P2KBP3A**
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	130 organisasi		26 organisasi	26 Organisasi	0 Organisasi	30.000.000	30.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			30.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.08.02.2.03.	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina**	**26 organisasi**		**26 organisasi**	**26 organisasi**	**26 organisasi**	**149.580.000**	**149.580.000**	**230.567.340**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**149.580.000,00**	**Dinsos P2KBP3A**
			Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**											
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	149.580.000	149.580.000	230.567.340	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			149.580.000,00	Dinsos P2KBP3A
63	**2.08.03.**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**149.532.000**	**202.390.300**	**147.632.000**							**149.532.000,00**	
	2.08.03.2.01.	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan**	**60 Laporan**		**12 Laporan**	**8 Lembaga**	**12 Laporan**	**30.000.000**	**68.345.300**	**50.000.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**30.000.000,00**	Dinsos P2KBP3A
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen		3 dokumen	6 Dokumen	3 dokumen	30.000.000	68.345.300	50.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			30.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.08.03.2.02.	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga/instansi yang terlibat dalam mekanisme rujukan**	**3 Lembaga**		**3 Lembaga**	**3 Lembaga**	**3 Lembaga**	**104.502.000**	**95.000.000**	**68.587.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**104.502.000,00**	Dinsos P2KBP3A

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 layanan		3 layanan	12 Layanan	3 layanan	104.502.000	95.000.000	68.587.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			104.502.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.08.03.2.03.	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah produk hukum yang diterbitkan**	**5 Dokumen**		**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**15.030.000**	**39.045.000**	**29.045.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**15.030.000,00**	Dinsos P2KBP3A
			Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	**500 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**											
			Jumlah layanan perlindungan perempuan tinngkat kab/kota	**50 layanan**		**10 layanan**	**10 layanan**	**10 layanan**											
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	18 lembaga		3 lembaga	-	3 lembaga	-	29.045.000	29.045.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0,00	Dinsos P2KBP3A
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen	15 Dokumen	0 Dokumen	15.030.000	10.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			15.030.000,00	Dinsos P2KBP3A
64	**2.08.06.**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)**	**64,24 Angka**		**64,05 Angka**	**64,08 Angka**	**64,08 Angka**	**120.620.000**	**270.375.600**	**86.291.041**							**120.620.000,00**	
	2.08.06.2.01.	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA**	**4 Lembaga**		**4 Lembaga**		**4 Lembaga**	**43.855.000**	**135.587.400**	**26.310.400**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**43.855.000,00**	**Dinsos P2KBP3A**
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	43.855.000	135.587.400	26.310.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			43.855.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.08.06.2.02.	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**- Persentase forum anak aktif**	**80 Persen**			**70 Persen**	**80 Persen**	**76.765.000**	**134.788.200**	**59.980.641**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**76.765.000,00**	Dinsos P2KBP3A
			Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan Sekolah Ramah Anak (SRA)	**100 Persen**				**100 Persen**											

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan Puskesmas Rumah Anak	**100 Persen**				**100 Persen**											
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen			5 Dokumen	5 Dokumen	76.765.000	134.788.200	59.980.641	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			76.765.000,00	Dinsos P2KBP3A
65	**2.08.07.**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**222.137.000**	**397.972.300**	**321.150.700**							**222.137.000,00**	
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	**85,98 Angka**		**85,74 Angka**	**85,8 Angka**	**85,8 Angka**											
	2.08.07.2.01.	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kasus yang ditindak lanjuti**	**persen**		**100 persen persen**	**100 persen**	**100 persen**	**62.137.000**	**147.857.300**	**103.224.800**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**62.137.000,00**	Dinsos P2KBP3A
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang		10 Orang	10 Orang	10 Orang	22.137.000	61.500.000	57.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			22.137.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	**0 Dokumen**		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	40.000.000	86.357.300	46.224.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			40.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.08.07.2.02.	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**160.000.000**	**210.140.000**	**177.950.900**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**160.000.000,00**	Dinsos P2KBP3A
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang		Orang	12 Orang	12 Orang	40.000.000	25.000.000	7.810.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			40.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	43 orang		43 orang	12 Layanan	43 orang	120.000.000	185.140.000	170.140.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			120.000.000,00	Dinsos P2KBP3A

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.07.2.03.	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah anak yang mendapatkan layanan dari lembaga AMPK yang difasilitasi**	**10 orang**		**43 orang**	**-**	**10 orang**	**-**	**39.975.000**	**39.975.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**0,00**	Dinsos P2KBP3A
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	10 orang			-	**10 orang**	-	39.975.000	39.975.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**1.397.000.000**	**2.349.228.611**	**2.313.179.065**							**1.884.782.000,00**	
66	**2.14.02.**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR)**	**2,34 Angka**		**2,51 Angka**	**2,39 Angka**	**2,39 Angka**	**53.000.000**	**85.501.746**	**73.344.600**							**30.000.000,00**	
			Angka Kelahiran remaja Umur 15 - 19 Tahun (Age Specific fertility Rate /ASFR 15 - 19)	**6 Angka**		**6,2 Angka**	**6,1 Angka**	**6,1 Angka**											
			Rate Nett Recent Migrasi (per 100 atau per 1000 penduduk)	**0,88 %**		**0,89 %**	**0,89 %**	**0,89 %**											
	2.14.02.2.01.	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan**	**2 Dokumen**		**1 Dokumen**	**1 dokumen**	**1 Dokumen**	**23.000.000**	**12.302.050**	**7.358.800**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**0,00**	Dinsos P2KBP3A
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	0 Kegiatan		0 Kegiatan	25 Kegiatan	0 Kegiatan	23.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan		1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	12.302.050	7.358.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.02.2.02.	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah dataku yang dikembangkan**	**16 unit**		**16 Unit**	**16 unit**	**16 Unit**	**30.000.000**	**73.199.696**	**65.985.800**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**30.000.000,00**	Dinsos P2KBP3A
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	60 laporan		12 laporan	-	12 laporan	-	19.200.000	19.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen		12 Dokumen	-	12 Dokumen	-	24.000.000	24.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0,00	Dinsos P2KBP3A

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	96 Unit		16 Unit	16 Unit	16 Unit	30.000.000	29.999.696	22.785.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			30.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
67	**2.14.03.**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)**	**64,5 %**		**62 %**		**62, 25 %**	**248.880.000**	**1.107.417.465**	**1.005.030.465**							**356.064.000,00**	
			Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	**11,5 %**		**14 %**		**13, 7 %**											
			Rasio akseptor KB	**74,69 %**		**74,41 %**		**74,45 %**											
			Proporsi Kebutuhan Kb Yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara Kb Modern (Demand Satisfied)	**67 %**		**65.73 %**		**66 %**											
			Persentase Kampung Keluarga Berkulitas Mandiri	**100 %**		**100 %**		**100 %**											
	2.14.03.2.01.	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	4904 orang		4704 orang	2300 orang	**4734 orang**	55.000.000	477.997.465	428.975.465			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	-		155.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12 Laporan		Laporan	-	12 Laporan	-	60.000.000	60.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			60.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	60 Laporan		12 Laporan	-	0 Laporan	-	97.997.465	97.997.465	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan		0 Laporan	-	12 Laporan	-	40.000.000	40.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			40.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen		0 Dokumen	-	4 Dokumen	-	125.000.000	125.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0,00	Dinsos P2KBP3A

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	7 Dokumen		0 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	40.000.000	40.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			40.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi		30 Organisasi	30 Organisasi	30 Organisasi	15.000.000	115.000.000	105.978.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			15.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.02.	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina**	**86 orang**		**86 orang**	**99 orang**	**86 orang**	**137.880.000**	**355.880.000**	**344.000.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**137.880.000,00**	**Dinsos P2KBP3A**
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	86 orang		86 orang	-	86 orang	-	128.000.000	128.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 organisasi		1 organisasi	40 Organisasi	1 organisasi	137.880.000	227.880.000	216.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			137.880.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.03.	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya**	**60 Laporan**		**12 Laporan**	**-**	**12 Laporan**	**-**	**127.940.000**	**127.940.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**7.184.000,00**	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	60 laporan		12 laporan	-	12 laporan	-	7.184.000	7.184.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			7.184.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2481 Orang		0 Orang	-	2161 Orang	-	103.659.000	103.659.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0,00	Dinsos P2KBP3A

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan		0 Laporan	-	12 Laporan	-	17.097.000	17.097.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.04.	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah kegiatan edukasi/sosialisasi KB yang dilaksanakan oleh atau bersama organisasi kemasyarakatan**	**5 kegiatan**		**1 kegiatan**		**1 kegiatan**	**56.000.000**	**145.600.000**	**104.115.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**56.000.000,00**	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi		0 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	56.000.000	56.000.000	14.515.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			56.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12 Dokumen		0 Dokumen	-	12 Dokumen	-	13.300.000	13.300.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Kampung		16 Kampung	16 Kampung	16 Kampung	-	76.300.000	76.300.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0,00	Dinsos P2KBP3A
68	**2.14.04.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga**	**64,5 %**		**62 %**		**62,25 %**	**1.095.120.000**	**1.156.309.400**	**1.234.804.000**							**1.498.718.000,00**	
			Indeks Lansia Berdaya	**61,4 Angka**		**NA Angka**		**59,4 Angka**											
			Indeks Pengasuhan Keluarga yang mempunyai remaja	**91,96 Angka**		**86,86 Angka**		**86,96 Angka**											
	2.14.04.2.01.	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina**	**64 Kelompok**		**64 Kelompok**		**64 Kelompok**	**552.560.000**	**731.558.000**	**775.558.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		692.158.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	30.000.000	30.000.000	74.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			30.000.000,00	Dinsos P2KBP3A

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	12 Laporan		Laporan	-	12 Laporan	-	9.598.000	9.598.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			9.598.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit		Unit	-	10 Unit	-	130.000.000	130.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			130.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1338 Orang		223 Orang	223 Orang	223 Orang	522.560.000	561.960.000	561.960.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			522.560.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.04.2.02.	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan**	**5 kegiatan**		**1 kegiatan**		**1 kegiatan**	**542.560.000**	**424.751.400**	**459.246.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**806.560.000,00**	Dinsos P2KBP3A
			Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	**54 persen**			**54 persen**	**54 persen**											
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	23 organisasi		23 organisasi	23 Organisasi	23 organisasi	522.560.000	140.751.400	185.666.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			522.560.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	20.000.000	9.580.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			20.000.000,00	Dinsos P2KBP3A
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	12 Laporan		12 Laporan	-	12 Laporan	-	120.000.000	120.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			120.000.000,00	Dinsos P2KBP3A

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	12 Laporan		12 Laporan	-	12 Laporan	-	144.000.000	144.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			144.000.000,00	Dinsos P2KBP3A

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 merupakan pencajabaran dari Rencana Strategis yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Adapun noenklatur program, kegiatan serta subkegiatan pada dokumen rencana kerja ini mendasarkan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 ini sudah melalui tahap-tahap yang dipersyaratkan, dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025 ini menjadi tanggungjawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan demikian Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan dan anggaran dalam rangka menunjang pencapaian pembangunan.

Pada Tahun Anggaran 2025 Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan beberapa kegiatan strategis yang bersumber dari anggaran APBD dan APBN Tahun 2025 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan disesuaikan dengan dinamika yang terjadi dalam proses pembangunan dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu.

Pelaksanaan semua kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran mensyaraktkan pentingnya koordinasi dan sinkronosisi antar kegiatan baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu bidang dan lintas bidang, dengan tetap memperhatikan tugas

kota dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program dan kegiatan yang disusun dalam Perubahan Renja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat inikatf segingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi regulasi serta ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah tahun anggaran bersangkutan.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya kesepakatan dan penetapan kaidah-kaidah dalam penjabaran Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan perubahan Renja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan Tahun 2025 yang memuat indikator, tolok ukur kinerja, kode rekening, uraian belanja per rekening, rincian perhitungan serta jumlah anggaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025. Perubahan RKA tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun 2025;

2. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan monitoring dan evalausai pelaksanaan anggaran dan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan selama tahun pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan;

3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2025 yang berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Evaluasi dimaksud meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan.

Dengan adanya Perubahan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 ini diharapkan agar pencapaian sasaran strategis , target program dan kegiatan dapat lebih focus, terintegrasi serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat umum serta bagi pengguna layanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tidak terlepas dari prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Padang Panjang, 30 Juni 2025

Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang



Drs. OSMAN BIN NUR, M. Si
Pembina Utama Muda, NIP. 19690120 198902 1 001

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa atas Berkah dan Rahmat Nya Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dapat menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang untukperiode Tahun 2025 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan pada RPJMD 2025-2029 Kota Padang Panjang dan penjabaran dari Rensta Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi implementasi pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Demikian Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini dibuat sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Padang Panjang, Juni 2025

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang

Ade Nafrita Anas, S.P., MP
NIP. 19710520 199903 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……..... i
DAFTAR ISI……..... ii
DAFTAR TABEL……..... iii
BAB I PENDAHULUAN …….... .1
1.1 Latar Belakang.....1
1.2 Landasan Hukum.....2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan……..…....5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.....6
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.....16
2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD……20
2.4 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Mayarakat 26
2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.....28
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 31
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Daerah 31
3.2 Tujuan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....32
3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan..... 33
BAB IV PENUTUP 49

DAFTAR TABEL

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun 2025..... 7

2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 17

2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang 19

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025 Kota Padang Panjang 21

2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan pada Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertaian Kota Padang Panjang Tahun 2025..... 27

3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025 32

3.2 Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025..... 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran Perubahan Renja serta memuat program, kegiatan dan subkegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dengan demikian Perubahan Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Perangkat Daerah dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP).

Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu tahun berjalan, meliputi: evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program, kegiatan dan subkegiatan masyarakat, dan penelaahan kebijakan nasional bidang pertanian.

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang adalah salah satu Perangkat Daerah di Kota Padang Panjang yang memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan, serta Ketahanan Pangan kepada masyarakat.

Secara Umum Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan sampai dengan triwulan I Tahun 2025, yang menunjukkan adanya ketidak sesuaian perkembangan keadaan yaitu:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

2. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka perlu penyesuaian penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, Penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.
3. Dengan terpilihnya Kepala Daerah Kota Padang Panjang pada priode 2025-2029 yang baru maka Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang perlu menyesuaikan dengan program unggulan terkait visi misi Kepala Daerah terpilih.

Tahun Anggaran 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029, yang dituangkan dalam Renja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025 yang memuat rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam Anggaran APBD Perubahan Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang tahun 2025 dilandasi oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaiberikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338);
8. Undang-Undang No. 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat;
9. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Keputusan Mentri Keuangan RI No. 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasioanal Kesehatan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Sub Jenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian DAK Non-Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Sub Jenis Bantuan Operasional Penyulun Pertanian Tahun Angaran 2025;
13. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota padang Panjang Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

16. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 29);
17. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6); dan
18. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 15).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029. Maksud dari Perubahan Renja Tahun 2025 adalah penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi tentang:

a. Program Indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang;
b. Program Indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang; dan
c. Program Indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 adalah menjabarkan rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja optimal, serta sebagai arah dan acuan untuk:

a. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
d. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
e. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Pangan dan Pertanian.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Peraturan tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II.HASIL EVALUASI RENJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN SAMPAI DENGAN TRWIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD.
2.4 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat.
2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Daerah.
3.2 Tujuan Sasaran Renja Perangkat Daerah.
3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan.

BAB IV. PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025- 2029 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Dinas Pangan dan Pertanian selaku Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Indikator Kinerja program, kegiatan dan subkegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan.

Hasil evaluasi kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidak berhasilan dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (Renja tahun berikutnya). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 Dinas Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Gambaran lengkap dari hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang kondisi Triwulan I Tahun 2025 terdapat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PADANG PANJANG PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

No.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SAMPAI DENGAN RENJA TAHUN LALU = 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (APBD)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA OPD (%)	
										I		II		III		IV							
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100	
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)**	**100 %**	**563.320.000**	**100,05 %**	**303.077.070**	**100 %**	**182.061.800**	**0 %**	-							**0 %**	-	**100,05 %**	**303.077.070**	**100,05**	**53,80**
			Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	**100 %**		**100 %**		**100 %**		**0 %**								**0 %**		**100,00 %**		**100,00**	
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan	**Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk**	**2.400 Kkal/ kap/ hr)**	**288.320.000**	**2.844,14 Kkal/ kap/ hr)**	**58.674.172**	**2.400 Kkal/ kap/ hr)**	**142.435.000**	**0 Kkal/ kap/ hr)**	-							**0 Kkal/ kap/ hr)**	-	**2.844 Kkal/ kap/ hr)**	**58.674.172**	**118,51**	**20,35**
		Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang tersedia	3 Laporan	130.000.000	1 Laporan	29.792.000	1 Laporan	142.435.000	0 Laporan	-							0 Laporan		1 Laporan	29.792.000	33,33	
		Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	2 Unit	70.000.000	- -	-	- -	-	- -	-							- -		- Unit	-	0,00	
		Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	3 Dokumen	20.400.000	- -	-	- -	-	- -	-							- -	-	- Dokumen	-	0,00	0,00
		Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	6 Dokumen	67.920.000	1 Dokumen	28.882.172	- -	-	- -	-							- -	-	1 Dokumen	28.882.172	16,67	42,52
		Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	**Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**	**7,7 Ton**	**95.000.000**	**15,612 Ton**	**192.776.976**	- -	-	- -	-							**- -**	-	**15,612 Ton**	**192.776.976**	202,75	202,92
		Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	7,7 Ton	95.000.000	15,612 Ton	192.776.976	- -	-	- -	-							- -	-	15,612 Ton	192.776.976	202,75	202,92
		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Angka Kecukupan Energi (AKE)**	**1845 kkal/ kapita/ hari**	**180.000.000**	**1.852,9 kkal/ kapita/ hari**	**51.625.922**	**1853 kkal/ kapita/ hari**	**39.626.800**	**0 kkal/ kapita/ hari**	-							**0 kkal/ kapita/ hari**	-	**1.852,9 kkal/ kapita/ hari**	**51.625.922**	**100,43**	**28,68**
			Angka Kecukupan Protein (AKP)	**63,10 gram/ kapita/ hari**		**62,9 gram/ kapita/ hari**		**63 gram/ kapita/ hari**		**0 gram / kapita/ hari**								**0 gram / kapita/ hari**		**62,9 gram/ kapita/ hari**		**99,68**	
		Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 Dokumen	30.000.000	- -	-	- -	-	- -	-							- -	-	- Dokumen	-	0,00	0,00
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	150.000.000	1 Laporan	51.625.922	1 Laporan	39.626.800	0 Laporan	-							0 Laporan	-	1 Laporan	51.625.922	33,33	34,42
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	**Persentase Pengawasan Pangan Segar**	**100 %**	**90.000.000**	**100 %**	**9.070.975**	**100 %**	**27.488.200**	**0 %**	-							**0 %**	-	**100 %**	**9.070.975**	**100,00**	**10,08**
		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota**	**3 Laporan**	**90.000.000**	**1 Laporan**	**9.070.975**	**1 Laporan**	**27.488.200**	**0 Laporan**	-							**0 Laporan**	-	**1 Laporan**	**9.070.975**	**33,33**	**10,08**
		Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	90.000.000	1 Dokumen	9.070.975	1 Dokumen	27.488.200	0 Dokumen	-							0 Dokumen	-	1 Dokumen	9.070.975	33,33	10,08
2	**Meningkatnya Produksi/ Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan**	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**Produksi Budidaya Perikanan**	**2256 Ton/ Tahun**	**1.621.036.400**	**751,03 Ton/ Tahun**	**531.452.350**	**752 Ton/ Tahun**	**340.422.000**	**150,92 Ton/ Tahun**	-							**150,92 Ton/ Tahun**	-	**901,95 Ton/ Tahun**	**531.452.350**	**39,98**	**32,78**

No.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SAMPAI DENGAN RENJA TAHUN LALU = 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (APBD)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA OPD (%)	
										I		II		III		IV							
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100	
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Jumlah Pelaku Perikanan yang Menerapkan Teknologi Perikanan**	**60 Orang**	**1.621.036.400**	**20 Orang**	**531.452.350**	**20 Orang**	**340.422.000**	**5 Orang**	**-**							**5 Orang**	**-**	**25 Orang**	**531.452.350**	**41,67**	**32,78**
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3 Unit	1.535.036.400	1 Unit	442.837.460	1 Unit	305.524.000	0 Unit	-							0 Unit	-	1 Unit	442.837.460	33,33	28,85
		Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota	3 Unit	86.000.000	1 Unit	88.614.889,55	1 Unit	34.898.000	0 Unit	-							0 Unit	-	1 Unit	88.614.890	33,33	103,04
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	**Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan**	**3 Jenis**	**132.320.000**	**1 Jenis**	**59.077.578**	**1 Jenis**	**72.376.400**	**0 Jenis**	**-**							**0 Jenis**	**-**	**1 Jenis**	**59.077.578**	**33,33**	**0,45**
		Kegiatan Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Mikro dan Kecil	**Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi**	**6 Kali**	**132.320.000**	**2 Kali**	**59.077.578**	**2 Kali**	**72.376.400**	**0 Kali**	**-**							**0 Kali**	**-**	**2 Kali**	**59.077.578**	**33,33**	**44,65**
		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	3 Dokumen	132.320.000	1 Dokumen	59.077.578	1 Dokumen	72.376.400	0 Dokumen	-							0 Dokumen	-	1 Dokumen	59.077.578	33,33	44,65
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	**Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian**	**85 %**	**1.074.582.000**	**77 %**	**743.646.523**	**80,00 %**	**694.508.300**	**0 %**	**13.231.040**							**0 %**	**13.231.040**	**77 %**	**59.077.578**	**90,59**	**5,50**
			Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan	**85 %**		**75 %**		**80,00 %**		**0 %**								**0 %**		**75 %**		**88,24**	
		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia**	**6 Jenis**	**60.000.000**	**2 Jenis**	**379.103.775**	**2 Jenis**	**403.025.000**	**0 Jenis**	**-**							**0 Jenis**	**-**	**2 Jenis**	**379.103.775**	**33,33**	**631,84**
		Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	36 Laporan	60.000.000	12 Laporan	379.103.775	12 Laporan	403.025.000	3 Laporan	-							3 Laporan	-	15 Laporan	379.103.775	41,67	631,84
		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	**Produksi Tanaman Hias**	**246.165 Tangkai**	**226.020.000**	**73.039 Tangkai**	**75.726.516**	**82.055 Tangkai**	**123.600.000**	**17.362 Tangkai**	**-**							**17.362 Tangkai**	**-**	**90.401 Tangkai**	**379.103.775**	**36,72**	**167,73**
			Produksi Padi	**25.720,2 Ton**		**9.210 Ton**		**8.573,4 Ton**		**2.280,18 Ton**								**2.280,18 Ton**		**11.490,18 Ton**		**44,67**	
			Kelompok Tani Pembudidaya Pertanian Organik	**6 kelompok**		**2 kelompok**		**2 kelompok**		**2 kelompok**								**2 kelompok**		**4 kelompok**		**66,67**	
		Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	226.020.000	1 Dokumen	75.726.516	1 Dokumen	123.600.000	0 Dokumen	-							0 Dokumen	-	1 Dokumen	75.726.516	33,33	33,50
		Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan**	**51 Ekor**	**788.562.000**	**8 Ekor**	**288.816.232**	**7 Ekor**	**167.883.300**	**7 Ekor**	**13.231.040**							**7 Ekor**	**13.231.040**	**15 Ekor**	**302.047.272**	**29,41**	**38,30**
		Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bakan Pakan/ Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	3 Laporan	788.562.000	1 Laporan	288.816.232	1 Laporan	167.883.300	0 Laporan	13.231.040							0 Laporan	13.231.040	1 Laporan	302.047.272	33,33	38,30
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	**Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian**	**85 %**	**495.100.000**	**77 %**	**109.429.025**	**80 %**	**99.142.400**	**0 %**	**11.073.600**							**0 %**	**11.073.600**	**77 %**	**120.502.625**	90,59	**24,34**
			Persentase Pemenuhan Prasarana Peternakan	**85 %**		**75 %**		**80 %**		**0 %**								**0 %**		**75 %**		88,24	
		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	**Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani**	**3 Unit**	**453.100.000**	**- -**	**100.654.525**	**1 Unit**	**67.605.000**	**0 Unit**	**11.073.600**							**0 Unit**	**11.073.600**	**- Unit**	**111.728.125**	**0,00**	**24,66**
			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	**2 Unit**		**- -**		**1 Unit**		**0 Unit**								**0 Unit**		**- Unit**		**0,00**	

No.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SAMPAI DENGAN RENJA TAHUN LALU = 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (APBD)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA OPD (%)	
										I		II		III		IV							
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100	
			Jumlah Prasarana Peternakan yang Disediakan	**3 Unit**		**1 Unit**		**1 Unit**		**1 Unit**								**1 Unit**		**2 Unit**		**66,67**	
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	60.000.000	- -	-	1 Unit	20.000.000	0 Unit	-							0 Unit	-	- Unit	-	0,00	0,00
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	293.100.000	1 Unit	100.654.525	1 Unit	30.805.000	1 Unit	11.073.600							1 Unit	11.073.600	2 Unit	111.728.125	66,67	38,12
		Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilistasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	- -	-	1 Unit	16.800.000	0 Unit	-							0 Unit	-	- Unit	-	0,00	0,00
		Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah	**Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB**	**123 Ekor**	**42.000.000**	**127 Ekor**	**8.774.500**	**25 Ekor**	**31.537.400**	**3 Ekor**	**-**							**3 Ekor**	**-**	**130 Ekor**	**8.774.500**	**105,69**	**20,89**
		Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	3 Laporan	42.000.000	1 Laporan	8.774.500	1 Laporan	31.537.400	0 Laporan	-							0 Laporan	-	1 Laporan	8.774.500	33,33	20,89
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/Kasus**	**9,5 %**	**1.215.252.000**	**11,11 %**	**353.873.161**	**9,0 %**	**162.795.800**	**0 %**	**-**							**0 %**	**-**	**11 %**	353.873.161	**115,79**	**29,12**
		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakitr Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pelayanan Medis Veteriner**	**100 %**	**685.952.000**	**100 %**	**174.250.259**	**100 %**	**128.485.800**	**100 %**	**-**							**100 %**	**-**	**100 %**	**174.250.259**	**100,00**	**25,40**
		Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	3 Laporan	365.952.000	1 Laporan	105.569.812	1 Laporan	8.485.800	0 Laporan	-							0 Laporan	-	1 Laporan	105.569.812	33,33	28,85
		Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah atau kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	320.000.000	1 Laporan	68.680.447	1 Laporan	120.000.000	0 Laporan	-							0 Laporan	-	1 Laporan	68.680.447	33,33	21,46
		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)**	**100 %**	**185.700.000**	**100 %**	**46.170.696**	**- -**	**-**	**- -**	**-**							**100 %**	**-**	**100 %**	**46.170.696**	**100,00**	**24,86**
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3 Laporan	185.700.000	1 Laporan	46.170.696	- -	-	- -	-							- -	-	1 Laporan	46.170.696	33,33	24,86
		Kegiatan Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Jumlah Livestock Expo yang diikuti**	**3 Kali**	**343.600.000**	**- -**	**133.452.206**	**1 Kali**	**34.310.000**	**0 Kali**	**-**							**0 Kali**	**-**	**- Kali**	**133.452.206**	**0,00**	**38,84**
			Jumlah Sertifikasi Produk Susu	**3 Sertifikat**		**1 Sertifikat**		**1 Sertifikat**		**0 Sertifikat**								**0 Sertifikat**		**1 Sertifikat**		**33,33**	
		Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	3 Laporan	276.600.000	1 Laporan	133.452.206	1 Laporan	11.310.000	0 Laporan	-							0 Laporan	-	1 Laporan	133.452.206	33,33	48,25
		Sub Kegiatan Penerapan Persyaratan Higiene sanitasi pada unit usaha produk	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Telah Dibina untuk Penerapan Persyaratan	3 Unit Usaha	67.000.000	- -	-	1 Unit Usaha	23.000.000	0 Unit Usaha	-							0 Unit Usaha	-	- Unit Usaha	-	0,00	0,00
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani**	**85 %**	**61.846.000**	**75 %**	**50.687.980**	**80 %**	**10.000.000**	**0 %**	**-**							**0 %**	**-**	**75 %**	**50.687.980**	**88,24**	**81,96**

No.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SAMPAI DENGAN RENJA TAHUN LALU = 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (APBD)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA OPD (%)	
										I		II		III		IV							
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100	
		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	**Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)**	**441 Ha**	**61.846.000**	**41,98 Ha**	**50.687.980**	**147 Ha**	**10.000.000**	**0 Ha**	**-**							**0 Ha**	**-**	**42 Ha**	**50.687.980**	**9,52**	**81,96**
		Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	35 Ha	31.846.000	10 Ha	45.908.000	- -	-	- -	-							- -	-	10 Ha	45.908.000	28,57	144,16
		Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3 Laporan	30.000.000	1 Laporan	4.779.980	1 Laporan	10.000.000	0 Laporan	-							0 Laporan	-	1 Laporan	4.779.980	33,33	15,93
		Program Penyuluhan Pertanian	**Adopsi Inovasi Teknologi Pertanian**	**41,4 %**	**252.320.000**	**13,8 %**	**297.117.243**	**27,6 %**	**139.017.150**	**6,9 %**	**3.017.950**							**6,9 %**	**3.017.950**	**20,7 %**	**300.135.193**	**50**	**118,95**
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	**Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan**	**60 Keltan**	**252.320.000**	**20 Keltan**	**297.117.243**	**20 Keltan**	**139.017.150**	**5 Keltan**	**3.017.950**							**5 Keltan**	**3.017.950**	**25 Keltan**	**300.135.193**	**41,67**	**118,95**
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Unit	122.320.000	1 Unit	29.498.125	1 Unit	31.001.000	0 Unit	3.017.950							0 Unit	3.017.950	1 Unit	32.516.075	33,33	26,58
		Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	130.000.000	1 Unit	267.619.118	1 Unit	108.016.150	0 Unit	-							0 Unit		1 Unit	267.619.118	33,33	205,86
3	**Meningkatnya Pendapatan Petani Penerima Bansos**	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**Persentase Pemenuhan Sarana Peternakan**	**85 %**	**60.000.000**	**75 %**	**2.009.308.450**	**80 %**	**1.007.340.150**	**0 %**	**-**							**0 %**	**-**	**75 %**	**2.009.308.450**	**88,235294**	**3348,85**
		Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	**Jumlah KK Miskin yang Dibantu**	**6 KK**	**60.000.000**	**59 KK**	**2.009.308.450**	**31 KK**	**1.007.340.150**	0 **KK**	**-**							0 **KK**	**-**	**59 KK**	**2.009.308.450**	**983,33**	**3348,85**
		Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Benih/ Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	6 ekor	60.000.000	485 ekor	2.009.308.450	56 ekor	1.007.340.150	0 ekor	-							0 ekor	-	485 ekor	2.009.308.450	8083,33	3348,85
4	**Terselenggaranya Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian**	**100 %**	**23.210.183.698**	**100 %**	**8.128.596.307**	**100 %**	**8.797.842.036**	**24,2 %**	**2.092.357.452**							**24,2 %**	**2.092.357.452**	**100 %**	**10.220.953.759**	**100,00**	**44,04**
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**18.394.468.806**	**100 %**	**6.877.037.384**	**100 %**	**6.406.468.292**	**25 %**	**1.636.759.905**							**25 %**	**1.636.759.905**	**100 %**	**8.513.797.289**	**100,00**	**46,28**
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	2268 Orang/ Bulan	18.394.468.806	756 Orang/ Bulan	6.877.037.384	756 Orang/ Bulan	6.406.468.292	189 Orang/ Bulan	1.636.759.905							189 Orang/ Bulan	1.636.759.905	945 Orang/ Bulan	8.513.797.289	41,67	46,28
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Ppemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 %**	**24.000.000**	**100 %**	**24.000.000**	**- -**	**-**	**- -**	**-**							**- %**	**-**	**100 %**	**24.000.000**	**100,00**	**100,00**
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	54 Paket	24.000.000	48 Paket	24.000.000	- -	-	- -	-							- Paket	-	48 Paket	24.000.000	88,89	100,00
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**	**1.050.000.000**	**100 %**	**272.340.137**	**100 %**	**361.033.555**	**24 %**	**29.272.820**							**24 %**	**29.272.820**	**100 %**	**301.612.957**	**100,00**	**28,73**
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Paket	48.000.000	4 Paket	9.364.000	4 Paket	16.000.000	1 Paket	-							1 Paket	-	5 Paket	9.364.000	41,67	19,51

No.	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2024-2026 (AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SAMPAI DENGAN RENJA TAHUN LALU = 2024		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (APBD)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA YANG DIEVALUASI		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA OPD (%)	
										I		II		III		IV							
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = (8+9+10+11)		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100	
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	360.000.000	4 paket	68.704.650	4 paket	71.505.945	1 paket	4.655.900							1 paket	4.655.900	5 paket	73.360.550	41,67	20,38
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 paket	42.000.000	12 paket	6.863.700	12 paket	17.193.350	3 paket	3.064.320							3 paket	3.064.320	15 paket	9.928.020	41,67	23,64
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	600.000.000	24 Laporan	187.407.787	24 Laporan	256.334.260	6 Laporan	21.552.600							6 Laporan	21.552.600	30 Laporan	208.960.387	41,67	34,83
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan**	**100 %**	**614.842.892**	**100 %**	**35.960.000**	**100 %**	**36.981.300**	**0 %**	**-**							**0 %**	**-**	**100 %**	**35.960.000**	**100,00**	**5,85**
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000	- -	-	- -	-	- -	-							- Unit	-	- Unit	-	0,00	0,00
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnnya yang Disediakan	13 Unit	114.842.892	3 Unit	35.960.000	1 Unit	36.981.300	0 Unit	-							0 Unit	-	3 Unit	35.960.000	23,08	31,31
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi**	**100 %**	**1.815.872.000**	**100 %**	**605.364.386**	**100 %**	**1.572.305.734**	**25 %**	**362.707.277**							**25 %**	**362.707.277**	**100 %**	**968.071.663**	**100,00**	**53,31**
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	14.000.000	12 Laporan	5.570.000	12 Laporan	4.003.700	3 Laporan	800.000							3 Laporan	800.000	15 Laporan	6.370.000	41,67	45,50
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan	600.000.000	36 Laporan	157.439.634	36 Laporan	199.999.034	9 Laporan	30.933.045							9 Laporan	30.933.045	45 Laporan	188.372.679	41,67	31,40
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	1.201.872.000	12 Laporan	442.354.752	12 Laporan	1.368.303.000	3 Laporan	330.974.232							3 Laporan	330.974.232	15 Laporan	773.328.984	41,67	64,34
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penun jang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik**	**100 %**	**1.311.000.000**	**100 %**	**313.894.400**	**100 %**	**421.053.155**	**22 %**	**63.617.450**							**22 %**	**63.617.450**	**100 %**	**377.511.850**	**100,00**	**28,80**
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	165 Unit	921.000.000	55 Unit	264.084.650	45 Unit	315.000.000	9 Unit	48.752.150							9 Unit	48.752.150	64 Unit	312.836.800	38,79	33,97
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	135.000.000	5 unit	25.669.250	5 unit	45.000.000	3 unit	8.024.300							3 unit	8.024.300	8 unit	33.693.550	53,33	24,96
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	21 Unit	240.000.000	3 Unit	24.140.500	2 Unit	61.053.155	1 Unit	6.841.000							1 Unit	6.841.000	4 Unit	30.981.500	19,05	12,91
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Luas Tanah yang Diakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1,5 ha	15.000.000	- -	-	- -	-	- -	-							- -	-	- -	-	0,00	0,00
		Total			**28.775.960.098**		**12.595.336.661,55**		**11.532.994.236**		**2.119.680.042**		**-**						**2.119.680.042**		**14.715.016.703,55**		**51,14**
									Rata - Rata Capaian Kinerja (%)														
									Predikat Kinerja														
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																							
Tindak Lanjut																							

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025

Dari Tabel 2.1. dapat dilihat bahwa dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I ini maka berikut ini ditampilkan capaian masing-masing program:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

Realisasi Keuangan Rp.0,- (0%) dan realisasi fisik 13%. Dimana pada program ini terdapat 3 kegiatan, yaitu: 1). Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan. Pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan, yaitu a. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya local; b. Pemantauan harga dan Pasokan Pangan; dan c. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM). 2). Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota. Pada Kegiatan ini terdapat 1 sub kebgiatan yaitu Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota. 3) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Pada Kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan, yaitu: a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun dan b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Indikator kinerja dari program ini ada 2, yaitu : 1) Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) dan 2) Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP), dimana target persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP) pada Triwulan I adalah 0% dengan realisasi 0% karena masih menunggu ketersediaan data Susenas dari BPS.

2. Pengawasan Keamanan Pangan

Realisasi Keuangan Rp.0,- (0,00%) dan realisasi fisik 10%. Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kotan. Pada kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan (1) Subkegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja pada program ini adalah persentase Pengawasan Pangan Segar. Dimana pada Triwulan I adalah 0% dengan realisasi 0% karena kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Realisasi Keuangan Rp.0,- (0%) dan realisasi fisik 12%. Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan (1) Subkegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dan (2) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Derah Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja pada program ini adalah peningkatan produksi budidaya perikanan. Dimana pada Triwulan I persentase telah mencapai 12,54%, dengan jumlah produksi perikanan sebanyak 508 ton/ tahun.

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Realisasi Keuangan Rp.0,- (0%) dan realisasi fisik (10%). Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil. Pada Kegiatan ini terdapat 1 sub kegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota.

Indikator kinerja pada program ini adalah Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan, Dimana pada Triwulan I masih 0 %, dengan Jenis Produk Olahan Perikanan 1 Jenis.

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Realisasi Keuangan Rp. 13.231.040,- (0,78%) dan realisasi fisik 21%. Dimana pada program ini terdapat 4 kegiatan, yaitu: 1) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian. Pada Kegiatan ini terdapat 1 Subkegiatan, yaitu: Subkegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian. 2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota. Pada kegiatan ini terdapat 1 Subkegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman. 3) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Pada Kegiatan ini terdapat 1 subkegiatan, yaitu: Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil. 4) Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain. Pada Kegiatan ini terdapat 1 subkegiatan yaitu Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.

Indikator kinerja pada program ini ada 2, yaitu 1) persentase pemenuhan Sarana pertanian, dan 2) persentase pemenuhan Sarana peternakan. Dimana pada Triwulan I realisasi 0% karena penghitungan hanya dapat dilakukan pada akhir tahun.

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Realisasi Keuangan Rp.11.073.600,- (16,38%) dan realisasi fisik 30%. Dimana pada program ini terdapat 2 kegiatan, yaitu: 1) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian . Pada Kegiatan ini terdapat 3 subkegiatan yaitu (1) Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya; (2) Subkegiatan Pembagunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani; dan (3) Subkegiatan Pembagunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi Usaha

Tani. 2) Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pada Kegiatan ini terdapat 1 Subkegiatan yaitu Pelestarian dan Pemanfaatan Wailayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak.

Indikator kinerja pada program ini ada 2 yaitu 1) persentase pemenuhan prasarana pertanian, dan 2) persentase pemenuhan prasarana peternakan dengan realisasi capaian 0% dan realisasi pemenuhan prasarana pertanian dan peternakan 0% karena penghitungan hanya dapat dilakukan pada akhir tahun.

7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Realisasi Keuangan Rp.0,- (0%) dan realisasi fisik 11%. Dimana pada program ini terdapat 3 kegiatan, yaitu: 1) Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Pada kegiatan ini terdapat 2 sub kegiatan, yaitu: (1) Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular dan (2) Sub Kegiatan Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota. 2) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pada kegiatan ini terdapat 1 subkegiatan yaitu Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner. 3) Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner. Pada kegiatan ini terdapat 2 subkegiatan, yaitu: (1) Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan dan (2) Pembinaan Penerapan Persyaratan Higienis Sanitasi pada Unit Usaha Produk.

Indikator kinerja pada program ini adalah persentase penurunan penyakit hewan/ternak/kasus , dengan realisasi 0% karena penghitungan hanya dapat dilakukan pada akhir tahun.

8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Realisasi Keuangan Rp. 0,- (0%) dan realisasi fisik 15%. Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu: Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota. Pada Kegiatan ini terdapat 1 subkegiatan, yaitu: (1) Subkegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Indikator kinerja pada program ini adalah persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang tertangani,dimana pada Triwulan I mencapai 0 % pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang tertangani.

9. Program Penyuluhan Pertanian

Realisasi Keuangan Rp.3.017.950,- (9,74%) dan realisasi fisik 1 3 %. Dimana pada program ini terdapat 1 kegiatan, yaitu: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Pada Kegiatan ini terdapat 3 subkegiatan, yaitu: (1) Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (2) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.

Indikator kinerja pada program ini adalah persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan inovasi teknologi pertanian dengan realisasi 13 % bagi kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan inovasi teknologi pertanian. Semua program sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang direncanakan

Pada Pergeseran Anggaran Tahun 2025 terdapat penambahan sub kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 59.280.000,- untuk peningkatan kapasitas penyuluhan pertanian dan sisa DAK Tahun lapu pada sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembuidayaan ikanndalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 7.500.000,- subkegiatan Peyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian sebesar Rp. 4.500.000,- serta ada penamabahan untuk produk unggulan pada sub kegiatan Peyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pendampingan penyususnan RDKK dan subkegiatan Peningkatan Kuaitas SDG hewan/tanaman sebesar Rp. 10.000.000,- untuk insentif pertanian.

Ada beberapa 1 program/ 1 kegiatan/ 3 subkegiatan yang hilang / recofusing pada Tahun 2025 diantaranya :

1. Program Pengawasan Keamanan Pangan, Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dana sebesar Rp. 27.488.200,-
2. Sub kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Higienis sanitasi pada unit usaha produk hewan dana sebesar Rp. 23.000.000,-

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja secara umum beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program adalah:

1) Bahwa terdapat kegiatan dalam program yang tidak dianggarkan karena terbatas alokasi anggaran, sehingga mengurangi capaian program;
2) Bahwa terdapat pergeseran anggaran;dan
3) Bahwa terdapat pengurangan volume pengadaan barang atau jasa dalam program,karena disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Dinas:

Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut:

1. Perubahan target capaian kinerja akhir periode Renstra;
2. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan;
3. Efisiensi alokasi belanja; dan
4. Penambahan alokasi pagu anggaran.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Ditinjau dari jenis urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian, terdapat 1 (satu) urusan wajib yaitu urusan bidang pangan. Urusan bidang pangan merupakan urusan wajib dengan kategori tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

1) Analisis terhadap Capian Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Adapun target Indikator Kinerja Kunci (IKK) disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014, sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (EPPD) sesuai Permendagri 18 Tahun 2020. Pada Dinas Pangan dan Pertanian, ada 3 Urusan yang mendukung IKK Kota yaitu Urusan Pangan, Urusan Pertanian serta Urusan Kelautan dan Perikanan, dimana bisa kita lihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel.2.2

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

(Sesuai dengan urusan pemerintahan yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014)

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Rumus	Target 2025	Sumber Data	OPD
1	**Pangan**				**Dinas Pangan Pertanian**
	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan ---------- x 100% Jumlah kebutuhan pangan	100 %	Dinas Pangan dan Pertanian	
2	**Pertanian**				**Dinas Pangan Pertanian**
	a. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi padi/ ha	7,20 ton/ ha	Dinas Pangan dan Pertanian	
	b. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian /kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t1) ----------x 100% Jumlah kejadian /kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	11,11 %	Dinas Pangan dan Pertanian	
3	**Kelautan dan Perikanan**				**Dinas Pangan Pertanian**
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten / kota	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/ kota	100,004/ ha	Dinas Pangan dan Pertanian	

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025

Dari tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa Dinas Pangan dan Pertanian memliki 3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang terbagi pada 3 unsur, yaitu : Unsur Pangan, Unsur Pertanian serta Unsur Kelautan dan Perikanan. Pada urusan pangan terdapat indikator persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan), dengan target 100%. Kemudian urusan pertanian dengan Indikator 2 indikator, yaitu: 1) produktivitas pertanian per hektar per tahun dengan target 7,20 ton/ ha dan 2) persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular dengan target 11,11% . Serta Indikator pada Urusan Kelautan dan Perikanan jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/ kota dengan target 100,004 %.

2) Analisis terhadap Capaian SPM

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar Kebutuhan Pelayanan. Sehubungan dengan kinerja pelayanan urusan bidang pangan tidak memiliki ketentuan SPM maka indikator analisis kinerja pelayanan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang

No	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA OPD-				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12
1	Skor Pola Pangan Harapan			85,75	87,3	86,1	85,19	87,4	86,18	85,19	85,20
2	Produktivitas Padi		√	6,3 ton/ ha	6,7 ton/ ha	6,5 ton/ ha	7,2 ton/ ha	7,2 ton/ ha	7,2 ton/ ha	5,85 ton/ ha	5,90 ton/ ha
3	Produktivitas Susu Sapi perah			11,2 liter/ ekor/hr	11,8 litert ekor/hr	11,80 liter/ ekor/hr	11,85 liter/ ekor/hr	11,02 liter/ ekor/hr	11,8 liter/ ekor/hr	11,85 liter/ ekor/hr	11,88 liter/ ekor/hr
4	Peningkatan Produksi Perikanan			5%	7%	0,13%	0,26%	7%	0,13%	0,26%	0,39%
5	Adopsi Inovasi Teknologi			67,80	100%	33,3%	66,7%	100%	33,3%	-	-
6	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos			11%	20,15%	8%	8,5%	20,15%	8%	-	-
7	Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk			-	-	-	2.420 kkal/kapita/hr	-	-	2.420 kkal/kapita/hr	2.425 kkal/kapita/hr
8	Nilai AKIP Dinas Pangan dan Pertanian			-	-	-	71,70	-	-	71,75	71,80

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025

Pada Tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang tidak termasuk Perangkat Daerah Pemangku Standar Pelayan Minimal (SPM), Sehingga kinerja pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian diukur dari capaian sasaran Renstra yang rata-rata realisasi untuk Tahun 2024 mencapai Target.

Menindaklanjuti Visi Misi Kepala daerah terpilih, RPJMD 2025-2029 yang diturunkan pada Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029, maka Renja perubahan Tahun 2025 berdasar pada IKU Tahun 2024 maka ada bebarapa indikator yang dihilangkan diantaranya: Adopsi Inovasi Teknologi dan Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos. Serta juga ada penambahan indikator yaitu Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk dan Nilai AKIP Dinas Pangan dan Pertanian. Untuk perkiraan pencapaian indiator kinerja pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025 diupayakan mencapai target yang telah ditentukan.

2.3. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Mengacu pada Renstra 2025-2029, dilakukan analisis lebih lanjut terhadap kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan rencana kegiatan dan analisis kebutuhan kemudian dimunculkan sejumlah program, kegiatan dan subkegitan beserta penganggarannya. Dalam Rancangan Awal Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025 terdapat 10 Program, 24 Kegiatan dan 47 Subkegiatan dengan anggaran sebesar Rp.10.663.606.951,- kemudian mengalami perubahan pada Rancangan Akhir Perubahan Renja menjadi 9 program, 19 Kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.10.594.480.886,-

Untuk lebih jelas perbandingan antara rancangan awal Perubahan RKPD dengan rancangan akhir dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel. 2.4
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
Kota Padang Panjang

NO	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN					**10.663.606.951**	**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**				**10.594.480.886**	
A	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**8.343.819.657**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN**				**8.125.946.726**	
I	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**8.343.819.657**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**8.125.946.726**	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan Dan Pertanian**	**100%**	**8.078.678.977**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan Dan Pertanian**	**100%**	**8.029.343.426**	
1.1	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**6.604.468.292**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**6.126.470.627**	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	756 Orang/ bulan	6.06.468.292	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/ bulan	6.126.470.627	
1.2	**Kegiatan Administrasi Umum PerangkatDaerah**		**Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**194.271.090**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**186.974.090**	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	9.570.200	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	9.570.200	
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan LogistikKantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan	4 Paket	36.138.390	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan	4 Paket	36.138.390	
1.2.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	8.596.500	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	8.596.500	
1.2.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	132.669.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	132.669.000	
1.3	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	**100%**	**2.507.900**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	**100%**	**12.507.900**	
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	2.507.900	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	12.507.900	
1.4	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	**1.457.507.154**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	**1.328.378.754**	
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	. 3.535.800	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	. 3.535.800	
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	199.999.034	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	199.999.034	
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.253.972.320	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.124.843.920	

NO	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik**	**100%**	**325.012.055**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik**	**100%**	**375.012.055**	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45 unit	263.167.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	45 unit	263.167.000	
1.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	40.791.900	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	40.791.900	
1.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	21.083.155	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	71.053.155	
2	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**		**Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)** **Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)**	**100%** **100%**	**96.603.300**	**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**		**Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**	**85,19**	**96.603.300**	
2.1	**Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan**		**Ketersediaan Pangan untuk DikonsumsiPenduduk**	**2400 kkal/ kap/ hr**	**76.175.000**	**Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan**		**Ketersediaan Pangan untuk DikonsumsiPenduduk**	**2420 kkal/ kap/ hr**	**76.175.000**	
2.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Padang Panjang	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	76.175.000	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Padang Panjang	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	76.175.000	
2.3	**Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**		**Angka Kecukupan Energi (AKE)** **Angka Kecukupan Protein (AKP)**	**1853 Kkal/ Kapita/ hari** **63 gram/ Kapita/ Hari**	**20.428.300**	**Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**		**Angka Kecukupan Energi (AKE)** **Angka Kecukupan Protein (AKP)**	**1851 Kkal/ Kapita/ hari** **57,01 gram/ Kapita/ Hari**	**20.428.300**	
2.3.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Padang Panjang	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	20.428.300	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Padang Panjang	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	20.428.300	
B	**Urusan Pemerintahan Pilihan**				**2.099.254.160**	**Urusan Pemerintahan Pilihan**				**2.468.534.160**	
II	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**				**307.645.900**	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**				**390.145.900**	
3	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**		**Produksi budidaya ikan**	**752 Ton/ tahun**	**262.645.900**	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**		**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya**	**752 Ton/ tahun**	**345.145.900**	
3.1	**Kegiatan Pengelolaan PembudidayaanIkan**		**Jumlah Pelaku Perikanan yang menerapkan teknologi perikanan**	**20 Orang**	**262.645.000**	**Kegiatan Pengelolaan PembudidayaanIkan**		**Jumlah Pelaku Perikanan yang menerapkan teknologi perikanan**	**20 Orang**	**345.145.900**	
3.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	270.145.900	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	320.145.900	

NO	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.2	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	0	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	25.000.000	
4	**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**		**Jumlah Jenis Produk Olahan Perikanan**	**1 jenis**	**45.000.000**	**Program Pengolahan dan Pemasaran HasilPerikanan**		**Angka Konsumsi Ikan**	**42,16 kg/kapita/ tahun**	**45.000.000**	
4.1	**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**		**Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN) di Kota Padang Panjangdan Provinsi**	**2 kali**	**45.000.000**	**Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**		**Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (FORIKAN) di Kota Padang Panjang**	**1 kali**	**45.000.000**	
4.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	45.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan InformasiUsaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	45.000.000	
III	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**	**1.791.608.260**	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**	**2.023.959.660**						**2.078.388.260**	
6	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**		**Persentase Pemenuhan Sarana Pertanian** **Persentase Ketersediaan Sarana Peternakan**	**80%** **80%**	**1.557.137.880**	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**		**Peningkatan Produksi Tanaman Pangan** **Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan**	**80%** **80%**	**1.595.137.880**	
6.1	**Kegiatan Pengawasan Penggunaan SaranaPertanian**		**Jumlah Jenis Sarana Pertanian yangTersedia**	**2 jenis**	**373.895.000**	**Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**		**Jumlah Jenis Sarana Pertanian yangTersedia**	**2 jenis**	**373.895.000**	
6.1.1	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Padang Panjang	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	373.895.000	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Padang Panjang	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	373.895.000	
6.1	**Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**		- **Produksi Tanaman Hias** - **Produksi Padi** - **Kelompok Tani Pembudidaya Pertanian Organik**	**82.055 tangkai** **8.534,4 ton** **2 kelompok**	**27.875.000**	**Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**		- **Produksi Tanaman Hias** - **Produksi Padi** - **Kelompok Tani Pembudidaya Pertanian Organik**	**82.055 tangkai** **8.534,4 ton** **2 kelompok**	**57.875.000**	
6.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDGHewan/ Tanaman	Padang Panjang	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDGHewan/Tanaman	1 Dokumen	27.875.000	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDGHewan/ Tanaman	Padang Panjang	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDGHewan/Tanaman	1 Dokumen	57.875.000	
6.3	**Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan**	**7 ekor**	**167.777.730**	**Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan**	**7 ekor**	**167.777.730**	
6.3.1	Sub kegiatan Pengawasan Mutu Benih/ Bibit ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman SkalaKecil	Padang Panjang	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	167.777.730	Sub kegiatan Pengawasan Mutu Benih/ Bibitternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Padang Panjang	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	167.777.730	
6.4	**Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain**		**Jumlah KK Miskin yang Dibantu**	**31 KK**	**995.590.150**	**Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain**		**Jumlah KK Miskin yang Dibantu**	**35 KK**	**995.590.150**	

NO	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.4.1	Sub kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Padang Panjang	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	56 Ekor	995.590.150	Sub kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Padang Panjang	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	79 Ekor	995.590.150	
7	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**		**Persentase Pemenuhan Prasarana Pertanian** **Persentase Pemenuhan Prasarana Peternakan**	**80%** **80%**	**69.549.780**	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**		**Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B**	**80%** **80%**	**69.549.780**	
7.1	**Kegiatan Pembangunan PrasaranaPertanian**		**Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani** **Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani** **Jumlah Prasarana Peternakan Yang Disediakan**	**1 unit** **1 unit** **1 unit**	**47.473.600**	**Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**		**Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani** **Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani** **Jumlah Prasarana Peternakan Yang Disediakan**	**1 unit** **1 unit** **2 unit**	**47.473.600**	
7.1.1	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Padang Panjang	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	20.000.000	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Padang Panjang	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	20.000.000	
7.1.2	Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	19.073.600	Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	19.073.600	
7.1.3	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Padang Panjang	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	8.400.000	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Padang Panjang	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	8.400.000	
7.2	**Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB**	**25 Ekor**	**22.076.180**	**Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB**	**25 Ekor**	**22.076.180**	
7.2.1	Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Padang Panjang	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	22.076.180	Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Padang Panjang	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	22.076.180	
8	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**Persentase Penurunan Penyakit Ternak/ Hewan/ Kasus**	**11,11%**	**105.143.200**	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**	**11,11%**	**105.143.200**	
8.1	**Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Padang Panjang**	**Persentase Pelayanan Medis Veteriner**	**100%**	**96.944.200**	**Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Padang Panjang**	**Persentase Pelayanan Medis Veteriner**	**100%**	**96.944.200**	
8.1.1	Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Padang Panjang	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	1.975.800	Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Padang Panjang	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	1.975.800	
8.1.2	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	94.968.400	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan	94.968.400	

NO	Rancangan RKPD Perubahan					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.3	**Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**Jumlah Livestock Expo yang Diikuti**	**1 kali**	**8.199.000**	**Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**		**Jumlah Livestock Expo yang Diikuti**	**0 kali**	**8.199.000**	
			Jumlah Sertifikasi Produk Susu	**1 sertifikat**				**Jumlah Sertifikasi Produk Peternakan/Olahan**	**1 sertifikat**		
8.3.1	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Padang Panjang	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	8.199.00	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Padang Panjang	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	8.199.00	
9	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**		**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yangTertangani**	**80%**	**7.600.000**	**Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**		**Persentase Penanganan Bencana Pertanian**	**80%**	**7.600.000**	
9.1	**Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana PertanianKabupaten/ Kota**		**Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)**	**147 Ha**	**7.600.000**	**Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana PertanianKabupaten/ Kota**		**Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)**	**147 Ha**	**7.600.000**	
9.1.2	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Padang Panjang	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	7.600.000	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Padang Panjang	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	7.600.000	
10	**Program Penyuluhan Pertanian**		**Persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan Inovasi Teknologi Pertanian**	**27,6 %**	**125.957.400**	**Program Penyuluhan Pertanian**		**Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan**	**100 %**	**300.957.400**	
10.1	**Kegiatan Pelaksanaan PenyuluhanPertanian**		**Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan**	**20 Keltan**	**125.957.400**	**Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		**Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan**	**20 Keltan**	**300.957.400**	
10.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Padang Panjang	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	8.587.400	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Padang Panjang	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	8.587.400	
10.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana PenyuluhanPertanian	1 Unit	58.090.000	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana PenyuluhanPertanian	1 Unit	233.090.000	
10.1.3	Subkegiatan Penyediaan dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian	Padang Panjang	Jumlah penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	13 org	59.280.000	Subkegiatan Penyediaan dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian	Padang Panjang	Jumlah penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	16 org	59.280.000	
TOTAL					**10.663.606.951**					**10.594.480.886**	

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025

Pada Tabel 2.4 di atas dapat dibandingkan antara rancangan awal Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Berdasarkan perbandingan tersebut, rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 menjadi 9 program, 19 kegiatan, dan 35 subkegiatan, dari semula 10 program, 24 kegiatan, dan 47 subkegiatan. Pengurangan tersebut meliputi 1 (satu) program, yaitu Program Pengawasan Keamanan Pangan; 1 (satu) kegiatan, yaitu Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota; serta 2 (dua) subkegiatan, yaitu: (1) Subkegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota; dan (2) Subkegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi pada Unit Usaha Produk Hewan.

Selanjutnya, dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas, serta Perubahan Rincian DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2025, pada pergeseran anggaran terjadi penambahan 1 (satu) subkegiatan, yaitu Subkegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian, yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian.

Pendanaan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025 mengalami peningkatan untuk mendukung kegiatan prioritas daerah, yang dialokasikan bagi rehabilitasi kolam Balai Benih Ikan (BBI), pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH), pengadaan mesin pendorong air untuk RPH, serta pembangunan sekolah lapang dan demplot pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

2.4. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat

Pada Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025 telah mengakomodir usulan Musrembang yang awalnya sebanyak 3 usulan menjadi 1 usulan dan Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD sebanyak 106 KK untuk usulan bantuan sosial berupa uang yang digunakan untuk pangadaan sarana pertanian pada Subkegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, pengadaan ternak pada Subkegiatan Pegadaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, pengadaan sarana dan prasarana pembudidyaan ikan pada Subkegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan bantuan kandang ayam dan itik pada Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dari Para Pemangku Kepentingan (POKIR) dan Musrenbang pada Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang periode Pelaksanaan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jenis Bantuan	Volume Awal	Volume Setelah Perubahan	Ket
1	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** 1.1 Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.1.1 Subkegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Perikanan	3 KK	3 KK	Pokir
2	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian** 2.1 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2.1.1. Subkegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	Bantuan Sarana Perrtanian	67 KK	67 KK	Pokir
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2.2 Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota lain 2.2.1 Subkegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Bantuan Bibit ternak	31 KK	35 KK	Pokir
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 2.3 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian 2.3.1 Subkegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Bantuan Kandang	2 KK	2 KK	Pokir
3	**Program Penyuluhan Pertanian** 3.1 Kegiatan Peaksanaan Penyuluhan Pertanian 3.1.1 SubKegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Demplot Kopi	1 paket	1 Paket	Musrenbang

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa usulan Pokok Pikiran (Pokir) tahun 2025 dan musrembang terdapat pada 3 program 5 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang mencakup pada urusan wajib yaitu: Urusan Pangan dan urusan pilihan, yaitu : Urusan Pertanian serta Urusan Kelautan dan Perikanan pada Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025 bertambah pada subkegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota bertambah sebanyak 3 KK dengan penambahan 3 ekor Sapi. Usulan Pokir tahun 2025 tersebut diterima oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dan kemudian dilakukan kajian lebih lanjut mengenai

keterkaitan usulan kegiatan dengan arah pembangunan pertanian serta keterkaitan dengan isu-isu penting pembangunan pertanian di Kota Padang Panjang. Dari usulan para pemangku kepentingan pada bidang ekonomi yang disampaikan melalui aplikasi https://padangpanjang.sipd.kemendagri.go.id/.

2.5. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2019 yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, maka Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang mempunyai tugas yakni melaksanakan sebagian Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pangan Pertanian, Kelauatan dan Perikanan.

Selanjutnya dalam Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian telah ditetapkan bahwa Dinas Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi pelaksana teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Urusan Pangan, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, dan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, yang menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pertanian, pangan dan perikanan;
b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang pangan, pertanian dan perikanan;
c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas Pangan dan Pertanian;
d. perumusan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan;
e. pembinaan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sejauh ini Dinas Pangan dan Pertanian tetap komit menjalankan tugas dan fungsinya, meskipun banyak ditemui permasalahan diantaranya:

1. Belum optimalnya ketahanan pangan;
2. Menurunnya jumlah populasi ternak sapi perah;
3. Rendahnya SDM petani ikan pada usaha budidaya ikan;
4. Rendahnya Produktivitas Pertanian; dan
5. Belum optimalnya pengembangan nilai tambah pertanian dan perikanan.

Berdasarkan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang 2025-2029, disebutkan beberapa isu strategis yang akan menentukan dan mempengaruhi arah kebijakan dan strategi Dinas untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pangan dan Pertanian, yaitu:

1. Belum optimalnya produktivitas komoditi pertanian dan perikanan,
2. Belum optimalnya pengembangan sapi perah,
3. Belum optimalnpya pengembangan usaha perikanan,
4. Belum optimalnya pengembangan pertanian organic,
5. Belum optimalnya pengimplementasian penganekaragaman konsumsi payangan yang B2SA.

Hal penting yang perlu dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran dinas serta peningkatan pelayanan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dimasa mendatang diantaranya dengan memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan. Berdasarkan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang 2025-2029, tantangan dan peluang pada Dinas Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

- ***Tantangan***

1. Rendahnya tingkat partisipasi petani dalam mengadopsi inovasi pembangunan pertanian;
2. Rendahnya minat generasi muda dalam berusaha tani;
3. Tingginya upah tenaga kerja usaha tani, sehingga komoditi yang dihasilkan sulit bersaing dengan daerah lain yang upah tenaga kerja lebih rendah;
4. Rendahnya produktivitas usaha tani;
5. Berkembangnya jenis hama dan penyakit tanaman dan ikan serta penyakit ternak/hewan;
6. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
7. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal cenderung menurun;
8. Pengembangan pangan lokal masih bersifat tradisional;
9. Lemahnya permodalan pelaku utama dan pelaku usaha tani;
10. Lemahnya kelembagaan tani;
11. Status kepemilikan lahan;
12. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cenderung meningkat; dan
13. Belum Optimalnya Pasar yang menampung hasil produksi pertanian.

- ***Peluang***

1. Padang Panjang memiliki letak geografis yang strategis yaitu terletak pada daerah persimpangan;
2. Iklim yang mendukung dengan curah hujan 4.619,4 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 239 hari dalam setahun, sehingga pertanaman dan usaha perikanan darat dapat dilakukan (sumber PPDA tahun 2025);
3. Kondisi jalan dan akses tranportasi lancar baik dari sentra produksi maupun ke pasar;
4. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Padang Panjang relatif besar terhadap total PDRB Kota Padang Panjang (5,14%) (sumber PPDA tahun 2025);
5. Adanya dukungan inovasi teknologi oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi, pihak ketiga lainnya;
6. Dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian; dan
7. Ditetapkannya Kota Padang Panjang oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Gubernur Sumatera Barat sebagai kawasan sapi perah, tanaman hias dan aneka cabai.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Daerah

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2025-2029 merupakan integrasi dari RPJMN 2025-2029, Penyusunan RPJMD harus sejalan dan menyelaraskan tujuan serta sasaran pembangunan daerah dengan program-program nasional yang ditetapkan dalam RPJMN. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, memastikan pembangunan daerah berkontribusi pada pencapaian prioritas nasional yang tertuang dalam Astacita, yaitu delapan prioritas pembangunan jangka menengah. Pembangunan antara pusat dan daerah harus terkoordinasi untuk mencapai keselarasan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara maju dan berdaulat pada tahun 2045. Swasembada pangan adalah salah satu fondasi penting untuk mencapai visi Indonesia Emas Tahun 2045 dan Misi ke-2 Astacita fokus pada pemantapan pertahanan keamanan dan kemandirian bangsa, dengan swasembada pangan sebagai salah satu tujuannya.

Peran Swasembada Pangan:

1. Kemandirian Ekonomi: Swasembada pangan mengurangi ketergantungan pada impor pangan, yang rentan terhadap fluktuasi harga global.
2. Peningkatan Ketahanan Nasional: Kemandirian pangan memperkuat kemampuan negara untuk menjaga stabilitas nasional, terutama dalam kondisi darurat atau krisis.
3. Peningkatan Produktivitas: Swasembada pangan mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian.
4. Kesejahteraan Masyarakat: Peningkatan produksi pangan lokal berdampak pada penurunan harga pangan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pangan berkualitas.

Upaya yang Dilakukan:

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan swasembada pangan, seperti:

1. Inpres 02 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
2. Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan, di mana paling sedikit 20% dana desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan.
3. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait untuk mendukung program swasembada pangan.

4. Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) juga terlibat dalam upaya menjaga ketahanan pangan, termasuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah.
5. Koopsudnas (Komando Operasi Udara Nasional) dan TNI AU juga mendukung swasembada pangan dengan berbagai kegiatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil analisis pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kota Padang Panjang, identifikasi isu dan permasalahan mendesak, pagu indikatif, serta hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2025 dalam rangka penetapan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2025, maka disusun Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan tujuan dan sasaran rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah, serta tetap menetapkan prioritas pembangunan pada sektor pertanian Tahun 2025 berdasarkan isu dan permasalahan mendesak yang perlu ditangani pada Tahun 2025.

Mengacu pada Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029, tujuan, sasaran, dan target Perubahan Renja Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Renstra Tahun I (2025)	Target P-Renja 2025
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan daerah	**Meningkatkan produktivitas dan ketersediaan pangan daerah**		Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	5,31%,	5,31%,
			Ratio PDRB Pertanian,Kehutanan dan Perikanan	5,20%	5,20%
		Meningkatknya Ketersediaan Pangan	**Ketersediaan Pangan untuk dikonsumsi Penduduk**	2.420 Kkal/kapita/hr	2.420 Kkal/kapita/hr
		Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya Ikan, Petani dan Peternak	Peningkatan Produksi Perikanan	0,26%	0,26%
			Prduktivitas Padi	5,85 Ton/Ha	5,85 Ton/Ha
			Produktivitas susu sapi perah	11,85 Ltr/Ekor/Hari	11,85 Ltr/Ekor/Hari
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas pangan dan Pertanian	71,75	71,75

Sumber Data Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025

Berdasarkan uraian pada tabel di atas, Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Pangan dan Pertanian menetapkan 3 (tiga) sasaran, yaitu: (1) meningkatnya ketersediaan pangan dengan indikator ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk; (2) meningkatnya kesejahteraan pembudidaya ikan, petani, dan peternak dengan indikator peningkatan produksi perikanan, produksi padi, serta produktivitas susu sapi perah; dan (3) meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator nilai AKIP Dinas Pangan dan Pertanian.

Salah satu indikator sasaran yang mengalami perubahan definisi operasional adalah Produktivitas Padi. Target produktivitas padi untuk periode 2026–2030 dihitung berdasarkan definisi operasional yang menggunakan Gabah Kering Giling (GKG). Perhitungan produktivitas dilakukan dengan rumus**: Perhitungan produktivitas dilakukan dengan formulasi** Produktivitas (ton/ha) = Produksi GKG (ton) dibagi dengan Luas Panen (ha). Sementara itu, produktivitas padi pada tahun 2024 dihitung berdasarkan rata-rata produktivitas padi selama satu tahun.

3.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Renstra Perangkat Daerah serta target capaian pada Perubahan Anggaran Tahun 2025, maka disusunlah rencana program dan kegiatan sebanyak **10 (sepuluh) Program** dengan didukung oleh 20 **(Dua puluh) Kegiatan** dan 34 **(tiga puluh empat) sub kegiatan**. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah
Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									12.835.272.726	**11.532.994.236**	**10.594.480.886**							**9.633.497.294,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**9.449.254.626**	**9.007.392.036**	**10.594.480.886**							**7.903.796.494,00**	
	2.09.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**9.449.254.626**	**9.007.392.036**	**8.125.946.726**							**7.903.796.494,00**	
76	**2.09.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	***100 %***	**9.191.602.526**	**8.797.842.036**	**8.029.343.426**							**7.695.956.494,00**	
	2.09.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	***100 %***	**6.685.345.882**	**6.406.468.292**	**6.126.470.627**			**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Dinas Pangan dan Pertanian**		**6.157.489.602,00**	**Dinpaper**
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2854 Orang/bulan		756 Orang/bulan	756 Orang/bulan	754 Orang/bulan	6.685.345.882	6.406.468.292	6.126.470.627	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			6.157.489.602,00	Dinpaper
	2.09.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	***100 %***	**411.133.610**	**361.033.555**	**186.974.090**			**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Dinas Pangan dan Pertanian**		**392.000.000,00**	**Dinpaper**
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	16.000.000	16.000.000	9.570.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			16.000.000,00	Dinpaper
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	121.606.000	71.505.945	36.138.390	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			120.000.000,00	Dinpaper
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket	17.193.350	17.193.350	8.596.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			16.000.000,00	Dinpaper
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	256.334.260	256.334.260	132.669.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			240.000.000,00	Dinpaper
	2.09.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	***100 %***	**37.000.000**	**36.981.300**	**12.507.900**			**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Dinas Pangan dan Pertanian**		**104.842.892,00**	**Dinpaper**
	2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit		N/A Unit	0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	Dinpaper
	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		1 Unit	-	0 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			30.000.000,00	Dinpaper

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit		3 Unit	4 Unit	1 Unit	37.000.000	36.981.300	12.507.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			44.842.892,00	Dinpaper
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		1 Unit	-	0 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			30.000.000,00	Dinpaper
	2.09.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	***100 %***	**1.586.399.034**	**1.572.305.734**	**1.328.378.754**			**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Dinas Pangan dan Pertanian**		**604.624.000,00**	**Dinpaper**
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.000.000	4.003.700	3.535.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			4.000.000,00	Dinpaper
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	199.999.034	199.999.034	199.999.034	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			200.000.000,00	Dinpaper
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.382.400.000	1.368.303.000	1.124.843.920	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			400.624.000,00	Dinpaper
	2.09.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**471.724.000**	**421.053.155**	**375.012.055**			**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Dinas Pangan dan Pertanian**		**437.000.000,00**	**Dinpaper**
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	84 Unit		55 Unit	55 Unit	45 Unit	315.000.000	315.000.000	263.167.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			307.000.000,00	Dinpaper
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		5 Unit	5 Unit	5 Unit	45.000.000	45.000.000	40.791.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			45.000.000,00	Dinpaper
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit		3 Unit	7 Unit	2 Unit	111.724.000	61.053.155	71.053.155	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			80.000.000,00	Dinpaper
	2.09.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	2,5 Ha		3 Ha	0 Ha	0 Ha	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			5.000.000,00	Dinpaper
77	**2.09.03.**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**	**85,24 Angka**		**85,18 Angka**	***85,19 Angka***	***85,19 Angka***	**230.163.900**	**182.061.800**	**96.603.300**							**177.840.000,00**	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.01.	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Tingkat Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pokok di Tingkat kota**	**30 %**		**23,07 %**		***25 %***	**52.420.700**	**142.435.000**	**76.175.000**			**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Masyarakat**		**77.840.000,00**	**Dinpaper**
	2.09.03.2.01. 0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	28.435.000	142.435.000	76.175.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			50.000.000,00	Dinpaper
	2.09.03.2.01. 0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	Dinpaper
	2.09.03.2.01. 0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	18.486.200	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			5.200.000,00	Dinpaper
	2.09.03.2.01. 0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	5.499.500	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			22.640.000,00	Dinpaper
	2.09.03.2.02.	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah**	**18,112 Ton**		**15,612 Ton**	**11,126 ton**	***0 Ton***	**127.949.000**	**-**	**-**			**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Masyarakat**		**40.000.000,00**	**Dinpaper**
	2.09.03.2.02. 0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	85,56 Ton		15,612 Ton	11,126 Ton	0 Ton	127.949.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			40.000.000,00	Dinpaper
	2.09.03.2.04.	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Angka Kecukupan Energi (AKE)**	**1853.5 kkal/ kapita/ hari**		**1850,9 kkal/ kapita/ hari**	***1851 kkal/ kapita/ hari***	***1851 kkal/ kapita/ hari***	**49.794.200**	**39.626.800**	**20.428.300**			**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Masyarakat**		**60.000.000,00**	**Dinpaper**
			Angka Kecukupan Protein (AKP)	**57.46 gram/ kapita/ hari**		**57.40 gram/ kapita/ hari**	***57.05 gram/ kapita/ hari***	***57.41 gram/ kapita/ hari***											
	2.09.03.2.04. 0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5 Dokumen		N/A Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	4.560.200	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			10.000.000,00	Dinpaper
	2.09.03.2.04. 0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	45.234.000	39.626.800	20.428.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			50.000.000,00	Dinpaper

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
78	**2.09.05.**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan**	**56 %**		**50 %**		***51 %***	**27.488.200**	**27.488.200**	**-**							**30.000.000,00**	
	2.09.05.2.01.	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Laporan**		**1 Laporan**	**1 laporan**	***0 Laporan***	**27.488.200**	**27.488.200**	**-**			**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Masyarakat**		**30.000.000,00**	**Dinpaper**
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	27.488.200	27.488.200	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			30.000.000,00	Dinpaper
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**3.386.018.100**	**2.525.602.200**	**2.468.534.160**							**1.729.700.800,00**	
	3.25.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**496.938.400**	**412.798.400**	**390.145.900**							**592.178.800,00**	
79	**3.25.04.**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah produksi Perikanan Budidaya**	**4527 Ton/Tahun**		**751.03 Ton/Tahun**	**752 ton/tahun**	***752 Ton/Tahun***	**424.562.000**	**340.422.000**	**345.145.900**							**547.178.800,00**	
	3.25.04.2.04.	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah Pelaku Perikanan yang menerapkan teknologi perikanan**	**20 orang**		**20 orang**	**20 orang**	**20 orang**	**424.562.000**	**340.422.000**	**345.145.900**			**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Masyarakat, Pokdakan dan UPTD BBI**		**547.178.800,00**	**Dinpaper**
			Jumlah kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat Penyuluhan	**42 kelompok**		**NA kelompok**	***7 kelompok***	***7 kelompok***											
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	389.664.000	305.524.000	320.145.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			511.678.800,00	Dinpaper
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	34.898.000	34.898.000	25.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			35.500.000,00	Dinpaper
80	**3.25.06.**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Angka Konsumsi Ikan**	**42,92 Kg/kapita/th**		**41,98 Kg/kapita/th**	***42,16 Kg/kapita/th***	***42,16 Kg/kapita/th***	**72.376.400**	**72.376.400**	**45.000.000**							**45.000.000,00**	
	3.25.06.2.01.	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi**	**2 Kali**		**2 Kali**	**2 kali**	***1 Kali***	**72.376.400**	**72.376.400**	**45.000.000**			**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Kelompok Masyarakat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**		**45.000.000,00**	**Dinpaper**
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	72.376.400	72.376.400	45.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			45.000.000,00	Dinpaper
	3.27.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**2.889.079.700**	**2.112.803.800**	**2.078.388.260**							**1.137.522.000,00**	
81	**3.27.02.**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Peningkatan Produksi Tanaman Pangan**	**100 %**		**77 %**	**80 %**	***80 %***	**2.348.592.350**	**1.701.848.450**	**1.595.137.880**							**402.854.000,00**	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	**100 %**		**75 %**	***80 %***	***80 %***											
	3.27.02.2.01.	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia**	**2 Jenis**		**2 Jenis**	**2 jenis**	***2 Jenis***	**641.609.200**	**403.025.000**	**373.895.000**			**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Kelompok Tani dan Mayarakat**		**20.000.000,00**	**Dinpaper**
	3.27.02.2.01. 0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	641.609.200	403.025.000	373.895.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			20.000.000,00	Dinpaper
	3.27.02.2.02.	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Produksi Tanaman Hias**	**497070 Tangkai**		**73039 Tangkai**	***82055 Tangkai***	***82055 Tangkai***	**13.600.000**	**123.600.000**	**57.875.000**			**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Kelompok Tani**		**100.000.000,00**	**Dinpaper**
			Produksi Padi	**51289.4 Ton**		**7444.3 Ton**	***8534.4 Ton***	***8534.4 Ton***											
			Kelompok Tani Pembudidaya Pertanian Organik	**2 Kelompok**		**2 Kelompok**	***2 Kelompok***	***2 Kelompok***											
	3.27.02.2.02. 0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13.600.000	123.600.000	57.875.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			100.000.000,00	Dinpaper
	3.27.02.2.03.	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan**	**7 Ekor**		**8 Ekor**		***7 Ekor***	**167.883.300**	**167.883.300**	**167.777.730**			**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**UPTD PUSKESWAN**		**262.854.000,00**	**Dinpaper**
	3.27.02.2.03. 0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	167.883.300	167.883.300	167.777.730	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			262.854.000,00	Dinpaper
	3.27.02.2.06.	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Jumlah KK Miskin yang Dibantu**	**63 KK**		**59 KK**	**2 kk**	***35 KK***	**1.525.499.850**	**1.007.340.150**	**995.590.150**			**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Masyarakat**		**20.000.000,00**	**Dinpaper**
	3.27.02.2.06. 0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	107 Ekor		485 Ekor	2 Ekor	79 Ekor	1.525.499.850	1.007.340.150	995.590.150	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			20.000.000,00	Dinpaper
82	**3.27.03.**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Cakupan Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B**	**100 %**		**75 %**	**80 %**	***80 %***	**211.912.400**	**99.142.400**	**69.549.780**							**181.700.000,00**	
	3.27.03.2.02.	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani**	**1 Unit**		**N/A Unit**	**1 unit**	***1 Unit***	**180.375.000**	**67.605.000**	**47.473.600**			**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Kelompok Tani, UPTD RPH**		**167.700.000,00**	**Dinpaper**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	**1 Unit**		**N/A Unit**	***1 Unit***	***1 Unit***											
			Jumlah Prasarana Peternakan Yang Disediakan	**1 Unit**		**1 Unit**	***2 Unit***	***2 Unit***											
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit		N/A Unit	1 Unit	1 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			20.000.000,00	Dinpaper
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	110.375.000	30.805.000	19.073.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			97.700.000,00	Dinpaper
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	6 Unit		N/A Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000	16.800.000	8.400.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			50.000.000,00	Dinpaper
	3.27.03.2.03.	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB**	**177 Ekor**		**127 Ekor**	**41 ekor**	***25 Ekor***	**31.537.400**	**31.537.400**	**22.076.180**			**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Peternak dan Masyarakat**		**14.000.000,00**	**Dinpaper**
	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	31.537.400	31.537.400	22.076.180	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			14.000.000,00	Dinpaper
83	**3.27.04.**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**	**13.64 %**		**11 %**	**9,0 %**	***11,11 %***	**162.795.800**	**162.795.800**	**105.143.200**							**427.884.000,00**	
	3.27.04.2.01.	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Medis Veteriner**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	***100 % %***	**128.485.800**	**128.485.800**	**96.944.200**			**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Masyarakat**		**241.984.000,00**	**Dinpaper**
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8.485.800	8.485.800	1.975.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			121.984.000,00	Dinpaper
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000	120.000.000	94.968.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			120.000.000,00	Dinpaper

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.04.2.03.	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	***0 %***	**-**	**-**	**-**			**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Masyarakat**		**61.900.000,00**	**Dinpaper**
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			61.900.000,00	Dinpaper
	3.27.04.2.04.	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Jumlah Livestock Expo yang Diikuti**	**5 Kali**		**N/A Kali**		***0 Kali***	**34.310.000**	**34.310.000**	**8.199.000**			**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Kelompok Peternak**		**124.000.000,00**	**Dinpaper**
			Jumlah Sertifikasi Produk Peternakan/ Olahan	**6 Sertifikat**		**1 Sertifikat**		***1 Sertifikat***											
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan Laporan	11.310.000	11.310.000	8.199.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			100.000.000,00	Dinpaper
	3.27.04.2.04.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	4 Unit Usaha		0 Unit Usaha	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha Unit Usaha	23.000.000	23.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			24.000.000,00	Dinpaper
84	**3.27.05.**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Penanganan Bencana Pertanian**	**87 %**		**75 %**	**80 %**	***80 %***	**16.762.000**	**10.000.000**	**7.600.000**							**25.084.000,00**	
	3.27.05.2.01.	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)**	**147 Ha**		**41,98 Ha**	**147 ha**	***147 Ha***	**16.762.000**	**10.000.000**	**7.600.000**			**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Kelompok Tani**		**25.084.000,00**	**Dinpaper**
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	65 Ha		10 Ha	10 Ha	0 Ha	6.762.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			15.084.000,00	Dinpaper
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	7.600.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			10.000.000,00	Dinpaper
85	**3.27.07.**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan**	**100 %**		**100 %**	**27,6 %**	***100 %***	**149.017.150**	**139.017.150**	**300.957.400**							**100.000.000,00**	
			Jumlah Kelembagaan Tani yang ditingkatkan kapasitasnya	**9 Kelompok**		**5 Kelompok**		***9 Kelompok***											
	3.27.07.2.01.	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan**	**20 Kelompok Tani**		**20 Kelompok Tani**	**20 keltan**	***20 Kelompok Tani***	**149.017.150**	**139.017.150**	**300.957.400**			**Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Penyuluh**		**100.000.000,00**	**Dinpaper**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	31.001.000	31.001.000	8.587.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			50.000.000,00	Dinpaper
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	21 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	118.016.150	108.016.150	233.090.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			50.000.000,00	Dinpaper
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	94 Orang		0 Orang	-	13 Orang	-	-	59.280.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	Dinpaper

Berdasarkan tabel di atas, Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025 mencakup 3 (tiga) urusan bidang, yaitu Urusan Pangan, Urusan Kelautan dan Perikanan, serta Urusan Pertanian. Urusan Pangan terdiri atas 2 (dua) program, 7 (tujuh) kegiatan, dan 15 (lima belas) subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.125.946.726,00. Selanjutnya, Urusan Kelautan dan Perikanan mencakup 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan, dan 3 (tiga) subkegiatan dengan anggaran sebesar Rp390.145.900,00. Adapun Urusan Pertanian terdiri atas 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 17 (tujuh belas) subkegiatan dengan total anggaran sebesar Rp2.078.386.260,00.

Dengan demikian, kebutuhan dana atau pagu indikatif Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebesar Rp10.594.480.886,00, sedangkan prakiraan maju kebutuhan dana atau pagu indikatif untuk Tahun 2026 sebesar Rp8.394.979.977,00. Selain itu, Perubahan Renja ini juga mengakomodasi prioritas nasional yang selaras dan mendukung pembangunan daerah Kota Padang Panjang.

Pada Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025, prioritas nasional yang diadopsi adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sementara itu, prioritas daerah difokuskan pada upaya peningkatan nilai tambah dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta peningkatan produktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan daerah. Adapun sektor unggulan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pangan dan Pertanian meliputi sektor ketahanan pangan, sektor pertanian, dan sektor perikanan.

Perubahan Rencana Kerja tersebut disusun dengan tetap memperhatikan keselarasan antara prioritas pembangunan nasional dan arah kebijakan Pemerintah Daerah. Penyesuaian program dan kegiatan difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan, peningkatan produktivitas pertanian, serta penguatan ekonomi masyarakat, sehingga mampu berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian target RPJMN, RPJPD, dan prioritas pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program yang menjadi acuan dalam pelaksanaan semua kegiatan yang mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program pada Dinas Pangan dan Pertanian dan instansi terkait lainnya, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada Perangkat daerah Kota Padang Panjang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Selain itu Perubahan Renja Tahun 2025 telah secara penuh menerapkan klasifikasi dan nomenklatur baru sesuai ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja ini, baik proses maupun hasilnya masih jauh dari sempurna. Sehingga sebagimana pengalaman tahun-tahun sebelumnya akan terjadi penyempurnaan terhadap Perubahan Renja ini, terutama dalam rumusan program dan kegiatan. Namun demikian meskipun nanti ada kegiatan yang tidak diakomodir sepenuhnya dalam APBD karena keterbatasan anggaran atau penyebab lainnya, kami berharap agar esensi kegiatan tersebut tetap ada meskipun digabung dengan kegiatan lainnya.

Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025 dalam Pelaksanaan mengacu kepada mekanisme pelaksanaan rencana pembangunan serta mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Padang Panjang, Juni 2025

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang

Ade Nafrita Anas, S.P., MP
NIP. 19710520 199903 2 004

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang……	1
	1.2 Landasan Hukum……...	1
	1.3 Maksud dan Tujuan……	4
	1.4 Sistematika Penulisan……...	4
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DN PENCATATAN SIPIL s.d. TRIWULAN I TAHUN 2025	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja s.d. Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra……...	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....……..	15
	2.3 Isu-isu Penting Peenyelenggaraan Tugas dan Fungsi……	17
	2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025……	18
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	24
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional……	24
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....……..	25
	3.3 Program dan Kegiatan……..	26
BAB IV	PENUTUP	39

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2025……	7
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil …….	16
Tabel 2.3	Pemetaan Permasalahan…….	17
Tabel 2.4	Review Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang…….	19
Tabel 3.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat……	25
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029……..	26
Tabel 3.3	Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2025 Kota Padang Panjang……..……...	29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang merupakan dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang selama satu tahun. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dan RKPD Kota Padang Panjang. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangann Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap OPD dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan dengan merujuk pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan Renja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian rencana kerja dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah serta kebijakan nasional maupun provinsi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesi Nomor 6975);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1)
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024;
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024;

20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025.
22. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana Perubahan Kegiatan dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025;
2. Menjalin integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program kegiatan agar selaras dengan program tahunan daerah;
3. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan orgranisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta perubahan teknis lainnya seperti penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran sub kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL s.d. TRIWULAN I TAHUN 2025
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja s.d. Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
2.4 Review Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL s.d. TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja s.d. Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. Rencana Kerja juga merupakan alat ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiata yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025, sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II		III		IV								
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																						**Dinas Dukcapil**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang Dipenuhi**	**100%**	**8.936.025.569**	**100%**	**3.480.541.758**	**100%**	**3.137.818.511**	**30%**	**653.593.142**							**30%**	**663.127.142**	**65%**	**4.143.668.900**	**65,00%**	**46,37%**	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**6.883.150.569**	**100%**	**2.584.765.405**	**100%**	**2.337.287.819**	**30%**	**597.520.521**							**30%**	**597.520.521**	**65%**	**3.182.285.926**	**65,00%**	**46,23%**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	862 orang/ bulan	6.883.150.569	294 orang/ bulan	2.584.765.405	294 orang/ bulan	2.337.287.819	294 orang/ bulan	597.520.521							294 orang/ bulan	597.520.521	294 orang/ bulan	3.182.285.926	34,11%	46,23%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II		III		IV								
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**100%**	**10.500.000**	**100%**	**8.500.000**	**0%**	**000**	**0%**	**000**	**100%**	**8.500.000**	**0 %**	**0**	**0 %**	**0**	**100%**	**8.500.000**	**100%**	**8.500.000**	**100,00%**	**80,95%**	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	21 paket	10.500.000	17 Paket	8.500.000	0 Paket	000	0 Paket	000	0 Paket	0		0	0	0	0 Paket	8.500.000	17 Paket	8.500.000	80,95%	80,95%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**456.109.800**	**100%**	**240.627.202**	**100%**	**220.099.180**		**22.858.602**							**0%**	**22.858.602**	**100%**	**263.485.804**	**100,00%**	**57,77%**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	21.162.000	10 Paket	1.295.000	4 Paket	3.522.700	4 Paket	000							4 Paket	000	14 Paket	1.295.000	116,67%	6,12%	
Penyedian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	48.072.000	2 Paket	20.042.450	4 Paket	27.685.980	4 Paket	620.000							2 Paket	620.000	4 Paket	20.662.450 -	33,33%	42,98%	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	65.975.800	2 Paket	6.273.000	12 Paket	9.995.500	12 Paket	000							12 Paket	000	14 Paket	6.273.000	38,89%	9,51%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	320.900.000	24 Laporan	213.016.752	24 Laporan	178.895.000	6 Laporan	22.238.602							6 Laporan	22.238.602	30 Laporan	235.255.354	41,67%	73,31%	
Pengadaan Barang Milik Daerah	**Persentase Pemenuhan**	**100%**	**120.000.000**	**100%**	**198.866.400**	**100%**	**24.109.800**	**50%**	**000**							**50%**	**000**	**75%**	**198.866.400**	**75,00%**	**165,72%**	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II		III		IV								
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan**																					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	120.000.000	13 Unit	198.866.400	2 Unit	24.109.800	0 Unit	000							0 Unit	000	13 Unit	- 198.866.400	185,71%	0,00%	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah**	**100%**	**745.203.200**	**100%**	**183.471.855**	**100%**	**236.393.712**	**20%**	**33.214.019**							**20%**	**33.214.019**	**60,00 %**	**216.685.874**	**60,00%**	**29,08%**	
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	144 Laporan	286.368.000	36 Laporan	27.043.589	48 Laporan	54.333.712	12 Laporan	6.384.019							12 Laporan	6.384.019	48 Laporan	33.427.608 -	33,33%	11,67%	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	458.835.200	6 Laporan	156.428.266	12 Laporan	182.060.000	12 Laporan	26.830.000							12 Laporan	26.830.000 000	18 Laporan	183.258.266 -	50,00%	39,94%	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**721.062.000**	**100%**	**264.310.896**	**100%**	**319.928.000**	**25%**								**25%**	**9.534.000**	**63%**	**273.844.896**	**63%**	**37,98%**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit	361.062.000	9 Unit	198.116.296	9 Unit	243.030.000	9 Unit	8.834.000							9 Unit	8.834.000	18 Unit	206.950.296	66,67%	57,32%	
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	180.000.000	19 Unit	5.125.000	17 Unit	27.030.000	3 Unit	700.000							3 Unit	700.000	22 Unit	5.825.000	43,14%	3,24%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II		III		IV					-			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	180.000.000	1 Unit	61.069.600	1 Unit	49.868.000	0 Unit	000							0 Unit	000	1 Unit	61.069.600	33,33%	33,93%	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**100,00 %**	**1.744.507.300**	**100%**	**156.675.700**	**100%**	**458.864.100**	**25%**								**25%**	**21.001.600**	**63%**	**177.677.300**	**62,50%**	**10,18%**	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Persentase Penduduk yang Terlayani terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**100,00 %**	**516.303.300**	**100%**	**57.819.700**	**99%**	**54.744.000**	**25%**								**25%**	**000**	**63%**	**57.819.700**	**62,50%**	**11,20%**	
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan , Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4500 Dokumen	20.700.000	0 Dokumen	000	4.500 Dokumen	10.352.000	1383 Dokumen	000									0 Dokumen	000	0,00%	0,00%	
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	39 Laporan	485.253.300	9 Laporan	25.608.100	13 Laporan	44.392.000	3 Laporan	000							3 Laporan	-	12 Laporan	25.608.100	30,77%	5,28%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II		III		IV								
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	9000 Dokumen	10.350.000	4500 Dokumen	32.211.600	0 Dokumen	000	0 Dokumen	000	0 Dokumen	000	0	0	0	0	0 Dokumen	-	4500 Dokumen	32.211.600	50,00%	311,22%	
Penataan Pendaftaran Penduduk	**Persentase pendaftaran penduduk yang terlaksana**	**100%**	**977.070.000**	**100%**	**79.850.000**	**100%**	**236.213.100**	**50%**	**000**							**50%**	**-**	**75%**	**79.850.000**	**75,00%**	**8,17%**	
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaa, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	**2** Dokumen	240.000.000			1 Dokumen	42.166.700	1 Dokumen	0								-					
Pengadaan Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan Selain Blangko KTP-El, Formulir dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	30.000 Dokumen	737.070.000	5500 Dokumen	79.850.000	10000 Dokumen	194.046.400	0 Dokumen	0							- Dokumen	-	5500 Dokumen	79.850.000	18,33%	10,83%	
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah jenis Penyelenggaraan Pendaftaran**	**1 jenis**	**251.134.000**	**1 Jenis**	**19.006.000**	**1 Jenis**	**167.907.000**	**1 Jenis**	**21.001.600**							**1 Jenis**	**21.001.600**	**2 Jenis**	**40.007.600**	**200,00%**	**15,93%**	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II		III		IV								
	Penduduk																					
Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	3 Laporan	251.134.000	1 Laporan	19.006.000	1 Laporan	167.907.000	1 Laporan	21.001.600							1 Laporan	21.001.600	2 Laporan	40.007.600	66,67%	15,93%	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil 0-18 Tahun**	**100%**	**469.064.300**	**100,00 %**	**119.053.904**	**100%**	**139.668.050**	**25%**	**17.600.000**							**25%**	**17.600.000**	**113%**	**136.653.904**	**112,50%**	**29,13%**	
Pelayanan Pencatatan Sipil	**Jumlah Kepemilikan Akta kelahiran Usia 0-18 Tahun**	**6.000 Akta**	**469.064.300**	**2011 Akta**	**119.053.904**	**2000 Akta**	**139.668.050**	**429 Akta**	**17.600.000**							**429 Akta**	**17.600.000**	**2440**	**136.653.904**	40,67%	29,13%	
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6000 Layanan	469.064.300	2011 Layanan	119.053.904	2000 Layanan	139.668.050	429 Layanan	17.600.000							429 Layanan	17.600.000	2.440 Layanan	136.653.904	40,67%	29,13%	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100%**	**590.122.500**	**100%**	**141.480.374**	**100%**	**179.752.500**	**25%**	**2.334.150**							**25%**	**18.794.100**	**112,50 %**	**160.274.474**	**112,50%**	**27,16%**	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Informasi Admnistrasi Kependudukan**	**36 Laporan**	**489.880.000**	**12 Laporan**	**141.480.374**	**12 Laporan**	**143.005.100**	**3 Laporan**	**2.334.150**							**3 Laporan**	**18.794.100**	15 **Laporan**	**160.274.474**	**41,67%**	**32,72%**	
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	36 Laporan	94.000.000	12 Laporan	20.090.200	12 Laporan	31.989.900	3 Laporan	2.334.150							3 Laporan	2.334.150	15 Laporan	22.424.350	41,67%	23,86%	
Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen	10	60.000.000	1	1.228.500	0	000	0	000	0	000	0	0	0	0	0	000	1	1.228.500	10,00%	2,05%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II		III		IV								
Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dokumen		Dokumen	-			
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 Laporan	60.000.000	0 Laporan	000	1 Laporan	20.027.600 Laporan	0 Laporan	000							0 Laporan		0 Laporan	000	0,00%	0,00%	
Komunikasi,Informasi ,dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	15 Laporan	275.880.000	5 Laporan	120.161.674	5 Laporan	90.987.600	1 Laporan	16.459.950							1 Laporan	16.459.950	6 Laporan	136.621.624	40,00%	49,52%	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan**	**3 Laporan**	**100.242.500**		**000**	**1 Laporan**	**36.747.400**	**1 Laporan**	**000**													
Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	3 Laporan	100.242.500	0 Laporan	000	1 Laporan	36.747.400	0 Laporan	000									0 Laporan	000	0,00%	0,00%	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (outcome) /Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Priode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1) 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun) yang dievaluasi 2025		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								I		II		III		IV								
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Jumlah Dokumen Profil dan Agrerat Kependudukan**	**9 Dokumen**	**75.000.000**	**3 Dokumen**	**15.191.300**	**3 Dokumen**	**24.967.000**	**2 Dokumen**	**718.200**							2 Dokumen	**718.200**	**5 Dokumen**	**15.909.500**	**55,56%**	**21,21%**	
Penyusunan Profil Kependudukan	**Jumlah Dokumen Profil Kependudukan dan Agregat Kependudukan**	**9 Dokumen**	**75.000.000**	**3 Dokumen**	**15.191.300**	**3 Dokumen**	**24.967.000**	**2 Dokumen**	**718.200**							**2 Dokumen**	**718.200**	**5 Buku**	**15.909.500**	55,56%	21,21%	
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	9 Dokumen	75.000.000	3 Dokumen	15.191.300	3 Dokumen	24.967.000	2 Dokumen	718.200							2 Dokumen	718.200	5 Dokumen	718.200	55,56%	0,96%	
TOTAL			**11.814.719.669**		**3.912.943.036**		**3.941.070.161**		**674.245.492**		**000**		**0**		**0**		**721.241.042**		**4.634.184.078**		**39,22%**	

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
dari Anggaran sebesar Rp.3.941.070.161,- telah terealisasi sebanyak Rp. 721.241.042 ,- atau sebesar 26,23 persen.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang konkrit dalam upaya percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2025, antara lain sebagai berikut :

1. Perlunya percepatan pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa serta optimalisasi koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait agar dapat mengejar keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga sesuai dengan target perencanaan untuk menghasilkan output dan outcome yang berkualitas.
2. Melakukan pergeseran/penyesuian beberapa rekening belanja dan analisa target capaian yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. Mengurangi sub kegiatan agar dapat mendukung sasaran program lainya dengan tetap merujuk pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang 2025-2029.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan target kinerja yang ada pada Renstra, Renja, Indikator Kinerja Kunci dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal. Idealnya, kinerja pelayanan yang ditampilkan pada Perubahan Renja ini adalah kinerja pelayanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, bahwa capaian kinerja fisik secara umum sudah terlaksana.

Capaian indikator kinerja kunci (IKK) urusan administrasi kependudukan yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Padang Panjang

No	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi	Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	Perekaman KTP elektronik		IKK	99,40	99,51	99,52	99,50	99,51	99,52	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		IKK	60,00	99,19	99,20	99,18	99,19	99,20	
3	Kepemilikan akta kelahiran		IKK	99,00	99,92	99,93	101,65	99,92	99,93	
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		IKK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Penyelenggaran Urusan Pemerinatahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disadari bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Adapun Penyelenggaran Urusan Pemerinatahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi aspek fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan serta pengolahan informasi administrasi kependudukan dan pemanfataan data.Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas dan kewenangan sebagai penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, sistem informasi dan administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, sanksi administratif dan sanksi pidana terkait administrasi kependudukan.

Belum terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

Tabel 2.3

Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket.
1.	Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat	Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan.	Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui informasi dan prosedur yang jelas tentang administrasi kependudukan dan manfaatnya dalam kehidupan sosial bermasyarakat.	

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket.
2.	Perbedaan Persepsi dan Aturan dalam Administrasi Kependudukan antara Organisasi Perangkat Daerah	Kurangnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah tentang Administrasi Kependudukan	Masih kurangnya pengetahuan Operator pada Organisasi Perangkat Daerah Lainnya tentang Pemanfaatan Data Kependudukan.	

Secara umum isu utama sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan review penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama periode sebelumnya, serta berdasarkan permasalahan dan hambatan yang ada, dapat diidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara massif.
b. Belum optimalnya peran Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam mendukung percepatan transpformasi digital untuk pelayanan publik dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
c. Masih lemahnya regulasi dan peningkatan kompetensi Aparatur Dukcapil yang menguasai talenta, budaya dan literasi digital.
d. Anggaran APBD yang sangat terbatas, sedangkan dukungan APBN untuk layanan Adminduk di provinsi maupun kabupaten tidak ada lagi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Tabel 2.4
Review Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang

No	Reviu Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	***13=11-6***	*12*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**3.210.784.031**					**3.185.557.251**		
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**	**100 %**	**2.795.534.191**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**	**100 %**	**2.783.640.591**		
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**2.172.556.062**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**2.240.646.462**		
2.12.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/ bulan	2.172.556.062	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/ bulan	2.240.646.462		
2.12.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**0 %**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**0 %**	**0**		
2.12.01.2.05 .0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0		
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**112.395.705**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**112.395.705**		
2.12.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.114.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.114.200		
2.12.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	15.991.305	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	15.991.305		

No	Reviu Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
2.12.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.167.700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.167.700		
2.12.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	90.122.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	90.122.500		
2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100 %**	**5.564.900**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100 %**	**5.564.900**		
2.12.01.2.07 .0002	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.564.900	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.564.900		
2.12.01.2.07 .0005	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**223.521.524**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi**	**100 %**	**223.521.524**		
2.12.01.2.07 .0006	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	41.461.524	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	41.461.524		
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	182.060.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	182.060.000		
2.12.01.2.08 .0001	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik**	**100 %**	**281.496.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik**	**100 %**	**201.512.000**		
2.12.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	204.598.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	141.540.000		
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	27.030.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	27.030.000		
2.12.01.2.09 .0001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.868.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	32.942.000		

No	Reviu Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Kota Padang Panjang	**Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital**	**34 %**	**200.474.680**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Kota Padang Panjang	**Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital**	**34 %**	**195.078.840**		
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	**62 %**				**Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak**	**62 %**			
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Kota Padang Panjang	**Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk**	**100 %**	**6.218.840**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Kota Padang Panjang	**Persentase penduduk yang terlayani terhadap dokumen pendaftaran penduduk**	**100 %**	**15.773.720**		
2.12.02.2.01 .0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	13 Laporan	5.430.000	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	13 Laporan	15.012.000		
2.12.02.2.01 .0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4500 Dokumen	788.840	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4500 Dokumen	761.720		
2.12.02.2.01 .0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0 Dokumen	0	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0 Dokumen	0		
2.12.02.2.02	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	Kota Padang Panjang	**Persentase pendaftaran penduduk yang terlaksana**	**100 %**	**161.055.640**	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	Kota Padang Panjang	**Persentase pendaftaran penduduk yang terlaksana**	**100 %**	**147.754.920**		
2.12.02.2.02 .0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen	5.564.900	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen	5.564.900		
2.12.02.2.02 .0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	6000 Dokumen	155.490.740	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	6000 Dokumen	142.190.020		

No	Reviu Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
								yang Tersedia				
2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Kota Padang Panjang	**Jumlah jenis penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**1 Jenis**	**33.200.200**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Kota Padang Panjang	**Jumlah jenis penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**1 Jenis**	**31.550.200**		
2.12.02.2.03 .0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	33.200.200	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	31.550.200		
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Kota Padang Panjang	**Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal**	**100 %**	**101.779.310**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Kota Padang Panjang	**Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal**	**100 %**	**98.276.970**		
			Presentase anak berusia 0 - 4 Tahun yang memiliki akta kelahiran	**92 %**				**Presentase anak berusia 0 - 4 Tahun yang memiliki akta kelahiran**	**92 %**			
			Persentase Penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	**100 %**				**Persentase Penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah**	**100 %**			
			Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai	**100 %**				**Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai**	**100 %**			
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Kota Padang Panjang	**Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 Tahun**	**1300 Akta**	**101.779.310**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Kota Padang Panjang	**Jumlah kepemilikan akte kelahiran usia 0-18 Tahun**	**1300 Akta**	**98.276.970**		
2.12.03.2.01 .0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Padang Panjang	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1300 Layanan	101.779.310	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Padang Panjang	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1300 Layanan	98.276.970		
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Kota Padang Panjang	**Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan**	**100 Persen**	**103.014.850**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Kota Padang Panjang	**Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan**	**100 Persen**	**98.579.850**		
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Kota Padang Panjang	**Jumlah laporan penyelenggaran informasi administrasi kependudukan**	**12 Laporan**	**103.014.850**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Kota Padang Panjang	**Jumlah laporan penyelenggaran informasi administrasi kependudukan**	**12 Laporan**	**98.579.850**		

No	Reviu Perubahan RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
2.12.04.2.03 .0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	25.152.000	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	20.717.000		
2.12.04.2.03 .0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	0 Dokumen	0	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	0 Dokumen	0		
2.12.04.2.03 .0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	9.336.000	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	9.336.000		
2.12.04.2.03 .0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5 Laporan	68.526.850	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	5 Laporan	68.526.850		
2.12.04.2.04	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Kota Padang Panjang	**Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan**	**0 Laporan**	**0**	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Kota Padang Panjang	**Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan**	**0 Laporan**	**0**		
2.12.04.2.04 .0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0 Laporan	0	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0 Laporan	0		
2.12.05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Kota Padang Panjang	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan**	**100%**	**9.981.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Kota Padang Panjang	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan**	**100%**	**9.981.000**		
2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**	Kota Padang Panjang	**Jumlah dokumen profil dan aggregat kependudukan**	**3 Dokumen**	**9.981.000**	**Penyusunan Profil Kependudukan**	Kota Padang Panjang	**Jumlah dokumen profil dan aggregat kependudukan**	**3 Dokumen**	**9.981.000**		
2.12.05.2.01 .0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	9.981.000	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	9.981.000		

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG PANJANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Merujuk pada Bab I, ayat 49 dan 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri menyatakan yang dimaksud dengan **Tujuan** dalam kerangka perencanaan pemerintahan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Perumusan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentu harus menunjang rencana pembangunan daerah yang dirumuskan melalui visi - misi pembangunan daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Adapun isi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029:

"SUMATERA BARAT YANG MAJU DAN BERKEADILAN"

Penjabaran dari visi pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam 8 (delapan) misi pembangunan Provinsi Sumatera Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan. Misi ini menjadi penjabaran operasional dari visi yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan daerah, sekaligus menangkap peluang dan potensi strategis yang dimiliki Sumatera Barat.

Berdasarkan misi pembangunan tersebut yang telah dirumuskan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak menjadi urusan yang langsung mendukung salah satu misi. Namun demikian, substansi pengelolaan dan/atau pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berupa pemberian layanan pemerintahan kepada penerima manfaat layanan publik. Oleh karena itu urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melekat pada Misi ke 8 (delapan) dari delapan misi pembangunan tahun 2025-2029, yakni:

"Tata Kelola Pemerintah Bersih
dan Pelayanan Publik yang Efektif"

Tabel 3.1

Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 8 RPJMD 2025-2029: Tata Kelola Pemerintah Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif elayanan Publik yang Efektif	Tujuan 1: Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	1.1 Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan untuk semua kebutuhan
		1.2 Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang lengkap
		1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
		1.4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang berkaitan langsung dengan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah pada Prioritas Nasional 04 dan Prioritas Nasional 07.

Secara eksplisit, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada RPJMN 2025-2029 adalah:

1) Kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-4 tahun;
2) Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP; dan
3) Pemutakhiran data kependudukan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang yaitu **PADANG PANJANG, KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH**. dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk dalam Misi ke-III yakni ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Akuntabel, Profesional, Transparan dan Inovatif.***

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Padang Panjang dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu

5 (lima) tahun mendatang, untuk tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
				Renstra 2025	Perubahan Renja 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif		Indeks Pelayanan Publik	4,20	4,20
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	98,82	98,82
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Pemerintahan dan Masyarakat	Persentase Pemanfaatan dan Ketersediaan Data Kependudukan yang Akurat dan Informatif	100	100
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72,28	72,28

Sumber: RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Padang Panjang

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

2. Penetapan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029
3. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah 5 (lima) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Subkegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      2) Pemeliharaan Peralatan MesinI Lainnya
      3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pendaftaran Penduduk
   a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
      1) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
      2) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
   b. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
      1) Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan,

Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil

2) Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, FOrmulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan.

c. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

1) Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

3. Program Pencatatan Sipil

a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

1) Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

1) Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2) Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3) Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat

5. Program Pengelolaa Profil Kependudukan

a. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

1) Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota

Program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025
KOTA PADANG PANJANG

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**4,243,575,676**	**3,941,070,161**	**3,210,784,031**							**4.597.398.443,00**	
	2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4,243,575,676**	**3,941,070,161**	**3,210,784,031**							**4.597.398.443,00**	
	2.12.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**4,243,575,676**	**3,941,070,161**	**3,210,784,031**							**4.597.398.443,00**	
86	**2.12.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3,389,789,226**	**3,137,818,511**	**2,795,534,191**							**3.677.398.443,00**	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2,578,761,374**	**2,337,287,819**	**2,172,556,062**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**2.707.699.443,00**	**Disdukcapil**
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1414 Orang/Bulan		294 Orang/Bulan	294 Orang/bulan	294 Orang/Bulan	2,578,761,374	2,337,287,819	2,172,556,062	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			2.707.699.443,00	Disdukcapil
	2.12.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**220,102,400**	**220,099,180**	**112,395,705**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**254.699.000,00**	**Disdukcapil**
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		10 Paket	4 Paket	1 Paket	3,523,100	3,522,700	2,114,200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			3.699.000,00	Disdukcapil
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 Paket		2 Paket	4 Paket	9 Paket	27,686,300	27,685,980	15,991,305	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan			29.000.000,00	Disdukcapil

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Kolaboratif				
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		2 Paket	12 Paket	1 Paket	9,998,000	9,995,500	4,167,700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			12.000.000,00	Disdukcapil
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	178,895,000	178,895,000	90,122,500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			210.000.000,00	Disdukcapil
	2.12.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 %**	**100 Persen**	**25,122,512**	**24,109,800**	**5,564,900**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**100.000.000,00**	**Disdukcapil**
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit		13 Unit	2 Unit	1 Unit	25,122,512	24,109,800	5,564,900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			100.000.000,00	Disdukcapil
	2.12.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**245,712,940**	**236,393,712**	**223,521,524**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal,**	**-**		**257.000.000,00**	**Disdukcapil**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Adaptif dan Kolaboratif				
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan		36 Laporan	48 Laporan	36 Laporan	54,333,740	54,333,712	41,461,524	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			60.000.000,00	Disdukcapil
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	5 Laporan	191,379,200	182,060,000	182,060,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			197.000.000,00	Disdukcapil
	2.12.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**320,090,000**	**319,928,000**	**281,496,000**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**358.000.000,00**	**Disdukcapil**
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit		9 Unit	9 Unit	9 Unit	243,030,000	243,030,000	204,598,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			253.000.000,00	Disdukcapil
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit		19 Unit	17 Unit	17 Unit	27,060,000	27,030,000	27,030,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis			35.000.000,00	Disdukcapil

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												Kel/Desa			Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	50,000,000	49,868,000	49,868,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			70.000.000,00	Disdukcapil
87	**2.12.02.**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital**	**54 Persen**		**30,93 Persen**	**34 Persen**	**34 Persen**	**489,419,400**	**458,864,100**	**200,474,680**							**530.000.000,00**	
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	**97,5 Persen**		**96,99 Persen**	**97 Persen**	**97 Persen**											
	2.12.02.2.01.	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Penduduk yang Terlayani terhadap Dokumen Pendaftaran Penduduk**	**100 Persen**		**100 Persen**	**99 Persen**	**100 Persen**	**54,744,000**	**54,744,000**	**6,218,840**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**65.000.000,00**	**Disdukcapil**
			Perekaman KTP Elektronik	**99,7 Persen**		**99,14 Persen**		**99,2 Persen**											
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	4500 Dokumen		0 Dokumen	4500 Dokumen	4500 Dokumen	10,352,000	10,352,000	788,840	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			15.000.000,00	Disdukcapil
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan	78 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	44,392,000	44,392,000	5,430,000	Kota Padang Panjang,	PENDAPATAN ASLI	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah			50.000.000,00	Disdukcapil

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)		yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				
	2.12.02.2.02.	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Pendaftaran Penduduk yang terlaksana**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**266,768,400**	**236,213,100**	**161,055,640**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**290.000.000,00**	**Disdukcapil**
	2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	6 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	72,722,000	42,166,700	5,564,900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			80.000.000,00	Disdukcapil
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	26000 Laporan		5500 Laporan	10000 Dokumen	6000 Laporan	194,046,400	194,046,400	155,490,740	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			210.000.000,00	Disdukcapil
	2.12.02.2.03.	**Penyelenggaraan**	**Jumlah Jenis Penyelengga**	**6 Jenis**		**1 Jenis**	**1 jenis**	**1 Jenis**	**167,907,000**	**167,907,000**	**33,200,200**			**-**	**Meningkatkan kinerja**	**-**		**175.000.000,00**	**Disdukcapil**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Pendaftaran Penduduk	**raan Pendaftaran Penduduk**												**penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**				
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	167,907,000	167,907,000	33,200,200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			175.000.000,00	Disdukcapil
88	**2.12.03.**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**139,668,050**	**139,668,050**	**101,779,310**							**145.000.000,00**	
			Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	**100 Persen**		**91,8 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**											
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**											
			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**											
	2.12.03.2.01.	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jumlah Kepemilikan Akte**	**7800 Akta**		**2000 Akta**	**2000 akta**	**1300 Akta**	**139,668,050**	**139,668,050**	**101,779,310**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan**	**-**		**145.000.000,00**	**Disdukcapil**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kelahiran Usia 0-18 Tahun												**pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**				
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	7800 Layanan		2000 Layanan	2000 Layanan	1300 Layanan	139,668,050	139,668,050	101,779,310	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			145.000.000,00	Disdukcapil
89	**2.12.04.**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**199,723,000**	**179,752,500**	**103,014,850**							**218.000.000,00**	
	2.12.04.2.03.	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Laporan Penyelenggaran Informasi Administrasi Kependudukan**	**17 Laporan**		**12 Laporan**	**12 laporan**	**12 Laporan**	**162,975,600**	**143,005,100**	**103,014,850**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**180.000.000,00**	**Disdukcapil**
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	32,000,000	31,989,900	25,152,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			35.000.000,00	Disdukcapil

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	19,960,000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			21.000.000,00	Disdukcapil
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20,027,600	20,027,600	9,336,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			23.000.000,00	Disdukcapil
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	10 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	90,988,000	90,987,600	68,526,850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			101.000.000,00	Disdukcapil
	2.12.04.2.04.	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan**	**0 laporan**			**1 laporan**	**0 laporan**	**36,747,400**	**36,747,400**	**-**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**38.000.000,00**	**Disdukcapil**
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayaguna an Data	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan	0 Laporan			1 Laporan	0 Laporan	36,747,400	36,747,400	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			38.000.000,00	Disdukcapil

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kependudukan	Pendayaguna an Data Kependudukan																
90	**2.12.05.**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan**	**100 Persen**		**3 Dokumen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**24,976,000**	**24,967,000**	**9,981,000**							**27.000.000,00**	
	2.12.05.2.01.	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Jumlah Dokumen Profil dan Aggregat Kependudukan**	**15 Dokumen**		**3 Dokumen**	**3 dokumen**	**3 Dokumen**	**24,976,000**	**24,967,000**	**9,981,000**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**27.000.000,00**	**Disdukcapil**
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	15 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	24,976,000	24,967,000	9,981,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			27.000.000,00	Disdukcapil

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2025. Terlaksananya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Padang Panjang, Juni 2025

Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Padang Panjang

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rudy Suarman, AP
Pembina Utama Muda NIP. 19740918 199311 1 001

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

LAMPIRAN X

KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdullillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena curahan nikmat dan rahmat-Nya pada kita semua, saat ini kita masih dapat terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kota Padang Panjang yang kita cintai ini, dengan kasih sayang-Nya pula kita dapat menyusun salah satu dokumen penting perubahan rencana kerja Perangkat Daerah ini sebagai evaluasi dan sinkronisasi atas rencana kerja awal pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang telah dipogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan Kualitas dan kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Padang Panjang, Juni 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

PEMERINTAH KOTA ★ DINAS PERHUBUNGAN ★ PADANG PANJANG

ARKES REFAGUS, S.Sos
Nip.19651112 1986021 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

Bab I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjan
2.3 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD
2.4 Penelahaan Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat
2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi
3.2 Telahaan Terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih
3.2 Tujuan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program, Kegiatan dan SubKegiatan

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I

Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Tabel 3.2 Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Tabel 3.3 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Renja ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) dalam pembangunan daerah. Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran strategis, serta rencana program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 pada tahun berjalan mengalami beberapa perubahan yang disesuaikan dengan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan melalui pelaksanaan evaluasi rencana kerja pada tiap triwulannya. Perubahan Renja dapat dilakukan apabika hasil evalausi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta kebijakan nasional maupun provinsi yang secara langsung atau tidak langusng mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan.

Perubahan Renja berdampak pada perubahan anggaran 2025 sesuai dengan KUA PPAS yang ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 yang memuat rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) tahun 2025.

Adapun yang menjadi hal mendasar perubahan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Adanya refocussing anggaran dampak inflasi dan kebijakan nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor .. Tahun 2025;
b. Penyesuaian kebutuhan belanja dengan anggaran;
c. Penambahan anggaran belanja mendukung prioritas program unggulan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang didasari kepada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4982).
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
8. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiia Nomor 5025);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6)
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pengemudi di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5368);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
21. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Evaluasi Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 528);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
32. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
33. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
34. Peraturan Walikota Kota Padang Panjang Nomor .. Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang sudah ditetapkan sebelumnya, dikarenakan adanya perubahan kondisi, kebijakan, atau kebutuhan yang mendesak. Sehingga disusun kembali untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah.

2. Tujuan

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
c. Mengukur kinerja penyelenggara fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan;
d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.
e. Menyesuaikan rencana program dan kegiatan dengan perkembangan kebijakan nasional, prioritas daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renja dalam tahun berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I, analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, review terhadap rancangan perubahan RKPD, penelahaan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat serta penentuan isu penting penyelengaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional/provinsi, telahaan terhadap visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, tujuan dan dan sasaran Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Bab IV Penutup

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan 1 (satu) tahun 2025 adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dapat melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tahun anggaran 2025 yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang terdiri dari 2 (dua) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan, terdapat beberapa pergeseran dan perubahan sehingga berdampak pada capaian kinerja.

Adapun Program, kegiatan dan subkegiatan yang tidak tercapai pada triwulan 1 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   a. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah, subkegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya tidak tercapai dimana terdapat pengurangan anggaran dan target kinerja karena dampak refocussing anggaran dan intruksi presiden nomor 2 tahun 2025, yakni pengadaaan kursi, komputer/PC, Laptop dan printer.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

   a. Kegiatan Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kab/kota, Subkegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, dimana terdapat penghapusan anggaran dan target kinerja karena dampak refocussing anggaran dan intruksi presiden nomor 2 tahun 2025, yakni pengadaan Speedbump, Cermin Tikung, Road Berrier, Traffict Count, Marka Jalan.

Adapun gambaran pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Triwulan Pertama Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

TABEL 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG
TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah *(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)*			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran (target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat daerah penanggung gjawab
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10=6+9		11=10/5x100%		12
				K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	**Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan**		**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan**	**96,90**			**97,50**		**97,50**				**0,00**						
		A Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	**Persentase layanan angkutan darat**	**0,0559%**					**0,0582**				**0,00**						
			Persentase Kepemilikan keur kendaraan bermotor	**70,50%**					**69,50**				**0,00**						
			Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	**0,00367**					**0,00368**				**0,00**						
						13.129.093.350		**4.634.424.883**		**3.619.283.820**		**498.942.318**	**13,79%**	**498.942.318**	**13,79%**	**5.133.367.201**	**6,89%**	**3,80%**	
		I Penetapan rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen RIJ LLAJ**	**0**	**Dokumen**	**50.000.000**	**2**	-	**2**	-	2	-	**3**	-	**5**	-	**60,00%**	**7,82%**	
		1 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0	Dokumen	50.000.000		-				-							
		II Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase perlengkapann berkualitas baik**	**84,5**	**persen**	**8.571.587.350**	**84,2**	**3.086.940.566,00**	**84,3**	**2.846.473.120**	0	**482.373.318**	**0%**	**482.373.318**	**84**	**3.569.313.884**	**0,00%**	**7,82%**	
		2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	18379	unit	8.271.587.350	1500	2.821.593.415,00	1500	2.721.473.120	1500	476.178.318	1500	476.178.318	3000	3.297.771.733	8,16%	5,76%	
		3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	6	unit	300.000.000	5	265.347.151	2	125.000.000	2	6.195.000	2	6.195.000	2	271.542.151	33,33%	2,07%	
		II Pengelolaan terminal Penumpang Tipe C	**Jumlah terminal Tipe C yang di kelola**	**1**	**unit**	**248.926.000**	16	**3.970.350**	1	**38.407.700**		-	**0**	-	**16**	**3.970.350**	**0,00%**		
		4 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	**3**	Dokumen	248.926.000	10	3.970.350	1	38.407.700	0	-	0	-	10	3.970.350	0,00%	0,00%	
		III Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	**Jumlah Lokasi Parkir tepi jalan umum**	**16**	**titik**	**1.388.880.000**	**16**	**449.115.768**	**16**	**17.410.000**	**14**	**2.310.000**	**14**	**2.310.000**	**16**	**451.425.768**			
		5 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir	36	Laporan	1.388.880.000	1	449.115.768	12	17.410.000	3	2.310.000	3	2.310.000	4	451.425.768		0,17%	
		IV Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Persentase kepemilikan keur angkutan orang dan barang**	**97,5**	**persen**	**362.500.000**	**83.20**	**127.914.000**	**96,64**	**109.020.000**	0	-	**0**	-		**127.914.000**			
		6 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6000	Dokumen	87.500.000	1000	25.000.000	1000	25.020.000	0	-	0	-	1000	25.000.000	0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah *(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)*			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran (target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat daerah penanggungjawab
1	2	3		4	5			6		7		8		9		10=6+9		11=10/5x100%		12
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang	36	unit	275.000.000	10	102.914.000	10	84.000.000	0	-	10	-	20	102.914.000	27,78%	0,00%	
		V	**Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kab/kota**	**Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas**	**4**	**Kegiatan**	**1.625.352.000**	4	**685.327.327**	**4**	**453.469.000**	**4**	**8.799.000**	**4,0**	**8.799.000**	0,3	**694.126.327**		**7,23%**	
		8	pengawasan dan pengendalian efektiftas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk JalanKabupaten/Kota	36	Laporan	1.040.000.000	12	397.628.082	12	72.644.000	3	2.887.500	3	2.887.500	15	400.515.582	8,33%	0,28%	
		9	Forum lalu lintas angkutan jalan kab/kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6	Laporan	55.000.000	2	26.447.500	2	30.630.000		-	0	-	2	26.447.500	0,00%	0,00%	
		10	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	6	Dokumen	445.352.000	20	207.805.245	2	255.340.000	1	-	1	-	21	207.805.245	16,67%	0,00%	
		11	Penataan manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	36	Laporan	85.000.000	12	53.446.500	3	94.855.000	3	5.911.500	3	5.911.500	15	59.358.000	8,33%	6,95%	
		VII	**Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang**	**1215**	**angka**	**881.848.000**	**1215**	**281.156.872**	**1215**	**154.504.000**		**5.460.000**	**0**	**5.460.000**		**286.616.872**	**0,00%**	0,62%	
		12	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antara kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	36	Laporan	881.848.000	1	281.156.872	2	154.504.000	3	5.460.000	3	5.460.000	4	286.616.872	8,33%	0,62%	
		B	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi**			**18.947.308.300**	**100**	**7.390.667.528**		**8.216.121.440**	**16,842**	**1.959.928.839**	**17**	**1.959.928.839**	117	**9.278.516.367**	**336,83%**	**10,34%**	
		VIII	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase layanan keuangan perangkat daerah**	**100**	**persen**	**15.041.376.300**	**90**	**6.143.975.763**	**100**	**5.777.449.609**	**0,25**	**1.522.259.836**	**0**	**1.522.259.836**	**90**	**7.666.235.599**	**5,00%**	10,12%	
		13	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2142	bulan	15.041.376.300	**14**	6.143.975.763	8	5.777.449.609	3	1.522.259.836	3	1.522.259.836	17	7.666.235.599	0,14%	10,12%	
		IX	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi**	**100**	**persen**	**35.250.000**	-	**72.080.000**	**100**	-	**100**	-		-		**72.080.000**			
		14	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60	paket	35.250.000	-	72.080.000	85	-	85	-		-		72.080.000	0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah *(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)*			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran (target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat daerah penanggung gjawab
1	2	3		4	5			6		7		8		9		10=6+9		11=10/5x100%		12
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		X	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**90**	**persen**	**750.590.000**	**90**	**232.863.877**	**100**	**282.966.051**	**0,25**	**62.665.891**	**0**	**62.665.891**	**90**	**295.529.768**	**5,00%**	**37%**	
		15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	25.590.000	15	8.237.000	15	10.000.000	3	138.000	3	138.000	18	8.375.000	25,00%	0,54%	
		16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan yang dijaga	12	paket	135.000.000	6	40.553.600	6	45.401.500	6	5.882.000	5	5.882.000	5	46.435.600	41,67%	4,36%	
		17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36	paket	50.000.000	2	34.091.000	2	25.899.850	2	11.926.500	2	11.926.500	4	46.017.500	5,56%	23,85%	
		18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	540.000.000	1	149.982.277	12	201.664.701	12	44.719.391	12	44.719.391	13	194.701.668	33,33%	8,28%	
		XI	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan**	**90%**	**persenta se**	**620.000.000**	**90**	**50.200.000**	**100**	**112.211.860**	**0,05**	**-**	0	-	90	**50.200.000**	1,00%	0,00%	
		19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	116	unit	620.000.000	-	50.200.000	5	112.211.860	4	-	4	-	4	50.200.000	3,45%	0,00%	
		XII	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**persenta se**	**1.182.432.000**	**90%**	**512.623.338**	**100**	**1.624.436.520**	**0,25**	**318.107.212**	**0**	**318.107.212**	**1**	**830.730.550**	**5,00%**	26,90%	
		20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	180.000.000	12	50.450.906	6	60.000.000	6	14.557.212	6	14.557.212	18	65.008.118	16,67%	8,09%	
		21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108	Laporan	1.002.432.000	15	462.172.432	6	1.564.436.520	6	303.550.000	6	303.550.000	21	765.722.432	5,56%	30,28%	
		XIII	**Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**80%**	**persenta se**	**1.317.660.000**	**90%**	**378.924.550**	**100**	**419.057.400**	**0,25**	**56.895.900**		**56.895.900**		**435.820.450**		**4,32%**	
		22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33	unit	231.000.000	11	63.633.700	11	80.000.000	11	8.937.100	11	8.937.100	22	72.570.800	33,33%	3,87%	
		23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny	15	unit	450.900.000	5	153.877.250	15	150.500.000	15	23.772.650	15	23.772.650	20	177.649.900	100,00%	5,27%	
		24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	6	unit	313.800.000	2	113.783.600	1	149.992.000	2	23.635.650	2	23.635.650	4	137.419.250	33,33%	7,53%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah *(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)*			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran (target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat daerah penanggung gjawab
1	2	3		4	5			6		7		8		9		10=6+9		11=10/5x100%		12
					K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita sikan	6	unit	276.960.000	2	20.905.500	2	30.000.000	2	150.000	2	150.000	4	21.055.500	33,33%	0,05%	
		26	Pemeliharaan peralatan mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	unit	45.000.000	5	26.724.500	15	8.565.400	2	400.500	2	400.500	7	27.125.000	4,44%	0,89%	
Rata-rata capaian kinerja %																				
Prediket Kinerja												**20,78%**	**2.458.871.157**	**29,14%**	**2.458.871.157,00**	**0,00%**	**14.411.883.568,00**	**5,83%**	**14,14%**	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	1. Terlaksanannya pengawasan penerangan jalan umum
	2. Terlaksananya pengawasan perpakiran
	3. Terlaksananya Forum lalu lintas
	4. Terlaksanannya pengendalian dan pengawasan lalu lintas
	5. Terlaksananya penjemputan mahasiswa mudik dengan 2 angkutan sewa
Faktor penghambat pencapaian kinerja	1. Masih kurangnya kebutuhan fasilitas lalu lintas rambu, guadril, cermin tikung, speed bump dan marka jalan.
	2. Masih rendahnya minat masyarakat menggunakan kendaraan angkutan umum.
	3. Belum tersedianya angkutan umum yang representative. (trayek yang tdk terlayani), perlu perubahan SK Penetapan jalur trayek angkutan kota
	4. Masih kurangnya sarana prasarana pada rest area atau Terminal Angkutan Barang.
	5. Masih kurangnya satuan ruang parkir di Kota Padang Panjang. (perlu pembangunan gedung parkir)
	6. Masih kurangnya sarana prasarana pada Terminal Type C Kota Padang Panjang.
	7. Kurangnya SDM yang berkompetensi.
	8. Refocussing anggaran

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

PEMERINTAH KOTA DINAS PERHUBUNGAN PADANG PANJANG

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 19651112 198602 1 002

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) yang juga merupakan indikator kinerja outcome urusan perhubungan pada LPPD Kota Padang Panjang, serta Indikator Kinerja Daerah kota Padang Panjang, dapat dilihat pada tabel. 2.2

TABEL 2.2
ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	IKK/IK Sasaran Kota	TARGET	REALISASI				REALISASI S/D TRIWULAN INI	% CAPAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
				I	II	III	IV				
(1)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kinerja Lalu Lintas (V/C Ratio)	IKK	0,45	0,39	-	-	-	0,39	86,66	volume kendaraan padat diruas jalan tertentu pada jam sibuk	Peningkatan manajemen rekayasa lalu lintas dalam kota Padang Panjang
2	Rasio Konektivitas Kota	IKK	61,45	77,77	-	-	-	77,77	126,4	menurunnya jumlah angkutan kota yang beroperasi, tidak semua trayek terlayani	- Peningkatan layanan angkutan kota sebagai moda transportasi - Perlu dikaji ulang SK penetapan jaringan trayek angkutan kota
3	Indeks Kualitas Layanan Insfrastruktur Perhubungan	IKD	96,90	95,52	-	-	-	95,22	98,41	Masih terdapat penilaian masyarakat bernilai rendah, terkait traffic light tidak berfungsi, kinerja petugas pengatur lalu lintas, lahan parkir belum mencukupi, parkir sembarangan dan menganggu kelancaran lalu lintas	- Optimalisasi fungsi traffict light pada persimpangan yng sudah ditentukan, sedangkan pada persimpangan yang tidak aktif sudah dilakukan penghapusan. - Optimalisasi pengaturan lalu lintas pada jam sibuk dan hari pasar. - Optimalisasi lahan parkir

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

PEMERINTAH KOTA DINAS PERHUBUNGAN PADANG PANJANG

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 19651112 198602 1 00

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan pada triwulan pertama tahun 2025 masih menggunakan hasil capaian tahun 2024, dimana penghitungan indikator kinerja kunci dilakukan pada akhir tahun berjalan, sedangkan indikator kinerja daerah dilakukan pertengahan pada tahun berjalan.

1. Indikator yang mencapai target

- Rasio Konektivitas Kota

  Rasio konektivitas kota Padang Panjang tahun 2025 ditargetkan sebesar 61,54 realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar 77,77 atau 126,4%. capaian ini memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan akses jalan dan transportasi darat khususnya angkutan kota, sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota Dalam Kota Padang Panjang. Serta untuk mendukung akses jalan yang tidak ditempuh oleh angkutan kota, maka Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang mengoperasikan 2 unit bus sekolah untuk menjemput anak sekolah di 2 (dua) kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Nomor 57.A Tahun 2022 tentang Trayek Bus Sekolah di Kota Padang Panjang.

- Kinerja Lalu Lintas

  Kinerja lalu lintas Kota Padang Panjang tahun 2025 ditarget sebesar 0,45 realisasi sampai dengan triwulan 1 sebesar 0,39 atau 86,67%. Indikator ini mengalami kinerja yang baik, karena rasio kinerja lalu lintas memiliki trend menurun, semakin kecil angka rasio semakin bagus kinerja lalu lintas, hal ini didukung oleh volume kendaraan yang tidak terlalu padat diruas jalan utama disamping tahun 2024 masa pemulihan jalan penghubung antara padang panjang dan padang pasca longsor.

2. Indikator yang tidak mencapai target

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perhubungan tahun 2025 dengan target kinerja sebesar 96,83 terealisasi sebesar 95,22 atau 98,34%. Belum tercapainya indikator ini disebabkan ada beberapa unsur penilaian terendah yaitu :

- Traffic light tidak berfungsi;
- Kinerja petugas pengatur lalu lintas;
- Lahan parkir belum memadai, parkir sembarangan dan menganggu kelancaran lalu lintas.

2.3 Review terhadap Rancangan awal Perubahan RKPD

1. Review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2. Proses review ini dilakukan dengan alasan agar program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tercover dalam RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang akuntabel.

3. Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang sudah sesuai dengan rancangan awal Perubahan RKPD.

Berikut tabel review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.

TABEL 2.5

REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Selisih	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
					Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN				11.835.405.260	10.512.517.805					11.835.405.260	11.299.781.282	- 535.623.978	
37302	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100%	8.216.121.440	7.831.825.845	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan	100%	8.216.121.440	7.894.086.217	- 322.035.223	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	5.777.449.609	5.777.449.609	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	5.777.449.609	5.865.068.336	87.618.727	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	714 Orang/bulan	5.777.449.609	5.777.449.609	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	728 Orang/bulan	5.777.449.609	5.865.068.336	87.618.727	Kekurangan gaji dan tunjangan
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100%	282.966.051	157.274.316	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100%	282.966.051	190.774.311	- 92.191.740	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	201.664.701	100.813.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	201.664.701	115.813.000	- 85.851.701	Biaya SPPD Pengurusan administrasi bus sekolah
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.899.850	21.677.100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25.899.850	40.177.095	14.277.245	penambahan biaya cetak karcis
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	45.401.500	28.843.636	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	45.401.500	28.843.636	- 16.557.864	Refocussing Anggaran
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	5.940.580	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	5.940.580	- 4.059.420	Refocussing Anggaran

Kode Rekening	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Selisih	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
					Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X.XX.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Padang Panjang**	**Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan**	**90%**	**112.211.860**	**7.523.700**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Padang Panjang**	**Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan**	**90%**	**112.211.860**	**7.523.700**	**- 104.688.160**	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit	112.211.860	7.523.700	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Laporan	112.211.860	7.523.700	- 104.688.160	Refocussing Anggaran
X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**1.624.436.520**	**1.581.236.220**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**1.624.436.520**	**1.477.519.020**	**- 146.917.500**	
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.564.436.520	1.521.236.520	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.564.436.520	1.417.519.320	- 146.917.200	Refocussing Anggaran
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	60.000.000	59.999.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	60.000.000	59.999.700	- 300	
X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Padang Panjang**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100%**	**419.057.400**	**308.342.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Padang Panjang**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100%**	**419.057.400**	**353.200.850**	**- 65.856.550**	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	8.565.400	8.565.400	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8.565.400	8.565.400	-	kekurangan biaya BBM Genset PKB
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30.000.000	12.400.600	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000	12.400.600	- 17.599.400	Refocussing Anggaran

Kode Rekening	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Selisih	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
					Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	**Padang Panjang**	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	149.992.000	110.376.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	**Padang Panjang**	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	149.992.000	125.234.850	- 24.757.150	kekurangan biya BBM
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	150.500.000	110.210.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	150.500.000	140.210.000	- 10.290.000	Biaya balik nama bus sekolah, biaya pemeliharaan
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	80.000.000	66.790.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	80.000.000	66.790.000	- 13.210.000	Refocussing Anggaran
37302	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		**Persentase kepemilikan keur kendaraan bermotor**	**69.50 %**	**3.619.283.820**	**2.680.691.960**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		**Konektivitas Darat**	**1**	**3.619.283.820**	**3.405.695.065**	**- 213.588.755**	
			Persentase layanan angkutan Darat	**0.0582 %**					**Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal**	**86.62**			-	
			Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	**0.003681 angka**	-						-		-	
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**		**Jumlah Dokumen RIJ**	**1 Dokumen**	**-**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**		**Jumlah Dokumen RIJ**	**1 Dokumen**	**-**		**-**	
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	**Padang Panjang**	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	**Padang Panjang**	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-	

Kode Rekening	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Selisih	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
					Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		**Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik**	**84.40 %**	**2.846.473.120**	**2.169.449.360**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		**Jumlah perlengkapan jalan yang berkualitas baik**	**2178**	**2.846.473.120**	**2.594.452.465**	**- 252.020.655**	
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	125.000.000	83.588.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	125.000.000	83.588.000	- 41.412.000	Refocussing Anggaran
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1533 Unit	2.721.473.120	2.085.861.360	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1600 Unit	2.721.473.120	2.510.864.465	- 210.608.655	- kekurangan biaya tagihan listrik - Pokir PJU
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**		**Jumlah terminal Tipe C yang di kelola**	**1 unit**	**38.407.700**	**2.955.200**	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**		**Jumlah terminal Tipe C yang di kelola**	**1 unit**	**38.407.700**	**2.955.200**	**- 35.452.500**	
2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit	38.407.700	2.955.200	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit	38.407.700	2.955.200	- 35.452.500	Refocussing Anggaran
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Padang Panjang**	**Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum**	**16 Titik**	**17.410.000**	**11.799.000**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Padang Panjang**	**Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum**	**16 Titik**	**17.410.000**	**11.799.000**	**- 5.611.000**	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	17.410.000	11.799.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	17.410.000	11.799.000	- 5.611.000	Refocussing Anggaran

Kode Rekening	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Selisih	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
					Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Padang Panjang**	**persentase kendaraan yang terlayani melakukan pengujian berkala**	**97.00 %**	**109.020.000**	**104.000.000**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Padang Panjang**	**persentase kendaraan yang terlayani melakukan pengujian berkala**	**97.00 %**	**109.020.000**	**104.000.000**	**- 5.020.000**	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Padang Panjang**	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	84.000.000	84.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Padang Panjang**	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	84.000.000	84.000.000	-	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	25.020.000	20.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1000 Dokumen	25.020.000	20.000.000	- 5.020.000	Refocussing Anggaran
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Padang Panjang**	**Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas**	**4 kegiatan**	**453.469.000**	**206.110.900**	**Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Padang Panjang**	**persentase pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas**	**90%**	**453.469.000**	**306.110.900**	**- 147.358.100**	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	**Padang Panjang**	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	30.630.000	19.583.500	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	**Padang Panjang**	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	30.630.000	19.583.500	- 11.046.500	Refocussing Anggaran
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	72.644.000	105.913.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	72.644.000	105.913.000	33.269.000	
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Padang Panjang	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 Dokumen	255.340.000	12.155.000	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Padang Panjang	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 Dokumen	255.340.000	112.155.000	- 143.185.000	Belanja pemasangan marka

Kode Rekening	Rancangan Awal Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Selisih	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Program/Kegiatan/sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)			
					Sebelum	Sesudah					Sebelum	Sesudah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	94.855.000	68.459.400	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	94.855.000	68.459.400	- 26.395.600	
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang**	**1215 unit**	**154.504.000**	**186.377.500**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang**	**1058 unit**	**154.504.000**	**386.377.500**	**231.873.500**	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)	**Padang Panjang**	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	154.504.000	186.377.500	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)	**Padang Panjang**	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	154.504.000	386.377.500	231.873.500	biaya transportasi gratis 2 bln

Analisis terhadap review rancangan awal perubahan RKPD sebagaimana tabel diatas, terdapat penurunan anggaran sebesar 535.623.978 atau 8,5% dari anggaran awal sebesar Rp. 11.835.405.260,- menjadi Rp. 11.299.781.282,-.

Turunnya kebutuhan anggaran adalah dampak refocussing anggaran dan penyesuaian kegiatan mendukung program unggulan yang sifatnya mendesak, antara lain :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu rancangan awal perubahan sebesar Rp. 5.777.449.609,- menjadi Rp. 5.865.068.336,- pada pagu analisis kebutuhan, hal ini merupakan penambahan kekurangan gaji dan tunjangan.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu rancangan awal perubahan sebesar Rp. 157.275.316,- menjadi Rp. 190.774.311,- pada pagu analisis kebutuhan, hal ini merupakan penambahan biaya perjalanan dinas pengurusan administrasi bus sekolah, dan penambahan biaya cetak karcis.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu rancangan awal perubahan sebesar Rp. 1.581.236.220,- menjadi Rp. 1.477.519.020,- pada pagu analisis kebutuhan, hal ini merupakan pengurangan biaya gaji tenaga harian lepas.

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu rancangan awal perubahan sebesar Rp. 308.342.000,- menjadi Rp. 353.200.850,- pada pagu analisis kebutuhan, hal ini merupakan penambahan biaya BBM genset PKB, biaya BBM kendaraan alat besar, biaya balik nama bus sekolah dan pemeliharaannya.

5. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan pagu rancangan awal perubahan sebesar Rp. 2.169.449.360,- menjadi Rp. 2.594.452.465,- pada pagu analisis kebutuhan, hal ini merupakan penambahan biaya tagihan listrik lampu penerangan jalan umum dan pengadan tiang lampu penerangan jalan umum.

6. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan pagu rancangan awal perubahan sebesar Rp. 206.110.900,- menjadi Rp. 306.110.900,- pada pagu analisis kebutuhan, hal ini merupakan penambahan biaya pemasangan marka.

7. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu rancangan awal perubahan sebesar Rp. 186.377.000,- menjadi Rp. 386.377.000,- pada pagu analisis kebutuhan, hal ini penambahan anggaran mendukung program prioritas kepala daerah yaitu penyediaan transportasi gratis bagi siswa.

2.4 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

1. Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas perhubungan Kota Padang Panjang adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalah-permasalah dalam hal transportasi beserta perlengkapan jalan.
2. Telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui musrenbang terdapat perubahan signifikan yakni penghapusan anggaran pengadaan cermin tikung dan pemasangan speedbump dampak refocussing anggaran tahun 2025 sedangkan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Padang Panjang terdapat penambahan Pokir pada Renja Perubahan Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.

2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

1. Dalam rangka penyusunan rencana kerja perubahan tahun 2025 dilakukan penelaahan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan serta menyesuaikan kebijakan anggaran pada Perubahan RKPD 2025 antara lain pergeseran kebijakan nasional dan daerah, dinamika kebutuhan masyarakat serta potensi dan tantangan yang berkembang. Isu-isu penting yang memiliki keterkaitan erat dengan upaya pencapaian visi misi Kepala Daerah Terpilih 2025-2030 dimana prioritas program unggulannya terkait tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah :
   a. penyediaan transportasi gratis bagi pelajar;
   b. penyediaan infrastruktur pendukung.
2. untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) bidang perhubungan, guna menjamin keberlanjutan pelayanan transportasi yang aman, tertib, dan efisien. Penentuan isu penting dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika kebutuhan transportasi masyarakat, kondisi prasarana dan sarana transportasi, serta pergeseran kebijakan nasional dan daerah di sektor perhubungan. Isu-isu ini menjadi landasan utama dalam merumuskan penyesuaian program dan kegiatan pada Renja Perubahan. Adapun isu-isu penting yang sangat mendasar sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang antara lain :
   a. Efesiensi manajemen rekayasa lalu lintas (One Way);
   b. Optimalisasi kualitas dan layanan angkutan umum sebagai sarana angkutan massa;
   c. Optimalisasi jaringan trayek angkutan kota;
   d. Penataan perpakiran ditepi jalan umum untuk peningkatan PAD yang belum memadai;
   e. Disiplin berlalu lintas pengguna jalan relatif rendah yang mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan;
   f. Kurangnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum dikarenakan perkembangan moda transportasi umum berbasis online;
   g. Tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor;
   h. Belum memadainya terminal angkutan penumpang dan pangkalan truk (rest area);
   i. Belum memadainya sarana dan prasarana lalu lintas;

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi menunjukkan adanya keselarasan antara arah kebijakan pusat dan daerah dalam sektor perhubungan. Oleh karena itu, Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang perlu disusun dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan tersebut berpedoman pada RPJMN 2025-2030, RKP Tahun 2025, Renstra Kementrian Perhubungan 2025-2029, RKPD Propinsi Sumatera Barat 2025, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat 2025-2029, agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan transportasi yang terintegrasi, aman, efisien, dan berkelanjutan.

Mengacu pada RKP Tahun 2025 dengan tema "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif "**, maka Dinas Perhubungan menyesuaikan prioritas kegiatan pada bidang angkutan, yang terefleksi dalam perubahan alokasi pada sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

3.2 Telaahan Terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2025-2029

Telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah menjadi langkah awal yang sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang tetap berada dalam koridor arah pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Visi Pembangunan Kota Padang Panjang adalah :

"**Padang Panjang, Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera dan Bermarwah**"

Dinas Perhubungan memiliki keterkaitan dengan misi 5 yakni **"Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk menjadikan Padang Panjang Kota Hijau Berkelanjutan"**.

Perwujudan misi dikelompok menjadi beberapa tujuan, Dinas Perhubungan berada pada tujuan 1 **"Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan".**

Agar lebih terarahnya tujuan dimaksud maka dipilah menjadi beberapa sasaran berkaitan urusan, sehingga Dinas Perhubungan berada pada sasaran 1 "**Meningkatnya penyediaan dan pengelolaan infrastruktur berkualitas"**.

3.2 Tujuan, Sasaran Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang

Mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 bahwa tujuan Dinas Perhubungan yaitu “Meningkatnya penyediaan dan pengelolaan infrastruktur berkualitas” dengan sasaran :

1. Meningkatnya Konektivitas dan Kelancaran Transportasi Darat.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dituangkan dalam berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Renstra 2025	Target Renja Perubahan 2025
Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Akses Infrastruktur Perhubungan		Indeks kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan	96,83	96,83
	1. Meningkatnya Konektivitas dan Kelancaran Transportasi Darat	Rasio Konektivitas Kota	0,7778	0,7778
		Kinerja Lalu Lintas	0,38	0,38
	2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perhubungan	70,72	71,76

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang. Disusun berdasarkan tugas dan fungsi (tupoksi) serta selaras dengan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) organisasi.

Tujuan dan Fungsi IKU antara lain :

1. Mengukur kinerja organisasi secara objektif, berdasarkan target yang telah ditentukan.
2. Menjadi dasar evaluasi dan pertanggungjawaban atas capaian kinerja unit kerja.
3. Mengarahkan program dan kegiatan agar fokus pada hasil (outcome), bukan hanya keluaran (output).
4. Memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, sebagai lembaga teknis daerah telah menyusun Perubahan Rencana Kerja yang meliputi program, Kegiatan dan Subkegiatan untuk dapat dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025.

Rumusan program, kegiatan dan subkegiatan ini mendukung sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan ;

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
   a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
   b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
   d) Pemeliharaan peralatan mesin lainnya
   e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

B. Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

6. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
   a) Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota
   b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
7. Pengelolaan terminal dan Pemeliharaan Tipe C
   a) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
8. Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
   a) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kab/kota.
9. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
   a) Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor
   b) Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
10. Kegiatan pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kab/kota

a) Penataan manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota
b) Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas.
c) Pengawasan dan pengendalian efektiftas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kab/kota
d) Forum lalu lintas angkutan jalan kab/kota

11. Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
    a) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

TABEL 3.2
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KOTA PADANG PANJANG

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RKPD 2024	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan 2025						Lokasi Output Kegiatan	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026	
			Semula	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Perubahan Refocussing (hasil Desk)	Pagu Perubahan Final			Nasional	Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	12=8-9+10+11	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	DINAS PERHUBUNGAN				**11.795.592.197**	**11.835.405.260**	**10.512.517.305**	**11.299.781.282**							**13.416.905.970**
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DA**				**11.795.592.197**	**11.835.405.260**	**10.512.517.305**	**11.299.781.282**							
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**11.795.592.197**	**11.835.405.260**	**10.512.517.305**	**11.299.781.282**							**13.416.905.970**
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perhubungan**	**100 Persen**	**100%**	**8.025.116.497**	**8.216.121.440**	**7.831.825.845**	**7.894.086.217**						**100 Persen**	**8.426.666.520**
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persentase**	**5.658.626.946**	**5.777.449.609**	**5.777.449.609**	**5.865.068.336**						**100 Persen**	**6.000.000.000**
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	714 orang/bulan	728 Orang/bulan	5.658.626.946	5.777.449.609	5.777.449.609	5.865.068.336	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	714 orang/bulan	6.000.000.000
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persentase**	**282.966.051**	**282.966.051**	**157.274.316**	**190.774.311**						**100 Persen**	**313.530.000**
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	10.000.000	10.000.000	5.940.580	5.940.580	-Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	4 Paket	8.530.000
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	45.401.500	45.401.500	28.843.636	28.843.636	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	4 Paket	45.000.000
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	25.899.850	25.899.850	21.677.100	40.177.095	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	12 Paket	40.000.000
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	201.664.701	201.664.701	100.813.000	115.813.000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	12 Laporan	220.000.000
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan**	**90 Persen**	**90 Persentase**	**114.996.500**	**112.211.860**	**7.523.700**	**7.523.700**						**90 Persen**	**120.000.000**
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 unit (30 unit kursi, PC 2 unit, 2 printer, Laptop 2 unit, mesin ptong	3	114.996.500	112.211.860	7.523.700	7.523.700	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	36 unit (30 unit kursi, PC 2 unit, 2 printer, Laptop 2 unit, mesin ptong	120.000.000
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.594.447.000**	**1.624.436.520**	**1.581.236.220**	**1.477.519.020**						**100 Persen**	**1.581.236.520**
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	60.000.000	60.000.000	59.999.700	59.999.700	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	36 Laporan	60.000.000
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	1.534.447.000	1.564.436.520	1.521.236.520	1.417.519.320	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	12 Laporan	1.521.236.520
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 Persen**	**100 Persentase**	**374.080.000**	**419.057.400**	**308.342.000**	**353.200.850**						**100 Persen**	**411.900.000**
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	8 Unit	80.000.000	80.000.000	66.790.000	66.790.000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	11 unit	77.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RKPD 2024	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan 2025						Lokasi Output Kegiatan	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026	
			Semula	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Perubahan Refocussing (hasil Desk)	Pagu Perubahan Final			Nasional	Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	12=8-9+10+11	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	4 Unit	150.500.000	150.500.000	110.210.000	140.210.000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	5 unit	150.300.000
2.15.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	105.000.000	149.992.000	110.376.000	125.234.850	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	2 unit	104.600.000
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	8 Unit	8.580.000	8.565.400	8.565.400	8.565.400	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	15 unit	30.000.000
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	30.000.000	30.000.000	12.400.600	12.400.600	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	OPD	2 unit	50.000.000
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase layanan angkutan darat Persentase Kepemilikan keur kendaraan bermotor Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan'**	**0,0605% 68,00 Persen 0,003700 angka**	**0,0605% 68,00 Persen 0,003700 angka**	**3.720.475.700**	**3.619.283.820**	**2.680.691.460**	**3.405.695.065**						**0,0582% 69,5 Persen 0,003681 angka**	**4.740.239.450**
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik**	1 Dokumen		**50.000.000**	**-**	**-**	**-**						**84,4 Persen**	**250.000.000**
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	-	50.000.000	-	-	0	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		1 Dokumen	250.000.000
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas baik**	**84,3 Persen**	**84.30 persentase**	**2.733.531.200**	**2.846.473.120**	**2.169.449.360**	**2.594.452.465**						**84,4 Persen**	**2.823.862.450**
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1513unit	1600 Unit	2.608.531.200	2.721.473.120	2.085.861.360	2.510.864.465	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		1533 unit	2.723.862.450
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 unit	2 Unit	125.000.000	125.000.000	83.588.000	83.588.000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		2 unit	100.000.000
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah terminal Tipe C yang di kelola**	**1 unit**	**1 unit**	**65.003.500**	**38.407.700**	**2.955.200**	**2.955.200**						**1 unit**	**25.000.000**
2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 Dokumen	1 Dokumen	65.003.500	38.407.700	2.955.200	2.955.200	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		1 Dokumen	25.000.000
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah Lokasi Parkir tepi Jalan Umum**	**16 titik**	**16 Titik**	**60.774.000**	**17.410.000**	**11.799.000**	**11.799.000**						**16 titik**	**50.000.000**
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	60.774.000	17.410.000	11.799.000	11.799.000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		12 Laporan	50.000.000
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**persentase kendaraan yang terlayani melakukan pengujian berkala**	**96,64 Persen**	**96.64 Persentase**	**100.000.000**	**109.020.000**	**104.000.000**	**104.000.000**						**97,00 Persen**	**125.000.000**
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000	0	50.000.000	25.020.000	20.000.000	20.000.000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		1000	25.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan RKPD 2024	Capaian Kinerja Kerangka Pendanaan 2025						Lokasi Output Kegiatan	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju 2026	
			Semula	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	Pagu Perubahan Refocussing (hasil Desk)	Pagu Perubahan Final			Nasional	Daerah		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	12=8-9+10+11	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	10 unit	9 Unit	50.000.000	84.000.000	84.000.000	84.000.000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		9 unit	100.000.000
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan** **Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas**	**4 kegiatan**	**4 kegiatan**	**550.663.000**	**453.469.000**	**206.110.900**	**306.110.900**						**4 kegiatan**	**430.000.000**
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan,	12 Laporan	127.338.000	72.644.000	105.913.000	105.913.000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		12 Laporan	70.000.000
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	41.130.000	30.630.000	19.583.500	19.583.500	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		2 Laporan	40.000.000
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	2 Dokumen	2 Dokumen	287.340.000	255.340.000	12.155.000	112.155.000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		2 dokumen	250.000.000
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 laporan	12 Laporan	94.855.000	94.855.000	68.459.400	68.459.400	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		12 laporan	70.000.000
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah** **Kabupaten/Kota**	**Jumlah Ketersediaan angkutan orang dan barang**	**1215 unit**	**1058 angka**	**210.504.000**	**154.504.000**	**186.377.000**	**386.377.500**						**1215 unit**	**1.286.377.000**
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	12 Laporan	210.504.000	154.504.000	186.377.000	386.377.500	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan		12 Laporan	1.286.377.000

Rumusan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang terdapat beberapa perubahan anggaran dimana anggaran awal sebesar Rp11.835.405.260,- berubah menjadi Rp 11,299.781.282,- sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 535.623.978,- atau 4,52%.

Adapun alokasi dana perubahan anggaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Program ini mengalami refocussing anggaran sebesar Rp.384.295.595,- atau 4,68% dari anggaran awal sebesar Rp.8,216.121.440,- bergeser menjadi Rp. 7.831.825.845,-. Pada Renja Perubahan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 322.035.223,- atau 3,20% dari anggaran awal.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
   Program ini mengalami refocussing anggaran sebesar Rp.938.592.360,- atau 25,93% dari anggaran awal sebesar Rp.3.619.283.820 bergeser menjadi Rp.2.680.691.460,-. Pada Renja Perubahan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. 213.588.755,- atau 5,90% dari anggaran awal.

TABEL 3.3
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							**12.139.592.197**	**11.835.405.260**	**11.299.781.282**							**11.783.005.550,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.139.592.197**	**11.835.405.260**	**11.299.781.282**							**11.783.005.550,00**	
	2.15.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**12.139.592.197**	**11.835.405.260**	**11.299.781.282**							**11.783.005.550,00**	
91	**2.15.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Pada Dinas Perhubungan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**8.025.116.497**	**8.216.121.440**	**7.894.086.217**							**7.863.369.100,00**	
	2.15.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**5.658.626.946**	**5.777.449.609**	**5.865.068.336**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	-		**5.013.792.100,00**	**DINAS PERHUBUNGAN**
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4368 Orang/bulan		728 Orang/bulan	728 Orang/bulan	728 Orang/bulan	5.658.626.946	5.777.449.609	5.865.068.336	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			5.013.792.100,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**282.966.051**	**282.966.051**	**190.774.311**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	-		**293.530.000,00**	**DINAS PERHUBUNGAN**
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	10.000.000	10.000.000	5.940.580	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			8.530.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	45.401.500	45.401.500	28.843.636	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	62 Paket		12 Paket	12 Paket	2 Paket	25.899.850	25.899.850	40.177.095	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	201.664.701	201.664.701	115.813.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan**	**100 %**		**100 %**	**90 %**	**90 %**	**114.996.500**	**112.211.860**	**7.523.700**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	-		**550.000.000,00**	**DINAS PERHUBUNGAN**
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit		0 Unit	36 Unit	3 Unit	114.996.500	112.211.860	7.523.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.594.447.000**	**1.624.436.520**	**1.477.519.020**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	-		**1.594.447.000,00**	**DINAS PERHUBUNGAN**
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	60.000.000	59.999.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.534.447.000	1.564.436.520	1.417.519.320	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			1.534.447.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**374.080.000**	**419.057.400**	**353.200.850**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	-		**411.600.000,00**	**DINAS PERHUBUNGAN**
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	**13 Unit**		10 Unit	11 Unit	8 Unit	80.000.000	80.000.000	66.790.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**79 Unit**		5 Unit	5 Unit	4 Unit	150.500.000	150.500.000	140.210.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	**12 Unit**		2 Unit	2 Unit	2 Unit	105.000.000	149.992.000	125.234.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			105.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**83 Unit**		10 Unit	15 Unit	8 Unit	8.580.000	8.565.400	8.565.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			34.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**11 Unit**		2 Unit	2 Unit	1 Unit	30.000.000	30.000.000	12.400.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			42.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
92	**2.15.02.**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal**	**87 %**		**86,59 %**		**86,63 %**	**4.114.475.700**	**3.619.283.820**	**3.405.695.065**							**3.919.636.450,00**	
			Konektivitas Darat	**1 Angka**		**1 Angka**		**1 Angka**											
	2.15.02.2.01.	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen RIJ**	**2 Dokumen**		**0 Dokumen**	**1 Dokumen**	**0 Dokumen**	**50.000.000**	-	-			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**null**		**50.000.000,00**	**DINAS PERHUBUNGAN**
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia**	**2245 Unit**		**2224 Unit**		**2228 Unit**	**3.069.531.200**	**2.846.473.120**	**2.594.452.465**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**null**		**2.823.862.450,00**	**DINAS PERHUBUNGAN**
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1.600 Unit		1513 Unit	1513 Unit	1600 Unit	2.944.531.200	2.721.473.120	2.510.864.465	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Penerangan Jalan	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			2.723.862.450,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	12 Unit		2 Unit	2 Unit	2 Unit	125.000.000	125.000.000	83.588.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.03.	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah terminal Tipe C yang di kelola**	**1 Unit**		**1 Unit**	**1 unit**	**1 Unit**	**65.003.500**	**38.407.700**	**2.955.200**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**null**		**80.000.000,00**	**DINAS PERHUBUNGAN**
	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	65.003.500	38.407.700	2.955.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah Lokasi Parkir tepi jalan umum yang memadai**	**14 Titik**		**14 Titik**	**16 Titik**	**14 Titik**	**60.774.000**	**17.410.000**	**11.799.000**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**null**		**60.774.000,00**	**DINAS PERHUBUNGAN**
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	60.774.000	17.410.000	11.799.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			60.774.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase kendaraan yang terlayani melaksanakan pengujian kendaraan bermotor**	**98,5 %**		**97 %**	**-**	**97 %**	**100.000.000**	**109.020.000**	**104.000.000**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**null**		**150.000.000,00**	**DINAS PERHUBUNGAN**
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6000 Dokumen		1000 Dokumen	2000 Dokumen	1000 Dokumen	50.000.000	25.020.000	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	54 Unit		9 Unit	10 Unit	9 Unit	50.000.000	84.000.000	84.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Opsen PKB	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kab/kota**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**558.663.000**	**453.469.000**	**306.110.900**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**null**		**545.000.000,00**	**DINAS PERHUBUNGAN**
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	127.338.000	72.644.000	105.913.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			125.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	41.130.000	30.630.000	19.583.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	295.340.000	255.340.000	112.155.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			290.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	94.855.000	94.855.000	68.459.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.09.	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Operasi Angkutan Umum**	**51,69 %**		**51,69 %**	**51,69 %**	**0,53**	**210.504.000**	**154.504.000**	**386.377.500**			-	**Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan**	**null**		**210.000.000,00**	**DINAS PERHUBUNGAN**
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	210.504.000	154.504.000	386.377.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan			210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

PEMERINTAH KOTA DINAS PERHUBUNGAN PADANG PANJANG

ARKES REFAGUS, S.Sos
NIP. 19651112 198602 1 00

BAB IV

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2026 dan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025. Perubahan Renja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dengan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Padang Panjang, sehingga target kinerja pada tahun pertama periode Renstra dapat tercapai.

Dinas Perhubungan melaksanakan satu urusan yaitu urusan perhubungan. Urusan perhubungan diprioritaskan pada peningkatan manajemen rekayasa lalu lintas, penataan perpakiran, peningkatan pelayanan angkutan.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

a. Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang harus mampu melaksanakan tujuan, sasaran, program dan kegatan yang ada dalam Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025;
b. Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025 sesuai dengan Renja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025 dan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025;
c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025, Kepala Dinas harus mengawasi dan mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan tahun 2024.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Adapun tindak lanjut yang perlu diperbaiki dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2025, hal ini untuk menjadi perhatian dan diharapkan tidak terulang kembali pada penyusunan Renja ditahun selanjut :

a. Perlu adanya koordinasi yang baik dengan stakeholder yang mendukung program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan yang terkait rumusan, kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan;
b. Perlu adanya saran dan kritik yang membangun dalam merumuskan program/kegiatan Dinas Perhubungan agar dalam pelaksanaan program/kegiatan ditahun selanjutnya dapat terlaksanan dan tercapai dengan baik.
c. Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi, prioritas dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah pada tahun anggaran bersangkutan.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025, dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus

diakomodir. Sebagai konsekuensinya diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Padang Panjang, Juni 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

PEMERINTAH KOTA
DINAS PERHUBUNGAN
PADANG PANJANG

ARKES REFAGUS, S.Sos
Nip.19651112 1986021 002

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2025 disusun berdasarkan Ranwal RKPD Perubahan tahun 2025 dengan memperhatikan program prioritas sesuai dengan Visi Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu:**“**“**PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH”**

Demikian kiranya, semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG,

Drs. AMPERA SH, M.Si.
NIP. 19680101 199803 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI dan INFORMATIKA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025……...6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika 19

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika 23

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 27

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 37

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi 38

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika 41

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 43

BAB IV PENUTUP 71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang……...	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika……...	20
Tabel 2.3	Pemetaan Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang…….	23
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025…….	28
Tabel 3.1	Permasalahan dan Isu Strategis Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika & Statistik Prov Sumatera Barat 2021 – 2026 …….	39
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 – 2029…….	42
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program, Kegiatan & Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dan perkiraan maju 2026……...	44
Tabel 3.4	Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2025……...	55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis (Renstra) dalam pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi rencana kerja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran rencana kerja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman kepada Rencana Strategis OPD.

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka disusunlah Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 didasarkan atas hasil evaluasi renja OPD pada Triwulan I yang meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan dan menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan. Selain itu dokumen Perubahan Renja ini juga selaras dengan Rancangan awal Renstra Dinas Kominfo Tahun 2025-2029 yang mengakomodir program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Perubahan Tahun 2025 guna mencapai Visi Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu:**“**“**PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH”**

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah sebagai panduan dalam menyesuaikan rencana kerja dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik dan lingkungan yang mungkin terjadi, termasuk dalam hal ini penyesuaian terhadap prioritas pembangunan yang baru atau perubahan anggaran yang tidak terduga serta memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien dalam penataan ulang prioritas dan alokasi anggaran untuk mencapai hasil yang optimal. Sementara itu tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah untuk :

1. Adaptasi terhadap dinamika situasi yang mempengaruhi perencanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal, seperti perubahan kebijakan, anggaran, atau kebutuhan masyarakat;
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, untuk memastikan bahwa perencanaan yang dilakukan lebih relevan, realistis dan sesuai dengan kondisi terbaru dilapangan;
3. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi, untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapaian tujuan organisasi;
4. Menjamin Ketercapaian Sasaran dan Indikator Kinerja dengan menyusun ulang target yang lebih realistis berdasarkan evaluasi capaian sebelumnya, untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra);

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan I dengan menjelaskan penyebab program/kegiatan/subkegiatan yang tidak mencapai target dan melebihi target serta faktor penghambat dan faktor pendorong.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional/provinsi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, kegiatan dan sub kegiatan.

Bab IV Penutup

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun berkenan adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tahun anggaran 2025 terdiri dari 5 (lima) program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 19 (Sembilan Belas) sub kegiatan. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

TABEL 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG

PERIODE PELAKSANAAN : JANUARI S/D MARET 2025

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (Target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			20,885,917,655	-	8,202,020,031	-	4,810,847,000		2,184,200,863		2,184,200,863		10,386,220,894	58%	49.73%	-
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			20,760,067,655		8,186,106,031		4,810,847,000		2,182,501,088		2,182,501,088	47.16%	10,368,607,119	100%	49.94%	-
A	Meningkatkan implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	100%	10,687,474,255	33%	4,405,984,883	42%	2,229,968,100	42%	1,879,656,738	100%	1,879,656,738	42%	6,285,641,621	100%	58.81%	
I		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	8,577,970,155	33%	3,568,305,179	42%	1,057,391,000	42%	899,531,271	100%	899,531,271	42%	4,467,836,450	100%	125.21 %	

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (Target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.050 orang/bulan	8,577,970,155	392 org/bulan	3,568,305,179	100	1,057,391,000	168	899,531,271	100	899,531,271	492	4,467,836,450	46.86 %	52.09%	
II		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**12,500,000**	**100%**	**14,000,000**	**100%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**0%**	**14,000,000**	**112%**	**112.00 %**	
2		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	25 paket	12,500,000	28 paket	14,000,000	0	-	0	-	0	-	28	14,000,000	112%	112.00 %	
III		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**785,737,700**	**33%**	**287,591,257**	**42%**	**57,593,050**	**42%**	**40,297,098**	**42%**	**40,297,098**	**42%**	**327,888,355**	**42%**	**41.73%**	
3		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	24,423,000	4 paket	7,766,000	1 paket	1,980,000	1 paket	-	1 paket	-	5 paket	7,766,000	5 paket	31.80%	
4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	77,207,800	4 paket	33,164,500	1 paket	8,213,000	1 paket	3,349,500	1 paket	3,349,500	5 paket	36,514,000	5 paket	47.29%	
5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	34,106,900	12 paket	3,940,200	3 paket	4,400,050	3 paket	1,134,000	3 paket	1,134,000	15 paket	5,074,200	15 paket%	14.88%	
6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	650,000,000	24 laporan	242,720,557	6 laporan	43,000,000	6 laporan	35,813,598	6 laporan	35,813,598	6 laporan	278,534,155	6 laporan	42.85%	

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (Target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
IV		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	**100%**	**105,000,000**	**33%**	**34,250,000**	**42%**	**11,129,800**	**42%**	**6,225,000**	**42%**	**6,225,000**	**42%**	**40,475,000**	**113%**	**38.55%**	
7		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 Unit	105,000,000	35 unit	34,250,000	1 unit	11,129,800	1 unit	6,225,000	I unit	6,225,000	36 unit	40,475,000	113%	38.55%	
V		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**775,440,000**	**33%**	**296,200,247**	**42%**	**301,065,501**	**42%**	**307,122,098**	**42%**	307,122,098	**42%**	603,322,345	**42%**	**77.80%**	
8		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan	330,000,000	36 laporan	99,597,987	9 laporan	26,757,501	9 laporan	16,445,494	9 laporan	16,445,494	45 laporan	116,043,481	42%	35.16%	
9		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	445,440,000	12 laporan	196,602,260	3 laporan	274,308,000	3 laporan	290,676,604	3 laporan	290,676,604	15 laporan	487,278,864	42%	109.39 %	
VI		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100%**	**430,826,400**	**33%**	**205,638,200**	**42%**	**27,286,000**	**42%**	**17,925,700**	**42%**	17,925,700	**42%**	223,563,900	**42%**	51.89%	

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (Target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
10		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	261,506,400	7 unit	165,850,200	7 unit	21,626,000	7 unit	17,240,700	7 unit	17,240,700	7 unit	183,090,900	8%	70.01%	
11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	90,000,000	1 unit	26,658,000	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	26,658,000	0%	29.62%	
12		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	162 Unit	79,320,000	54 unit	13,130,000	54 unit	5,660,000	30 unit	685,000	30 unit	685,000	84 unit	13,815,000	52%	17.42%	
B		**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik**	**45.00%**	**3,608,803,900**	**99,80**	**2,063,555,688**	**44,5%**	**800,441,900**	**0%**	**283,271,000**	**99.80%**	**283,271,000**	**99.80%**	**2,346,826,688**	**225%**	**65.03%**	
VII		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)**	**29000 followers**	**3,608,803,900**		**2,063,555,688**	**28000 follower**	**800,441,900**	**37.014 follower**	**283,271,000**	**37.014 follower**	**283,271,000**	**37.014 follower**	**2,346,826,688**	**132%**	**65.03%**	
13		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	1,355,071,200	1 dokumen	305,444,806	0	61,224,900	0	2,785,600	0	2,785,600	1 dokumen	308,230,406	33%	22.75%	

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (Target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah rilis berita mengenai informasi pembangunan daerah	3300 rilis		1150 rilis		330 rilis		330 rilis		330 rilis	-	1480	-	45%		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatn media berbayar sesuai kriteria atau juknis					4 media		1 media						25%		
14		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 Dokumen	646,742,700	1 dokumen	156,261,382	1 dokumen	4,410,000	0 dokumen	-	0	-	1 dokumen	156,261,382	33%	24.16%	
			Jumlah konten informasi publik (pps dan videotron)	2.625 konten	-	1044 konten		213 konten		300 konten		300 konten	-	1344	-	51%		
			Jumlah PPID pembantu yang sudah dilakukan monev keterbukaan informasi publik	15 OPD	-	0 OPD		5 OPD		0		0	-	0	-	0%		
			jumlah permohonan informasi publik	na		na		1 permohonan		0								
15		Layanan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	15 Layanan	1,539,600,000	5 layanan	1,485,526,500	5 layanan		5 layanan		5 layanan	-	5 layanan	1,485,526,500	33%	96.49%	
			Jumlah pertemuan jumpa pers	24 kali		6 kali		2 kali		1 kali		1 kali	-	7 kali	-	29%		

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (Target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah	6 edisi		1 edisi		0		0		0	-	0	-	0%		
		Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: terverifikasi dewan pers, terdaftar di dinas kominfo, aktif dalam kegiatan relasi media	**na**		na		8 Laporan	734,807,000	1 laporan	280,485,400	1 laporan			280,485,400	6%		
16		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 Dokumen	67,390,000	1 dokumen	9,846,000	1 dokumen		0		0	-	0	9,846,000	0%	14.61%	
			Jumlah web KIM	6 website	-	2 website		2 website		0		0	-	0	-	0%		
			Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan	3 pelatihan	-	1 pelatihan		1 pelatihan		0		0	-	0	-	0%		
		Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat	Jumlah Komunitas informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di diskominfo	na		na		2 komunitas	14,199,450	0	-	0		0		0%		

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (Target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	na		13	106,477,000			0		0		0	106,477,000	0%		
C		**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks domain tata kelola SPBE**	**3,80 Indeks**	**6,463,789,500**	**2,90 indeks**	**1,716,565,460**	**3,60 indeks**	**1,780,437,000**	**0**	**19,573,350**	**0**	**19,573,350**	**0**	**1,736,138,810**	**0%**		
VIII		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan**	**10 Aplikasi**	**6,463,789,500**	**2 aplikasi**	**1,716,565,460**	**2 aplikasi**	**1,780,437,000**	**0**	**19,573,350**	**0**	**19,573,350**	**0**	**1,736,138,810**	**0%**	**26.86%**	
			Indeks Aspek Layanan Administrasi Berbasis Elektronik	**4,10**	**-**	**3,70**												
			Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	**4,20**	**-**	**4,00**												
17		Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	833,860,800	1 dokumen	110,129,041	1 dokumen		0		0	-	1 dokumen	-	33%	0.00%	
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	10 Aplikasi	-	2 aplikasi		2 aplikasi		0		0	-	2 aplikasi	-	20%		

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (Target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			0	-	4 aplikasi	248,263,000	2 aplikasi	1,070,000	2 aplikasi	248,263,000	2 aplikasi	1,070,000	0%	0.00%	
18		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	5,629,928,700	1 dokumen	1,716,565,460	1 dokumen	-	0	-	0	-	1 dokumen	1,716,565,460	33%	30.49%	
			Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola	21 jenis	-	7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis	-	7 jenis	-	33%		
		Penyelenggaraan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Akses Internet yang di sediakan oleh dinas	na		na	1,908,819,200	23 OPD	1,532,174,000	23 OPD	18,503,350	23 OPD		23 OPD		0%	0.00%	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			**90,000,000**		**6,088,750**				**404,775**	**35%**	404,775	**35%**	6,493,525	**35%**	7.22%	
D	**Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintahan (kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan)**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas**	**100%**	**90,000,000**	**71%**	**6,088,750**	**35%**	**4,080,000**	**0%**	**404,775**	**35%**	404,775	**35%**	6,493,525	**35%**	7.22%	
IX		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan**	**3 dokumen**	**90,000,000**	**3 dokumen**	**6,088,750**	**1 dokumen**	**4,080,000**	**0**	**404,775**	**0**	**404,775**	**1 dokumen**	**6,493,525**	**33%**	**7.22%**	

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (Target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase metadata statistik sektoral yang berkualitas	**100%**		**35%**		**35%**		0%		35%	-	35%	-	35%		
19		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	90,000,000	1 dokumen	6,088,750	1 dokumen	4,080,000	0	404,775	0	404,775	**1 dokumen**	6,493,525	33%	7.22%	
			Jumlah jenis dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	9 dokumen	-	3 dokumen		3 dokumen		0		0	-	0	-	0%		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			**35,850,000**		**9,825,250**				**1,295,000**	0	1,295,000	0.379487179	11,120,250	38%	31.02%	
E		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**indeks KAMI**	**585 indeks**	**35,850,000**	**222 indeks**	**9,825,250**	**375 indeks**	**9,680,000**	**0**	**1,295,000**	**0**	1,295,000	**38%**	11,120,250	**38%**	31.02%	
X		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan**	**3 pelatihan**	**35,850,000**	**1 pelatihan**	**9,825,250**	**1 pelatihan**	**9,680,000**	**0**	**1,295,000**	**0**	1,295,000	**1 pelatihan**	11,120,250	**33%**	31.02%	
			Nilai Aspek Tata kelola Keamanan Informasi	**63 point**	**-**	**33 point**		**0**		**0**		**0**	-	**33**	-	**52%**		

No	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja tahun berjalan (Target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD s/d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=6+12		14=13/5*100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
20		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Laporan	35,850,000	1 laporan	9,825,250	1 laporan	9,680,000	0	1,295,000	0	1,295,000	1 laporan	11,120,250	33%	31.02%	
			Jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan	3 pelatihan	-	1 pelatihan				0			-		-			
					20,885,917,655	**-**	**8,202,020,031**	**-**	**4,810,847,000**	**-**	**2,184,200,863**	**11.67%**	**2,184,200,863**	**1**	**10,386,220,894**	**173%**	**29.39%**	**-**
Rata-rata capaian kinerja %											**45%**		**45%**	**0%**	**50%**			
Prediket Kinerja																		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja																		

Berdasarkan hasil tabel 2.1 rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat disimpulkan capaian kinerja Dinas Kominfo sampai dengan triwulan I pada Tahun anggaran berjalan adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil monitoring dan evaluasi pada akhir maret, untuk realisasi fisik pelaksanaan kegiatan dari target sebesar 30% baru terealisasi sebesar 23% atau dengan persentase capaian kinerja fisik sebesar 76%. Sementara itu terkait dengan realisasi keuangan, dari target sebesar 28% dapat terealisasi sebesar 19 % atau dengan capaian kinerja sebesar 68 %. Rendahnya realisasi fisik dan keuangan disebabkan adanya beberapa sub kegiatan yang mengalami refocusing anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Capaian Kinerja untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dengan Indikator kinerja program persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi sebesar 60% atau sesuai target. Dari 5 (lima) bentuk kegiatan yang dilaksanakan hanya 1 (satu) kegiatan yang capaiannya dibawah target yakni pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya dikarenakan adanya pengadaan yang tidak bisa direalisasikan terkait dengan efisiensi anggaran.
3. Capaian Kinerja Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dengan target sebesar 44,50%, untuk capaian belum bisa dihitung karena terkait dengan pelaksanaaan diseminasi informasi selama 1 (satu) tahun. Sementara untuk capaian indikator kinerja kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah follower pada laman resmi Kominfo Padang Panjang (instagram) sebanyak 28.000 follower adalah sangat baik dimana berdasarkan insight Instagram kominfo Padang Panjang jumlah followers sudah mencapai 37.403 follower atau capaian 132 %. Hal ini didukung oleh kinerja Kominfo yang massif dalam menyebarluaskan informasi kegiatan terutama sekali melalui media sosial. Untuk capaian kinerja sub kegiatan pada umumnya belum terealisasi sesuai target dikarenakan banyaknya anggaran yang mengalami efisiensi.

4. Capaian kinerja Program Aplikasi Informatika dengan indikator kinerja berupa indeks domain tata kelola SPBE sebesar 3,70 belum dapat diukur karena penilaian SPBE belum dimulai. Sementara untuk capaian kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan sebanyak 2 (dua) aplikasi, sudah terealisasi sesuai target. Kecuali untuk indikator indeks aspek layanan administrasi public dan pemerintahan berbasis elektronik termasuk yang belum bisa diukur.
5. Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator persentase data statistik sektoral yang berkualitas sebanyak 70% juga belum bisa diukur karena akan dilaksanakan diakhir tahun. Capaian indikator kegiatan penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan sebanyak 3 (tiga) dokumen, dan persentase metadata statistic sectoral yang berkualitas belum terealisasi sesuai target. Salah satu faktor penghambat tercapainya kinerja ini adalah terbatasnya jumlah SDM yang mengelola urusan Statistik.
6. Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator indeks keamanan informasi (keamanan informasi) sebesar 385 indeks, belum bisa diukur karena akan dilaksanakan diakhir tahun.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, dimana penyusunan program dan kegiatan diarahkan dalam rangka melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yakni urusan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian dan urusan Statistik.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian (Tahun)		Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026 (n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
T1	Indeks SPBE				*3*	*3,10*	*3,20*	*2,93*	*3.16*	*3.16*	*3,20*	
S1	Indeks domain layanan SPBE				2,60	2,80	2,90	3,26	2,60	2,60	2,80	
IP	Indeks domain tata kelola SPBE				3,60	3,70	3,70	2,40	3,60	3,60	3,70	
IP	Nilai indeks KAMI				375	385	385	222	375	375	385	
IP	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik				44%	44,50%	44,50%	100%	44%	44%	44,50%	
S2	Indeks domain pembangunan statistik				2,80	3,00	3,00	na	1.94	1.94	3,00	
IP	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas		√		35%	70%	70%	Na	35%	35%	70%	
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		√		100%	100%	100%	54%	100%	100%	100%	
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan		√		44%	44,5%	44,5%	100%	44%	44%	44,5%	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian (Tahun)		Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026 (n+1)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah		√		71%	78%	78%	34%	78%	78%	78%	

Dari tabel tersebut di atas, terkait dengan pencapaian indikator kinerja pelayanan pada Renstra dan Indikator Kinerja Kunci per Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Tujuan Renstra “Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah” dengan indikator kinerja Indeks SPBE. Pada Tahun 2025 indeks SPBE Kota Padang Panjang ditargetkan sebesar 3,10, sementara untuk capaian akhir tahun 2024 sudah mencapai nilai 3,16 dengan artian sudah melewati target Renja 2025. Target dan proyeksi capaian untuk perubahan renja 2025 disamakan dengan realisasi 2024 dikarenakan tidak dilaksanakannya penilaian SPBE untuk kota Padang Panjang pada tahun ini oleh Kemenpan RB.
2. Indikator Sasaran Srategis meningkatnya implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas dengan Indikator Indeks domain layanan SPBE (Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik) ditargetkan sebesar 2,80 , sementara untuk capaian tahun 2024 sudah didapat nilai 3,26 atau sudah melebihi target Renja pada tahun 2025. Target dan proyeksi capaian untuk perubahan renja 2025 disamakan dengan realisasi 2024 dikarenakan tidak dilaksanakannya penilaian SPBE untuk kota Padang Panjang pada tahun ini oleh Kemenpan RB.
3. Indikator Sasaran Srategis Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintah (kualitas,pengelolaan dan pemanfaatan) dengan Indikator Indeks Pembangunan Statistik dengan target indeks 3,00, Untuk Indeks ini capaian pada tahun 2024 baru mencapai 1,94 . Target dan proyeksi capaian untuk perubahan renja 2025 disamakan dengan realisasi 2024 dikarenakan tidak dilaksanakannya penilaian IPS untuk kota Padang Panjang pada tahun ini oleh BPS.
4. Indikator kinerja kunci (IKK) terkait dengan pelaksanaan urusan wajib pemerintahan terkait kominfo, statistik dan persandian, capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut :
    a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dengan target 100%, pada tahun 2024 sudah mencapai target begitu juga pada tahun 2025.
    b. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi, pada tahun 2024 baru terealisasi sebesar 78,6%. Adapun penyebab rendahnya capaian kinerja pada indikator ini terkait dengan masih adanya kendala mengintegrasikan beberapa layanan publik Pada Tahun 2025 indikator ini ditargetkan sebesar 100% dan hasilnya baru akan diperoleh pada akhir tahun 2025.
    c. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pada tahun 2024 sudah terealisasi sebesar 99,8%, sementara untuk tahun 2025 diproyeksikan akan sesuai target dan hasilnya baru akan diperoleh pada akhir tahun.

d. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, pada tahun 2024 sudah terealisasi sebesar 100%, sementara untuk tahun 2025

   diproyeksikan akan sesuai target dan hasilnya baru akan diperoleh pada akhir tahun.

e. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah, pada tahun 2023 sudah terealisasi sebesar 100%, sementara untuk tahun 2024 diproyeksikan akan sesuai target dan hasilnya baru akan diperoleh pada akhir tahun 2024.

f. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah, pada tahun 2024 pencapaian indikator ini berada dibawah target dimana dari target sebesar 52 baru terealisasi 34,42. Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur pengamanan informasi yang dimiliki oleh Kota Padang Panjang. Sementara itu untuk capaian 2025 diproyeksikan sesuai target yakni sebesar 57.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Kominfo dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya Penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital	Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Digital	1. Tidak tersedianya dokumen perencanaan strategis SPBE (Arsitektur dan Peta Rencana). 2. Masih terbatasnya skalabilitas koordinasi internal
		Belum optimalnya pengelolaan layanan publik prioritas dan administrasi pemerintah berbasis digital	Masih adanya sistem informasi layanan publik dan administrasi pemerintah yang belum terintegrasi
		Penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur TI belum memadai	1. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur dan pengelolaTeknologi Informasi 2. Terjadinya gangguan keamanan informasi (*cyber attack)*
		Masih rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia Digital	1. Terbatasnya upaya peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, dan workshop digitalisasi
2	Belum Optimalnya Keterbukaan Informasi Publik pemerintah daerah	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas informasi publik	1. Terbatasnya konten informasi yang berkualitas, inklusif dan partisipatif 2. Belum optimalnya pengelolaan media komunikasi publik pemerintah daerah melalui medsos, website, dan media luar ruang.

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			3. Perlunya penguatan kerjasama dengan media dalam rangka publikasi informasi pembangunan 4. Masih rendahnya kapasitas pranata humas yang ada di OPD sehingga publikasi informasi masih terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika
		Belum optimalnya pelayanan permohonan informasi publik	1. Terbatasnya ketersediaan Daftar Informasi Publik 2. Belum optimalnya peran PPID pembantu (OPD) dalam mengelola informasi
		Belum optimalnya pengelolaan layanan pengaduan masyarakat	1. Belum tersedianya regulasi/tatakelola layanan pengaduan 2. Masih minimnya sosialisasi dan informasi keberadaan kanal aduan 3. Perlunya meningkatkan koordinasi lintas OPD untuk pengelolaan pengaduan yang responsif
3	Terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Belum optimalnya tata Kelola statistik sektoral	1. Belum tesedianya kebijakan tentang penerapan Aspek Standar Data, Metadata, Interoperabilitas, dan Kode Referensi yang berlaku bagi seluruh Produsen Data 2. Belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi penyelenggara

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			statistik sektoral 3. Terbatasnya Kompetensi SDM pengelola statistik
4.	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Belum optimalnya capaian kinerja OPD	1. Masih rendahnya pemahaman dan komitmen organisasi terkait dengan penjenjangan kinerja 2. Belum tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang berkualitas. 3. Terbatasnya skalabilitas monitoring dan evaluasi kinerja. 4. Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar pengambilan keputusan.

Dari tabel di atas, beberapa isu strategis yang ada pada Dinas Kominfo dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital, terutama dalam integrasi penyelenggaraan layanan publik ke dalam satu aplikasi yang dapat mempermudah akses layanan publik, informasi daerah, promosi pariwisata, dan pengaduan warga secara cepat dan transparan melalui aplikasi Padang Panjang Barcode.
2. Belum Optimalnya Keterbukaan Informasi Publik pemerintah daerah, terkait dengan masih rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia terutama di OPD dalam menyediakan konten informasi dan mempublikasikan informasi melalui media.
3. Kualitas dan validitas data statistik sektoral sebagai dasar dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan, membutuhkan peningkatan kapasitas pengelola data baik yang ada di Dinas Kominfo sebagai walidata dan OPD sebagai penyedia data.
4. Masih rendahnya kesadaran terhadap pengamanan informasi dan seringnya terjadi serangan cyber (cyberattack).

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang melaksanakan 5 (lima) program dengan 9 (Sembilan) kegiatan dan 18 (Delapan Belas) sub kegiatan dengan Pagu Indikatif Rp. 7.505.913.153. Dibandingkan dengan renja tahun 2025 terdapat pengurangan 1 (satu) sub kegiatan. Review terhadap rancangan perubahan RKPD Tahun 2025 dan hasil analisa kebutuhan untuk perubahan Anggaran 2025 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Rancangan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Perubahan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
				Semula	Menjadi	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					**8,377,522,415**	**6,817,115,209**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**8,848,844,809**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**8,377,522,415**	**6,817,115,209**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**8,848,844,809**	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					**8,297,636,415**	**6,807,760,209**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**8,289,489,809**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika**	**100 Persen**	**100 Persen**	**5,346,475,965**	**5,145,515,809**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika**	**100 Persen**	**5,152,225,909**	
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**3,518,508,865**	**3,518,508,865**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**3,518,508,865**	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392 Orang/ bulan	392 Orang/ bulan	3,518,508,865	3,518,508,865	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392 Orang/ bulan	3,518,508,865	

Kode	Rancangan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Perubahan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
				Semula	Menjadi	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**278,455,100**	**120,169,575**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 persen**	**120,169,575**	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7,921,500	4,750,440	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,750,440	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	31,778,000	15,888,510	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	15,888,510	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	16,969,000	5,138,725	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	5,138,725	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	221,786,600	94,391,900	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	94,391,900	

Kode	Rancangan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Perubahan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
				Semula	Menjadi	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	**100 persen**	**100 persen**	**12,300,000**	**6,289,900**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	**100 persen**	**13,000,000**	
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	12,300,000	12.300.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	13,000,000	BM pencacah kertas
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1,393,254,000**	**1,389,696,269**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**	**1,389,696,269**	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	107,030,000	103,600,269	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	103,600,269	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1,286,224,000	1,170.249.048	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,286,096,000	

Kode	Rancangan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Perubahan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
				Semula	Menjadi	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**143,958,000**	**O2143.958.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 Persen**	**110,851,200**	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	91,280,000	73,127,200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	73,127,200	
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	26,908,000	13,454,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	13,454,000	
2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2 unit	25,770,000	24,270,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	24,270,000	

Kode	Rancangan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Perubahan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
				Semula	Menjadi	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik**	**44,50 Persen**	**44,50 Persen**	**1,370,723,450**	**802,717,400**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**		**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik**	**44,50 Persen**	**1,477,736,900**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)**	**28.000 followers**	**28.000 followers**	**1,370,723,450**	**802,717,400**	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)**	**28.000 followers**	**1,477,736,900**	
2 16 02 2.01 0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria / juknis	4 Media	4 Media	168,471,000	21,649,900	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria / juknis	4 Media	21,649,900	
2 16 02 2.01 0017	Pelayanan Informasi Publik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 permohonan	1 permohonan	13,246,000	3,552,000	Pelayanan Informasi Publik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 permohonan	32,077,000	penambahan BM PC dan Laptop untuk progul pengelolaan Kanal lapor pengaduan warga sebesar Rp. 28.525.000

Kode	Rancangan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Perubahan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
				Semula	Menjadi	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 16 02 2.01 0014	Relasi Media	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : terverifikasi dewan pers, terdaftar didinas kominfo, aktif dalam kegiatan relasi media	8 Laporan	8 Laporan	1,174,807,000	777,515,500	Relasi Media	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : terverifikasi dewan pers, terdaftar didinas kominfo, aktif dalam kegiatan relasi media	8 Laporan	1,424,010,000	kecukupan belanja spanduk dan media Rp.646.494.500
2 16 02 2.01 0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan Informasi dan terdaftar di diskominfo	2 Komunitas	0 komunitas	14,199,450	-	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan Informasi dan terdaftar di diskominfo	0 komunitas	-	dihilangkan terkait refocusing
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**		**Indeks domain tata kelola SPBE**	**3,70 Indeks**	**3,70 Indeks**	**1,580,437,000**	**859,527,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**		**Indeks domain tata kelola SPBE**	**3,70 Indeks**	**1,659,527,000**	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan**	**4 aplikasi**	**4 aplikasi**	**1,580,437,000**	**859,527,000**	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan**	**4 aplikasi**	**1,659,527,000**	

Kode	Rancangan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Perubahan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
				Semula	Menjadi	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	**3,90**	**3,90**					**Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**	**3,90**		
			Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	**4,00**	**4,00**					**Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**	**4,00**		
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	4 Aplikasi	4 Aplikasi	248,263,000	14,685,000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	4 Aplikasi	14,685,000	
	Penyelenggaraan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	1,332,174,000	844,842,000	Penyelenggaraan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas	23 Perangkat Daerah	1,644,842,000	penambahan internet 5 bulan, video wall CC 3 unit @100.000.000
2.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**					**19,480,000**	**5,505,000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**5,505,000**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		**Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas**	**70 Persen**	**70 Persen**	**19,480,000**	**5,505,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**		**Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas**	**70 Persen**	**5,505,000**	

Kode	Rancangan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Perubahan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
				Semula	Menjadi	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan**	**3 dokumen**	**3 dokumen**	**19,480,000**	**5,505,000**	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan**	**3 dokumen**	**5,505,000**	
			Persentase Metadata Statistik Sektoral yang berkualitas	**70%**	**70%**					**Persentase Metadata Statistik Sektoral yang berkualitas**	**70%**		
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik untuk Perencanaan ,Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan atau Penyusunan Kebijakan	100 Persen	100 persen	19,480,000	5,505,000	Peningkatan peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik untuk Perencanaan ,Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan atau Penyusunan Kebijakan	100 Persen	5,505,000	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**					**60,406,000**	**3,850,000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**553,850,000**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**indeks KAMI**	**385 indeks**	**385 Indeks**	**60,406,000**	**3,850,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**indeks KAMI**	**385 indeks**	**553,850,000**	

Kode	Rancangan RKPD							Hasil Analisa Kebutuhan					
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Perubahan	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
				Semula	Menjadi	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan**	**1 pelatihan**	**1 pelatihan**	**60,406,000**	**3,850,000**	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan**	**1 pelatihan**	**553,850,000**	
			Nilai Aspek Tata Kelola Keamanan Informasi		**57**					**Nilai Aspek Tata Kelola Keamanan Informasi**	**57**		
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	60,406,000	3,850,000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	553,850,000	Belanja Firewall @550.000.000

Dibandingkan dengan pagu pada APBD awal TA 2025 sebesar Rp 8.377.522.415,- yang mengalami refocusing melalui pergeseran APBD menjadi Rp. 6.817.115.209 terjadi penambahan belanja sebesar Rp.531.295.618. Penambahan belanja tersebut dialokasikan pada penambahan kecukupan belanja internet selama 5 (lima) bulan dan penambahan belanja infrastruktur yang mendukung pada Program Unggulan Kepala Daerah terpilih.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam proses penyusunan perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kominfo juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Pada Musrenbang RKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.1.1 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Statistik Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kominfo, Persandian dan Statistik Sektoral yang bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat tahun 2021-2026, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumatera Barat sebagai Provinsi yang Clean Government;
2. Meningkatkan sebaran informasi kebijakan dan program prioritas dan strategis pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;
3. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang untuk Pembangunan Daerah;
4. Mewujudkan penyelenggaraan Persandian untuk keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE;

5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

Tabel 3.1
Permasalahan dan Isu Strategis Renstra Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No.	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan 2021-2026
1.	Belum optimalnya implementasi SPBE.	a. perlunya intervensi pemerintah pusat dan provinsi dalam mengatasi blank spot dan pengembangan taman digital dengan bekerjasama dengan pihak ketiga, b. optimalisasi keterlibatan provider dengan kabupaten/Kota dalam menyediakan akses layanan telekomunikasi c. pemerintah provinsi akan memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dalam mendorong meningkatkan nilai indeks SPBE (terutama pada Kabupaten/Kota yang nilai indeks SPBEnya pada kategori kurang/cukup) d. pemanfaatan SPLP dan mall multidomain.	Terwujudnya Implementasi SPBE.

2.	Belum optimalnya penyebaran informasi publik	a. Mengupayakan integrasi layanan call ceter yang sudah ada ke dlam satu layanan call center terpadu. b. mendorong integrasi situs PPID Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung penilaian keterbukaan informasi publik. c. optimalisasi peran dan kinerja diskominfo sebagai leading sektor dalam pengelolaan SP4N LAPOR d. mendukung kebijakan pembentukan Komisi Informasi di Kabupaten/Kota.	Meningkatnya Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas dan startegis pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
3.	Belum tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas	a. penguatan fungsi walidata pendukung pada setiap OPD, b. menjadikan Indeks Penyelenggaraan Statistik menjadi Indikator Kinerja Daerah pada tahap RPJMD berikutnya serta integrasi aplikasi BPS dengan portal satu data,	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang lengkap dan berkualitas.
4.	Belum optimalnya pelaksanaan pengamanan informasi Pemerintah Daerah	Mengarahkan dan memfasilitasi kabupaten/kota yang belum memiliki CSIRT agar menyiapkan data dan kebutuhan persiapan peluncuran CSIRT	Terwujudnya penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi Pemerintah Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kominfo

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas, akuntabel, serta mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang selaras dengan sasaran RPJMD 2025–2029. Dinas Komunikasi dan informatika berperan dalam mendukung pelaksanaan Misi ke-3 yakni ***"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif"***, dengan sasaran **Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.** Sasaran ini sekaligus menjadi tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode Renstra 2025-2029. Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel. 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo Tahun 2025-2029

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET		KET
						RENSTRA 2025-2029 (Tahun 2025)	PERUBAHAN RENJA 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital		Indeks SPBE	Angka	3.16	3.16	3.16	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Angka	70.90	71	71	
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka	30.70	30.70	30.70	
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik pemerintah daerah	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	80.90	81	81	
		Terwujudnya Layanan Statistik Akurat dan Dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik	Angka	1.94	1.94	1.94	

3.3 Program dan Kegiatan

Pada perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang merencanakan untuk melaksanakan 5 (lima) program dengan 9 (Sembilan) kegiatan dan 18 (Delapann Belas) sub kegiatan. Sedikit berbeda dengan RKPD 2025, pada perubahan RKPD 2025 terdapat pengurangan 1 (satu) sub kegiatan pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yakni Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat, hal ini terkait dengan terjadinya efisiensi anggaran pada awal tahun 2025.

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Kota Padang Panjang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2025		PAGU		Lokasi	Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Semula	Menjadi	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8,377,522,415	6,817,115,209				6,205,577,427
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8,377,522,415	6,817,115,209				
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8,297,636,415	6,807,760,209				6,196,222,427
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	100 Persen	100 Persen	5,346,475,965	5,145,515,809			100 Persen	5,233,987,827
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	100 persen	3,518,508,865	3,518,508,865			100 persen	3,614,842,727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392 Orang/bulan	392 Orang/bulan	3,518,508,865	3,518,508,865	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	350 Orang/bulan	3,614,842,727
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**278,455,100**	**120,169,575**			**100 Persen**	**128,891,900**
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7,921,500	4,750,440	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Paket	3,000,000
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	31,778,000	15,888,510	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Paket	10,000,000
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	16,969,000	5,138,725	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Paket	5,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	221,786,600	94,391,900	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24 Laporan	110,891,900
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	**100 persen**	**100 persen**	**12,300,000**	**6,289,900**			**100 Persen**	**7,000,000**
2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	12,300,000	6,289,900	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	7,000,000
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							1 Unit	7,000,000
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1,393,254,000**	**1,389,696,269**			**100 Persen**	**1,393,126,000**
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	107,030,000	103,600,269	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36 Laporan	107,030,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1,286,224,000	1,286,096,000	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	1,286,096,000
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 Persen**	**100 Persen**	**143,958,000**	**110,851,200**			**100 Persen**	**83,127,200**
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	91,280,000	73,127,200	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Unit	73,127,200
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	26,908,000	13,454,000	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	10,000,000
2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	54 Unit	54 Unit	25,770,000	24,270,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik**	**44,50 Persen**	**0.00%**	**1,370,723,450**	**802,717,400**			**0.00%**	**962,234,600**
		Persentase kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	**na**	**77**					**78**	

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)**	**28.000 followers**	**na**	**1,370,723,450**	**802,717,400**			**0**	**962,234,600**
		Persentase capaian pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	**na**	**100%**					**100%**	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria / juknis	4 Media	4 Media	168,471,000	21,649,900	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Media	68,167,100
2.16.02.2.01	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 permohonan	12 permohonan	13,246,000	3,552,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 permohonan	6,552,000
2.16.02.2.01	Relasi Media	Jumlah Aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : terverifikasi dewan pers, terdaftar didinas kominfo, aktif dalam kegiatan relasi media	8 Laporan	60 laporan	1,174,807,000	777,515,500	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60 laporan	887,515,500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.16.02.2.01	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan Informasi dan terdaftar di diskominfo	2 Komunitas	0	14,199,450	-	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0	
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks domain tata kelola SPBE**	**2.90 Indeks**	**2.90 Indeks**	**1,580,437,000**	**859,527,000**			**0 Indeks**	
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan**	**4 aplikasi**	**0**	**1,580,437,000**	**859,527,000**		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**0**	
		Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	**3,90**	**0**				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**0**	
		Indeks Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	**4,00**	**0**				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**0**	
		Persentase capaian pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah	**0**	**100%**					**100%**	
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	4 Aplikasi	1 aplikasi	248,263,000	14,685,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 aplikasi	

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.16.03.2.02.0030	Penyelenggaraan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	1,332,174,000	844,842,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Perangkat Daerah	
2.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**19,480,000**	**5,505,000**				**5,505,000**
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas**	**70%**	**0%**	**19,480,000**	**5,505,000**			**0%**	**5,505,000**
		Nilai domain prinsip SDI		**2.5**					**2.5**	
		Nilai domain kualitas		**2.3**					**2.7**	
		Nilai domain proses bisnis		**2.7**					**2.92**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	**3 dokumen**	**0**	**19,480,000**	**5,505,000**			**0**	**5,505,000**
		Persentase Metadata Statistik Sektoral yang berkualitas	**70%**	**0%**					**0%**	
		Persentase capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah		**100%**					**100%**	
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik untuk Perencanaan,Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan atau Penyusunan Kebijakan	100 Persen	100 persen	19,480,000	5,505,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	5,505,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**60,406,000**	**3,850,000**				**3,850,000**
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**indeks KAMI**	**385 indeks**	**0**	**60,406,000**	**3,850,000**			**0**	**3,850,000**
		Tingkat Kematangan penerapan manajemen keamanan informasi	**na**	**82**					**87**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan**	**1 pelatihan**	**0**	**60,406,000**	**3,850,000**			**0**	**3,850,000**
		Nilai Aspek Tata Kelola Keamanan Informasi	**57**	**0**					**0**	
		Persentase capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	**na**	**100**					**100**	
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	60,406,000	3,850,000	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	3,850,000

Berdasarkan tabel di atas, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 dapat dirinci sebagai berikut :

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**,
   a. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
      i. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
   b. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,** dengan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
      i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
      ii. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      iii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      iv. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
   c. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
      i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
   d. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:**
      i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
      ii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
   e. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan 3 (tiga) sub kegiatan antara lain :
      i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
      ii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
      iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2) **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :
   a. **Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan 4 sub kegiatan, antara

lain :

i. Pengelolaan Media Komunikasi.
ii. Pelayanan Informasi Publik.
iii. Relasi Media.

3) **Program Aplikasi Informatika** dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

   a. **Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

      i. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
      ii. Penyelenggaraan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE.

4) **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** dengan 1 (satu) kegiatan yaitu:

   a. **Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

      i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

5) **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi** dengan 1 (satu) kegiatan yaitu:

   a. **Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

      i. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Perubahan Anggaran Tahun 2025 sesuai SIPD dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 3.4

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

Tabel 3.4

Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Padang Panjang

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**8,153,848,881**	**8,377,522,415**	**7,505,913,153**							**8.110.273.711,00**	
	2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8,153,848,881**	**8,377,522,415**	**7,505,913,153**							**8.110.273.711,00**	
	2.16.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**8,153,848,881**	**8,377,522,415**	**7,505,913,153**							**8.030.387.711,00**	
93	**2.16.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**5,322,794,431**	**5,346,475,965**	**4,934,313,753**							**5.279.219.261,00**	
	2.16.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**3,466,728,931**	**3,518,508,865**	**3,423,153,761**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**3.423.153.761,00**	**Kominfo**
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2282 Orang/bulan		392 Orang/bulan	392 Orang/bulan	392 Orang/bulan	3,466,728,931	3,518,508,865	3,423,153,761	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			3.423.153.761,00	Kominfo
	2.16.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**306,553,500**	**278,455,100**	**120,169,575**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**306.553.500,00**	**Kominfo**
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	7,921,500	7,921,500	4,750,440	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			7.921.500,00	Kominfo
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	31,778,000	31,778,000	15,888,510	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			31.778.000,00	Kominfo
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket	16,969,000	16,969,000	5,138,725	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			16.969.000,00	Kominfo
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	249,885,000	221,786,600	94,391,900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			249.885.000,00	Kominfo

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	2.16.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**12,300,000**	**12,300,000**	**6,289,900**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**12.300.000,00**	**Kominfo**
	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit		Unit	5 Unit	2 unit	12,300,000	12,300,000	6,289,900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			12.300.000,00	Kominfo
	2.16.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1,393,254,000**	**1,393,254,000**	**1,273,849,317**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**1.393.254.000,00**	**Kominfo**
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	107,030,000	107,030,000	103,600,269	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			107.030.000,00	Kominfo
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,286,224,000	1,286,224,000	1,170,249,048	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			1.286.224.000,00	Kominfo
	2.16.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**143,958,000**	**143,958,000**	**110,851,200**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**143.958.000,00**	**Kominfo**
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		1 Unit	7 Unit	7 Unit	91,280,000	91,280,000	73,127,200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			91.280.000,00	Kominfo
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	26,908,000	26,908,000	13,454,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			26.908.000,00	Kominfo
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	174 Unit		30 Unit	54 Unit	54 Unit	25,770,000	25,770,000	24,270,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			25.770.000,00	Kominfo
94	**2.16.02.**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)**	**82 %**		**NA %**	**44,50 %**	**77 %**	**970,731,450**	**1,370,723,450**	**1,202,717,400**							**970.731.450,00**	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	2.16.02.2.01.	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase capaian kegiatan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah**	**82 %**		**NA %**	**NA %**	**100%**	**970,731,450**	**1,370,723,450**	**1,202,717,400**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**null**		**970.731.450,00**	**Kominfo**
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	249 Laporan		60 Laporan	8 Laporan	60 Laporan	734,807,000	1,174,807,000	1,127,515,500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			734.807.000,00	Kominfo
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				2 Komunitas	0	14,199,450	14,199,450	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			14.199.450,00	Kominfo
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	64 Permohonan		NA Permohonan	1 Permohonan	12 Permohonan	13,246,000	13,246,000	3,552,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			13.246.000,00	Kominfo
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	22 Media		4 Media	4 Media	4 Media	208,479,000	168,471,000	71,649,900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			208.479.000,00	Kominfo
95	**2.16.03.**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks Domain Tata Kelola SPBE**	**2.90 angka**		**2.90 angka**	**2.90 angka**	**2.90 angka**	**1,780,437,000**	**1,580,437,000**	**1,359,527,000**							**1.780.437.000,00**	
			Nilai aspek strategi dan rencana	**1,66 Angka**		**NA Angka**		**NA Angka**											
			Nilai aspek tata kelola	**2,35 Angka**		**NA Angka**		**NA Angka**											
			Nilai aspek teknologi digital	**3,66 Angka**		**NA Angka**		**NA Angka**											
	2.16.03.2.02.	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan e-government**	**100 persen**		**NA persen**	**NA persen**	**100 persen**	**1,780,437,000**	**1,580,437,000**	**1,359,527,000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**null**		**1.780.437.000,00**	**Kominfo**
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	12 Aplikasi		NA Aplikasi	4 Aplikasi	1 Aplikasi	248,263,000	248,263,000	14,685,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			248.263.000,00	Kominfo

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	23 Perangkat Daerah		23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	1,532,174,000	1,332,174,000	1,344,842,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			1.532.174.000,00	Kominfo
	2.20.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**19,480,000**	**19,480,000**	**5,505,000**							**19.480.000,00**	
96	**2.20.02.**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Nilai domain prinsip SDI**	**3,6 Angka**		**2,5 Angka**	**NA**	**2,5 Angka**	**19,480,000**	**19,480,000**	**5,505,000**							**19.480.000,00**	
			Nilai domain kualitas	**3,5 Angka**		**2,3 Angka**	**NA**	**2,3 Angka**											
			Nilai domain proses bisnis	**3,6 Angka**		**2,7 Angka**	**NA**	**2,7 Angka**											
	2.20.02.2.01.	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase capaian penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah**	**100 Persen**		**NA Persen**	**NA Persen**	**100 Persen**	**19,480,000**	**19,480,000**	**5,505,000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**null**		**19.480.000,00**	**Kominfo**
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 %		0 %	100 %	100 %	19,480,000	19,480,000	5,505,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			19.480.000,00	Kominfo
	2.21.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**60,406,000**	**60,406,000**	**3,850,000**							**60.406.000,00**	
97	**2.21.02.**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi**	**100 Nilai**		**78 Nilai**	**NA**	**82 Nilai**	**60,406,000**	**60,406,000**	**3,850,000**							**60.406.000,00**	
	2.21.02.2.01.	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase capaian penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**100 persen**		**NA persen**	**NA persen**	**100 persen**	**60,406,000**	**60,406,000**	**3,850,000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**null**		**60.406.000,00**	**Kominfo**
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	60,406,000	60,406,000	3,850,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			60.406.000,00	Kominfo

Dalam perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025, dibandingkan dengan renja Awal terdapat pengurangan 1 (satu) sub kegiatan pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yakni Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat. Pengurangan Sub Kegiatan ini terkait dengan terjadinya efisiensi anggaran pada awal tahun 2025, sehingga penganggaran diutamakan pada sub kegiatan pendukung program prioritas dan indikator kinerja utama perangkat daerah. Dengan pengurangan tersebut, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan renja 2025 meliputi 5 (lima) program dengan 9 (Sembilan) kegiatan dan 18 (Delapan belas) sub kegiatan.

Sementara itu untuk indikator terdapat beberapa penyesuaian terhadap target kinerja yang disebabkan oleh berbagai pertimbangan atas kondisi yang terjadi terutama terkait dengan keterbatasan anggaran. Lebih lanjut masing masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**, Indikator kinerja untuk program ini adalah persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi sebesar 100%. Program ini dirinci dalam 5 (lima) bentuk kegiatan, antara lain sebagai berikut.
    a. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja persentase layanan keuangan perangkat daerah sebanyak 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
        i. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 392 orang/bulan.
    b. **Administrasi Umum Perangkat Daerah,** dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :
        i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 4 paket.

ii. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 6 paket.

iii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 4 paket

iv. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD sebanyak 24 laporan.

c. **Pengadaan Barang Milik Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan indikator kinerja persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan sebanyak 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya, indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lain yang disediakan sebanyak 2 unit.

d. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan indikator kinerja persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah sebesar 100%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan antara lain:

i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 36 laporan.

ii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 12 laporan.

e. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan indikator kinerja persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan antara lain :

i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator kinerja jumlah kendaraan dinas yang di pelihara sebanyak 7 unit (3 unit roda 4 dan 4 unit roda 2).

ii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja jumlah gedung kantor yang dipelihara sebanyak 1 (satu) unit.

iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 54 (lima puluh empat) unit.

2. **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** dengan indikator kinerja Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei) dengan target 77%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:

   a. **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator Persentase capaian kinerja Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dengan target sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, antara lain :

      i. Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan indikator kinerja jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria / juknissebanyak 4 media.

      ii. Pelayanan Informasi Publik dengan indikator kinerja Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan sebanyak 13 permohonan.

      iii. Relasi Media dengan indikator Jumlah Aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : terverifikasi dewan pers, terdaftar didinas kominfo, aktif dalam kegiatan relasi media sebanyak 60 laporan.

3. **Program Aplikasi Informatika** dengan indikator kinerja berupa indeks domain tata kelola SPBE sebesar 2.90. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

   a. **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase capaian kinerja Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah dengan target sebesar 100%.

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

i. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah sebanyak 1 (satu) aplikasi,

ii. Penyelenggaraan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE dengan indikator kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas sebanyak 23 OPD.

4. **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** dengan indikator nilai domain prinsip SDI sebesar 2.5, nilai domain kualitas sebesar 2.3 dan nilai domain proses bisnis dengan nilai 2.7. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

   a. **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Persentase capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

      i. Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik untuk Perencanaan,Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan atau Penyusunan Kebijakan sebanyak 100%.

5. **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi** dengan indikator tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi dengan target nilai sebesar 82. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu

   a. **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja persentase capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan target 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

      i. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan indikator kinerja jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik sebanyak 1 laporan.

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025, disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja pada triwulan I sekaligus adaptasi terhadap perkembangan yang terjadi dalam rangka proses transisi dari Renstra RPD tahun 2024-2026 ke Renstra tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut dilakukanlah analisa terhadap berbagai faktor dan kondisi yang mungkin akan berpengaruh pada pencapaian pelaksanaan program/kegiatan serta menyusun ulang target yang lebih realistis guna pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dari hasil evaluasi yang dilakukan, maka pada Perubahan anggaran tahun 2025 ini Dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan 5 (lima) program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan. Sedikit berbeda dengan Renja Tahun 2025, pada perubahan ini terdapat pengurangan 1 (satu) sub kegiatan dan penyesuaian pada beberapa target kinerja. Penyesuaian dan rasionalisasi anggaran dibeberapa sub kegiatan terpaksa dilakukan terkait dengan keterbatasan/refocusing anggaran pada awal tahun 2025. Banyak upaya tetap harus dilakukan agar capaian kinerja tetap dapat maksimal diakhir periode Renstra 2024-2026.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini dibuat, untuk dapat jadi pedoman dan acuan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, Juni 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Drs. AMPERA, SH, M.Si
NIP.19680101 199803 1 010

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG

KATA PENGANTAR

Rasa puji dan syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan “Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025” dimana kami telah berupaya sedapat mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan Kota Padang Panjang melalui Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.

Penyusunan Rencana Kerja suatu instansi pemerintah daerah mutlak dilakukan karena merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Oleh sebab itu, maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 ini disusun untuk menjadi bagian dari upaya mewujudkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Iklim Investasi yang Kondusif , Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja yang Maju, Mandiri dan Islami”. Diharapkan agar target yang telah direncanakan dapat terpenuhi di setiap tahun anggaran sehingga visi tersebut dapat tercapai.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan Perubahan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025. Semoga Allah SWT memberkahi usaha yang telah kita laksanakan ini.

Padang Panjang, Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG

FHANDY RAMADHONA, S.STP, MM

Pembina, IV/a. NIP. 19850609 200412 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I 5
PENDAHULUAN 5
1.1. LATAR BELAKANG 5
1.2. LANDASAN HUKUM 6
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 8
BAB II 10
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 10
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 10
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 16
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 18
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025 22
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT TAHUN 2025 32
BAB III 34
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 34
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL/PROVINSI 34
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 44
3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 46
BAB IV 61
PENUTUP 61

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 11
Tabel 2. 2 17
Tabel 2. 3 20
Tabel 2. 4 23
Tabel 2. 5 32

Tabel 3. 1 36
Tabel 3. 2 1
Tabel 3. 3 40
Tabel 3. 4 41
Tabel 3. 5 42
Tabel 3. 6 42
Tabel 3. 7 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana pada ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa "(1)*Kepala perangkat daerah menyusun rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan rancangan perubahan RKPD" (*2) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada :

a. perubahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi;
b. evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
c. capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
d. perubahan asumsi dasar; dan/atau
e. kebijakan anggaran dan pagu indikatif perubahan.

Latar belakang perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah umumnya didasari oleh berbagai faktor yang memengaruhi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan tahunan. Berikut ini adalah beberapa poin yang biasa menjadi latar belakang perubahan Renja:

a. Perubahan Kebijakan Nasional, Provinsi, atau Daerah
    - Adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi yang harus diakomodasi dalam rencana kerja.
    - Penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang mengalami revisi atau perubahan arah prioritas.
b. Keterbatasan atau Perubahan Anggaran
    - Alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan rencana awal, baik karena pengurangan, efisiensi, atau refocusing anggaran
c. Evaluasi dan Hasil Musrenbang
d. Masukan dari masyarakat, DPRD, maupun hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang menuntut adanya perubahan pada program/kegiatan.
e. Hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya yang menunjukkan perlunya perbaikan strategi atau penyesuaian target.

Penyusunan Perubahan Rencana KerjaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dilatarbelakangi oleh perlunya penyesuaian terhadap beberapa kondisi aktual yang terjadi di lapangan. Di antaranya adalah perubahan asumsi dasar perencanaan, adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat dan/atau daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan pertengahan tahun. Selain itu, perkembangan situasi ekonomi dan kebutuhan pelayanan investasi yang dinamis turut mendorong perlunya revisi terhadap target dan strategi pelaksanaan program.

Penyesuaian ini diperlukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP tetap berjalan optimal, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025.

Oleh karena itu, Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 disusun sebagai dasar perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan pada semester kedua tahun anggaran, serta menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2025.

Adapun proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada pasal 344-347 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan	Dasar Hukum
Evaluasi capaian sampai triwulan II	Pasal 344
Identifikasi perubahan arah kebijakan dan pagu anggaran	Pasal 343
Penyusunan rancangan perubahan Renja	Pasal 345
Konsultasi/fasilitasi ke Bappeda	Pasal 346
Penetapan Renja Perubahan oleh Kepala Perangkat Daerah	Pasal 347

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini adalah:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
j. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
k. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
l. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
n. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 7 Agustus 2023 sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
p. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045;
q. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032;
r. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019;

s. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dari Walikota Padang Panjang Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang; Peraturan Walikota;

t. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 105 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2025;

u. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman operasional pelaksanaan program dan kegiatan yang mengalami penyesuaian terhadap kondisi aktual, kebijakan, serta capaian kinerja hingga pertengahan tahun anggaran berjalan. Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan tetap relevan, adaptif, serta mampu menjawab dinamika pembangunan daerah.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana KerjaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Melakukan penyesuaian terhadap program, kegiatan, dan anggaran berdasarkan perubahan asumsi dasar perencanaan, kebijakan nasional/daerah, serta hasil evaluasi capaian pelaksanaan sampai triwulan II tahun berjalan.
2. Menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan perubahan RKPD,
3. Serta sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P)
4. Sebagai acuan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAN

2.1 Evaluasi Renja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

BAB III. Penentuan RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program dan Kegiatan

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Dalam melakukan penyusunan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2025, perlu diperhatikan hasil evaluasi Pelaksanaan Triwulan I Renja 2025. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai triwulan I 2025.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan kondisi Triwulan I pada tahun berkenan adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi.

Secara umum pelaksaaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 terdiri dari 7 (tujuh) program dan 13 (tiga belas) kegiatan. evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Evaluasi Terhadap hasil renja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota padang Panjang

Periode pelaksanaan : Januari s/d Maret 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)/ sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi CapaianKinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 6+9		11 = 10/5*100%	
				K	RP	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
		DPMPTSP							**5.786.228.743**		**915.999.435**						
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi**	**100%**	**3.048.400.540**	**100%**	**4.275.163.051**	**100%**	**4.156.003.993**	**100%**	**915.999.435**	**100%**	**915.999.435**	**100%**	**5.191.162.486**	**100%**	**170%**
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase layanan keuangan perangkat daerah**	**100%**	**2.415.293.540**	**100%**	**3.113.420.351**	**100%**	**2.867.627.593**	**100%**	**760.913.538**	**100%**	**760.913.538**	**100%**	**3.874.333.889**	**100%**	**160%**
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 orang/bulan	2.415.293.540	336 orang/bulan	3.113.420.351	336 orang/bulan	2.867.627.593	88 orang/bulan	760.913.538	88 orang/bulan	760.913.538	424 orang/bulan	3.874.333.889	126%	160%
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase layanan administrasi perangkat daerah**	**100%**	11.000.000	100%	11.000.000	100%	**-**	0%	-	**-**	**-**	**100%**	**11.000.000**	**100%**	**100%**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 paket	11.000.000	22 paket	11.000.000	22	-	-	-	0 paket	-	22 paket	11.000.000	100%	100%
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan pelayanan adminitrasi perkantoran**	**100%**	**300.000.000**	**100%**	**380.651.587**	**100%**	**297.337.600**	**100%**	**36.659.142**	**100%**	**36.659.142**	**100%**	**417.310.729**	**100%**	**139%**
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	3.000.000	4 paket	2.589.000	4 paket	3.000.000	0 paket	-	0 paket	-	4 paket	2.589.000	100%	86%
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	33.000.000	4 paket	37.191.900	4 paket	30.337.600	4 paket	2.559.500	4 paket	2.559.500	4 paket	39.751.400	100%	120%
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	34.000.000	12 paket	51.269.600	12 paket	34.000.000	12 paket	350.000	12 paket	350.000	12 paket	51.619.600	100%	152%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)/ sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi CapaianKinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 6+9		11 = 10/5*100%	
				K	RP	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	220.000.000	24 laporan	281.573.137	24 laporan	220.000.000	24 laporan	33.749.642	24 laporan	33.749.642	24 laporan	315.322.779	100%	143%
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 dokumen	10.000.000	4 dokumen	8.027.950	4 dokumen	10.000.000	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	8.027.950	25%	80%
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	**100%**	**20.000.000**	**100%**	**-**	**100%**	**201.820.600**	-	-	**0%**	-	100%	-	**100%**	0%
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	20.000.000	2 unit	-	2 unit	201.820.600	0 unit	-	0 unit	-	2 unit	-	100%	0%
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi**	**100%**	**177.848.000**	**100%**	**210.828.128**	**100%**	**562.456.200**	**100%**	**112.956.755**	**100%**	**112.956.755**	**100%**	**323.784.883**	**100%**	**182%**
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3.000.000	12 laporan	2.990.000	12 laporan	3.000.000	0 laporan	-	0 laporan	-	12 laporan	2.990.000	100%	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	50.000.000	48 laporan	74.804.819	48 laporan	253.993.500	48 laporan	56.581.755	48 laporan	56.581.755	48 laporan	131.386.574	100%	263%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	124.848.000	12 laporan	133.033.309	12 laporan	305.462.700	12 laporan	56.375.000	12 laporan	56.375.000	12 laporan	189.408.309	100%	152%
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhanurusan penunjang yangdipelihara**	**100%**	**155.259.000**	**100%**	**559.262.985**	**100%**	**226.762.000**	**100%**	**5.470.000**	**100%**	**5.470.000**	**100%**	**564.732.985**	**100%**	**364%**
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	32.170.000	11 unit	113.716.098	11 unit	174.380.000	6 unit	2.230.000	6 unit	2.230.000	11 unit	115.946.098	100%	360%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	20.000.000	12 unit	27.340.617	12 unit	32.170.000	4 unit	3.070.000	4 unit	3.070.000	16 unit	30.410.617	133%	152%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	103.089.000	1 unit	418.206.270	1 unit	20.212.000	1 unit	170.000	1 unit	170.000	1 unit	418.376.270	100%	406%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)/ sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi CapaianKinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 6+9		11 = 10/5*100%	
				K	RP	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	Meningkatnya Partispasi Angkatan Kerja	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yang dilatih**	**0,48%**	**341.109.200**	**0,18%**	**344.354.058**	**0,32%**	**509.250.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,18%**	**344.354.058**	**37,50%**	**101%**
		KEGIATAN : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi	**Persentase pemenuhan pelaksanaan pelatihan sesuai perencanaan**	**100%**	**341.109.200**	**100%**	**344.354.058**	**100%**	**509.250.000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**344.354.058**	**100%**	**101%**
		Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	120 orang	166.109.200	53 orang	196.850.000	120 orang	374.250.000	0 orang	-	0 orang	-	53 orang	196.850.000	44%	119%
		Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	6 lembaga	175.000.000	1 lembaga	147.504.058	1 lembaga	135.000.000	0 lembaga	-	0 lembaga	-	1 lembaga	147.504.058	17%	84%
		PROGRAM : PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	**0,12%**	-	**0,04%**	**189.634.100**	**0,04%**	**140.000.000**	**0,00%**	**-**	**0,00%**	**-**	**0,04%**	**189.634.100**	**33,33%**	**0%**
		KEGIATAN : Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pemenuhan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**-**	**100%**	**18.266.000**	**100%**	**25.000.000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**100%**	**18.266.000**	**100%**	**0%**
		Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	200 orang	-	112 orang	18.266.000	150 orang	25.000.000	0 orang	-	0 orang	-	112 orang	18.266.000	56%	0%
		Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	30 orang	-	0 orang	-	10 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0%	0%
		KEGIATAN : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Jumlah Job Fair yang Dilaksanakan**	**4 Job fair**	-	1 job fair	**171.368.100**	**1 Job fair**	**115.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**		**171.368.100**	**0%**	**0%**
		Sub Kegiatan Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	30 orang	-	781 orang	171.368.100	30 orang	115.000.000	0 orang	-	0 orang	-	781 orang	171.368.100	2603%	0%

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)/ sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi CapaianKinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 6+9		11 = 10/5*100%	
				K	RP	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
	Optimalnya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Sektor Informal Bukan Penerima Upah yang Masuk Kategori Miskin	**PPROGRAM :HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase peningkatanjumlah peserta BPJSKetenagakerjaan yang aktif**	**32%**	**250.000.000**	**18%**	**716.301.600**	**32%**	**780.974.300**	**0%**	-	**0%**	-	**18%**	716.301.600	**56%**	287%
		KEGIATAN : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Pemenuhan layanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**	**100%**	**250.000.000**	**100%**	**716.301.600**	**100%**	**780.974.300**	**0%**	-	**0%**	-	100%	716.301.600	**100%**	287%
		Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	8000 orang	250.000.000	6568 orang	716.301.600	8000 orang	780.974.300	0 orang	-	0 orang	-	6568 orang	716.301.600	82%	287%
	Meningkatnya Peluang Investasi	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Nilai Investasi per tahun**	**87.000.000.000**	**75.000.000**	**37.944.342.286**	**-**	**37.000.000.000 Rupiah**	**75.000.000**	**-**	-	**-**	-	**37.944.342.286**	-	**0**	0%
		KEGIATAN : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Promosi yang dilaksanakan**	**2 dokumen**	**75.000.000**	**0 dokumen**	**-**	**2 dokumen**	**75.000.000**	**0 dokumen**	-	**0 dokumen**	-	**-**	-	**0%**	0%
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	75.000.000	0 dokumen	-	2 dokumen	75.000.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0%	0%
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	**Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal**	**12%**	**-**	**-**	**-**	**12%**	**75.000.450**	**-**		**-**		-	-	**0**	0%
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**Jumlah Pra Studi Kelayakan dan Video Promosi Investasi**	**1 dokumen**	**-**	**0 dokumen**	**-**	**1 dokumen**	**75.000.450**	**0 dokumen**		**0 dokumen**		-	-	**0%**	0%
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	75.000.450	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen	-	0%	0%
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu	**PROGRAM : PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP**	**96,88%**	**108.200.000**	**100%**	**451.663.894**	**96,88%**	**50.000.000**	**96,88%**	**-**	**96,88%**	**-**	**100%**	**451.663.894**	**103,22 %**	**417%**

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (output)/ sub kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu n-2		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi CapaianKinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10 = 6+9		11 = 10/5*100%	
				K	RP	K	Rp	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
		KEGIATAN : Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP**	**100%**	**108.200.000**	**100%**	**451.663.894**	**100%**	**50.000.000**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**451.663.894**	**100%**	**417%**
		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan berusaha Berbasis Risiko Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yangMendapatkan PelayananPerizinan Berusaha melaluiSistem Perizinan BerusahaBerbasis Risiko Terintegrasisecara Elektronik	410 pelaku usaha	68.400.000	262 pelaku usaha	354.256.650	40 pelaku usaha	15.000.000	357 pelaku usaha	-	357 dokumen	-	619 dokumen	354.256.650	151%	518%
		Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	250 pelaku usaha	15.000.000	53 pelaku usaha	91.392.319	85 pelaku usaha	10.000.000	335 pelaku usaha	-	335 dokumen	-	388 dokumen	91.392.319	155%	609%
		Sub Kegiatan Pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	36 kegiatan usaha	24.800.000	12 kegiatan usaha	6.014.925	12 kegiatan usaha	25.000.000	0 kegiatan usaha	-	0 dokumen	-	12 dokumen	6.014.925	33%	24%

Keterangan tabel :

1. Pelaksanaan kegiatan untuk triwulan I Tahun 2025 baru terlaksana untuk Progran Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupa pembayaran gaji ASN dan non ASN serta pembayaran rutin lainnya.
2. Pelaksanaan program kegiatan lainnya baru akan terlaksana di triwulan II dan seterusnya. Namun fisik kegiatan sudah disusun pada triwulan I.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijelaskan bahwa fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja.

Analisis terhadap capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dengan uraian pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2. 2

Pencapaian Klinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian (Tahun)		Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
T	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik				*93*	*95*	*97*	*88*	*90*	*93*	*95*	
S	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				96,87	98,76	99,62	97	97.90	98	99	
IP	Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
T	Tingkat Pengangguran				*4,72%*	*4,61%*	*4,51%*	*5,49*	*4,94*	*4,72*	*4,61*	
S	Persentase peningkatan partisipasi angkatan kerja				64,05%	64,07%	64,09%	66,05	66,33	66,11%	66,16%	
	Persentase pencari kerja yang dilatih				0,32%	0,32%	0,32%	0,18%	0,18%	0,32%	0,32%	
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)				0,04	0,08	0,12	0,42	0,02	0,04%	0,08%	
	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
T	Angka Kemiskinan				*4,99%*	*4,85%*	*4,75%*	-	*5%*	*4,99%*	*4,85%*	
S	Persentase peningkatan kepersertaan BPJS tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin				2,50%	2,78%	3,00%	2,5	1,27	2,78%	3,00%	
IP	Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan yang aktif				32%	32%	32%	32	18%	0,32	0,32	
T	Persentase kenaikan investasi				*6%*	*6%*		*6*	*6*	*0,06*	*0,06*	
S	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)				22	29	31	52	27	29	32	
	Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal				-	12%		-	-	-	0,12	
	Nilai Investasi per tahun				39,9M	41,9M	43,9M	32,59M	39,9M	41M	43M	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami beberapa perubahan pada Renstra 2018-2023 dan Renstra 2024-2026.
2. Pada Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 4 (empat) tujuan sebagai berikut:
   a. Tujuan “Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah” dengan indikator “Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik” dengan target secara berurut Tahun 2024 2025 adalah 93 dan 95.
   b. Tujuan “Menurunkan tingkat pengangguran” dengan indikator “Tingkat Pengangguran” dengan target secara berurut Tahun 2024 2025 yatu 4,72% dan 4,61%.

c. Tujuan “Menurunkan Angka Kemiskinan” dengan indikator “Angka Kemiskinan” dengan target secara berurut Tahun 2024 2025 yaitu 4,99% dan 4,85%.

d. Tujuan “Meningkatkan Nilai Investasi” dengan indikator “Persentase kenaikan investasi” dengan target secara berurut Tahun 2024 2025 dengan target sama Tahun 2024 2025 yaitu 6%.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, dalam pelaksanaan tugasnya tidak terlepas dari hal-hal sebagai berikut :

1. Hal-hal kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

   Dalam rangka operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, terdapat beberapa hal kritis yang terkait dengan pelayanan yang harus ditindaklanjuti yaitu:

   a. Kurang optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah teknis terkait dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
   b. Kurang optimalnya fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan oleh Perangkat Daerah teknis/ Instansi terkait.
   c. Masyarakat/ pelaku usaha masih enggan untuk pengurusan perizinan.
   d. Masih kurangnya pemahaman masyarakat/pelaku usaha tentang pengurusan perizinan dan non perizinan.
   e. Kurang optimalnya kerjasama antar Perangkat Daerah terkait di dalam menjalankan dan menegakkan Perda.
   f. Masih rendahnya keterampilan SDM Aparatur dalam mengadopsi dan menjalankan jaringan / mengakses aplikasi Teknologi Informasi di dalam pelayanan perizinan dan non perizinan pada pelayanan publik.
   g. Belum adanya kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang representatif untuk sebuah pelayanan yang profesional.

2. Permasalahan dan Hambatan yang akan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

   Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanannya adalah:

   A. Urusan Penanaman Modal

      Dalam melaksanakan urusan Penanaman Modal, permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1) Belum optmalnya informasi peluang penanaman modal kepada investor
2) Belum optimalnya promosi penanaman modal yang massif dan tepat sasaran
3) Keterbatasan ruang/lahan untuk penanaman modal.

B. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan dalam urusan tenaga kerja adalah:

1) Meningkatnya jumlah pengangguran karena kurangnya kesempatan kerja
2) Belum maksimalnya kualitas dan jaringan kerjasama tenaga kerja keluar negeri dan antar daerah.
3) Kualitas SDM pencari kerja yang masih rendah.

3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dalam operasionalnya ditantang untuk dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat sehingga dapat merubah image masyarakat terhadap pelayanan yang berbelit-belit serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menghadapi tantangan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Melaksanakan kajian terhadap peluang investasi
2) Melaksanakan promosi secara massif dan tepat sasaran
3) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
4) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Investasi Penanaman Modal
5) Melaksanakan Fasilitasi kemudahan investasi
6) Melaksanakan pendataan tenaga kerja dan kesempatan kerja
7) Melaksanakan Sosialisasi penempatan tenaga kerja
8) Peningkatan hubungan industrial, koordinasi dengan pengusaha dan pekerja .
9) Peningkatan kualitas SDM aparatur pelayanan
10) Pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik
11) Melaksanakan tindak lanjut pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan
12) Menyusun dan melaksanakan evaluasi terhadap Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
13) Melaksanakan sosialisasi perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	**Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintah**	Belum optimalnya kinerja pelayanan perizinan terpadu	Belum optimalnya sarana dan prasarana serta kualitas SDM pada Mal Pelayanan Publik Kota Padang Panjang
			Masih belum optimalnya sosialisasi terhadap perizinan dan non perizinan kepada masyarakat
2	**Masih tingginya angka pengangguran**	Belum optimalnya partisipasi angkatan kerja	Masih rendahnya jumlah wirausahawan baru sebagai potensi untuk penyediaan lapangan kerja
			Belum maksimalnya kualitas dan jaringan kerjasama tenaga kerja keluar negeri dan antar daerah
			Meningkatnya jumlah pengangguran karena kurangnya kesempatan kerja
3	**Masih tingginya angka kemiskinan**	Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja sektor informal bukan penerima upah yang masuk kategori miskin	Masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja
4	**Belum optimalnya capaian nilai investasi**	Belum optimalnya peluang investasi yang ada	Belum adanya informasi peluang penanaman modal yang mendetail dan akurat
			Belum terlaksananya promosi penanaman modal yang masif dan tepat sasaran
			Keterbatasan ruang/lahan untuk penanaman modal.

Gambar 2. 1

Pohon Masalah DPMPTSP Kota Padang Panjang



Secara umum isu utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang adalah dengan Peningkatan nilai investasi dan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Padang Panjang terkait Peningkatan daya saing ekonomi daerah terkait dan Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik terkait Peningkatan tata kelola kinerja pemerintah daerah

Berdasarkan reviu penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang selama periode sebelumnya, serta berdasarkan permasalahan dan hambatan yang ada, dapat diidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang sebagai berikut:

a. Belum Optimalnya Peluang Investasi yang ada
b. Belum Optimalnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
c. Belum Optimalnya Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu
d. Belum Optimalkan Kesempatan Kerja
e. Belum Optimalnya Produktivitas Tenaga Kerja

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025

Renja DPMPTSP disusun dengan mengacu pada RKPD Perubahan 2025. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan awal RKPD, maka ada beberapa program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dijadikan program dan kegiatan prioritas kedua. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025. Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2. 4

Review terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2025

dengan Renja Perubahan DPMPTSP Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Cat
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	***13=11-6***	*12*
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				**5.961.242.647**					**6.090.934.638**	**458.385.041**	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**5.961.242.647**					**6.090.934.638**	**458.385.041**	
	TENAGA KERJA				**5.761.242.197**					**5.940.934.638**	**533.385.491**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi**	**100,00%**	**3.844.871.197**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi**	**100,00%**	**4.454.534.638**	**611.635.491**	
X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**2.920.701.197**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**3.113.420.351**	**192.719.154**	
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	2.920.701.197	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	3.113.420.351	192.719.154	
X.XX.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat**	**0%**	**-**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat**	**0%**	**-**	**-**	

No	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Cat
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	***13=11-6***	*12*
			daerah					**daerah**				
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	-	
X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**306.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**380.651.587**	**76.623.637**	
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.589.000	(411.000)	
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	39.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	37.191.900	(1.808.100)	
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	34.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	51.269.600	17.269.600	
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	220.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	281.573.137	61.573.137	

No	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Cat
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	***13=11-6***	*12*
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Laporan	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Laporan	8.027.950	(1.972.050)	
X.XX.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	**100%**	**20.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	**100%**	**201.000.000**	**181.000.000**	
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	201.000.000	181.000.000	
X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**433.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**562.462.700**	**129.462.700**	
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000	-	
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	254.000.000	204.000.000	

No	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Cat
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	***13=11-6***	*12*
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	380.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	305.462.700	(74.537.300)	
X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100%**	**165.170.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100%**	**197.000.000**	**31.830.000**	
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	113.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	115.000.000	2.000.000	
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	32.170.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	32.000.000	(170.000)	
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	50.000.000	30.000.000	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivas Tenaga Kerja	**Kota Padang Panjang**	**Persentase Pencari kerja yang Dilatih**	**0,48%**	**468.250.000**	**Program Pelatihan Kerja dan Produktivas Tenaga Kerja**	Kota Padang Panjang	**Persentase Pencari kerja yang Dilatih**	**0,48%**	**335.000.000**	**(133.250.000)**	

No	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Cat
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	***13=11-6***	*12*
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Kota Padang Panjang**	**Persentase Pemenuhan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi**	**100%**	**468.250.000**	**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	Kota Padang Panjang	**Persentase Pencari kerja yang Dilatih**	**100%**	**335.000.000**	**(133.250.000)**	
	Sub Kegiatan Proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Padang Panjang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	120 orang	333.250.000	Sub Kegiatan Proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kota Padang Panjang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	80 orang	200.000.000	(133.250.000)	
	Sub Kegiataan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan kerja	Kota Padang Panjang	• Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	6 lembaga	135.000.000	Sub Kegiataan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan kerja	Kota Padang Panjang	• Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 lembaga	135.000.000	-	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	**Kota Padang Panjang**	**Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	**0,12%**	**290.000.000**	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	Kota Padang Panjang	**Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	**0,12%**	**345.000.000**	**55.000.000**	

No	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Cat
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	***13=11-6***	*12*
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Kota Padang Panjang**	**Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**100%**	**175.000.000**	**Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	Kota Padang Panjang	**Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**100%**	**145.000.000**	**-30.000.000**	
	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Kota Padang Panjang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	200 orang	25.000.000	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Kota Padang Panjang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	200 orang	25.000.000	-	
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Padang Panjang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	30 orang	150.000.000	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Padang Panjang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	30 orang	120.000.000	(30.000.000)	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Kota Padang Panjang**	**Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang perekonomian dan SDA**	**2 kali jobfair**	**115.000.000**	**Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Kota Padang Panjang	**Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang perekonomian dan SDA**	**2 kali jobfair**	**200.000.000**	**85.000.000**	
	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Kota Padang Panjang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	30 orang	115.000.000	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Kota Padang Panjang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	30 orang	200.000.000	85.000.000	
	Program Hubungan Industrial	**Kota Padang Panjang**	**Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan yang aktif**	**32,00%**	**1.158.121.000**	**Program Hubungan Industrial**	Kota Padang Panjang	**Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan yang aktif**	**32,00%**	**806.400.000**	**-351.721.000**	

No	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Cat
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	***13=11-6***	*12*
	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Kota Padang Panjang**	**Persentase pemenuhan layanan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial**	**100%**	**1.158.121.000**	**Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial**	**100%**	**806.400.000**	**-351.721.000**	
	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Padang Panjang	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	8000 orang	1.158.121.000	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Padang Panjang	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	8000 orang	806.400.000	(351.721.000)	
	PENANAMAN MODAL				**200.000.450**					**150.000.000**	**(75.000.450)**	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Kota Padang Panjang	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**96,89%**	**50.000.000**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Kota Padang Panjang	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**96,89%**	**-**	**#REF!**	
	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	**Persentase penerbitan izin yang dikeluarkan sesuai SOP**	**100%**	**50.000.000**	**Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Padang Panjang	**Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90**	**100,00%**	**-**	(50.000.000)	
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Padang Panjang	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	410 Pelaku usaha	15.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	410 Pelaku usaha	-	(15.000.000)	

No	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Cat
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	***13=11-6***	*12*
	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Padang Panjang	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	260 orang	10.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	260 orang	-	(10.000.000)	
	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Padang Panjang	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	36 Kegiatan	25.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	36 Kegiatan	-	(25.000.000)	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kota Padang Panjang	**Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal**	**14,00%**	**75.000.450**	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	Kota Padang Panjang	**Persentase capaian fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal**	**14,00%**	**75.000.000**	**-450**	
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	**Jumlah Pra Studi Kelayakan dan video promosi investasi**	**1 dokumen**	**75.000.450**	**Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Kota Padang Panjang	**Jumlah Pra Studi Kelayakan dan video promosi investasi**	**1 dokumen**	**75.000.000**	**-450**	

No	RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Cat
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	***13=11-6***	*12*
	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	75.000.450	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 dokumen	75.000.000	(450)	
	Program Promosi Penanaman Modal	Kota Padang Panjang	**Nilai Investasi per tahun**	**87,000,000, 000 Rupiah**	**75.000.000**	**Program Promosi Penanaman Modal**	Kota Padang Panjang	**Nilai Investasi per tahun**	**87,000,000, 000 Rupiah**	**75.000.000**	**-**	
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	**Jumlah promosi yang dilaksanakan**	**2 dokumen**	**75.000.000**	**Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Kota Padang Panjang	**Jumlah promosi yang dilaksanakan**	**2 dokumen**	**75.000.000**	**-**	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	75.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	75.000.000	-	

Keterangan tabel :

1. Terdapat beberapa perbedaan target kinerja dan pagu anggaran antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang disusun dikarenakan menyesuaikan dengan pagu indikatif dan target kinerja capaian tahun sebelumnya serta sasaran capaian untuk tahun selanjutnya.
2. Terdapat 7 program, 13 kegiatan dan 24 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang untuk tahun perubahan 2025.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT TAHUN 2025

Dari hasil Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan, terdapat beberapa usulan yang berkaitan dengan urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kota Padang Panjang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja/ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi / Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kelurahan Silaing Atas, Kota Padang Panjang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	3 orang	20.000.000	Usulan Pelatihan Calon Pencari Kerja (Pelatihan Satpam) Kelurahan Silaing Atas Prioritas 2
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja/ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi / Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kelurahan Tanah Hitam	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	18 orang	120.000.000	Usulan Pelatihan Calon Pencari Kerja (Pelatihan Satpam) Kelurahan Tanah Hitam Prioritas 2
3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja/ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi / Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kelurahan Kampung Manggis	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	5 orang	31.250.000	Usulan Pelatihan Calon Pencari Kerja (Pelatihan Satpam) Kelurahan Kampung Manggis Prioritas 2
	Jumlah				**171.250.000**	

Keterangan Tabel:

Dari hasil penjaringan usulan yang dilakukan dari tingkat kelurahan maka terdapat 3 (tiga) usulan dari 3 (tiga) kelurahan yang berkaitan dengan urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang yaitu Pelatihan Satpam. Usulan ini berkaitan dengan urusan pemerintah bidang tenaga kerja dan masuk dalam program Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi dengan total anggaran usulan sebesar Rp 171.250.000. Ketiga usulan merupakan usulan prioritas 2 yang berasal dari Kelurahan Silaing Atas, Kelurahan Tanah Hitam dan Kelurahan Kampung Manggis.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL/PROVINSI

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap Warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan Publik mencakup dua hal pokok yaitu Pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai pihak yang dilayani.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa PTSP Daerah menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan .

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka sudah seharusnya kita melaksanakan seluruh jenis pelayanan perizinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu, artinya seluruh perizinan yang ada di Kota Padang Panjang harus melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.

Sebagaimana kita sadari bahwa terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan ciri pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara dan konsekuensi logis bahwa pemerintah dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan yang dibutuhkan masyarakat luas adalah pelayanan yang terkait dengan perizinan dan non perizinan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan dalam rangka menindak lanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana dalam Pasal 6 ayat (3) dinyatakan bahwa Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi :

a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/Wali Kota.

Sistem pelayanan terpadu merupakan langkah strategis dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah secara keseluruhan dan juga dapat mendorong peningkatan kinerja birokrasi, dengan menitik beratkan bahwa pelayanan perizinan tidak dilihat dalam konteks kemudahan prosedural administrasi saja akan tetapi juga meliputi kualitas pelayanan.

3.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah. Untuk itu perlu digambarkan terlebih dahulu visi dan misi serta prioritas pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019, yang merupakan tahap ke tiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025

Visi ini merupakan penjabaran dari visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2025 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan”.** Sedangkan untuk mencapai visi tersebut ditetapkan lima misi yakni;

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah adaik basandi syara’, syara’ basandi kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintah dan pelayanan public yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Tabel 3. 1

Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara'–Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan Investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;

5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu: ***"Peningkatan Daya Saing Daerah"***

3.1.3 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta nantinya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2026 mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Kota Padang Panjang yang telah mengakomodir visi misi Walikota terpilih tahun 2025-2029.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah maupun perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Target dari tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 dirumuskan dengan berdasarkan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, serta kebijakan pembangunan nasional tahun 2025. Berikut dijelaskan penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Tabel 3. 2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Strategi
Tujuan 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	
1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Peningkatan Upaya Pemenuhan Standar Pendidikan 2. Meningkatkan Kemampuan Literasi Masyarakat 3. Pemberian Dukungan Pendidikan Bagi Anak Berprestasi
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Penguatan Layanan Primer Dan Rujukan 2. Penguatan Program Pengendalian Penyakit

	3. Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Melalui Intervensi Spesifik Dan Intervensi Sensitif
3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, PemenuhanHak Dan PerlindunganAnak	1. Meningkatkan Partisipasi Dan Kesempatan Yang Sama Bagi Perempuan Untuk Memimpin Di Semua Tingkat Pengambilan Keputusan Dalam Kehidupan Politik, Ekonomi Dan Masyarakat 2. Peningkatan Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak 3. Menghapuskan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak
4. Meningkatnya DayaSaing Kepemudaan Dan Keolahragaan	1. Penguatan Daya Saing Kepemudaan 2. Penguatan Daya Saing Keolahragaan 3. Pemasalan Kegiatan Olahraga Rekreasi
Tujuan 2 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel	
5. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Inovatif 2. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Standar Dan Kualitas Pelayanan Publik 3. Implementasi Transformasi Digital Dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas 4. Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Berkualitas
Tujuan 3 : Terwujudnya Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Disertai Dengan Penurunan Ketimpangan	
6. Meningkatkan Pertumbuhan SektorUnggulan Daerah	1. Memperkuat Manajemen/Tatakelola Sektor Perdagangan 2. Peningkatan Pemanfaatan TIK Dalam Perdagangan 3. Mendorong Koperasi Untuk Melakukan Pengembangan Usaha 4. Penguatan UMKM 5. Meningkatkan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan 6. Meningkatkan Produktivitas Peternakan 7. Meningkatkan Pola Pangan Harapan (PPH) 8. Meningkatkan Stabilitas Pasokan Dan Harga Pangan Strategis 9. Pengembangan Kawasan, Destinasi, Daya Tarik Pariwisata Yang Berkelanjutan Dan Terpadu 10. Pengembangan Ekonomi Kreatif

Tujuan/ Sasaran	Strategi
7. Meningkatnya Investasi	1. Meningkatkan Iklim Investasi
8. Menurunnya Tingkat Kemiskinan DanPengangguran	1. Menyinergikan Program Penanggulangan Kemiskinan 2. Mengurangi Beban Masyarakat Miskin 3. Meningkatkan Kemampuan Dan Pendapatan Masyarakat Miskin/ Mengembangkan Dan Menjamin Keberlanjutan Usaha Ekonomi Mikro Dan Kecil
9. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	1. Meningkatkan Kualitas SDM Pencari Kerja 2. Memperluas Kesempatan Kerja
Tujuan 4 : Terwujudnya Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tenteram Dan Agamis	
10. Meningkatnya Penerapan Nilai-NilaiAdat Budaya Dan Agama Dalam Kehidupan Masyarakat	1. Pelestarian Kebudayaan Daerah 2. Meningkatkan Pemahaman Dan Pengamalan Ajaran Agama
11. Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1. Peningkatan Penegakan Perda Trantibum 2. Peningkatan Edukasi Dan Sosialisasi Pada Masyarakat
12. Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Peningkatan Rehabilitasi Sosial Terhadap Penduduk Rentan Sosial 2. Peningkatan Partisipasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat 3. Peningkatan Akses Jaminan Kesejahteraan Sosial Berbasis Data Elektronik Yang Valid Dan Terintegrasi
Tujuan 5 : Terwujudnya Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	
13. Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan Yang Berkualitas	1. Meningkatkan Layanan Jaringan Drainase Perkotaan 2. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Air Limbah 3. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Jalan 4. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Irigasi 5. Meningkatkan Layanan Infrastruktur Bangunan Gedung 6. Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni 7. Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas PSU Perumahan 8. Meningkatkan Saran Dan Prasarana LLAJ 9. Pengendalian Kemacetan Lalu Lintas 10. Peningkatan Kualitas Penerangan Jalan 11. Optimalisasi Pengelolaan Parkir 12. Meningkatkan Pengelolaan Persampahan

14. Meningkatnya Konsistensi Penataan Ruang	1. Meningkatkan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang 2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Penataan Ruang
15. Meningkatnya Kualitas Udara Dan Tutupan Lahan	1. Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan 2. Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah, DPMPTSP berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan yang ada dalam RKPD, ada 2 (dua) tujuan yang diambil dari RKPD yaitu Tujuan 2 (dua) : **"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel",** dengan sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tujuan 3 (tiga) : **"Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing Disertai Dengan Penurunan Ketimpangan"**, dengan sasaran Meningkatnya Nilai Investasi dan Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai lembaga teknis dalam urusan penanaman modal dan tenaga kerja, DPMPTSP Kota Padang Panjang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Dengan adanya kontribusi tersebut, diharapkan dari aspek penanaman modal dan tenaga kerja dapat diwujudkan bersama seluruh *stakeholder*.

3.1.4 Telaahan Renstra Provinsi

1. Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

a. Permasalahan dan Isu Strategis

Tabel 3. 3
Permasalahan dan Isu Strategis Renstra DPMPTSP Provinsi Sumbar
Tahun 2021-2026

No	Permasalahan	Isu strategis	Tujuan 2021-2026
1	Belum semua penerbitan izin sesuai Dengan standar pelayanan (masih memakan waktu lama)	Regulasi yang berlum efektif dan sering tumpang tindih berkaitan dengan penanaman modal baik pada tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.	Meningkatnya Kinerja Organisasi
2	Dokumen Informasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (*master plan, feasibility study, DED, business plan*) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai	Perlunya meningkatkan standar pelayanan optimal dan mekanisme kerja pelayanan satu pintu.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi
3	Kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan terutama dalam melakukan kajian dan perumusan kebijakan investasi daerah serta kajian	Diperlukan pola insentif penanaman modal yang dapat diberikan oleh pemerintah	

	dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik	kepada calon investor untuk menarik minat mereka menanamkan modal di Sumatera Barat.	
4	Sistem sanksi yang masih belum tegas dan lemah dalam implementasi sehingga memperlemah kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM.	Masih belum tersedianya informasi yang akurat dan minimnya dokumen perencanaan pendukung investasi (*master plan*, *feasibility study*, DED, dan *business plan*) yang dibutuhkan oleh calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah.	
5	Rendahnya realisasi investasi dibandingkan dengan rencana investasi	Masih belum terwujudnya jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang pasti dan konsisten	

b. **Sasaran Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

Untuk mewujudkan visi misi tersebut di bidang penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merumuskan tujuan dan sasaran antara lain:

Tabel 3. 4

Sasaran Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Investasi di Sumatera Barat	Nilai realisasi investasi PMA dan PMDN	
		PMA (ribu US)	6.779.050
		PMDN (juta Rp)	187.000
		TOTAL (Juta Rp)	4.086.250
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Satu Pintu	Indeks Kepuasan Msayarakat (IKM)	83.5 / 3.45
3.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A (80.69)

2. Telaahan Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2026

a. Permasalahan dan Isu Strategis

Tabel 3. 5

Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2026

No	Permasalahan	Isu strategis	Tujuan 2021-2026
1	Rendahnya kompetensi angkatan kerja	Rendahnya produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja
2	Masih rendahnya serapan tenaga kerja	Peningkatan kualitas pelayanan pelatihan kerja belum sepenuhnya didukung oleh sarana dan prasarana pembelajaran dan praktik yang memadai dan berkualitas serta kecukupan pendidik (instruktur) produktif berkualitas	
3	Belum optimalnya keharmonisan hubungan industrial	Percepatan transformasi digitalisasi yang berpengaruh terhadap pola kerja.	
4	Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana pada kawasan transmigrasi	Salah satu aspek penting dalam penguatan daya saing ekonomi adalah kondusifnya iklim ketenagakerjaan yang didukung oleh harmonisnya hubungan industrial antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah.	
5	Belum optimalnya pengembangan kawasan transmigrasi	Kawasan transmigrasi diharapkan dapat mendukung pertumbuhan wilayah.	

b. Sasaran Pembangunan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2026

Selanjutnya untuk mewujudkan visi misi di bidang ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3. 6

Tujuan Dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
Meningkatnya daya saing angkatan kerja		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Indeks	8.57	8,60	8,62
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	%	36.04	36,34	36,68

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026
	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Persentase serapan tenaga kerja	%	36.50	36,99	37,97
	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaa	%	74,42	84,32	91,14
Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah		Indeks perkembangan satuan permukiman transmigrasi (IPSP Trans)	Indeks	76.10	77,00	79,00
	Meningkatnya status perkembangan satuan permukiman transmigrasi	Indeks perkembangan satuan pemukiman transmigrasi (IPSP)	Indeks	42.00	6,00	51,00
Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani		Nilai SAKIP (Predikat)	Nilai	BB	BB	A
		Rata-rata tingkat kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	%	83.33	85	86,67
	Meningkatnya akuntablitas kinerja organisasi	Nilai evaluasi kinerja	%	14.75	15,25	15,5
	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap layanan umum	%	90	90	90
		Tingkat kepuasan terhadap layanan kepegawaian	%	90	90	90
		Tingkat kepuasan terhadap layanan aset	%	70	75	80

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, Visi pembangunan Kota Padang Panjang adalah **"**Padang Panjang, Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera dan Bermarwah**"**.

Untuk mendukung Visi dan Misi Walikota Padang Panjang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang, perlu ditetapkan tujuan. Tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan Misi Walikota Padang Panjang serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan sesuai target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.

Sekaitan dengan hal tersebut diatas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET	
							2025	Perubahan 2025
Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan kemudahan berusaha di daerah dengan mendorong peningkatan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja			Nilai Investasi	Milyar	37,9 M	44,75 M	44,75 M
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	29,55	30,19	30,19
		Meningkatkan Peluang Investasi		Jumlah investor terdaftar(PMDN/PMA)	Pelaku usaha	26	30	29
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap target investasi	Persentase	NA	75	75
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	NA	3	3
		Meningkatkan kinerja pelayanan Perizinan Terpadu		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	97,9	96,88	98,76
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persentase	100	100	100
Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja				Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp Juta/Tenaga	108.5	137,78	137,78
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	66,33	64,07	69,2
		Meningkatkan kesempatan kerja		Persentase peningkatan serapan tenaga kerja	%	0,1	0,2	0,2

			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan Mengacu pada Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	Persentase	-	-	-
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	54,45	59,45	59,45
		Meningkatkan produktivitas tenaga kerja		Persentase Tenaga Kerja yang Meningkat Produktivitasnya	Persentase	10,85	13,77	13,77
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	0,2	0,4	0,4
			Program Hubungan Industrial	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja	Orang	7883	9883	9883
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP OPD	Nilai	60	65	65
			Program Penunjang urusan pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	Persentase	100	100	100

3.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Untuk dapat meningkat dan tercapainya mutu pelayanan dibidang perizinan dan non perizinan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas tidak akan terlepas dari ketersediaan anggaran, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta kebulatan tekad (komitmen) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah terkait selaku Tim Teknis didalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran serta pelaksanaan strategi dan kebijakan maka ditetapkanlah program dan kegiatan indikatif pada DPMPTSP sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7

Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Perubahan Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
													Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Pergeseran	Pagu Indikatif Perubahan	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				**4.830.000.507**	**5.341.693.399**					**4.110.617.413**
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4.731.200.507**	**5.242.932.399**					**4.110.617.413**
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**4.731.200.507**	**5.242.932.399**					**4.075.617.413**
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhanpemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	3.910.883.507	3.972.740.399				100%	3.790.617.413
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminitrassi keuangan perangkat daerah	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	2.867.627.593	3.027.593.635				100%	3.029.678.586
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	336 Orang/bulan	2.867.627.593	3.027.593.635	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan	3.029.678.586
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminitrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	-	-				100%	-
2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	-	-	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminitrasi umum perangkat daerah	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	143.278.914	143.278.914				100%	77.000.000
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	4 Paket	1.768.700	1.768.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Perubahan Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
													Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Pergeseran	Pagu Indikatif Perubahan	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	4 Paket	14.203.214	14.203.214	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.000
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	12 Paket	12.151.100	12.151.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.000.000
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	24 Laporan	110.817.000	110.817.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	51.000.000
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	4 Dokumen	4.338.900	4.338.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	5.000.000
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	201.820.600	202.683.450				100%	-
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	16 Unit	201.820.600	202.683.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipenuhi	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	556.654.400	491.638.400				100%	433.000.000,00
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	12 Laporan	1.403.700	1.403.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	48 Laporan	253.993.500	254.263.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	253.998.500
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	12 Laporan	301.257.200	235.971.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Perubahan Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
													Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Pergeseran	Pagu Indikatif Perubahan	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	141.502.000	107.546.000				100%	128.940.327
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	92.360.000	58.404.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	88.940.327
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	12 Unit	28.930.000	28.930.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	20.000.000
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	20.212.000	20.212.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Meningkat Produktivitasnya	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	13,77%	310.883.000	640.770.000			14,07%	14,07%	50.000.000
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pemenuhan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	310.883.000	640.770.000			100%	100%	50.000.000
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Orang	217.883.000	216.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	pengiriman berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	10.000.000
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	93.000.000	424.770.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	pelatihan bahasa jepang	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	40.000.000
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	Kota Padang Panjang, Padang Panjang	59,45%	106.234.000	226.222.000				64,45%	35.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Perubahan Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
													Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Pergeseran	Pagu Indikatif Perubahan	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
							Barat, Silaing Bawah								
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan antar kerja di daerah kabupaten/kota	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	-	-				100%	25.000.000
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	persiapan siswa SMK memasuki dunia kerja dan analisis pasar kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	150 Orang	15.000.000
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	uang saku peserta magang (10 bulan) dan penempatan naker di lokasi magang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	10 Orang	10.000.000
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pemenuhan pengelolaan informasi pasar kerja		100%	106.234.000	226.222.000				100%	10.000.000
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	106.234.000	226.222.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	30 Orang	10.000.000
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	9883 orang	403.200.000	403.200.000				11883 orang	200.000.000
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	403.200.000	403.200.000				100%	200.000.000
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4000 Orang	403.200.000	403.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	premi sektor informal ketenagakerjaa 10 bulan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	8000 Orang	200.000.000
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**98.800.000**	**98.761.000**					**35.000.000**
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap target investasi	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	56.000.000	55.991.000				100%	-

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Perubahan Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
													Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Pergeseran	Pagu Indikatif Perubahan	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Pra Studi Kelayakan dan Video Promosi Investasi	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	1 Dokumen	56.000.000	55.991.000				1 Dokumen	-
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan peluang usaha kabupaten / kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	56.000.000	55.991.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	pembuatan kajian potensi investasi dan DED potensi investasi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	3%	42.300.000	42.270.000				3%	20.000.000
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi yang dilaksanakan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	1 Dokumen	42.300.000	42.270.000				1 Dokumen	20.000.000
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten / kota	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	42.300.000	42.270.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	temu bisnis dengan calon investor	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	500.000	500.000				100%	15.000.000
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penerbutan izin yang diekluarkan sesuai SOP	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	100%	500.000	500.000				100%	15.000.000
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Pelaku Usaha	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	sosialisasi kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	40 Pelaku Usaha	5.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Perubahan Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
													Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Pergeseran	Pagu Indikatif Perubahan	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Pelaku Usaha	500.000	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	sosalisasi melalui media elektronik seperti radio, medsos	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	85 Pelaku Usaha	5.000.000
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Kegiatan Usaha	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	12 Kegiatan Usaha	5.000.000

Keterangan Tabel :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang untuk tahun Anggaran Perubahan 2025 memiliki 7 program kegiatan dengan total anggaran Rp 5.341.693.399,-
2. Dari hasil analisis kebutuhan yang dilakukan terdapat perbedaan anggaran dengan RKPD Kota Padang Panjang dikarenakan pagu indikatif sementara serta fluktuasi kenaikan satuan biaya pemerintah.

Tabel 3.8 Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**5.961.242.647**	**5.836.228.743**	**5.151.694.195**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.761.242.197**	**5.586.228.293**	**5.052.894.195**							**0,00**	
	2.07.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**5.761.242.197**	**5.586.228.293**	**5.052.894.195**							**0,00**	
69	**2.07.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**3.844.871.197**	**4.156.003.993**	**3.872.577.195**							**0,00**	
	2.07.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**		**100 %**	**-**	**100 %**	**2.920.701.197**	**2.867.627.593**	**2.894.607.281**			**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**ASN**		**0,00**	**DPMPTSP**
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2016 Orang/bulan		336 Orang/bulan	336 Orang/bulan	336 Orang/bulan	2.920.701.197	2.867.627.593	2.894.607.281	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 %**		**100 %**	**- persentase**	**100 %**	**-**	**-**	**-**			-	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**-**		**0,00**	**DPMPTSP**
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	96 Paket		22 Paket	0 Paket	0 Paket	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100 %**		**86,87 %**	**100 %**	**100 %**	**306.000.000**	**297.337.600**	**143.278.914**			-	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**-**		**0,00**	**DPMPTSP**
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	3.000.000	3.000.000	1.768.700	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	39.000.000	30.337.600	14.203.214	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket	34.000.000	34.000.000	12.151.100	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	220.000.000	220.000.000	110.817.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	32 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	10.000.000	4.338.900	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100 %**		**100 %**	**100 Persentase**	**100 %**	**20.000.000**	**201.820.600**	**201.820.600**			-	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**-**		**0,00**	**DPMPTSP**
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48 Unit		0 Unit	2 Unit	16 Unit	20.000.000	201.820.600	201.820.600	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**433.000.000**	**562.456.200**	**491.368.400**			-	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**-**		**0,00**	**DPMPTSP**
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan		4 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	3.000.000	3.000.000	1.403.700	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	50.000.000	253.993.500	253.993.500	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	380.000.000	305.462.700	235.971.200	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**165.170.000**	**226.762.000**	**141.502.000**			-	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**-**		**0,00**	**DPMPTSP**
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit		11 Unit	11 Unit	11 Unit	113.000.000	174.380.000	92.360.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit		5 Unit	12 Unit	12 Unit	32.170.000	32.170.000	28.930.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Silaing Bawah	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	20.000.000	20.212.000	20.212.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP
70	**2.07.03.**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi**	**1,4 %**		**0,2 %**	**0.3 %**	**0,4 %**	**468.250.000**	**509.250.000**	**670.883.000**							**0,00**	
	2.07.03.2.01.	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah Pencari Kerja yang mendapat pelatihan berdasarkan unit kompetensi**	**1091 Orang**		**186 Orang**	**100 %**	**106 Orang**	**468.250.000**	**509.250.000**	**670.883.000**			**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Masyarakat (Tenaga Kerja)**		**0,00**	**DPMPTSP**
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	832 Orang		53 Orang	126 Orang	42 Orang	333.250.000	374.250.000	247.883.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	9 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	135.000.000	135.000.000	423.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP
71	**2.07.04.**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri**	**84,45 %**		**54,45 %**		**59,45 %**	**290.000.000**	**140.000.000**	**106.234.000**							**0,00**	
	2.07.04.2.01.	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pencari kerja yang disalurkan ke dunia kerja/dunia usaha**	**1000 Orang**		**61 Orang**	**100 %**	**90 Orang**	**175.000.000**	**25.000.000**	**-**			**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Masyarakat (Tenaga Kerja)**		**0,00**	**DPMPTSP**
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1350 Orang		112 Orang	150 Orang	150 Orang	25.000.000	25.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	131 Orang		0 Orang	10 Orang	10 Orang	150.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP
	2.07.04.2.03.	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah job fair/bursa kerja yang dilaksanakan**	**6 Kegiatan**		**1 Kegiatan**	**1 Job Fair**	**1 Kegiatan**	**115.000.000**	**115.000.000**	**106.234.000**			-	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**-**		**0,00**	**DPMPTSP**
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	180 Orang		1 Orang	30 Orang	30 Orang	115.000.000	115.000.000	106.234.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP
72	**2.07.05.**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial**	**19883 Orang**		**7883 Orang**		**9883 Orang**	**1.158.121.000**	**780.974.300**	**403.200.000**							**0,00**	
	2.07.05.2.02.	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan layanan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**	**36 Persen**		**33,28 Persen**		**33,5 Persen**	**1.158.121.000**	**780.974.300**	**403.200.000**			**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Masyarakat (Tenaga Kerja)**		**0,00**	**DPMPTSP**
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	28000 Orang		6006 Orang	8000 Orang	4000 Orang	1.158.121.000	780.974.300	403.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP
	2.18...	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**200.000.450**	**250.000.450**	**98.800.000**							**0,00**	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
73	**2.18.02.**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Realisasi Total terhadap target investasi**	**100 %**		**NA %**	**12 %**	**75 %**	**75.000.450**	**75.000.450**	**56.000.000**							**0,00**	
	2.18.02.2.02.	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**6 Dokumen**		**0 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**75.000.450**	**75.000.450**	**56.000.000**			**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Pelaku Usaha**		**0,00**	**DPMPTSP**
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	6 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.450	75.000.450	56.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP
74	**2.18.03.**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi**	**25 %**		**NA %**	**3 %**	**3 %**	**75.000.000**	**75.000.000**	**42.300.000**							**0,00**	
	2.18.03.2.01.	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah promosi penanaman modal yang dilaksanakan**	**6 Kali**		**0 Kali**	**1 Kali**	**1 Kali**	**75.000.000**	**75.000.000**	**42.300.000**			**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Pelaku Usaha**		**0,00**	**DPMPTSP**
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	75.000.000	42.300.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP
75	**2.18.04.**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan**	**100 %**		**100 %**	**96,88 %**	**100 %**	**50.000.000**	**100.000.000**	**500.000**							**0,00**	
	2.18.04.2.01.	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**50.000.000**	**50.000.000**	**500.000**			**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**Pelaku Usaha**		**0,00**	**DPMPTSP**
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1930 Pelaku Usaha		262 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	410 Pelaku Usaha	15.000.000	15.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1025 Pelaku Usaha		53 Pelaku Usaha	85 Pelaku Usaha	260 Pelaku Usaha	10.000.000	10.000.000	500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	162 Kegiatan Usaha		12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	25.000.000	25.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			0,00	DPMPTSP

Keterangan Tabel:

Berdasarkan tabel diatas bahwasanya Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Perubahan 2025 disusun berdasarkan tujuan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Tujuan tersebut kemudian diturunkan menjadi sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator pengukurannya. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang 2025 sebagai berikut:

1. Tujuan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan public dengan sasaran Meningkatnya Akuntablitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target tahun 2025 yakni 100%.
2. Tujuan Terwujudnya Iklim Investasi yang kompetitif memiliki dua sasaran yakni sasaran pertama yaitu Meningkatnya Peluang Investasi dengan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan target 2025 sebesar 100% dan Program Promosi Penanaman Modal dengan target 2025 sebesar 3%. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target 2025 sebesar 98,76.
3. Tujuan Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja dengan sasaran Meningkatnya partisipasi angkatan kerja memiliki 2 program yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan target secara 2025 100% serta Program Penempatan Tenaga Kerja dengan target 2025 sebesar 59,45%.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan harapan dapat mengakomodir semua kebutuhan berbagai pihak demi terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan serta tercapainya Visi dan Misi Walikota Padang Panjang sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang sangat tergantung kepada komitmen dan keseriusan segenap unsur dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola Sumber Daya Manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal Tahun 2025 seluruh kebutuhan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat dipenuhi.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun, dengan harapan kiranya akan mampu meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Padang Panjang, Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG

FHANDY RAMADHONA, S.STP, MM

Pembina, IV/a. NIP. 19850609 200412 1 002

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena kehendak-Nya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang berperan penting dalam mendukung dan mencapai tujuan Pemerintah Kota Padang Panjang yang tertuang dalam RPD tahun 2024-2026.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dengan Permendagri Nomor 86 Taun 2017 tentan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dalam rangka penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang panjang perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun antar daerah, sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kami mengharapkan pihak–pihak terkait dapat memberikan saran untuk penyempurnaan Perubahan Renja ini. Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Perubahan Renja ini kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KOTA PADANG PANJANG



YAN KAS BARI, SE

NIP. 196801131994011001

DAFTAR ISI

Har

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Triwulan I Tahun 2025 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 23

2.3 Penentuan Isi Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 23

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 28

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat 38

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 39

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 39

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 41

3.3 Program dan Kegiatan 44

BAB IV PENUTUP 50

DAFTAR TABEL

Table 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Periode Pelaksanaan s.d Triwulan I Tahun 2025 8

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan (Indikator Capaian Program) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 s.d Triwulan I Tahun 2025 . 23

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Padang Panjang 29

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang 43

Tabel 3.2 Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2025 45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pohon Masalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang 27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1), perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Ketidaksesuaian ini mencakup perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD, atau adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan. Dalam konteks ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang telah mebuat perubahan Renja Tahun 2025 untuk menyesuaikan dengan tantangan aktual dan mendukung Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang 2024-2026.

Perubahan Renja 2025 dilakukan sebagai respons terhadap perubahan lingkungan operasional yang memengaruhi tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang menuntut penyesuaian agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Perubahan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menekankan pentingnya keselarasan antara rencana kerja dengan dinamika perkembangan keadaan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang telah merevisi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 untuk menyesuaikan dengan tantangan yang muncul dan memastikan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Revisi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1), yang mengizinkan perubahan RKPD dan Renja apabila evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, seperti prioritas pembangunan daerah atau kebutuhan penggunaan saldo anggaran tahun

sebelumnya.

Berdasarkan evaluasi Renja tahun berjalan, teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi dasar revisi:

1. Bidang Perpustakaan

   Pesatnya perkembangan teknologi informasi mendorong diversifikasi layanan perpustakaan umum. Masyarakat kini menuntut layanan yang lebih proaktif, seperti layanan jemput bola, akses digital, serta penyediaan informasi cepat dan relevan, di samping layanan peminjaman bahan pustaka konvensional.

2. Bidang Kearsipan

   Tantangan utama meliputi rendahnya kesadaran Perangkat Daerah dalam pengelolaan arsip yang baik dan kompetensi arsiparis yang terbatas. Hal ini memengaruhi efisiensi dan akurasi pengelolaan data pemerintahan.

Perubahan Renja 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 dan dirancang untuk mendukung peran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam meningkatkan literasi masyarakat, mengelola informasi secara efektif, dan memastikan tata kelola kearsipan yang baik. Dengan demikian, revisi ini berkontribusi pada pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Padang Panjang

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2025 didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan, yang mencakup :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Kota Padang Panjang di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 105 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangakat Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai salah satu bahan penyempurna dalam penyusunan rancangan Perubahan RKPD Kota Padang Panjang tahun 2025;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2025

Mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Triwulan I tahun 2025, Analisis kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsupan, review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 dan Perkiraan Maju tahun 2026.

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Triwulan I Tahun 2025

Kualitas Renja Perangkat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah yang berkualitas diperlukan adanya review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun tahun sebelumnya. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, perlu diperhatikan perbandingan hasil evaluasi capaian kinerja pada Renja Tahun 2025 Triwulan 1

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Triwulan 1 Tahun 2025

Secara umum, pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Triwulan 1 Tahun 2025, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan. Begitu juga berdasarkan hasil reviu berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026.

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Triwulan 1 Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PADANG PANJANG

PERIODE PELAKSANAAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome/Kegia n(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 202			Target Kinerja dan Anggaran Ren Perangkat Daerah Tahun 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerj dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang d Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Angggaran Renstra Perangka Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaia Kinerja dan Realisasi Anggaran Rens Perangkat Daer s/d Tahun 2025 (%)		Unit Peran at Daera Penan gung jawab
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
1.	Meningkatn Minat Baca Masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	87		4,380,738,682	96.78		4,882,206,522	96,80		5,827,446,150		1,177,891,096	0	1,177,891,096	96.	6,060,097,618	111%	138%	DPK
		PROGRAM PENUNJAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100	%	3,659,464,682	100	%	4,404,395,251	100	%	4,396,873,900	25	1,011,085,761	25	1,011,085,761	125	5,415,481,012	125%	148%	DPK

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	95	%	2,799,779,682	100	%	3,491,202,053	95	%	3,299,338,919	24	854,789,291	24	854,789,291	124	4,345,991,344	129%	155%	DPK
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	364	Orang/bula	2,799,779,682	26	Orang/bula	3,491,202,053	364	Orang/bn	3,299,338,919	104	854,789,291	104	854,789,291	130	4,345,991,344	100%	155%	DPK
		Administrasi Kepagawaian Perangka Daerah	Persentase jumlah pakaian dinas yang diadakan	100	%	13,000,000	100	%	13,000,000	0	%	-		-	0	-	100	13,000,000	100%	100%	DPK
		Pengadaan Pakaian Din beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	26	Paket	13,000,000	26	Paket	13,000,000	0	Paket	-		-	0	-	26	13,000,000	140%	100%	DPK

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90	%	199,605,000	100	%	224,373,159	90	%	138,476,831	24	11,636,955	24	11,636,955	124	236,010,114	138%	118%	DPK
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	6,605,000	8	Paket	3,623,800	4	Paket	4,522,300		-	0	-	8	3,623,800	140%	55%	DPK
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	33,000,000	25	Paket	27,135,588	4	Paket	25,866,531	1	50,000	1	50,000	26	27,185,588	200%	82%	DPK
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	10,000,000	7	Paket	10,236,600	4	Paket	9,342,000	1	175,000	1	175,000	8	10,411,600	200%	104%	DPK

		Penyelenggaraan Rapa Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsult SKPD	24	Laporan	150,000,000	200	Laporan	183,377,171	24	Laporan	98,746,000	6	11,411,955	6	11,411,955	206	194,789,126	44%	130%	DPK
		Pengadaan Barang Mili Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	0	%	-	0	%	-	100	%	15,000,000	0	-		-	0	-	0%	0%	DPK
		Pengadaan Peralatan d Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan d Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-		Unit	-	1	Unit	15,000,000		-	0	-	0	-	0%	0%	DPK
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ya terpenuhi	90	%	502,080,000	100	%	525,306,971	90	%	691,383,150	24	135,397,115	24	135,397,115	124	660,704,086	138%	132%	DPK

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	6,000,000	2	Laporan	1,000,000	12	Laporan	785,800	1	300,000	1	300,000	3	1,300,000	100%	22%	DPK
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumb Daya Air dan Listrik yan Disediakan	48	Laporan	48,000,000	60	Laporan	25,604,422	48	Laporan	27,795,350	12	4,515,187	12	4,515,187	72	30,119,609	125%	63%	DPK
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kant	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	448,080,000	16	Laporan	498,702,549	12	Laporan	662,802,000	4	130,581,928	4	130,581,928	20	629,284,477	100%	140%	DPK
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjng Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaa barang milik daerah berkondisi baik	80	%	145,000,000	100	%	150,513,068	80	%	252,675,000	20	9,262,400	20	9,262,400	120	159,775,468	150%	110%	DPK

		Penyediaan Jasa Pemeliharan, Biaya Pemeliharaan dan Paja Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	5,000,000	11	Unit	118,461,818	1	Unit	53,140,000	1	3,159,000	1	3,159,000	12	121,620,818	217%	2432%	DPK
		Penyediaan Jasa Pemeliharan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dina Operasional atau Lapangan yang Dipeliha dan dibayarkan Pajak da Perizinannya	10	Unit	85,000,000	0	Unit	-	10	Unit	137,435,000	3	5,722,400	3	5,722,400	3	5,722,400	217%	7%	DPK
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46	Unit	22,000,000	46	Unit	14,165,000	46	Unit	22,400,000	1	381,000	1	381,000	47	14,546,000	102%	66%	DPK
		Pemeliharaan/Rehabilit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Unit	33,000,000	3	Unit	17,886,250	3	Unit	39,700,000		-	0	-	3	17,886,250	167%	54%	DPK

		PROGRAM PEMBINAA PERPUSTAKAAN	Jumlah anggota pustaka	3200	Orang	696,274,000	3678	Orang	477,811,271	3325	Orang	1,329,195,200	3741	152,555,975	3741	152,555,975	741	630,367,246	100%	91%	DPK
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat daerah kabupaten/ Kot	Jumlah kunjungan ke Perpustakaan	31000	Orang	354,388,000	37418	Orang	283,471,366	32000	Orang	392,754,450	2722	8,406,450	2722	8,406,450	401	291,877,816	129%	82%	DPK
		Pembinaan Perpustaka pada Satuan Pendidika Dasar di Seluruh Wilay Kabupaten/Kota Sesua dengan Standar Nasio Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakuk Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	4	Perpustaka n	43,200,000		Perpustaka n	-		Perpust aan	-		-	0	-	0	-	0%	0%	DPK
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaa	Jumlah Data dan Inform Perpustakaan		Dokumen	-	-	Dokumen	-	50	Dokume	48,622,850	0	-	0	-	0	-	0%	0%	DPK

		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan Perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadak	500	Eksemplar	35,000,000	786	Eksemplar	107,386,200	0		-	0	-	0	-	786	107,386,200	0%	0%	DPK
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan unt Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500	Eksemplar	276,188,000	786	Eksemplar	176,085,166	700	Eksemp	175,679,700	125	8,406,450	125	8,406,450	911	184,491,616	0%	67%	DPK
		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kot	Jumlah koleksi Perpustakaan khas daer tingkat kabupaten/kota yang dikembangkan		Eksemplar	-	0	Eksemplar	-	145	Eksemp	158,471,900	0	-	0	-	0	-	0%	0%	DPK

		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektron	Jumlah layanan Perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen TIK		Perpustaka n	-	0	Perpustaka n	-	1	Perpust aan	9,980,000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	DPK
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daer Kabupaten/ Kota	Persentase minat baca masyarakat	59	%	341,886,000	72.47	%	194,339,905	60	%	936,440,750		144,149,525		144,149,525	72.	338,489,430	123%	99%	DPK
		Pengembangan Literas Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Wilayah Kabupaten/Kot yang Dikembangkan	4	Perpustaka n	74,071,800	5	Perpustaka n	36,825,780	6	Perpust aan	101,892,700	1	3,000,000	1	3,000,000	6	39,825,780	100%	54%	DPK
		Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaandi Tempa tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah sarana Perpustakaan yang dibangun dan dipelihara ditempat-tempat umum yang menjadi kewenang daerah kabupaten/Kota		Perpustaka n	-		Perpustaka n		1	Perpust aan	39,750,000	2	30,325,000	2	30,325,000	2	30,325,000	0%	0%	DPK

		Pemberian Penghargaa Gerakan Budaya Gema Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/kota		Orang	-		Orang		9	Orang	463,328,850	0	-	0	-	0	-	0%	0%	DPK
		Sosialisasi Budaya Bac dan Literasi pada Satua Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus ser masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca da Literasi pada Satuan Pendidikan	68	Lokus	267,814,200	68	Lokus	157,514,125	68	Lokus	331,469,200	10	110,824,525	10	110,824,525	78	268,338,650	0%	100%	DPK
		PROGRAM PELESTARIAN NASKA KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan koleksi naskah kuno	25	%	25,000,000	0	%	-	33	%	101,377,050		14,249,360	0	14,249,360	0	14,249,360	0%	57%	DPK

		Pelestarian Naskah Ku Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi naskah kuno	2	Naskah	25,000,000		Naskah	-	3	Naskah	101,377,050	0	14,249,360	0	14,249,360	0	14,249,360	1%	57%	DPK
		Peningkatan Peran Ser Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawat pelestarian, dan pendaftaran Naskah Ku	Jumlah masyarakat yan berperan dalam penyimpanan, perawata pelestarian dan pendaftaran naskah kur	1	Orang	25,000,000	0	Orang	-	100	Orang	101,377,050	1	14,249,360	1	14,249,360	1	14,249,360	1%	57%	DPK
3	Meningkatn penyelamat pembinaan dan penata arsip secar baku di OPI		Rata-rata Nilai LAKI OPI	70,5		117,471,200	83.03		222,895,435	83,08		96,444,510		3,000,000	0	3,000,000	83.	225,895,435	132%	192%	

		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang menerapkan arsip secar baku	50	%	25,000,000	62.50	%	133,664,305	60	%	50,033,450		3,000,000	0	3,000,000	62.	136,664,305	125%	547%	DPK
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/K	Jumlah OPD yang melaksanakan pengolah arsip dinamis		OPD	-	15	OPD	133,664,305	20	OPD	24,999,850		3,000,000	0	3,000,000	15	136,664,305	1%	0%	DPK
		Pengawasan arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Lapora	-	23	Lapor	133,664,305	23	Lapo n	24,999,850		3,000,000	0	3,000,000	23	136,664,305	1%	0%	DPK
		Pengelolaan Arsip Stat Daerah Kabupaten/Kot	Jumlah OPD yang melaksanakan pengolah arsip statis	15	OPD	25,000,000	15	OPD	-	20	OPD	-		-	0	-	15	-	1%	0%	DPK

		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yan Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	23	Lapora	25,000,000		Lapor	-		Lapo n	-		-	0	-	0	-	1%	0%	DPK
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kot	Persentase jumlah arsip statis yang telah tersedi di JIKN	0	%	-	0	%	-	60	%	25,033,600		-	0	-	0	-	0%	0%	DPK
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kerasipan Tingkat daer Kabupaten/Kota Melalu JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daera kabupaten/kota melalui JIKN	0	Pengg a	-	0	Pengg na	-	400	Peng na	25,033,600		-	0	-	0	-	1%	0%	DPK
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSI	Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan pa LKD	5000	Dokun n	92,471,200	5996	Dokun n	89,231,130	5000	Doku en	46,411,060		-	0	-	599	89,231,130	1%	96%	DPK

		Perlindungan dan Penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kab/Kota	Persentase jumlah arsip yang diperbaiki	50	%	22,000,000	66.67	%	22,531,550	60	%	14,421,260		-	0	-	66.	22,531,550	133%	102%	DPK
		Pemulihan dan Penyelamatan arsip akibat bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	15	Arsip	22,000,000	20	Arsip	22,531,550	15	Arsip	14,421,260		-	0	-	20	22,531,550	1%	102%	DPK
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip alihmed kota	75	%	70,471,200	75	%	66,699,580	75	%	31,989,800		-	0	-	75	66,699,580	100%	95%	DPK

		Penilaian dan Penetapa Autentisitas Arsip Stati Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahar Arsip	Jumlah Daftar Autentisi Arsip Sesuai Persyarata Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1000	Arsip	70,471,200	1,644	Arsip	66,699,580	1000	Arsi	31,989,800		-	0	-	164	66,699,580	1%	95%	DPK
						4,498,209,882			5,105,101,957			5,923,890,660									
Rata - rata capaian kinerja (%)													19.93%	1,180,891,096	19.93%	1,180,891,096		6,285,993,053			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 didasarkan pada review hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 juga menyajikan perkiraan realisasi capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan s.d Triwulan I Tahun 2025 serta proyeksi realisasi capaian Renstra Tahun 2025 dan tahun 2026. Pencapaian terhadap indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang meliputi indikator sasaran, indikator program, SPM, sesuai dengan tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN (INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2025

S.D TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Indikator Tujuan Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian (Tahun) s.d TW I Tahun 2025	Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2024	2025		2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat			59	60	0	59	60	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			86,79	87,05	0	96,80	87,05	
2	Nilai LAKE			80,5	87,5	0	80,5	87,5	
	Rata-rata Nilai LAKI OPD			70,5	71	0	83,08	71	

2.3. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinan Perpustakaan dan Kearsipan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagaian kewenangan Pemerintah Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dibidang perpustakaan dan kearsipan disadari bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum melaksanakan fungsinya secara optimal.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwasanya Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban:

a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
c. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
d. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
e. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
f. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dijelaskan bahwa Unit kearsipan pada pemerintahan daerah berada di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah dan memiliki tugas :

a. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah;
b. Melaksanakan pemusnahan arsip dari lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah;
c. Mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah kepada lembaga kearsipan daerah; dan
d. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.

Belum terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain:

Pemetaan Permasalahan

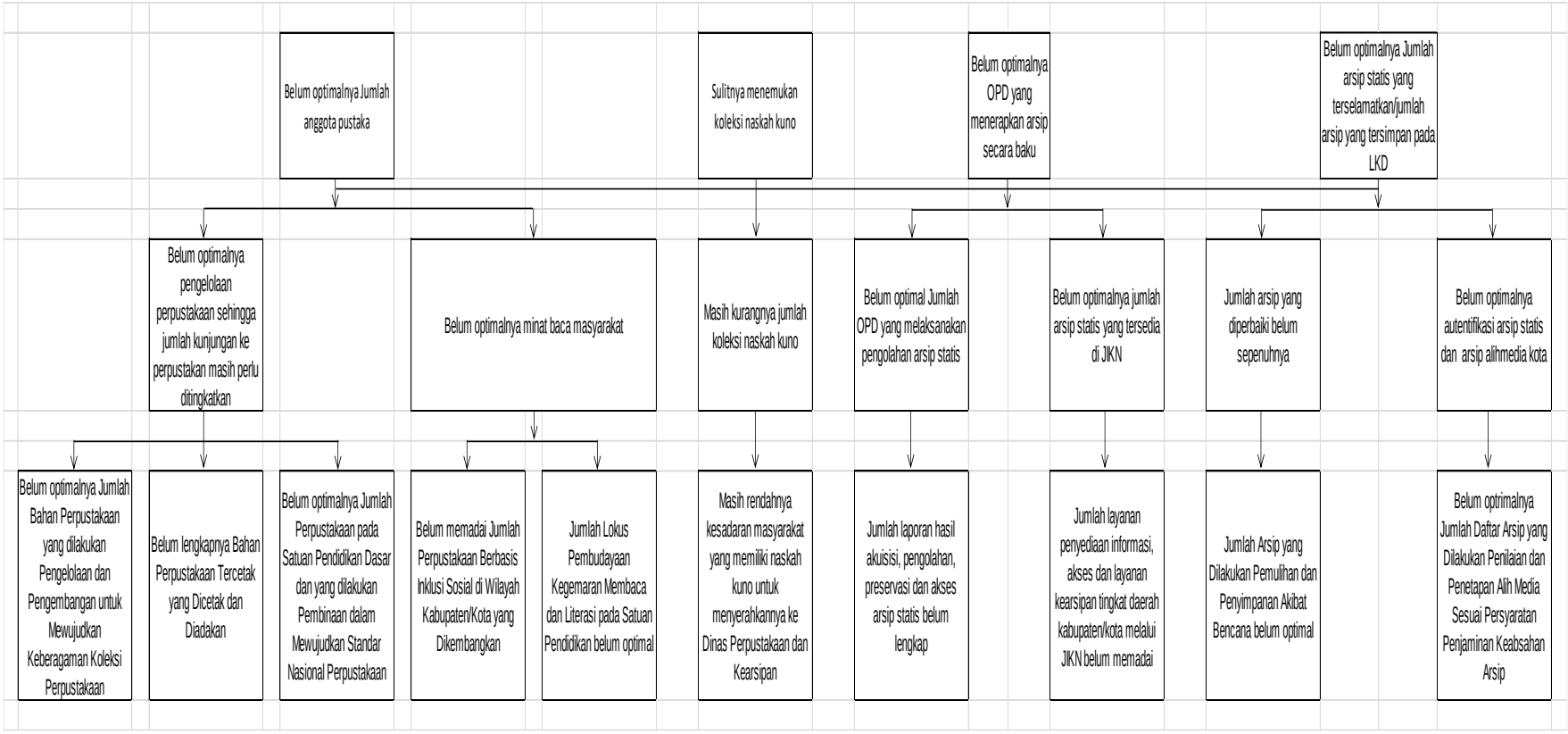
No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket.
1.	Belum optimalnya Jumlah anggota pustaka	Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan sehingga jumlah kunjungan ke perpustakan masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya Jumlah Bahan Perpustakaan yang dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	
			Belum lengkapnya Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	
			Belum optimalnya Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	
		Belum optimalnya minat baca masyarakat	Belum memadai Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan belum optimal	
2.	Sulitnya menemukan koleksi naskah kuno	Masih kurangnya jumlah koleksi naskah kuno	Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang memiliki naskah kuno untuk menyerahkannya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
3.	Belum optimalnya OPD yang menerapkan arsip secara baku	Belum optimal Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip statis	Jumlah laporan hasil akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis belum lengkap	
		Belum optimalnya jumlah arsip statis yang	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN belum memadai	

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket.
		tersedia di JIKN		
4.	Belum optimalnya Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan pada LKD	Jumlah arsip yang diperbaiki belum sepenuhnya	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana belum optimal	
		Belum optimalnya autentifikasi arsip statis dan arsip alihmedia kota	Belum optimalnya Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	

GAMBAR 2.1

POHON MASALAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KOTA PADANG PANJANG



2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disusun dengan mengacu pada rancangan awal Perubahan RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan awal Perubahan RKPD, untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kota Padang Panjang

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakan dan Kearsipan

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				4.527.007.882					4.954.748.652	427.740.770	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				4.384.536.682					4.850.805.032	466.268.350	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	100 Persen	3.693.264.682	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	100 Persen	4.299.940.982	606.676.300	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	95 Persen	2.812.779.682	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	3.228.673.662	- 415.893.980	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/Sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang/bulan	2.812.779.682	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang/bulan	3.228.673.662	- 415.893.980	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**90 Persen**	**223.405.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**90 Persen**	**144.153.330**	**79.251.670**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.605.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.161.500	443.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	33.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	33.000.000	-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	21.800.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9.709.600	12.090.400	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan Semua	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	162.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	95.282.230	66.717.770	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
		Kel/Desa					Kel/Desa					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100%**	**10.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100%**	**15.000.000**	**5.000.000**	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.000.000	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**90 Persen**	**502.080.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**	**688.798.990**	**186.718.990**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Padang Panjang, Semu Kecamatan, Semua Kel/De	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.347.200	4.652.800	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Padang Panjang, Semu Kecamatan, Semua Kel/De	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48.011.790	11.790	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/Sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	448.080.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	639.440.000	191.360.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**80 Persen**	**145.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**80 Persen**	**223.315.000**	**78.315.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	53.140.000	8.140.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	45.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	125.285.000	80.285.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/Sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	22.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	24.890.000	2.890.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamata, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	33.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	70.000.000	37.000.000	
2.	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		**Jumlah anggota pustaka**	**3325 Orang**	**641.272.000**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**		**Jumlah anggota pustaka**	**3325 Orang**	**500.864.050**	**140.407.950**	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah kunjungan ke Perpustakaan**	**32000 Orang**	**382.622.000**	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah kunjungan ke Perpustakaan**	**32000 Orang**	**242.216.500**	**140.405.500**	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Tanah Pak Lambik	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	48.500.000	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Tanah Pak Lambik	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	48.495.000	5.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/Sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**		
	Pengembangan Bahan Pustaka	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	700 Eksemplar	35.000.000	Pengembangan Bahan Pustaka	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicet dan Diadakan	-	-	35.000.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	700 Eksemplar	299.122.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untu Mewujudkan Keberagaman Kolek Perpustakaan	700 Eksemplar	193.721.500	105.400.500	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Persentase minat baca masyarakat**	**60 Persen**	**258.650.000**	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase minat baca masyarakat**	**60 Persen**	**258.647.550**	**2.450**	
	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	68 Lokus	200.000.000	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Memba dan Literasi pada Satuan Pendidikan	68 Lokus	199.997.800	2.200	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	6 Perpustakaan	58.650.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaa Berbasis Inklusi Sos di Wilayah Kabupaten/Kota yan Dikembangkan	6 Perpustak aan	58.649.750	250	
3	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN**		**Persentase peningkatan koleksi naskah kuno**	**33 Persen**	**50.000.000**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN**		**Persentase peningkatan koleks naskah kuno**	**33 Persen**	**-**	**50.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
	NASKAH KUNO					**NASKAH KUNO**						
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah Koleksi naskah kuno**	**3 Naskah**	**50.000.000**	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah Koleksi naskah kuno**	**3 Naskah**	**-**	50.000.000	
	Peningkatan Peran Ser Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naska Kuno	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	1 Orang	50.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	1 Orang	-	50.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				**142.471.200**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**103.943.620**	**9.000**	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSI**		**Persentase OPD yang menerapkan arsip secara barku**	**50 Persen**	**50.000.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**		**Persentase OPD yang menerapkan arsip secara barku**	**50 Persen**	**50.009.000**	**9.000**	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip statis**	**20 OPD**	**25.000.000**	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip statis**	**20 OPD**	**25.000.000**	**-**	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan Preservasi dan Akse Arsip Statis	23 Arsip	25.000.000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	23 Arsip	25.000.000	-	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		**Persentase jumlah arsip statis yang telah tersedia di JIKN**	**60 Persen**	**25.000.000**	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**		**Persentase jumlah arsip statis yang telah tersedia di JIKN**	**60 Persen**	**25.009.000**	**9.000**	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	400 Pengguna	25.000.000	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	400 Pengguna	25.009.000	9.000	
5	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		**Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan pada LKD**	**5000 Dokumen**	**92.471.200**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**		**Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan pada LKD**	**5000 Dokumen**	**53.934.620**	38.536.580	
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota		**Persentase jumlah arsip yang diperbaiki**	**50 Persen**	**22.000.000**	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**		**Persentase jumlah arsip yang diperbaiki**	**50 Persen**	**21.943.120**	**56.880**	
	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	15 Arsip	22.000.000	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	15 Arsip	21.943.120	56.880	
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		**Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip**	**75 Persen**	**70.471.200**	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media**		**Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip**	**75 Persen**	**31.991.500**	**38.479.700**	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp)**	**Program/ Kegiatan/Sub kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp)**		
			alihmedia kota			**Kabupaten/Kot**		**alihmedia kota**				
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Med Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1000 Arsip	70.471.200	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1000 Arsip	31.991.500	38.479.700	

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Perubahan Renja tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak terdapat usulan program, kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat yang diperoleh dari Pokok Pikiran DPRD.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Dalam RKP Tahun 2025 diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan;

RKP 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Arah pembangunan yang termuat dalam RKP dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) dan *Non-State Actor* untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Berikut adalah kebijakan dan inisiatif utama Provinsi Sumatera Barat yang relevan dengan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026

   RPJMD Provinsi Sumatera Barat menetapkan peningkatan literasi dan pengelolaan informasi sebagai prioritas pembangunan. Fokus utama meliputi:

- Penguatan literasi masyarakat melalui pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- Digitalisasi layanan perpustakaan dan kearsipan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi.
- Pelestarian budaya lokal melalui pengelolaan arsip statis, seperti naskah kuno Minangkabau.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pustakawan dan arsiparis. *Implikasi untuk Kota Padang Panjang*: Renja 2025 harus memasukkan program yang mendukung literasi masyarakat, seperti pembinaan perpustakaan sekolah dan desa, serta pelatihan SDM untuk memenuhi standar kompetensi nasional. Program pelestarian budaya lokal juga perlu diperkuat, misalnya melalui dokumentasi kearifan lokal Minangkabau.

2. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

   Provinsi Sumatera Barat aktif mendukung program nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, sebagaimana ditunjukkan melalui kegiatan Replikasi Mandiri pada 23 Mei 2023. Program ini bertujuan meningkatkan literasi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok marginal (misalnya, masyarakat miskin, anak terlantar, dan komunitas terpencil), melalui layanan perpustakaan yang inklusif, seperti perpustakaan keliling dan Taman Baca Masyarakat (TBM). *Implikasi untuk Kota Padang Panjang*: Renja 2025 perlu mengintegrasikan kegiatan yang mendukung inklusi sosial, seperti layanan perpustakaan keliling di kelurahan terpencil atau program literasi untuk kelompok rentan, sesuai dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (Community Based Development) yang disebutkan dalam dokumen Renja.

3. Pengembangan Layanan Perpustakaan Digital

   Provinsi Sumatera Barat telah memulai transformasi digital melalui pengembangan layanan perpustakaan online dan pendirian Rumah Pustaka Buku Balega di Padang sebagai pusat literasi. Selain itu, provinsi mendorong penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan literasi dan numerasi, meskipun menghadapi tantangan seperti biaya implementasi dan privasi data. *Implikasi untuk Kota Padang*

Panjang: Renja 2025 dapat mengadopsi pendekatan digital dengan mengembangkan platform perpustakaan digital sederhana atau memperluas akses ke koleksi digital. Namun, keterbatasan anggaran dan kebutuhan pelatihan SDM harus diatasi melalui kemitraan dengan provinsi atau lembaga lain.

4. Pembinaan Kearsipan dan Digitalisasi Arsip

   Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan pembinaan kearsipan, termasuk melalui Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan pada 2019. Fokusnya adalah pengelolaan arsip dinamis dan statis, serta percepatan digitalisasi arsip untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Provinsi juga menekankan pelatihan arsiparis untuk memenuhi standar kompetensi nasional. *Implikasi untuk Kota Padang Panjang*: Renja 2025 harus memasukkan program digitalisasi arsip, seperti pengembangan sistem informasi arsip berbasis teknologi, dan pelatihan tenaga arsiparis untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien.

5. Promosi Khasanah Arsip dan Literasi Lokal

   Provinsi Sumatera Barat mempromosikan pelestarian khasanah arsip lokal, seperti koleksi Irwan Prayitno Corner, dan mendukung literasi berbasis kearifan lokal melalui kegiatan seperti resensi buku, lomba literasi, dan promosi perpustakaan. Hal ini bertujuan memperkuat identitas budaya Minangkabau dan meningkatkan minat baca masyarakat. *Implikasi untuk Kota Padang Panjang*: Renja 2025 dapat mengembangkan program serupa, seperti pengumpulan naskah kuno Minangkabau, dokumentasi kearifan lokal, atau kegiatan promosi literasi berbasis budaya, untuk memperkaya koleksi perpustakaan dan arsip daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tujuan

Tujuan ditetapkan dengan berpedoman kepada pencapaian kinerja 5 tahun sebelumnya sehingga rumusannya harus dapat menunjukan suatu kondisi

yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Untuk itu tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah ini adalah guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang

Sasaran

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi,sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PADANG PANJANG

SEBELUM				SESUDAH			
No	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**No**	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target**
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	96,80	1	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	74
2	Meningkatnya penyelamatan, pembinaan dan penataan arsip secara baku di OPD	Rata-rata Nilai LAKI OPD	83,08	2	Meningkatnya Konservasi, Pembinaan dan Penataan Arsip Secara Baku di OPD	Rata-rata Nilai LAKI OPD	83,08
				3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	68,5

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 serta Review Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Panjang Tahun 2024-2026;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025.
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 sebagaimana table 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Padang Panjang

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							**4.954.748.652**	**5.923.890.660**	**5.215.021.218**							**4.465.009.882,00**	
	2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**4.954.748.652**	**5.923.890.660**	**5.215.021.218**							**4.465.009.882,00**	
	2.23.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**4.850.805.032**	**5.827.446.150**	**5.199.353.368**							**4.347.538.682,00**	
##	**2.23.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.349.940.982**	**4.396.873.900**	**4.061.613.493**							**3.736.264.682,00**	
	2.23.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**		**100 %**	**95 %**	**100 %**	**3.228.673.662**	**3.299.338.919**	**3.229.825.218**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**			**2.812.779.682,00**	**DPK**
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2184 orang		364 orang	364 Orang/bulan	364 orang	3.228.673.662	3.299.338.919	3.229.825.218	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			2.812.779.682,00	DPK
	2.23.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**90 %**		**90 %**	**90 %**	**90 %**	**144.153.330**	**138.476.831**	**42.783.050**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**			**276.405.000,00**	**DPK**
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 paket		8 paket	4 Paket	4 paket	6.161.500	4.522.300	1.748.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			6.605.000,00	DPK
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 paket		25 paket	4 Paket	4 paket	33.000.000	25.866.531	12.002.650	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			33.000.000,00	DPK
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 paket		7 paket	4 Paket	4 paket	9.709.600	9.342.000	5.783.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			21.800.000,00	DPK
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan		200 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	95.282.230	98.746.000	23.249.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			215.000.000,00	DPK

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.23.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100**		**100 %**	**100 %**	**0 %**	**15.000.000**	**15.000.000**	**-**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**			**0,00**	**DPK**
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 unit		0 unit	1 Unit	0 unit	15.000.000	15.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0,00	DPK
	2.23.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**90 %**		**90 %**	**90 %**	**90 %**	**688.798.990**	**691.383.150**	**668.015.225**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**			**502.080.000,00**	**DPK**
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 laporan		12 laporan	12 Laporan	12 laporan	1.347.200	785.800	517.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			6.000.000,00	DPK
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288 laporan		60 laporan	48 Laporan	48 laporan	48.011.790	27.795.350	27.895.325	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			48.000.000,00	DPK
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 laporan		16 laporan	12 Laporan	12 laporan	639.440.000	662.802.000	639.602.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			448.080.000,00	DPK
	2.23.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**80 %**		**80 %**	**80 %**	**80 %**	**273.315.000**	**252.675.000**	**120.990.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**			**145.000.000,00**	**DPK**
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit		0 unit	1 Unit	1 unit	53.140.000	53.140.000	31.646.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			45.000.000,00	DPK
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 unit		11 unit	10 Unit	6 unit	125.285.000	137.435.000	81.104.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			45.000.000,00	DPK

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	216 unit		46 unit	46 Unit	16 unit	24.890.000	22.400.000	8.240.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			22.000.000,00	DPK
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit		3 unit	3 Unit	0 unit	70.000.000	39.700.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			33.000.000,00	DPK
##	**2.23.02.**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase peningkatan pengelolaan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan**	**17 Lembaga**		**0 Lembaga**	**3325 Orang**	**3325 Orang**	**500.864.050**	**1.329.195.200**	**1.036.362.825**							**611.274.000,00**	
	2.23.02.2.01.	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kunjungan ke perpustakaan**	**39000 Orang**		**37418 Orang**	**32000 Orang**	**38001 Orang**	**242.216.500**	**392.754.450**	**245.240.650**			-	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**			**351.500.000,00**	**DPK**
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	48.495.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			51.500.000,00	DPK
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	101 Dokumen		0 Dokumen	-	50 Dokumen	-	48.622.850	48.622.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0,00	DPK
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	6600 Eksemplar		786 Eksemplar	700 Eksemplar	700 Eksemplar	193.721.500	175.679.700	28.165.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			300.000.000,00	DPK
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	870 Eksemplar		0 Eksemplar	-	145 Eksemplar	-	158.471.900	158.471.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0,00	DPK
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	2 Perpustakaan		4 Perpustakaan	-	1 Perpustakaan	-	9.980.000	9.980.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0,00	DPK
	2.23.02.2.02.	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan minat baca masyarakat**	**17,0%**		**5,0%**		**7,0%**	**258.647.550**	**936.440.750**	**791.122.175**			-	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**			**259.774.000,00**	**DPK**
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	17 Perpustakaan		5 Perpustakaan	6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	58.649.750	101.892.700	43.097.425	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			59.774.000,00	DPK

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Perpustakaan		0 Perpustakaan	-	1 Perpustakaan	-	39.750.000	39.750.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0,00	DPK
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	54 Orang		0 Orang	-	9 Orang	-	463.328.850	463.328.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0,00	DPK
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	408 Lokus		68 Lokus	68 Lokus	68 Lokus	199.997.800	331.469.200	244.945.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			200.000.000,00	DPK
##	**2.23.03.**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase Peningkatan koleksi naskah kuno yang terdaftar**	**100 %**		**25 %**	**-**	**37,5 %**	**-**	**101.377.050**	**101.377.050**							**0,00**	
	2.23.03.2.01.	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koleksi naskah kuno**	**8 koleksi**		**0 koleksi**	**-**	**4 koleksi**	**-**	**101.377.050**	**101.377.050**			-	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**			**0,00**	**DPK**
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	600 Orang		0 Orang	-	100 Orang	-	101.377.050	101.377.050	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0,00	DPK
	2.24.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**103.943.620**	**96.444.510**	**15.667.850**							**117.471.200,00**	
##	**2.24.02.**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku**	**91,3 %**		**43,48%**	**60 %**	**69,57%**	**50.009.000**	**50.033.450**	**15.667.850**							**25.000.000,00**	
	2.24.02.2.01.	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsp dinamis**	**19 OPD**		**14 OPD**	**20 OPD**	**15 OPD**	**25.000.000**	**24.999.850**	**15.667.850**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**			**0,00**	**DPK**
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	138 Laporan		23 Laporan	23 Laporan	23 Laporan	25.000.000	24.999.850	15.667.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0,00	DPK
	2.24.02.2.03.	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah arsip Statis yang telah tersedia di JIKN**	**70%**		**0 %**	**60 %**	0 %	**25.009.000**	**25.033.600**	**-**			-	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**			**25.000.000,00**	**DPK**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	550 Pengguna		0 Pengguna	400 Pengguna	0 Pengguna	25.009.000	25.033.600	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			25.000.000,00	DPK
##	**2.24.03.**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**83,3 %**		**58,30%**		**65,5 %**	**53.934.620**	**46.411.060**	**-**							**92.471.200,00**	
	2.24.03.2.02.	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah arsip yang diperbaiki**	**75 %**		**66,67 %**	**60 %**	**0 %**	**21.943.120**	**14.421.260**	**-**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**			**22.000.000,00**	**DPK**
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	100 Arsip		20 Arsip	15 Arsip	0 Arsip	21.943.120	14.421.260	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			22.000.000,00	DPK
	2.24.03.2.04.	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip alihmedia kota**	**75 %**		**75 %**	**75 %**	0 %	**31.991.500**	**31.989.800**	**-**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**			**70.471.200,00**	**DPK**
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	4000 Arsip		1644 Arsip	1000 Arsip	0 Arsip	31.991.500	31.989.800	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			70.471.200,00	DPK

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan program dan kegiatan dengan dinamika perkembangan keadaan, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Revisi ini berlandaskan evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang 2024-2026. Dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (Community Based Development), Renja ini mengutamakan keterlibatan pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan mendukung kebutuhan masyarakat.

Perubahan Renja ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025, yang dirumuskan berdasarkan analisis isu strategis, indikator kinerja, dan pagu indikatif sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025. Implementasi Perubahan Renja bergantung pada komitmen bersama, koordinasi yang efektif, dan ketersediaan anggaran yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Penyesuaian program dan kegiatan dilakukan untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan masyarakat serta efisiensi pengelolaan sumber daya.

Dokumen Perubahan Renja ini juga menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan mendukung akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dengan sinergi seluruh pihak terkait, Perubahan Renja 2025 diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat, mengoptimalkan pengelolaan kearsipan, dan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Padang Panjang..

Padang Panjang, 30 Juni 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kota Padang Panjang



YAN KAS BARI, SE

Pembina Utama Muda NIP. 1968011319940110

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehinggga Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat disusun. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan suatu bentuk tanggungjawab Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata untuk melaksanakan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan acuan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahunan yang merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan serta rumusan indikator kinerja yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan dan terukur secara kuantitatif. Dengan demikian pelaksanaan Program kegiatan yang selama ini berorientasi pada indikator kinerja output dan realisasi keuangan sudah lebih diarahkan kepada pencapaian-pencapaian target kinerja hasil yang terukur dan mempunyai dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya besar harapan Kami penyusunan perubahan Rencana kerja ini bisa bermanfaat sebagai acuan bagi seluruh aparatur dinas dalam melaksanakan tugas-tugas pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Juni 2025
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata
Kota Padang Panjang

NURASRIZAL, ST.MT
Pembina Tingkat I, NIP. 19770829 200501 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN .....
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 8
2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sd Triwulan I 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang 16
2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD ... 18
2.4 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat 28
2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang 29

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 30
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional / Provinsi 30
3.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 30
3.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunnan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 35
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 38
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 41

BAB IV PENUTUP 51

DAFTAR TABEL

2.1	EVALUASI RENJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG TAUN 2025 SD TRIWULAN 1	9
2.2	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	17
2.3	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KOTA PADANG PANJANG	19
2.4	PENELAAHAN USULAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN 2025 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG	28
2.5	USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ASPIRASI MASYARAKAT TAHUN 2025 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG	28
3.1	SASARAN STRATEGIS KEMENTRIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 2025-2029	32
3.2	MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029	40
3.3	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	40
3.4	RUMUSAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026	44

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Tahapan Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang	2
GAMBAR 1.2	Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD	3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Perubahan Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Proses penyusunan perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah

dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang yang berpedoman pada RPJMD 205-2029.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui tahapan, meliputi :

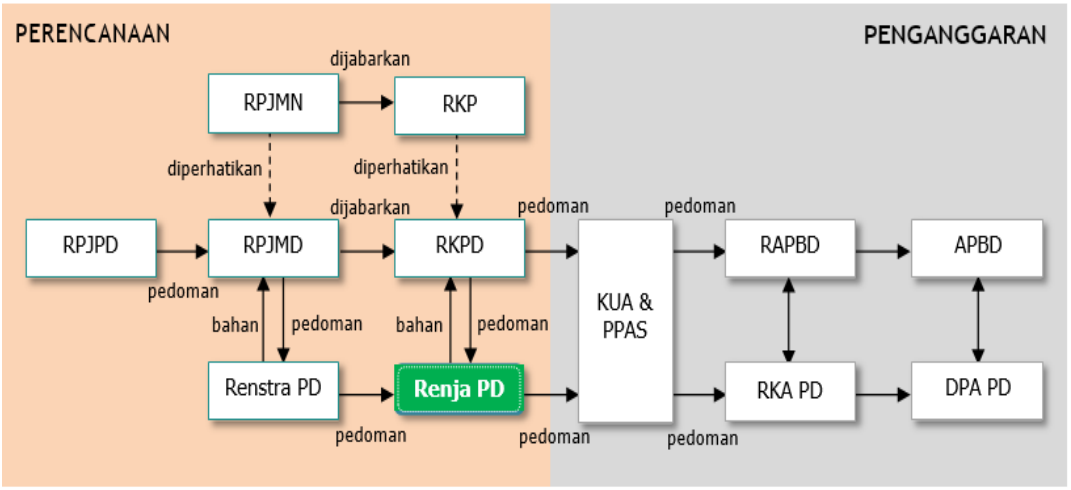
1. Persiapan penyusunan
   Meliputi pembentukan tim penyusun Renja PD Tahun 2025, Pengumpulan hasil evaluasi renja 2024, pengendalian kegiatan tahun 2024.
2. Tahap perumusan rancangan Perubahan Renja OPD, meliputi :
   a. Pengolahan data dan informasi
   b. Analisis gambaran pelayanan OPD
   c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
   d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
   e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
   f. Perumusan tujuan dan sasaran
   g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
   h. Perumusan kegiatan prioritas
   i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
   j. Penyempurnaan rancangan Renja OPD
   k. Pembahasan forum OPD
3. Penyusunan rancangan
   Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Bappeda Kota Padang panjang Tahun Anggaran 2025, Masukan dari pelaksana kegiatan pembahasan oleh tim Bappeda.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Tahap penyajian rancangan Perubahan Renja PD, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam bentuk rancangan akhir
6. Tahap Penetapan Perubahan Rencana Kerja PD

GAMBAR 1.1
Tahapan Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang



Perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025-2029 untuk melihat hubungan antar dokumen dapat kita lihat pada tabel berikut:

Gambar 1.2
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan perubahan Renja Disporapar Kota Padang Panjang Tahun 2025 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Inndonesia Nomor 5169)
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
8. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6975)
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 212);
16. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 75);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);

28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
32. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
33. Peraturan Wali Kota No 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 5)
34. Peraturan Wali kota Padang Panjang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
35. Peraturan Wali kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 10)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan penyusunan perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025.
2. Sebagai salah satu dokumen acuan dalam penyusunan perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan RKA Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I **Pendahuluan**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II **Hasil Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025**

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan 1 Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2025) serta keterkaitan dengan pencapaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun 2025, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III **Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata**

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta Program, kegiatan dan sub kegiatan.

Bab IV **Penutup**

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sd Triwulan I

Kualitas perubahan Renja-PD yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun perubahan Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD Triwulan I tahun berkenaan, dikaitkan dengan pencapaian Renstra-PD. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun berkenaan dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025, perlu diperhatikan hasil evaluasi Renja Tahun berkenaan terhadap capaian Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025-2029,

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

TABEL 2.1
EVALUASI RENJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025 S.D TRIWULAN 1

Nama Perangkat Daerah : DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	Sasaran	Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026(S/D akhir periode Renstra PerangKat Daerah)		Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan renja Perangkat Daerah Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan/Th yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realiasasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
				(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	
	Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata**			**100%**	**4,997,903,174**	**100 Persen**	**5,542,768,093**		**1,265,278,194**		**1,265,278,194**		**6,263,181,368**			**Disporapar**
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**			**100%**	**3,989,675,116**	**100 Persen**	**3,707,633,330**		**941,403,419**		**941,403,419**		**4,931,078,535**			**Disporapar**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			378 Orang/Bulan	3,989,675,116.00	406 Orang/Bulan	3,707,633,330	104 orang/ bulan	941,403,419	104 orang/ bulan	941,403,419		4,931,078,535		-	Disporapar
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**			**100%**	**13,500,000**	**100%**	**-**		**-**		**-**		**13,500,000**			**Disporapar**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			27 paket	13,500,000	0		0	-	0	-		13,500,000		-	Disporapar
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah**			**100%**	**290,264,432**	**100%**	**199,909,140**		**41,202,710**		**41,202,710**		**331,467,142**			**Disporapar**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 paket	11,923,400	4 paket	14,988,920	1 paket	1,680,000	1 paket	1,680,000		13,603,400		-	Disporapar
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 paket	27,795,000	4 paket	28,919,470	1 paket	2,496,400	1 paket	2,496,400		30,291,400		-	Disporapar
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 paket	15,461,300	12 paket	20,999,750	4 paket	4,179,000	4 paket	4,179,000		19,640,300		-	Disporapar
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan			100 laporan	235,084,732	100 laporan	135,001,000	25 laporan	32,847,310	25 laporan	32,847,310		267,932,042		-	Disporapar

NO	Sasaran	Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026(S/D akhir periode Renstra PerangKat Daerah)		Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan renja Perangkat Daerah Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan/Th yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realiasasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
				(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	
		Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**			**100%**	**50,402,285**	**100%**	**35,003,400**		**-**		**-**		**50,402,285**			**Disporapar**
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 unit	4,610,000	4 unit	11,438,200	0	-	0	-		4,610,000		-	Disporapar
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 unit	45,792,285	3 unit	23,565,200	0	-	0	-		45,792,285		-	Disporapar
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**			**100%**	**91,846,557**	**100%**	**1,394,317,423**		**264,930,065**		**264,930,065**		**704,994,471**			**Disporapar**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 laporan	2,140,000	12 laporan	2,997,400	3 laporan	1,390,000	3 laporan	1,390,000		3,530,000		-	Disporapar
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 laporan	89,706,557	36 laporan	114,765,000	9 laporan	25,958,337	9 laporan	25,958,337		115,664,894		-	Disporapar
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	348,217,849	12 laporan	1,276,555,023	1 laporan	237,581,728	1 laporan	237,581,728		585,799,577		-	Disporapar
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik**			**100%**	**213,996,935**	**100%**	**205,904,800**		**17,742,000**		**17,742,000**		**231,738,935**		**-**	**Disporapar**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			7 unit	98,184,550	7 unit	115,960,000	3 unit	15,687,000	3 unit	15,687,000		113,871,550		-	Disporapar
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			0 unit	-	20 unit	4,000,000	0	-	0	-		-		-	Disporapar
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15,754,750	60 unit	35,972,800	5 unit	2,055,000	5 unit	2,055,000		17,809,750		-	Disporapar
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 unit	100,057,635	4 unit	49,972,000	0	-	0	-		100,057,635		-	Disporapar
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**Pemenuhan indikator kota layak pemuda**			**3 indikator**	**169,109,584**	**4 indikator**	**243,396,950**		**409,500**		**409,500**		**169,519,084**		**-**	**Disporapar**

NO	Sasaran	Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026(S/D akhir periode Renstra PerangKat Daerah)		Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan renja Perangkat Daerah Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan/Th yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realiasasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
				(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda**			**2 kegiatan**	**169,109,584**	**2 kegiatan**	**143,396,950**	**1 kegiatan**	**409,500**	**1 kegiatan**	**409,500**		**169,519,084**			**Disporapar**
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausaahaan pemuda bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kab/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			60 orang	110,829,334	30 orang	78,149,900	0	-	0	-		110,829,334		-	Disporapar
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya			60 orang	58,280,250	30 orang	65,247,050	30 orang	409,500	30 orang	409,500		58,689,750		-	Disporapar
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					**-**	**1 OKP**	**100,000,000**		**-**		**-**		**-**		**-**	**Disporapar**
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyeleggaraan Pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota					-	1 organisasi	100,000,000	0	-	0			-		-	Disporapar
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**Jumlah cabang olahraga yang dibina**			**44 cabang**	**23,075,137,559**	**45 cabang**	**4,238,093,820**	**45 cabang**	**343,006,571**	**45 cabang**	**343,006,571**					**Disporapar**
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan**			**1 kali**	**21,406,331,794**	**1 kali**	**2,434,627,720**	**1 kali**	**29,818,571**	**1 kali**	**29,818,571**					**Disporapar**
		Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olaharaga melalui perencanaan,	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			4 unit	21,406,331,794	4 unit	2,434,627,720	1 unit	29,818,571	1 unit	29,818,571		21,436,150,365		-	Disporapar

NO	Sasaran	Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026(S/D akhir periode Renstra PerangKat Daerah)		Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan renja Perangkat Daerah Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan/Th yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realiasasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
				(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	
		pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/Kota																
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan**			**1 kompetisi/ even**	**760,209,407**	**5 kompetisi/even**	**336,679,500**	**0 kompetisi /even**	**-**	**0 kompetisi/even**	**-**					**Disporapar**
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			1 Dokumen	351,504,884.00	2 kegiatan	336,679,500	0	-	0	-		351,504,884		-	Disporapar
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan			30 orang	408,704,523.00	0	-	0		0	-		408,704,523		-	Disporapar
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi**				**102,770,000**	**1 cabang olahraga**	**802,486,500**	**1 cabang olahraga**	**300,000,000**	**1 cabang olahraga**	**300,000,000**					**Disporapar**
		Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten / Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				100,520,000	200 Orang	802,486,500	50 orang	300,000,000	50 orang	300,000,000		400,520,000		-	Disporapar
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				2,250,000	0	-	0	-	0	-		2,250,000		-	Disporapar
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan**			**2 kegiatan**	**805,826,358**	**2 kegiatan**	**664,300,100**	**1 kegiatan**	**13,188,000**	**1 kegiatan**	**13,188,000**					**Disporapar**
		Pemassalan Olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			2 Dokumen	124,967,500	1 Dokumen	300,000,100	1 Dokumen	7,200,000	1 Dokumen	7,200,000		132,167,500		-	Disporapar
		Penyediaan Prasarana dan sarana Olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai			2 unit	680,858,858	3 Unit	364,300,000	1 unit	5,988,000	1 unit	5,988,000		686,846,858		#DIV/0!	Disporapar

NO	Sasaran	Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026(S/D akhir periode Renstra PerangKat Daerah)		Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan renja Perangkat Daerah Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan/Th yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realiasasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
				(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina**			**1 Organisasi**	**107,840,507**	**1 Organisasi**	**150,000,000**	**1 cabang olahraga**	**100,000,000**	**1 cabang olahraga**	**100,000,000**					**Disporapar**
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan**			**1 organisasi**	**107,840,507**	**1 organisasi**	**150,000,000**	**1 organisasi**	**100,000,000**	**1 organisasi**	**100,000,000**					**Disporapar**
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya			1 Organisasi	107,840,507	1 Organisasi	150,000,000	1 Organisasi	100,000,000	1 Organisasi	100,000,000		207,840,507		-	Disporapar
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																**Disporapar**
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					**1,842,087,740**		**1,443,944,550**		**47,814,181**		**47,814,181**					**Disporapar**
	Meningkatnya PAD Pariwisata	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Rasio lama kunjungan wisata**				**1,333,764,732**	**1,20**	**574,705,950**	**0**	**15,271,800**	**0**	**15,271,800**					**Disporapar**
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah destiinasi wisata yang dikelola**			**4**	**1,333,764,732**	**4 destinasi**	**574,705,950**	**0**	**15,271,800**	**00**	**15,271,800**					**Disporapar**
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)			2 lokasi	571,988,650	2 lokasi	83,601,200	0	-	0	-		571,988,650		-	
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara			2 unit	712,920,832	2 unit	287,080,000	1 unit	15,271,800	1 unit	15,271,800		728,192,632		-	Disporapar
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1 laporan	48,855,250	1 laporan	114,024,900	0	-	0	-		48,855,250		-	Disporapar
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				-	-	1 lokasi	89,999,850	0	-	0			-		-	Disporapar
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**Jumlah kunjungan wisata**			**600000 orang**	**173,355,500**	**660000**	**339,239,750**		**500,000**		**500,000**					**Disporapar**

NO	Sasaran	Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026(S/D akhir periode Renstra PerangKat Daerah)		Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan renja Perangkat Daerah Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan/Th yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realiasasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
				(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase cakupan pelayanan promosi wisata**			**90 Persen**	**173,355,500**	**90%**	**339,239,750**	**10 Persen**	**500,000**	**10 Persen**	**500,000**					**Disporapar**
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			10 Dokumen	7,997,500	0	-	0		0	-		7,997,500		-	Disporapar
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			3 Dokumen	57,750,000	3 dokumen	62,990,000	-		-	-		57,750,000		-	Disporapar
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			5 Kegiatan	107,608,000	7 kegiatan	276,249,750	1 kegiatan	500,000	1 kegiatan	500,000		108,108,000		-	Disporapar
	Pengembangan ekonomi kreatif	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**				**92,704,500**	**90 pelaku usaha ekonomi kreatif**	**80,000,000**		**-**		**-**					
		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah prasarana kreatif yang disediakan**				**25,620,000**	**1 kreatif hub**	**50,000,000**		**-**		**-**					**Disporapar**
		Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia			10 unit	25,620,000	10 unit	50,000,000	0	-	0	-		25,620,000		-	Disporapar
		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	**Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI**				**67,084,500**	**40 oroduk**	**30,000,000**		**-**		**-**					**Disporapar**
		Fasilitasi pemberian insentif				10 pelaku usaha/ 108 karya	46,980,000			-		-			46,980,000		-	Disporapar
		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku			30 produk	20,104,500	40 produk	30,000,000	0	-	0	-		20,104,500		-	Disporapar

NO	Sasaran	Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026(S/D akhir periode Renstra PerangKat Daerah)		Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan renja Perangkat Daerah Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan/Th yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I		Realiasasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
				(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	
			Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif															
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina**			**14 Sub sektor**	**121,131,504**	**14 sub sektor**	**249,999,400**	**1 cabang olahraga**	**32,042,381**	**1 cabang olahraga**	**32,042,381**					**Disporapar**
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina**			**14 sub sektor**	**121,131,504**	**14 sub sektor**	**199,999,450**	**14 sub sektor**	**32,042,381**	**14 sub sektor**	**32,042,381**					**Disporapar**
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif			1 laporan	52,748,000	3 laporan	159,999,750	1 laporan	12,500,000	1 laporan	12,500,000		65,248,000		-	Disporapar
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			30 Orang	68,383,504	30 orang	39,999,700	2 orang	19,542,381	2 orang	19,542,381		87,925,885		-	Disporapar
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif					**-**	**4 kelompok**	**49,999,950.00**		**-**		**-**		-			**Disporapar**
		Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						50 orang	49,999,950.00	0	-	0			-		-	Disporapar
	TOTAL						**30,070,947,060.13**		**11,418,203,963.**		**1,756,508,446.**		**1,756,508,446**		31,827,455,506			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA %																		
PREDIKET KINERJA										15.38%	1,756,508,446	15.38%	1,756,508,446					

Berdasarkan tabel hasil evaluasi Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Triwulan I Tahun 2025 diatas dapat dilihat beberapa capaian kinerja yang belum tercapai sesuai target pada triwulan I tahun 2025 . Beberapa kegiatan mengalami refocusing dan pergeseran pada beberapa sub kegiatan dalam upaya efisiensi anggaran sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan anggaran Pendapatan Belanja Negara dan APBD Tahun 2025.

Tabel diatas juga menggambarkan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, sampai dengan triwulan I Tahun 2025. Untuk indikator Sasaran dan Program, sebagian besar baru dapat dihitung pada akhir Tahun 2025, sementara untuk indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah mulai dilakukan pada triwulan I namun sebagian besar baru akan terealisasi sepenuhnya pada triwulan II, III dan IV.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis yang melaksanakan sebagian urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu dibidang kepemudaan, olahraga dan urusan pilihan pariwisata di Kota Padang Panjang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang.

Disusunnya perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 mendukung pencapaian tujuan Pembangunan daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, yaitu : T1“ Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Tinggi”, T2 “ Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Inklusif, serta Ketahanan Pangan Daerah yang Kuat” serta T3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani”.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Oalhraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kinerja pelayanan Disporapar.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Disporapar digunakan sasaran

(Indikator Kinerja Utama) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang. Berikut pencapaian kinerja Disporapar Kota Padang Panjang.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

	Indikator	SPMI	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian (Tahun)	Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*10*	*11*	*12*	*13*
T	Status Kota Layak Pemuda			Menuju Pratama	Menuju Pratama	Pratama	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Pratama	
	Rasio daya saing keolahragaan			0,2	0,25	0,30		0,25	0,30	
S	Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/ provinsi			1 prestasi nasional | 3 prestasi provinsi	2 prestasi nasional | 4 prestasi provinsi	3 prestasi nasional | 5 prestasi provinsi	0 prestasi nasional | 0 prestasi provinsi	2 prestasi nasional | 4 prestasi provinsi	3 prestasi nasional | 5 prestasi provinsi	
S	Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/ provinsi			2 prestasi nasional | 15 prestasi provinsi	3 prestasi nasional | 50 prestasi provinsi	3 prestasi nasional | 20 prestasi provinsi	9prestasi nasional | 33 prestasi provinsi	3 prestasi nasional | 50 prestasi provinsi	3 prestasi nasional | 20 prestasi provinsi	
S	PAD Sektor Pariwisata			300.000.000	350.000.000	400.000.000	2.283.382.152	350.000.000	400.000.000	
S	Persentase pemanfaatan dan perlindungan hak kekayan inteletual			10%	12%	14%		12%	14%	
IP	Pemenuhan indikator kota layak pemuda			3 Indikator	4 Indikator	5 Indikator	3 Indikator	4 Indikator	5 Indikator	
IP	Jumlah cabang olahraga yang dibina			44 cabang	45 cabang	46 cabang	44 cabang	45 cabang	46 cabang	
IP	Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina			1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	
IP	Rasio lama kunjungan wisata			1,15	1,2	1,25	1,15	1,2	1,25	
IP	Jumlah kunjungan wisata			600.000. orang	660.000. orang	700.000. orang	600.469 orang	660.000. orang	700.000. orang	
IP	Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			70 pelaku usaha Ekonomi kreatif	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif	110 pelaku usaha Ekonomi kreatif	70 pelaku usaha Ekonomi kreatif	90 pelaku usaha Ekonomi kreatif	110 pelaku usaha Ekonomi kreatif	
IP	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina			14 Sub sektor	14 Sub sektor	15 Sub sektor	14 Sub sektor	14 Sub sektor	15 Sub sektor	

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang tahun 2024 dan proyeksi target dua tahun berikutnya.

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Sasaran Disporapar tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan dengan Indikator “Jumlah pemuda berprestasi tingkat nasional/ provinsi “ sampai dengan triwulan 1 belum meraih prestasi baik ditingkat nasional maupun provinsi. Jumlah atlit berprestasi tingkat nasional/ provinsi sampai

dengan triwulan 1 meraih prestasi nasional sebanyak 25 prestasi dan prestasi provinsi sebanyak 23 prestasi.

b. Meningkatnya PAD pariwisata dengan indikator PAD sektor pariwisata sampai dengan triwulan 1 mencapai Rp. 624.497.333
c. Pengembangan ekonomi kreatif dengan indikator Persentase pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sampai dengan triwulan 1 belum memfasilitasi pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025 terdiri dari 8 (delapan) program, 17 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Dalam rancangan awal rencana kerja Tahun 2025 dengan pagu indikatif Rp. 14,203,117,706,- dan dalam rancangan awal perubahan rencana kerja tahun 2025 disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Wali kota dan Wakil Walikota Padang Panjang. Hasil telaahan terhadap rancangan perubahan RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3.

TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KOTA PADANG PANJANG

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA				**14,203,117,706**	**DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA**				**10,330,140,489**		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**12,370,296,756**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**9,034,546,789**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				**12,370,296,756**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**9,034,546,789**		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata**	**100 Persen**	**4,707,515,716**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata**	**100 Persen**	**5,550,987,793**		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**3,883,099,416**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**3,707,633,330**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	406 Orang/Bulan	3,883,099,416	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang/Bulan	3,707,633,330		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**199,912,300**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**134,863,940**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	14,991,100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	11,920,720		

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	28,920,200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	28,919,470		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	21,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	20,999,750		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	135,001,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	73,024,000		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100%**	**36,951,500**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100%**	**148,184,300**		
	Pengadaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	12,000,000	Pengadaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	4,619,100		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	24,951,500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	143,565,200		Pembelian mesin penghancur kertas, mesin scanner dan kendaraan bermotor roda 3 (betor)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**412,565,000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**1,394,317,423**		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2,997,400		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	114,765,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	114,765,000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	294,800,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,276,555,023		

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik**	**100%**	**174,987,500**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik**	**100%**	**165,988,800**		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	85,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	79,464,000		
	Pemeliharaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	4,000,000	Pemeliharaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 unit	4,000,000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	35,987,500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 unit	32,552,800		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	49,972,000		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		**Pemenuhan indikator kota layak pemuda**	**4 indikator**	**325,117,050**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		**Pemenuhan indikator kota layak pemuda**	**4 indikator**	**532,512,950**		
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		**Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda**	**2 kegiatan**	**275,117,050**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**		**Jumlah kegiatan kader pemuda pelopor dan wirausaha muda**	**2 kegiatan**	**432,512,950**		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausaahaan pemuda bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kab/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah wirausaha muda tingakt kabupaten/kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda	30 orang	178,150,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausaahaan pemuda bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kab/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah wirausaha muda tingakt kabupaten/kota yang difasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda	30 orang	291,465,900		1. Pengadaan alat studio musik (untuk youth centre) Rp. 140.000.000 (Drum lengkap, Gitae elektrik, Bass Elektrik, Keyboard, Microphone, Microphone drum, Stan Mix, Stand Gitar, Mixer 32 CH, Speaker Monitor Keybord vokal gitas bass drum, Speaker midrangeturbosound, speaker subwoofer, stabilizer, kabel, jack)

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
												2. Perencanaan pemenuhan fasilitas pelayanan kepemudaan yang berorientasi pada pemenuhan hak konseling kepemudaan, pelaksanaan ajang kreativitas pemuda seperti Rp. 80.000.000 Dianggarkan DEDnya terlebih dahulu
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota dari seluruh kabupaten/kota yang difaslilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda	30 orang	96,967,050	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepeloporan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota dari seluruh kabupaten/kota yang difaslilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda	30 orang	80,000,000		
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		**Jumlah organisasi yang diberdayakan dan dikembangkan**	**1 OKP**	**50,000,000**	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**		**Jumlah organisasi yang diberdayakan dan dikembangkan**	**1 OKP**	61,047,050		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyeleggaraan Pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah organisasi kepemudaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	1 organisasi	50,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyeleggaraan Pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah organisasi kepemudaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	1 organisasi	**100,000,000**		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		**Jumlah cabang olahraga yang dibina**	**45 cabang**	**7,187,663,990**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		**Jumlah cabang olahraga yang dibina**	**45 cabang**	100,000,000		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan**	**1 kali**	**3,040,264,000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan**	**1 kali**	**2,851,046,046**		
	Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olaharaga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 unit	3,040,264,000	Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olaharaga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 unit	**1,325,769,446**		1. Verifikasi teknis kawasan sport center Rp. 15.000.000 2. Retensi 2,5% pemeliharaan sarana olahraga sport center RP. 976.141.726,31

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan**	**5 kompetisi/even**	**2,936,690,090**	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah kompetisi / even olahraga yang diselenggarakan**	**5 kompetisi/even**	1,325,769,446		
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah kejuaraan olahraga multi event dan single event Tingkat Kabupaten/Kota	2 kegiatan	436,679,900	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah kejuaraan olahraga multi event dan single event Tingkat Kabupaten/Kota	2 kegiatan	**132,188,000**		
	Keikutsertaan anggota kontinen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan olahraga	Kota Padang Panjang	Jumlah Peserta pada penyelenggaraan kejuaraan tingkat kabupaten/kota	400 orang	2,500,010,190	Keikutsertaan anggota kontinen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan olahraga	Kota Padang Panjang	Jumlah Peserta pada penyelenggaraan kejuaraan tingkat kabupaten/kota	0 orang	132,188,000		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		**Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi**	**1 cabang olahraga**	**533,670,000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**		**Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi**	**1 cabang olahraga**			
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten / Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yangdibina dan diberikan Pengembangan	200 Orang	533,670,000	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten / Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yangdibina dan diberikan Pengembangan	200 Orang	**402,486,500**		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kota Padang Panjang	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	0	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kota Padang Panjang	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	0	402,486,500		
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		**Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan**	**2 kegiatan**	**677,039,900**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**		**Jumlah pelaksanaan senam dan olahraga rekreasi yang dilaksanakan**	**2 kegiatan**	**990,602,100**		
	Pemassalan Olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional	Kota Padang Panjang	Jumlah lembaga yang terfasilitasi dalam pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	1 Lembaga	99,999,900	Pemassalan Olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional	Kota Padang Panjang	Jumlah lembaga yang terfasilitasi dalam pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	1 Lembaga	716,822,000		
	Penyediaan Prasarana dan sarana Olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Kota Padang Panjang	Jumlah prasarana dan sarana keolahragaan kabupaten/kota yang tersedia dan termanfaatkan	3 Unit	577,040,000	Penyediaan Prasarana dan sarana Olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Kota Padang Panjang	Jumlah prasarana dan sarana keolahragaan kabupaten/kota yang tersedia dan termanfaatkan	3 Unit	273,780,100		1.Pekerjaan lintasan pacu, pekerjaan ban/pagar lintasan, pekerjaan tribun steward, pekerjaan paddock dan pekerjaan podium juara Rp.

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
												400.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		**Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina**	**1 Organisasi**	**150,000,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**		**Jumlah organisasi Kepramukaan yang dibina**	**1 Organisasi**	**100,000,000**		
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		**Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan**	**1 organisasi**	**150,000,000**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**		**Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan**	**1 organisasi**	**100,000,000**		
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	150,000,000	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	100,000,000		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				**1,832,820,950**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**1,295,593,700**		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				**1,832,820,950**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**1,295,593,700**		
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		**Rasio lama kunjungan wisata**	**1,20**	**1,106,580,950**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		**Rasio lama kunjungan wisata**	**1,20**	**671,675,400**		
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		**Jumlah destiinasi wisata yang dikelola**	**4 destinasi**	**1,106,580,950**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Jumlah destiinasi wisata yang dikelola**	**4 destinasi**	**671,675,400**		
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 lokasi	498,001,200	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 lokasi	197,615,450		1. Tambahan pengadaan Baju adat Rp. 45.000.000 2. Pengadaan Permainan tradisional Rp. 15.000.000 3. Penyusunan dokumen penataan Revitalisasi PDIKM Rp. 80.000.000
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 unit	454,080,000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 unit	331,522,900		1. Master plan pembangunan kawasan pemandian Lubuk mata kucing Rp. 100.000.000 2. Repro foto Rp.

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
												30.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 laporan	64,499,900	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 laporan	63,637,450		
	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	1 lokasi	89,999,850	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah lokasi yang menerapkan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	1 lokasi	78,899,600		
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		**Jumlah kunjungan wisata**	**660000**	**214,240,000**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		**Jumlah kunjungan wisata**	**660000**	**422,528,150**		
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		**Persentase cakupan pelayanan promosi wisata**	**90%**	**214,240,000**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**		**Persentase cakupan pelayanan promosi wisata**	**90%**	**422,528,150**		
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0	-	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0			
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 dokumen	62,990,000	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 dokumen	32,016,000		
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 kegiatan	151,250,000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 kegiatan	390,512,150		1. Tambahan festival seni Rp. 150.000.000 2. Cetak kalender even
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		**Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**90 pelaku usaha ekonomi kreatif**	**132,000,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**		**Jumlah pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**90 pelaku usaha ekonomi kreatif**	**44,175,000**		

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah prasarana kreatif yang disediakan**	**1 kreatif hub**	**102,000,000**	**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah prasarana kreatif yang disediakan**	**1 kreatif hub**	**30,000,000**		
	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	10 unit	102,000,000	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kota Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	8 unit	30,000,000		
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		**Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI**	**40 oroduk**	**30,000,000**	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**		**Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI**	**25 oroduk**	**14,175,000**		
	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Kota Padang Panjang	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	40 produk	30,000,000	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Kota Padang Panjang	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	25 produk	14,175,000		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		**Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina**	**14 sub sektor**	**380,000,000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		**Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina**	**14 sub sektor**	**157,215,150**		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		**Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina**	**14 sub sektor**	**330,000,000**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**		**Jumlah Sub Sektor Ekraf yang dibina**	**14 sub sektor**	**130,030,200**		
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 laporan	240,000,000	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 laporan	93,280,500		
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Padang Panjang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 orang	40,000,000	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Padang Panjang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	2 orang	36,749,700		

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					SELISH	Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13=11-6	12
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		50,000,000		Kota Padang Panjang					
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			**4 kelompok**	**50,000,000.00**	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**			**4 kelompok**	**27,184,950**		
	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kota Padang Panjang		50 orang	50,000,000.00	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kota Padang Panjang		20 orang	27,184,950		
					14,203,117,706.00					**10,330,140,489**		

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada rancangan awal diusulkan pagu sebesar Rp. 14.203.117.706,- dan pada rancangan akhir dengan penambahan dan pengurangan pokir dan menjadi Rp. 10.330.140.489

2.4 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD dan usulan dari aspirasi masyarakat dalam Musrenbang

Usulan ini telah diakomodir dalam Rencana Kerja Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut

Tabel 2.4

USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
DINAS PEMUDA,OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

NO	PENGUSUL	USULAN	AN GGARAN	ANGGARAN SETELAH PERGESERAN
1	2	3	4	5
1	Puji Astuti, A.Md	Bantuan pengadaan alat kesenian Sanggar Sikumbang Tabang dalam usaha sosialisasi pelestarian, pengadaan alat music, pakaian	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
2	Herman	Bantuan sarana dang peningkatan fasilitas Sanggar Alang Bangkeh	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
3	Imral	Festival Usia dini Putra Bumi Serambi K-U 10 & K-U 12 Tahun 2025	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
4	Micko Kirstie, S.Psi	Penambahan Kandang Kuda	Rp. 225.000.000	Rp. 186.975.000
5	Idris	Pengadaan Peralatan untuk latihan dan tanding Pencak Silat Perguruan Pencak Silat Tenaga Dasar (PSTD)	Rp. 59.986.500	Rp. 59.986.500

Tabel 2.5

USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN ASPIRASI MASYARAKAT TAHUN 2025
DINAS PEMUDA,OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PADANG PANJANG

No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Rasio lama kunjungan wisata			

No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
	Pelatihan SDM Pokdarwis	Pokdarwis Batu Batirai Kelurahan Kampung Manggis, Kota Padang Panjang		20 orang	80..000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Kampung Manggis
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		**Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang sudah dibina**			
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		**Jumlah pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif**			
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			
	Pelatihan Ekraf dalam bidang kerajinan (Handycraf)	Kelurahan Silaing Atas, Kota Padang Panjang		22 orang	50.000.000	Hasil Musrenbang Kelurahan Silaing Atas

2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Dalam rangka pelaksanaan reformasi dan birokrasi dan mewujudkan Visi dan Misi pada Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata memiliki beberapa isu penting diantaranya:

1. Meningkatkan peran aktif dan ketelibatan pemuda dalam pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kualitas pembinaan dan prestasi olahraga yang berdaya saing.
3. Meningkatkan strategi pemasaran dan promosi pariwisata berbasis digital.
4. Mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.1.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata merupakan turunan dari Rancangan Rencana Strategis (renstra) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, dilakukan dengan mempertimbangkan sinergi dan keselarasan kebijakan antara Rancangan Awal Rencana Strategis Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Rancangan Awal Kementrian Pariwisata, Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahaga Provinsi Sumatera Barat, Rancangan Awal Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat serta kebutuhan dan karakteristik daerah Kota Padang Panjang. Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN 2025-2029, Rancangan Awal Rencana Strategis Kementrian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 menetapkan visi yaitu “ Terwujudnya pemuda yang berkarakter dan berdaya saing, masyarakat yang bugar, prestasi olahraga yang membanggakan di tingkat dunia, serta industry olahraga

yang berkontribusi terhadap ekonomi nasional, bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementrian Pemuda dan Olahraga melaksanakan Misi tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang andal, inklusif, kolaboratif, dan berkesinambungan dalam mewujudkan pemuda berkualitas.
2. Mendorong masyarakat yang berpartisipasi aktif berolahraga dengan tingkat kebugaran jasmani baik.
3. Mengembangkan industri olahraga yang mendukung pembangunan olahraga serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
4. Memperkuat daya saing olahragawan dan tenaga keolahragaan dalam rangka peningkatan prestasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga (Sport Science) melalui pembinaan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan.
5. Membangun tata kelola pembangunan pemuda dan sarana prasarana olahraga yang mendukung pembudayaan, prestasi, serta industri olahraga secara transparan, akuntabel, profesional, dan adaptif.

Tujuan Kementrian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029

1. Membangun pemuda berkualitas, berdaya saing, berideologi Pancasila dan berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Meningkatkan budaya olahraga dan prestasi internasional, serta membangun industri olahraga sebagai salah satu pendorong ekonomi nasional.
3. Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan pemerintah yang transparan, akuntabel, profesional, dan adaptif.

Sasaran Strategis Kementrian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029

Sasaran strategis pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai suatu impact/outcome dari 3(tiga) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis, antara lain:

TABEL 3.1
SASARAN STRATEGIS KEMENTRIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2025-2029

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2029	Satuan
SS 01: Meningkatnya kualitas pemuda Indonesia yang siap berperan aktif dalam membangun Indonesia maju	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	73,57	Indeks
SS 02: Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya industri olahraga nasional	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	12,13 – 13,40	Persen
	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0,350	Indeks
	peringkat pada Olympic Games	20 (2028)	Peringkat
	Peringkat pada Paralympic Games	30 (2028)	Peringkat
	Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Game	5 (2028)	
	Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games	5 (2028)	
	Peringkat pada Youth Olympic Games	81-83 (2026)	Peringkat Peringkat
	Peringkat pada Asian Youth Games	12-14	Peringkat
	Peringkat pada Asian Youth Para Games	2-4	Peringkat
	PDB Industri Olahraga *	42.925-44.075	Miliar rupiah
SS 03: Terwujudnya tata kelola kelembagaan,	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)		Indeks

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2029	Satuan
kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik			
	Opini BPK		Opini BPK
	Indeks Pelayanan Publik		Indeks

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN 2025-2029, Rancangan Awal Rencana Strategis Kementrian Pariwisata Tahun 2025-2029 menetapkan visi yaitu : " Pariwisata yang Mengedepankan Kearifan Lokal, Berdaya Saing dan Berorientasi Lingkungan untuk Mewujudkan Negara Nusantara yang Berdaullat, Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045"

Rumusan visi di atas pada dasarnya mengandung tiga elemen utama yang secara kolektif mendukung visi pembangunan nasional yaitu "Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan" . Ketiga elemen tersebut meliputi :

1. Pariwisata yang mengedepankan kearifan lokal, mengandung makna bahwa pembangunan di bidang pariwisata akan menjunjung tinggi kepribadian bangsa serta inklusif terhadap nilai dan budaya lokal;
2. Pariwisata yang berdaya saing, mengandung makna bahwa pembangunan pada sector ini akan meningkatkan keunggulan kompetitif Indonesia pada tingkat internasional; dan
3. Pariwisata yang berorientasi lingkungan, mengandung makna bahwa pembangunan nasional pada sector pariwisata diarahkan agar sejalan dengan lingkungan alam, sosial, dan geopolitik Indonesia dengan berbasis ekonomi biru, ekonomi hijau, dan ekonomi digital.

Berdasarkan misi pembangunan nasional, rumusan misi Kementrian Pariwisata untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat daya saing pariwisata melalui pembangunan destinasi pariwisata, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, dan pemasaran berkelalanjutan.
2. Memajukan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pariwisata yang komitmen pada praktik modern dan berkelanjutan dengan berorientasi ekonomi biru, ekonomi hijau, ekonomi digital, serta keseimbangan pembangunan di desa dan kota.
3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya pariwisata dengan memanfaatkan kekayaan intelektual dan budaya nasional dan daerah.

Tujuan Kementrian Pariwisata 2025-2029

Sebagai penerjemahan atas visi Kementrian Pariwisata yang sejalan dengan sasaran pembangunan nasional ditetapkan tujuan strategis Kementrian Pariwisata, yaitu:

1. Daya Saing Indonesia pada tingkat global yang meningkat akibat kontribusi pariwisata
2. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pariwisata yang unggul dan berkelanjutan; dan
3. Kementrian Pariwisata yang handal, professional, berintegritas, dan berbasis digital.

Sasaran Strategis Kementrian Pariwisata 2025-2029

Rumusan sasaran Strategis Kemetrian Pariwisata 2025-2029 beserta ukuran keberhasilannya adalah sebagai berikut”

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kapabilitas sistem kepariwisataan
Ukuran keberhasilan/Indikator SS:

1.1 indeks Pembangunan Pariwisata (Peringkat Travel and Tourm Developent Indeks)
1.2 Rasio PDB Pariwisata
1.3 Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas pariwisata
Ukuran keberhasilan/Indikator SS:

2.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

2.2 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara

2.3 Devisa Pariwisata

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas governansi, kelembagaan, dan sumber daya manusia aparatur Kementrian Pariwisata.

Ukuran keberhasilan/Indikator SS:

3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementrian Pariwisata

3.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030 yaitu " Sumatera Barat Madani Yang Maju dan Berkeadilan" dengan penjabaran Misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

TABEL 3.2
MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Pendidikan merata, kesehatan berkualitas	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas
Misi 2 : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan	Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	**Sasaran 1 :** Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya

Misi	Tujuan	Sasaran
		saing serta keberlanjutan dengan transformasi sector pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan **Sasaran 2 :** Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Misi 3 : Nagari/Desa Basis Kemajuan	Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	**Sasaran 1 :** Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi local **Sasaran 2 :** Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layaan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan
Misi 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	**Sasaran 1 :** Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industry daerah **Sasaran 2 :** Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas **Sasaran 3 :** Mendorong pertumbuhan UMKM dan industry kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah
Misi 5 :	Terwujudnya	**Sasaran 1 :**

Misi	Tujuan	Sasaran
Membangun Infrastruktur Be	infrastruktur yang inklusif, tangguh berebcana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesejahteran masyarakat dan mitigasi bencana	meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim **Sasaran 2 :** terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan **Sasaran 3 :** Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur.
Misi 6 : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas	Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religious, serta berbasis keluarga berkualitas	**Sasaran 1 :** Memperkuat nilai adat, budaya dan kearifan local dalam kehidupan masyarakat **Sasaran 2:** Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender **Sasaran 3 :** Terwujudnya lingkungan social yang aman dan harmonis keluarga berkualitas
Misi 7 : Tingkat Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang	**Sasaran 1 :** Meningkatnya kontribusi sector pariwisata terhadap ekonomi daerah

Misi	Tujuan	Sasaran
	berkelanjutan	**Sasaran 2 :** Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM
Misi 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik Yang Efektif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan public yang efektif berbasis digital	**sasaran 1:** Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan **Sasaran 2 :** Meningkatnya kualitas layanan publik **Sasaran 3 :** Meningkatnya pendapatan daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Padang Panjang, Disporapar berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan yang ada dalam RPJMD 2025-2029, ada 3 (tiga) tujuan yang diambil dari RPJMD yaitu Tujuan 1 (satu) : **"Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak dan berdaya saing tinggi",** Indikatornya Indeks Pembangunan Manusia dengan sasaran S1.3 "Meningkatnya prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan", dengan 3 (tiga) indikator yang akan dicapai: 1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, 2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan, 3. Rasio daya saing keolahragaan. Tujuan 2 (dua) : **"Terwujudnya pengembangan ekonomi local yang berdaya saing dan inklusif, serta ketahanan pangan daerah yang kuat"**, Indikatornya Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan sasaran S2.2 " Meningkatnya kontribusi sector pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah" dengan 2 (dua) indicator yang akan dicapai : 1. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum, 2. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif. Tujuan 3 (tiga) : **" Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel, inovatif, responsive dan melayani"**, Indikatornya Indek Reformasi Birokrasi, dengan sasaran S3.1 Meningkatnya kualitas peyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayana public yang inovatif, dengan indicator yang akan dicapai : Nilai Sakip Kota.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai lembaga teknis kepemudaan,olahraga dan pariwisata, Disporapar Kota Padang Panjang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Dengan adanya kontribusi tersebut, diharapkan dari aspek kepemudaan, olahraga dan aspek pariwisata dapat diwujudkan bersama seluruh *stakeholder*.

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan dari Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang adalah : " Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan, serta memperkuat kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Dengan indikator kinerja :

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
3. Rasio Daya Saing Keolahragaan
4. Rasio PDRB Akomodasi Mamin
5. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

Sasaran dari Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang adalah :

1. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, dengan indikator kinerja "Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri", dan " Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan"
2. Meningkatnya prestasi olahraga, dengan indikator "Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional dan provinsi"
3. Meningkatnya pengelolaan pariwisata daerah, dengan indikator "Lama tinggal wisatawan" dan "Jumlah kunjungan wisatawan"
4. Pengembangan ekonomi kreatif, dengan indikator "Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif",

5. Meningkatnya kinerja perangkat daerah, dengan indikator “Nilai AKIP Dinas Pemuda ,Olahraga dan Pariwisata”

Secara lebih terperinci keterkaitan antara tujuan sasaran jangka menengah daerah dapat dirumuskan dalam tujuan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagaimana tabel 3.3 berikut

TABEL 3.3

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DISPORAPAR KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Target Kinerja Sasaran		Ket.
					Renstra 2025-2029 (2025)	Renja 2025	
Meningkatnya prestasi olah raga dan peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatkan prestasi olahraga dan peran pemuda dalam pembangunan , serta memperkuat kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		0,18	0,18	
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		0,81	0,81	
			Rasio daya saing keolahragaan		29,76	29,76	
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah			Rasio PDRB Akomodasi Mamin		2,94	2,94	
			Rasio PDRB Ekonomi Kreatif		5.38	5.38	
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah pemuda berwirausaha	orang	206	206	
			Jumlah pemuda anggota organisasi kemasyarakatan	orang	160	160	
		Meningkatnya prestasi Olah Raga	Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional	orang	75	75	

		Meningkatnya pengelolaan Pariwisata daerah	Lama tinggal wisatawan	hari	1,03	1,03	
			Jumlah kunjungan wisatawan	Orang (ribu)	660	660	
		Pengembangan ekonomi kreatif	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	%	5,00	5,00	
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Angka	69.19	69.19	

Sumber Data : Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025-2029

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah instrument arah kebijakan yang berisi sekumpulan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mendapatkan hasil (outcome) dalam rangka mencapai sasaran.

Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029
2. Penetapan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029
3. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah periode transisi tahun 2024-2026, serta Evaluasi Renstra dan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sampai dengan Tahun 2024.
4. Tema dan prioritas pembangunan tahun 2025.
5. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.

Dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2025 awal yang meliputi 8 (delapan) program, 18 (Delapan belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat sub kegiatan, adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      a. Pengadaan Mebel
      b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      b. Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      b. Pemeliharaan Mebel
      c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
      d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
   1. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
      a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota
      b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan

Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota

2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

    a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota

C. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

    a. Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olaharaga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/Kota

2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

    a. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota

3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

    a. Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Kabupaten / Kota

4. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

    a. Penyediaan Prasarana dan sarana Olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan

    b. Pemassalan Olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional

D. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

1. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

    a. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

E. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

    a. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota

    b. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota

    c. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

    d. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan

Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota

F. Program Pemasaran Pariwisata
    1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
        a. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
        b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar negeri Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten / Kota

G. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
    1. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi insan Kreatif di Daerah Kebupaten / Kota
        a. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
    2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
        a. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

H. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
    1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
        a. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
    2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
        a. Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berkenaan dalam hal ini terkait realisasi dan capaian pada triwulan I, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan diperkirakan akan berpengaruh terhadap realisasi target pelaksanaan program/kegiatan dan berakibat terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran.

Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Perubahan Renja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.4
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01.00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA							**14,203,117,706**	**11,418,203,963**	**10,459,604,674**							**13.217.008.700,00**	
	2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12,370,296,756**	**10,174,258,863**	**10,459,604,674**							**11.927.008.700,00**	
	2.19.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**12,370,296,756**	**10,174,258,863**	**10,459,604,674**				**12,370,296,756**			**11.927.008.700,00**	
110	**2.19.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4,707,515,716**	**5,542,768,093**	**5,315,461,618**							**5.027.008.700,00**	
	2.19.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**		**100 %**	**-**	***100 %***	**3,883,099,416**	**3,707,633,330**	**3,738,007,155**			**-**	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	**null**		**3.421.336.700,00**	**Porapar**
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2409 Orang/bulan		412 Orang/bulan	406 Orang/bulan	364 Orang/bulan	3,883,099,416	3,707,633,330	3,738,007,155	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			3.421.336.700,00	Porapar
	2.19.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	***100 %***	**199,912,300**	**199,909,140**	**134,863,940**			**-**	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	**-**		**210.000.000,00**	**Porapar**
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	14,991,100	14,988,920	11,920,720	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			15.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	28,920,200	28,919,470	28,919,470	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			33.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket	21,000,000	20,999,750	20,999,750	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			12.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196 Laporan		24 Laporan	100 Laporan	50 Laporan	135,001,000	135,001,000	73,024,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			150.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	***100 %***	**36,951,500**	**35,003,400**	**28,184,300**			**-**	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	**-**		**52.000.000,00**	**Porapar**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit		5 Unit	4 Unit	1 Unit	12,000,000	11,438,200	4,619,100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			12.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		3 Unit	3 Unit	3 Unit	24,951,500	23,565,200	23,565,200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			40.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	***100 %***	**412,565,000**	**1,394,317,423**	**1,248,417,423**			**-**	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	**-**		**1.131.672.000,00**	**Porapar**
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3,000,000	2,997,400	2,997,400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			3.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	216 Laporan		12 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	114,765,000	114,765,000	114,765,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			122.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	294,800,000	1,276,555,023	1,130,655,023	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			1.006.672.000,00	Porapar
	2.19.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**174,987,500**	**205,904,800**	**165,988,800**			**-**	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	**-**		**212.000.000,00**	**Porapar**
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit		1 Unit	7 Unit	8 Unit	85,000,000	115,960,000	79,464,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			85.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit		5 Unit	20 Unit	5 Unit	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			6.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit		20 Unit	60 Unit	20 Unit	35,987,500	35,972,800	32,552,800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			43.000.000,00	Porapar
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit		3 Unit	4 Unit	3 Unit	50,000,000	49,972,000	49,972,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			78.000.000,00	Porapar
111	**2.19.02.**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase pemuda yang difasilitasi peningkatan kapasitasnya**	**12,41%**		**13,84%**		***14,08%***	**325,117,050**	**243,396,950**	**232,512,950**							**150.000.000,00**	
	2.19.02.2.01.	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan, pembinaan dan pembekalan kepeloporan dan kewirausahaan serta menjadi pemuda pelopor dan wirausaha muda melalui youth center**	**540 Orang**		**90 Orang**		***90 Orang***	**275,117,050**	**143,396,950**	**132,512,950**			**-**	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	**null**		**150.000.000,00**	**Porapar**
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	180 Orang		30 Orang	30 Orang	30 Orang	178,150,000	78,149,900	71,465,900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			64.278.450,00	Porapar

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	180 Orang		30 Orang	30 Orang	30 Orang	96,967,050	65,247,050	61,047,050	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			85.721.550,00	Porapar
	2.19.02.2.02.	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota**	**3 Organisasi**		**1 Organisasi**	**1 OKP**	***1 Organisasi***	**50,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**			**-**	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	**-**		**0,00**	**Porapar**
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	3 Organisasi		0 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	50,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			0,00	Porapar
112	**2.19.03.**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase atlet yang ikut kejuaraan tingkat provinsi, regional dan nasional**	**64,41%**		**53,44%**	**57,54%**	**57,54%**	**7,187,663,990**	**4,238,093,820**	**3,236,038,336**							**6.600.000.000,00**	
	2.19.03.2.01.	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia**	**6 Unit**		**1 Unit**	**1 Unit**	***1 Unit***	**3,040,264,000**	**2,434,627,720**	**1,410,769,446**			**-**	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	**-**		**5.100.000.000,00**	**Porapar**
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	24 Unit		4 Unit	4 Unit	4 Unit	3,040,264,000	2,434,627,720	1,410,769,446	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			5.100.000.000,00	Porapar
	2.19.03.2.02.	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah yang dilaksanakan**	**42 Kegiatan**		**2 Kegiatan**	**5 kompetisi/even**	***17 Kegiatan***	**2,936,690,090**	**336,679,500**	**332,188,000**			**-**	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	**-**		**800.000.000,00**	**Porapar**
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	42 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	***17 Kegiatan***	436,679,900	336,679,500	332,188,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			300.000.000,00	Porapar
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	400 Orang		400 Orang	400 Orang	400 Orang	2,500,010,190	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			500.000.000,00	Porapar
	2.19.03.2.03.	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Jumlah pembinaan organisasi keolahragaan**	**30 organisasi**		**1 organisasi**	**1 cabang olahraga**	**1 cabang olahraga**	**533,670,000**	**802,486,500**	**402,486,500**			**-**	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	**-**		**100.000.000,00**	**Porapar**
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	600 Orang		200 Orang	200 Orang	200 Orang	533,670,000	802,486,500	402,486,500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			100.000.000,00	Porapar
	2.19.03.2.05.	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Jumlah pembinaan dan pegembangan olahraga rekreasi**	**12 Kegiatan**		**2 Kegiatan**	**2 kegiatan**	***2 Kegiatan***	**677,039,900**	**664,300,100**	**1,090,594,390**			**-**	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	**-**		**600.000.000,00**	**Porapar**
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	13 Unit		3 Unit	3 Unit	3 Unit	577,040,000	364,300,000	716,814,290	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			200.000.000,00	Porapar
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	6 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	99,999,900	300,000,100	373,780,100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			400.000.000,00	Porapar

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
113	**2.19.04.**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Jumlah keanggotaan pramuka**	**12964 Orang**		**12664 Orang**		***12714 Orang***	**150,000,000**	**150,000,000**	**100,000,000**							**150.000.000,00**	
	2.19.04.2.01.	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah pembinaan terhadap organisasi kepramukaan**	**6 Organisasi**		**1 Organisasi**	**1 organisasi**	***1 Organisasi***	**150,000,000**	**150,000,000**	**100,000,000**			**-**	**Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing**	**-**		**150.000.000,00**	**Porapar**
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	6 Organisasi		1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	150,000,000	150,000,000	100,000,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatan Kualitas Pendidikan yang berkarakter dan berdaya saing			150.000.000,00	Porapar
	3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1,832,820,950**	**1,243,945,100**	**1,575,591,770**							**1.290.000.000,00**	
	3.26.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**1,832,820,950**	**1,243,945,100**	**1,575,591,770**							**1.290.000.000,00**	
114	**3.26.02.**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Jumlah wisatawan mancanegara**	**278691 orang**		**15157 orang**	**0**	***16673 orang***	**1,106,580,950**	**574,705,950**	**541,673,470**							**680.000.000,00**	
	3.26.02.2.03.	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	***Persentase destinasi pariwisata yang dikelola sesuai standar***	***84%***		***NA***	**80%**	**80%**	**1,106,580,950**	**574,705,950**	**541,673,470**			**-**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**-**		**680.000.000,00**	**Porapar**
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	22 Lokasi		4 Lokasi	2 Lokasi	4 Lokasi	498,001,200	83,601,200	117,615,450	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			200.000.000,00	Porapar
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	12 Unit		2 Unit	2 Unit	2 Unit	454,080,000	287,080,000	281,520,970	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			300.000.000,00	Porapar
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	64,499,900	114,024,900	63,637,450	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			100.000.000,00	Porapar
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	7 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	89,999,850	89,999,850	78,899,600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			80.000.000,00	Porapar
115	**3.26.03.**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah media pemasaran pariwisata**	**49 Media**		**6 Media**		***7 Media***	**214,240,000**	**339,239,750**	**262,528,150**							**280.000.000,00**	
	3.26.03.2.01.	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	***Jumlah kegiatan promosi pemasaran pariwisata***	***2 Kegiatan***		***2 Kegiatan***		***2 Kegiatan***	**214,240,000**	**339,239,750**	**262,528,150**			**-**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**null**		**280.000.000,00**	**Porapar**
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			30.000.000,00	Porapar

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	62,990,000	62,990,000	32,016,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			60.000.000,00	Porapar
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan		7 Kegiatan	7 Kegiatan	2 Kegiatan	151,250,000	276,249,750	230,512,150	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			190.000.000,00	Porapar
116	**3.26.04.**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual**	**11,70 %**		**35%**		***14,08%***	**132,000,000**	**80,000,000**	**44,175,000**							**60.000.000,00**	
	3.26.04.2.01.	**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah prasarana kreatif yang disediakan**	**13 Unit**		**10 Unit**	**1 Kreatif Hub**	8 Unit	**102,000,000**	**50,000,000**	**30,000,000**			**-**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**-**		**30.000.000,00**	**Porapar**
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	13 Unit		10 Unit	10 unit Unit	8 Unit	102,000,000	50,000,000	30,000,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			30.000.000,00	Porapar
	3.26.04.2.02.	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah produk Ekraf yang memiliki HAKI**	**150 unit**		**130 unit**	**40 produk**	25 unit	**30,000,000**	**30,000,000**	**14,175,000**			**-**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**-**		**30.000.000,00**	**Porapar**
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	150 Produk		130 Produk	40 Produk	25 Produk	30,000,000	30,000,000	14,175,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			30.000.000,00	Porapar
117	**3.26.05.**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi**	**85,96%**		**83,33%**		***84,13%***	**380,000,000**	**249,999,400**	**727,215,150**							**270.000.000,00**	
	3.26.05.2.01.	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah Dokumen Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif**	**6 Dokumen**		**1 Dokumen**		***1 Dokumen***	**330,000,000**	**199,999,450**	**700,030,200**			**-**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**-**		**195.000.000,00**	**Porapar**
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	6 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	240,000,000	159,999,750	663,280,500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			80.000.000,00	Porapar
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi	152 Orang		30 Orang	30 Orang	2 Orang	40,000,000	39,999,700	36,749,700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			40.000.000,00	Porapar

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang			60 Orang	60 Orang	50,000,000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			75.000.000,00	Porapar
	3.26.05.2.02.	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah dokumen laporan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif**	**5 Dokumen**		**1 Dokumen**		***1 Dokumen***	**50,000,000**	**49,999,950**	**27,184,950**			**-**	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**-**		**75.000.000,00**	**Porapar**
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	130 Orang		0 Orang	50 orang Orang	50 Orang	50,000,000	49,999,950	27,184,950	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			75.000.000,00	Porapar

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan , dalam hal ini terkait realisasi dan capaian pada triwulan I, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan diperkirakan akan berpengaruh terhadap realisasi target pelaksanaan program/kegiatan dan berakibat terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran.

Berdasarkan evaluasi tersebut, maka untuk perubahan anggaran Tahun 2025 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang akan melaksanakan 8 (delapan) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang beserta para pemangku kepentingan dalam membangun kesepahamandan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang

Padang Panjang, Juni 2025

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Kota Padang Panjang

NURASRIZAL, ST.MT
Pembina Tingkat I, NIP. 19770829 200501 1 004

PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat – Nya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat kami susun. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang adalah dokumen Perencanaan Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM serta Rencana Strategis Provinsi.

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang telah menyusun Renstra Tahun 2024-2026.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang Tahun 2025. Besar Harapan kami dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bagian dalam system perencanaan dan pedoman pencapaian kinerja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM selama satu tahun kedepan

Padang Panjang, Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi
Usaha Kecil Dan Menengah
Kota Padang Panjang,

FERINO ROMIKO, S.STP, M.Si
NIP. 198602122006021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI TRIWULAN I RENJA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2025 ..... **8**

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 25

BAB V PENUTUP 41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen

perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Proses penyusunan rancangan awal Renja Perubahan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang yang berpedoman pada RPD 2026-2029. Dokumen Renja perubahan Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta sejalan dengan tujuan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Professional, Bersih dan Akuntabel”. (sesuaikan dengan tujuan OPD dalam RPD)

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui tahapan, meliputi :

1. Persiapan penyusunan

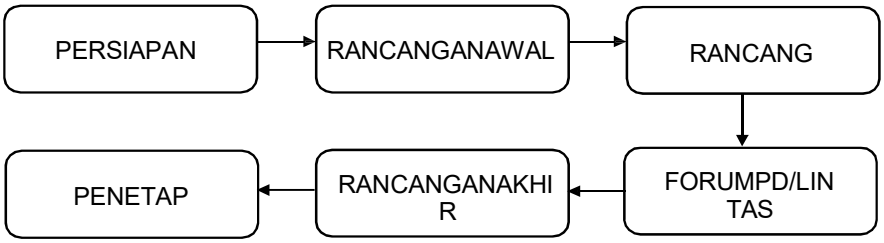
   Meliputi pembentukan tim penyusun perubahan renja OPD Tahun 2025, pengumpulan hasil evaluasi renja tahun 2024 dan evaluasi renja TW I tahun 2025
2. Tahap perumusan rancangan Renja OPD, meliputi :
   a. Pengolahan data dan informasi
   b. Analisis gambaran pelayanan OPD
   c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD
   d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
   e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
   f. Perumusan tujuan dan sasaran
   g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
   h. Perumusan kegiatan prioritas
   i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD
   j. Penyempurnaan rancangan Renja OPD
   k. Pembahasan forum OPD

3. Penyusunan rancangan

   Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang panjang Tahun Anggaran 2025, Masukan dari pelaksana kegiatan pembahasan oleh tim Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Tahap penyajian rancangan Renja PD, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam bentuk rancangan akhir
6. Tahap Penetapan Rencana Kerja PD

Gambar1.1

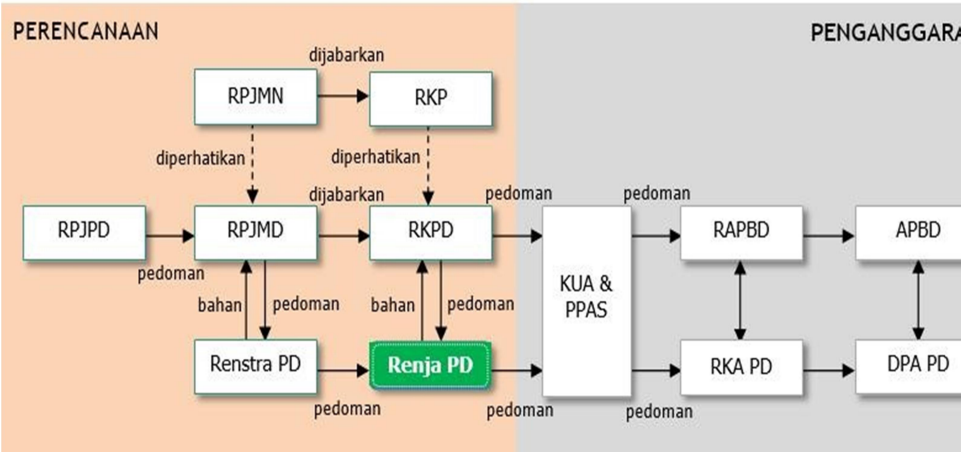
TahapanPenyusunanRenjaDinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan MenengahKota Padang Panjang



Perubahan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha kecil dan menengah 2025 adalah penjabaran Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha kecil dan menengah 2025-2029 dengan memperhatikan RPJMD 2025-2029 dan program prioritas Walikota yang dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2025, untuk melihat hubungan antar dokumen dapat kita lihat pada tabel berikut:

Gambar1.2

Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



1.2. Landasan Hukum

PenyusunanRenja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2025 berlandaskan pada PeraturanPerundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2024 tentang Padang panjang
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2045;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Walikota Padang Panjang No. 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Padang Panjang adalah untuk untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Padang Panjang melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025.
2. Sebagai salah satu dokumen acuan dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA PD Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan MenengahKota Padang PanjangKota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TRIWULAN I PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun n dan Perkiraan Maju tahun n+1

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik

dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TRIWULAN I
PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

Kualitas perubahan Renja-PD yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Perubahan Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Triwulan I tahun 2025, dikaitkan dengan pencapaian Renstra-PD. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Triwulan I dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan perubahan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2025, perlu diperhatikan hasil evaluasi Renja triwulan I terhadap capaian Renstra Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2025 terhadap target kinerja Tahun 2025.

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Tahun 2025

Secara umum, pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2024, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik telah mencapai 100%. Begitu juga berdasarkan hasil reviu berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 realisasi capaian kinerja mencapai 100%.

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PADANG PANJANG
PERIODE PELAKSANAAN: Januari s/d Maret 2025 TRIWULAN I

NO	Sasaran	Program /kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026(S/D akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan renja Perangkat Daerah Tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan/Th yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realiasasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Keterangan
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		10		11		12		13
				(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	(K)	Rp	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah**	**100 %**	**21.786.563.099**			**100 Persen**	**8076000949**	25%	**2188486405**							25%	**2.166.836.405**	25%	##############	25%	**2.166.836.405**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**17.414.266.324**			**100 Persen**	**6045087102**	25%	**1777177845**							25%	**1.777.177.845**	25%	##############	25%	**1.777.177.845**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2,310 Orang/bulan	17.414.266.324			770 Orang/bulan	6.045.087.102	144	1777177845							144	1.777.177.845,00	144	1.777.177.845,00	144	1.777.177.845	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**24.500.000**			**0%**	**0**	75%	-							75%	**-**	75%	**-**	75%	**-**	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	24.500.000			**0**	**0**	0	-							0	-	0	-	0	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**1.147.014.750**			**100 Persen**	**599.120.450**	25%	**59.831.079**							25%	**59.831.079**	25%	**59.831.079,00**	25%	**59.831.079**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	68.784.750			4 Paket	17.888.700	0	-							0	-	0	-	0	-	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	388.790.100			4 paket	84.986.650	0	253.000							0	253.000,00	0	253.000,00	0	253.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	83.609.900			12 paket	23.046.100		582.500							0	582.500,00	0	582.500,00	0	582.500	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	605.830.000			24 laporan	473.199.000	6	58.995.579							6	58.995.579,00	6	58.995.579,00	6	58.995.579	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	**100%**	**85.000.000**			**100 Persen**	**199.438.800**		-							-	**-**	-	**-**	-	**-**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1 Unit	115.000.000		**21.650.000**													
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	85.000.000			1 unit	84.438.800	0	-							0	-	0	-	0	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**100%**	**1.748.710.275**			**100 Persen**	**624.235.550**	25%	**153.716.096**							25%	**153.716.096**	25%	**153.716.096,00**	25%	**153.716.096**	

			Pemerintahan Daerah yang terpenuhi																						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	18.000.000			12 laporan	5.996.800	1	1.490.000							1	1.490.000,00	1	1.490.000,00	1	1.490.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan	260.191.875			36 laporan	62.456.750	9	9.506.096							9	9.506.096,00	9	9.506.096,00	9	9.506.096	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	1.470.518.400			12 laporan	555.782.000	3	142.720.000							3	142.720.000,00	3	142.720.000,00	3	142.720.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100%**	**1.367.071.750**			**100 Persen**	**608.119.047**		**176.111.385**							-	**176.111.385**	-	**176.111.385,00**	-	**176.111.385**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	126.423.000			1 Unit	122.412.000	1	3.625.650							1	3.625.650,00	1	3.625.650,00	1	3.625.650	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	357.734.250			27 Unit	141.971.600	27	25.119.300							27	25.119.300,00	27	25.119.300,00	27	25.119.300	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang di Pelihara	2 Unit				2 Unit	35.000.000		-								-		-		-	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	182.914.500			20 Unit	83.017.200	0	4.850.000							0	4.850.000,00	0	4.850.000,00	0	4.850.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	700.000.000			3 Unit	225.718.247	0	142.516.435							0	142.516.435,00	0	142.516.435,00	0	142.516.435	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**Persentase penurunan koperasi yang bermasalah**	**31 %**	**115.000.000**			**27 %**	**3.829.000**	0%	-							0%	-	0%	-	0%	-	kriteria sehat tidak sehatnya koperasi dapat dihitung di akhir tahun yang berjalan
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Jumlah pengawasan koperasi**	**60 koperasi**	**115.000.000**			**20 koperasi**	**3.829.000**	10	-							10	-	10	-	10	-	
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	60 Unit Usaha	115.000.000			20 Unit Usaha	3.829.000	10	-							10	-	10	-	10	-	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Persentase koperasi yang dibina**	**31,57 %**	**150.000.000**			**26,31%**	**56.120.600**	0	-								-	0	-	0	-	
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah koperasi yang dibina**	**45 koperasi**	**150.000.000**			**15 koperasi**	**56.120.600**	0	-								-	0	-	0	-	
		Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	45 Unit Usaha	150.000.000			15 Unit Usaha	56.120.600	0	-							0	-	0	-	0	-	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase peningkatan omset usaha**	**15 %**	**812.600.000**			**15%**	**763.502.099**	0	**64.600.000**							0	**64.600.000**	0	**64.600.000,00**	0	**64.600.000**	

		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	**Persentase peningkatan omset usaha**	**15%**	**812.600.000**			**15%**	**763.502.099**	0	**64.600.000**						0	**64.600.000**	0	**64.600.000,00**	0	**64.600.000**	
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	60 Unit Usaha	662.600.000			20 Unit Usaha	505.044.099	0	57.100.000						0	57.100.000,00	0	57.100.000,00	0	57.100.000	Masih Banyak UMKM yang terkendala dengan SLIK OJK
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	120 Unit Usaha	150.000.000			40 Unit Usaha	258.458.000	0	7.500.000						0	7.500.000,00	0	7.500.000,00	0	7.500.000	Di perubahan terjadi penambahan target
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**Persentase Kenaikan pendapatan UMKM yang di bantu**	**50 %**	**225.600.000**			**45%**	**3.610.317.000**		**10.916.400**						0	**10.916.400**	0	**10.916.400,00**	0	**10.916.400**	penghitungan kenaikan pendapatan ukm dapat di hitung diakhir tahun berjalan
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	**Persentase Kenaikan Pendapatan UMKM yang dibantu**	**50%**	**225.600.000**			**45%**	**3.610.317.000**		**10.916.400**						0	**10.916.400**	0	**10.916.400,00**	0	**10.916.400**	penghitungan kenaikan pendapatan ukm dapat di hitung diakhir tahun berjalan
		Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2,061 Unit Usaha	225.600.000			200 Unit Usaha	3.610.317.000	0	10.916.400						0	10.916.400,00	0	10.916.400,00	0	10.916.400	
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			-												0	-	0	-	0	-	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			**14.529.431.239**				**8.778.883.650**		**1319324729**						0	**1.311.800.979**	0	**###############**	0	**1.311.800.979**	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang perdagangan**	**40 %**	**140.000.000**			**37%**	**24.592.500**	33	**4.273.500**						36	**4.273.500**	36	**4.273.500,00**	36	**4.273.500**	
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	**Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha**	**350 pelaku usaha**	**70.000.000**	1372		**100 pelaku usaha**	**5.396.000**	30	**-**						30	**-**	1402	**-**	1402	**-**	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	350 Dokumen	70.000.000	1372		100 Dokumen	5.396.000	30	-						30	-	1402	-	1402	-	tidak ada permintaan verifikasi teknis di akun OSS, karena jenis usaha resiko rendah terbit secara otomatis di web
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	**Junlah pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi ,pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kab/kota**	**6 kali**	**70.000.000**			**2 Kali**	**19.196.500**	1	**4.273.500**						1	**4.273.500**	1	**4.273.500,00**	1	**4.273.500**	
		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	6 Laporan	70.000.000			2 laporan	19.196.500	1	4.273.500						1	4.273.500,00	1	4.273.500,00	1	4.273.500	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	**Persentase pasar ber-SNI**	**100 %**	**12.934.788.900**			**95%**	**7.516.396.650**		**1191816078**							**1.191.816.078**	0	**###############**	0	**1.191.816.078**	
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**Jumlah pasar yang dipelihara dan di kelola**	**6 unit**	**12.934.788.900**			**2 unit**	**7.516.396.650**	0	**1191816078**							**1.191.816.078**	0	**###############**	0	**1.191.816.078**	
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6 unit	4.847.757.000			2 Unit	4.115.230.000	0	493607598						-	493.607.598,00	-	493.607.598,00	-	493.607.598	

		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	8.087.031.900			1 Unit	3.401.166.650	0	698208480						-	698.208.480,00	-	698.208.480,00	-	698.208.480	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Persentase Kebutuhan Variasi Harga antar waktu barang kebutuhan pokok**					6%	239.702.800		7.523.750						0	0	0	0	0	0	dapat dihitung pada akhir tahun berjalan
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Ko	Persentase Kebutuhan Variasi Harga antar waktu barang kebutuhan pokok	-	-			6%	239.702.800	4.1%	7.523.750						0	0	0	0	0	0	
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Ko ta	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka stabilitasi harga barang kebutuhan pokok	-	-			250 Laporan	239.702.800		-						0	-	0	-	0	-	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	**Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah**	**70 %**	**579.642.339**			**65%**	**113.556.100**	######	**6.638.000**						14,33%	**6.638.000**	14,33%	**6.638.000,00**	14,33%	**6.638.000**	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	**Jumlah Pelaksanaan tera ulang alat UTTP**	**18 kali**	**579.642.339**			**6 kali**	**113.556.100**	1	**6.638.000**						1	**6.638.000**	1	**6.638.000,00**	1	**6.638.000**	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1600 Unit	579.642.339			1400 unit	113.556.100	215	6.638.000						215	6.638.000,00	215	6.638.000,00	215	6.638.000	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital**	**23 %**	**875.000.000**			**20%**	**884.635.600**	7	**109.073.401**						7	**109.073.401**	7	**109.073.401,00**	7	**109.073.401**	
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	**Jumlah Pelaku usaha yang bertransaksi digital**	**225 pelaku usaha**	**875.000.000**			**75 pelaku usaha**	**884.635.600**	20	**109.073.401**						20	**109.073.401**	20	**109.073.401,00**	20	**109.073.401**	
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	45 UMKM	500.000.000			15 UMKM	214.000.000	2	37.823.401						0	37.823.401,00	0	37.823.401,00	0	37.823.401	
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	180 UMKM	375.000.000			60 UMKM	670.635.600	0	71.250.000						0	71.250.000,00	0	71.250.000,00	0	71.250.000	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			**2.043.899.400**				**774.958.188**		**125.548.750**							**125.548.750**	-	**125.548.750,00**	-	**125.548.750**	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	**Persentase IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri (sertifikat halal,MD,GMP,SNI dan Merk)**	**10 %**	**2.043.899.400**			**8%**	**774.958.188**	0	**125.548.750**						0,0%	**125.548.750**	0,0%	**125.548.750,00**	0,00%	**125.548.750**	
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pembinaan IKM nbaik melalui workshop, pendampingan maupun pembinaan lainnya**	**36 kali**	**2.043.899.400**			**12 kali**	**774.958.188**		**125.548.750**						0	**125.548.750**	0	**125.548.750,00**	0	**125.548.750**	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan	3 Dokumen	1.800.000.000			1 Dokumen	674.958.088		123.326.950						0	123.326.950,00	0	123.326.950,00	0	123.326.950	

			Pembangunan Sumber Daya Industri																				
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	243.899.400			1 Dokumen	100.000.100		2.221.800						0	2.221.800,00	0	2.221.800,00	0	2.221.800	
Jumlah				39.663.093.738,00				22.063.611.486,00		3.708.876.284,00		-	-		-		3.679.702.534,00		3.679.702.534,00		3.679.702.534,00	

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 Kota Padang Panjang diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan 11 Program 16 Kegiatan dan 29 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Program Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi, target 25 % dan capaian realisasi sebesar 25% sehingga persentase capaian kinerja triwulan I mencapai 100%,
2. Program Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dengan indikator Persentase penurunan koperasi bermasalah target tahunan 27%, yang dapat dihitung di akhir tahun berjalan.
3. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dengan indikator Persentase koperasi yang dibina, target 26.31%
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan indikator Persentase Peningkatan Omset Usaha Menjadi Usaha Kecil, yang dapat dihitung di akhir tahun berjalan.
5. Program Pengembangan Umkm dengan indikator Persentase Kenaikan Pendapatan UMKM yang dibantu, target 45% yang dapat dihitung di akhir tahun berjalan.
6. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dengan indikator Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang dimiliki Izin Usaha di Bidang Perdagangan, target 37% yang dapat dihitung di akhir tahun berjalan.
7. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan indikator Persentase Pasar Ber SNI, target 95% yang dapat dihitung di akhir tahun berjalan.
8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan indikator Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok, target 9% yang dapat dihitung di akhir tahun berjalan.
9. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan indikator Persentase Alat UTTP yang Bertanda Tera Sah, target 65% yang dapat dihitung di akhir tahun berjalan.

10. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan indikator Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya, target 20% yang dapat dihitung di akhir tahun berjalan.
11. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dengan indikator Persentase Peningkatan IKM yang difasilitasi Mendapatkan Sertifikat dan Standarisasi Produk Industry (Sertifikat Halal, MD, GMP, SNI dan Merk), target 8% yang dapat dihitung di akhir tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dengan kinerja yang dibutuhkan, dan dampak yang ditimbulkanatas kinerja pelayanan tersebut dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2017, dengan sasaran target sesuai dengan RENSTRA pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah dan / atau berdasarkan atas hasil analisis standar Kebutuhan Pelayanan.

Pencapaian kinerja pelayanan dari Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat di lihat dari tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan MenengahKota Padang Panjang

o	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah (Tahun)				Realisasi Capaian (Tahun)		Proyeksi (Tahun)	Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Renstra 2024 – 2026											
	Persentase peningkatan volume perdagangan				30%	35%			30%	35%	
	persentase pelaku usaha perdagangan yang menggunakan aplikasi digital				15%	20%			15%	20%	
	Persentase Koperasi Sehat				22%	27%			36%	27%	
	Persentase Koperasi yang memiliki usaha				18%	26.31%			24%	26.31%	
	Persentase Kenaikan Omset dan Aset Pelaku Usaha				10%	15%			10%	15%	
	Persentase peningkatan produktivitas industri				25%	30%			25%	30%	
	Persentase kenaikan pendapatan pelaku usaha miskin				45%	50%			40%	50%	
	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang di penuhi				100%	100%			100%	100%	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Sasaran “meningkatnya tata kelola kinerja sektor perdagangan” dengan indikator kinerja Persentase peningkatan volume perdagangan ,pada tahun 2024 mencapai target renstra (30%) dengan tingkat capaian realisasi 100%
2. Sasaran “Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam sektor perdagangan” dengan indikator kinerja persentase pelaku usaha perdagangan yang menggunakan aplikasi digital, pada tahun 2024 bisa mencapai sesuai target 15% dengan tingkat capaian realisasi 100%
3. Sasaran “meningkatnya tata kelola koperasi” dengan indikator Persentase Koperasi Sehat, pada tahun 2024 target 22% dengan capaian realisasi target (36%) dan tingkat capaian realisasi 164%

4. Sasaran “Meningkatnya Koperasi Sektor Riil” dengan indikator Persentase Koperasi yang memiliki usaha target 18% dengan realisasi target 24% dan tingkat capaian realisasi 133%
5. Sasaran “Meningkatnya produktivitas UMKM” dengan Persentase Kenaikan Omset dan Aset Pelaku Usaha, target 10% dengan realisasi target 10% dan tingkat capaian realisasi 100%
6. Sasaran “meningkatnya tata kelola kinerja sektor industri” dengan indikator Persentase peningkatan produktivitas industri, target 25% dengan realisasi target 25% dan tingkat capaian realisasi 100%
7. Sasaran “eningkatnya pendapatan pelaku usaha Miskin” dengan indikator Persentase kenaikan pendapatan pelaku usaha miskin, target 45% dengan realisasi target 40% dan tingkat capaian realisasi 89%
8. Sasaran “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah” dengan indikator Persentase pemenuhan urusan penunjang yang di penuhi, target 100% dengan realisasi target 100% dan tingkat capaian realisasi 100%

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, maka Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok untukmelaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dibidang KoperasiUsaha Kecil Menengah, dan urusan pilihan dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

Selanjutnya tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Panjang 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang Perdagangan, koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perdagangan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perindustrian;
3. Pelaksanaan administrasi dibidang Perdagangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perindustrian serta Unit Pelaksana Teknis Dinas.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perdagangan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perindustrian;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota dibidang Perdagangan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perindustrian;

Sejauh ini Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tetap berkomitmen menjalankan tugas dan fungsinya, meskipun pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut belum terlaksana secara menyeluruh dan optimal.

Belum terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengahsecara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

Tabel 2.4

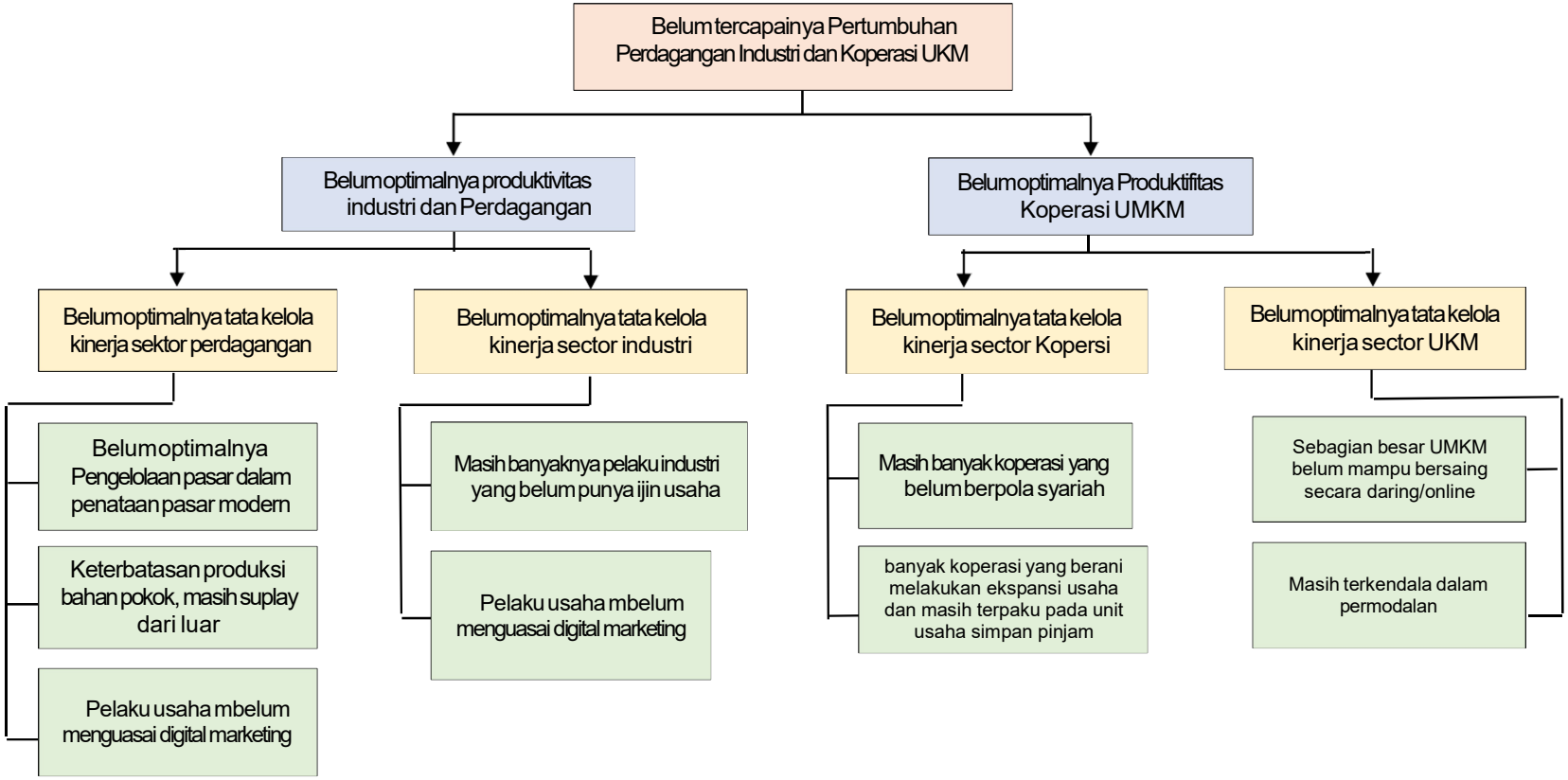
Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	AkarMasalah	Ket.
1.	Belum optimalnya tata kelola kinerja sektor perdagangan	Masih banyaknya pelaku ussaha perdagangan yang belum memiliki izin usaha	Keterbatasan sumber daya dalam melakukan sosialisasi atupun monitoring terhadap pelaku usaha	
			Keterbatasan informasi dan pengetahuan dari pelaku usaha akan manfaat dari izin usaha perdagangan.	
2.	Pangsa pasar online lebih besar dari pada pangsa pasar offline	Pelaku usaha masish bertahan dengan pola marketing yang lama	Keterbatasan sumber daya dalam fasilitasi pemasaran online	
			Kurangnya inovasi para wirausaha dalam pengembangan produk atau pemasaran	
3.	Kehadiran koperasi masih belum dirasakan oleh	Penambahan modal masih menjadi masalah	Keterbatasan sumber daya dalam melakukan pendampingan pelaku usaha untuk bekerjasama dengan koperasi dalam	

No.	Masalah Pokok	Masalah	AkarMasalah	Ket.
	pelaku usaha	tersendiri bagi sebagian besar pelaku usaha	Pelaku usaha masih enggan menggunakan koperasi untuk masalah permodalan	
4.	Belum optimalnya tata kelola koperasi	Belum banyak koperasi yang berani melakukan ekspansi usaha dan masih terpaku pada unit usaha simpan pinjam	Keterbatasan sumber daya untuk pendampingan koperasi dalam melakukan ekspansi usaha	
			Keterbatasan pengetahuan dan sumber daya koperasi	
5.	Belum optimalnya produktivitas UMKM	Sebagian besar UMKM belum mampu bersaing secara daring/online	Keterbatasan sumber daya untuk memfasilitasi UMKM dalam melakukan pemasaran online	
			Kurang nya pengetahuan dan skill pelaku usaha terhadap strategi pemasaran online	

Gambar 2.1

Pohon Masalah
Disperdagkop UKM Kota Padang Panjang



Isu strategis pembangunan Kota Padang Panjang untuk penentuan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel tabel berikut:

Tabel 2.3

Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	IsuUtama	IsuStrategis
1	Isu PembangunanManusia	a. Peningkatankualitaspendidikanmasyarakat b. Peningkatanderajatkesehatanmasyarakat c. kesenjangan akses, partisipasi, kontrol danmanfaatyang dialamiperempuan dalammerasakanmanfaatpembangunan d. Peningkatandaya saing kepemudaandan prestasikeolahragaan
2	Isu Tata KelolaPemerintahan	a. implementasi 8 area perubahan ReformasiBirokrasi
3	Isu PembangunanEkonomi	a. Peningkatan pertumbuhan sektor unggulandaerah b. MasihrendahnyanilaiInvestasi c. Penurunan angka kemiskinan danpengangguran d. rendahnyapendapatanmasyarakat
4	Isu Tatanan KehidupanMasyarakat	a. Mulai lunturnya nilai-nilai Adat dan Budaya ditengahmasyarakat b. Masih terbatas pemahaman masyarakatdalam pengamalannilai-nilaikeagamaan c. Belum optimalnya layanan ketentraman danketertibanumum d. penyelenggaranlayanankesejahteraansosial
5	Isu kualitas infrastruturdanlingkunganhidup	a. layananinfrastruktur dasar b. kesesuaianpemanfaatan ruang c. kualitasair,udara,tutupanlahan

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Berdasarkan reviu penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah selama periode sebelumnya, serta berdasarkan permasalahan dan hambatan yang ada, dapat diidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda, sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penataan pasar modern yang nyaman, kreatif dan profesional.
2. Belum berkembangnyapemasaran secara online
3. Permodalan masih menjadi isu utama bagi UMKM
4. Koperasi belum melakukan ekspansi usaha

5. Belum optimalnya produktivitas UMKM

Selain untuk pendorong atau Peluang dalam peningkatan pelayananDinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diantaranya adalah :

1. Jumlah UMKM yang terus berkembang;
2. Kecendrungan masyarakat untuk mengunjungi pasar kuliner dan mengkonsumsi produk yang legal dan higienis;
3. Tersedianya sarana informasi untuk mempromosikan peroduksi UKM;
4. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah tentang pengelolaan pasar;
5. Padang Panjang terletak di jalur strategis yang memudahkan bagi pelaku usaha melakukan pemasaran dan melakukan ekspansi usaha;
6. Iklim Padang Panjang yang berhawa sejuk memungkinkan Pasar Padang Panjang sebagai sentra sayur mayur.
7. Lembaga koperasi yang cukup banyak dan bisa untuk memfasilitasi UMKM mengakses permodalan.

2.5 Penelahaan usulan program dan kegiatan Masyarakat

Hasil usulan masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan tingkat kecamatan dan tingkat Kota adalah berupa kegiatan “Pemberian bantuan kepada UMKM miskin berupa bantaun sosial uang yang akan digunakan untuk perbaikan warung, gerobak, pembelian peralatan dan pembelian barang dagangan”.

Usulan ini telah di akomodir dalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan menengah yang dapat dilihat pada tabel2.5 berikut :s

Tabel 2.4
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Padang Panjang

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENEGAH

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi*	Indikator Kerja	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif	Catatan*
1	2	3	4	5		6
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Padang Panjang	Persentase Kenaikan pendapatan UMKM yang di bantu	Usaha		
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Persentase Kenaikan Pendapatan UMKM yang dibantu			
	Subkegiatan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi			

Usulan aspirasi masyarakat melalui musrenbang dan Pokok Pokok Pikiran DPRD telah ditampung oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah melalui Program Pengembangan UMKM. Bentuk kegiatannya adalah berupa pemberian bantuan sosial berupa uang untuk perbaikan warung, pembelian gerobak, pembelian peralatan usaha dan pembelian bahan dagangan bagi pelaku usaha yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Pemberian bantuan ini akan di awali dengan monitoring dan verifikasi data ke

masing masing tempat usaha dan juga monitoring stelah pemberian bantuan sosial, sehingga Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat mengevaluasi dan monitoring penerima manfaat dari Musrenbang dan Pokir

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 serta Review Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan MenengahKota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025. Secara umum Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh 1 (dua) indikator tujuan dan 2 (dua) indikator sasaran pembangunan daerah.
3. Meningkatkan pertumbuhan sector unggulan daerah dan Menurunnya tingkat kemiskinan serta meningkatnya pendapatan masyarakat.
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka

menengah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Untuk mencapai tujuan, sasaran maka disandingkan indikator tujuan dan sasaran serta target kinerja tahunan yang disandingkan dengan target renstra yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Renstra Tahun 2025	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Perubahan Renja Tahun 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6*
1	**Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi berbasis potensi lokal**		**Rasio PDRB Industri Pengolahan**	**%**	**9,54**	**9,54**
			Rasio PDRB Perdagangan Besar, kecil dan Eceran)	**%**	**18,35**	**18,35**
		Meningkatnya usaha industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	%	5,42	5,42
		Meningkatnya kapasitas perdagangan	Persentase peningkatan volume perdagangan	%	30	30
			persentase pelaku usaha perdagangan yang memanfaatkan teknologi informasi digital	%	21	21
			Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	%	5,3	5,3
		Meningkatnya daya saing dan kapasitas koperasi serta UKM dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	16	16
			Persentase Kenaikan Omset Pelaku Usaha	%	35	35
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	Angka	70	70

3.2 Rumusan program dan kegiatan

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan MenengahKota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana table 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Padang Panjang
Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH							**23.001.091.723**	**22.065.966.486**	**19.889.076.226**							**13.263.624.296,00**	
	2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.883.611.170**	**12.509.769.648**	**11.541.569.164**							**7.636.914.083,00**	
	2.17.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**12.883.611.170**	**12.509.769.648**	**11.541.569.164**							**7.636.914.083,00**	
98	**2.17.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**8.760.135.408**	**8.076.000.949**	**7.400.199.403**							**7.221.714.083,00**	
	2.17.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi keuangan yang diselesaikan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**6.468.369.811**	**6.045.087.102**	**5.857.061.223**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**null**		**5.836.522.108,00**	**Perdagkop UKM**
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3900 Orang/bulan		650 Orang/bulan	770 Orang/bulan	650 Orang/bulan	6.468.369.811	6.045.087.102	5.857.061.223	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			5.836.522.108,00	Perdagkop UKM
	2.17.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**0 %**	**-**	**-**	**-**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**0,00**	**Perdagkop UKM**
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	240 Paket		60 Paket	0 Paket	0 Paket	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0,00	Perdagkop UKM
	2.17.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**638.123.800**	**599.120.450**	**311.577.603**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**null**		**417.244.900,00**	**Perdagkop UKM**
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	17.888.700	17.888.700	10.733.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			22.928.250,00	Perdagkop UKM
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	84.987.000	84.986.650	40.411.797	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			129.596.700,00	Perdagkop UKM
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket	23.046.100	23.046.100	11.204.606	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			36.804.950,00	Perdagkop UKM
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	512.202.000	473.199.000	249.228.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			227.915.000,00	Perdagkop UKM

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.17.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**239.345.000**	**199.438.800**	**88.150.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**null**		**30.600.000,00**	**Perdagkop UKM**
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 Unit		5 Unit	1 Unit	5 Unit	26.450.000	115.000.000	83.650.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			15.600.000,00	Perdagkop UKM
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		3 Unit	9 Unit	3 Unit	212.895.000	84.438.800	4.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			15.000.000,00	Perdagkop UKM
	2.17.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**637.989.550**	**624.235.550**	**621.589.130**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**null**		**599.989.825,00**	**Perdagkop UKM**
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	5.996.800	5.996.800	2.998.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			6.000.000,00	Perdagkop UKM
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	62.456.750	62.456.750	52.629.830	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			86.730.625,00	Perdagkop UKM
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	13 Laporan	12 Laporan	569.536.000	555.782.000	565.960.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			507.259.200,00	Perdagkop UKM
	2.17.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**776.307.247**	**608.119.047**	**521.821.447**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**null**		**337.357.250,00**	**Perdagkop UKM**
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	164.412.000	122.412.000	113.136.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			42.141.000,00	Perdagkop UKM
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	108 Unit		33 Unit	27 Unit	20 Unit	127.445.000	141.971.600	102.630.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			119.244.750,00	Perdagkop UKM
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	13 Unit		3 Unit	2 Unit	3 Unit	29.794.000	35.000.000	35.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			15.000.000,00	Perdagkop UKM
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit		20 Unit	20 Unit	20 Unit	105.910.000	83.017.200	45.337.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			60.971.500,00	Perdagkop UKM

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit		3 Unit	3 Unit	3 Unit	348.746.247	225.718.247	225.718.247	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			100.000.000,00	Perdagkop UKM
99	**2.17.03.**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**48,71 %**		**29,9 %**	**27 Persen**	**32,25 %**	**25.651.100**	**3.829.000**	**1.610.000**							**40.000.000,00**	
	2.17.03.2.01.	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**48,71 %**		**29,9 %**		**32,25 %**	**25.651.100**	**3.829.000**	**1.610.000**			-	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**null**		**40.000.000,00**	**Perdagkop UKM**
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	38 Unit Usaha		20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	25.651.100	3.829.000	1.610.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			40.000.000,00	Perdagkop UKM
##	**2.17.06.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas**	**92,06 %**		**73,33 %**		**80,85 %**	**105.987.500**	**56.120.600**	**111.200.000**							**50.000.000,00**	
	2.17.06.2.01.	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase koperasi yang dibina**	**50%**		**18 %**		**22.73 %**	**105.987.500**	**56.120.600**	**111.200.000**			-	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**null**		**50.000.000,00**	**Perdagkop UKM**
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	138 Unit Usaha		10 Unit Usaha	15 Unit Usaha	14 Unit Usaha	105.987.500	56.120.600	111.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			50.000.000,00	Perdagkop UKM
##	**2.17.07.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Forma**	**23,14 %**		**16,6 %**	**15 Persen**	**19,04 %**	**645.458.000**	**763.502.099**	**682.180.599**							**250.000.000,00**	
			Pertumbuhan Wirausaha	**32,14 %**		**15 %**		**25 %**											
	2.17.07.2.01.	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Persentase peningkatan usaha mikro yang terfasilitasi**	**2,5 %**		**0,75 %**		**1,25 %**	**645.458.000**	**763.502.099**	**682.180.599**			-	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**null**		**250.000.000,00**	**Perdagkop UKM**
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	205 Unit Usaha		10 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	537.000.000	505.044.099	483.514.099	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			200.000.000,00	Perdagkop UKM

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	340 Unit Usaha		40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	108.458.000	258.458.000	198.666.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			50.000.000,00	Perdagkop UKM
##	**2.17.08.**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase peningkatan omset pelaku usaha mikro miskin dan wirausaha pemula**	**45 %**		**33 %**		**35 %**	**3.346.379.162**	**3.610.317.000**	**3.346.379.162**							**75.200.000,00**	
	2.17.08.2.01.	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Persentase peningkatan produktivitas usaha mikro**	**30 %**		**15 %**		**18 %**	**3.346.379.162**	**3.610.317.000**	**3.346.379.162**			-	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**null**		**75.200.000,00**	**Perdagkop UKM**
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2423 Unit Usaha		1331 Unit Usaha		823 Unit Usaha	3.346.379.162	3.610.317.000	3.346.379.162	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			75.200.000,00	Perdagkop UKM
	3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**9.258.055.450**	**8.778.883.650**	**7.731.304.960**							**5.626.710.213,00**	
	3.30.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**9.258.055.450**	**8.778.883.650**	**7.731.304.960**							**4.917.410.413,00**	
##	**3.30.02.**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi**	**45 %**		**34 %**	**37 Persen**	**37 %**	**34.293.000**	**24.592.500**	**13.397.300**							**55.000.000,00**	
	3.30.02.2.01.	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Jumlah pelaku usaha perdagangan yang terawasi perizinannya**	**280 pelaku usaha**		**100 pelaku usaha**		**30 pelaku usaha**	**13.396.500**	**5.396.000**	**1.500.000**			-	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**null**		**25.000.000,00**	**Perdagkop UKM**
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	13.396.500	5.396.000	1.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			25.000.000,00	Perdagkop UKM
	3.30.02.2.06.	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah kegiatan pengawasan penyalahgunaan bahan berbahaya pada produk pangan**	**12 Kali**		**2 Kali**	**2 kali**	**2 Kali**	**20.896.500**	**19.196.500**	**11.897.300**			-	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**null**		**30.000.000,00**	**Perdagkop UKM**
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	12 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	20.896.500	19.196.500	11.897.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			30.000.000,00	Perdagkop UKM
##	**3.30.03.**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Sarana Pendukung pada Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya**	**100 %**		**NA %**		**10 %**	**8.016.396.650**	**7.516.396.650**	**6.719.191.560**							**4.311.596.300,00**	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.30.03.2.01.	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase Pemenuhan Kriteria Pasar BerSNI**	**100%**		**95 %**		**96%**	**8.016.396.650**	**7.516.396.650**	**6.719.191.560**			-	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**null**		**4.311.596.300,00**	**Perdagkop UKM**
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	10 Unit		2 Unit	2 Unit	2 Unit	4.615.230.000	4.115.230.000	3.796.060.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			1.615.919.000,00	Perdagkop UKM
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9 Unit		2 Unit	1 Unit	1 Unit	3.401.166.650	3.401.166.650	2.923.130.760	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			2.695.677.300,00	Perdagkop UKM
##	**3.30.04.**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**95 %**		**94,7 %**		**94,7 %**	**403.307.000**	**239.702.800**	**73.986.300**							**32.600.000,00**	
	3.30.04.2.02.	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan pengendalian harga barang kebutuhan pokok melalui pemantauan dan operasi pasar**	**12 %**		**2 %**		**2 %**	**403.307.000**	**239.702.800**	**73.986.300**			-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah	null		32.600.000,00	Perdagkop UKM
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1500 Laporan		250 Laporan	250 Laporan	250 Laporan	403.307.000	239.702.800	73.986.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			32.600.000,00	Perdagkop UKM
##	**3.30.06.**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase penanganan pengaduan konsumen terkait metrologi legal**	**100 %**		**100 %**		**100 %**	**211.558.800**	**113.556.100**	**59.386.100**							**193.214.113,00**	
	3.30.06.2.01.	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah**	**72 %**		**50 %**		**55 %**	**211.558.800**	**113.556.100**	**59.386.100**			-	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**-**		**193.214.113,00**	**Perdagkop UKM**
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4700 Unit		625 Unit	1400 Unit	700 Unit	211.558.800	113.556.100	59.386.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			193.214.113,00	Perdagkop UKM
##	**3.30.07.**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan**	**100 %**		**100 %**		**100 %**	**592.500.000**	**884.635.600**	**865.343.700**							**325.000.000,00**	
	3.30.07.2.01.	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah pelaku usaha yang bertransaksi digital**	**165 pelaku usaha**		**75 pelaku usaha**		**75 pelaku usaha**	**592.500.000**	**884.635.600**	**865.343.700**			-	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**null**		**325.000.000,00**	**Perdagkop UKM**
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	360 UMKM		60 UMKM	15 UMKM	60 UMKM	417.500.000	214.000.000	245.455.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			200.000.000,00	Perdagkop UKM
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	90 UMKM		15 UMKM	60 UMKM	15 UMKM	175.000.000	670.635.600	619.888.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			125.000.000,00	Perdagkop UKM

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.31.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**859.425.103**	**777.313.188**	**616.202.102**							**709.299.800,00**	
##	**3.31.02.**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri**	**50 %**		**9 %**		**15,8 %**	**856.230.103**	**774.958.188**	**615.108.852**							**706.299.800,00**	
	3.31.02.2.01.	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah IKM yang dibina baik melalui workshop, pendampingan maupun pembinaan lainnya**	**300 IKM**		**50 IKM**		**50 IKM**	**856.230.103**	**774.958.188**	**615.108.852**			-	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**null**		**706.299.800,00**	**Perdagkop UKM**
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	724.880.103	674.958.088	551.891.052	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			600.000.000,00	Perdagkop UKM
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	131.350.000	100.000.100	63.217.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			106.299.800,00	Perdagkop UKM
##	**3.31.03.**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase perizinan industri yang verifikasi tepat waktu**	**100 %**		**100 %**		**100 %**	**3.195.000**	**2.355.000**	**1.093.250**							**3.000.000,00**	
	3.31.03.2.01.	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelaku usaha industri yang diawasi perizinannya**	**20 IKM**		**20 IKM**		**20 IKM**	**3.195.000**	**2.355.000**	**1.093.250**			-	**Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah**	**null**		**3.000.000,00**	**Perdagkop UKM**
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.195.000	2.355.000	1.093.250	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan produktifitas ekonomi sektor unggulan daerah			3.000.000,00	Perdagkop UKM

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat,sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti.Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Perubahan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang selama tahun 2025. Terlaksananya Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang sesuai

dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang.

Padang Panjang, Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi
Usaha Kecil Dan Menengah
Kota Padang Panjang,

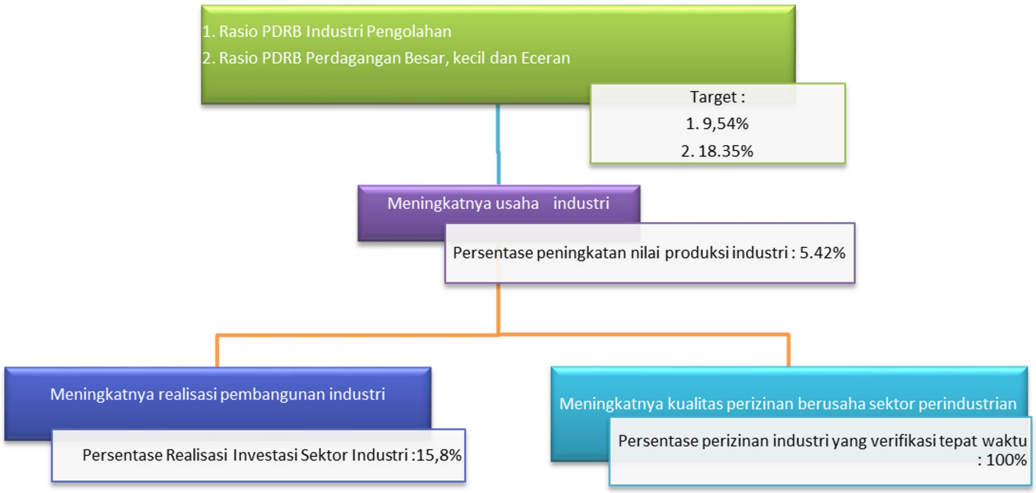
FERINO ROMIKO, S.STP, M.Si
NIP. 198602122006021001

1. POHON KINERJA

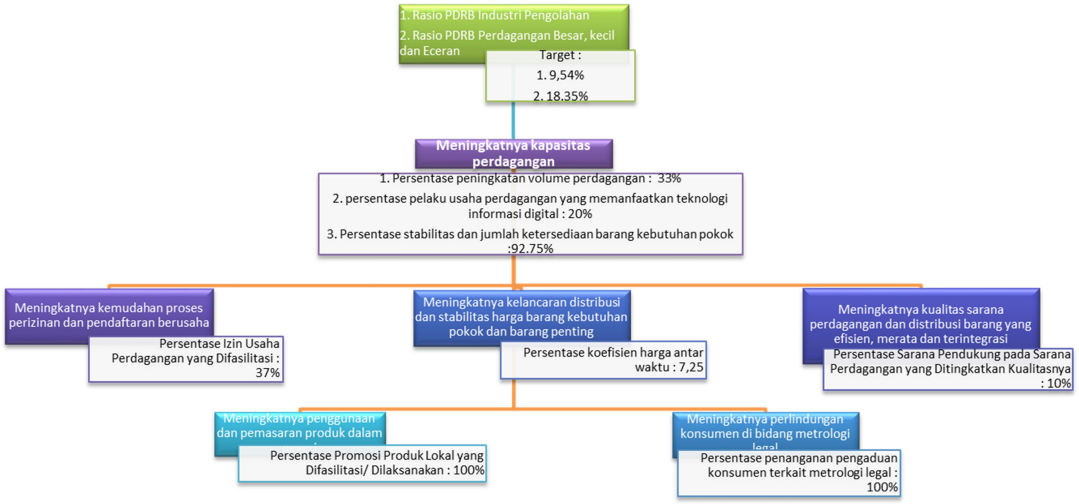


2. CASCADING

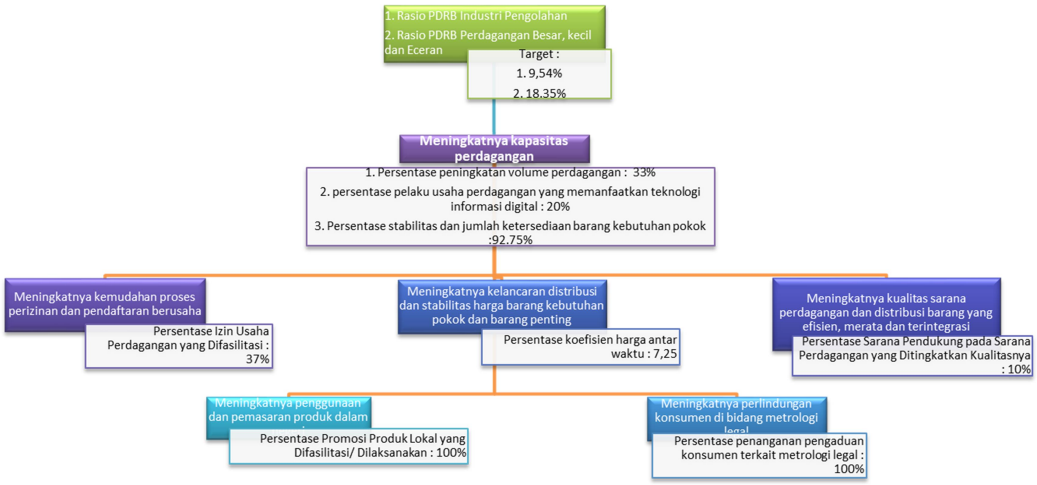
1. **SASARAN** 1



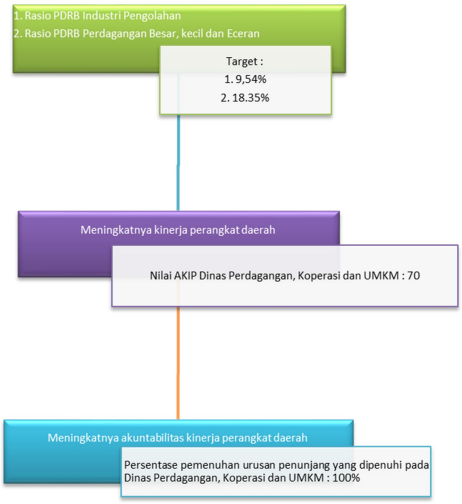
2. **SASARAN 2**



3. SASARAN 3



4. SASARAN 4



PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I	**PENDAHULUAN** ……..…..	1
1.1.	Latar Belakang ……..	1
1.2.	Landasan Hukum ……..	2
1.3.	Maksud dan Tujuan ……..	4
1.4.	Sistematika Penulisan ……..	4
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN**	6
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Berkenaan sampai dengan Triwulan I …..	6
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……	15
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ……	17
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** …….	19
3.1	Telahaan terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi……..……	19
3.1.1.	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 ……..	19
3.2.2.	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 …..	21
3.2.	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ……	23
3.3.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan …….	25
BAB IV	**PENUTUP** ……..	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 BAPPEDA Kota Padang Panjang ……..…….	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kota Padang Panjang s.d Tahun 2024 ……..	16
Tabel 2.3	Pemetaan Permasalahan BAPPEDA Kota Padang Panjang …….	17
Tabel 3.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ……..	21
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 …….	24
Tabel 3.3	Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 ……..	28

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Renja-PD merupakan acuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah dan merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) OPD. Renja-PD Perubahan memuat hasil evaluasi Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan I, dan memuat tujuan dan sasaran Renja-PD serta program dan kegiatan perubahan pada tahun berkenaan.

Dengan demikian Renja-PD Perubahan pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra dan merupakan salah satu dari komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja-PD Perubahan dalam tahun berkenaan dilakukan pengukuran kinerja triwulan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD sebagaimana diamanatkan dalam pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja-PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berkenaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi : (a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD dan/atau (b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berkenaan, maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Renja Perubahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 ini didasarkan atas hasil evaluasi Renja-PD pada Triwulan I yang meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, Rancangan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dan menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi terkait pelaksanaan program/kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);

16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Negara Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 9);
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 10).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun berkenaan, guna menyikapi perkembangan keadaan yang yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD sesuai dengan Renja sebelumnya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah guna mengarahkan kembali seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2025 dapat terencana dan berkenaan dengan baik sesuai dengan perkembangan keadaan yang terjadi, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan I dengan menjelaskan penyebab program/kegiatan/subkegiatan yang tidak mencapai target dan melebihi target serta faktor penghambat dan faktor pendorong.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional/provinsi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, kegiatan dan sub kegiatan.

Bab IV Penutup

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang tahun berkenaan adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi pada tahun 2025.

Secara umum pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sudah disusun berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan keuangan daerah. Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang tahun anggaran 2025 terdiri dari 4 (Empat) program, 16 (Enam belas) kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) sub kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2025 adalah sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 BAPPEDA Kota Padang Panjang

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)*	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2004-2026 (akhir periode renstra PD)		Realisasi capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD tahun lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2025)		REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)		PERANGKAT DARAH PENANGGUNG JAWAB
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	%	
		PENUNJANG URUSAN			**72,650,169,698**				**6,788,688,665**		**1,221,803,802**								**1,221,803,802**		**1,221,803,802**			
	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**72,650,169,698**			**100.00%**	**6,788,688,665**	**27.70%**	**1,221,803,802**							**18.00%**	**1,221,803,802**		**1,221,803,802**		**1.68%**	BAPPEDA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah**	**100%**	**15,499,169,698**			**100.00%**	**5,759,261,165**		**1,195,589,052**								**1,195,589,052**		**1,195,589,052**		**7.71%**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah***	***100%***	***11,641,705,698***			***100.00%***	***4,442,640,605***		***1,105,311,960***								***1,105,311,960***		**1,105,311,960**		***9.49%***	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1386 orang/ bulan	11,641,705,698			462 orang/ bulan	4,442,640,605	99 orang/ bulan	1,105,311,960							99 orang/ bulan	1,105,311,960	462 orang/ bulan	1,105,311,960		9.49%	BAPPEDA
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase pemenuhan urusan administrasi kepegawaian***	***100%***	***21,500,000***			-	-										-		-		***0.00%***	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan kepegawaian	43 Paket	21,500,000			-	-									0%	-	0%	-		0.00%	BAPPEDA
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah***	***100%***	***1,432,300,000***			***100%***	***430,792,560***		***39,532,117***								***39,532,117***		**39,532,117**		***2.76%***	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12,300,000			4 Paket	4,100,000	-	-							-	-	-	-		0.00%	BAPPEDA
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	202,500,000			4 Paket	50,488,560	-	-							0%	-	4 Paket	-		0.00%	BAPPEDA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	67,500,000			4 Paket	15,000,000	-	-							0%	-	4 Paket	-		0.00%	BAPPEDA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	1,150,000,000			24 Laporan	361,204,000	6 Laporan	39,532,117							6 Laporan	39,532,117	24 Laporan	39,532,117		3.44%	BAPPEDA
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan***	***100%***	***670,000,000***			***100%***	***400,360,000***		***0***								***0***				***0.00%***	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	540,000,000			1 Unit	350,000,000	-	-							-	-	1 Unit	-		0.00%	BAPPEDA
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Paket	50,000,000			-	-									-	-		-		0.00%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	80,000,000			6 Unit	50,360,000	-	-							-	-	6 Unit	-		0.00%	BAPPEDA
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah***	***100%***	***643,664,000***			***100%***	***207,750,000***		***35,850,995***								***35,850,995***		***35,850,995***		***5.57%***	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12,000,000			4 Laporan	3,000,000	-	-							-	-	4 Laporan	-		0.00%	BAPPEDA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan	114,000,000			-	-									0%	-	0%	-		0.00%	BAPPEDA
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	517,664,000			12 Laporan	204,750,000	3 Laporan	35,850,995							3 Laporan	35,850,995	12 Laporan	35,850,995		6.93%	BAPPEDA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik***	**100%**	**1,090,000,000**			***100%***	***277,718,000***		***14,893,980***								***14,893,980***		**14,893,980**		***1.37%***	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit	720,000,000			20 Unit	237,718,000	9 Unit	14,893,980							9 Unit	14,893,980	20 Unit	14,893,980		2.07%	BAPPEDA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	120,000,000			50 Unit	40,000,000	-	-							-	-	50 Unit	-		0.00%	BAPPEDA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	250,000,000			-	-									-	-	0%	-		0.00%	BAPPEDA
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	**Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah**	***86%***	**56,331,000,000**			**82%**	**552,079,550**		**18,651,500**								**18,651,500**		**18,651,500**		**0.03%**	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	***Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan***	3 Dokumen	***55,891,000,000***			***4 dokumen***	***512,079,550***		***18,328,100***								***18,328,100***		**18,328,100**		***0.03%***	
		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	3 Dokumen	90,000,000					-	-							-	-	0%	-		0.00%	BAPPEDA
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5 Berita Acara	190,000,000			2 Berita Acara	100,000,000	2 Berita Acara	411,600							2 Berita Acara	411,600	2 Berita Acara	411,600		0.22%	BAPPEDA
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	15 Dokumen	55,611,000,000			6 Dokumen	412,079,550	1 Dokumen	17,916,500							1 Dokumen	17,916,500	6 Dokumen	17,916,500		0.03%	BAPPEDA
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	***Tingkat ketersediaan data perencanaan pembanguinan pada OPD dalam sistem pengelolaan data***	***88%***	***50,000,000***			***86%***	***10,000,000***	-	***323,400***								***323,400***		**323,400**		***0.65%***	
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	50,000,000			1 Dokumen	10,000,000	-	323,400							-	323,400	1 Dokumen	323,400		0.65%	BAPPEDA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	***Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah***	12 Dokumen	***50,000,000***			***4 Dokumen***	***15,000,000***	-	-								-		-		***0.00%***	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	30 Laporan	50,000,000			10 Laporan	15,000,000	-	-							0.00%	-	10 Laporan	-		0.00%	BAPPEDA
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	***Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan***	**15 modul**	**340,000,000**			**5 Modul**	**15,000,000**	**-**	**-**								**-**				***0.00%***	
		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	123 Dokumen	340,000,000			41 Dokumen	15,000,000	-	-							0.00%	-	41 Dokumen	-		0.00%	BAPPEDA
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik**	92%	**450,000,000**			**88%**	**159,847,950**		**1,023,750**								**1,023,750**		**1,023,750**		**0.23%**	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	***Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia***	92%	***210,000,000***			***88%***	***75,000,000***		***1,023,750***								***1,023,750***		**1,023,750**		***0.49%***	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	39 Laporan	90,000,000			13 Laporan	35,000,000	-	-							0%	-	13 Laporan	-		0.00%	BAPPEDA
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	39 Laporan	120,000,000			13 Laporan	40,000,000	-	1,023,750							-	1,023,750	13 Laporan	1,023,750		0.85%	BAPPEDA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	***Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan kewilayahan***	92%	***150,000,000***			***88%***	***50,000,000***	-	-								-		-		***0.00%***	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	6 Laporan	150,000,000			2 Laporan	50,000,000	-	-							-	-	1 laporan	-		100.00%	BAPPEDA
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	***Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA***	92%	***90,000,000***			***88%***	***34,847,950***	-	-								-		-		***0.00%***	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	24 Laporan	90,000,000			8 Laporan	34,847,950	-	-							-	-	8 Laporan	-		0.00%	BAPPEDA
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	**Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan; Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90**	**24 Dokumen ; 76%**	**370,000,000**			**6 Dokumen; 72%**	**317,500,000**		**6,539,500**							**6,539,500**		**6,539,500**		**1.77%**	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	***Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun***	3 Dokumen	***65,000,000***			-	-									***0***			-		***0.00%***	
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	3 Laporan	65,000,000			-	-									-	-	-	-		0.00%	BAPPEDA
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	***jumlah dokumen kelitbangan daerah Bidang Sosial dan Kependudukan yang disusun***	***3 Dokumen***	***62,500,000***			***1 dokumen***	***22,500,000***	-	-							***0***			-		***0.00%***	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	%	
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	3 Dokumen	62,500,000			1 dokumen	22,500,000	-	-							-	-		-		0.00%	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	***jumlah dokumen kelitbangan daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang disusun***	***3 Dokumen***	***62,500,000***			***1 dokumen***	***215,000,000***	-	-												***0.00%***	
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	3 Dokumen	62,500,000			1 dokumen	215,000,000	-	-							-	-		-		0.00%	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	***Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah***	***100%***	***180,000,000***			***100%***	***80,000,000***	-	***6,539,500***								***6,539,500***		***6,539,500***		***3.63%***	
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	3 Dokumen	180,000,000			1 Dokumen	80,000,000	-	6,539,500							-	6,539,500	1 Dokumen	6,539,500		3.63%	BAPPEDA
		JUMLAH TOTAL			**72,650,169,698**				**6,788,688,665**		**1,221,803,802**								**1,221,803,802**		**1,221,803,802**		**1.68%**	

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Bappeda Kota Padang Panjang Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan I Tahun 2025 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas kegiatan :

    a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk realisasi keuangan 24,88% dan fisik 32%.

    b. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, realisasi keuangan 0% dan fisik 26%. (2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, realisasi keuangan 0% dan fisik 15%. (3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, realisasi keuangan 0% dan fisik 20%. (4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, realisasi keuangan 10,94% dan fisik 18%.

    c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan (1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi keuangan 0% dan fisik 26%, rencananya pengadaan kendaraan dinas di awal tahun namun sub kegiatan tersebut masuk recofusing anggaran. (2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, realisasi keuangan 0% dan fisik 0%.

    d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi keuangan 0% dan fisik 17%. (2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, realisasi keuangan 17,51% dan fisik 31%.

    e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, realisasi keuangan 6,27% dan fisik 50%. (2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, realisasi keuangan 0% dan fisik 36%. Pemeliharaan ini dibayarkan sesuai kebutuhan jika ada pemeliharaan kendaraan maupun peralatan dan mesin.

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas kegiatan :

a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, dengan sub kegiatan : (1) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, realisasi keuangan 6,27% dan fisik 50%, selanjutnya sub kegiatan ini berisi pembekalan fasilitator musrenbang pada akhir tahun. (3) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi keuangan 4,35% dan fisik 36% karena kegiatan masih sedang berlangsung untuk penyusunan RPJMD 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan RKPD Perubahan Tahun 2025.

b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan (1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, realisasi keuangan 6,23% dan fisik 6%.

c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan (1) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, realisasi keuangan 0% dan fisik 10%.

d. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, dengan sub kegiatan (1) Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, realisasi keuangan 0% dan fisik 70%.

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas kegiatan :

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan sub kegiatan (1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, realisasi keuangan 0% dan fisik 30%. (2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia, realisasi keuangan 2,56% dan fisik 10%.

b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan sub kegiatan : (1) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA, realisasi keuangan 0% dan fisik 12%.

c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dengan sub kegiatan : (1) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, realisasi keuangan 0% dan fisik 7%.

4. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, terdiri atas kegiatan :

   a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan, dengan sub kegiatan (1) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, realisasi keuangan 0% dan fisik 0%. Sub kegiatan akan dihilangkan di recofusing anggaran.

   b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan sub kegiatan : (1) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, realisasi keuangan 0% dan fisik 1%. Sub kegiatan akan dihilangkan di recofusing anggaran.

   c. Pengembangan Inovasi dan Teknologi, dengan sub kegiatan : (1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, realisasi keuangan 8,17% dan fisik 33%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang penyelenggaraan urusan pemerintahan seluruh program kegiatan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang untuk tahun 2018-2023 (Berdasarkan Perubahan Renstra tahun 2018-2023) dicapai dengan sasaran yakni :

1. ***Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah***
2. ***Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan***
3. ***Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting***

Sedangkan untuk tahun 2024 (Berdasarkan Renstra 2024-2026) dicapai dengan sasaran yakni :

1. ***Meningkatnya Kualitas Perencanaan***
2. ***Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah***

Target evaluasi capaian kinerja untuk 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kota Padang Panjang s.d Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Tahun 2023			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.	Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah				73%	68,75%	94,18%	72%	69,71%	95,49%
2.	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan				96,37%	100%	103,77%	95%	96,37%	101,44%
3.	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting				100%	100%	100%	91,7%	100%	109.05%
4.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	70,00	72,20	103,14%						
5.	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100%						

Sumber : Bappeda Kota Padang Panjang

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal koordinator perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan disadari bahwa Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Adapun perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud adalah penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, baik perencanaan skala kota, maupun perencanaan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota padang Panjang.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Namun selama tahun 2018-2023 pelaksanaan tugas dan fungsi koordinator perencanaan pembangunan ini belum terlaksana secara menyeluruh dan optimal.

Belum terlaksananya tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan BAPPEDA Kota Padang Panjang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih belum terukurnya kualitas perencanaan	Koordinasi singkronisasi perencanaan pembangunan daerah masih belum optimal	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dan sinergitas penyusunan perencanaan daerah
			Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap mekanisme penyusunan dokumen perencanaan
			Masih beragamnya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
		Konsistensi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah masih belum optimal	Rendahnya konsistensi Indikator dokumen perencanaan
			Rendahnya koordinasi dalam pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Perencanaan dan penganggaran masih belum berdasarkan analisis kebutuhan
			Kurangnya pemahaman OPD terhadap mekanisme penyusunan dokumen perencanaan
			Masih rendahnya tatakelola data dan pemanfaatan sistem informasi
			Kurangnya pemahaman OPD terhadap pentingnya data dalam penyusunan perencanaan
2.	Masih kurangnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan masih belum optimal	Masih rendahnya Konsistensi Penelitian dengan Rencana Induk Kelitbangan dan Dokumen Perencanaan
			Rendahnya pengelolaan dan Penguatan Inovasi Daerah

Sumber : Bappeda Kota Padang Panjang

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.1.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu ***"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".*** Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian targettarget pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024.

3.1.2. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu ***"Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan"***, dengan penjabaran misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara'–Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor
		Meningkatnya pertumbuhan Investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 merupakan tahun ketiga dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu: ***"Transformasi Sektor Strategis yang Inklusif dan Berkelanjutan".***

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan. Seiring perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) dinamika kebijakan, regulasi di bidang perencanaan dan penganggaraan mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas. Perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas adalah perencanaan yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan yang baik; yang mengedepankan perencanaan teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up, dengan didasari ukuran-ukuran yang akuntabel; serta dalam pelaksanaannya selalu dipantau melalui proses pengendalian dan evaluasi sebagai dasar proses perencanaan.

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kota Padang Panjang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk tujuan dan sasaran selama kurun waktu tiga tahun kedepan.

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Baseline (2024)	Target Target Kinerja Sasaran		Ket.
						Renstra 2025-2029 (2025)	Renja 2025	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks perencanaan pembangunan Daerah	Indeks	72,20	73,00	73,00	
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	81,35 (Sangat Inovatif)	82,22 (Sangat Inovatif)	82,22 (Sangat Inovatif)	
			Nilai AKIP Kota	Angka	64,22	65,00	65,00	
		1. Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Nilai komponen perencanaan kinerja dalam AKIP Kota	Angka	22,93	23,00	23,00	
		2. Meningkatkan kualitas riset dan inovasi	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persen	NA	78,8%	78,8%	
		3. Meningkatkan kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Angka	70,40	70,60	70,60	

3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Perencana, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029
2. Penetapan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029
3. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah periode transisi tahun 2024-2026, serta Evaluasi Renstra dan Renja Badan Perencana, Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan Tahun 2024.
4. Tema dan prioritas pembangunan tahun 2025.
5. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah Tahun 2025 awal yang meliputi 4 (Empat) program, 15 (Lima belas) kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) sub kegiatan, adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
   b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
   a. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
   b. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
   a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
   a. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
4. Impelementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
   a. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

C. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
   a. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
   b. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
   a. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
   a. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

D. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
   a. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
   a. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
   a. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Tabel 3.3 Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							**6.949.396.059**	**6.996.438.665**	**5.351.515.549**							**6.442.068.566,00**	
	5.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**6.949.396.059**	**6.996.438.665**	**5.351.515.549**							**6.442.068.566,00**	
	5.01.	**PERENCANAAN**							**6.949.396.059**	**6.996.438.665**	**5.351.515.549**							**6.317.068.566,00**	
##	**5.01.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**6.029.007.869**	**5.967.011.165**	**4.916.245.499**							**5.341.268.566,00**	
	5.01.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 %**	**100 Persen**	**4.320.901.309**	**4.442.640.605**	**4.155.960.264**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**3.902.068.566,00**	**Bappeda**
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2772 Orang/bulan		462 Orang/bulan	462 Orang/bulan	462 Orang/bulan	4.320.901.309	4.442.640.605	4.155.960.264	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			3.902.068.566,00	Bappeda
	5.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 %**	**100 Persen**	**419.588.560**	**430.792.560**	**231.040.435**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**554.200.000,00**	**Bappeda**
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	4.100.000	4.100.000	3.091.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			4.200.000,00	Bappeda
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	50.488.560	50.488.560	28.833.885	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			70.000.000,00	Bappeda
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	0 Paket	4 Paket	15.000.000	15.000.000	18.516.750	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			30.000.000,00	Bappeda
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	350.000.000	361.204.000	180.598.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			450.000.000,00	Bappeda
	5.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 %**	**100 Persen**	**400.000.000**	**400.360.000**	**91.420.600**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**330.000.000,00**	**Bappeda**
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit		1 Unit	1 Unit	0 Unit	350.000.000	350.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			270.000.000,00	Bappeda

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		6 Unit	6 Unit	6 Unit	50.000.000	50.360.000	91.420.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			60.000.000,00	Bappeda
	5.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi**	**100 Persen**		**100 Persen**	**-**	**100 Persen**	**305.400.000**	**207.750.000**	**187.648.600**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**227.000.000,00**	**Bappeda**
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	3.000.000	3.000.000	2.495.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			3.000.000,00	Bappeda
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		12 Laporan	24 Laporan	0 Laporan	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			39.000.000,00	Bappeda
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	302.400.000	204.750.000	185.152.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			185.000.000,00	Bappeda
	5.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 %**	**100 Persen**	**277.718.000**	**277.718.000**	**250.175.600**			-	-	**-**		**328.000.000,00**	**Bappeda**
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		20 Unit	20 Unit	20 Unit	237.718.000	237.718.000	210.205.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			248.000.000,00	Bappeda
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	50 Unit	40.000.000	40.000.000	39.970.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			30.000.000,00	Bappeda
##	**5.01.02.**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD**	**90 Persen**		**84 Persen**	**84 %**	**85 Persen**	**620.540.240**	**552.079.550**	**250.691.900**							**815.800.000,00**	
	5.01.02.2.01.	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan**	**10 Dokumen**		**2 Dokumen**	**4 dokumen**	**2 Dokumen**	**565.540.240**	**512.079.550**	**250.691.900**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**Perangkat Daerah**		**665.800.000,00**	**Bappeda**
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000	-	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			35.000.000,00	Bappeda

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	6 Berita Acara		1 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100.000.000	100.000.000	49.387.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			70.000.000,00	Bappeda
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	18 Dokumen		5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	430.540.240	412.079.550	201.304.050	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			560.800.000,00	Bappeda
	5.01.2.2.02.	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase kesesuaian daftar data dengan kebutuhan perencanaan pembangunan**	**99 Persen**		**80 Persen**	**87 %**	**82 Persen**	**15.000.000**	**10.000.000**	**-**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**15.000.000,00**	**Bappeda**
	5.01.2.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	10.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			15.000.000,00	Bappeda
	5.01.2.2.03.	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah**	**4 Dokumen**		**4 Dokumen**	**4 dokumen**	**0 Dokumen**	**15.000.000**	**15.000.000**	**-**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**15.000.000,00**	**Bappeda**
	5.01.2.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	36 Laporan		9 Laporan	10 Laporan	0 Laporan	15.000.000	15.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			15.000.000,00	Bappeda
	5.01.2.2.04.	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Jumlah modul yang dikembangkan**	**0 Modul**		**1 Modul**	**5 modul**	**0 Modul**	**25.000.000**	**15.000.000**	**-**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**120.000.000,00**	**Bappeda**
	5.01.2.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	41 Dokumen		41 Dokumen	41 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000	15.000.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			120.000.000,00	Bappeda
##	**5.01.3.**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD**	**100 Persen**		**100 Persen**	**88 %**	**100 Persen**	**174.847.950**	**159.847.950**	**80.980.600**							**160.000.000,00**	
	5.01.03.2.01.	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia**	**100 Persen**		**100 Persen**	**88 %**	**100 Persen**	**75.000.000**	**75.000.000**	**44.782.650**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**75.000.000,00**	**Bappeda**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	78 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	35.000.000	35.000.000	19.618.650	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			35.000.000,00	Bappeda
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	78 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	40.000.000	40.000.000	25.164.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			40.000.000,00	Bappeda
	5.01.03.2.02.	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang perekonomian dan SDA**	**100 Persen**		**100 Persen**	**88 %**	**100 Persen**	**49.847.950**	**34.847.950**	**24.847.950**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**35.000.000,00**	**Bappeda**
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	48 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	49.847.950	34.847.950	24.847.950	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			35.000.000,00	Bappeda
	5.01.03.2.03.	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**100 Persen**		**100 Persen**	**88 %**	**100 Persen**	**50.000.000**	**50.000.000**	**11.350.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**50.000.000,00**	**Bappeda**
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	10 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000	50.000.000	11.350.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			50.000.000,00	Bappeda
	5.05.	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**125.000.000**	**317.500.000**	**103.597.550**							**125.000.000,00**	
##	**5.05.02.**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan**	**86 Persen**		**NA Persen**		**81 Persen**	**125.000.000**	**317.500.000**	**103.597.550**							**125.000.000,00**	
			Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	**80 Persen**		**NA Persen**		**75 Persen**											
	5.05.02.2.01.	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun**	**4 Dokumen**		**0 Dokumen**	**1 dokumen**	**0 Dokumen**	**15.000.000**	**-**	**-**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**20.000.000,00**	**Bappeda**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Laporan	**0 Dokumen**	15.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			20.000.000,00	Bappeda
	5.05.02.2.02.	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun**	**5 Dokumen**		**2 Dokumen**	**1 dokumen**	**0 Dokumen**	**22.500.000**	**22.500.000**	**-**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**20.000.000,00**	**Bappeda**
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	**0 Dokumen**	22.500.000	22.500.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			20.000.000,00	Bappeda
	5.05.02.2.03.	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun**	**5 Dokumen**		**2 Dokumen**	**1 dokumen**	**1 Dokumen**	**22.500.000**	**215.000.000**	**10.888.590**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**20.000.000,00**	**Bappeda**
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	4 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000	215.000.000	10.888.590	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			20.000.000,00	Bappeda
	5.05.02.2.04.	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah**	***100 Persen***		*93,3 Persen*	**100 %**	99,6 Persen	**65.000.000**	**80.000.000**	**92.708.960**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**65.000.000,00**	**Bappeda**
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000	80.000.000	92.708.960	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			65.000.000,00	Bappeda

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berkenaan dalam hal ini terkait realisasi dan capaian pada triwulan I, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan diperkirakan akan berpengaruh terhadap realisasi target pelaksanaan program/kegiatan dan berakibat terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran. .

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah pada Renja Perubahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dalam hal ini terkait realisasi dan capaian pada triwulan I, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan diperkirakan akan berpengaruh terhadap realisasi target pelaksanaan program/kegiatan dan berakibat terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran.

Berdasarkan evaluasi tersebut, maka untuk perubahan anggaran Tahun 2025 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang akan melaksanakan 4 (Empat) program 15 (Lima belas) kegiatan dan 23 (Dua puluh tiga) sub kegiatan. Pedoman Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dan acuan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, Juni 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda NIP. 19721016 199303 2 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Renstra, dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Renja, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Perubahan Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Proses penyusunan rancangan Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Badan Pengelola Keuangan daerah 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang yang berpedoman pada RPJMD 2025-2029. Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah serta sejalan dengan tujuan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset daerah dan Pendapatan asli daerah

Penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah dilakukan melalui tahapan, meliputi :

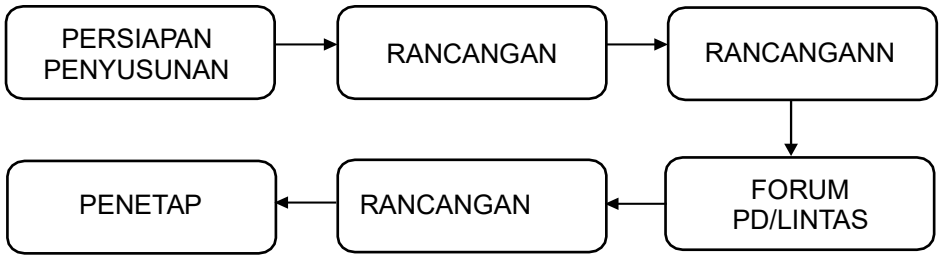
1. Persiapan penyusunan :

   Meliputi pembentukan tim penyusun Perubahan Renja Perangkat daerah Tahun 2025, Pengumpulan hasil evaluasi renja 2024, pengendalian kegiatan tahun 2025.
2. Tahap perumusan rancangan awal perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah,meliputi:
   a. Pengolahan data dan informasi ;
   b. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah ;
   c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah;
   d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah;
   e. Telaahan terhadap rancangan awal Perubahan RKPD;
   f. Perumusan tujuan dan sasaran;
   g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
   h. Perumusan kegiatan prioritas;
   i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah;
   j. Penyempurnaan rancangan Perangkat Daerah;
   k. Pembahasan forum Perangkat Daerah;
3. Penyusunan rancangan sinkronisasi dilaksanakan oleh Tim Penyusun Perubahan Renja Badan Pengelola Keunagan Daerah Kota Padang Panjang

Tahun Anggaran 2025, Masukan dari pelaksana kegiatan pembahasan oleh tim Badan Pengelola Keuangan Daerah;

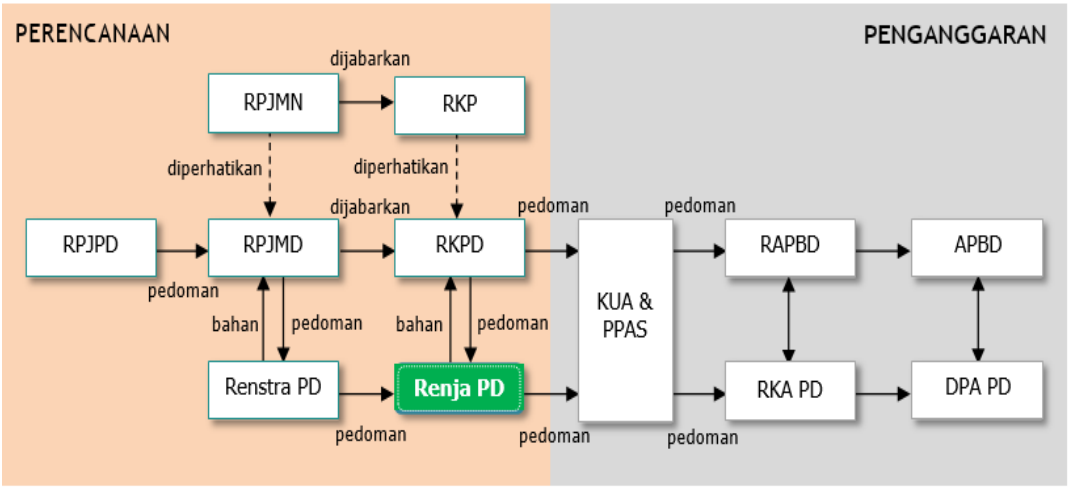
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Tahap penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam bentuk rancangan akhir;
6. Tahap Penetapan Renja Perangkat Daerah;

GAMBAR 1.1
Tahapan Penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang



Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025-2029, untuk melihat hubungan antar dokumen dapat kita lihat pada tabel berikut:

Gambar 1.2
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



:

Penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota

Padang Panjang Tahun 2025 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 9)
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang adalah untuk untuk memberikan arah dan pedoman dalam

penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang adalah:

a) Menjabarkan Tujuan, Sasaran, program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
b) Memberikan arahan dan panduan bagi peningkatan sumber-sumber pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam waktu 1 Tahun ;
c) Memberikan dasar penilaian kinerja penyelenggaraan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kurun waktu satu tahun;
d) Sebagai Dasar penyusunan program dan kegiatan dalam KUA PPAS Perubahan tahun 2025;
e) Menetapkan kegiatan prioritas berdasarkan isu dan masalah yang mendesak agar lebih terarah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I **Pendahuluan**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II **Hasil Evaluasi Renja Badan Pengelola Keuangan Tahun Berkenaan**

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan I dengan menjelaskan penyebab program/kegian/subkegiatan yang tidak mencapai target dan melebihi target serta faktor penghambat dan faktor pendorong, evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Triwulan I Tahun Anggaran 2025

Bab III **Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah**

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta Program dan kegiatan.

Bab IV **Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2025

Bab V **Penutup**

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025 s/d Triwulan I

Kualitas Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 perlu diperhatikan evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025 sampai dengan triwulan I. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2025 terhadap target kinerja Tahun 2025. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Secara umum, pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik telah mencapai 100%. Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

No	Sasaran	Program dan Kegiatan Baru	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan		Realisasi Kinerja Per triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
				Kinerja	KEUANGAN			Kinerja	KEUANGAN	K	KEUANGAN	K	KEUANGAN	K	KEUANGAN	K	KEUANGAN							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					33.895.114.104		**10.221.768.772**		**11.487.167.033**		**1.961.804.162**		**0,00**		**0**		**0**		**1.961.804.162**		**12.183.572.934**			
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	**Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu**	**Tepat Waktu**	**8.487.000.000**		**1.505.157.043**		**1.891.608.300**	**-**	**108.783.750**		**0**		**0**		**0**	**-**	**108.783.750**		**1.613.940.973**		**19,02**	
		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/waktu maupun ketentuan lainnya**	**Tepat Waktu**	**2.160.000.000**		**681.827.650**		**716.323.500**		**104.663.550**		**0**		**0**		**0**		**104.663.550**		**786.491.200**		**36,41**	
		Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	18 Dokumen	1.050.000.000	6 dokumen	349.239.750	6 Dokumen	349.154.500	-	104.663.550		-	-	0		-	-	104.663.550	6 dokumen	453.903.300	33,33	43,23	

		Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	12 dokumen	390.000.000	4 dokumen	119.913.950	4 dokumen	129.015.200	-	-	-	-		0		-	-	0	4 dokumen	119.913.950	33,33	30,75	
		Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6 dokumen	360.000.000	2 dokumen	106.609.650	2 dokumen	118.290.400	-	-	-	-	-	0		-	-	0	2 dokumen	106.609.650	33,33	29,61	
		Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6 dokumen	360.000.000	2 dokumen	106.064.300	2 dokumen	119.863.400	-	-	-	-		0	-	-	-	0	2 dokumen	106.064.300	33,33	29,46	
		Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	**Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dan SAP**	**Tepat Waktu**	**202.000.000**		**41.824.200**		**113.454.800**		**3.826.200**		**0**		**0**		**0**		**3.826.200**		**45.650.400**		**22,60**	
		Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 laporan	23.000.000	8 laporan	6.642.250	8 laporan	6.553.400	2 laporan	-		-		-		-	2 laporan	0	10 laporan	6.642.250	83,33	28,88	
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	21 laporan	107.000.000	7 laporan	27.279.050	7 laporan	93.104.400	7 laporan	3.826.200	-	-		-	-	-	7 laporan	3.826.200	14 laporan	31.105.250	66,67	29,07	
		Koordinasi dan penyusunan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Ranper Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 dokumen	72.000.000	2 dokumen	7.902.900	2 dokumen	13.797.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2 dokumen	7.902.900	33,33	10,98	

		Kegiatan Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	**Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK**	**83%**	**125.000.000**		**12.500.000**		**61.830.000**		**294.000**		**0**		**0**		**0**		**294.000**		**12.794.000**		**10,24**	
		Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6 dokumen	14.000.000	6 dokumen	12.500.000	6 dokumen	61.830.000	1 dokumen	294.000		-		-		-	1 dokumen	294.000	7 dokumen	12.794.000	100,00	91,39	
							-			-		-		-		-							
		Kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	**Jumlah dokumen perwako tentang sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah**		**6.000.000.000**		**769.005.193**		**1.000.000.000**	-	**0**		**0**		**0**		**0**	-	**0**		**769.005.193**		**12,82**	
		Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3 Laporan	6.000.000.000	1 Laporan	769.005.193	1 Laporan	1.000.000.000	-	-		-		-		-	-	0	1 laporan	769.005.193	33,33	12,82	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah**	**2%**	**1.050.178.476**		**253.401.790**		**600.578.100**		**38.614.200**		**0**		**0**		**0**		**38.614.200**		**292.015.990**		**27,81**	
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah**	**9,9 Milyar**	**1.050.178.476**		**253.401.790**		**600.578.100**		**38.614.200**		**0**		**0**		**0**		**38.614.200**		**292.015.990**		**27,81**	

		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	42000 objek pajak	300.000.000	400 objek pajak	96.289.650	400 objek pajak	89.261.900	-	37.561.400	-	-		0		-	-	37.561.400	400 objek pajak	133.851.050	0,95	44,62	
		Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	6 laporan	130.000.000	2 laporan	30.204.600	2 laporan	240.970.000	-	-	-	-	-	-		-	-	0	2 laporan	30.204.600	33,33	23,23	
		Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	27 dokumen	350.000.000	9 dokumen	88.428.550	9 dokumen	168.639.300	3 dokumen	1.052.800	-	-	-	-		-	3 dokumen	1.052.800	12 dokumen	89.481.350	44,44	25,57	
		Pengendalian pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	216 dokumen	270.178.476	72 dokumen	38.478.990	72 dokumen	101.706.900	18 dokumen	-		-		-		-	18 dokumen	0	90 dokumen	38.478.990	41,67	14,24	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu**	**Tepat Waktu**	**3.905.000.000**		**112.823.300**		**471.337.800**		**9.914.100**		**0**		**0**		**0**		**9.914.100**		**122.737.400**		**3,14**	
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu**	**100%**	**3.905.000.000**		**112.823.300**		**471.337.800**		**9.914.100**		**0**		**0**		**0**		**9.914.100**		**122.737.400**		**3,14**	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6 laporan	136.000.000	2 laporan	8.961.350	2 laporan	112.107.000	1 laporan	-	-	-		0	-	-	1 laporan	0	3 laporan	8.961.350	50,00	6,59	
		Optimalisasi penggunaan pemanfaatan,pemindahtangan,pemusnahan dan penghapusan barang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	660.000.000	4 Dokumen	7.690.700	4 Dokumen	203.843.000	-	1.606.500		-		0	-	-	-	1.606.500	4 dokumen	9.297.200	33,33	1,41	

		Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Laporan	19.000.000	2 Laporan	4.781.700	2 Laporan	17.279.800	1 laporan	4.908.750		-		0	-	-	1 laporan	4.908.750	3 laporan	9.690.450	50,00	51,00	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 dokumen	45.000.000	2 dokumen	8.752.550	2 dokumen	16.635.000	-	3.398.850		-		-	-	-	-	3.398.850	2 dokumen	12.151.400	33,33	27,00	
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	6 dokumen	45.000.000	2 dokumen	6.591.850	2 dokumen	27.803.000	1 dokumen	-		-		-	-	-	1 dokumen	0	3 dokumen	6.591.850	50,00	14,65	
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	9 laporan	3.000.000.000	1 laporan	76.045.150,00	1 laporan	93.670.000	-	0,00		-		-		-	-	0	-	76.045.150	11,11	2,53	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah**	**100%**	**20.452.935.628**		**8.350.386.639**		**8.523.642.833**		**1.528.804.144**		**0**		**0**		**0**		**1.804.492.112**		**8.701.134.206**			
		Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	**Persentase Pemenuhan Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**16.009.380.738**		**6.546.330.062**		**6.790.845.581**		**1.528.804.144**		**0**		**0**		**0**		**1.524.804.144**		**8.701.134.206**			
		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2058 org/bln	16.009.380.738	630 org/bln	6.546.330.062	630 org/bln	6.790.845.581	180 org/bln	1.524.804.144		0		0		0	180 org/bln	1.524.804.144	810 org/bln	8.071.134.206	39,36	50,42	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**100%**	**75.000.000**		**22.500.000**		**0**		**0**		**-**		**0**		**-**		**0**		**0**		0,00	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	98 paket	75.000.000	45 paket	22.500.000	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,00	0,00	
		Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah**	**90%**	**1.423.488.090**		**712.189.297**		**509.008.552**		**78.059.990**		**0**		**0**		**0**		**78.059.990**		**790.249.287**		**55,51**	

		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	135 paket	210.000.000	45 paket	117.696.018	45 paket	145.156.552	45 paket	25.908.800		-		0		-	45 paket	25.908.800	90 paket	143.604.818	66,67	68,38	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 paket	139.488.090	8 paket	17.796.100	8 paket	23.728.000	2 paket	3.200.000		-		0		-	2 paket	3.200.000	10 paket	20.996.100	41,67	15,05	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 paket	24.000.000	7 paket	9.317.000	7 paket	15.488.000	7 paket	1.543.000		-		0	-	-	7 paket	1.543.000	14 paket	10.860.000	66,67	45,25	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1386 laporan	1.050.000.000	512 laporan	567.380.179	512 laporan	324.636.000	40 laporan	47.408.190		-		0		-	40 laporan	47.408.190	552 laporan	614.788.369	39,83	58,55	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan BMD yang Tuntas Dilaksanakan**	**100%**	**150.000.000**		**175.340.000**		**152.713.100**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**175.340.000**		116,89	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	150.000.000	26 unit	175.340.000	26 unit	62.713.100	-	0		0		0		0	-	0	26 unit	175.340.000	173,33	116,89	
		Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	90.000.000			1 unit	90.000.000	-	0		0		0		0		0		-		0,00	
		Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	**persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**1.982.992.000**		**645.014.331**		**692.445.400**		**149.917.828**		**0**		**0**		**0**		**149.917.828**		**794.932.159**		**40,09**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 laporan	18.600.000	3 laporan	2.750.000	3 laporan	4.379.000	3 laporan	1.000.000		-		0		0	3 laporan	1.000.000	6 laporan	3.750.000	66,67	20,16	
		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 laporan	489.000.000	60 laporan	130.207.273	60 laporan	163.000.000	15 laporan	28.848.544		-		0		0	15 laporan	28.848.544	75 laporan	159.055.817	41,67	32,53	
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	6 laporan	1.475.392.000	2 laporan	512.057.058	2 laporan	525.066.400	2 laporan	120.069.284		-		-		0	2 laporan	120.069.284	4 laporan	632.126.342	66,67	42,84	

			Kantor yang Disediakan																				
		Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	**Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik**	**88%**	**887.074.800**		**249.012.949**		**378.630.200**		**51.710.150**		**0**		**0**		**0**		**51.710.150**		**300.723.099**		**33,90**	
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau jabatan kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	99 Unit	617.074.800	33 Unit	198.948.449	33 Unit	242.629.000	11 unit	45.552.150		0		0		0	11 unit	45.552.150	44 unit	244.500.599	44,44	39,62	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	168 unit	120.000.000	30 unit	9.000.000	56 unit	43.490.000	7 unit	3.650.000		0		0		0	7 unit	3.650.000	37 unit	12.650.000	22,02	10,54	
		Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	150.000.000	1 unit	41.064.500	1 unit	92.511.200	1 unit	2.508.000		-		0,00		0,00	1 unit	2.508.000	2 unit	43.572.500	50,00	29,05	

Berdasarkan Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang dapat di ambil Kesimpulan bahwasannya pada Tahun 2024 ada 1 Sub Kegiatan yang di hilangkan Pada Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2024 yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis administrasi keuangan karena sub kegiatan ini sudah tercapai 100% pada akhir Tahun anggaran 2023 sehingga tidak dilaksanakan lagi pada tahun 2024 dimana APBD 2024 sementara seluruh sub kegiatan yang lain terlaksana 100% secara kinerja. Jika kita bandingkan dengan Sub Kegiatan yang ada pada Tahun 2024 dengan Tahun 2025 ada 1 Sub Kegiatan yang tidak kita anggarakan lagi pada Tahun 2025 yaitu Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya sementara keadaan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 seluruh sub kegiatan yang telah di targetkan tercapai 100% secara kinerja walaupun secara keuangan banyak yang tidak tercapai jika disandingkan dengan kondisi di awal Tahun hal ini disebabkan oleh Refocusing anggaran yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sesuai dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Penyelenggaraan tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Keuangan di Kota Padang Panjang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2029. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran, target evaluasi capaian kinerja sasaran . Disamping itu juga dilakukan pengukuran terhadap capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan pada tabel :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-						
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1	Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP				
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah				70	70,5	71	71,5	72	70	62	63,2				
3	Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		**IKK**		9102	8,938	2,52	2,56	2,58	9102	8,938	2,52				
4	Revenue mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		**IKK**		71414	10,084	13,9	14,1	14,2	71414	10,084	13,9				
5	Manajemen aset		**IKK**		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
6	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		**IKK**		11,791	1,06	21,15%	22,15	22,15	11,791	1,06	22,87				
7	Rasio PAD Terhaadap Pendapatan Daerah		**IKK**		15,92	20,26	18%	18,5%	19%	15,92	20,26	18,22				
8	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures (%)		**IKK**		11791	1,08	7,77	10	10	11791	1,08	7,77				

Adapun hasil analisis dari pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelola keuangan Daerah Tahun Tahun 2024 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu dengan hasil penilaian dengan penghargaan tertinggi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Penghargaan WTP berhasil di raih Pemerintah Kota Padang Panjang dalam 7 Tahun ber turut turut, dengan demikian artinya seluruh indikator yang menjadi penilaian atas Prestasi tersebut terlaksana dengan baik sesuai ketentuan dan aturan Perundang – undangan yang berlaku
2. Indikator Kinerja terkait Indeks Pengelola Keuangan Daerah Penilaiannya di keluarkan oleh Kemendagri pada akhir Tahun 2024 hal ini menjadi pekerjaan yang serius bagi kita bersama karena tahun lalu kita hanya memperoleh skor sebesar 63,2 sementara untuk tahun 2025 ini kita menargetkan Skor Penilaian sebesar 71,5
3. Beberapa indikator Kinerja yang ada pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Juga Indikator Kinerja Kunci ada beberapa point yang tidak mencapai target yaitu
   a. Nilai Indeks Pengelola Keuangan Daerah kita masih di bawah target yang ditetapkan hal ini disebabkan oleh yang menjadi kendala pada Tahun 2024 adalah dimana dari 6 dimensi yang menjadi penilaian terhadap Skor Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ada 3 dimensi yang nilai kita dibawah standar yang ditetapkan, salah satunya yaitu dimensi 1 (Dimensi kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran) dimana point yang jadi penilaianya adalah Nomenklatur dengan penganggaran dimana yang menjadi point penilaiannya kesesuaian nomenklatur dan penganggaran dari RPJMD sampai menjadi APBD, pada Tahun 2024 untuk Tujuan Sasaran, program hingga Sub kegiatannya sesuai tetapi untuk Penganggarannya hampir seluruh nya berbeda per tahapan mulai dari RPJMD, renstra, RKPD, KUA hingga menjadi APBD
   b. Pada Indikator Kinerja Kunci yaitu Rasio PAD tidak mencapai target yang ditetapkan hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu bencana tanah longsor yang terjadi pada Tahun 2024 sehingga menyebabkan kunjungan tamu yang datang ke Padang Panjang menurun drastis sehingga berdampak langsung terhadap Pajak Restaurant, Hotel dan Pajak Hiburan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, dalam upaya pencapaian visi dan misi BPKD maupun Visi dan Misi pembangunan daerah

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu BPKD sebagai instasi pengelola keuangan daerah perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya Controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen external yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, sebagai berikut :

Dalam Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah satu (satu) tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, maka harus di perhatikan faktor internal seperti kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman guna menentukan langkah-langkah kedepan.

Tabel. 2.3

KELEMAHAN, KEKUATAN, PELUANG DAN ANCAMAN

KELEMAHAN	KEKUATAN
(1) Kurangnya peremajaan SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.	(1) Tersedianya Perda, Perwal dan Keputuan Gubernur tentang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah

(2) Reward dan Punishment belum disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan ukuran kinerja. (3) Jarang mengikuti diklat fungsional perpajakan, pengelolan keuangan dan Aset Daerah (4) Sarana dan prasarana belum sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.	(2) Pengalaman empirik dari Sumberdaya Manusia dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. (3) Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah. (4) Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan Walikota Sikap tenggang rasa dari sesama aparat cukup tinggi.
Peluang	**Ancaman**
(1) Laju pertumbuhan Ekonomi selama beberapa tahun lalu menunjukan angka positif dan progresif. **(2)** Potensi Wajib Pajak dan Retribusi mengalami tren kenaikan yang positif. **(3)** Pusat Kegiatan Wilayah menjadi daya magnet terhadap hak dan kewajiban daerah	**(1)** Fluktuasi ekonomi makro semakin tidak jelas yang berdampak pada ekonomi mikro **(2)** Ketidaksabaran masyarakat dalam menghadapi globalisasi **(3)** Kebebasan dalam mengakses informasi keuangan melalui dunia maya. **(4)** Perubahan aturan yang cepat mendorong penatausahan keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada (5) Pekerjaan bertumpuk dalam waktu bersamaan

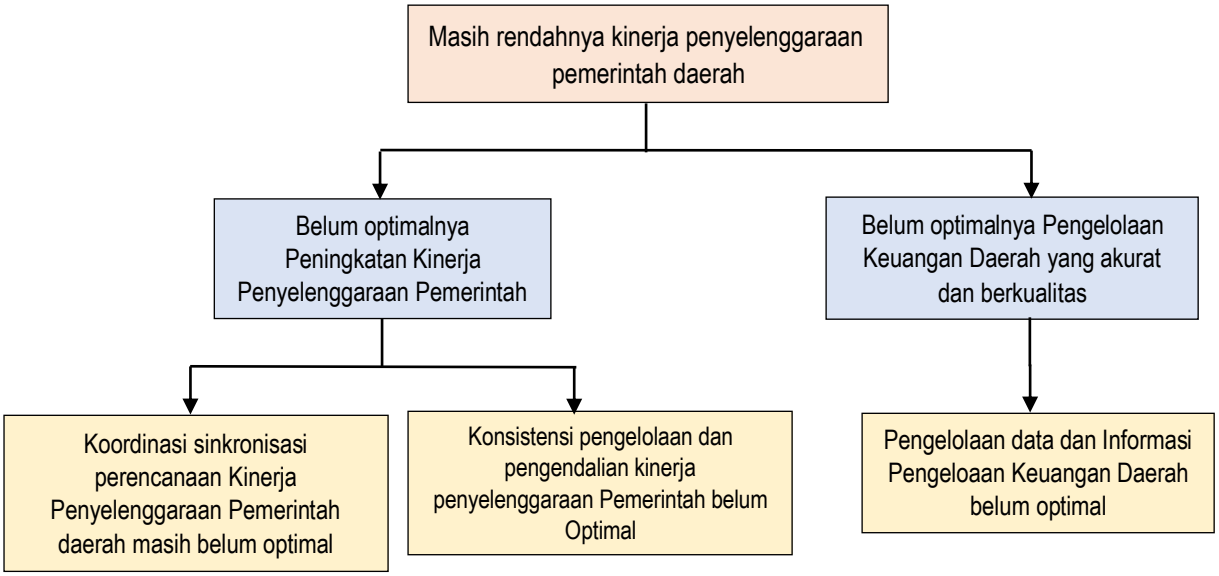
Jika kita lihat pada akar permasalahan sehingga belum terlaksananya tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kota Padang Panjang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket.
1.	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang keuangan daerah belum optimall	Laporan-Laporan yang berkaitan dengan bobot penilaian Kinerja Pemerintah Daerah	Koordinasi antar OPD terkait 6 dimensi yang menjadi point dalam Penilaian Indeks Pengelola Keuangan Daerah yang belum berjalan dengan baik	
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akurat dan berkualitas	Perubahan Aturan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus sesuai dengan Peraturan maupun ketentuan Perundang – undangan yang berlaku	Mensosialisasikan kepada seluruh OPD terkait dengan perubahan-perubahan aturan terkait laporan Keuangan	
			Batasan waktu penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang

Gambar 2.1
POHON MASALAH
BPKD KOTA PADANG PANJANG



Berdasarkan analisis dan Penjabaran akar permasalahan di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD 3 (tiga) tahun ke depan khususnya yang menjadi perhatian pada Perubahan Renja 2025 ini adalah :

1. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang keuangan daerah

   Didalam Pelaksanaan Peningkatan Peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah dengan meningkatkan kinerja di bidang Pemerintah Daerah baik itu berupa Laporan-laporan yang berkaitan dengan bobot penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah , Peningkatan Pendapatan asli Daerah dan juga dalam hal penganggaran

2. Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan PAD

   Di dalam Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan PAD yang menjadi permasalahan yang harus ditindak lanjuti adalah objek/ Wajib Pajak yang tidak mau membayar Pajak atau menyetorkan Pajak sesuai dengan nominal seutuhnya, karena jika hal ini tidak di tindak lanjuti secara serius akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Jika Kita lihat pada Isu strategis pembangunan Kota Padang Panjang untuk penentuan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana yang dilampirkan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2029

No	Isu Utama	Isu Strategis
1	Isu Pembangunan Manusia	a. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat c. kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami perempuan dalam merasakan manfaat pembangunan d. Peningkatan daya saing kepemudaan dan prestasi keolahragaan
2	Isu Tata Kelola Pemerintahan	a. implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi

3	Isu Pembangunan Ekonomi	a. Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan daerah b. Masih rendahnya nilai Investasi c. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran d. rendahnya pendapatan masyarakat
4	Isu Tatanan Kehidupan Masyarakat	a. Mulai lunturnya nilai-nilai Adat dan Budaya di tengah masyarakat b. Masih terbatas pemahaman masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai keagamaan c. Belum optimalnya layanan ketentraman dan ketertiban umum d. penyelenggaran layanan kesejahteraan sosial
5	Isu kualitas infrastrukturdan lingkungan hidup	a. layanan infrastruktur dasar b. kesesuaian pemanfaatan ruang c. kualitas air, udara, tutupan lahan

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal Perubahan RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan Perubahan RKPD, maka ada beberapa program dan kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah dijadikan program dan kegiatan prioritas kedua. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025
Dengan Renja Perubahan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD 2025 (Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan (sesuikan dengan PI)					SELISH	Catatan
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Pelaksanaan	Target capaian	Kebutuhan Dana		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	***13=11-6***	*12*
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				**11.487.167.033**					**12.055.271.358**	568.104.325	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**11.487.167.033**					**12.055.271.358**	568.104.325	
	Keuangan				**11.487.167.033**					**12.055.271.358**	568.104.325	

X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah**	**100,00%**	**8.523.642.833**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah**	**100,00%**	**8.129.301.859**	**2.471.159.196**		
X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**6.790.845.581**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**		**100 Persen**	**6.911.924.813**	**121.079.232**		
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630 Orang/bulan	6.790.845.581	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	630 Orang/bulan	6.911.924.813	121.079.232		

X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**509.008.552**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**		**91 Persen**	**259.937.846**	**-249.070.706**	
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	15.488.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	7 Paket	8.813.400	-6.674.600	
X.XX.01.2.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	145.156.552	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	45 Paket	73.835.746	-71.320.806	

							yang Disediakan						
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	23.728.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	Kota Padang Panjang	2 Paket	15.653.700	-8.074.300		
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462 Laporan	324.636.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	256 Laporan	161.635.000	-163.001.000		

X.XX.01.2.06.0005	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100%**	**152.713.100**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**		**100 Persen**	**100.000.000**	**-52.713.100**		
X.XX.01.2.06.0009	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	62.713.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang	7 Unit	10.000.000	-52.713.000		
X.XX.01.2.06.0009	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah unit kendaraan dinas yang disediakan	1 Unit	90.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang disediakan	Kota Padang Panjang	1 Unit	90.000.000	0		

X.XX.01.2.07	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**692.445.400**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		**100 Persen**	**645.494.000**	-46.951.400	
X.XX.01.2.07.0002	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	4.379.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	3 Laporan	3.603.700	-775.300	
X.XX.01.2.07.0005	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	163.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	60 Laporan	133.989.500	-29.010.500	

							yang Disediakan						
X.XX.01.2.07.0006	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	525.066.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	2 Laporan	507.900.800	-17.165.600		
X.XX.01.2.08	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik**	**100%**	**378.630.200**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik**		**90 Persen**	**211.945.200**	-166.685.000		

X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	242.629.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Padang Panjang	23 Unit	136.540.000	242.629.000		
X.XX.01.2.08.0002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	43.490.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang	56 Unit	40.770.000	-2.720.000		
X.XX.01.2.08.0004	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	92.511.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	1 Unit	34.635.200	-57.876.000		

			Dipelihara/Direhabilitasi				yang Dipelihara/ Direhabilitasi						
X.XX.01.2.09	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Kota Padang Panjang**	**Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu**	**Tepat Waktu**	**1.891.608.300**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu**		**Tepat Waktu**	**2.829.473.500**	**937.865.200,00**		
			Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan keuangan	**Tepat Waktu**			**Ketepatan Waktu Penyampaian laporan Keuangan**		**Tepat Waktu**				
X.XX.01.2.09	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Kota Padang Panjang	**Penyusunan APBD/ APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/ waktu**	**Tepat Waktu**	**716.323.500**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara**		**Tepat Waktu**	**684.284.600**	**-32.038.900**		

			maupun ketentuan lainnya				**tanggal/ waktu maupun ketentuan lainnya**						
X.XX.01.2.09 .0011	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	118.290.400	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Padang Panjang	2 Dokumen	115.739.400	-2.551.000		
5.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	119.863.400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Padang Panjang	2 Dokumen	116.192.400	-3.671.000		

5.01.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Padang Panjang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 dokumen	349.154.500	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Padang Panjang	6 Dokumen	333.618.400	-15.536.100		
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Padang Panjang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	129.015.200	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Kota Padang Panjang	4 Dokumen	118.734.400	-10.280.800		

							Perubahan APBD						
5.01.02.2.01.0005	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK**	**88%**	**61.830.000**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK**	**88%**	**11.872.000**	**-49.958.000**		
5.01.02.2.01.0002	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6 Dokumen	61.830.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6 Dokumen	11.872.000	-49.958.000		

5.01.02.2.02.0001	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah**	**Tepat Waktu**	**113.454.800**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah**	**Tepat Waktu**	**33.316.900**	**-80.137.900**		
5.01.02.2.03	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	6.553.400	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8 Laporan	3.196.000	-3.357.400		

5.01.02.2.03.0003	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	93.104.400	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	24.157.900	- 68.946.500		

5.01.02.2.04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	13.797.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	2 Dokumen	5.963.000	-7.834.000		

5.01.03	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan**	**100,00%**	**1.000.000.000**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan**	**100,00%**	**2.100.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	
5.01.03.2.01.0007	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1.500.000.000,00	500.000.000,00	
5.01.03.2.01.0009	Analisis Perencanaan dan	Kota Padang Panjang	Jumlah laporan hasil analisis	1 Laporan	0	Analisis Perencanaan dan Penyaluran	Kota Padang Panjang	Jumlah laporan hasil analisis	1 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	

	Penyaluran Bantuan Keuangan		Perencanaan dan Penyaluran bantuan keuangan			Bantuan Keuangan		Perencanaan dan Penyaluran bantuan keuangan					
5.01.03.2.01.0008	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Kota Padang Panjang**	**Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan Tepat waktu**	**Tepat Waktu**	**471.337.800**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu**		**Tepat Waktu -**	**317.781.100**	**-153.556.700**		
5.01.03.2.02	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu**	**100%**	**471.337.800**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu**		**100 Persen**	**317.781.100**	-153.556.700		

5.01.03.2.02.0008	Penyusunan Standar Harga	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	27.803.000	Penyusunan Standar Harga	Kota Padang Panjang	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	6.531.800	- 21.271.200		
5.01.03.2.02.0009	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	16.635.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	6.578.000	- 10.057.000		
5.01.03.2.03.00010	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	112.107.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	41.504.200	- 70.602.800		
5.01.03.2.03.00011	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 laporan	93.670.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	43.100.000	- 50.570.000		

5.01.03.2.03.00012	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	203.843.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	213.571.200	9.728.200	
5.01.03.2.03.00013	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	17.279.800	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan	2 Laporan	6.495.900	- 10.783.900	

								Barang Milik Daerah					
5.05.02.2.01	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah**	**2%**	**600.578.100**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah**		**2 Persen**	**778.714.899**	**178.136.799**		
5.05.02.2.01.0002	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah**	**9,9 Milyar**	**600.578.100**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah**		**9,9 Milyar**	**778.714.899**	**178.136.799**		
5.05.02.2.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan	9 dokumen	168.639.300	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan	9 Dokumen	341.607.999	172.968.699		

			Kebijakan Pajak Daerah					Pajak Daerah					
5.05.02.2.02 .0003	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	240.970.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	266.495.000	25.525.000		
5.05.02.2.03	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Padang Panjang	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	400 Obyek pajak	89.261.900	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah	Kota Padang Panjang	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	400 Obyek Pajak	75.931.900	- 13.330.000		

						dan Bangunan (BPHTB)							
5.05.02.2.03 .0002	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	72 Dokumen	101.706.900	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	72 Dokumen	94.680.000	-7.026.900		

No	Rancangan Perubahan RKPD 2025 (Renstra 2025-2029)					Hasil Analisis Kebutuhan (sesuikan dengan PI)					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi Pelaksanaan	Target capaian	Kebutuhan Dana		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	***13=11-6***	*12*
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				**12.055.271.358**					**12.055.271.358**		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**12.055.271.358**					**12.055.271.358**		
	Keuangan				**12.055.271.358**					**12.055.271.358**		
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah**	**100,00 %**	**8.129.301.859**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah**	**100,00%**	**8.129.301.859**		
X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**6.911.924.813**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**		**100 Persen**	**6.911.924.813**		

X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630 Orang/ bulan	6.911.924.813	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	630 Orang/bulan	6.911.924.813		
X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**259.937.846**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**		**91 Persen**	**259.937.846**		
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	8.813.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	7 Paket	8.813.400		
X.XX.01.2.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	73.835.746	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	45 Paket	73.835.746		
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.653.700	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	2 Paket	15.653.700		
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462 Laporan	161.635.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	256 Laporan	161.635.000	-	

X.XX.01.2.06.0005	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100%**	**100.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**		**100 Persen**	**100.000.000**		
X.XX.01.2.06.0009	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang	7 Unit	10.000.000		
X.XX.01.2.06.0009	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah unit kendaraan dinas yang disediakan	1 Unit	90.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang disediakan	Kota Padang Panjang	1 Unit	90.000.000		
X.XX.01.2.07	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**645.494.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		**100 Persen**	**645.494.000**		
X.XX.01.2.07.0002	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3.603.700	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	3 Laporan	3.603.700		

X.XX.01.2.07.0005	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	133.989.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang	60 Laporan	133.989.500	-	
X.XX.01.2.07.0006	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	507.900.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	2 Laporan	507.900.800		
X.XX.01.2.08	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik**	**100%**	**211.945.200**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik**		**90 Persen**	**211.945.200**		
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	136.540.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Padang Panjang	23 Unit	136.540.000		

X.XX.01.2.08.0002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	40.770.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang	56 Unit	40.770.000	
X.XX.01.2.08.0004	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	34.635.200	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang	1 Unit	34.635.200	
X.XX.01.2.09	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Kota Padang Panjang**	**Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu**	**Tepat Waktu**	**2.829.473.500**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu**		**Tepat Waktu**	**2.829.473.500**	
			Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	**Tepat Waktu**			**Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu**		**Tepat Waktu**	**2.829.473.500**	
			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	**47%**			**Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD**		**47%**		
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	**30%**			**Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik**		**30%**		

			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	**20%**			**Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar**		**20%**			
			Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	**100%**			**Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu**		**100%**			
X.XX. 01.2.09	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Kota Padang Panjang	**Penyusunan APBD/ APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/ waktu maupun ketentuan lainnya**	**Tepat Waktu**	**684.284.600**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/ waktu maupun ketentuan lainnya**		**Tepat Waktu**	**684.284.600**		
X.XX. 01.2.09.0011	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	115.739.400	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Padang Panjang	2 Dokumen	115.739.400		
5.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	116.192.400	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Padang Panjang	2 Dokumen	116.192.400		

5.01.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Padang Panjang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 dokumen	333.618.400	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Padang Panjang	6 Dokumen	333.618.400		
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Padang Panjang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	118.734.400	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Padang Panjang	4 Dokumen	118.734.400		
5.01.02.2.01.0005	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK**	**88%**	**11.872.000**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK**	**88%**	**11.872.000**		

5.01.02.2.01.0002	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6 Dokumen	11.872.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6 Dokumen	11.872.000		
5.01.02.2.02.0001	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah**	**Tepat Waktu**	**33.316.900**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah**	**Tepat Waktu**	**33.316.900**		
5.01.02.2.03	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	3.196.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8 Laporan	3.196.000		

5.01.02.2.03.0003	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	24.157.900	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	24.157.900		
5.01.02.2.04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	5.963.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	5.963.000		
5.01.03	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan**	**100,00 %**	**2.100.000.000,00**	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan**	**100,00%**	**2.100.000.000,00**		

5.01.03.2.01.0007	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1.500.000.000,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	1.500.000.000,00		
5.01.03.2.01.0009	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Padang Panjang	Jumlah laporan hasil analisis Perencanaan dan Penyaluran bantuan keuangan	1 Laporan	600.000.000,00	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Padang Panjang	Jumlah laporan hasil analisis Perencanaan dan Penyaluran bantuan keuangan	1 Laporan	600.000.000,00		
5.01.03.2.01.0008	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Kota Padang Panjang**	**Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan Tepat waktu**	**Tepat Waktu**	**317.781.100**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu**		**Tepat Waktu -**	**317.781.100**		
			Persentase Penambahan nilai aset tetap	**10%**			**Persentase Penambahan nilai aset tetap**		**10%**			

5.01.03.2.02	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu**	**100%**	**317.781.100**	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu**		**100 Persen**	**317.781.100**		
5.01.03.2.02.0008	Penyusunan Standar Harga	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	6.531.800	Penyusunan Standar Harga	Kota Padang Panjang	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	6.531.800		
5.01.03.2.02.0009	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	6.578.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	6.578.000		
5.01.03.2.03.00010	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	41.504.200	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	41.504.200		
5.01.03.2.03.00011	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	3 laporan	43.100.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	43.100.000		

5.01.03.2.03.00012	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	213.571.200	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	213.571.200		
5.01.03.2.03.00013	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	6.495.900	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	6.495.900		
5.05.02.2.01	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah**	**2%**	**778.714.899**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah**		**2 Persen**	**778.714.899**		
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	**16,28%**			**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**		**16,28%**			

			Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	**14 OPD**			**Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan**		**14 OPD**			
			Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	**100%**			**Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital**		**100%**			
5.05.02.2.01.0002	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah**	**9,9 Milyar**	**778.714.899**	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah**		**9,9 Milyar**	**778.714.899**		
5.05.02.2.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	9 Dokumen	341.607.999	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	9 Dokumen	341.607.999		

5.05.02.2.02.0003	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	266.495.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	266.495.000		
5.05.02.2.03	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Padang Panjang	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	400 Obyek pajak	75.931.900	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Padang Panjang	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	400 Obyek Pajak	75.931.900		
5.05.02.2.03.0002	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	72 Dokumen	94.680.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	72 Dokumen	94.680.000		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak ada Usulan terhadap Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2025 ini kita kita **Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045"** Tema ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memulai transformasi besar sebagai fondasi menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia RPJMN 2025–2029 merupakan tahap awal pelaksanaan RPJPN 2025–2045. Terdapat **8 prioritas nasional** yang menjadi arah utama pembangunan:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM
2. Memantapkan pertahanan dan kemandirian bangsa (termasuk swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru)
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur & penciptaan lapangan kerja
4. Penguatan SDM dan sains-teknologi (termasuk pendidikan, kesehatan, gender, pemuda, dan disabilitas)
5. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam
6. Pembangunan dari desa dan bawah (untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan)
7. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi (termasuk pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan)
8. Harmoni sosial dan lingkungan hidup (termasuk toleransi antarumat beragama dan pelestarian budaya)

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta Major Project dalam RKP Tahun 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Keuangan maka kebijakan dan langkah strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Pada Rencana Kerja Perubahan 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan daerah;
2. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD;
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah

Dalam rangka pencapaian target kerja untuk lima tahun ke depan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang perlu menetapkan tujuan sebagai langkah awal pelaksanaan tugas.

TUJUAN

Yang Menjadi tujuan kedepan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah ***"Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset daerah dan Pendapatan asli daerah "***

Untuk mendukung Tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah ada beberapa indikator agar Tujuan yang diemban Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025 – 2029 dapat tercapai yaitu :

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Indeks Pengelolaan Aset Daerah
4. Nilai Pendapatan Asli daerah

SASARAN

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut,maka sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah 5 tahun kedepan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator nya Opini BPK
2. Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah dengan Indikator Persentase Peningkatan Pengelolaan Aset OPD
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator persentase masyarakat Dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak daerah dan retribusi daerah
4. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP Badan Pengelola Keuangan Daerah

3.3 Program Dan Kegiatan Renja Badan Pengelola Keuangan daerah

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Pada Perubahan Renja Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.
2. Penetapan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029
3. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun kelima, serta Renja BPKD sampai dengan Tahun 2023.
4. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Bappeda.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Masih terdiri dari 4 Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pelayan Administrasi Perkantoran dan 12 Kegiatan namun sebelum Perubahan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Memiliki 32 Sub kegiatan guna mendukung seluruh sasaran Maupun Tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2025 – 2029 Pada Tahun 2025 sub kegiatan Penyusunan Petunjuk teknis administrasi keuangan tidak dilaksanakan karena Sub Kegiatan telah selesai 100% namun pada Tahun 2025 ini ada satu sub kegiatan yang muncul yaitu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/ Jabatan . Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat rincian Program, kegiatan maupun sub kegiatan serta Target perubahan yang akan di capai pada Perubahan Tahun 2025 pada Tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Renstra 2025	P-Renja 2025
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset daerah dan Pendapatan asli daerah				
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK		
		Meningkatnya Pengelolaan Aset daerah	Persentase Pengelolaan aset OPD		
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	persentase masyarakat Dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak daerah dan retribusi daerah		

		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Akip Badan Pengelola Keuangan Daerah		

Berdasarkan Tabel TC.31 diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya hampir seluruh Sub Kegiatan yang ada pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang yang mengalami Penurunan anggaran hal ini disebabkan oleh Refocusing yang dilakukan atas Inpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Efisiensi anggaran bahkan jika kita lihat secara total pagu Pengurangan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah lebih dari 1 Milyar tetapi hal ini tidak mempengaruhi terhadap pencapaian Tujuan maupun sasaran yang telah ditargetkan pada awal Tahun 2025

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada Perubahan 2025 yang telah dirumuskan. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 serta Review Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kota Padang Panjang pada Perubahan Tahun 2025 Secara umum Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota padang Panjang bertugas menkoordinasikan pencapaian 2 (dua) indikator tujuan yaitu : “Indeks Pengelola Keuangan Daerah dan Opini BPK ;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian daerah, serta infrastruktur pengembangan wilayah dalam kerangka pembangunan daerah Kota Padang Panjang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan

program /kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

8. Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada table 3.2 berikut :

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH							**15.118.573.922**	**11.865.797.233**	**12.055.271.358**					
	5.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**15.118.573.922**	**11.865.797.233**	**12.055.271.358**					
	5.02.	**KEUANGAN**							**15.118.573.922**	**11.865.797.233**	**12.055.271.358**					
132	**5.02.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah**	**100 %**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**8.778.653.922**	**8.902.273.033**	**8.129.301.859**					
	5.02.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**6.384.166.322**	**6.790.845.581**	**6.911.924.813**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**

	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3780 Orang/bulan		630 Orang/bulan	644 Orang/bulan	630 Orang/bulan	6.384.166.322	6.790.845.581	6.911.924.813	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**		**100 %**	**91 %**	**100 %**	**446.824.400**	**509.008.552**	**259.937.846**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	42 Paket		7 Paket	7 Paket	7 Paket	15.494.500	15.488.000	8.813.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 Paket		9 Paket	9 Paket	9 Paket	116.752.400	145.156.552	73.835.746	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket		8 Paket	8 Paket	8 Paket	14.577.500	23.728.000	15.653.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten	

															Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2360 Laporan		462 Laporan	462 Laporan	256 Laporan	300.000.000	324.636.000	161.635.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**415.760.000**	**152.713.100**	**100.000.000**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit		0 Unit	1 Unit	1 Unit	352.180.000	90.000.000	90.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	52 Unit		12 Unit	6 Unit	4 Unit	63.580.000	62.713.100	10.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	

	5.02.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**935.400.000**	**692.445.400**	**645.494.000**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4.400.000	4.379.000	3.603.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	360 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	163.000.000	163.000.000	133.989.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	768.000.000	525.066.400	507.900.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik**	**100 %**		**100 %**	**90 %**	**100 %**	**298.251.600**	**378.630.200**	**211.945.200**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten**	**-**

															Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit		23 Unit	34 Unit	23 Unit	205.691.600	242.629.000	136.540.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	336 Unit		56 Unit	56 Unit	56 Unit	43.580.000	43.490.000	40.770.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	48.980.000	92.511.200	34.635.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
133	**5.02.02.**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD**	***30%***		***47,3%***		***47%***	**4.972.908.750**	**1.891.608.300**	**2.829.473.500**					
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	***40%***		***28%***		***30%***								

			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	***20%***		***20%***		***20%***									
			Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	***100%***		***100%***		***100%***									
	5.02.02.2.01.	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/waktu maupun ketentuan lainnya**	**Tepat Waktu**		**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**716.483.800**	**716.323.500**	**684.284.600**			**Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang**	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	118.339.400	118.290.400	115.739.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	119.912.400	119.863.400	116.192.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	36 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	349.176.000	349.154.500	333.618.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal,		

															Adaptif dan Kolaboratif		
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	24 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	129.056.000	129.015.200	118.734.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.02.2.02.	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK**	**82 %**		**82 %**	**84 %**	**83 %**	**61.948.000**	**61.830.000**	**11.872.000**			**-**	**-**	**seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang**
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	36 Dokumen		2 Dokumen	9 Dokumen	6 Dokumen	61.948.000	61.830.000	11.872.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	
	5.02.02.2.03.	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dan SAP**	**Tepat Waktu**		**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**Tepat Waktu**	**113.457.300**	**113.454.800**	**33.316.900**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**null**
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	48 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	6.556.200	6.553.400	3.196.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	

	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	42 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	93.104.100	93.104.400	24.157.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	13.797.000	13.797.000	5.963.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.02.2.04.	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.081.019.650**	**1.000.000.000**	**2.100.000.000**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5 Laporan		0 Laporan	-	1 Laporan	-	-	600.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Laporan	0 Dokumen	4.081.019.650	1.000.000.000	1.500.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten	

															Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
134	**5.02.03.**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap**	**10 %**		**4% %**		**10 %**	**810.170.000**	**471.337.800**	**317.781.100**					
	5.02.03.2.01.	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**810.170.000**	**471.337.800**	**317.781.100**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**null**
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	114.626.000	27.803.000	6.531.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	12 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	16.635.000	16.635.000	6.578.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	

	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	151.849.000	112.107.000	41.504.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	18 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	290.930.000	93.670.000	43.100.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	24 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	218.850.000	203.843.000	213.571.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	17.280.000	17.279.800	6.495.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		
135	**5.02.04.**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**31,81 %**		**16.18 %**	**2 %**	**16,28 %**	**556.841.250**	**600.578.100**	**778.714.899**						
			Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	**14 OPD**		**14 OPD**		**14 OPD**									

			Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	**100 %**		**100 %**		**100 %**								
	5.02.04.2.01.	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Jumlah Pencapaian Pendapatan Asli Daerah**	**947,3 Rupiah**		**9,6 Rupiah**	**10,1 Milyar**	**112,7 Rupiah**	**556.841.250**	**600.578.100**	**778.714.899**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	54 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	168.646.500	168.639.300	341.607.999	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	241.000.000	240.970.000	266.495.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10338 Obyek Pajak		14000 Obyek Pajak	400 Obyek Pajak	400 Obyek Pajak	97.194.750	89.261.900	75.931.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	

	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	432 Dokumen		72 Dokumen	72 Dokumen	72 Dokumen	50.000.000	101.706.900	94.680.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	

BAB IV

PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen pengelolaan keuangan ditingkat OPD, Badan Pengelola Keuangan Daerah telah menyusun dan menetapkan Rentra Badan Pengelola Keuangan Daerah (Renstra BPKD) Tahun 2025 - 2029 yang memuat Tujuan, sasaran, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi BPKD. Kemudian terkait dengan perencanaan tahunan daerah maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing masing.

Sehubungan dengan ini maka BPKD juga menyusun dan menetapkan Rancangan akhir Perubahan Renja BPKD tahun 2025. Rancangan Perubahan Renja BPKD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan I, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja BPKD ini sangat tergantung pada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf BPKD. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur BPKD, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja BPKD juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur BPKD dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang

SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-19 09:33:54

Baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada Tahun berjalan di 2025, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Perubahan Renja BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja BPKD dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Padang Panjang, 30 Juni 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



Dr. WINARNO, SE, ME

NIP. 19740206 199903 1 003

PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG (RENJA) TAHUN 2025

(BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH)

DAFTAR ISI

Bab I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

Bab II. HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DEARAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 8

2.1 Evaluasi Rencana Kerja BPKD Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPKD 16

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKD 18

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD 23

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 38

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN BPKD 60

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 60

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKD 61

3.3 Program dan Kegiatan Renja BPKD 61

Bab IV. PENUTUP 87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 9

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKD 17

Tabel 2.3 Kelemahan, Kekuatan, Peluang dan Ancaman 19

Tabel 2.4 Pemetaan Permasalahan 21

Tabel 2.5 Isu-isu Strategis Pembanguna Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 … 22

Tabel 2.6 Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Renja Perubahan BPKD Tahun 2025 24

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 63

Tabel 3.2 Perubahan Rencana Kerja BPKD Tahun 2024 67

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA - P) 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI……..

BAB I : PENDAHULUAN…… 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum …..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ……..... 4
1.4 Sistematika ……..... 4

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PD PADA TRIWULAN I..…… 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 pada Triwulan I.. 6
2.2 Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 15
2.3 Isu-isu Penting peyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia . 18
2.4 Review tehadap Rancangan awal RKPD Perubahan PD Tahun 2025 …… 19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…… 26

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 27

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi PD..... 27
3.2 Tujuan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM..... 28
3.3 Program dan Kegiatan……..... 30

BAB IV : PENUTUP ……..... 45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 atau disingkat Renja PD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan renja tahun berjalan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan disertai indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra PD. Penyusunan rancangan Perubahan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja PD yang definitif.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanan pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD.

Proses penyusunan Perubahan Renja PD dibagi atas dua tahap, yaitu tahap perumusan rancangan dan tahap penyajian. Proses penyusunan rancangan Perubahan Renja PD mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), hasil pengkajian terhadap kondisi eksisting Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Melalui proses penyusunan secara terintegrasi ini diharapkan akan mampu mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, dan semakin terarahnya penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah di bidang keuangan negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah, serta pelayanan masyarakat, disusunlah rancangan KUA dan rancangan PPAS. Rancangan KUA dan rancangan PPAS ini dijadikan dasar untuk penyusunan RKA Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang (UU) Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6):
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 9):

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebagai acuan atau pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran dan indikator kinerja sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan daerah tahun 2024-2026, serta penyelenggaraan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 34 Tahun 2024.

Dengan disusunnya Perubahan Renja BKPSDM tahun 2025 diharapkan BKPSDM Kota Padang Panjang akan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD PADA TRIWULAN I
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 pada Triwulan I
- 2.2 Analisis kinerja Pelayanan BKPSDM
- 2.3 Isu-isu Penting peyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM
- 2.4 Review tehadap Rancangan awal RKPD Perubahan PD Tahun 2025
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.1 Telahan terhadap kebijakan Nasional/Provinsi PD

3.2 Tujuan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PD PADA TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 pada Triwulan I

Pada tahun 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Padang Panjang mendapatkan alokasi dana belanja langsung sebesar Rp. **9.835.957.664 -** yang tersebar ke dalam 3 program dengan 10 kegiatan dan 22 sub kegiatan, dengan tingkat capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan I adalah sebesar Rp. **1.603.117.291,-** atau **16,30%**.

Untuk lebih jelasnya capaian realisasi keuangan dari masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PADANG PANJANG
PERIODE PELAKSANAAN: JANUARI S/D JUNI 2025

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD TW Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		12		8		9		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
	Optimalisasi penerapan sistem merit dan profesionalisme ASN		**Indeks Profesionalitas ASN**					76,70		-										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	**100 %**	**20.825.818.391**	**100 %**	**7.633.432.608**	**100 %**	**7.130.609.639**	**25%**	**1.290.012.142**	**25%**	**2.767.535.358**	**50%**	**4.057.547.500**	**50%**	**11.690.980.108**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat**	**100 %**	**17.969.098.391**	**100 %**	**6.709.190.504**	**100 %**	**6.260.172.564**	**25%**	**1.154.519.284**	**25%**	**2.455.235.105**	**50%**	**3.609.754.389**	**50%**	**10.318.944.893**		**57,43%**	**Sekretariat**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	1540	17.969.098.391	576	6.709.190.504	1540	6.260.172.564	144	1.154.519.284	144	2.455.235.105	288	3.609.754.389	864	10.318.944.893	56,10%	57,43%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**	-	-	**100%**	**17.500.000**	**100%**	-	-	-	-	-		-		**17.500.000**			
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	38	17.500.000	40		0	-	-	-	-	-	38	17.500.000			

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD TW Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		12		8		9		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**90 %**	**360.000.000**	**90 %**	**307.207.835**	**90 %**	**194.440.140**	**22,5%**	**31.947.880**	**22,5%**	**107.413.695**	**45,0 %**	**139.361.575**	**1**	**446.569.410**		**124,05%**	**Sekretariat**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	10.000.000	4	6.185.100	4	4.387.700	1	-	1	1.330.000	2	1.330.000	6	7.515.100	150,00%	75,15%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	70.000.000	4	58.281.500	4	38.833.640	1	-	1	12.445.300	2	12.445.300	6	70.726.800	150,00%	101,04%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	30.000.000	12	17.668.250	12	21.747.800	3	1.334.000	3	6.598.750	6	7.932.750	18	25.601.000	150,00%	85,34%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	250.000.000	24	225.072.985	24	129.471.000	6	30.613.880	6	87.039.645	12	117.653.525	36	342.726.510	150,00%	137,09%	Sekretariat

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD TW Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		12		8		9		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan**	**100 %**	**2.100.000.000**	**100 %**	**163.040.000**	**100 %**	**130.813.600**	**25%**	-	**25%**	-	**50%**	-	**2**	**163.040.000**		**7,76%**	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10	80.000.000	-	-	10	27.000.000	0	-	0	-	**0%**		-				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	20.000.000	12	163.040.000	5	103.813.600	0	-	0	-	-	-	12	163.040.000	240,00%	815,20%	
		Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	2.000.000.000						-		-							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang**	**90%**	**226.720.000**	**90%**	**225.822.714**	**90%**	**270.856.335**	**22,5%**	**62.504.078**	**22,5%**	**105.134.686**	**45,0 %**	**167.638.764**		**393.461.478**		**173,55%**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	6.000.000	12	2.000.000	12	2.615.800	3	1.250.000	3	1.250.000	6	2.500.000	18	4.500.000	150,00%	75,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	90.000.000	24	85.809.312	24	89.998.935	6	21.454.078	6	42.908.656	12	64.362.734	36	150.172.046	150,00%	166,86%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD TW Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		12		8		9		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	130.720.000	12	138.013.402	12	178.241.600	3	39.800.000	3	60.976.030	6	100.776.030	18	238.789.432	150,00%	182,67%	Sekretariat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**90 %**	**170.000.000**	**90 %**	**210.671.555**	**90 %**	**274.327.000**	**22,5%**	**41.040.900**	**22,5%**	**99.751.872**	**45,0 %**	**140.792.772**	**1**	**351.464.327**		**206,74%**	**Sekretariat**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	100.000.000	17	89.644.850	17	109.485.000	17	26.110.900	17	47.257.400	17	73.368.300	34	163.013.150	200,00%	163,01%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26	40.000.000	26	25.261.250	26	39.990.000	26	6.760.000	26	9.925.000	26	16.685.000	52	41.946.250	200,00%	104,87%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	30.000.000	1	95.765.455	1	124.852.000	1	8.170.000	1	42.569.472	1	50.739.472	2	146.504.927	200,00%	488,35%	Sekretariat

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD TW Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		12		8		9		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Sistem Merit	340 Nilai	745.000.000		567.475.312	335 Nilai	603.232.600		31.838.383		63.916.186	-	95.754.569	-	663.229.881		89,02%	PMK
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik	1200 file	325.000.000	400	219.404.358	400 file	254.038.100	100	6.278.333	100	27.379.886	200	33.658.219	600	253.062.577		77,87%	DKIK
			Jumlah usulan ASN Per tahun	600	-	200		200	-					-						
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	300.000.000	1	212.884.933	1	244.747.000	0,25	5.978.333	0,25	25.687.086	0,50	31.665.419	2	244.550.352	150,00%	81,52%	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	25.000.000	1	6.519.425	1	9.291.100	0,25	300.000	0,25	1.692.800	0,50	1.992.800	2	8.512.225	150,00%	34,05%	PMK
		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan	100 %	350.000.000	100 %	293.671.222	100 %	317.663.000	25 %	25.398.140	25 %	35.465.390	50%	60.863.530	2	354.534.752		101,30%	

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD TW Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		12		8		9		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	300.000.000	1	262.670.782	1	265.881.000	0,25	25.398.140	0,25	25.398.140	0,50	50.796.280	2	313.467.062	150,00%	104,49%	
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1	50.000.000	1	31.000.440	1	51.782.000	0,25	-	0,25	10.067.250	0,50	10.067.250	2	41.067.690	150,00%	82,14%	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik**	**100 %**	**70.000.000**	**100 %**	**54.399.732**	**100 %**	**31.531.500**	**25 %**	**161.910**	**25 %**	**1.070.910**	**50%**	**1.232.820**	**2**	**55.632.552**		**79,48%**	**DKIK**
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	10.000.000	1	6.414.450	1	4.200.000	0,25	161.910	0,25	161.910	1	323.820	1,5	6.738.270	150,00%	67,38%	
		Pengelolaan Pemberian Penghargaanbagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	5	20.000.000			5	6.220.000	-	-	0	-	-						
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10	40.000.000	15	47.985.282	10	21.111.500	6	-	4	909.000	10	909.000	25	48.894.282	250,00%	122,24%	DKIK

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD TW Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		12		8		9		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi**	**22,80%**	**1.520.000.000**	**10,45%**	**1.132.561.036**	**7,60%**	**972.914.000**	**4,43%**	**281.266.766**	**0,00%**	**332.593.066**	**4,43%**	**613.859.832**		**1.746.420.868**		**114,90%**	
		Pengembangan Kompetensi Teknis	**Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi ASN**	**360 orang**	**800.000.000**	**165**	**510.236.062**	**120**	**442.588.000**	**70**	**275.206.766**	**0**	**280.393.066**	**70**	**555.599.832**	**190**	**1.065.835.894**		**133,23%**	
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120	800.000.000	120	510.236.062	120	442.588.000	70	275.206.766	0	280.393.066	70	555.599.832	190	1.065.835.894	158,33%	133,23%	DKIK

No	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD TW Lalu		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
										I		II								
1	2	3	4	5		6		12		8		9		12		13=12+6		14=13/5x100%		15
				K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	K	Rp (000)	
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan**	**3**	**720.000.000**	**1**	**622.324.974**	**1**	**530.326.000**	0,25	**6.060.000**	0,25	**52.200.000**	**1**	**58.260.000**		**680.584.974**		**94,53%**	
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	720.000.000	1	622.324.974	1	530.326.000	0,25	6.060.000	0,25	52.200.000	0,50	58.260.000	1,5	680.584.974	150,00%	94,53%	DKIK
Jumlah					**23.090.818.391**		**9.333.468.956**		**8.706.756.239**		**1.603.117.291**		**3.164.044.610**		**4.767.161.901**		**14.100.630.857**		**61,07%**	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															**54,75%**					
Predikat Kinerja																				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																				
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja:																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam riwulan berikutnya																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya																				

Dari 3 program 10 kegiatan dan 22 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, secara garis besar sudah terlaksana dengan sangat baik, namun dari segi realisasi keuangan masih rendah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Padang Panjang merupakan lembaga teknis daerah yang berfungsi membantu Walikota dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian. Pelaksanaan manajemen kepegawaian merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan penunjang daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Menyangkut pengelolaan manajemen kepegawaian di daerah, belum ada acuan yang dijadikan dasar untuk menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan kondisi itu maka pelaksanaan pelayanan manajemen kepegawaian di daerah mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang disusun berdasarkan urusan-urusan wajib yang diserahkan Pemerintah kepada Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur lebih lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang. Sesuai dengan Lampiran XIII Perda Nomor 12 tahun 2008 dimaksud maka pelayanan manajemen kepegawaian antara lain meliputi perencanaan formasi, pengadaan, kenaikan pangkat, mutasi dan promosi, pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundangan-undangan di bidang kepegawaian, pembinaan disiplin, fasilitasi kartu identitas pegawai seperti : Kartu Pegawai (Karpeg) dan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE), Kartu Taspen, Kartu Suami / Isteri, pemutakhiran data PNS, serta proses pemberhentian dan pensiun PNS. Untuk melaksanakan manajemen kepegawaian tersebut, sebagian besar berpedoman kepada aturan yang berlaku, mengingat sebagian sistem manajemen kepegawaian secara nasional sama penerapannya.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa BKPSDM belum menyusun SPM di bidang kepegawaian, maka pelaksanaannya mempedomani Pasal 11 PP Nomor 38 Tahun 2008, karena untuk

pengelolaan manajemen kepegawaian ini sudah ada prosedur yang diberlakukan secara nasional seperti kenaikan pangkat, pembinaan disiplin maupun promosi dan mutasi, maka standar pelayanannya mengacu kepada aturan terkait seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian maupun Keputusan Bersama Kementerian/Lembaga terkait.

Lebih lanjut terkait dengan pemenuhan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2 (T-C 30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	6	7	8	8	9		11	12	13
1	jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS			20 orang	20 orang	20 orang		4 orang		20 orang		
2	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 Laporan		1 laporan		
3	Jumah Peserta yang telah tuntuas mengikuti diklat tugas dan fungsi ASN			120 orang	120 orang	120 orang		120 orang		120 orang		
4	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan			12 orang	10 orang	8 orang		15 orang		8 orang		
5	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan			5 orang	5 orang	5 orang		-		5 orang		
6	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
7	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
8	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
9	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
10	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		
11	Jumlah usulan ASN Per tahun			200 orang	200 orang	200 orang		200 orang		200 orang		
12	Jumlah dokumen pegawai yang tertata dengan baik dan terdigitalisasi			400 file	400 file	400 file		400 file		400 file		

2025* Kondisi sampai dengan Juni 2025

Pada tabel 2.2 (TC.30) dapat dilihat bahwa pada umumnya target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Diharapkan dengan penetapan target yang disesuaikan dengan situasi tahun 2025, mempermudah capaian sasaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan yang telah direncanakan.

2.3 Isu-isu Penting peyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Pada hakikatnya, isu merupakan suatu gambaran wacana yang masih diperdebatkan dan belum ditangani dan diolah secara optimal ke dalam suatu agenda pada lembaga tertentu. Kondisi ini dapat menimbulkan perbedaan persepsi yang bisa terjadi pada arah tujuan, cara, prinsip, lokasi, waktu dan kelompok - kelompok yang memperoleh keuntungan atau kerugian akibat dampak atau hasil pemecahan isu tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, tuntutan terhadap pelaksanaan manajemen SDM aparatur juga telah terjadi pergeseran. Saat ini, sebagian besar masyarakat menginginkan suatu bentuk pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas dari aparatur. Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas tersebut, tentu saja dipengaruhi oleh kualitas, kompetensi dan tingkat kesejahteraan aparatur tersebut. Namun yang paling penting untuk mewujudkan hal tersebut, adalah kemauan yang kuat dari semua pihak, untuk bersama-sama memperbaiki pelayanan.

Dengan demikian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Padang Panjang sebagai lembaga teknis yang memiliki tugas membantu Kepala Daerah dalam proses pelaksanaan manajemen kepegawaian, juga berkaitan erat dengan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Isu penting yang berkaitan dengan BKPSDM adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Merit System

   Merit Sistem merupakan salah satu sistem dalam manajemen SDM yang menjadikan kualifikasi, komptensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin dan pensiun pegawai

2. Indeks Profesionalisme ASN

   IP ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya

2.4 Review tehadap Rancangan awal RKPD Perubahan PD Tahun 2025

Rancangan awal Perubahan RKPD BKPSDM Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Setelah melalui tahapan pembahasan Perubahan Renja 2025 bersama TAPD, terdapat beberapa perbaikan dan dilakukan rasionalisasi terhadap anggaran kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan sebelumnya. Review terhadap rancangan perubahan RKPD Tahun 2025 dan hasil analisa kebutuhan untuk perubahan Anggaran 2025 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025

KODE	RANCANGAN RKPD			HASIL ANALISA KEBUTUHAN									CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target 2025		PAGU INDIKATIF		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERUBAHAN	KEBUTUHAN DANA	
				Awal	Perubahan	RKPD 2025	RKPD 2025 Perubahan						
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					**10.252.703.653**	**8.336.750.200**					**8.336.750.200**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**10.252.703.653**	**8.336.750.200**	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**8.714.756.239**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**					**8.732.703.703**	**7.363.836.200**	**KEPEGAWAIAN**				**7.363.836.200**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	**7.974.145.053**	**6.760.603.600**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**	**100 %**	**6.760.603.600**	
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**100 %**	**6.676.918.553**	**5.907.454.525**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**5.907.454.525**	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang/bulan	1540 Orang/bulan	6.676.918.553	5.907.454.525	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang/bulan	5.907.454.525	
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**90 %**	**90 %**	**357.288.765**	**194.440.140**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**90 %**	**194.440.140**	

KODE	RANCANGAN RKPD			HASIL ANALISA KEBUTUHAN									CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target 2025		PAGU INDIKATIF		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERUBAHAN	KEBUTUHAN DANA	
				Awal	Perubahan	RKPD 2025	RKPD 2025 Perubahan						
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	7.314.000	4.387.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.387.700	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	70.002.765	38.833.640	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	38.833.640	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	29.972.000	21.747.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	21.747.800	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	250.000.000	129.471.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	129.471.000	
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase pengadaan BMD yang terpenuhi**	**100 %**	**100 %**	**131.637.800**	**138.813.600**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase pengadaan BMD yang terpenuhi**	**100 %**	**138.813.600**	
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	27.749.800	27.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	27.000.000	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	103.888.000	111.813.600	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	111.813.600	
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**90 %**	**90 %**	**408.544.935**	**253.576.335**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**90 %**	**253.576.335**	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.250.000	2.615.800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.615.800	

KODE	RANCANGAN RKPD			HASIL ANALISA KEBUTUHAN									CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target 2025		PAGU INDIKATIF		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERUBAHAN	KEBUTUHAN DANA	
				Awal	Perubahan	RKPD 2025	RKPD 2025 Perubahan						
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	89.998.935	89.998.935	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	89.998.935	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	313.296.000	160.961.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	160.961.600	
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**90 %**	**90 %**	**399.755.000**	**266.319.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**90 %**	**266.319.000**	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	109.765.000	109.485.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	109.485.000	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	26 Unit	39.990.000	39.990.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	39.990.000	
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	250.000.000	116.844.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	116.844.000	
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		**Nilai Sistem Merit**	**335 Nilai**	**335 Nilai**	**758.558.650**	**603.232.600**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		**Nilai Sistem Merit**	**335 Nilai**	**603.232.600**	

KODE	RANCANGAN RKPD			HASIL ANALISA KEBUTUHAN									CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target 2025		PAGU INDIKATIF		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERUBAHAN	KEBUTUHAN DANA	
				Awal	Perubahan	RKPD 2025	RKPD 2025 Perubahan						
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		**Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik Jumlah usulan ASN Per tahun**	**400 File 200 Orang**	**400 File 200 Orang**	**324.991.550**	**254.038.100**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		**Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik Jumlah usulan ASN Per tahun**	**200 orang 400 file**	**254.038.100**	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	299.995.700	244.747.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	244.747.000	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	24.995.850	9.291.100	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	9.291.100	
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**		**Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan**	**100 %**	**100 %**	**363.568.600**	**317.663.000**	**Mutasi dan Promosi ASN**		**Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan**	**100 %**	**317.663.000**	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	299.990.000	265.881.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	265.881.000	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	63.578.600	51.782.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	51.782.000	
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		**Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik**	**100 %**	**100 %**	**69.998.500**	**31.531.500**	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		**Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik**	**100 %**	**31.531.500**	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.500	4.200.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	4.200.000	

KODE	RANCANGAN RKPD			HASIL ANALISA KEBUTUHAN									CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target 2025		PAGU INDIKATIF		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERUBAHAN	KEBUTUHAN DANA	
				Awal	Perubahan	RKPD 2025	RKPD 2025 Perubahan						
			Aparatur										
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kota Padang Panjang	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5 Orang	5 Orang	16.040.000	6.220.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kota Padang Panjang	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5 Orang	6.220.000	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	10 Orang	10 Orang	43.959.000	21.111.500	Pembinaan Disiplin ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	8 Orang	21.111.500	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**1.519.999.950**	**972.914.000**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**972.914.000**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		**Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi**	**7,60 %**	**7,60 %**	**1.519.999.950**	**972.914.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		**Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi**	**7,60 %**	**972.914.000**	
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**		**Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi ASN**	**120 orang**	**120 orang**	**799.999.900**	**442.588.000**	**Pengembangan Kompetensi Teknis**		**Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi ASN**	**120 orang**	**442.588.000**	

KODE	RANCANGAN RKPD							HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target 2025		PAGU INDIKATIF		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET PERUBAHAN	KEBUTUHAN DANA	
				Awal	Perubahan	RKPD 2025	RKPD 2025 Perubahan						
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Padang Panjang	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang	120 Orang	799.999.900	442.588.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Padang Panjang	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang	442.588.000	
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		**jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS**	**20 Orang**	**20 Orang**	**720.000.050**	**530.326.000**	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		**jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS**	**20 orang**	**530.326.000**	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1 Laporan	720.000.050	530.326.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	530.326.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Musrenbang RKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BKPSDM selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Padang Panjang

No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Nihil						

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi Perangkat Daerah

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu kebijakan nasional. Hal ini merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Dimana tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur dapat dipertanggung jawabkan, baik secara kualitas maupun biaya.

Untuk mendukung reformasi birokrasi secara nasional tersebut, maka BKPSDM tentu harus menyikapinya dengan positif serta mempersiapkan kegiatan yang dapat mendukung kebijakan nasional dimaksud. Untuk itu, rencana kerja yang ditetapkan setiap tahun, harus mampu menceminkan arah reformasi birokrasi, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan berpijak pada kebijakan nasional tentang reformasi birokrasi tersebut, maka diharapkan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDM akan menghasilkan nilai-nilai yang positif, terutama dalam hal pelaksanaan manajemen kepegawaian. Sebab sasaran reformasi birokrasi akan sulit terwujud jika BKPSDM yang memiliki fungsi manajemen kepegawaian tidak menjalankan fungsinya tersebut dengan baik.

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi, Pemerintah telah mencanangkan beberapa program, seperti Netralitas PNS dan Peningkatan Profesionalitas PNS, Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik (e-government), Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri, Pencanangan Pakta Integritas, Percepatan Pemberantasan KKN, Optimalisasi Penggunaan SAPK dan Penyempurnaan Peraturan Disiplin PNS.

Sebagaimana arahan Menteri dan Wakil Menteri PAN-RB dalam berbagai kegiatannya menyebutkan bahwa Pemerintah mengagendakan pembaharuan paradigma PNS, yaitu meningkatkan kinerja, perampingan struktur organisasi dan penggantian jabatan struktural dengan fungsional. Disamping itu terdapat beberapa kebijakan lain yang perlu disikapi, terutama untuk meningkatkan kompetensi aparatur daerah dalam menyongsong era perubahan yang sudah dekat tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

a. Tujuan

Tujuan dan sasaran Renja BKPSDM pada intinya mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025 – 2029. Selain itu Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2025 ini merupakan gambaran keadaan masa mendatang tentang kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Padang Panjang yang dapat direalisasikan. Tujuan yang ingin dicapai oleh BKPSDM Kota Padang Panjang adalah “Meningkatkan profesionalitas ASN melalui tata kelola manajemen ASN berbasis kompetensi”.

b. Sasaran

Secara umum, sasaran adalah hasil dari proses atau kegiatan yang diinginkan oleh organisasi. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, BKPSDM memiliki 3 sasaran yakni. Pertama, Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pengembangan Kompetensi ASN, Meningkatnya Kinerja dan Disiplin ASN dan Meningkatnya kinerja perangkat daerah.

c. Target Indikator Kunci (IKK)

Adapun target Indikator Kunci (IKK) yang menjadi kewenangan BKPSDM kota Padang Panjang tahun 2025 sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) sesuai Permendagri 18 tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Target 2025	OPD
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) = $\frac{\text{Jumlah PNS Berpendidikan Tinggi}}{\text{Jumlah PNS Berpendidikan Menengah/Dasar}} \times 100\%$ Keterangan : • **Jumlah PNS Berpendidikan Tinggi:** PNS non-guru dan non-tenaga kesehatan yang memiliki pendidikan terakhir Diploma, Sarjana, Magister, atau Doktor. • **Jumlah PNS Berpendidikan Menengah/Dasar:** PNS non-guru dan non-tenaga kesehatan yang memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK, SMP, SD, atau sederajat. • **Pengecualian:** Guru dan tenaga kesehatan tidak diperhitungkan dalam pembilang maupun penyebut.	36,80%	BKPSDM
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio Pegawai Fungsional (%) = $\frac{\text{Jumlah PNS Jabatan Fungsional}}{\text{Jumlah PNS Non-Guru dan Non-Tenaga Kesehatan}} \times 100\%$	20,45%	BKPSDM

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Target 2025	OPD
		Keterangan : • **Jumlah PNS Jabatan Fungsional:** PNS non-guru dan non-tenaga kesehatan yang menduduki jabatan fungsional tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. • **Jumlah PNS Non-Guru dan Non-Tenaga Kesehatan:** Seluruh PNS selain guru dan tenaga kesehatan, baik yang menduduki jabatan struktural, fungsional, maupun pelaksana. • **Pengecualian:** Guru dan tenaga kesehatan tidak diperhitungkan dalam pembilang maupun penyebut**.**		
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) = $\frac{\text{Jumlah PNS Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi}}{\text{Jumlah PNS Jabatan Fungsional Non-Guru dan Non-Tenaga Kesehatan}} \times 100\%$ Keterangan : • **Jumlah PNS Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi:** PNS non-guru dan non-tenaga kesehatan yang menduduki jabatan fungsional dan telah memiliki sertifikat kompetensi/sertifikat keahlian/sertifikat profesi yang diakui dan masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. • **Jumlah PNS Jabatan Fungsional Non-Guru dan Non-Tenaga Kesehatan:** Seluruh PNS non-guru dan non-tenaga kesehatan yang menduduki jabatan fungsional. • **Pengecualian:** Guru dan tenaga kesehatan tidak diperhitungkan dalam pembilang maupun penyebut.	20,19%	BKPSDM
4	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator; $IP = \sum_{i=1}^{4} IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m	86,40	BKPSDM
5	Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase ASN yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian = $\frac{\text{Jumlah ASN yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian}}{\text{Jumlah ASN yang Membutuhkan/Mengajukan Pelayanan Administrasi Kepegawaian}} \times 100\%$ Keterangan : • **Jumlah ASN yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian**: Jumlah ASN yang permohonan pelayanan administrasi kepegawaiannya telah diproses dan diselesaikan, meliputi antara lain pengangkatan, kenaikan pangkat, mutasi, pensiun, cuti, penilaian kinerja, penyesuaian data kepegawaian, dan layanan administrasi lainnya. • **Jumlah ASN yang Membutuhkan/Mengajukan Pelayanan Administrasi Kepegawaian**: Seluruh ASN yang mengajukan atau tercatat membutuhkan pelayanan administrasi kepegawaian pada periode pelaporan.	100	BKPSDM

NO	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Target 2025	OPD
6	Persentase ASN yang mendapatkan perlindungan kepegawaian	Persentase ASN yang Mendapatkan Perlindungan Kepegawaian = $\frac{\text{Jumlah ASN yang Mendapatkan Perlindungan Kepegawaian}}{\text{Jumlah ASN yang Membutuhkan/Mengajukan Perlindungan Kepegawaian}} \times 100\%$ Keterangan : • **Jumlah ASN yang Mendapatkan Perlindungan Kepegawaian:** Jumlah ASN yang telah memperoleh perlindungan kepegawaian, antara lain perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**.** • **Jumlah ASN yang Membutuhkan/Mengajukan Perlindungan Kepegawaian:** Seluruh ASN yang mengajukan atau tercatat membutuhkan perlindungan kepegawaian dalam periode pelaporan**.**	100	BKPSDM

3.3 Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 dapat kita lihat sebagaimana digambarkan dalam tabel 3.3 (T-C.33).

.

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	SEMULA	MENJADI	APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan			TARGET	PAGU INDIKATIF
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					**9.835.957.664**	**8.336.750.200**				**6.305.589.819**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**					**9.835.957.664**	**8.336.750.200**				**6.305.589.819**
5.03	**KEPEGAWAIAN**					**8.315.957.714**	**7.363.836.200**				**6.205.589.819**
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**		**100 %**	**100 %**	**7.557.399.064**	**6.760.603.600**			**100 %**	**6.011.605.969**
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**		**100 %**	**100 %**	**6.260.172.564**	**5.907.454.525**			**100 %**	**5.469.210.910**
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	1540 Orang/bulan	1540 Orang/bulan	6.260.172.564	5.907.454.525			1540 Orang/bulan	5.469.210.910
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**		**90 %**	**90 %**	**357.288.765**	**194.440.140**			**90 %**	**118.269.324**
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 Paket	4 Paket	7.314.000	4.387.700			4 Paket	2.000.000
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 Paket	4 Paket	70.002.765	38.833.640			4 Paket	11.269.324

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	SEMULA	MENJADI	APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan			TARGET	PAGU INDIKATIF
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	12 Paket	12 Paket	29.972.000	21.747.800			12 Paket	5.000.000
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	24 Laporan	24 Laporan	250.000.000	129.471.000			24 Laporan	100.000.000
5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pengadaan BMD yang terpenuhi**		**100 %**	**100 %**	**131.637.800**	**138.813.600**			**100 %**	**200**
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Padang Panjang	10 Unit	10 Unit	27.749.800	27.000.000			10 Unit	100
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang	5 Unit	5 Unit	103.888.000	111.813.600			5 Unit	100
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**		**90 %**	**90 %**	**408.544.935**	**253.576.335**			**90 %**	**269.640.535**
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	12 Laporan	12 Laporan	5.250.000	2.615.800			12 Laporan	1.000.000
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang	24 Laporan	24 Laporan	89.998.935	89.998.935			24 Laporan	89.998.935
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	12 Laporan	12 Laporan	313.296.000	160.961.600			12 Laporan	178.641.600

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	SEMULA	MENJADI	APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan			TARGET	PAGU INDIKATIF
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**		**90 %**	**90 %**	**399.755.000**	**266.319.000**			**90 %**	**154.485.000**
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Padang Panjang	17 Unit	17 Unit	109.765.000	109.485.000			17 Unit	109.485.000
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang	26 Unit	26 Unit	39.990.000	39.990.000			26 Unit	15.000.000
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang	1 Unit	1 Unit	250.000.000	116.844.000			1 Unit	30.000.000
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Nilai Sistem Merit**		**335 Nilai**	**335 Nilai**	**758.558.650**	**603.232.600**			**335 Nilai**	**193.983.850**
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik Jumlah usulan ASN Per tahun**		**400 File 200 Orang**	**400 File 200 Orang**	**324.991.550**	**254.038.100**			**400 File 200 Orang**	**69.983.850**
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	1 Dokumen	299.995.700	244.747.000			1 Dokumen	60.000.000
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	1 Dokumen	24.995.850	9.291.100			1 Dokumen	9.983.850

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	SEMULA	MENJADI	APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan			TARGET	PAGU INDIKATIF
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan**		**100 %**	**100 %**	**363.568.600**	**317.663.000**			**100 %**	**90.000.000**
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	1 Dokumen	299.990.000	265.881.000			1 Dokumen	60.000.000
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	1 Dokumen	63.578.600	51.782.000			1 Dokumen	30.000.000
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik**		**100 %**	**100 %**	**69.998.500**	**31.531.500**			**100 %**	**34.000.000**
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.500	4.200.000			1 Dokumen	10.935.000
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kota Padang Panjang	5 Orang	5 Orang	16.040.000	6.220.000			5 Orang	11.770.000
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kota Padang Panjang	10 Orang	10 Orang	43.959.000	21.111.500			10 Orang	11.295.000
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					**1.519.999.950**	**972.914.000**				**100.000.000**
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi melalui diklat, bimtek, dan sosialisasi**		**7,60 %**	**7,60 %**	**1.519.999.950**	**972.914.000**			**7,60 %**	**100.000.000**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			PAGU INDIKATIF		SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	SEMULA	MENJADI	APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan			TARGET	PAGU INDIKATIF
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi ASN**		**120 orang**	**120 orang**	**799.999.900**	**442.588.000**			**120 orang**	**15.000.000**
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kota Padang Panjang	120 Orang	120 Orang	799.999.900	442.588.000			120 Orang	15.000.000
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**jumlah CPNS yang lulus latsar CPNS**		**20 Orang**	**20 Orang**	**720.000.050**	**530.326.000**			**20 Orang**	**85.000.000**
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Padang Panjang	1 Laporan	1 Laporan	720.000.050	530.326.000			1 Laporan	85.000.000

Berdasarkan tabel di atas, setelah mengalami perubahan, Renja BKPSDM tahun 2025, memiliki sebanyak 3 program 10 kegiatan dan 21 sub kegiatan yang merupakan Prioritas I yang terdiri dari :

PRIORITAS I

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kota :
   5 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan
2. Program Kepegawaian Daerah :
   3 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia :
   2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan

Rencana Kerja perubahan BKPSDM Kota Padang Panjang tahun 2025 mengusulkan sebanyak 3 program, 10 kegiatan dan 21 sub kegiatan yang sumber anggaran dan pendanaanya bedasal dari APBD, untuk lebih jelasnya rencana kerja dan pendanaan BKPSDM Kota Padang Panjang dapat dilihat pada berikut;

Tabel 3.4 Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja) Kota Padang Panjang Tahun 2025
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**10.252.703.653**	**9.835.957.664**	**8.336.750.200**							**21.185.818.391**	
	5.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**10.252.703.653**	**9.835.957.664**	**8.336.750.200**							**21.185.818.391**	
	5.03.	**KEPEGAWAIAN**							**10.252.703.653**	**9.835.957.664**	**8.336.750.200**							**21.185.818.391**	
##	**5.03.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	***100 %***	**7.974.145.053**	**7.557.399.064**	**6.760.603.600**							**18.920.818.391**	
	5.03.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan BKPSDM**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**6.676.918.553**	**6.260.172.564**	**5.907.454.525**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**ASN Kota Padang Panjang**		**17.994.098.391**	**BKPSDM**
	5.03.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang		576 Orang	1540 Orang/bulan	1540 Orang/bulan	6.676.918.553	6.260.172.564	5.907.454.525	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				17.994.098.391	BKPSDM
	5.03.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum BKPSDM**	**90 %**		**90 %**	**90 %**	**90 %**	**357.288.765**	**357.288.765**	**194.440.140**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**ASN Kota Padang Panjang**		**360.000.000**	**BKPSDM**
	5.03.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	7.314.000	7.314.000	4.387.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				10.000.000	BKPSDM
	5.03.01.2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	70.002.765	70.002.765	38.833.640	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				70.000.000	BKPSDM
	5.03.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket	29.972.000	29.972.000	21.747.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				30.000.000	BKPSDM
	5.03.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	250.000.000	250.000.000	129.471.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				250.000.000	BKPSDM
	5.03.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**131.637.800**	**131.637.800**	**138.813.600**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**ASN Kota Padang Panjang**		**100.000.000**	**BKPSDM**
	5.03.01.2.07. 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Paket		0 Paket	10 Unit	10 Paket	27.749.800	27.749.800	27.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				50.000.000	BKPSDM

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit		12 Unit	5 Unit	5 Unit	103.888.000	103.888.000	111.813.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			50.000.000	BKPSDM
	5.03.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**90 %**		**90 %**	**90 %**	**90 %**	**408.544.935**	**408.544.935**	**253.576.335**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**ASN Kota Padang Panjang**		**226.720.000**	**BKPSDM**
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.250.000	5.250.000	2.615.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			6.000.000	BKPSDM
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	120 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	89.998.935	89.998.935	89.998.935	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			90.000.000	BKPSDM
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	313.296.000	313.296.000	160.961.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			130.720.000	BKPSDM
	5.03.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**90 %**		**90 %**	**90 %**	**90 %**	**399.755.000**	**399.755.000**	**266.319.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**ASN Kota Padang Panjang**		**240.000.000**	**BKPSDM**
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	85 Unit		17 Unit	17 Unit	17 Unit	109.765.000	109.765.000	109.485.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			100.000.000	BKPSDM
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit		26 Unit	26 Unit	26 Unit	39.990.000	39.990.000	39.990.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			40.000.000	BKPSDM
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	250.000.000	250.000.000	116.844.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Koto Panjang	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			100.000.000	BKPSDM
	5.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**758.558.650**	**758.558.650**	**603.232.600**							**745.000.000**	
	5.03.	**KEPEGAWAIAN**							**758.558.650**	**758.558.650**	**603.232.600**							**745.000.000**	
##	**5.03.02.**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi**	**100 %**		**100 %**		**98,59%**	**758.558.650**	**758.558.650**	**603.232.600**							**745.000.000**	
			Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	**100 %**		**20 %**		**30 %**											
			Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	**99,98 %**		**99,98 %**		**99,98 %**											

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5.03.02.2.01.	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah dokumen kepegawaian yang tertata dengan baik**	**2000 Dokumen**		**400 Dokumen**		**400 Dokumen**	**324.991.550**	**324.991.550**	**254.038.100**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**ASN Kota Padang Panjang**		**325.000.000**	**BKPSDM**
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	**5 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**									
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	299.995.700	299.995.700	244.747.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			300.000.000	BKPSDM
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24.995.850	24.995.850	9.291.100	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			25.000.000	BKPSDM
	5.03.02.2.02.	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase pengisian jabatan sesuai peraturan perundang undangan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**363.568.600**	**363.568.600**	**317.663.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**ASN Kota Padang Panjang**		**350.000.000**	**BKPSDM**
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	299.990.000	299.990.000	265.881.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			300.000.000	BKPSDM
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	63.578.600	63.578.600	51.782.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			50.000.000	BKPSDM
	5.03.02.2.04.	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Persentase jumlah ASN yang berkinerja baik**	**99,98 %**		**99,98 %**	**100 %**	**99,98 %**	**69.998.500**	**69.998.500**	**31.531.500**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**ASN Kota Padang Panjang**		**70.000.000**	**BKPSDM**
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.500	9.999.500	4.200.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			10.000.000	BKPSDM
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	50 Orang		0 Orang	5 Orang	5 Orang	16.040.000	16.040.000	6.220.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			20.000.000	BKPSDM
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	50 Orang		15 Orang	10 Orang	10 Orang	43.959.000	43.959.000	21.111.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			40.000.000	BKPSDM
	5.04.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1.519.999.950**	**1.519.999.950**	**972.914.000**							**1.520.000.000**	
##	**5.04.02.**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional**	**40 %**		**10,45 %**	**7,60 %**	**15 %**	**1.519.999.950**	**1.519.999.950**	**972.914.000**							**1.520.000.000**	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	**20,24 %**		**24,5 %**		**20,19 %**											
			Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	**5,39 %**		**12,55 %**		**3,48 %**											
	5.04.02.2.01.	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah peserta yang telah tuntas mengikuti diklat tugas dan fungsi ASN**	**600 Orang**		**120 Orang**	**120 orang**	**120 Orang**	**799.999.900**	**799.999.900**	**442.588.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**ASN Kota Padang Panjang**		**800.000.000**	**BKPSDM**
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	600 Orang		120 Orang	120 Orang	120 Orang	799.999.900	799.999.900	442.588.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			800.000.000	BKPSDM
	5.04.02.2.02.	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan**	**5 Laporan**		**1 Laporan**		1 Laporan	**720.000.050**	**720.000.050**	**530.326.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**ASN Kota Padang Panjang**		**720.000.000**	**BKPSDM**
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	720.000.050	720.000.050	530.326.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			720.000.000	BKPSDM

BAB IV
PENUTUP

Berikut ini ada beberapa poin penting yang terkait dengan isu-isu strategis nasional, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BKPSDM, sehingga dapat dijadikan prioritas kegiatan BKPSDM tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Adanya Rencana Strategis Nasional 2010-2025 tentang reformasi birokrasi, di mana bagian dari reformasi birokrasi tersebut adalah mewujudkan aparatur yang profesional dalam pelayanan serta memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai. Dengan demikian, kegiatan BKPSDM yang mendukung reformasi birokrasi tersebut, dapat dijadikan prioritas kegiatan tahun 2025, sehingga pembiayaannya dapat ditampung pada anggaran tahun 2025.
2. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, dimana Peraturan Pemerintah ini menggantikan beberapa peraturan sebelumnya terkait manajemen kepegawaian seperti formasi, pengangkatan dan pemberhentian PNS, jabatan fungsional tertentu, pengadaan ASN, dll. Untuk itu, Renja Perubahan BKPSDM tahun 2025 yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini kiranya ditampung pada kegiatan BKPSDM tahun 2025.
3. Diklat merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk meningkatkan kompetensi aparatur, dimana hal ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara khususnya mengenai peningkatan kompetensi ASN, diharapkan kegiatan BKPSDM yang terkait dengan Pendidikan dan pelatihan seperti Diklat Teknis Fungsional, serta sarana dan prasarana seperti Pengadaan perlengkapan gedung dan alat-alat kantor, kiranya dapat ditampung dan dialokasikan dananya pada kegiatan BKPSDM tahun 2025.

4. Diterbitkannya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Mutasi Antar Instansi, perlu kiranya untuk ditindaklanjuti oleh BKPSDM, dikarenakan peraturan tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan mutasi antar instansi maupun mutasi dalam instansi dengan berpedoman kepada Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis beban Kerja (ABK).

Dari uraian tersebut di atas pada dasarnya kegiatan BKPSDM yang diajukan pada Renja Perubahan BKPSDM tahun 2025, merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mewujudkan aparatur yang profesional. Walaupun dana APBD Kota Padang Panjang terbatas, namun usulan Renja Perubahan BKPSDM tahun 2025 dapat kiranya dijadikan prioritas untuk disediakan anggarannya pada APBD Kota Padang Panjang tahun 2025. Selain itu, kegiatan yang juga menyangkut dengan peningkatan kesejahteraan aparatur Kota Padang Panjang juga dapat menjadi masukan serta dapat disediakan dananya pada kegiatan BKPSDM tahun 2025. Hal ini didasarkan bahwa, untuk menciptakan aparatur yang memiliki kompetensi tinggi, maka harus didukung oleh tingkat kesejahteraan yang memadai sesuai dengan kinerja dan beban tugas.

Keberhasilan dari pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM tahun 2025 ini juga membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder yang berkaitan dengan perwujudan aparatur yang profesional, sebagaimana cita-cita reformasi birokrasi yang digariskan pada Rencana Strategis Nasional tahun 2010-2025.

Padang Panjang, Juni 2025

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang

DIAN EKA PURNAMA, SE, M.Si
NIP. 19760725 200312 1 003

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karunia-NYA, penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari 9 (sembilan) Bagian yang ada dilingkungan Sekretariat Daerah.

Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2025-2029 serta memperhatikan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 dan pemetaan nomenklatur program/kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025, harapan kami apa yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang ini dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025.

Padang Panjang, Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH

SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si.
Pembina Utama / NIP. 19750331 199501 1 001

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 13

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah 15

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD 18

2.5 Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 23

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH 26

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 26

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah 26

3.3 Program dan Kegiatan 28

BAB IV PENUTUP 38

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja Sekretariat Daerah merupakan dokumen Perangkat Daerah untuk peride tahun berjalan yang memuat perubahan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Renja Sekretariat Daerah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berjalan. Perubahan Renja Sekretariat Daerah dilaksanakan untuk mengakomodir penyesuaian kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dapat lebih meningkatkan kualitas capaian tujuan utama dalam pelayanan publik. Kualitas penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah sangat menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan I dan Renstra Sekretariat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal Perubahan RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Keterkaitan Perubahan Renja Sekretariat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD dan Renstra Sekretariat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena dalam Perubahan Renja Sekretariat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RKPD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) sesuai

dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan bepedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Nomor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 2);
22. Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah adalah untuk

1. Menyesuaian dengan kondisi terbaru, yakni mengakomodasi perubahan kondisi internal atau eksternal yang mempengaruhi kegiatan seperti perubahan kebijakan, anggaran dan situasi sosial ekonomi;
2. Mengoptimal Sumber Daya, dengan memastikan penggunaan sumber daya manusia, finansial dan material berjalan efisien dan efektif sesuai kebutuhan saat ini;

3. Meningktkan kinerja organisasi dengan memperbaiki fokus dan perioritas kegiatan berdasarkan evaluasi hasil kerja sebelumnya;
4. Menjamin bahwa semua kegiatan dan anggran yang direncanakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan tuhjuan strategi yang telah ditetapkan;
5. Melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses penyusunan untuk memperoleh masukan dan dukungan yang lebih luas, sehingga rencana yang disusun lebih relevan dan diterima.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Sekertariat Daerah ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, untuk memastikan bahwa perencanaan yang dilakukan lebih relevan, realistis dan sesuai dengan kondisi terbaru dilapangan;
2. Adaptasi terhadap perubahan, agar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan kondisi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, seperti perubahan kebijakan, anggaran, atau kebutuhan masyarakat;
3. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi, untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapaian tujuan organisasi;
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder;
5. Meningkatkan koordinasi antar unit terkait agar semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara sinergis;
6. Menyusun ulang target target yang lebih realistis berdasarkan evaluasi capaian sebelumnya, untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra);
7. Menfasilitasi keterlibatan Masyarakat dalam proses perencanaan, sehingga kebutuhan dan aspirasi Masyarakat terpenuhi;
8. Untuk dapat melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai Triwulan I tahun 2025 dan capaian Renstra Sekretariat Daerah, Analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretaraiat Daerah, review terhadap rancangan awal perubahan RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

Memuat Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan I

Melakukan Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kelembagaan. Hasil evaluasi juga menjadi dasar untuk menuyusun perencanaan yang lebih baik. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja adalah untuk melihat apakah target yang direncanakan sudah tercapai dan sesuai dengan waktu yang direncanakan serta sesuai dengan kebutuhan anggran, apakah ada pergeseran anggaran atau sisa anggran masih signifikan, sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan/permasalahan yang dihadapi, sehingga ditemukan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut.

Dalam melakukan penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah, perlu diperhatikan perbandingan hasil evaluasi capaian kinerja pada Renja Tahun 2025 sampai dengan triwulan I terhadap target kinerja pada Renstra 2024-2026.

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I.

Secara umum, pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik telah mencapai 15%. Begitu juga berdasarkan hasil reviu berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 realisasi capaian kinerja mencapai 15%.

Lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)*
KOTA PADANG PANJANG

SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan (Renstra 2024-2026)	Indikator Kinerja Program(outcome) Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)		
				Target Renja OPD Tahun 2025	Realisasi Renja OPD s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	6	7	8 =7/6
4.01	**Sekretariat Daerah**					
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah**	**100,00%**	**100,00%**		**6,42%**
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**90,00%**	**90,00%**		
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang/Bulan	1540 Orang/Bulan	385 Orang/Bulan	25,00%
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Peresentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**90,00%**	**90,00%**		
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	110 Paket	Paket	0,00%
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**90,00%**	**90,00%**		
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Paket	0,00%
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	Paket	0,00%
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Paket	0,00%
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	Paket	0,00%
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	500 Laporan	50 Laporan	10,00%
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	200 Laporan	50 Laporan	25,00%
4.01.01.2.07.0001	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**80,00%**	**80,00%**		
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0,00%
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0,00%
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	0 Unit	0,00%
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	10 Unit	0 Unit	0,00%
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**90,00%**	**90,00%**		
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik**	**80,00%**	**80,00%**		
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	82 Unit	82 Unit	20 Unit	24,39%
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100 Unit	25 Unit	25,00%
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	0 Unit	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan (Renstra 2024-2026)	Indikator Kinerja Program(outcome) Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)		
				Target Renja OPD Tahun 2025	Realisasi Renja OPD s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	6	7	8 =7/6
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Jumlah Pejabat Negara Yang Difasilitasi**	**28 Orang/Bulan**	**28 Orang/Bulan**		
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	9 Orang/Bulan	33,33%
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Paket	0,00%
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	4 Orang/Bulan	33,33%
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Jumlah Rumah Tangga Yang Difasilitasi**	**3 Objek**	**3 Objek**		
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Paket	0,00%
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Paket	0,00%
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Paket	0,00%
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Persentase Penataan Organisasi Yang Tepat Sesuai Peraturan Yang Berlaku**	**65,00%**	**65,00%**		
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	4 Laporan	0 Laporan	0,00%
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Walikota dan Wakil Walikota**	**100,00%**	**100,00%**		
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	300 Laporan	300 Laporan	50 Laporan	16,67%
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	6 Laporan	6 Laporan	0 Laporan	0,00%
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase terselenggaranya kebijakan / kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**	**100,00%**	**100,00%**		**2,38%**
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**100,00%**	**100,00%**		
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	10 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
4.01.02.2.03	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100,00%**	**100,00%**		
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9 Dokumen	9 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
4.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan (Renstra 2024-2026)	Indikator Kinerja Program(outcome) Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2024	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)		
				Target Renja OPD Tahun 2025	Realisasi Renja OPD s/d Triwulan I	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	6	7	8 =7/6
4.01.02.2.03.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	7 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Yang Terlaksana**	**100,00%**	**100,00%**		
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	35 Dokumen	35 Dokumen	5 Dokumen	14,29%
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10 Kasus	3 Kasus	0 Kasus	0,00%
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	10 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase terselenggaranya kebijakan /kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan**	**60,00%**	**60,00%**		**4,17%**
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Terlaksananya Monev BUMD, BLUD, Monev Pengendalian Inflasi Dan Monev Kebijakan Perekonomian**	**90,00%**	**90,00%**		
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	11 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Yang Dikeluarkan**	**95,00%**	**95,00%**		
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	25,00%
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**90,00%**	**90,00%**		
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250 Dokumen	250 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90 Dokumen	90 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	220 Orang	220 Orang	0 Orang	0,00%
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Dilaksanakan**	**90,00%**	**90,00%**		
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%

Berdasarkan Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Padang Panjang Renja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Periode Pelaksanaan Triwulan I dapat dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah melaksanakan 3 Program Kegiatan sebagai berikut**:**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator program persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi target 6,42% capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 sebesar 6,42%, program ini terdiri dari 9 kegiatan dan 27 sub kegiatan.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat indikator program persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan sektor pemerintahan dan kesejahteraan rakyat target kinerja tahun 2025 dengan capaian 2,38% persentase capaian 100%, program ini terdiri dari 3 Kegiatan dengan 9 sub kegiatan yang dilaksanakan.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator program persentase pencapaian kegiatan pembangunan daerah target tahun 2025 dengan capaian 4,17% persentasenya 100%,. Program ini terdiri dari 4 kegiatan dengan 8 sub kegiatan yang dilaksanakan.

2. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 Triwulan I. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Tahun 2025 dan anggaran tahun 2025 beserta perkiraan target realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Renja Perangkat Daerah dan Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2025

Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (RENSTRA 2024 - 2026)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025			TARGET ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2025)	
		ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH s/d TRIWULAN I TAHUN 2025 (Rp)	TINGKAT REALISASI (%)		TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**32.563.005.696**	**5.700.654.436**	**17,51%**	**28.676.987.196**	**-**	**0%**
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**14.540.209.670**	**3.723.637.865**	**25,61%**	**14.881.449.276**	**-**	**0%**
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.540.209.670	3.723.637.865	25,61%	14.881.449.276		0%
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**4.341.583.283**	**737.155.854**	**16,98%**	**5.482.414.180**	**-**	**0%**
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	-	0,00%	50.000.000		0%
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	890.000	2,97%	17.500.000		0%
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.978.283	-	0,00%	165.675.900		0%
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	658.500	3,29%	20.014.600		0%
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	950.000.000	50.657.850	5,33%	749.370.000		0%
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.146.605.000	684.949.504	21,77%	2.530.510.000		0%
4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**3.298.564.400**	**-**	**0,00%**	**1.949.343.680**	**-**	**0%**
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraaan Dinas	2.800.000.000	-	0,00%	10.000.000		0%
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.160.000	-	0,00%	348.550.000		0%
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	395.404.400	-	0,00%	626.509.680		0%
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	-	0,00%	964.284.000		0%
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.874.077.280**	**276.612.922**	**14,76%**	**1.949.343.680**	**-**	**0%**
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	-	0,00%	10.000.000		0%
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	313.500.000	57.001.380	18,18%	348.550.000		0%
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	659.979.680	47.869.318	7,25%	626.509.680		0%
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	890.597.600	171.742.224	19,28%	964.284.000		0%
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.054.462.800**	**327.892.880**	**10,73%**	**2.556.561.000**	**-**	**0%**
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.310.408.800	327.892.880	14,19%	2.031.233.000		0%
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	-	0,00%	78.360.000		0%
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	644.054.000	-	0,00%	446.968.000		0%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (RENSTRA 2024 - 2026)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025			TARGET ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2025)	
		ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH s/d TRIWULAN I TAHUN 2025 (Rp)	TINGKAT REALISASI (%)		TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**779.904.723**	**125.043.524**	**16,03%**	**645.389.680**	**-**	**0%**
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	180.129.723	24.593.525	13,65%	115.614.680		0%
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	199.775.000	450.000	0,23%	129.775.000		0%
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	99.999.999	25,00%	400.000.000		0%
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**3.522.600.340**	**413.844.250**	**11,75%**	**1.960.452.380**	**-**	**0%**
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.290.133.800	335.062.917	14,63%	1.721.334.700		0%
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.162.466.540	71.356.893	6,14%	199.090.480		0%
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	70.000.000	7.424.440	10,61%	40.027.200		0%
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**356.500.000**	**6.688.710**	**1,88%**	**409.989.900**	**-**	**0%**
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	46.500.000	2.780.210	5,98%	49.998.000		0%
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	260.000.000	1.870.000	0,72%	259.993.800		0%
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	50.000.000	2.038.500	4,08%	99.998.100		0%
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**795.103.200**	**89.778.431**	**11,29%**	**791.387.100**	**-**	**0%**
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	536.263.600	64.667.350	12,06%	562.991.900		0%
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	70.000.000	-	0,00%	60.736.600		0%
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	188.839.600	25.111.081	13,30%	167.658.600		0%
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**13.493.021.400**	**1.583.482.579**	**11,74%**	**13.206.116.226**	**-**	**0%**
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**350.006.100**	**51.144.950**	**14,61%**	**730.398.500**	**-**	**0%**
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	75.006.100	2.555.050	3,41%	40.000.000		0%
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	25.000.000	-	0,00%	24.999.800		0%
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	250.000.000	48.589.900	19,44%	665.398.700		0%
4.01.02.2.03	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**12.775.665.300**	**1.526.684.879**	**11,95%**	**11.965.711.326**	**-**	**0%**
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.638.056.800	184.649.450	5,08%	2.444.351.076		0%
4.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.685.252.000	521.942.500	30,97%	1.466.500.250		0%
4.01.02.2.03.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	7.452.356.500	820.092.929	11,00%	8.054.860.000		0%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (RENSTRA 2024 - 2026)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025			TARGET ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2025)	
		ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 (Rp)	REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH s/d TRIWULAN I TAHUN 2025 (Rp)	TINGKAT REALISASI (%)		TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**367.350.000**	**5.652.750**	**1,54%**	**510.006.400**	**-**	**0%**
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	65.100.000	4.262.750	6,55%	69.999.700		0%
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	279.000.000	1.390.000	0,50%	415.006.700		0%
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	23.250.000	-	0,00%	25.000.000		0%
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**617.194.000**	**25.121.299**	**4,07%**	**581.719.831**	**-**	**0%**
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**119.939.000**	**11.576.869**	**9,65%**	**121.728.000**	**-**	**0%**
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	30.000.000	3.234.101	10,78%	30.000.000		0%
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	89.939.000	8.342.768	9,28%	91.728.000		0%
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**200.400.000**	**4.150.000**	**2,07%**	**200.000.100**	**-**	**0%**
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	200.400.000	4.150.000	2,07%	200.000.100		0%
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**241.800.000**	**6.908.430**	**2,86%**	**209.991.731**	**-**	**0%**
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	10.000.000	1.475.000	14,75%	9.999.850		0%
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	100.000.000	1.050.000	1,05%	99.992.000		0%
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	131.800.000	4.383.430	3,33%	99.999.881		0%
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**55.055.000**	**2.486.000**		**50.000.000**	**-**	**0%**
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	55.055.000	2.486.000		50.000.000		0%

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Sekretariat Daerah Triwulan I Tahun 2025, capaian kinerja tahun anggaran 2025 dapat terlaksana dengan baik dengan 3 (tiga) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan. Ada beberapa sub kegiatan yang mencapai realisasi keuangan 30% pada Triwulan I anggaran Tahun 2025, yaitu :

a. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial (30,97%). Hal ini karena telah disalurkannya hibah dan bantuan sosial kepada lembaga, mushalla dan individu penerima bantuan sosial;
b. Penyediaan Gaji dan Tunjanga ASN (25,61%)
c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (16,03%) mulai awal tahun 2025 telah dilakukan kembali pembayaran gaji dan tunjangan untuk KDH/WKDH terpilih .
d. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (11,75%). Terlaksanannya pemenuhan kebutuhan kerumahtanggan pada Sekretariat Daerah yang meliputu Rumah Dinas KDH dan WKDH serta Sekretaris Daerah;
e. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat (11%), dengan telah dimulainya penyaluran bea siswa kepada pelajar yang membutuhkan;
f. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD (10,78%) dilaksanakannya dengan rutin rapat penanganan inflasi tingkat kota dengan melibatkan seluruh unsur pimpinan daerah.
g. Fasilitasi Keprotokolan (12,06%) terlaksananya fasilitasi keprotokolan untuk pimpinan daerah.
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (21,77%) terlaksananya rapat, koordinasi serta konsultasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas SKPD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Sekretariat Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Sekretariat Daerah Padang Panjang Tahun 2024-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran, target evaluasi capaian kinerja sasaran. Disamping itu juga dilakukan pengukuran terhadap capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan di Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN TAHUN 2025
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
XXVII	**SEKRETARIAT DAERAH**							
1	Persentase kebijakan pembangunan yang dilaksanakan	%	NA	NA	100	100	100	Sekretariat Daerah
2	Nilai LPPD	indeks	NA	Rendah	Sedang	Sedang	NA	Sekretariat Daerah
3	Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
4	Kualitas penyelenggaraan sektor bidang perekonomian	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
5	Kinerja proses pengadaan barang/jasa pemerintah	%	90	90	90	90	90	Sekretariat Daerah
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	88.62 (Sangat Baik)	97.16 (Sangat Baik)	96.09 (Sangat Baik)	95,26 (Sangat Baik)	95,26 (Sangat Baik)	Sekretariat Daerah
7	Nilai RB	nilai		55,19	59,4	66,54	77,66	Sekretariat Daerah
8	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	nilai	NA	68,25	63,35	63,4	Belum Rilis	Sekretariat Daerah
9	Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
10	Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
11	Persentase pemberian pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	90	90	90	90	95	Sekretariat Daerah
12	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	nilai	NA	NA	85	NA	94,46 (Tertinggi)	Sekretariat Daerah
13	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur	nilai	88.97 (Sangat Baik)	97.80 (Sangat Baik)	98.10 (Sangat Baik)	93.3 (Sangat Baik)	94,37 (Sangat Baik)	Sekretariat Daerah
14	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat	%	91.75 (Sangat Baik)	97.7 (Sangat Baik)	91.83 (Sangat Baik)	93.9 (Sangat Baik)	97,75 (Sangat Baik)	Sekretariat Daerah
15	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	NA	NA	4,14	NA	68,61	Sekretariat Daerah
16	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	NA	NA	52,58	NA	37,28	Sekretariat Daerah
17	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	NA	NA	8,71	NA	52,18	Sekretariat Daerah

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Persentase Kebijakan Pembangunan yang dilaksanakan memenuhi targer 100% pada tahun 2024.
2. Nilai LPPD terdapat peningkatan dari “Rendah” pada tahun 2021 menjadi ‘”Sedang” pada tahun 2022 dan 2023, sementara untuk penilaian tahun 2024 masih sedang berjalan.
3. Untuk Pemenuhan Layanan Keuangan Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah dapat memenuhi target 100%.
4. Indikator Kualitas Penyelenggaraan Sektor Bidang Perekonomian juga dapat terlaksana dengan baik dengan capaian dalam tiap periode yang mencapai 100%.
5. Proses Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa tetap diindakasi baik dengan capaian 90 setiap tahun anggaran dengan predikat nilai kematangan 9/9 (Sangat Tinggi).
6. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan juga menunjukan peningkatan pada setiap tahun dengan penilaian yang diberikan meningkat setiap tahunnya dengan predikat yang diraih Sangat Tinggi.
7. Indek Kepuasan Masyarakat juga meningkat sesuai penilaian yang terus membaik dari tahun 2020 sampai 2024.

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah disadari bahwa Sekretariat Daerah belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Adapun penyelenggaran pemerintah daerah adalah peningkatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat serta kebijakan sektor perekonomian dan pembangunan.

Belum terlaksananya tugas dan fungsi Sekretariat Daerah secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

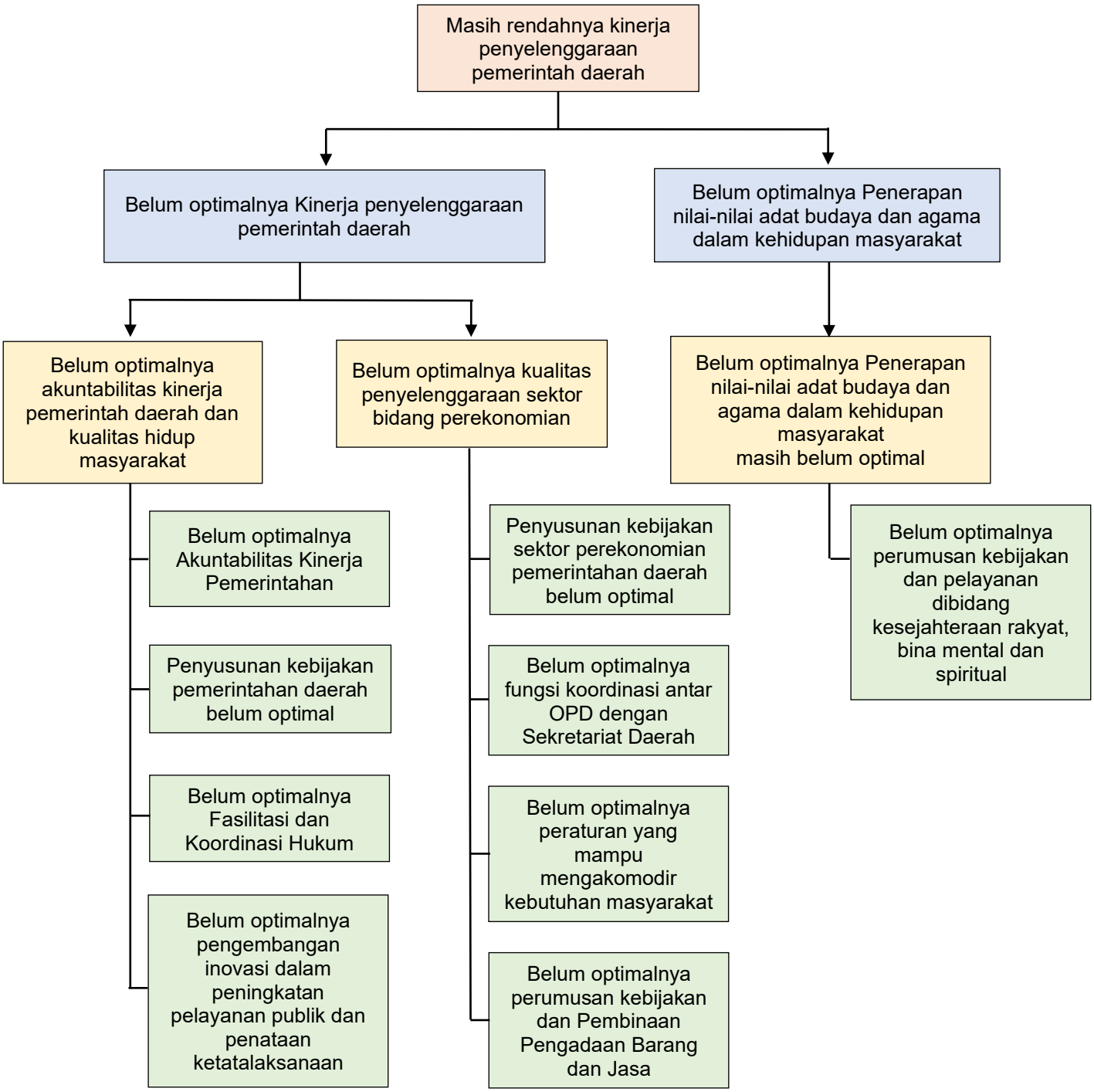
Tabel 2.4

Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	**Ket.**
1.	Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan	Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	
			Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah belum optimal	
			Belum optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	**Ket.**
		kualitas hidup masyarakat	Belum optimalnya pengembangan inovasi dalam peningkatan pelayanan publik dan penataan ketatalaksanaan	
		Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan sektor bidang perekonomian	Penyusunan kebijakan sektor perekonomian pemerintahan daerah belum optimal	
			Belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD dengan Sekretariat Daerah	
			Belum optimalnya peraturan yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat	
			Belum optimalnya perumusan kebijakan dan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	
2.	Penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Belum optimalnya perumusan kebijakan dan pelayanan dibidang kesejahteraan rakyat, bina mental dan spiritual	

Gambar 2.1
POHON MASALAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG



2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Hasil *review* terhadap rancangan perubahan RKPD 2025 dan analisis kebutuhan menunjukan adanya perubahan jumlah anggaran sub kegiatan dalam beberapa kegiatan, namun juga terdapat beberapa sasaran baru hasil analisis yang tidak terdapat dalam rancangan awal. Perubahan anggaran tersebut didasarkan pada hasil kajian terhadap tingkat urgensi setiap kegiatan dikaitkan dengan penetapan skala prioritas kegiatan yang dapat menghasilkan kontribusi langsung terhadap capaian sasaran program tahun 2025 serta adanya keterbatasan anggaran kegiatan pada tahun tersebut.

Berikut kami sampaikan Tabel Review Terhadap RKPD TA 2025 :

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025
KOTA PADANG PANJANG

SEKRETARIAT DAERAH

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					SELISIH	CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 11-6	13
	SEKRETARIAT DAERAH				**47.404.348.358**					**47.404.348.358**	-	
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				**47.404.348.358**					**47.404.348.358**	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Padang Panjang**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Perangkat Daerah**	**100%**	**33.875.791.528**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Padang Panjang**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Perangkat Daerah**	**100%**	**33.875.791.528**	-	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Padang Panjang**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	-	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Padang Panjang**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	-	-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Padang Panjang**	**Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pada Perangkat Daerah**	**100%**	**14.416.670.049**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Padang Panjang**	**Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pada Perangkat Daerah**	**100%**	**14.416.670.049**	-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.540 Orang/Bulan	14.416.670.049	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.540 Orang/Bulan	14.416.670.049	-	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-		
	Kegiatan Pengadaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Padang Panjang	**Persentase pengadaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	-	**Kegiatan Pengadaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Padang Panjang	**Persentase pengadaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	-	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 Paket	-	-	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Padang Panjang	**Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**4.116.332.783**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Padang Panjang	**Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**4.116.332.783**	-	
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	65.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	65.000.000	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Padang Panjang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Padang Panjang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	30.000.000	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	164.978.283	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	164.978.283	-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	-	

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					SELISIH	CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 11-6	13
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Padang Panjang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	1.100.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Padang Panjang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	1.100.000.000	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	2.736.354.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	2.736.354.500	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Padang Panjang	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	**100%**	**4.215.574.943**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Padang Panjang	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	**100%**	**4.215.574.943**	-	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	2 Unit	3.667.010.443	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	2 Unit	3.667.010.443	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	3.160.100	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	3.160.100	-	
	Pengadaan Mebel	Padang Panjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	395.404.400	Pengadaan Mebel	Padang Panjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	395.404.400	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	150.000.000	-	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang Panjang	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi**	**100%**	**1.923.437.280**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Padang Panjang	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi**	**100%**	**1.923.437.280**	-	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang Panjang	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	14.360.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang Panjang	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	14.360.000	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	313.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	313.500.000	-	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	704.979.680	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	704.979.680	-	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang Panjang	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik**	**100%**	**3.449.230.290**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Padang Panjang	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik**	**100%**	**3.449.230.290**	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	82 Unit	2.460.408.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	82 Unit	2.460.408.800	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	100 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	100 Unit	100.000.000	-	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	888.821.490	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	888.821.490	-	
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Padang Panjang	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**879.904.723**	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Padang Panjang	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**879.904.723**	-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan	180.129.723	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan	180.129.723	-	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	1 Paket	299.775.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	1 Paket	299.775.000	-	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	-	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	-	-	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	400.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	400.000.000	-	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Padang Panjang	**Jumlah Rumah Tangga yang difasilitasi**	**3 Objek**	**3.652.590.340**	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Padang Panjang	**Jumlah Rumah Tangga yang difasilitasi**	**3 Objek**	**3.652.590.340**	-	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Padang Panjang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Disediakan	1 Paket	2.340.133.800	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Padang Panjang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Disediakan	1 Paket	2.340.133.800	-	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Padang Panjang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	1 Paket	1.242.456.540	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Padang Panjang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	1 Paket	1.242.456.540	-	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Padang Panjang	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1 Paket	70.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Padang Panjang	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1 Paket	70.000.000	-	

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					SELISIH	CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 11-6	13
	Kegiatan Penataan Organisasi	Padang Panjang	**Tingkat Kematangan Organisasi**	**29**	**280.286.920**	**Kegiatan Penataan Organisasi**	Padang Panjang	**Tingkat Kematangan Organisasi**	**29**	**280.286.920**	-	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analasis Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	22.563.900	Pengelolaan Kelembagaan dan Analasis Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	22.563.900	-	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	4 Laporan	207.723.020	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	4 Laporan	207.723.020	-	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	50.000.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	50.000.000	-	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Padang Panjang	**Persentase Pemenuhan Layanan Keprotokolan Walikota dan Wakil Walikota**	**100%**	**941.764.200**	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Padang Panjang	**Persentase Pemenuhan Layanan Keprotokolan Walikota dan Wakil Walikota**	**100%**	**941.764.200**	-	
	Fasilitasi Keprotokolan	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	300 Laporan	603.064.200	Fasilitasi Keprotokolan	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	300 Laporan	603.064.200	-	
	Faslilisatsi Komunikasi Pimpinan	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	75.694.200	Faslilisatsi Komunikasi Pimpinan	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	75.694.200	-	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Padang Panjang	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	6 Laporan	263.005.800	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Padang Panjang	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	6 Laporan	263.005.800	-	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Padang Panjang	**Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100%**	**13.101.015.030**	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	Padang Panjang	**Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan**	**100%**	**13.101.015.030**	-	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Padang Panjang	1. Efektifitas Kerja Sama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	100%	**461.151.120**	**Administrasi Tata Pemerintahan**	Padang Panjang	1. Efektifitas Kerja Sama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	100%	**461.151.120**	-	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	39.351.350	Penataan Administrasi Pemerintahan	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	39.351.350	-	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	72.401.120	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	72.401.120	-	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	349.398.650	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	349.398.650	-	
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Padang Panjang	**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	100%	**12.253.874.890**	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Padang Panjang	**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	100%	**12.253.874.890**	-	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	3.561.144.800	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	3.561.144.800	-	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	1.660.198.690	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	1.660.198.690	-	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	7.032.531.400	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	7.032.531.400	-	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Padang Panjang	**Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan**	**100%**	**385.989.020**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Padang Panjang	**Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan**	**100%**	**385.989.020**	-	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Padang Panjang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	25 Dokumen	31.194.720	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Padang Panjang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	25 Dokumen	31.194.720	-	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Padang Panjang	Jumlah Laporan Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Laporan	343.606.800	Fasilitasi Bantuan Hukum	Padang Panjang	Jumlah Laporan Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Laporan	343.606.800	-	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Padang Panjang	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Didokumentasi	2 Dokumen	11.187.500	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Padang Panjang	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Didokumentasi	2 Dokumen	11.187.500	-	

NO	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					SELISIH	CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN	INDIKATOR KERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 11-6	13
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Padang Panjang	**Efetivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan**	**60%**	**20.946.600**	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	Padang Panjang	**Efetivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan**	**60%**	**20.946.600**	-	
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Padang Panjang	**Persentase Terlaksananya Monev BUMD, BLUD, Monev Pengendalian Inflasi Dan Monev Kebijakan Perekonomian**	**90%**	**67.189.600**	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Padang Panjang	**Persentase Terlaksananya Monev BUMD, BLUD, Monev Pengendalian Inflasi Dan Monev Kebijakan Perekonomian**	**90%**	**67.189.600**	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	20.946.600	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	20.946.600	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen			
	Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	46.243.000	Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	46.243.000	-	
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Padang Panjang	**Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Dilaksanakan**	**90%**	**27.199.400**	**Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Padang Panjang	**Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Dilaksanakan**	**90%**	**27.199.400**	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	27.199.400	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	27.199.400	-	
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Padang Panjang	**Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan**	**90%**	**173.688.860**	**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Padang Panjang	**Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan**	**90%**	**173.688.860**	-	
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	173.688.860	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	173.688.860	-	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Padang Panjang	**Tingkat Kematangan UKPBJ**	**90%**	**159.463.940**	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Padang Panjang	**Tingkat Kematangan UKPBJ**	**90%**	**159.463.940**	-	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	300 Dokumen	4.313.240	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	300 Dokumen	4.313.240	-	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90 Dokumen	72.134.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90 Dokumen	72.134.000	-	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Padang Panjang	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	230 Orang	83.016.700	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Padang Panjang	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	230 Orang	83.016.700	-	

2.5 Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Pada Sekretariat Daerah, terdapat beberapa usulan program dan kegiatan masyarakat yakni kegiatan non fisik. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat untuk perubahan tahun 2025 tersebut terlihat pada tabel di bawah ini :

DAFTAR HIBAH/BANSOS DARI POKIR DPRD UNTUK APBD-P 2025

NO	JENIS	NAMA	ALAMAT	SEKOLAH	ANGGARAN
1	Bantuan Sosial	AICO NANDITA PUTRI	Jalan Abdullah Ahmad No 30 RT 4 Kel Pasar Usang	SMA N 2 PADANG PANJANG	Rp 6.000.000
2	Bantuan Sosial	ANDIKA SUPARDI	Jalan Rohana Kudud RT 24 No 1 Kel Kampung Manggis	UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI	Rp 8.000.000
3	Bantuan Sosial	FATHEO ABILLAH RIFANZA	Jalan Adam BB No 553 RT 14 Kel Balai-Balai	SMA N 2 PADANG PANJANG	Rp 5.000.000
4	Bantuan Sosial	MUHAMMAD FARHAN	Jalan Pemuda No 21 RT 10 Kel Koto Panjang	UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG	Rp 5.000.000
5	Hibah Mushalla	Nurul Hidayah	Kelurahan Silaing Bawah		Rp 15.000.000
6	Hibah Mushalla	Nurul Muttaqin	Kelurahan Ganting		Rp 10.000.000
7	Hibah Ke Lembaga	TPQ Atthallah	Kelurahan Balai Balai		Rp 100.000.000
8	Hubah Rumah Tahfiz	Rumah Tahfiz Arrahman	Kelurahan Ngalau		Rp 15.000.000
JUMLAH					**Rp 164.000.000**

TABEL 2.5
USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

TABEL 2.5
USULAN PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM			SESUDAH		
			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	PAGU ANGGARAN 2025	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	PAGU ANGGARAN 2025
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Padang Panjang	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi**	**100%**	**32.563.005.796**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat Daerah**	**100%**	**33.875.791.528**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Padang Panjang			**-**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**-**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Padang Panjang				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Padang Panjang				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Padang Panjang				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Padang Panjang				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Padang Panjang				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	1 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang Panjang				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Padang Panjang	**Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah**	**90%**	**14.540.209.670**	**Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**14.416.670.049**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang/Bulan	14.540.209.670	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang/Bulan	14.416.670.049
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Padang Panjang				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**6 Jenis**	**4.341.583.283**	**Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**4.116.332.783**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	65.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Padang Panjang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	30.000.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	30.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah jenis alat tulis kantor dan peralatan kebersihan kantor yang disediakan	1 Paket	144.978.283	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	164.978.283
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Padang Panjang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	950.000.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	1.100.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	3.146.605.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	2.736.354.500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Padang Panjang	**Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur**	**80%**	**3.298.564.500**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	**80%**	**4.215.574.943**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2.800.000.000	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	2 Unit	3.667.010.443
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	3.160.100	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	3.160.100
	Pengadaan Mebel	Padang Panjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	395.404.400	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	395.404.400
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	150.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang Panjang	**Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah**	**100%**	**1.874.077.280**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi**	**100%**	**1.923.437.280**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.360.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	313.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	313.500.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	659.979.680	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	704.979.680
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	890.597.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	890.597.600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Padang Panjang	**Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah**	**100%**	**3.054.462.800**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik**	**100%**	**3.449.230.290**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	82 Unit	2.310.408.800	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	82 Unit	2.460.408.800
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	100.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	100 Unit	100.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	644.054.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	888.821.490
	Kegiatan Pengadaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Padang Panjang		**100%**	**-**	**Persentase pengadaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**90%**	**-**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Padang Panjang				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	-
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Padang Panjang	**Jumlah Pejabat Negara yang difasilitasi**	**28 Orang/Bulan**	**779.904.723**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**879.904.723**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan	180.129.723	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan	180.129.723
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	199.775.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	299.775.000
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Padang Panjang				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	-
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala	24 Orang/Bulan	400.000.000	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala	24 Orang/Bulan	400.000.000
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Padang Panjang	**Jumlah Rumah tangga yang difasilitasi**	**3 Objek**	**3.522.600.340**	**Jumlah Rumah tangga yang difasilitasi**	**3 Objek**	**3.652.590.340**
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Padang Panjang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	2.290.133.800	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Disediakan	1 Paket	2.340.133.800
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Padang Panjang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1.162.466.540	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	1 Paket	1.242.456.540
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Padang Panjang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	70.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1 Paket	70.000.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	SEBELUM			SESUDAH		
			INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	PAGU ANGGARAN 2025	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	PAGU ANGGARAN 2025
	Penataan Organisasi	Padang Panjang	**Jumlah OPD yang dievaluasi TUSI, Kinerja, RB, dan Pelayanan Publik**	**75%**	**356.500.000**	**Tingkat Kematangan Organisasi**	**29**	**280.286.920**
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	46.500.000	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	22.563.900
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan	260.000.000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	4 Laporan	207.723.020
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	50.000.000
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Padang Panjang	**Persentese Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**100%**	**795.103.200**	**Persentase Pemenuhan Layanan Keprotokolan Walikota dan Wakil Walikota**	**100%**	**941.764.200**
	Fasilitasi Keprotokolan	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	300 Laporan	536.263.600	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	300 Laporan	603.064.200
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	70.000.000	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	75.694.200
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Padang Panjang	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	188.839.600	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	6 Laporan	263.005.800
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Padang Panjang	**Persentase terselenggaranya kebijakan/ kegiatan sektor Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**13.493.021.400**	**Persentase Penyelenggaran kebijakan pemerintahan dan otononi daerah serta kesejahteraan rakyat**	**100%**	**13.101.015.030**
	Administrasi Tata Pemerintahan	Padang Panjang	**Persentase terlaksananya fasilitasi kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**100%**	**350.006.100**	**1. Efektivitas Kerja Sama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah**	**100%**	**461.151.120**
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	75.006.100	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	10 Dokumen	39.351.350
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	25.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	72.401.120
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	250.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	349.398.650
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Padang Panjang	**Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**12.775.665.300**	**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**12.253.874.890**
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9 Dokumen	3.638.056.800	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	3.561.144.800
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat	5 Dokumen	1.685.252.000	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat	5 Dokumen	1.660.198.690
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	7.452.356.500	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	7.032.531.400
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Padang Panjang	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana**	**100%**	**367.350.000**	**Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan**	**100%**	**385.989.020**
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Padang	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	35 Dokumen	65.100.000	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	25 Dokumen	31.194.720
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Padang	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan	10 Kasus	279.000.000	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan	3 Laporan	343.606.800
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Padang Panjang	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	10 Dokumen	23.250.000	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dokumen	11.187.500
3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Padang Panjang	**Persentase terselenggaranya kebijakan umum sektor perekonomian dan pembangunan Kota Padang Panjang**	**90%**	**617.194.000**	**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan**	**100%**	**427.541.800**
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Padang Panjang	**Persentase terlaksananya monev BUMD, BLUD, monev pengendalian inflasi dan monev kebijakan perekonomian**	**100%**	**119.939.000**	**Persentase Terlaksananya Monev BUMD, BLUD, Monev Pengendalian Inflasi Dan Monev Kebijakan Perekonomian Persentase terselenggaranya**	**90%**	**67.189.600**
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	30.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	20.946.600
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Padang Panjang				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen	-
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	89.939.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	46.243.000
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Padang Panjang	**Persentase Rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi kegiatan Pembangunan yang dikeluarkan**	**100%**	**200.400.000**	**Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan**	**95%**	**173.688.860**
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	200.400.000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	173.688.860
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Padang Panjang	**Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**100%**	**241.800.000**	**Tingkat Kematangan UKPBJ**	**90%**	**159.463.940**
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250 Dokumen	10.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250 Dokumen	4.313.240
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90 Dokumen	100.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90 Dokumen	72.134.000
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	Padang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan	300 Orang	131.800.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan	220 Orang	83.016.700
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Padang Panjang	**Persentase terlaksananya koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**100%**	**55.055.000**	**Persentase terlaksananya koordinasi Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**90%**	**27.199.400**
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	55.055.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 Dokumen	27.199.400
	TOTAL				**46.673.221.196**			**47.404.348.358**

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sekretariat Daerah sebagai penyelenggara urusan wajib pemerintahan daerah bidang urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian diarahkan dalam rangka memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah dan Anti KKN, Menyusun dan menerapkan SPM, membangun dan mengembangkan sistem dan manajemen pelayanan publik, sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK serta peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan Pembinaan kesadaran hukum.

Selanjutnya Sekretariat Daerah juga diarahkan dalam rangka melakukan sinkronisasi dan koordinasi yang optimal dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan serta meningkatkan akurasi data dalam setiap proses perencanaan pembangunan, Percepatan penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat, Membangun dan mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi kota sesuai RTRW, serta peningkatan kualitas kehidupan beragama dan penerapan ABS SBK.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah perlu dijelaskan yang menjadi Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

TABEL 3.2
TUJUAN DAN SASARAN DAN INDIKATOR SEKRETRIAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

NO	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET RENSTRA 2025	Perubahan Renja 2025	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif dan Terwujudnya pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3.14	3,38	
				Indeks Pelayanan Publik	4,17	4,20	
				Indeks Reformasi Hukum	96,66	96,82	
				Nilai AKIP Kota	64,22	65,00	
				Persentase Masjid yang Aktif Melaksanakan Aktifitas Keagamaan	85	88	
			Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai komponen pelaporan kinerja dalam AKIP Kota	9,92	9,97	
				Cakupan pembinaan peningkatan nilai layanan publik	35	42	
2	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan adat dalam kehidupan masyarakat			Nilai AKIP Sekretariat Daerah	65,10	66,00	
				Nilai JDIH	76	78	
				Persentase Pemenuhan Data Bahan Penyusunan LPPD	100	100	
			Meningkatnya Meningkatnya kualitas kebijakan dan fasilitasi aktivitas kegiatan keagamaan di mesjid dan musholla	Indeks Kualitas Kebijakan	NA	85,71	
				Persentase mesjid dan mushalla yang imam/garin/guru TPQ nya mendapatkan insentif	84	85	

3.3 Program dan Kegiatan

Program :

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 harus sesuai dengan tupoksi dari Sekretariat Daerah agar tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan di atas dapat tercapai. Pada Tahun 2025, Sekretriat Daerah akan melaksanakan 3 (tiga) Program Prioritas Utama, yaitu :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Program Perekonomian dan Pembangunan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

Sekretariat Daerah akan melaksanakan 16 (enam belas) Kegiatan yang terinci menjadi 43 (empat puluh enam) Sub Kegiatan. Adapun 16 (enam belas) Kegiatan yang dimaksud yaitu:

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
8. Penataan Organisasi;
9. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
10. Administrasi Tata Pemerintahan;
11. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat;
12. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
13. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
14. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan;
15. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
16. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

TABEL 3.3
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026

SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
SEKRETARIAT DAERAH							**47.649.348.358**	**DAU**			**32.957.316.819**
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							**47.649.348.358**	**DAU**			**32.957.316.819**
X.XX.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pada Perangkat Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**100%**	**100%**	**33.875.791.528**	**DAU**		**100%**	**27.251.329.340**
X.XX.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Padang Panjang**		**0%**	**-**	**DAU**		**100%**	**5.000.000**
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang		0	-	DAU		2 Dokumen	5.000.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Padang Panjang		0	-	DAU		1 Dokumen	5.000.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Padang Panjang		0	-	DAU		1 Dokumen	5.000.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Padang Panjang		0	-	DAU		1 Dokumen	5.000.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Padang Panjang		0	-	DAU		1 Dokumen	5.000.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Padang Panjang		0	-	DAU		5 Laporan	10.000.000
X.XX.01.2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**100%**	**100%**	**14.416.670.049**	**DAU**		**100%**	**14.717.860.000**
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	1540 Orang/Bulan	1540 Orang/Bulan	14.416.670.049	DAU		1540 Orang/Bulan	14.523.100.000
X.XX.01.2.02.0002	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Padang Panjang		12 Bulan	-	DAU			194.760.000
X.XX.01.2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**6 Jenis%**	**100%**	**4.116.332.783**	**DAU**		**90%**	**2.935.000.000**
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Paket	4 Paket	65.000.000	DAU		4 Paket	30.000.000
X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Padang Panjang	3 Paket	3 Paket	30.000.000	DAU		3 Paket	20.000.000
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Paket	4 Paket	164.978.283	DAU		4 Paket	75.000.000
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Paket	1 Paket	20.000.000	DAU		12 Paket	10.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Padang Panjang	500 Laporan	500 Laporan	1.100.000.000	DAU		500 Laporan	800.000.000
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	200 Laporan	200 Laporan	2.736.354.500	DAU		200 Laporan	2.000.000.000
X.XX.01.2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	**Kota Padang Panjang**	**80%**	**80%**	**4.215.574.943**	**DAU**		**80%**	**2.655.000.000**
X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	Kota Padang Panjang	2 Unit	2 Unit	3.667.010.443	DAU		9 Unit	2.455.000.000
X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Unit	0 Unit	3.160.100	DAU		10 Unit	100.000.000
X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Padang Panjang	20 Unit	20 Unit	395.404.400	DAU		10 Unit	50.000.000
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang	10 Unit	10 Unit	150.000.000	DAU		10 Unit	50.000.000
X.XX.01.2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi**	**Kota Padang Panjang**	**100%**	**100%**	**1.923.437.280**	**DAU**		**90%**	**1.052.850.000**
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Padang Panjang	1 Laporan	1 Laporan	14.360.000	DAU		12 Laporan	5.000.000
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Laporan	36 Laporan	313.500.000	DAU		36 Laporan	300.000.000
X.XX.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Laporan	4 Laporan	704.979.680	DAU		4 Laporan	327.850.000
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Laporan	12 Laporan	890.597.600	DAU		12 Laporan	420.000.000
X.XX.01.2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik**	**Kota Padang Panjang**	**100%**	**100%**	**3.449.230.290**	**DAU**		**80%**	**1.149.534.000**
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Padang Panjang	82 Unit	82 Unit	2.460.408.800	DAU		82 Unit	799.534.000
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Kota Padang Panjang	100 Unit	100 Unit	100.000.000	DAU		100 Unit	50.000.000
X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang	4 Unit	4 Unit	888.821.490	DAU		4 Unit	300.000.000
X.XX.01.2.06	**Kegiatan Pengadaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pengadaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Kota Padang Panjang**	**90%**	**90%**	**-**	**DAU**		**90%**	**-**
X.XX.01.2.06.0001	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Padang Panjang			-				-

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
X.XX.01.2.11	**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Jumlah Pejabat Negara Yang Difasilitasi**	**Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**8 Orang/Bula**	**100%**	**879.904.723**	**DAU**		**100%**	**810.000.000**
X.XX.01.2.11.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Padang Panjang	28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	180.129.723	DAU		28 Orang/Bulan	200.000.000
X.XX.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Kota Padang Panjang	1 Paket	1 Paket	299.775.000	DAU		1 Paket	200.000.000
X.XX.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Padang Panjang		2 Orang	-				10.000.000
X.XX.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Padang Panjang	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	400.000.000	DAU		24 Orang/Bulan	400.000.000
X.XX.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Jumlah Rumah Tangga yang difasilitasi**	**Terfasilitasinya Kebutuhan Rumah Tangga Walikota, Wakil Walikota dan Sekretariat Daerah**	**Kota Padang Panjang**	**3 Objek**	3 objek	**3.652.590.340**	**DAU**		**3 objek**	**3.366.360.340**
X.XX.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Paket	1 Paket	2.340.133.800	DAU		1 Paket	2.177.447.800
X.XX.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Paket	1 Paket	1.242.456.540	DAU		1 Paket	1.118.912.540
X.XX.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kota Padang Panjang	1 Paket	1 Paket	70.000.000	DAU		1 Paket	70.000.000
X.XX.01.2.13	**Kegiatan Penataan Organisasi**	**Persentase Penataan Organisasi Yang Tepat Sesuai Peraturan Yang Berlaku**	**Meningkatnya kematangan organisasi**	**Kota Padang Panjang**	**75%**	**29**	**280.286.920**	**PAD**		**85%**	**179.775.000**
X.XX.01.2.13.0003	Pengelolaan Kelembagaan dan Analasis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Kota Padang Panjang	5 Dokumen	5 Dokumen	22.563.900	PAD		3 Dokumen	40.000.000
X.XX.01.2.13.0002	Falislitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Kota Padang Panjang	4 Laporan	4 Laporan	207.723.020	PAD		3 Laporan	99.775.000
X.XX.01.2.13.0001	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Padang Panjang	5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000	PAD		4 Dokumen	40.000.000
X.XX.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Walikota dan Wakil Walikota**	**Terpenuhinya Layanan Keprotokolan Walikota dan Wakil Walikota**	**Kota Padang Panjang**	**100%**	1	**941.764.200**	**PAD**		**100%**	**384.950.000**
X.XX.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kota Padang Panjang	300 Laporan	300 Laporan	603.064.200	PAD		300 Laporan	206.340.000
X.XX.01.2.14.0002	Faslilisatsi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Padang Panjang	1 Laporan	1 Laporan	75.694.200	PAD		1 Laporan	50.000.000
X.XX.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Padang Panjang	1 Laporan	6 Laporan	263.005.800	PAD		6 Laporan	128.610.000
37347	**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Terselenggaranya Kebijakan/Kegiatan Sektor Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Penyelenggaran kebijakan pemerintahan dan otononi daerah serta kesejahteraan rakyat**	**Kota Padang Panjang**	**100%**	1	**13.101.015.030**	**PAD**		**100%**	**5.005.987.479**
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Efektivitas Kerja Sama Daerah	Kota Padang Panjang	**100%**	**100%**	**461.151.120**	**PAD**		100%	**135.000.000**
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Padang Panjang	10 Dokumen	2 Dokumen	39.351.350	PAD		2 Dokumen	30.000.000
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	3 Dokumen	72.401.120	PAD		3 Dokumen	25.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Padang Panjang	3 Dokumen	7 Dokumen	349.398.650	PAD		7 Dokumen	80.000.000
4.01.02.2.02	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Kota Padang Panjang**	**100%**	**100%**	**12.253.874.890**	**PAD**		**100%**	**4.665.987.479**
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Padang Panjang	9 Dokumen	7 Dokumen	3.561.144.800	PAD		7 Dokumen	2.701.342.500
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kota Padang Panjang	5 Dokumen	5 Dokumen	1.660.198.690	PAD		5 Dokumen	390.550.000
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kota Padang Panjang	7 Dokumen	7 Dokumen	7.032.531.400	PAD		7 Dokumen	1.574.094.979
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Yang Terlaksana**	**Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Produk Hukum yang Dihasilkan**	**Kota Padang Panjang**	**100%**	**100%**	**385.989.020**	**PAD**		**100%**	**205.000.000**
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kota Padang Panjang	35 Dokumen	25 Dokumen	31.194.720	PAD		70 Dokumen	30.000.000
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Laporan Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Laporan Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Padang Panjang	10 Kasus	3 Laporan	343.606.800	PAD		3 Laporan	150.000.000
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Didokumentasi	Kota Padang Panjang	10 Dokumen	2 Dokumen	11.187.500	PAD		10 Dokumen	25.000.000
37712	**Program Perekonomian dan Pembangunan**	**Persentase Terselenggaranya Kebijakan/Kegiatan Pada Bagian Perekonomian Dan Pembangunan**	**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan**	**Kota Padang Panjang**	**90%**	**100%**	**672.541.800**	**PAD**		**100%**	**665.000.000**
4.01.03.2.01	**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Terlaksananya Monev BUMD, BLUD, Monev Pengendalian Inflasi Dan Monev Kebijakan Perekonomian**	**Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan pada bagian perekonomian dan pembanguna**	**Kota Padang Panjang**	**90%**	**90%**	**67.189.600**	**PAD**		**90%**	**475.000.000**
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	1 Dokumen	20.946.600	PAD		1 Dokumen	30.000.000
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Padang Panjang	1 Laporan	1 Laporan	46.243.000	PAD		1 Laporan	45.000.000
4.01.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Kota Padang Panjang		1 Dokumen	-	PAD		1 Laporan	400.000.000
4.01.03.2.02	**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Yang Dikeluarkan**	**Persentase terselenggaranya Kebijakan Administrasi Pembangunan**	**Kota Padang Panjang**	**100%**	**95%**	**173.688.860**	**PAD**		**95%**	**50.000.000**
4.01.03.2.02.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Padang Panjang	12 Laporan	12 Laporan	173.688.860	PAD		12 Laporan	50.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Terselenggaranya Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Kota Padang Panjang**	**90%**	**95%**	**159.463.940**	**PAD**		**100%**	**110.000.000**
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Kota Padang Panjang	250 Dokumen	250 Dokumen	4.313.240	PAD		320 Dokumen	10.000.000
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Padang Panjang	90 Dokumen	90 Dokumen	72.134.000	PAD		90 Dokumen	50.000.000
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Kota Padang Panjang	300 Orang	220 Orang	83.016.700	PAD		250 Orang	50.000.000
4.01.03.2.04	**Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Dilaksanakan**	**Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Dilaksanakan**	**Kota Padang Panjang**	**90%**	**90%**	**272.199.400**	**PAD**		**90%**	**30.000.000**
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	1 Dokumen	272.199.400	PAD		1 Dokumen	30.000.000

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 serta Review Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025.;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian daerah, serta infrastruktur pengembangan wilayah dalam kerangka pembangunan daerah Kota Padang Panjang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah sebagaimana table 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretaris Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kota Padang Panjang

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD P 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SEKRETARIAT DAERAH				**42.458.052.032**	**46.763.160.196**	**47.404.348.358**							**32.957.316.819**
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**42.458.052.032**	**46.763.160.196**	**47.404.348.358**							**32.957.316.819**
4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**42.458.052.032**	**46.763.160.196**	**47.404.348.358**							**32.957.316.819**
4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pada Perangkat Daerah**	**%**	**100%**	**29.466.685.532**	**32.563.005.796**	**33.875.791.528**						**100%**	**27.251.329.340**
4 01 01 02.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**100%**	**35.000.000**
4 01 01 02.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)				2 Dokumen	5.000.000
4 01 01 02.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)				1 Dokumen	5.000.000
4 01 01 02.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)				1 Dokumen	5.000.000
4 01 01 02.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil						Kota Padang Panjang, Semua	DANA ALOKASI UMUM				1 Dokumen	5.000.000
4 01 01 02.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)				1 Dokumen	5.000.000
4 01 01 02.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)				5 Laporan	10.000.000
4 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**90 %**	**100%**	**15.096.445.532**	**14.540.209.670**	**14.416.670.049**			**-**	**-**	**Perangkat Daerah**	**100%**	**14.717.860.000**
4 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang/Bulan	1540 Orang/Bulan	15.096.445.532	14.540.209.670	14.416.670.049	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1540 Orang	14.523.100.000
4 01 01 2.02 0002	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen			-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	194.760.000
4 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi**	**90 %**	**100%**	**3.195.000.000**	**4.341.583.283**	**4.116.332.783**			**-**	**-**	**Perangkat Daerah**	**100%**	**2.935.000.000**
4 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000	50.000.000	65.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	30.000.000
4 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	30.000.000	30.000.000	30.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	20.000.000
4 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	145.000.000	144.978.283	164.978.283	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	75.000.000
4 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kota Padang Panjang, Semua	PENDAPATAN ASLI	-	-		12 Paket	10.000.000
4 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	500 Laporan	950.000.000	950.000.000	1.100.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		500 Laporan	800.000.000
4 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000.000	3.146.605.000	2.736.354.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Laporan	2.000.000.000
4 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah**	**80%**	**80%**	**2.800.000.000**	**3.298.564.500**	**4.215.574.943**			**-**	**-**	**Perangkat Daerah**	**90%**	**2.655.000.000**
4 01 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	2 Unit	2 Unit	2.300.000.000	2.800.000.000	3.667.010.443	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	2.455.000.000
4 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	1 Unit	0 Unit	200.000.000	3.160.100	3.160.100	Kota Padang Panjang, Semua	PENDAPATAN ASLI	-	-		10 Unit	100.000.000
4 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	200.000.000	395.404.400	395.404.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-		20 Unit	50.000.000
4 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	100.000.000	100.000.000	150.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	50.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD P 2025			Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi**	**90 %**	**100%**	**1.786.000.000**	**1.874.077.280**	**1.923.437.280**			**-**	**-**	**Perangkat Daerah**	**100%**	**1.052.850.000**
4 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	14.360.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	5.000.000
4 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	313.500.000	313.500.000	313.500.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	300.000.000
4 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	562.500.000	659.979.680	704.979.680	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	327.850.000
4 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	900.000.000	890.597.600	890.597.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	420.000.000
4 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik**	**80 %**	**80 %**	**2.400.000.000**	**3.054.462.800**	**3.449.230.290**			**-**	**-**	**Perangkat Daerah**	**100%**	**1.149.534.000**
4 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	82 Unit	82 Unit	2.000.000.000	2.310.408.800	2.460.408.800	Kota Padang Panjang, Semua	PENDAPATAN ASLI	-	-		88 Unit	799.534.000
4 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	9 Unit	9 Unit	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Unit	50.000.000
4 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	4 Unit	300.000.000	644.054.000	888.821.490	Kota Padang Panjang, Semua	PENDAPATAN ASLI	-	-		4 Unit	300.000.000
4 01 01 02.03	**Kegiatan Pengadaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pengadaan administrasi kepegawaian perangkat daerah**		**90%**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**Perangkat Daerah**	**90%**	**-**
4 01 01 02.03 0001	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		110 Paket	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		110 Paket	-
4 01 01 2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**2 Orang**	**2 Orang**	**800.000.000**	**779.904.723**	**879.904.723**			**-**	**-**	**KDH dan WKDH**	**100%**	**810.000.000**
4 01 01 2.11 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	200.000.000	180.129.723,0	180.129.723	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		28 Orang/Bulan	200.000.000
4 01 01 2.11 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut	1 Paket	1 Paket	200.000.000	199.775.000	299.775.000	Kota Padang Panjang, Semua	PENDAPATAN ASLI	-	-		1 Paket	200.000.000
4 01 01 2.11 0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang	-	-	-						2 Orang	10.000.000
4 01 01 2.11 0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Orang/Bulan	400.000.000
4 01 01 2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Jumlah Rumah Tangga yang difasilitasi**	**3 Objek**	**3 Objek**	**2.316.940.000**	**3.522.600.340**	**3.652.590.340**			**-**	**-**	**Rumah Dinas Sekretaris Daerah**	**3 Objek**	**3.366.360.340**
4 01 01 2.12 0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala	1 Paket	1 Paket	1.900.000.000	2.290.133.800	2.340.133.800	Kota Padang Panjang, Semua	PENDAPATAN ASLI	-	-		1 Paket	2.177.447.800
4 01 01 2.12 0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	346.940.000	1.162.466.540	1.242.456.540	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	1.118.912.540
4 01 01 2.12 0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1 Paket	1 Paket	70.000.000	70.000.000	70.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	70.000.000
4 01 01 2.13	**Penataan Organisasi**	**Tingkat Kematangan Organisasi**	**65%**	**65%**	**360.000.000**	**356.500.000**	**280.286.920**			**-**	**-**	**Perangkat Daerah**	**31**	**179.775.000**
4 01 01 2.13 0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000	46.500.000	22.563.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	40.000.000
4 01 01 2.13 0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik	4 Laporan	4 Laporan	260.000.000	260.000.000	207.723.020	Kota Padang Panjang, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	99.775.000
4 01 01 2.13 0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	40.000.000
4 01 01 2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi**	**Persentase Pemenuhan Layanan**	**100 %**	**100 %**	**712.300.000**	**795.103.200**	**941.764.200**			**-**	**-**	**KDH dan WKDH**	**100%**	**384.950.000**
4 01 01 2.14 0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	300 Laporan	300 Laporan	476.900.000	536.263.600	603.064.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		300 Laporan	206.340.000
4 01 01 2.14 0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	70.000.000	70.000.000	75.694.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000
4 01 01 2.14 0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas	1 Laporan	1 Laporan	165.400.000	188.839.600	263.005.800	Kota Padang Panjang, Semua	PENDAPATAN ASLI	-	-		1 Laporan	128.610.000
4 01 02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Penyelenggaran kebijakan pemerintahan dan otononi daerah serta kesejahteraan rakyat**	**100 %**	**100 %**	**12.581.366.500**	**13.493.021.400**	**13.101.015.030**						**100%**	**5.005.987.479**
4 01 02 2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	1. Efektivitas Kerja Sama Daerah	**100 %**	**100 %**	**250.000.000**	**350.006.100**	**461.151.120**			**-**	**-**	**Pemerintah**	100%	**135.000.000**
4 01 02 2.01 0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000	75.006.100	39.351.350	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	30.000.000
4 01 02 2.01 0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000	25.000.000	72.401.120	Kota Padang Panjang, Semua	PENDAPATAN ASLI	-	-		2 Dokumen	25.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD P 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4 01 02 2.01 0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	150.000.000	250.000.000	349.398.650	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	80.000.000
4 01 02 2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**100%**	**100%**	**11.936.356.500**	**12.775.665.300**	**12.253.874.890**			**-**	**-**	**Masyarakat**	100%	**4.665.987.479**
4 01 02 2.02 0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina	7 Dokumen	7 Dokumen	3.500.000.000	3.638.056.800	3.561.144.800	Kota Padang Panjang, Semua	PENDAPATAN ASLI	-	-		7 Dokumen	2.701.342.500
4 01 02 2.02 0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	5 Dokumen	1.344.000.000	1.685.252.000	1.660.198.690	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	390.550.000
4 01 02 2.02 0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan	2 Dokumen	2 Dokumen	7.092.356.500	7.452.356.500	7.032.531.400	Kota Padang Panjang, Semua	PENDAPATAN ASLI	-	-		7 Dokumen	1.574.094.979
4 01 02 2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan**	**100%**	**100%**	**395.010.000**	**367.350.000**	**385.989.020**			**-**	**-**	**Pemerintah Daerah**	**100%**	**205.000.000**
4 01 02 2.03 0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	35 Dokumen	35 Dokumen	70.000.000	65.100.000	31.194.720	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Dokumen	30.000.000
4 01 02 2.03 0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Laporan Kasus Yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	3 Kasus	300.010.000	279.000.000	343.606.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	150.000.000
4 01 02 2.03 0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Didokumentasi	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	23.250.000	11.187.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	25.000.000
4 01 03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan**	**60 %**	**60 %**	**410.000.000**	**707.133.000**	**427.541.800**						**100%**	**665.000.000**
4 01 03 2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Terlaksananya Monev BUMD, BLUD, Monev Pengendalian Inflasi Dan Monev Kebijakan Perekonomian Persentase terselenggaranya kebijakan/kegiatan pada bagian perekonomian dan pembangunan**	**60%**	**60%**	**80.000.000**	**209.878.000**	**67.189.600**			**-**	**-**	**Pelaku Ekonomi**	**90%**	**475.000.000**
4 01 03 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	30.000.000	20.946.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	30.000.000
4 01 03 2.01 0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	89.939.000	46.243.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	45.000.000
4 01 03 2.01 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		1 Dokumen	25.000.000	89.939.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	400.000.000
4 01 03 2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Dilaksanakan**	**100%**	**0,10%**	**50.000.000**	**200.400.000**	**27.199.400**			**-**	**-**	**Perangkat Daerah**	**90%**	**30.000.000**
4 01 03 2.02 0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	200.400.000	27.199.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	30.000.000
4 01 03 2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan**	**100%**	**100%**	**20.000.000**	**55.055.000**	**173.688.860**			**-**	**-**	**Sumber Daya Alam**	**95%**	**50.000.000**
4 01 03 2.04 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	55.055.000	173.688.860	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	50.000.000
4 01 03 2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Tingkat Kematangan UKPBJ**	**90%**	**90%**	**260.000.000**	**241.800.000**	**159.463.940**			**-**	**-**	**Pelaku Pengadaan**	**100%**	**110.000.000**
4 01 03 2.03 0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	250 Dokumen	250 Dokumen	10.000.000	10.000.000	4.313.240	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		300 Dokumen	10.000.000
4 01 03 2.03 0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	90 Dokumen	90 Dokumen	100.000.000	100.000.000	72.134.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		90 Dokumen	50.000.000
4 01 03 2.03 0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	220 Orang	220 Orang	150.000.000	131.800.000	83.016.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		230 Orang	50.000.000
		J U M L A H			**42.458.052.032**	**46.763.160.196**	**47.404.348.358**							**32.957.316.819**

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Padang Panjang, Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH

SONNY BUDAYA PUTRA, AP, M.Si.
Pembina Madya / NIP. 19750331 199501 1 001

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa atas Berkah dan Rahmat-Nya Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dapat menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perubahan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk periode Tahun 2025 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perubahan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan pada RPJMD 2025-2029 Kota Padang Panjang dan penjabaran dari Rensta Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan pedoman, arahan dan acuan bagi implementasi pembangunan di Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

Demikian Perubahan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini dibuat sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Padang Panjang, 30 Juni 2025

Pelaksana Tugas
CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG

DONI RAHMAN, S.Pd.I, M.Pd.
NIP. 197807202006041012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR TAHUN 2025 S.D TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur 17

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025 18

2.4 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat 20

2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur 21

24

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 24

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Padang Panjang Timur 24

3.3 Program dan Kegiatan 25

BAB IV. PENUTUP 84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I	8
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2020-2024	17
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025.....	19
Tabel 2.4	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 pada Perubahan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2025.....	33
Tabel 3.1	Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	42
Tabel dari SIPD	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025.....	56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran Perubahan Renja serta memuat program, kegiatan dan subkegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Dengan demikian Perubahan Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Perangkat Daerah dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP). Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu tahun berjalan, meliputi: evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan kecamatan, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program masyarakat, kegiatan dan subkegiatan.

Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang adalah salah satu Perangkat Daerah di Kota Padang Panjang yang memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat kecamatan**.**

Secara Umum Perubahan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan sampai dengan triwulan I Tahun 2025, yang menunjukkan adanya ketidak sesuaian perkembangan keadaan yaitu:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka perlu penyesuaian penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja program, Penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub kegiatan dan pergeseran pagu anggaran;
3. Dengan terpilihnya Kepala Daerah Kota Padang Panjang pada priode 2025-2029 yang baru maka Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang perlu menyesuaikan dengan program unggulan terkait visi misi Kepala Daerah terpilih.

Tahun Anggaran 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2025 yang memuat rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam Anggaran APBD Perubahan Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);

13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 2);
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 32);
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2025-2029. Maksud dari Perubahan Renja Tahun 2025 adalah penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi tentang:

a. Program Indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang;
b. Program Indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang; dan

c. Program Indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 adalah menjabarkan rencana program, kegiatan dan subkegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja optimal, serta sebagai arah dan acuan untuk:

a. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan;
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
d. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur
2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025
2.4 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat
2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Padang Panjang Timur

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR TAHUN 2025 s.d TRIWULAN I

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur tahun 2025 adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi. Secara umum pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tahun anggaran 2025 terdiri dari 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan, 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang kondisi Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

TABEL 2.1
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG
PERIODE PELAKSANAAN: TRIWULAN I TAHUN 2025

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026 (s/d akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (n - 2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 (tahun n - 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kerja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung gJawab
										I		II		III		IV							
				Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100		15
1	**Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur**	**95%**	**31,506,279,427**	**95%**	**11,643,353,546**	**95%**	**13,027,236,169**	**25%**	**2,908,874,695**		**-**		**-**		**-**	**25%**	**2,908,874,695**	**120%**	**14,552,228,241**	**126%**	**46%**	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**95%**	**25,887,271,427**	**100%**	**9,597,525,322**	**100%**	**9,018,801,269**	**31%**	**2,183,617,461**		**-**		**-**		**-**	**31%**	**2,183,617,461**	**131%**	**11,781,142,783**	**138%**	**46%**	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3234 orang	25,887,271,427	994 orang	9,597,525,322	994 orang	9,018,801,269	195	2,183,617,461	-	-	-	-	0	0	195	2,183,617,461	1,067	11,781,142,783	33%	45.51%	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**96,000,000**	**100%**	**35,500,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**	**92%**	**-**	**100%**	**-**		**-**	**0%**	**-**	**100%**	**35,500,000**	**100%**	**36.98%**	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	154 paket	96,000,000	71 paket	35,500,000	0%	0	-	0	-	-	-	-		-	-	-	71	35,500,000	46%	36.98%	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah**	**90%**	**1,461,000,000**	**90%**	**355,695,550**	**90 Persen**	**469,950,000**	**25%**	**44,944,175**	**50%**	**-**	**75%**	**-**	**90%**	**-**	**25%**	**44,944,175**	**115%**	**400,639,725**	**128%**	**27.42%**	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	108 paket	87,000,000	36 paket	13,402,200	4 Paket	17,000,000	1 paket	1,959,000							3 paket	1,959,000	54	15,361,200	50%	17.66%	Kecamatan Padang Panjang Timur

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026 (s/d akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (n - 2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 (tahun n - 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kerja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggunglawab
										I		II		III		IV								
				Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100		15
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	108 paket	600,000,000	36 paket	94,780,065	4 Paket	103,950,000	1 paket	28,972,300							3 paket	28,972,300	54	123,752,365	50%	20.63%	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	324 paket	120,000,000	108 paket	23,693,550	12 Paket	31,000,000	3 paket	6,079,400							3 paket	6,079,400	162	29,772,950	50%	24.81%	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360 laporan	654,000,000	120 laporan	223,819,735	24 laporan	318,000,000	6 laporan	7,933,475							6 laporan	7,933,475	180	231,753,210	50%	35.44%	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100%**	**275,000,000**	**100%**	**181,825,000**	**100 Persen**	**53,093,300**	**10%**	**9,925,000**	**90%**	**-**		**-**		**-**	**10%**	**9,925,000**	**110%**	**191,750,000**	**110%**	**69.73%**	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 unit	255,000,000	32 unit	181,825,000	21 unit	53,093,300	2 unit	9,925,000							2 unit	9,925,000	21	191,750,000	58%	75.20%	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	20,000,000	0	-	0	-	-	-	-					-	-	-		-	0%	0.00%	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**90%**	**2,257,008,000**	**90%**	**1,014,030,004**	**90 Persen**	**2,661,555,100**	**23%**	**509,625,309**	**50%**	**-**	**75%**	**-**	**90%**	**-**	**23%**	**509,625,309**	**113%**	**1,523,655,313**	**125%**	**67.51%**	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan	18,000,000	12 laporan	2,760,000	12 laporan	3,120,000	0	-							0	-	13	2,760,000	36%	15.33%	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	972 laporan	390,000,000	264 laporan	51,233,669	12 laporan	105,441,500	3 laporan	12,010,579							3 laporan	12,010,579	510	63,244,248	62%	16.22%	Kecamatan Padang Panjang Timur

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026 (s/d akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (n - 2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 (tahun n - 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kerja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
				Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100		15
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	324 laporan	1,849,008,000	108 laporan	960,036,335	12 laporan	2,552,993,600	3 laporan	497,614,730							3 laporan	497,614,730	162	1,457,651,065	50%	78.83%	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik**	**80%**	**1,530,000,000**	**80%**	**458,777,670**	**80 Persen**	**823,836,500**	**50 Persen**	**160,762,750**	**50%**	-	**75%**	-	**80%**	-	**80 Persen**	**160,762,750**	**#VALUE!**	**619,540,420**	**#VALUE!**	**40.49%**	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	156 unit	450,000,000	46 unit	132,624,300	46 unit	252,865,000	43 unit	102,974,750							43 unit	102,974,750	50	235,599,050	32%	52.36%	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	400 unit	180,000,000	150 unit	24,200,000	100 unit	49,500,000	10 unit	2,050,000							10 unit	2,050,000	130	26,250,000	33%	14.58%	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 unit	900,000,000	9 unit	301,953,370.00	9 unit	521,471,500	1 unit	55,738,000							1 unit	55,738,000	11	357,691,370	38%	39.74%	Kecamatan Padang Panjang Timur
2	**Meningkatnya Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur**	**40.00%**	**9,017,520,000**	**39.98%**	**3,090,042,550**	**39,99 Persen**	**4,739,480,540**	**10%**	**645,749,850**		-		-		-	**10%**	**645,749,850**	**50%**	**3,735,792,400**	**125%**	**41.43%**	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan**	**9 jenis**	**2,118,000,000**	**3 jenis**	**775,192,225**	**3 jenis**	**2,491,196,540**	**2 jenis**	**285,349,850**		-		-		-	**2 jenis**	**285,349,850**	5	**1,060,542,075**	**56%**	**50.07%**	Kecamatan Padang Panjang Timur

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026 (s/d akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (n - 2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 (tahun n - 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kerja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggunglawab
										I		II		III		IV								
				Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100		15
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27 lembaga	600,000,000	9 lembaga	103,164,825	9 lembaga	149,429,500	5 lembaga (RT,LPM,PKK,Karang Taruna,Posyandu)	129,447,575							5 lembaga (RT,LPM,PKK,Karang Taruna,Posyandu)	129,447,575	18	232,612,400	67%	38.77%	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 unit	240,000,000	10 paket (vertical garden 1 unit, baju adat jawa 1 paket, baju adat batak 1 paket,baju adat minang 1 paket, tenda 5 unit, peralatan KSB TPL 1 paket)	93,136,000	8 unit	391,570,000	-	-							-	-	-	93,136,000	0%	38.81%	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 pokmas/ormas	1,278,000,000	6 pokmas/ormas	578,891,400	6 pokmas/ormas	1,950,197,040	6 pokmas/ormas	155,902,275							6 pokmas/ormas	155,902,275	12	734,793,675	67%	57.50%	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah Rukun Tetangga (RT)**	**321 RT**	**6,899,520,000**	**107 RT**	**2,314,850,325**	**107 RT**	**2,248,284,000**	**107 RT**	**360,400,000**	**107 RT**	**-**	**107 RT**	**-**	**107 RT**	**-**	**107 RT**	**360,400,000**	213	**2,675,250,325**	**66%**	**38.77%**	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 lembaga (RT)	6,899,520,000	1 lembaga (RT)	2,314,850,325	1 lembaga (RT)	2,248,284,000	1 lembaga (RT)	360,400,000							1 lembaga (RT)	360,400,000	2	2,675,250,325	67%	38.77%	Kecamatan Padang Panjang Timur
3	**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur**	**100%**	**8,036,520,000**	**100%**	**3,530,639,653**	**100 Persen**	**1,168,995,400**	**100%**	**168,273,000**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**-**	**100%**	**168,273,000**	**200%**	**5,370,097,561**	**200%**	**66.82%**	Kecamatan Padang Panjang Timur

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026 (s/d akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (n - 2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 (tahun n - 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kerja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
				Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100		15
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan**	**36 kali**	**3,986,640,000**	**12 kali**	**1,671,184,908**	**12 kali**	**30,000,000**	**0**	-		-		-		-	**0**	-	54	**1,671,184,908**	**150%**	**41.92%**	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1728 dokumen	3,986,640,000	576 dokumen	1,671,184,908	1 dokumen	30,000,000.00	0	-							0	-	864	1,671,184,908	50%	41.92%	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan**	**36 kali**	**3,986,640,000**	**12 kali**	**1,671,184,908**	**12 kali**	**219,440,000**	**3 kali**	**39,416,550**		-		-		-	**3 kali**	**39,416,550**	54	**1,710,601,458**	**150%**	**42.91%**	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1728 dokumen	3,986,640,000	576 dokumen	1,671,184,908	8 dokumen	219,440,000	8 dokumen	39,416,550							8 dokumen	39,416,550	864	1,710,601,458	50%	42.91%	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan**	**30 urusan**	**4,046,880,000**	**8 urusan (FKKS, pokja kel.sehat, PKK, karang taruna, posyandu, dasawisma, PMT, Himpaudi)**	**1,859,454,745**	**8 urusan**	**919,555,400**	2 urusan (PMT Posyandu, Posyandu)	**128,856,450**		-		-		-	2 urusan (PMT Posyandu, Posyandu)	**128,856,450**	11	**1,988,311,195**	**37%**	**49.13%**	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	30 laporan	4,046,880,000	8 lap (FKKS, pokja kel.sehat, PKK, karang taruna, posyandu, dasawisma, PMT, Himpaudi)	1,859,454,745	8 laporan	919,555,400	2 laporan (PMT Posyandu, Posyandu)	128,856,450							2 laporan (PMT Posyandu, Posyandu)	128,856,450	16	1,988,311,195	53%	49.13%	Kecamatan Padang Panjang Timur

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026 (s/d akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (n - 2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 (tahun n - 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kerja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung gJawab
										I		II		III		IV								
				Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100		15
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Trantibum pada Kecamatan Padang Panjang Timur**	**8 Laporan**	**50,000,000**	**6 laporan (kemalingan sapi di 4 lokasi pd bln april & mei di tanjuang, ganting, solok batuang, gajah tanang) Narkoba di kel. Ganting & Ekor Lubuk**	**7,750,000**	**9 Laporan**	**18,010,000**	-	-		-		-		-	-	-	10	**7,750,000**	**125%**	**15.50%**	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah jenis kegiatan koordinasi trantib**	**6 jenis**	**50,000,000**	**2 jenis**	**7,750,000**	**2 Jenis**	**18,010,000**		-		-		-		-		-	4	**7,750,000**	**67%**	**15.50%**	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	324 Laporan	50,000,000	108 Laporan	7,750,000	12 laporan	18,010,000	-	0							-	-	162	7,750,000	50%	15.50%	Kecamatan Padang Panjang Timur
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur**	**100%**	**120,000,000**	**100%**	**244,558,625**	**100 Persen**	**30,000,000**	**0%**	-	**0%**	-	**0%**	-	0%	-	**0%**	-	**100%**	**244,558,625**	**100%**	**203.80%**	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah**	**15 kegiatan**	**120,000,000**	**5 keg (Forkopimca, HUTRI, HUTKota, Tim Ramadhan, MTQ)**	**244,558,625**	**4 kegiatan**	**30,000,000**		-		-		-		-		-	4	**244,558,625**	**27%**	**203.80%**	Kecamatan Padang Panjang Timur

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026 (s/d akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2024 (n - 2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 (tahun n - 1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Kerja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
										I		II		III		IV								
				Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	Kinerja	Rp. (000)	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100		15
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	480 orang	90,000,000	340 orang	219,000,100	80 orang	20,000,000	0	-							0	-	180	219,000,100	38%	243.33%	Kecamatan Padang Panjang Timur
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18 dokumen	30,000,000	6 dokumen	25,558,525	6 dokumen	10,000,000	0	-							0	-	6	25,558,525	33%	85.20%	Kecamatan Padang Panjang Timur
Rata-rata Capaian Kinerja (%)									**18,983,722,109**	**20%**	**3,722,897,545**	**0%**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**	**20%**	**3,722,897,545**					
Predikat Kinerja																								

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :	

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur sampai dengan Triwulan I tahun 2025, realisasi pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik walaupun adanya efisiensi anggaran berdasarkan instruksi presiden. Pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 terealisasi secara fisik sebesar 20% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.722.897.545,- atau 19,61% dengan rincian sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan target kinerja 95 %, realisasi sampai dengan triwulan I 25% atau capaian 26,32% dari target. Realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp.2.908.874.695,- atau 22,33%.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator kinerja Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan target kinerja 39,99%, realisasi sampai dengan triwulan I 10% atau capaian 25% dari target. Realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 645.749.850,- atau 13,62%.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan target kinerja 100%, realisasi sampai dengan triwulan I 25% atau capaian 25% dari target. Realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 168.273.000,- atau 14,39%.
- Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Trantibum pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan target kinerja 9 laporan, realisasi sampai dengan triwulan I baik kinerja maupun realisasi keuangan masih nihil.
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan target kinerja 100%, realisasi sampai dengan triwulan I baik kinerja maupun realisasi keuangan masih nihil.

Ada beberapa program, kegiatan dan subkegiatan yang direcofusing pada Tahun 2025, diantaranya :

1. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan pagu dana sebesar Rp. 18.010.000,-
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional dengan pagu dana sebesar Rp. 20.000.000,-
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan PUBLIK, Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan pagu dana sebesar Rp. 30.000.000,-

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja secara umum. Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program adalah:

1) Adanya kegiatan dalam program yang tidak dianggarkan karena keterbatasan alokasi anggaran, sehingga mengurangi capaian program;
2) Adanya pergeseran anggaran;
3) Adanya pengurangan volume pengadaan barang atau jasa dalam program, karena disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

Implikasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Dinas:

Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut:

1. Perubahan target capaian kinerja akhir periode Renstra;
2. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan;
3. Efisiensi alokasi belanja; dan
4. Penambahan alokasi pagu anggaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan adalah melaksanakan fungsi sebagai penunjang urusan pemerintahan di Kota Padang Panjang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Padang Panjang.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 sebagaimana pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Data Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Realisasi Anggaran SATIMISAKE	Persen	89.46%	94.89%			
2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Persen	33.93%	38.07%	38.28%	39.00%	39.20%
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Angka	88.97	97.80	98.09	93.30	94.37

Sumber : Kecamatan Padang Panjang Timur, 2025

Penjelasan Tabel 2.2 :

1. Indikator Persentase Realisasi Anggaran SATIMISAKE

   Capaian realisasi anggaran Satimisake pada tahun 2020 sebesar 89,46% dan untuk tahun 2021 sebesar 94,89%. Pada tahun 2021 akhir terjadi Perubahan RPJMD 2018-2023 Kota Padang Panjang yang mengakibatkan tidak adanya lagi indikator "Persentase Realisasi Anggaran Satimisake".

2. Indikator Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

   Kinerja indikator ini menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di tahun-tahun terakhir. Pertumbuhan yang cukup positif dan stabil, ini dapat dihubungkan dengan peningkatan kesadaran masyarakat, peran aktif lembaga, dan inovasi partisipatif dari kecamatan. Ini dapat dilihat dari peningkatan konsisten dari 33,93% (2020) ke 39,20% (2024).

3. Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

   Terjadi penurunan tajam di tahun 2023 (93,30), namun pulih kembali ke 94,37 di tahun 2024, tertinggi pada tahun 2022 (98,09). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memang belum sepenuhnya stabil, tetapi dengan adanya pemulihan di tahun 2024, ini mencerminkan respons cepat dan tetap perlu penguatan sistem.

2.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Perubahan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang akibat adanya efisiensi anggaran pada rancangan awal RKPD, maka ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur tahun 2025 yang dikurangi atau pun dihilangkan anggarannya. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.3 dibawah ini.

TABEL 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Padang Panjang

Tahun 2025

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD Tahun 2026	Target 2025		Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(15)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR					19,733,398,713	18,983,722,109	17,476,863,731							16,558,864,716	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					19,733,398,713	18,983,722,109	17,476,863,731							16,558,864,716	
7.01	KECAMATAN					19,733,398,713	18,983,722,109	17,476,863,731							16,558,864,716	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur	95%	95 Persen	95 Persen	13,488,740,213	13,027,236,169	12,200,852,281						95 Persen	12,087,002,996	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*95%*	95 Persen	95 Persen	9,405,394,813	9,018,801,269	9,453,802,286						95 Persen	9,453,802,286	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD Tahun 2026	Target 2025		Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(15)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3234 orang	1078 orang	994 orang	9,405,394,813.00	9,018,801,269.00	9,453,802,286.00	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU (Dana Alokasi Umum)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	ASN di Lingkungan OPD Kecamatan	994 orang (71x14bln)	9,453,802,286.00	Kecamatan Padang Panjang Timur
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	***100 Persen***	-	-									-		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	154 paket	-	-	0.00			-	-	-	-	-	-	0.00	
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah**	***90%***	**90 Persen**	**90 Persen**	**465,950,000**	**469,950,000**	**211,697,715**						**90 Persen**	**211,724,910**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD Tahun 2026	Target 2025		Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(15)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	108 paket	4 Paket	4 Paket	17,000,000	17,000,000	10,175,400	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU (Dana Alokasi Umum)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	ASN di Lingkungan OPD Kecamatan	4 Paket	10,199,880	Kecamatan Padang Panjang Timur
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	108 paket	4 Paket	4 Paket	103,950,000	103,950,000	52,189,665	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU (Dana Alokasi Umum)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	ASN di Lingkungan OPD Kecamatan	4 Paket	52,192,130	Kecamatan Padang Panjang Timur
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	324 paket	12 Paket	4 Paket	31,000,000	31,000,000	9,703,650	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU (Dana Alokasi Umum)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	ASN di Lingkungan OPD Kecamatan	12.00	9,703,700	Kecamatan Padang Panjang Timur

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD Tahun 2026	Target 2025		Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(15)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360 laporan	24 laporan	12 laporan	314,000,000	318,000,000	139,629,000	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU (Dana Alokasi Umum)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	ASN di Lingkungan OPD Kecamatan	24 laporan	139,629,200	Kecamatan Padang Panjang Timur
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	***100%***	**100 Persen**	**100 Persen**	**53,335,700**	**53,093,300**	**11,437,700**						**0%**	**100,000**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 unit	21 unit	2 unit	53,335,700	53,093,300	11,437,700	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU (Dana Alokasi Umum)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	BMD di Lingkungan OPD Kecamatan	0 unit	100,000	Kecamatan Padang Panjang Timur
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	***90%***	**90 Persen**	**90 Persen**	**2,592,464,700**	**2,661,555,100**	**1,859,798,080**						**90 Persen**	**2,072,648,800**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD Tahun 2026	Target 2025		Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(15)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan	12 laporan	1 laporan	3,120,000	3,120,000	500,000	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU (Dana Alokasi Umum)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Meningkatkan	Jasa penunjang urusan di lingkungan OPD Kecamatan	1 laporan	500,000	Kecamatan Padang Panjang Timur
01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	972 laporan	12 laporan	12 laporan	105,441,500	105,441,500	74,896,800	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU (Dana Alokasi Umum)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Jasa penunjang urusan di lingkungan OPD Kecamatan	12 laporan	74,896,800	Kecamatan Padang Panjang Timur
01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	324 laporan	12 laporan	12 laporan	2,483,903,200	2,552,993,600	1,784,401,280	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU (Dana Alokasi Umum)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Jasa penunjang urusan di lingkungan OPD Kecamatan	12 laporan	1,997,252,000	Kecamatan Padang Panjang Timur

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD Tahun 2026	Target 2025		Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(15)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	***80%***	**80 Persen**	**80 Persen**	**971,595,000**	**823,836,500**	**664,116,500**						**80 Persen**	**348,727,000**	
01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 unit	46 unit	46 unit	217,595,000	252,865,000	210,001,000	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU (Dana Alokasi Umum)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	BMD di Lingkungan OPD Kecamatan	46 unit	210,001,000	Kecamatan Padang Panjang Timur
01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	100 unit	50 unit	94,000,000	49,500,000	27,380,000	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU (Dana Alokasi Umum)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	BMD di Lingkungan OPD Kecamatan	50 unit	27,250,000	Kecamatan Padang Panjang Timur

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD Tahun 2026	Target 2025		Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(15)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	9 unit	9 unit	660,000,000	521,471,500	426,735,500	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU (Dana Alokasi Umum)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	BMD di Lingkungan OPD Kecamatan	9 unit	111,476,000	Kecamatan Padang Panjang Timur
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur**	**100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1,211,440,000**	**1,168,995,400**	**998,134,400**						**100 Persen**	**998,131,270**	
01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan**	***12 kali***	**12 kali**	**0 kali**	**30,000,000**	**30,000,000**	**-**						**0 kali**	**-**	
01 02 2.01 00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	30,000,000	30,000,000	-	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU (Dana Alokasi Umum)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 dokumen	-	Kecamatan Padang Panjang Timur

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD Tahun 2026	Target 2025		Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(15)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan**	***36 kali***	**12 kali**	**12 kali**	**219,440,000**	**219,440,000**	**191,474,400**						**12 kali**	**191,474,270**	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	24 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	219,440,000	219,440,000	191,474,400	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU (Dana Alokasi Umum)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Kebersihan Lingkungan di Wilayah Kelurahan se Kecamatan PPT	12 dokumen	191,474,270	Kecamatan Padang Panjang Timur
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan**	***30 urusan***	**8 urusan**	**8 urusan** (pmt, posyandu, karang taruna, fkks, pokja sehat,	**962,000,000**	**919,555,400**	**806,660,000**						**8 laporan** **(pmt, posyandu, karang taruna, fkks, pokja sehat, bunda paud, literasi)**	**806,657,000**	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	30 laporan	8 laporan	8 laporan (pmt, posyandu, karang taruna, fkks, pokja sehat, bunda paud, literasi)	962,000,000	919,555,400	806,660,000	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU (Dana Alokasi Umum)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan kepada camat	8 laporan (pmt, posyandu, karang taruna, fkks, pokja sehat, bunda paud, literasi)	806,657,000	Kecamatan Padang Panjang Timur

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD Tahun 2026	Target 2025		Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(15)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur**	**40.00%**	**39,99 Persen**	**9,99 Perse**	**4,966,218,500**	**4,739,480,540**	**4,274,677,050**						**39,99 Persen**	**3,470,330,450**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan**	***9 jenis***	**3 jenis**	**3 jenis**	**2,717,934,500**	**2,491,196,540**	**2,053,357,050**						**3 jenis**	**1,249,010,450**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27 lembaga	9 lembaga	9 lembaga	149,929,500	149,429,500	133,430,450	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU (Dana Alokasi Umum)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Pemberdayaan Masyarakat	5 lembaga	133,430,450	Kecamatan Padang Panjang Timur

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD Tahun 2026	Target 2025		Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(15)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 unit	8 unit	6 unit	333,770,000	391,570,000	373,570,000	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU (Dana Alokasi Umum)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Pemberdayaan Masyarakat	6 unit	100,000	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 pokmas/ormas	6 pokmas/ormas	6 pokmas/ormas	2,234,235,000	1,950,197,040	1,546,356,600	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU (Dana Alokasi Umum)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Pemberdayaan Masyarakat	6 pokmas/ormas	1,115,480,000	Kecamatan Padang Panjang Timur
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Rukun Tetangga (RT)**	***107 RT***	**107 RT**	**107 RT**	**2,248,284,000**	**2,248,284,000**	**2,221,320,000**						**107 RT**	**2,221,320,000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD Tahun 2026	Target 2025		Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(15)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 lembaga (RT)	1 lembaga (RT)	1 lembaga (RT)	2,248,284,000	2,248,284,000	2,221,320,000	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU (Dana Alokasi Umum)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Lembaga Kemasyarakatan RT	1 lembaga (RT)	2,221,320,000	Kecamatan Padang Panjang Timur
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas pada Kecamatan Padang Panjang Timur**	**100%**	**9 Laporan**	**100%**	**37,000,000**	**18,010,000**	**-**						**100%**	**100,000**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah jenis kegiatan koordinasi trantib**	***6 jenis***	**2 Jenis**	**0**	**37,000,000**	**18,010,000**	**-**						**2 Jenis**	**100,000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD Tahun 2026	Target 2025		Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(15)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	324 Laporan	12 laporan	0 Laporan	37,000,000	18,010,000	-	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU (Dana Alokasi Umum)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)	1 Laporan	100,000	Kecamatan Padang Panjang Timur
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur**	**100%**	**100 Persen**	**100 Persen**	**30,000,000**	**30,000,000**	**3,200,000**						**100 Persen**	**3,300,000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah**	***15 kegiatan***	**4 kegiatan**	**1 kegiatan**	**30,000,000**	**30,000,000**	**3,200,000**						**1 kegiatan**	**3,300,000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD Tahun 2026	Target 2025		Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Semula	Menjadi	RKPD 2025	APBD 2025	Perubahan RKPD 2025			Nasional	Daerah		Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(15)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	480 orang	80 orang (Tim Ramadan Kecamatan)	0 orang	20,000,000	20,000,000	-	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU (Dana Alokasi Umum)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	Urusan Pemerintahan Umum	0 orang	100,000	Kecamatan Padang Panjang Timur
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18 dokumen	6 dokumen	4 dokumen	10,000,000	10,000,000	3,200,000	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	DAU (Dana Alokasi Umum)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah Meningkatkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis	- Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) - Urusan Pemerintahan Umum	4 dokumen	3,200,000	Kecamatan Padang Panjang Timur

Penjelasan Tabel 2.3 :

Berdasarkan tabel diatas, pada awal APBD 2025 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang mempunyai 5 program, 12 kegiatan, dan 22 sub kegiatan dengan pagu APBD awal tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 18.983.722.109,-. dan pada rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang hanya mempunyai 4 program, 9 kegiatan, dan 19 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp.17.476.863.731, bila dibandingkan dengan pagu awal terjadi penurunan anggaran sebesar Rp. 1.506.858.378,- diakibatkan adanya efisiensi anggaran.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Perubahan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 masih tetap mengakomodir usulan Musrenbang sebanyak 17 usulan. Untuk usulan Pokir pada awalnya terdapat 2 usulan namun pada Perubahan Renja 2025 terjadi pengurangan 1 usulan pokir yaitu pada Sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan Kegiatan Rehab Pos Pemuda untuk peningkatan kegiatan pemuda sebanyak 1 paket, dan untuk penambahan terdapat pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan 1 usulan pokir yaitu Operasional Posyandu Mandiri Razaki Dia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

TABEL 2.4

USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 PADA PERUBAHAN RENJA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR TAHUN 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME AWAL	VOLUME PERUBAHAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7		8
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
		KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	***Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan***		***Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun***			
			1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana (peralatan KSB)	Kel. Koto Panjang		1 paket	1 paket	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			2 Pengadaan Peralatan untuk Penunjang Posyandu (Posyandu Baru)	Kel. Koto Panjang		1 paket	1 paket	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			3 Rehab Pos Pemuda untuk peningkatan kegiatan pemuda	Kel. Koto Panjang		1 unit	0 unit	Pokir
			4 Pembuatan Gedung Serba Guna	Kel. Koto Panjang		1 unit	1 unit	Pokir
			5 Pembuatan Taman Literasi	Kel. Tanah Pak Lambik		1 paket	1 paket	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			6 Pembuatan vertikal garden sekaligus plang selamat datang kelurahan Tanah Pak Lambik	Kel. Tanah Pak Lambik		1 unit	1 unit	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		***Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan***			
			Pelatihan / Event di Kecamatan Padang Panjang Timur :					
			1 Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Kantor Camat PPT		1 lembaga LPM	1 lembaga LPM	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			2 Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di Kelurahan	Kel. Ekor Lubuk		1 lembaga Karang Taruna	1 lembaga Karang Taruna	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			3 Pelatihan budi daya tanaman cabe dan holtikultura	Kel. Ganting		20 org (kelompok tani (RT 1 ganting)	20 org (kelompok tani (RT 1 ganting)	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			4 Pelatihan Benang Sulam (menyulam)	Kel. Sigando		20 orang	20 orang	Usulan Musrenbang Prioritas 1

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME AWAL	VOLUME PERUBAHAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7		8
			5 Pelatihan Budidaya Jamur Tiram	Kel. Sigando		20 orang	20 orang	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			6 PMT STUNTING	Kel. Ekor Lubuk		10 orang	10 orang	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			7 Pelatihan peningkatan ilmu tentang adat istiadat (Karang Taruna Ngalau)	Kel. Ngalau		20 orang	20 orang	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			8 Pelatihan untuk peningkatan produksi pangan dan Hortikultura (kelompok tani & KWT)	Kel. Ngalau		8 kelompok	8 kelompok	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			9 Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah	Kel. Guguk Malintang		30 orang	30 orang	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			10 Pelatihan Public Speaking	Kel. Guguk Malintang		30 orang	30 orang	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			11 Pelatihan Pemasaran Digital untuk peningkatan kapasitas pelaku usaha di kelurahan tanah	Kel. Tanah Pak Lambik		20 orang	20 orang	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			12 Pekan kelurahan koto panjang (festival rendang)	Kel. Koto Panjang		1 kegiatan	1 kegiatan	Usulan Musrenbang
			13 Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah	Kel. Koto Katik		20 orang	20 orang	Usulan Musrenbang Prioritas 1
			14 Posyandu Mandiri Razaki	Kel. Ganting		- -	1 paket	Pokir

Sumber : Kecamatan Padang Panjang Timur 2025

Penjelasan Tabel 2.4 :

Hasil usulan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan yang sudah melalui verifikasi Bappeda maupun perangkat daerah yang masuk dalam prioritas 1 (satu), sebagai berikut:

a. Bidang Fisik, untuk OPD Kecamatan Padang Panjang Timur terdapat 4 (empat) usulan musrenbang yang masuk prioritas 1;
b. Bidang Ekonomi Produktif sebanyak 7 usulan kegiatan yaitu 1 usulan kegiatan kelurahan Ganting, 2 usulan kegiatan kel. Sigando, 1 usulan kegiatan kel. Koto Katik, 1 usulan kegiatan kel. Ngalau, dan 1 usulan kegiatan kel. Tanah Pak Lambik serta 1 usulan kel. Guguk Malintang;
c. Bidang Sosial Budaya, terdapat 6 usulan yaitu kegiatan 2 usulan kel. Ekor Lubuk, 1 usulan kel. Ngalau, 1 usulan kel. Guguk Malintang dan 1 usulan 1 kel. Koto Panjang.

Usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Padang Panjang ada 2, yaitu :

- Pembuatan Gedung Serba Guna 1 paket, dengan pengusul Mardyansah, A.Md untuk kel. Koto Panjang
- Operasional Posyandu Mandiri Rasaki Dia 1 kegiatan, dengan pengusul Kiki Anugerah Dia,SE

2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur

Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang mempunyai tugas yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur adalah:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
3. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ada di kecamatan;
5. Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sejauh ini Kecamatan Padang Panjang Timur tetap komit menjalankan tugas dan fungsinya, meskipun banyak ditemui permasalahan dan hambatan, diantaranya:

1. Belum optimalnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;
2. Belum optimalnya inovasi pelayanan publik;
3. Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk;
4. Sumber daya manusia (aparatur) di kecamatan maupun kelurahan belum optimal.

Berdasarkan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang 2025-2029, disebutkan beberapa isu strategis yang akan menentukan dan mempengaruhi arah kebijakan dan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Padang Panjang Timur, yaitu:

1) Tujuan:

“Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah d**an** Pelayanan Publik yang Inovatif”

2) Sasaran

1. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan
3. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

Hal penting yang perlu dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta peningkatan pelayanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dimasa mendatang diantaranya dengan memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan. Kendala dan upaya yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur, sebagai berikut:

Kendala

1. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam menyikapi permasalahan sampah yang ada di lingkungan;
2. Masih kurangnya sarana prasarana persampahan di lingkungan pemukiman;
3. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada;
4. Belum optimalnya keterwakilan kelompok masyarakat yang hadir dalam musrenbang;
5. Belum semua usulan musrenbang terakomodir dalam APBD;
6. Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dikarenakan terkendalam dalam pencatatan aset sesuai dengan regulasi yang ada;
7. Belum optimalnya pelatihan-pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat;
8. Belum optmalnya pelaksanaan kegiatan dikarenakan keterbatasan anggaran akibat adanya refocusing anggaran.

Upaya

1. Mengoptimalkan petugas kebersihan persampahan;
2. Memaksimalkan sarana prasarana persampahan yang ada;
3. Memaksimalkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada;
4. Menambah jumlah peserta dari unsur kelompok masyarakat dalam mengikuti musrenbang baik di tingkat kecamatan maupun keluarahan;
5. Melakukan koordinasi dengan BPKD bidang aset dalam pencatatan aset sesuai dengan regulasi yang ada;
6. Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat secara berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
7. Mengusulkan kembali anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang belum optimal pada tahun berikutnya.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Padang Panjang Timur

Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, hasil analisis pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kota Padang Panjang, identifikasi isu dan masalah mendesak, dana Indikatif, hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2025 dalam rangka menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025, maka disusunlah Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk periode 2025. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tidak jauh berbeda dengan Tujuan dan Sasaran pada rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan pada Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan Perubahan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah untuk menetapkan Prioritas Pembangunan di lingkup Kecamatan Padang Panjang Timur tahun 2025 berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi pada tahun 2025.

Mengacu pada Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, tujuan dan sasaran Perubahan Renja Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

- Tujuan :

  "Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Inovatif" dengan indikator Indeks Pelayanan Publik dengan target tahun 2025 sebesar 4,20.

  .

- Sasaran :

1. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Timur dengan target Tahun 2025 sebesar 70,10;
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan target Tahun 2025 sebesar 97,82;
3. Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan dengan indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur.

   Pada sasaran ini terjadi perubahan definisi operasional (DO) dan target, yang semula "Perbandingan jumlah anggaran partisipasi dengan total belanja langsung kecamatan dan kelurahan", menjadi "Perbandingan jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kecamatan/kelurahan" sehingga terjadi perubahan target yang semula 39,21% menjadi 39,99% pada Renja Perubahan 2025.

   Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

TABEL 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2025

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Renstra 2025	Target Renja Perubahan 2025	KET
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Inovatif	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Inovatif		Indeks Pelayanan Publik	4,20	4,20	
		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Timur	70.10	70.10	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	97.82	97.82	
		Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39.99%	39.99%	

Sumber : Kecamatan Padang Panjang Timur

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada Perubahan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2025 yang didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dan Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2025-2029, RKPD Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Pada Perubahan Renja Kecamatan Padang Panjang Tahun 2025 terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
        2) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
        3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
        4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
        1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
        2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
        3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
    e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
        2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
        3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
        1) Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel dari aplikasi SIPD berikut ini.

Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR							**19.733.398.713**	**18.983.722.109**	**16.597.389.129**							**12.237.608.009,00**	
	7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**19.733.398.713**	**18.983.722.109**	**16.597.389.129**							**12.237.608.009,00**	
	7.01.	**KECAMATAN**							**19.733.398.713**	**18.983.722.109**	**16.597.389.129**							**12.237.608.009,00**	
##	**7.01.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Timur**	**95 %**		**95 %**	**95 %**	**95 %**	**13.488.740.213**	**13.027.236.169**	**11.311.377.679**							**9.843.208.009,00**	
	7.01.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**95 %**		**95 %**	**95 %**	**95 %**	**9.405.394.813**	**9.018.801.269**	**8.263.495.984**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**8.651.923.809,00**	**Kec. PPT**
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6174 Orang/bulan		994 Orang/bulan	1078 Orang/bulan	994 Orang/bulan	9.405.394.813	9.018.801.269	8.263.495.984	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			8.651.923.809,00	Kec. PPT
	7.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**90 %**		**90 %**	**90 %**	**90 %**	**465.950.000**	**469.950.000**	**211.697.715**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**310.000.000,00**	**Kec. PPT**
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		10 Paket	36 Paket	4 Paket	17.000.000	17.000.000	10.175.400	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			5.000.000,00	Kec. PPT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	36 Paket	4 Paket	103.950.000	103.950.000	52.189.665	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			40.000.000,00	Kec. PPT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		12 Paket	108 Paket	4 Paket	31.000.000	31.000.000	9.703.650	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	Kec. PPT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan		24 Laporan	120 Laporan	12 Laporan	314.000.000	318.000.000	139.629.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			250.000.000,00	Kec. PPT
	7.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**53.335.700**	**53.093.300**	**11.437.700**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**40.000.000,00**	**Kec. PPT**
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	71 Unit		32 Unit	22 Unit	2 Unit	53.335.700	53.093.300	11.437.700	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			40.000.000,00	Kec. PPT
	7.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**90 %**		**90 %**	**90 %**	**90 %**	**2.592.464.700**	**2.661.555.100**	**2.275.889.280**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**381.449.200,00**	**Kec. PPT**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	61 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	3.120.000	3.120.000	500.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			6.000.000,00	Kec. PPT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1416 Laporan		348 Laporan	40 Laporan	12 Laporan	105.441.500	105.441.500	74.896.800	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			40.298.000,00	Kec. PPT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.483.903.200	2.552.993.600	2.200.492.480	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			335.151.200,00	Kec. PPT
	7.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**93 %**		**80 %**	**80 %**	**80 %**	**971.595.000**	**823.836.500**	**548.857.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**459.835.000,00**	**Kec. PPT**
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	276 Unit		46 Unit	55 Unit	46 Unit	217.595.000	252.865.000	210.001.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			129.835.000,00	Kec. PPT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit		100 Unit	100 Unit	50 Unit	94.000.000	49.500.000	27.380.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			30.000.000,00	Kec. PPT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	55 Unit		9 Unit	10 Unit	9 Unit	660.000.000	521.471.500	311.476.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			300.000.000,00	Kec. PPT
##	**7.01.02.**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**1.211.440.000**	**1.168.995.400**	**998.134.400**							**1.598.400.000,00**	
	7.01.02.2.01.	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan**	**4 kali**		**0 kali**	**4 kali**	**0 kali**	**30.000.000**	**30.000.000**	**-**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**30.000.000,00**	**Kec. PPT**
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000	30.000.000	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			30.000.000,00	Kec. PPT
	7.01.02.2.03.	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan**	**60 kali**		**12 kali**	**12 kali**	**12 kali**	**219.440.000**	**219.440.000**	**191.474.400**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**219.440.000,00**	**Kec. PPT**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	72 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	219.440.000	219.440.000	191.474.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			219.440.000,00	Kec. PPT
	7.01.02.2.04.	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan**	**8 Urusan**		**8 Urusan**	**10 urusan**	**10 Urusan**	**962.000.000**	**919.555.400**	**806.660.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**1.348.960.000,00**	**Kec. PPT**
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	48 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	962.000.000	919.555.400	806.660.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			1.348.960.000,00	Kec. PPT
##	**7.01.03.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur**	**39,26%**		**39,20%**	**39.99 %**	**39,21 %**	**4.966.218.500**	**4.739.480.540**	**4.284.677.050**							**706.000.000,00**	
	7.01.03.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan**	**3 Jenis**		**3 Jenis**	**3 jenis**	**3 Jenis**	**2.717.934.500**	**2.491.196.540**	**2.063.357.050**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**706.000.000,00**	**Kec. PPT**
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	54 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	149.929.500	149.429.500	133.430.450	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			200.000.000,00	Kec. PPT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	56 Unit		10 Unit	10 Unit	6 Unit	333.770.000	391.570.000	373.570.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			80.000.000,00	Kec. PPT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	42 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	2.234.235.000	1.950.197.040	1.556.356.600	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			426.000.000,00	Kec. PPT
	7.01.03.2.03.	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Rukun Tetangga (RT)**	**107 RT**		**107 RT**	**107 RT**	**107 RT**	**2.248.284.000**	**2.248.284.000**	**2.221.320.000**			-	-	-		**0,00**	**Kec. PPT**
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	2.248.284.000	2.248.284.000	2.221.320.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			0,00	Kec. PPT
##	**7.01.04.**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Penyelenggaraan Tibuntranmas pada Kecamatan Padang Panjang Timur**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**37.000.000**	**18.010.000**	**-**							**20.000.000,00**	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7.01.04.2.01.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**2 Jenis**		**2 Jenis**	**2 kegiatan**	**2 Jenis**	**37.000.000**	**18.010.000**	**-**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)**		**20.000.000,00**	**Kec. PPT**
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Laporan		12 Laporan	108 Laporan	0 Laporan	37.000.000	18.010.000	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			20.000.000,00	Kec. PPT
##	**7.01.05.**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**30.000.000**	**30.000.000**	**3.200.000**							**70.000.000,00**	
	7.01.05.2.01.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah**	**4 kegiatan**		**4 kegiatan**	**5 kegiatan**	**5 kegiatan**	**30.000.000**	**30.000.000**	**3.200.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**70.000.000,00**	**Kec. PPT**
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	670 Orang		340 Orang	80 Orang	0 Orang	20.000.000	20.000.000	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			40.000.000,00	Kec. PPT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	36 Dokumen		6 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000	10.000.000	3.200.000	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			30.000.000,00	Kec. PPT

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program yang menjadi acuan dalam pelaksanaan semua kegiatan yang mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program pada Kecamatan Padang Panjang Timur dan instansi terkait lainnya, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada Perangkat daerah Kota Padang Panjang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Selain itu Perubahan Renja Tahun 2025 telah secara penuh menerapkan klasifikasi dan nomenklatur baru sesuai ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja ini, baik proses maupun hasilnya masih jauh dari sempurna. Sehingga sebagimana pengalaman tahun- tahun sebelumnya akan terjadi penyempurnaan terhadap Perubahan Renja ini, terutama dalam rumusan program dan kegiatan. Namun demikian meskipun nanti ada kegiatan yang tidak diakomodir sepenuhnya dalam APBD karena keterbatasan anggaran atau penyebab lainnya, kami berharap agar esensi kegiatan tersebut tetap ada meskipun digabung dengan kegiatan lainnya.

Perubahan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 dalam pelaksanaan mengacu kepada mekanisme pelaksanaan rencana pembangunan serta mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Padang Panjang, 30 Juni 2025

Pelaksana Tugas
CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG

DONI RAHMAN, S.Pd.I, M.Pd.
NIP. 197807202006041012

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

KECAMATAN
PADANG PANJANG BARAT
KOTA PADANG PANJANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025 akhirnya dapat disusun sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Renja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Rencana Kerja (Renja) ini merupakan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026, sehingga memiliki peran strategis untuk pencapaian kinerja lima tahun ke depan. Semoga dengan telah tersusunnya Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang ini harapan tercapainya pembangunan yang efektif dan efisien dapat tecapai.

Padang Panjang, 30 Juni 2025

CAMAT PADANG PANJANG BARAT

ROMI AR RAHMAN, ST
NIP. 19821012 201101 1 008

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 s.d Triwulan I Tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kecamatan Padang Panjang Barat

2.4 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat

2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasiona/Provinsi

3.2 Tujuan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah

3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

BAB IV PENUTUP

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

TABEL

1. Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PEeangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
2. Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Keuangan Renja Perangkat Daerah dan Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2024
3. Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat.
4. Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025
5. Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024 Kecamatan Padang Panjang Barat
6. Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju TAhun 2026 Kota Padang Panjang Tabel 3.2 Tujuan Sasaran dan indicator Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Perubahan Rencana Kerja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Perubahan Rencana Kerja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Rencana Kerja -SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Perubahan Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

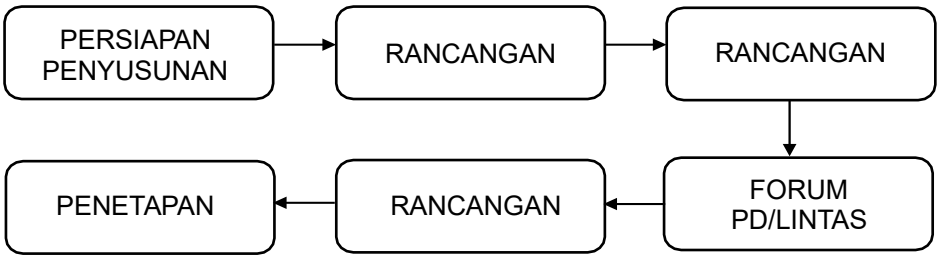
Proses penyusunan rancangan awal Perubahan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 2025-2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2024. Tahun 2025 merupakan tahun pertama perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang yang berpedoman pada RPJMD 2025-2029. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang serta sejalan dengan tujuan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah”

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan melalui tahapan, meliputi :

1. Persiapan penyusunan
   Meliputi pembentukan tim penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, Pengumpulan hasil evaluasi Perubahan Rencana Kerja 2025, pengendalian kegiatan tahun 2025.
2. Tahap perumusan rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, meliputi :
   a. Pengolahan data dan informasi
   b. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
   c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah
   d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
   e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
   f. Perumusan tujuan dan sasaran
   g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
   h. Perumusan kegiatan prioritas
   i. Penyajian awal dokumen rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
   j. Penyempurnaan rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
   k. Pembahasan forum Perangkat Daerah
3. Penyusunan rancangan
   Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Tahun Anggaran 2025, Masukan dari pelaksana kegiatan pembahasan oleh tim Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang .
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
5. Tahap penyajian rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam bentuk rancangan akhir
6. Tahap Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah

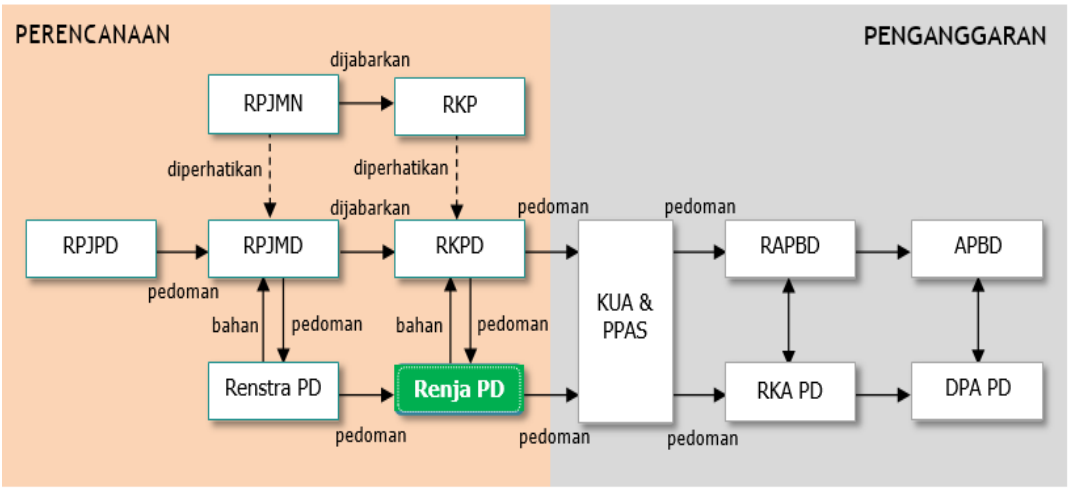
GAMBAR 1.1

Tahapan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang 2025-2029, untuk melihat hubungan antar dokumen dapat kita lihat pada tabel berikut:

Gambar 1.2
Hubungan antar Dokumen terhadap Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2024 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 9);
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang adalah untuk untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025.
2. Sebagai salah satu dokumen acuan dalam penyusunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perubahan PD Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II **Hasil Evaluasi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025**

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja tahun lalu (2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2025) serta keterkaitan dengan pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III **Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun n dan Perkiraan Maju tahun n+1

Bab IV **Penutup**

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kualitas Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja tahun sebelumnya, dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025, perlu diperhatikan hasil evaluasi Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 terhadap capaian Perubahan Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Triwulan I Tahun 2025. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 terhadap target kinerja Tahun 2025. Hal ini juga perlu dilihat hasil evaluasi terhadap capaian Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dengan kinerja Tahun 2025 (tahun ke-dua).

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2025-2029 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Secara umum, pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2024, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik telah mencapai 100%. Begitu juga berdasarkan hasil reviu berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 realisasi capaian kinerja mencapai 100%.

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Padang Panjang

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran (target s/d triwulan yang di evaluasi)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran s/d Tahun 2024		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
										I		II		III		IV								
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100 %		15
		KECAMATAN			**19.561.940.492**	-	-	-	-		**4.400.041.268**		**4.722.712.186**		**4.637.639.615**		**6.508.875.845**	-	**18.719.714.527**		**18.719.714.527**		95,69%	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat**	**100 Persen**	**11.128.717.882**	-	-	-	-	**100 Persen**	**2.580.675.923**	**100 Persen**	**3.334.375.906**	**100 Persen**	**2.296.800.156**	**100 Persen**	**3.611.109.767**	-	**10.891.330.230**	**100 Persen**	**10.891.330.230**	**100 Persen**		-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**90 Persen**	**8.875.892.682**	-	-	-	-	**90 Persen**	**2.131.698.178**	**90 Persen**	**2.815.854.885**	**90 Persen**	**1.826.888.200**	**90 Persen**	**2.093.488.469**	-	**8.867.929.732**	**90 Persen**	**8.867.929.732**	**90 Persen**		-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1125 Orang/ bulan	8.875.892.682					1125 Orang/ bulan	2.131.698.178	1125 Orang/ bulan	2.815.854.885	1125 Orang/ bulan	1.826.888.200	1125 Orang/ bulan	2.093.488.469		8.867.929.732	1125 Orang/ bulan	8.867.929.732	1125 Orang/ bulan	99,91%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**	**90 Persen**	**36.180.000**	-	-	-	-	**90 Persen**	-	**90 Persen**	**31.000.000**	**90 Persen**	**2.180.000**	**90 Persen**	-	-	**33.180.000**	**90 Persen**	**33.180.000**	**90 Persen**		-
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket	36.180.000					62 Paket	-	62 Paket	31.000.000	62 Paket	2.180.000	62 Paket	-		33.180.000	75 Paket	33.180.000	75 Paket	91,71%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**90 Persen**	**458.444.000**	-	-	-	-	**90 Persen**	**105.577.025**	**90 Persen**	**65.796.660**	**90 Persen**	**158.245.515**	**90 Persen**	**84.098.330**	-	**413.717.530**	**90 Persen**	**413.717.530**	**90 Persen**		-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	29.850.900					36 Paket	7.184.700	36 Paket	4.562.400	36 Paket	3.875.300	36 Paket	6.331.500		21.953.900	36 Paket	21.953.900	36 Paket	73,55%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	102.314.500					36 Paket	38.847.905	36 Paket	19.067.975	36 Paket	21.992.320	36 Paket	26.325.700		106.233.900	36 Paket	106.233.900	36 Paket	103,83%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	21.770.600					36 Paket	3.492.700	36 Paket	3.634.000	36 Paket	3.412.600	36 Paket	6.787.450		17.326.750	36 Paket	17.326.750	36 Paket	79,59%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	304.508.000					30 Laporan	56.051.720	30 Laporan	38.532.285	30 Laporan	128.965.295	30 Laporan	44.653.680		268.202.980	120 Laporan	268.202.980	120 Laporan	88,08%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100 Persen**	**145.558.000**	-	-	-	-	**100 Persen**	**23.800.000**	**100 Persen**	**119.180.000**	**100 Persen**	-	**100 Persen**	-	-	**142.980.000**	**100 Persen**	**142.980.000**	**100 Persen**		-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit	145.558.000					12 Unit	23.800.000	12 Unit	119.180.000		-		-	12 Unit	142.980.000	28 Unit	142.980.000	28 Unit	98,23%	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-						-		-		-				-	1 Unit	-	1 Unit	0,00%	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-						-		-		-				-	1 Unit	-	1 Unit	0,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**90 Persen**	**1.061.408.200**	-	-	-	-	**90 Persen**	**223.412.032**	**90 Persen**	**250.262.861**	**90 Persen**	**239.518.924**	**90 Persen**	**1.022.314.563**	-	**1.022.314.563**	**90 Persen**	**1.022.314.563**	**90 Persen**		-
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	108 Laporan	1.996.800					50 Laporan	500.000	50 Laporan	500.000	25 Laporan	250.000	25 Laporan	-		1.250.000	108 Laporan	1.250.000	108 Laporan	62,60%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	217 Laporan	93.561.000					6 Laporan	26.873.374	12 Laporan	34.935.208	18 Laporan	13.650.181	24 Laporan	18.102.000		93.560.763	217 Laporan	93.560.763	217 Laporan	100,00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 Laporan	965.850.400					3 laporan	196.038.658	6 laporan	214.827.653	9 laporan	225.618.743	12 laporan	291.018.746		927.503.800	108 Laporan	927.503.800	108 Laporan	96,03%	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**90 Persen**	**551.235.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**90 Persen**	**96.188.688**	**90 Persen**	**52.281.500**	**90 Persen**	**69.967.517**	**90 Persen**	**411.208.405**	**-**	**411.208.405**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47 Unit	165.497.000					47 Unit	39.230.900	47 Unit	43.326.500	47 Unit	28.628.950	47 Unit	45.115.750		156.302.100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 unit	70.550.000					21 unit	7.395.000	21 unit	8.955.000	21 unit	6.015.000	21 unit	23.655.000		46.020.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30.000.000					1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit		1 Unit	-		-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	285.188.000					13 Unit	49.562.788	13 Unit	-	13 Unit	35.323.567	13 Unit	123.999.950		208.886.305
	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat**	**100 Persen**	**4.339.381.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 Persen**	**901.006.595**	**100 Persen**	**805.614.480**	**100 Persen**	**1.236.149.899**	**100 Persen**		**-**	**4.107.797.302**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan**	**4 koordinasi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 koordinasi**	**-**	**4 koordinasi**	**-**	**4 koordinasi**	**-**	**4 koordinasi**	**4.107.797.302**	**-**	**-**
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen	-					9 Dokumen	-	9 Dokumen	-	9 Dokumen	-	9 Dokumen	-		-
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan**	**12 kali**	**1.603.880.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12 kali**	**328.783.970**	**12 kali**	**390.766.137**	**12 kali**	**383.728.279**	**12 kali**	**1.623.715.194**	**-**	**1.623.715.194**
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	680 Dokumen	1.603.880.800					162 Dokumen	328.783.970	324 Dokumen	390.766.137	510 Dokumen	383.728.279	680 Dokumen	520.436.808		1.623.715.194
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan**	**8 Urusan**	**2.735.500.300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 Urusan**	**572.222.625**	**8 Urusan**	**414.848.343**	**8 Urusan**	**852.421.620**	**8 Urusan**		**-**	**2.484.082.108**
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	2.735.500.300					8 Laporan	572.222.625	8 Laporan	414.848.343	8 Laporan	852.421.620	8 Laporan	644.589.520		2.484.082.108
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan, kelurahan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamat an/Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat**	**26 Persen**	**4.062.650.560**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26 Persen**	**917.039.750**	**26 Persen**	**576.571.250**	**26 Persen**	**1.093.867.510**	**26 Persen**	**2.484.082.108**	**-**	**3.482.027.970**
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan**	**3 jenis**	**1.191.548.750**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 jenis**	**221.402.750**	**3 jenis**	**49.411.250**	**3 jenis**	**153.727.510**	**3 jenis**		**-**	**617.198.170**
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 Lembaga Kemasyarakatan	199.675.150					9 Lembaga Kemasyarakatan	173.938.750	9 Lembaga Kemasyarakatan	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	-	9 Lembaga Kemasyarakatan	-		173.938.750
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	269.320.000					8 Unit	-	8 Unit	-	8 Unit		8 Unit	45.000.000		45.000.000
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	722.553.600					8 Pokmas / Ormas	47.464.000	8 Pokmas / Ormas	49.411.250	8 Pokmas / Ormas	153.727.510	8 Pokmas / Ormas	147.656.660		398.259.420
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Jumlah Rukun Tetangga (RT)**	**133 RT**	**2.871.101.810**					**133 RT**	**695.637.000**	**133 RT**	**527.160.000**	**133 RT**	**940.140.000**	**133 RT**	**173.938.750**	**-**	**2.864.829.800**
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	2.871.101.810					1 Lembaga Kemasyarakatan	695.637.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	527.160.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	940.140.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	701.892.800		2.864.829.800

	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Ketentraman Ketertiban Umum pada Kecamatan Padang Panjang Barat**	**10 laporan**	**20.191.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 laporan**	**1.319.000**	**10 laporan**	**6.150.550**	**10 laporan**	**3.643.250**	**10 laporan**	**398.259.420**	**-**	**15.424.550**	**10 laporan**	**15.424.550**	**10 laporan**		**-**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah jenis kegiatan koordinasi trantib**	**2 jenis**	**20.191.100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 jenis**	**1.319.000**	**2 jenis**	**6.150.550**	**2 jenis**	**3.643.250**	**2 jenis**	**2.864.829.800**	**-**	**15.424.550**	**2 jenis**	**15.424.550**	**2 jenis**		**-**
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	108 Laporan	20.191.100					108 Laporan	1.319.000	108 Laporan	6.150.550	108 Laporan	3.643.250	108 Laporan	4.311.750		15.424.550	108 Laporan	15.424.550	108 Laporan	76,39%	
	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Barat**	**100 Persen**	**10.999.850**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 Persen**	**-**	**100 Persen**	**-**	**100 Persen**	**7.178.800**	**100 Persen**	**15.424.550**	**-**	**223.134.475**	**100 Persen**	**223.134.475**	**100 Persen**	**217**	**-**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah**	**5 Kegiatan**	**10.999.850**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 Kegiatan**	**-**	**5 Kegiatan**	**-**	**5 Kegiatan**	**7.178.800**	**5 Kegiatan**	**15.424.550**	**-**	**223.134.475**	**5 Kegiatan**	**223.134.475**	**5 Kegiatan**	**217**	**-**
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	170 Orang	1.000.000					0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	170 Orang	215.955.675		215.955.675	170 Orang	215.955.675	170 Orang	21595,57%	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen	9.999.850					0 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	7.178.800	2 Dokumen	-		7.178.800	6 Dokumen	7.178.800	6 Dokumen	71,79%	

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bawah untuk pelaksanaan kinerja pada Tahun 2024 Kecamatan Padang Padang Panjang diatas dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang melaksanakan 5 Program Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Program Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi dengan target kinerja 100 % capaian kinerja tahun 2023 sebesar 100 % persentasenya 100%, program ini terdiri dari 5 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan persentase capaian kinerjanya 100%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 9 % dengan capaian 93 % persentase capaian 100 %. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 subkegiatan yang dilaksanakan persentasi capaian 100 %.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan indikator kinerja Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamat an/Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 43 % dengan capaian 32.34 % persentase capaian 77 %. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dan 4 subkegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100 %.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Presentase tingkat koordinasi Trantibum dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 93 % dengan capaian 93 % persentase capaian 100 %. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 subkegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100 %.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator kinerja Persentase Fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum dengan target kinerja tahun 2023 sebesar 93 % dengan capaian 93 % persentase capaian 100 %. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 subkegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100 %.

2. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan anggaran tahun 2024 beserta perkiraan target realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dan perkiraan Realisasi s/d Tahun 2024
Perangkat Daerah : Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
						Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2023) (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2024)
1					*2*	*6*	*7*	*8 = 7/6*	*9*	*10 = (5+7+9)*	*11 = 10/4*
						Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024					
7					**PENUNJANG URUSAN**						
7	**01**				**FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**18.254.003.430**	**17.827.175.773**	97,66%	**19.082.532.970**	**19.082.532.970**	100,00%
7	**01**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**10.265.837.780**	**10.034.868.419**	**97,75%**	**10.649.310.360**	**10.649.310.360**	**100,00%**
7	**01**	**01**	**2.02**		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***8.157.962.812***	***8.070.297.486***	***98,93%***	***8.381.305.160***	***8.381.305.160***	***100,00%***
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.157.962.812	8.070.297.486	98,93%	8.381.305.160	8.381.305.160	100,00%
7	**01**	**01**	**2.05**		***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	**-**	**-**	***0,00%***	***36.180.000***	***36.180.000***	***100,00%***
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	0,00%	36.180.000	36.180.000	100,00%
7	**01**	**01**	**2.06**		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***664.895.440***	***623.633.019***	***93,79%***	***458.444.000***	***458.444.000***	***100,00%***
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.621.650	26.198.750	82,85%	29.850.900	29.850.900	100,00%
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.512.100	101.527.750	94,43%	102.314.500	102.314.500	100,00%
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.051.150	35.696.000	81,03%	21.770.600	21.770.600	100,00%
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	481.710.540	460.210.519	95,54%	304.508.000	304.508.000	100,00%
7	**01**	**01**	**2.07**		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	**-**	**-**	***0,00%***	***145.558.000***	***145.558.000***	***100,00%***
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				145.558.000	145.558.000	100,00%
7	**01**	**01**	**2.08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***1.086.329.778***	***1.019.756.609***	***93,87%***	***1.061.408.200***	***1.061.408.200***	***100,00%***
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100,00%	1.996.800	1.996.800	100,00%
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.779.378	71.901.889	78,34%	93.561.000	93.561.000	100,00%
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	993.050.400	946.354.720	95,30%	965.850.400	965.850.400	100,00%
7	**01**	**01**	**2.09**		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***356.649.750***	***321.181.305***	***90,06%***	***566.415.000***	***566.415.000***	***100,00%***
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	183.199.750	156.684.900	85,53%	165.497.000	165.497.000	100,00%
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.100.000	55.701.250	95,87%	70.550.000	70.550.000	100,00%
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	0,00%	45.180.000	45.180.000	100,00%
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.350.000	108.795.155	94,32%	285.188.000	285.188.000	100,00%
7	**01**	**02**			***Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik***	**4.244.443.150**	**4.120.225.506**	**97,07%**	**4.339.381.100**	**4.339.381.100**	**100,00%**
7	**01**	**02**	**2.03**		**Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**1.663.661.700**	**1.625.774.506**	***97,72%***	**1.603.880.800**	**1.603.880.800**	***100,00%***

7	01	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.663.661.700	1.625.774.506	97,72%	1.603.880.800	1.603.880.800	100,00%
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**-**	**-**	***0,00%***	**-**	**-**	***0,00%***
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	0,00%			0,00%
7	**01**	**02**	**2.04**		**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**2.580.781.450**	**2.494.451.000**	***96,65%***	**2.735.500.300**	**2.735.500.300**	***100,00%***
7	01	02	2.04	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.580.781.450	2.494.451.000	96,65%	2.735.500.300	2.735.500.300	100,00%
7	**01**	**03**			***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	**3.653.553.200**	**3.594.434.723**	**98,38%**	**4.062.650.560**	**4.062.650.560**	**100,00%**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**798.905.650**	**750.436.373**	***93,93%***	**1.191.548.750**	**1.191.548.750**	***100,00%***
7	01	03	2.02	0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	187.592.300	177.178.023	94,45%	199.675.150	199.675.150	100,00%
7	01	03	2.02	0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	150.000.000	148.781.100	99,19%	269.320.000	269.320.000	100,00%
7	01	03	2.02	0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	461.313.350	424.477.250	92,01%	722.553.600	722.553.600	100,00%
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**2.854.647.550**	**2.843.998.350**	***99,63%***	**2.871.101.810**	**2.871.101.810**	***100,00%***
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.854.647.550	2.843.998.350	99,63%	2.871.101.810	2.871.101.810	100,00%
7	**01**	**04**			***Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum***	**44.316.850**	**36.541.875**	**82,46%**	**20.191.100**	**20.191.100**	**100,00%**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**44.316.850**	**36.541.875**	***82,46%***	**20.191.100**	**20.191.100**	***100,00%***
7	01	04	2.01	0001	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	44.316.850	36.541.875	82,46%	20.191.100	20.191.100	100,00%
7	**01**	**05**			***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	**45.852.450**	**41.105.250**	**89,65%**	**10.999.850**	**10.999.850**	**100,00%**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**45.852.450**	**41.105.250**	***89,65%***	**10.999.850**	**10.999.850**	***100,00%***
7	01	05	2.01	0004	Sub Kegiatan Pembinaan Keurukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	30.677.850	28.821.250	93,95%	1.000.000	1.000.000	100,00%
7	01	05	2.01	0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.174.600	12.284.000	80,95%	9.999.850	9.999.850	100,00%

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, capaian kinerja tahun anggaran 2023 dapat terlaksana dengan baik dengan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan. Dari sub kegiatan tersebut rata-rata mencapai realisasi keuangan diatas 80 % tetapi ada 1 sub kegiatan yang tidak mencapai realisasi sampai dengan 80 %, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (63,08%). Biaya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran tagihan air ke PDAM dan tagihan listrik ke PLN, dimana pembayaran dilakukan sesuai dengan tagihan pemakaian air dan listrik per bulannya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang adalah melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kecamatan dan Kelurahan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran, target evaluasi capaian kinerja sasaran "Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan" dengan indikator kinerja sasaran yakni, "Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif" untuk tahun 2023 dengan target sebesar 90%. Disamping itu juga dilakukan pengukuran terhadap capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian (Tahun)		Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	*3*	*4*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
T	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif			93%	95%			93%	95%			
S	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan			39%	42%			39%	42%			
IP	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan			39%	42%			39%	42%			
S	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat			92%	93%			92%	93%			
IP	Presentase tingkat layanan			92%	93%			92%	93%			
IP	Angka Tingkat Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			92%	93%			92%	93%			

IP	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan			92%	93%			92%	93%			
T	Nilai penyelenggaraan Pelayanan Publik					90%	93%			90%	93%	
S	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan					39,20%	39,50%			39,20%	39,50%	
IP	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan					24%	26%			24%	26%	
S	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat					97,90%	98,00%			97,90%	98,00%	
IP	Presentase tingkat layanan					90%	93%			90%	93%	
IP	Persentase penurunan tingkat pelanggaran ketenteraman ketertiban umum					10 Laporan	8 Laporan			10 Laporan	8 Laporan	
IP	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan					100%	100%			100%	100%	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan “Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga masyarakat Kecamatan dalam Pembangunan” memiliki 1 indikator kinerja yaitu
   a. Indikator Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2022 dengan presentase 93 % naik menjadi presentase 95 %
2. Sasaran Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :
   a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan, kelurahan, dengan Indikator “Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan”. Pada tahun 2023 adalah sebesar 42% mengalami kenaikan menjadi 39 % dari tahun 2022
   b. Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan, dengan Indikator “Nilai Survey Kepuasan Masyarakat”. Pada tahun 2023, realisasi dari indikator ini adalah sebesar 93 % capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yakni sebesar 92 %.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

Tujuan nasional seperti yang dimaksud didalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerderkaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka usaha pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, peradaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan yang adil dan merata.

Maka untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di kecamatan dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2016 dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan kelurahan. Adapun kedudukan, tugas dan wewenang kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan di wilayah kerjanya.
2. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah kota, diupimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasaran dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggarakan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Selain tugas sebagai mana dimaksud diatas camat juga melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi; perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang banyak dipengaruhi oleh permasalahan yang terjadi di

masyarakat. Adanya masyarakat yang masih belum memiliki keahlian dan keterampilan dalam rangka menurunkan jumlah pengangguran yang ada di lingkungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang . Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang masuk dalam kategori hampir miskin, mengusulkan untuk dimasukkan dalam kategori keluarga miskin dengan harapan mendapat bantuan tiap bulannya

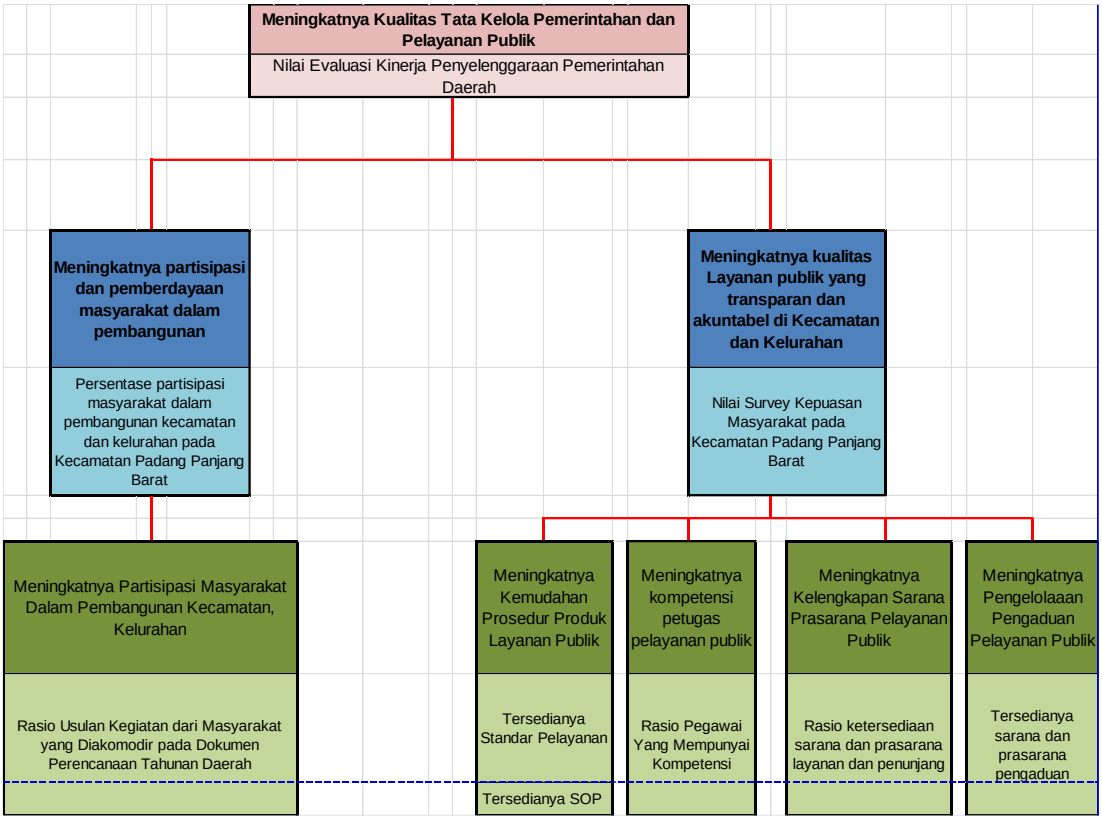
Selain itu pengembangan dan penerapan nilai-nilai agama dan budaya yang islami di Kota Padang Panjang umumnya dan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang pada khususnya saat ini memang belum optimal. Beberapa hal yang dapat diidentifikasikan antara lain masih ditemukannya tindakan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Belum terlaksananya tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan

TABULASI MASALAH		
Masalah	**Penyebab Masalah**	**Akar Masalah**
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	masih belum optimalnya perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah	masih belum optimalnya sinkronisasi dokumen Kinerja antara perencanaan dengan pelaporan
		belum optimalnya monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah
Pelayanan Publik	Belum optimalnya kelembagaan dan regulasi kebijakan layanan publik	Belum tersedianya SOP/Panduan Rinci
		Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan
	Belum optimalnya inovasi pelayanan publik	Perencanaan dan tata kelola inovasi
		Monitoring dan Evaluasi
Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat	Belum optimalnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi
		Masih kurangnya dukungan lembaga masyarakat dalam pembangunan
		Belum Tepatnya Managemen SDM Pemberdayaan Masyarakat
	Belum Optimalnya Koordinasi implementasi kebijakan Pemerintah	Belum sinkron dan validnya data & informasi
		Belum lengkapnya SOP dan regulasi

Gambar 2.1
POHON MASALAH
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG



Isu strategis pembangunan Kota Padang Panjang untuk penentuan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel tabel berikut:

Tabel 2.5
Isu-isu Strategis Pembangunan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang
Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	Belum optimalnya inovasi pelayanan publik	Efisiensi energi, pengurangan emisi dari aktivitas pemerintahan, digitalisasi ramah lingkungan	Tuntutan pelayanan berbasis digital & ramah lingkungan	Reformasi birokrasi, pelayanan publik digital	Integrasi layanan antar daerah	Optimalisasi Pelayanan Publik
	Belum optimalnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Pengurangan kesenjangan sosial, inklusivitas, pembangunan berkelanjutan	Agenda SDGs (pilar sosial)	Pemberdayaan masyarakat, penguatan desa	Sinergi antar daerah dalam pembangunan berbasis masyarakat	Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
	Belum Optimalnya Koordinasi implementasi kebijakan Pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penguatan kelembagaan	Good governance, akuntabilitas publik	Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan	Harmonisasi program antar daerah	

Sumber: Musrenbang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2024

Secara umum isu utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Berdasarkan reviu penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang selama periode sebelumnya, serta berdasarkan permasalahan dan hambatan yang ada, dapat diidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang , sebagai berikut:

a. Belum optimalnya inovasi pelayanan public
b. Belum optimalnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
c. Belum Optimalnya Koordinasi implementasi kebijakan Pemerintah

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan awal RKPD, maka ada beberapa program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dijadikan program dan kegiatan prioritas kedua. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024. Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dengan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025

KODE					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
					PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1					2	3	7	4	5	2	3	7	4	5	8
					KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT										
7					**Urusan Kewilayahan**										
7	**01**				**Kecamatan**				**18.746.526.040**					**19.423.040.682**	
7	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**		**12.414.942.150**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**		**12.383.814.088**	
7	**01**	**01**			**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan dan Kelurahan**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**8.453.928.480**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan dan Kelurahan**	**Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**8.165.987.501**	
7	01	01	2.02		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 orang/bulan	8.453.928.480	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		8.165.987.501	
					Kecamatan	Kecamatan			8.453.928.480	Kecamatan	Kecamatan			8.165.987.501	
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			-	
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			-	
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			-	
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			-	
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			-	
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			-	
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			-	
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			-	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan dan Kelurahan**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**650.345.534**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan dan Kelurahan**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**680.879.103**	
7	01	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	31.579.934	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	31.040.200	
					Kecamatan	Kecamatan			9.000.000	Kecamatan	Kecamatan				
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			2.499.200	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			2.500.000	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			2.499.900	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			5.073.750	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			2.508.800	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			2.495.100	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			2.503.284	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			2.499.900	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				
7	01	01	2.06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	193.812.300	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	174.795.703	
					Kecamatan	Kecamatan			60.040.100	Kecamatan	Kecamatan				
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			11.878.050	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			17.500.050	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			17.477.100	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			16.914.600	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			17.480.800	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			17.497.900	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			17.523.700	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			17.500.000	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				

7	01	01	2.06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	52.188.300	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	52.188.200	
					Kecamatan	Kecamatan			17.662.000	Kecamatan	Kecamatan				
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			3.212.750	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			4.500.000	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			4.500.600	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			4.500.250	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			4.508.700	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			4.495.400	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			4.308.600	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			4.500.000	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				
7	01	01	2.06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	372.765.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	422.855.000	
					Kecamatan	Kecamatan			256.380.000	Kecamatan	Kecamatan				
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			12.000.000	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			13.998.000	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			14.010.000	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			14.010.000	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			14.070.000	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			13.992.000	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			20.310.000	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			13.995.000	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				
7	**01**	**01**	**2.07**		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**162.180.000**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**101.500.000**	
7	01	01	2.07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit mobil, 10 unit motor	70.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit mobil, 10 unit motor	-	
					Kecamatan	Kecamatan			70.000.000	Kecamatan	Kecamatan			-	
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			-	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			-	
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			-	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			-	
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			-	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			-	
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			-	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			-	
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			-	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			-	
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			-	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			-	
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			-	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			-	
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			-	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			-	
7	01	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit Laptop/PC, 20 Unit Printer	92.180.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit Laptop/PC, 20 Unit Printer	101.500.000	
					Kecamatan	Kecamatan			92.180.000	Kecamatan	Kecamatan				
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				

7	**01**	**01**	**2.08**		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**2.534.109.136**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**2.516.058.084**	
7	01	01	2.08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	
					Kecamatan	Kecamatan			2.000.000	Kecamatan	Kecamatan				
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			-	
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			-	
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			-	
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			-	
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			-	
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			-	
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			-	
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			-	
7	01	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	102.157.136	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	102.156.084	
					Kecamatan	Kecamatan			29.017.076	Kecamatan	Kecamatan				
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			8.055.104	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			8.393.360	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			15.006.000	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			10.106.132	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			10.593.380	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			10.532.640	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			4.453.500	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			5.999.944	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				
7	01	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan (35 PH, THL)	2.429.952.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan (35 PH, THL)	2.411.902.000	
					Kecamatan	Kecamatan			2.429.952.000	Kecamatan	Kecamatan				
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				
7	**01**	**01**	**2.09**		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**614.379.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**919.389.400**	
7	01	01	2.09	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4	255.853.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47 Unit Kendaraan Roda 2, 2 Unit Kendaraan Roda 4	337.843.000	
					Kecamatan	Kecamatan			100.142.000	Kecamatan	Kecamatan				
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			19.980.000	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			19.244.000	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			19.996.000	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			20.000.000	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			20.000.000	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			19.775.000	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			16.720.000	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			19.996.000	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				

7	01	01	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	98.770.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	107.820.000	
					Kecamatan	Kecamatan			28.670.000	Kecamatan	Kecamatan				
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			8.810.000	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			8.700.000	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			8.710.000	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			8.750.000	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			8.750.000	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			8.750.000	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			8.750.000	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			8.880.000	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				
7	01	01	2.09	0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	224.756.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	174.328.000	
					Kecamatan	Kecamatan			129.456.000	Kecamatan	Kecamatan				
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			12.028.000	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			11.904.000	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			11.904.000	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			11.656.000	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			12.000.000	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			12.000.000	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			11.904.000	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			11.904.000	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	35.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	299.398.400	
					Kecamatan	Kecamatan			35.000.000	Kecamatan	Kecamatan				
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				
7	**01**	**02**			**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**		**Presentase tingkat layanan**		**2.929.154.890**	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**		**Presentase tingkat layanan**		**1.479.596.129**	
7	**01**	**02**	**2.03**		**Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		**Terlaksananya Koordinasi**	**9 Kelurahan, 50 oran, 8 sarana)**	**186.816.500**	**Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		**Terlaksananya Koordinasi**	**9 Kelurahan, 50 oran, 8 sarana)**	**186.555.800**	
7	01	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	680 dokumen (56 Laporan Petugas Kebersihan/bulan, 8 Becak motor)	186.816.500	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	680 dokumen (56 Laporan Petugas Kebersihan/bulan, 8 Becak motor)	186.555.800	
					Kecamatan	Kecamatan			-	Kecamatan	Kecamatan				
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			18.736.600	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			21.117.700	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			20.120.200	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			33.343.000	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			23.728.300	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			21.198.000	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			21.569.600	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			27.003.100	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				

7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan**	**1 Koordinasi**	**31.760.238**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**		**Terselenggaranya Koordinasi Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan**	**1 Koordinasi**	**6.759.900**	
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen (kegiatan pelatihan)	31.760.238	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen (kegiatan pelatihan)	6.759.900	
					Kecamatan	Kecamatan			31.760.238	Kecamatan	Kecamatan			-	
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			-	
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			-	
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			-	
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			-	
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			-	
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			-	
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			-	
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			-	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**6 Urusan**	**2.710.578.152**	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**6 Urusan**	**1.286.280.429**	
7	01	02	2.04	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah lembaga yang difasilitasi	8 Laporan (1 Forum, 520 Kader, 18 Lembaga, 9 pemenang, 6 tingkatan pembinaan) 8 Laporan	2.710.578.152	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan (1 Forum, 520 Kader, 18 Lembaga, 9 pemenang, 6 tingkatan pembinaan)	1.286.280.429	
					Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	149.479.600	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan		
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	446.478.700	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan		
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	223.223.000	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan		
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	322.952.400	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan		
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	226.523.852	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan		
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	140.361.000	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan		
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	432.062.500	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan		
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	263.512.800	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan		
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan	505.984.300	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	8 Laporan		

7	**01**	**03**			**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**		**Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamtan/kelurahan**		**3.321.952.150**	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**		**Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamtan/kelurahan**		**5.474.764.815**	
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Terlaksanaknya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan**	**3 jenis**	**471.237.100**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**Terlaksanaknya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan**	**3 jenis**	**2.624.562.865**	
7	01	03	2.02	0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakatan	204.534.850	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga kemasyarakatan	211.484.250	
					Kecamatan	Kecamatan			75.000.000	Kecamatan	Kecamatan				
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			16.775.000	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			13.999.900	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			14.034.950	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			15.990.900	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			13.999.850	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			18.979.400	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			15.755.000	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			19.999.850	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				
7	01	03	2.02	0002	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit		Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	359.000.000	
					Kecamatan	Kecamatan			-	Kecamatan	Kecamatan				
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			-	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			-	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			-	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			-	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			-	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			-	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			-	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			-	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				
7	01	03	2.02	0003	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/ ormas (9 lembaga, 8 lokasi, 3 pemenang, 1 kegiatan)	266.702.250	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/ ormas (9 lembaga, 8 lokasi, 3 pemenang, 1 kegiatan)	2.054.078.615	
					Kecamatan	Kecamatan			150.695.450	Kecamatan	Kecamatan				
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			13.960.000	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			14.010.000	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			14.000.000	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			18.036.800	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			14.000.000	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			13.990.000	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			14.000.000	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			14.010.000	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diberdayakan**	**133 RT**	**2.850.715.050**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang diberdayakan**	**133 RT**	**2.850.201.950**	
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan (133 rt)	2.850.715.050	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan (133 rt)	2.850.201.950	
					Kecamatan	Kecamatan			4.000.000	Kecamatan	Kecamatan				
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			477.480.000	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			228.360.000	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				

					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			373.680.000	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			251.100.000	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			124.750.500	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			498.240.000	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			373.680.000	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			519.424.550	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				
7	**01**	**04**			**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**		**Persentase penurunan tingkat pelanggaran ketenteraman ketertiban umum**		**30.477.000**	**Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**		**Persentase penurunan tingkat pelanggaran ketenteraman ketertiban umum**		**30.477.000**	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 jenis**	**30.477.000**	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 jenis**	**30.477.000**	
7	01	04	2.01	0001	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	30.477.000	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	30.477.000	
					Kecamatan	Kecamatan			6.000.000	Kecamatan	Kecamatan				
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			3.000.000	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			3.000.000	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			3.000.000	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			3.517.000	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			3.000.000	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			2.960.000	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			3.000.000	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			3.000.000	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				
7	**01**	**05**			**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan**		**49.999.850**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan**		**54.388.650**	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**2 jenis**	**49.999.850**	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**2 jenis**	**54.388.650**	
7	01	05	2.01	0004	Sub Kegiatan Pembinaan Keurukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 orang	40.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Keurukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 orang	39.994.000	
					Kecamatan	Kecamatan			40.000.000	Kecamatan	Kecamatan				
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan			-	Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan			-	Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan			-	Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan			-	Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan			-	Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan			-	Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			-	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan			-	Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				

7	01	05	2.01	0008	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	9.999.850	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	14.394.650	
					Kecamatan	Kecamatan			9.999.850	Kecamatan	Kecamatan			10.000.000	
					Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				Kelurahan Silaing Bawah	Kelurahan				
					Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				Kelurahan Silaing Atas	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				Kelurahan Pasar Usang	Kelurahan				
					Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				Kelurahan Bukit Surungan	Kelurahan				
					Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				Kelurahan Pasar Baru	Kelurahan				
					Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				Kelurahan Balai-Balai	Kelurahan				
					Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan			-	Kelurahan Tanah Hitam	Kelurahan				
					Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				Kelurahan Kampung Manggis	Kelurahan				

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dalam proses penyusunan perencanaan telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Pada Musrenbang RKPD ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang selaku Organisasi Perangkat Daerah diantaranya seperti tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamat an/Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan			
	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
1	Event Pertandingan Bola Voli	Silaing Atas	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 Paket	15.000.000	Terbatasnya kemampuan generasi muda melaksanakan event pertandingan bola volly yang diikuti oleh club Volly se Kota Padang Panjang, maka diperlukan bantuan biaya pelaksanaan event bola volly
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelompok Siaga Bencana	Kampung Manggis	Jumlah peralatan yang disediakan	1 Paket	8.000.000	Kurangnya Sarana Prasarana Kelompok Siaga Bencana (KSB) Saat Turun Lapangan dalam penanggulangan bencana di kelurahan kampung manggis Untuk Itu diperlukan Perlengkapan dan

						Peralatan KSB
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelompok Siaga Bencana	Balai Balai	Jumlah peralatan yang disediakan	1 Paket	8.000.000	terkendalanya tugas -tugas KSB dalam mengatasi dampak cuaca ekstreame dan bencana tak terduga sehingga dibutuhkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana (Kelurahan Tanggung Bencana)
4	Pengadaan Mobiler Poskeskel	Balai Balai	Jumlah peralatan yang disediakan	1 Paket	14.000.000	kurangnya sarana dan prasarana pendukung Puskeskel di Kelurahan Balai - Balai sehingga dibutuhkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskeskel di Kelurahan
5	Pengadaan Pompa Bandar	Bukit Surungan	Jumlah peralatan yang disediakan	1 set	20.000.000	bukit surungan terletak diwilayah rawan bencana alam dan banjir, maka diperlukan penyediaan sarana & prasarana mitigasi bencana dan alat pompa bandar yang tersumbat sedimen, maka perlu Penyediaan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana dan alat pompa bandar, dengan volume 1 Set
6	Pengadaan Mobiler Poskeskel	Silaing Bawah	Jumlah peralatan yang disediakan	1 paket	20.000.000	Terganggunya pelayanan di Puskeskel karena mobiler yang kurang memadai, maka diusulkan pengadaan 1 paket mobiler untuk Puskeskel,
7	Rehabilitasi Pustu	Pasar Usang	Jumlah peralatan yang disediakan	1 unit	40.000.000	Keadaan Fisik Bangunan Pustu seperti atap telah bocor, plafon perlu diganti, kuzen yang telah rusak yang berlokasi di Puskesmas Pembantu RT. 017 Kelurahan Pasar Usang sebanyak 1 (satu) unit bangunan
8	Rehabilitasi Puskeskel	Pasar Usang	Jumlah peralatan yang disediakan	1 unit	25.000.000	Keadaan Fisik Bangunan Puskeskel seperti atap telah bocor, plafon perlu diganti, kuzen yang telah rusak yang berlokasi di Belakang Rumah Healing Dinas Sosial Kota Padang Panjang RT. 004 Kelurahan Pasar Usang sebanyak 1 (Satu) unit bangunan

9	Pengadaan Mobiler Poskeskel	Pasar Usang	Jumlah peralatan yang disediakan	1 paket	40.000.000	Minimnya sarana dan prasarana Puskeskel untuk mendukung kegiatan di lapangan maka dibutuhkan Pengadaan sarana prasarana kesehatan sebanyak 1 (Satu) Paket
10	Pembuatan Mural	Pasar Usang	Jumlah peralatan yang disediakan	1 paket	21.000.000	lanjutan pembuatan mural yang berada di dinding bangunan globe pasar usang
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
1	Pelatihan Video dan Fotografi	Kampung Manggis	Jumlah peserta pelatihan	20 orang	15.000.000	Perlunya Peningkatan Kreatifitas Anak Muda dalam Bidang Perfilman, Video dan Fotografi guna mempublikasikan kegiatan UMKM masyarakat kelurahan kampung manggis untuk itu diperlukan Pelatihan Vlog
2	Pelatihan Tata Rias	Kampung Manggis	Jumlah peserta pelatihan	20 orang	10.000.000	Perlunya peningkatan kemampuan masyarakat dibidang usaha tata rias (pesta perkawinan & karnaval) di tengah-tengah masyarakat (dengan volume 20 orang
3	Pelatihan Sepakbola	Kampung Manggis	Jumlah peserta pelatihan	20 orang	15.000.000	Masih Perlunya Peningkatan Kemampuan Pemain Sepak Bola Untuk Itu Diperlukan Pelatihan Sepak Bola
4	Event Car Freeday	Bukit Surungan	Jumlah Kegiatan	1 paket	15.000.000	Perlu adanya pengembangan Car Free Day dengan berbagai Festival yang berkaitan dengan ekonomi,budaya dan lingkungan. maka perlu adanya Event Tahunan Bukit Surungan, dengan volume 1 Paket
5	Pelatihan pembuatan karangan bunga (bouqette)	Pasar Usang	Jumlah peserta pelatihan	20 orang	20.000.000	Adanya masyarakat usia produktif yang belum memiliki pekerjaan, maka diperlukan Pelatihan untuk pembuatan papan bunga dan karangan bunga (bucket bunga),
6	Pelatihan Penanggulangan Kebakaran	Pasar Usang	Jumlah peserta pelatihan	17 orang	10.000.000	Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta

						pemanfaatan banker air maka dibutuhkan pelatihan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran untuk 17 (Tujuh Belas) orang peserta
7	Pelatihan UMKM	Pasar Usang	Jumlah peserta pelatihan	20 orang	10.000.000	Dikarenakan para pelaku UMKM kurang memiliki kemampuan untuk memasarkan produk UMKM nya diera digital dimasa sekarang, maka dibutuhkan Pelatihan Pemasaran Digital untuk 20 (Dua Puluh) orang
8	Pelataihan Penyelenggaraan Jenazah	Pasar Usang		20 orang	15.000.000	Masyarakat membutuhkan pendidikan tentang penyelenggaraan jenazah perempuan maka diusulkan Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah untuk 20 (Dua Puluh) Orang
9	Loba cerdas cermat dan bercerita	Silaing Atas	Jumlah Kegiatan	1 paket	10.000.000	Masih kurangnya kunjungan wisata karena belum banyaknya kegiatan di wisata batu limo disebabkan keterbatasan biaya, maka perlu bantuan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan dalam bentuk lomba cerdas cermat wisata dan lomba bercerita "Wisata Padang Panjang di Matamu" guna menarik wisatawan (1 Paket)
10	Pelatihan Payet	Silaing Bawah	Jumlah peserta pelatihan	20 orang	20.000.000	Meningkatkan keterampilan warga dan ekonomi keluarga dengan UKM, maka diusulkan Pelatihan Payet, peserta 20 orang,
11	Pelatihan Pengolahan bahan kulit	Silaing Bawah	Jumlah peserta pelatihan	11 orang	20.000.000	Meningkatkan kemampuan/keahlian warga dalam mengolah kulit, maka diusulkan Pelatihan Pengelohan Bahan Kulit menjadi sepatu, atau olahan kerajinan bahan kulit lainnya, peserta 11 orang,
12	Pelatihan pembuatan ecobrick	Balai Balai	Jumlah peserta pelatihan	20 orang	25.000.000	Banyaknya ibu- ibu rumah tangga berminat melakukan kegiatan Ecobrick untuk menambah pendafatan keluarga serta menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga dibutuhkan

						Pelatihan Ecobrick dengan anggaran
13	Pelatihan pembuatan Kue Basah	Pasar Usang	Jumlah peserta pelatihan	10 orang	10.000.000	warga pasar usang meminta pelatihan pembuatan kue basah dan penyandang peralatan nya

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Padang Panjang Barat

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2025-2029 adalah Nilai penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

Tabel. 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		Ket
				Renstra 2025-2030	Renja Perubahan 2025	
(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(11)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif		Indeks Pelayanan Publik	4,17	4,20	4,20	
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Padang Panjang Barat	69,15	69,25	69,25	
	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Barat	97,75	97,86	97,86	
	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat	38,86	39,99	39,99	

3.3. Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2024 antara lain adalah :

1. Mempedomani RKPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 serta Review Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025;
3. Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029;
4. Penetapan Renstra Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029;
5. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Padang Panjang Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;
6. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
7. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   a. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
   c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
      2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana
4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
   a. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
      1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
   b. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
      1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
      1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
   a. Pemberdayaan Kelurahan
      1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
      2) Pembangunan Sarana dan Prasarana
      3) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
   b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
      1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
      1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
      1) Pembinaan Keurukunan antarsuku dan intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
      2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT							**19.316.817.806**	**19.423.040.682**	**17.097.564.341**							**20.453.231.040,00**	
	7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**19.316.817.806**	**19.423.040.682**	**17.097.564.341**							**20.453.231.040,00**	
	7.01.	**KECAMATAN**							**19.316.817.806**	**19.423.040.682**	**17.097.564.341**							**20.453.231.040,00**	
##	**7.01.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat**	**95 %**		**95 %**	**100 %**	***95 %***	**8.453.928.480**	**8.197.027.701**	**7.580.572.281**							**12.633.442.150,00**	
	7.01.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**90 %**		**90 %**	**90 Persen**	***90 %***	**8.453.928.480**	**8.165.987.501**	**7.562.658.031**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**Kecamatan Padang Panjang Barat**		**8.453.928.480,00**	**Kec. PPB**
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6750 Orang/bulan		1125 Orang/bulan	1125 Orang/bulan	1125 Orang/bulan	8.453.928.480	8.165.987.501	7.562.658.031	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			8.453.928.480,00	Kec. PPB
	7.01.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**90 Persen**	***100 Persen***	**-**	**-**	**-**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**Kecamatan Padang Panjang Barat**		**0,00**	**Kec. PPB**
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	292 Paket		75 Paket	75 Paket	0 Paket	-	-	-	Kota Padang Panjang, Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0,00	Kec. PPB
	7.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100 %**		**90 %**	**90 Persen**	**100 %**	**-**	**31.040.200**	**17.914.250**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**Kecamatan Padang Panjang Barat**		**650.345.534,00**	**Kec. PPB**
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	216 Paket		36 Paket	4 Paket	36 Paket	-	31.040.200	17.914.250	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			31.579.934,00	Kec. PPB
	7.	**NON URUSAN**							**-**	**-**	**-**							**20.453.231.040,00**	
	7.01.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**-**	**-**	**-**							**20.453.231.040,00**	
##	**7.01.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat**	**95 %**		**95 %**	**100 %**	**95 %**	**-**	**-**	**-**							**12.633.442.150,00**	
	7.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100 %**		**90 %**	**90 Persen**	**100 %**	**-**	**-**	**-**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**Kecamatan Padang Panjang Barat**		**650.345.534,00**	**Kec. PPB**
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	216 Paket		36 Paket		36 Paket											

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**-**	**174.795.703**	**83.515.017**							**20.453.231.040,00**	
	7.01.	**KECAMATAN**							**-**	**174.795.703**	**83.515.017**							**20.453.231.040,00**	
##	**7.01.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat**	**95 %**		**95 %**	**100 %**	**95 %**	**-**	**174.795.703**	**83.515.017**							**12.633.442.150,00**	
	7.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100 %**		**90 %**	**90 Persen**	**100 %**	**-**	**174.795.703**	**83.515.017**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**Kecamatan Padang Panjang Barat**		**650.345.534,00**	**Kec. PPB**
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	216 Paket		36 Paket	4 Paket	36 Paket	-	174.795.703	83.515.017	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			193.812.300,00	Kec. PPB
	7.	**NON URUSAN**							**-**	**-**	**-**							**20.453.231.040,00**	
	7.01.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**-**	**-**	**-**							**20.453.231.040,00**	
##	**7.01.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat**	**95 %**		**95 %**	**100 %**	**95 %**	**-**	**-**	**-**							**12.633.442.150,00**	
	7.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100 %**		**90 %**	**90 Persen**	**100 %**	**-**	**-**	**-**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**Kecamatan Padang Panjang Barat**		**650.345.534,00**	**Kec. PPB**
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	216 Paket		36 Paket	4 Paket	36 Paket											
	7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**52.188.300**	**475.043.200**	**213.529.500**							**20.453.231.040,00**	
	7.01.	**KECAMATAN**							**52.188.300**	**475.043.200**	**213.529.500**							**20.453.231.040,00**	
##	**7.01.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat**	**95 %**		**95 %**	**100 %**	**95 %**	**52.188.300**	**475.043.200**	**213.529.500**							**12.633.442.150,00**	
	7.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100 %**		**90 %**	**90 Persen**	**100 %**	**52.188.300**	**475.043.200**	**213.529.500**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**Kecamatan Padang Panjang Barat**		**650.345.534,00**	**Kec. PPB**
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	216 Paket		36 Paket	4 Paket	36 Paket	52.188.300	52.188.200	26.061.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			52.188.300,00	Kec. PPB
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	720 Laporan		120 Laporan	24 Laporan	120 Laporan	-	422.855.000	187.468.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			372.765.000,00	Kec. PPB

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7.	**NON URUSAN**							**-**	**-**	**-**							**20.453.231.040,00**	
	7.01.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**-**	**-**	**-**							**20.453.231.040,00**	
##	**7.01.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat**	**95 %**		**95 %**	**100 %**	**95 %**	**-**	**-**	**-**							**12.633.442.150,00**	
	7.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100 %**		**90 %**	**90 Persen**	**100 %**	**-**	**-**	**-**			-	-	**Kecamatan Padang Panjang Barat**		**650.345.534,00**	**Kec. PPB**
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	720 Laporan		120 Laporan	24 Laporan	120 Laporan											
	7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**2.980.912.136**	**3.237.549.084**	**2.491.884.284**							**20.453.231.040,00**	
	7.01.	**KECAMATAN**							**2.980.912.136**	**3.237.549.084**	**2.491.884.284**							**20.453.231.040,00**	
##	**7.01.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat**	**95 %**		**95 %**	**100 %**	**95 %**	**2.980.912.136**	**3.237.549.084**	**2.491.884.284**							**12.633.442.150,00**	
	7.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100 %**		**100 %**	**90 Persen**	**90 %**	**92.180.000**	**101.500.000**	**25.000.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**Kecamatan Padang Panjang Barat**		**162.180.000,00**	**Kec. PPB**
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit		Unit	2 Unit	0 Unit	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			70.000.000,00	Kec. PPB
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	68 Unit		28 Unit	28 Unit	28 Unit	92.180.000	101.500.000	25.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			92.180.000,00	Kec. PPB
	7.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**90 %**		**90 %**		**90 %**	**2.534.109.136**	**2.516.058.084**	**2.167.931.284**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**Kecamatan Padang Panjang Barat**		**2.534.109.136,00**	**Kec. PPB**
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	552 Laporan		108 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	2.000.000	920.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			2.000.000,00	Kec. PPB
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1109 Laporan		217 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	102.157.136	102.156.084	102.156.084	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			102.157.136,00	Kec. PPB
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	648 Laporan		108 Laporan	108 Laporan	108 Laporan	2.429.952.000	2.411.902.000	2.064.855.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			2.429.952.000,00	Kec. PPB
	7.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**80 %**		**90 %**	**90 %**	**90 %**	**354.623.000**	**619.991.000**	**298.953.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**Kecamatan Padang Panjang Barat**		**832.879.000,00**	**Kec. PPB**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	74 Unit		47 Unit	36 Unit	36 Unit	255.853.000	337.843.000	198.343.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				255.853.000,00	Kec. PPB
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		21 Unit	3 Unit	3 Unit	98.770.000	107.820.000	100.610.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			98.770.000,00	Kec. PPB
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	9 Unit	0 Unit	-	174.328.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			443.256.000,00	Kec. PPB
	7.	**NON URUSAN**							**-**	**-**	**-**							**20.453.231.040,00**	
	7.01.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**-**	**-**	**-**							**20.453.231.040,00**	
##	**7.01.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat**	**95 %**		**95 %**	**100 %**	**95 %**	**-**	**-**	**-**							**12.633.442.150,00**	
	7.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**80 %**		**90 %**	**90 %**	**90 %**	**-**	**-**	**-**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**Kecamatan Padang Panjang Barat**		**832.879.000,00**	**Kec. PPB**
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit		0 Unit											
	7.	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**7.829.788.890**	**7.338.624.994**	**6.728.063.259**							**20.453.231.040,00**	
	7.01.	**KECAMATAN**							**7.829.788.890**	**7.338.624.994**	**6.728.063.259**							**20.453.231.040,00**	
##	**7.01.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Kecamatan Padang Panjang Barat**	**95 %**		**95 %**	**100 %**	**95 %**	**35.000.000**	**299.398.400**	**389.732.000**							**12.633.442.150,00**	
	7.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**80 %**		**90 %**	**90 %**	**90 %**	**35.000.000**	**299.398.400**	**389.732.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**Kecamatan Padang Panjang Barat**		**832.879.000,00**	**Kec. PPB**
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit		13 Unit	1 Unit	9 Unit	35.000.000	299.398.400	389.732.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			35.000.000,00	Kec. PPB
##	**7.01.02.**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Barat**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**377.137.338**	**1.479.596.129**	**1.346.361.023**							**402.137.338,00**	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7.01.02.2.01.	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah koordinasi yang dilaksanakan ditingkat kecamatan**	**16 kali**		**4 kali**		**4 kali**	**6.760.238**	**6.759.900**	**-**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**null**		**31.760.238,00**	**Kec. PPB**
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37 Dokumen		9 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	6.760.238	6.759.900	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			31.760.238,00	Kec. PPB
	7.01.02.2.03.	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan**	**12 Kali**		**12 Kali**		**12 Kali**	**186.816.500**	**186.555.800**	**199.160.900**			-	-	**Kecamatan Padang Panjang Barat**		**186.816.500,00**	**Kec. PPB**
	7.01.02.2.03.(	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4080 Dokumen		680 Dokumen	680 Dokumen	680 Dokumen	186.816.500	186.555.800	199.160.900	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-			186.816.500,00	Kec. PPB
	7.01.02.2.04.	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan**	**8 Urusan**		**8 Urusan**	**8 laporan**	**8 Urusan**	**183.560.600**	**1.286.280.429**	**1.147.200.123**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**Kecamatan Padang Panjang Barat**		**183.560.600,00**	**Kec. PPB**
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	48 Laporan		8 Laporan Laporan	1 Laporan	8 Laporan	183.560.600	1.286.280.429	1.147.200.123	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			183.560.600,00	Kec. PPB
##	**7.01.03.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Barat**	**39,26%**		**39,2%**	**39.99 %**	**39,21 %**	**7.337.174.702**	**5.474.764.815**	**4.974.602.936**							**7.337.174.702,00**	
	7.01.03.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah jenis pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan**	**3 Jenis**		**3 Jenis**	**3 jenis**	**3 Jenis**	**4.486.459.652**	**2.624.562.865**	**2.194.682.936**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**Kecamatan Padang Panjang Barat**		**4.486.459.652,00**	**Kec. PPB**
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	54 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	204.534.850	211.484.250	173.714.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			204.534.850,00	Kec. PPB
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	55 Unit		8 Unit	15 Unit	15 Unit	709.265.600	359.000.000	293.560.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			709.265.600,00	Kec. PPB
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	42 Pokmas / Ormas		7 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	3.572.659.202	2.054.078.615	1.727.407.886	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			3.572.659.202,00	Kec. PPB

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7.01.03.2.03.	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Rukun Tetangga**	**133 RT**		**133 RT**		**133 RT**	**2.850.715.050**	**2.850.201.950**	**2.779.920.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**Lembaga Kemasyarakatan (RT)**		**2.850.715.050,00**	**Kec. PPB**
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	2.850.715.050	2.850.201.950	2.779.920.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			2.850.715.050,00	Kec. PPB
##	**7.01.04.**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Penyelenggaraan Tibuntranmas pada Kecamatan Padang Panjang Barat**	**100 %**		**100 %**		**100 %**	**30.477.000**	**30.477.000**	**12.643.800**							**30.477.000,00**	
	7.01.04.2.01.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**2 Jenis**		**2 Jenis**		**2 Jenis**	**30.477.000**	**30.477.000**	**12.643.800**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**Kecamatan Padang Panjang Barat**		**30.477.000,00**	**Kec. PPB**
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	648 Laporan		108 Laporan	12 Laporan	108 Laporan	30.477.000	30.477.000	12.643.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			30.477.000,00	Kec. PPB
##	**7.01.05.**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**49.999.850**	**54.388.650**	**4.723.500**							**49.999.850,00**	
	7.01.05.2.01.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum**	**5 kegiatan**		**5 Kegiatan kegiatan**	**2 jenis**	**5 kegiatan**	**49.999.850**	**54.388.650**	**4.723.500**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**Kecamatan Padang Panjang Barat**		**49.999.850,00**	**Kec. PPB**
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	850 Orang		170 Orang	170 Orang	0 Orang	40.000.000	39.994.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			40.000.000,00	Kec. PPB
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	36 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	9.999.850	14.394.650	4.723.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			9.999.850,00	Kec. PPB

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2026. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang selama Tahun 2025. Terlaksananya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait pada Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang .

Padang Panjang, 30 Juni 2025

CAMAT PADANG PANJANG BARAT

ROMI AR RAHMAN, ST

NIP. 19821012 201101 1 008

PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI 1

DAFTAR TABEL……. 2

DAFTAR GAMBAR……. 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Maksud danTujuan 8

1.4 Sistematika Renja Perubahan BPBDKESBANGPOL 9

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023..... 10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja perubahan BPBD KESBANGPOL Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra BPBDKESBANGPOL Tahun 2018-2023…… 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD KESBANGPOL..... 23

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPPBD KESBANGPOL……..…… 26

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD……..... 33

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 39

BAB III TUJUAN DAN BPBD KESBANGPOL……..... 40

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 40

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 43

3.3 Program dan Kegiatan……..... 48

BAB IV PENUTUP……..... 79

DAFTAR TABEL

		Halaman
TABEL 2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Padang Panjang……	11
TABEL 2.2	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2024……..	19
TABEL 2.3	Pencapaian Kinerja BPBD Kesbangpol Padang Panjang……	25
TABEL 2.4	Pemetaan Permasalahan…….....	29
TABEL 2.5	Pohon Masalah BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.....	39
TABEL 2.6	Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.....	32
TABEL 2.7	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dengan Renja BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2025…..	34
TABEL 3.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat……	41
TABEL 3.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang 2025…….....	44
TABEL 3.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.....	47
TABEL 3.4	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang…….....	51
TABEL 43.5	Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja BPBD Kesbangpol Tahun 2025…….....	58

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
GAMBAR 1.1	Tahapan Penyusunan Renja BPBD Kesbangpol.....	6
GAMBAR 1.2	Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah	6
GAMBAR 2.1	Pohon Masalah BPBD, Kesbangpol Padang Panjang…….	38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja Perubahan) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

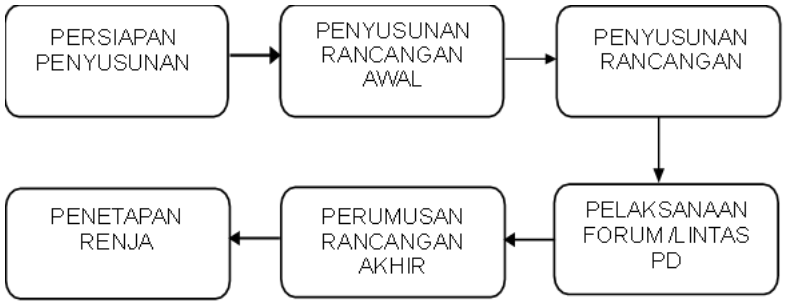
Proses penyusunan rancangan awal Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik (BPBD, Kesbangpol) Tahun 2025 didasarkan pada Renstra BPBD, Kesbangpol 2025-2029

dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun pertama perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang yang berpedoman pada Renstra Tahun 2025-2029. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kesbangpol serta sejalan dengan tujuan Renstra BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu “Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum melalui layanan kebencanaan daerah, impelementasi nilai-nilai ideologi pancasila, karakter kebangsaan dan pendidikan politik”

Penyusunan Renja Perubahan BPBD Kesbangpol dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

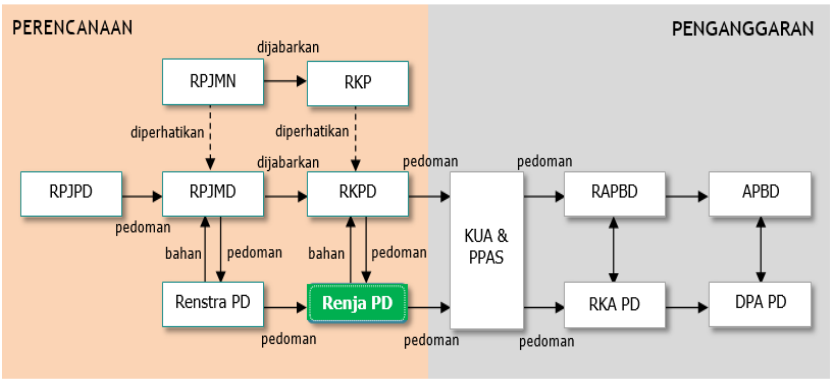
1. Persiapan penyusunan Renja BPBD Kesbangpol meliputi :
   Pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renja Perubahan BPBD Kesbangpol penyusunan agenda kerja tim penyusun dan penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan daerah berdasarkan SIPD;
2. Penyusunan rancangan Renja Perubahan BPBD Kesbangpol
   Penyusunan rancangan Renja Perubahan BPBD Kesbangpol berpedoman pada Renstra BPBD Kesbangpol, hasil evaluasi Renja Perubahan BPBD, Kesbangpol tahun 2025 Pengendalian Kegiatan Tahun 2025 :
   a. Analisa gambaran pelayanan BPBD Kesbangpol; dan
   b. Hasil evaluasi Renja Perubahan Perubahan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.
3. Penyusunan rancangan Renja BPBD Kesbangpol
   Penyempurnaan rancangan Renja BPBD, Kesbangpol dilakukan berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan setelah verifikasi oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Hal ini menjamin rancangan Renja Perubahan BPBD, Kesbangpol selaras dengan rancangan awal RKPD dan Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir Renja Perubahan BPBD Kesbangpol;
   Rancangan akhir Renja BPBD Kesbangpol disajikan dengan sistematika yang telah ditetapkan;
6. Penetapan Renja Perubahan BPBD Kesbangpol.

GAMBAR 1.1
Tahapan Penyusunan Renja BPBD KESBANGPOL
Kota Padang Panjang



Renja BPBD KESBANGPOL adalah penjabaran dari Renstra BPBD, Kesbangpol 2024-2026, untuk melihat hubungan antar dokumen dapat kita lihat pada tabel berikut:

Gambar 1.2
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan BPBD Kesbangpol berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan bangsa dan Politik (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 194)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7.)
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padanng Panjang Tahun 2010 Nomor 5);
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
20. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 105 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan BPBD Kesbangpol adalah untuk untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan BPBD Kesbangpol adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan BPBD Kesbangpol melalui program, kegiatan dan sub kegiatan indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai salah satu bahan penyempurnaan dalam penyusunan rancangan awal Renstra BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2025;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPBD Kesbangpol Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan BPBD Kesbangpol disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan BPBD Kesbangpol tahun 2024 dan capaian Tahun Berjalan (2025) serta keterkaitan dengan pencapaian Renstra BPBD Kesbangpol Tahun 2018-2023, Analisis kinerja pelayanan BPBD Kesbangpol, isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kesbangpol review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPBD KESBANGPOL

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perubahan BPBD Kesbangpol serta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD KESBANGPOL

Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 dan Perkiraan Maju tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kualitas Renja Perubahan Perangkat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perubahan tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan Renja Perubahan BPBD Kesbangpol, perlu diperhatikan perbandingan hasil evaluasi capaian kinerja pada Renja Perubahan Tahun 2024 terhadap target kinerja pada Perubahan Renstra tahun 2024-2026. Evaluasi juga dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian tahun berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target kinerja pada Renstra tahun 2024-2026.

2.1.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPBD Kesbangpol Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra BPBD Kesbangpol tahun 2024-2026 tahun 2024 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Secara umum, pelaksanaan Renja Perubahan BPBD Kesbangpol dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik telah mencapai 100%.

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD Kesbangpol Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Padang Panjang
(berdasarkan Renstra 2024-2026)

Nama Perangkat Daerah: BPBD Kesbangpol

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024-2026 *(akhir periode Renstra Perangkat Daerah)*		Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan (Thn yang di Evaluasi) 2025		Realisasi Kinerja Per triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (akhir Tahun Pelaksanaan Daerah Tahun 2025)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggjawab
								I		II		III		IV								
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik	90 Persen	13,215,822,085	-	15,611,016,648	-	5,041,271,812	-	1,149,436,366							-	1,052,071,820	-	1,052,071,820	-	210,414,364	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ASN	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	10,397,100,751	-	10,397,100,751	-	4,192,585,326	-	1,052,071,820							-	1,052,071,820	-	11,449,172,571	-	2,288,834,514	Sekretariat
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1334 orang/bulan	10,397,100,751	1600 orang	10,397,100,751	32 orang	4,192,585,326	32 orang	1,052,071,820							32 orang	1,052,071,820	32 orang	11,449,172,571		2,288,834,514	Sekretariat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	32,150,000		32,150,000	100 Persen	-		-													
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		32,150,000		32,150,000	33 Paket	-		-													
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan layanan Administrasi Pertanoran	90 Persen	789,111,830	-	2,600,284,084	-	257,331,470	-	30,122,575							-	30,122,575	-	30,122,575	-	6,024,515	Sekretariat
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang di sediakan	12 paket	17,960,530	10 Jenis	3,897,500	10 Jenis	3,805,200		-							0.00%	0	10 Jenis	0		-	Sekretariat
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan Peralatan Kebersihan Kantor yang di sediakan	12 paket	34,133,700	30 Jenis	123,735,716	60 Jenis	40,464,570	14 Jenis	-							14 Jenis	0	28 Jenis	10,573,500		2,115,100	Sekretariat
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	36 paket	38,736,350	Jenis	136,390,868	2 Jenis	15,494,700	2 Jenis	1,580,700							2 Jenis	1,580,700	2 Jenis	1,580,700		316,140	Sekretariat
Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang di luti	102 laporan	638,221,050	200 Kali	2,324,040,000	200 kali	193,567,000	71 Kali	28,541,875							71 Kali	28,541,875	121 Kali	28,541,875		5,708,375	Sekretariat
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Standarisasi						23,894,000															
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						0															
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						23,894,000															
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 Persen	317,610,170			90 Persen	182,042,116		30,580,471													
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Jasa Surat Menyurat yang disediakan	36 laporan	11,950,000	1 Jenis	13,513,260	3 Laporan	3,494,400	1jenis	-								0	1 Jenis	0		-	Sekretariat
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang dibayarkan	72 laporan	36,221,380	36 rekening	213,678,500	36 Laporan	34,397,716	3 rekening	6,131,671							3 rekening	6,131,671	36 rekening	6,131,671		1,238,334	Sekretariat
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas Yang di bayarkan	36 laporan	403,438,590	4 Orang		4 Laporan	143,550,000	4 Orang	24,398,800							4 orang	24,398,800	4 orang	24,398,800		4,879,760	Sekretariat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	90 Persen	1,153,849,334	-	2,613,631,813	-	383,308,300	-	36,651,500							-	36,651,500	-	36,651,500	-	7,330,300	

1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12		13=6+12		14=13/5x100%		15
II		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	1,028,721,110	20 Unit	2,160,748,313	20 Unit	341,778,400	20 Unit	35,121,500				20 Unit	35,121,500	20 unit	35,121,500		7,024,300	Sekretariat	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit	76,252,754	33 Unit	147,627,500	20 Unit	26,241,000	4 unit	1,530,000				4 unit	1,530,000	20 unit	1,530,000		306,000	Sekretariat	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	50,875,470	1 gedung	305,255,000	1 Unit	15,283,500	-	-					-	1 gedung	-		-	Sekretariat	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Bencana yang Tertangani	100 Persen	4,099,201,248	-	3,711,064,000	100 Persen	1,288,694,470	-	162,198,228				-	162,198,228	-	162,198,228	-	32,439,646		
		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase terfasilasinya informasi rawan bencana bagi masyarakat	100 Persen	400,000,000			100 Persen	49,999,960		-										
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen		1 Dokumen	-	1 Dokumen	-										
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	480 Orang	140,000,000	-	-	160 Orang	49,999,960	-											
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	3,121,618,760	-	3,711,064,000	5 Persen	1,023,834,450	-	147,594,000				-	147,594,000	-	147,594,000	-	29,518,800		
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	210 Unit	60,000,000			105 Unit	-	-											
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	350 Orang	240,000,000	160 orang	368,260,000	160 orang	119,999,430	-	-				-	-	-	-	-	-	
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Matriumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	36 Dokumen	1,744,880,000	22 org	3,711,064,000	12 Dokumen	905,855,000	22 org	147,594,000				22 orang	147,594,000	22 orang	147,594,000		29,518,800	Bid.Kedaruratan dan Logistik	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	presentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Persen	290,000,000		1,163,604,671		83,997,000		3,830,000					3,830,000		3,830,000				
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dokumen	290,000,000	-	1,163,604,671	85 kejadian	83,997,000		3,830,000				0	3,830,000	66 kejadian	3,830,000	-	770,000	Bid.Kedaruratan dan Logistik	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah kerusakan yang ditanggani	100 Persen	287,582,488			100 Persen	122,843,060		10,754,228													
		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RSP) Provinsi yang diteglikan	12 kegiatan	170,622,488			1 Kegiatan	122,843,060		10,754,228													
2	Terwujudnya Stabilitas Daerah	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	80 Persen	1,790,000,000	250 org	121,092,972	80 Persen	711,022,000	-	1,458,975											-		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	presentase pencegahan terhadap perisitiwa gangguan keamanan berlatar belakang ideologi radikal dan isu-isu di daerah	80 Persen	1,790,000,000	250 org	121,092,972	80 Persen	711,022,000		1,458,975											-	-	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	240 orang	1,790,000,000	250 org	121,092,972	80 Orang	711,022,000	650 rg	1,458,975											-		
IV		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah	100 Persen	12,195,410,800		2,615,409,520	100 Persen	1,816,083,966	-	63,547,000					-	63,547,000	-	63,547,000	-	12,709,400		-	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwatilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	presentase pencegahan terhadap pertembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya	23 Persen	12,195,410,800		2,615,409,520	23 Persen	1,816,083,966		63,547,000						63,547,000		63,547,000					
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwatilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwatilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	135 orang	10,800,000,000	0	-	450rng	812,398,966	1 dokumen	-												
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwatilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwatilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	3 laporan	307,169,800	8 partai	2,615,409,520	15 Orang	1,003,084,000	8 partai	63,547,000					8 partai	63,547,000	8 partai	63,547,000		12,709,400	Bid. Kesbangpol		

1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12		13=6+12		14=13/5x100%		15
V		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku	100 Persen	150,000,000	65	205,096,200	100 Persen	-	-	-						0		0		-	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi masyarakat yang diberdayakan dan diawasi	165 organisasi masyarakat	150,000,000	65	205,096,200	550 organisasi masyarakat	-	-	-						0		0		-	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	42 Orang	150,000,000	65	205,096,200	14 Orang	-	-	-					-	0		0		-	
VI		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik yang tertangani	100 Persen	426,800,000	-	116,400,000	100 Persen	113,950,000	-	-					-	-	-	-	-		
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	presentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya ditengah masyarakat	100 Persen	426,800,000		116,400,000	100 Persen	113,950,000		-						0		0		-	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengmayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengmayat Kepercayaan di Daerah	129 Orang	305,000,000	6 kali	116,400,000	43 Orang	113,950,000	1 kali	-						0	kali	0		-	Bid. Kesbangpol
VII		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah	100 Persen	1,647,075,000	3 kali	38,250,000	100 Persen	500,342,000	-	44,037,300					-	44,037,300	-	44,037,300	-	8,807,460	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	presentase pencegahan konflik sosial yang berlembang ditengah masyarakat	100 Persen	1,647,075,000			100 Persen	500,342,000		44,037,300						44,037,300		44,037,300		8,807,460	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga	177 Orang	147,075,000	3 kali	38,250,000	100 Persen	500,342,000	30%	44,037,300											
		JUMLAH			31,584,309,133	-	22,092,140,168	-	9,471,364,248	-	1,420,677,869	-	-	-	-	-	-	1,420,677,869	-	1,420,677,869	-	284,135,574	

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Padang Panjang di atas dapat dijelaskan bahwa BPBD Kesbangpol melaksanakan 6 Program Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Program Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Yang Dipenuhi target 98 % capaian kinerja tahun 2023 sebesar 98,77% program ini terdiri dari 5 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan persentase capaian kinerjanya 100%;
2. Program Penanggulangan Bencana dengan indikator kinerja Persentase Bencana yang Tertangani target kinerja tahun 2023 sebesar 100 % dengan capaian 100% persentase capaian 100%, program ini terdiri dari 3 Kegiatan dengan 5 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%. Sementara itu ada 1 (satu) Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota realisasinya di bawah 75 % (sub kegiatan ini berupa Kegiatan ini ditujukan untuk membantu Kejadian Pascabencana yang berdampak yang berskala kecil di Kota Padang Panjang Tahun 2023, dalam upaya peningkatan pelayanan pascabencana yang berskala kecil maka BPBD Kesbangpol membantu berupa bahan bangunan. kegiatan ini telah membantu pascabencana memberi bantuan berupa material/bahan bangunan pada Masyarakat di Kota Padang Panjang. Pelaksanaan memberi bantuan berupa material/bahan bangunan kepada masyarakat terdampak pascabencana;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan indikator Program Persentase Peningkatan Stabilitas Daerah target tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian 100% dan persentase capaiannya 100%. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%;
4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator Program Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlakutarget tahun 2023 sebesar 75% dengan capaian 100% dan persentase capaiannya 100% Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya dengan indikator Program Persentase Konflik yang tertangani target tahun 2023 sebesar 100% dengan capaian 100% dan persentase capaiannya 100% Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan indikator Program Persentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah target tahun 2023 sebesar

100% dengan capaian 100% dan persentase capaiannya 100% Program ini terdiri dari 1 kegiatan dengan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan persentase capaian 100%.

2.1.2 Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran BPBD Kesbangpol Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan anggaran tahun 2024 beserta perkiraan target realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Renja Perangkat Daerah dan Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2024

Perangkat Daerah: BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahu 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4/3*	*6*	*7*	*8 = 7/6*
	Perubahan Renstra 2018-2023						
5 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.663.026.389**	**4.503.880.942**	**97.31%**	**5.065.099.557**	**5.065.099.557**	**100%**
5 01 01 2.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	3.822.528.436	*3.719.698.684*	97.31%	4.245.506.957	4.245.506.957	**100%**
5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.822.528.436	*3.719.698.684*	97.31%	4.245.506.957	4.245.506.957	100%
5 01 01 2.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**24.000.000**	**24.000.000**	**100%**
5 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-		**24.000.000**	**24.000.000**	100%
5 01 01 2.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**317.379.700**	**292.945.247**		**209.950.200**	**209.950.200**	**100%**
5 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5.803.400	5.737.400	90.25%	3.911.200	3.911.200	100%
5 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.039.400	15.302.500	80.37%	45.684.200	45.684.200	100%
5 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.316.900	10.735.000	74.98%	10.364.800	10.364.800	100%
5 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278.220.000	261.670.347	94.05%	149.990.000	149.990.000	100%
5 01 01 2.07	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	49.650.000	42.400.000	85.39%	**60.378.200**	**28.707.600**	**100%**
	Pengadaan Mebel				40.871.400	40.871.400	100%
5 01 01 2.07 0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.650.000	42.400.000	85.39%	21.506.800	21.506.800	100%
5 01 01 2.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**170.710.204**	**142.973.206**		**155.912.000**	**155.912.000**	**100%**
5 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.450.000	98.57%	3.432.000	3.432.000	100%
5 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.498.500	16.416.786	59.70%	28.904.000	28.904.000	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahu 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4/3*	*6*	*7*	*8 = 7/6*
	Perubahan Renstra 2018-2023						
5 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.712.500	123.106.420	88.11%	123.576.000	123.576.000	100%
5 01 01 2.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**352.408.049**	**305.863.805**		**367.352.200**	**367.352.200**	**100%**
5 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau lapangan	312.388.599	277.373.205	88.79%	316.456.000	316.456.000	100%
5 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.733.750	16.399.600	66.30%	35.619.700	35.619.700	100%
5 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.285.700	12.091.000	79.10%	15.276.500	15.276.500	100%
5 01 02	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**1.274.223.434**	**1.110.737.374**		**1.593.913.300**	**1.593.913.300**	**100%**
5 01 02 2.01	**Kegiatan Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan bencana Kabupaten/Kota**	**37.879.834**	**33.581.550**	**88.65%**	**299.921.200**	**299.921.200**	**100%**
	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				**260.000.000**	**260.000.000**	**100**
5 01 02 2.01 0002	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per Jenis Bencana)	37.879.834	33.581.550	88.65%	39.921.200	39.921.200	100%
5 01 02 2.01 0005	Kegiatan pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.104.350.600	972.662.574		1.054.869.900	1.054.869.900	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				49.958.100	49.958.100	100%
5 01 02 2.01 0007	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bancana Kabupaten/Kota	83.045.300	79.130.225	95.3%	44.293.000	44.293.000	100%
	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyedian Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bancana Kabupaten/Kota	958.509.000	887.722.499	92.61%	960.618.800	960.618.800	100%
	Kegiatan Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana	62.796.300	5.809.850	9.25%	92.352.200	92.352.200	100%
	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	62.796.300	5.809.850	9.25%	92.352.200	92.352.200	100%
5 01 02 2.02	**Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**131.993.000**	**104.493.250**	**79.17**	146.770.000	146.770.000	**100%**
5 01 02 2.02 0001	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	131.993.000	104.493.250	79.17%	146.770.000	146.770.000	100%
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				762.379.600	762.379.600	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahu 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4/3*	*6*	*7*	*8 = 7/6*
	Perubahan Renstra 2018-2023						
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				762.379.600	762.379.600	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				762.379.600	762.379.600	100%
5 01 02 2.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**7.481.820.357**	**7.353.906.436.73**	**94.5%**	**11.996.392.898**	**11.996.392.898**	**100%**
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umkum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	**7.481.820.357**	**7.353.906.436.73**	**94.5%**	**11.996.392.898**	**11.996.392.898**	**100%**
5 01 02 2.03 0003	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	25.338.000	24.221.050	95.59%			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	6.701.693.380	6.662.848.530	99.42%	10.977.504.680	10.977.504.680	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	754.788.977	666.836.856.73	88.35%	1.018.888.218	1.018.888.218	100%
5 01 02 2.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	51.274.050	37.710.450	73.5%	56.832.100	56.832.100	100%
5 01 02 2.04 0001	Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	51.274.050	37.710.450	73.5%	56.832.100	56.832.100	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahu 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024)
1	*2*	*3*	*4*	*5 = 4/3*	*6*	*7*	*8 = 7/6*
	Perubahan Renstra 2018-2023						
	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas Asing di Daerah	51.274.050	37.710.450	73.5%	56.832.100	56.832.100	100%
5 01 03	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	120.747.700	113.942.000	94%	177.525.700	177.525.700	**100%**
5 01 03 2.01	Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	120.747.700	113.942.000	94%	177.525.700	177.525.700	**100%**
5 01 03 2.01 0007	**Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**	120.747.700	113.942.000	94%	177.525.700	177.525.700	100%
5 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	460.576.800	438.132.833	95.13%	682.988.950	682.988.950	100%
5 05 02 2.01	**Kegiatan Perumusan kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial**	460.576.800	438.132.833	95.13%	682.988.950	682.988.950	100%
5 05 02 2.01 0002	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	460.576.800	438.132.833	95.13%	682.988.950	682.988.950	100%

Berdasarkan hasil evaluasi Perubahan Renstra BPBD Kesbangpol Tahun 2018-2023, capaian kinerja tahun anggaran 2023 dapat terlaksana dengan baik dengan 7 program , 15 (lima belas) kegiatan, dan 27 (dua puluh tujuah) sub kegiatan. Ada beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai realisasi keuangan 75% dan Program, Kegiatan, sub kegiatan yang dihilangkan pada perubahan anggaran Tahun 2023, yaitu :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (59.70%). Biaya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran token listrik, Tagihan telepon, Tagihan TV Berlangganan dimana pembayaran dilakukan sesuai dengan tagihan pemakaian per bulannya;
b. Pemiliharaan peralatan dan Mesin Lainnya (66,30%). Sub kegiatan ini melakukan Pemeliharaan Laptop, Komputer, Printer, Mesin chainsaw, Genset, CCTV, HT, Radio Pemencar, dan Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas Genset dan Pompa Portable. dimana pembayaran dilakukan sesuai dengan Kebutuhan;
c. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Sub kegiatan ini melakukan Rehab kecil yang terdampak bencana alam dan Makanan dan minuman aktivitas lapangan. dimana pembayaran sesuai dengan kejadian di Lapangan (Insidentil);
d. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas Asing di Daerah (73.5%). Sub kegiatan ini ada Honorarium Tim Pengawasan Ormas, Makanan dan Minuman Rapat Tim rendahnya realisasi karena keterbatasan porsonil yang ada di Bidang Kesbangpol mengakibatkan kurangnya maksimalnya pengawasan kepada ormas tersebut;

   Program, Kegiatan, sub kegiatan yang dihilangkan pada perubahan anggaran Tahun 2023, Yaitu :

   a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan;
   b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan BPBD** Kesbangpol

Penyelenggaraan pelayanan BPBD, Kesbangpol adalah melaksanakan fungsi menyelenggarakan penanggulangan bencana dan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di Kota Padang Panjang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja BPBD Kesbangpol.

Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran, target evaluasi capaian kinerja sasaran “meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah” dengan indikator kinerja sasaran yakni, “persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah untuk tahun 2023 dengan target sebesar 73%. Disamping itu juga dilakukan pengukuran terhadap capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Pelaksanaan Keuangan Renja Perangkat Daerah dan Perkiraan Realisasi s/d Tahun 2024

Perangkat Daerah: BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisa
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2022	2023	
-1	-2	-3	-4	-5	-9	-10			-11	-12	-16	-17	
1	Pelaksanaan Upaya Pengurangan Resiko Bancana				4 kali, 140 org, 1 paket	4 kali, 140 org, 1 paket			4 kali, 140 org, 1 paket	4 kali, 140 org, 1 paket			
2	Pencegahan Dini dan penanggulangan bencana melalui jambore pengrangan resiko bencana				15 org, 160 org	15 org, 160 org			15 org, 160 org	15 org, 160 org			
3	Pendidikan dan Pelatihan				160 org	160 org			160 org	160 org			
4	Simulasi Penanganan Bencana				1.500 org				1.500 org				
5	Operasional Pusdalops				22 org	22 org			22 org	22 org			
6	Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana				85 kejadian	80 kejadian			85 kejadian	80 kejadian			
7	Pengadaan sarana dan Prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam				20 jenis				20 jenis				
8	Pengadaan Barang/peralatan penanganan Covid-19				-	-			-	-			
9	Penegakan Disiplin Protokol Covid-19				-	-			-	-			
10	Verifikasi dan Volidasi kerusakan				44 Kejadian	42Kejadian			44 Kejadian	42Kejadian			
11	Standarisasi Penanganan Pasca Bencana				1 dokumen, 40	1 dokumen, 40			1 dokumen, 40 d	1 dokumen, 40 d			
12	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Peredaran Gelap Narkotoka (P4GN)				50 org	50 org			50 org	50 org			
13	Kewaspadaan Dini Daerah				12 kali	12 kali			12 kali	12 kali			
14	Pendidikan wawasan Kebangsaan				50 org	50 org			50 org	50 org			
15	Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama				6 kali pertemuai	6 kali pertemuan			6 kali pertemuan	6 kali pertemuan			
16	Pengawasan orang asing NGO dan lembaga asing				11 org /LMM	11 org /LMM			11 org /LMM	11 org /LMM			
17	Pelaksanaan Koordinasi penanganan Konflik Sosial				7 kejadian	6 kejadian			7 kejadian	6 kejadian			
18	Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah				7 Kali pertemua	7 Kali pertemuan			7 Kali pertemuan	7 Kali pertemuan			
19	Pembinaan pengawasan dan pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan				55 Ormas	55 Ormas			55 Ormas	55 Ormas			
20	Fasilitasi Penyelenggaraan pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula				100 org	100 org			100 org	100 org			
21	Verifikasi Administrasi Bantuan Keungan Partai				8 parpol	8 parpol			8 parpol	8 parpol			
22	Pemantauan Pelaksanaan Presiden dan Wakil Presiden				-	-			-	-			
23	Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada				-	3 bln			-	3 bln			

Adapun hasil analisis dari pencapaian Tujuan/sasaran dan indikator tersebut dalam rentang waktu 2019 sampai dengan 2023 ditargetkan dapat diwujudkan dalam bentuk meningkatnya manajemen penanggulangan bencana dan meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat. BPBD Kesbangpol tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan BPBD Kesbangpol
   a. “Meningkatkan menajemen Penanggulangan bencana" Meningkatkan menajemen Penanggulanagn bencana” memiliki indikator kinerja yaitu : Indikator Kinerja Presentase Penanganan Bencana yang tertangani sesuai SOP;
   b. “Terwujudnya Stabilitas Daerah” Terwujudnya Stabilitas Daerah memiliki indikator kinerja yaitu:Indikator Kinerja Angka Kejadian Gangguan Stabilitas Daerah
2. Sasaran BPBD Kesbangpol adalah sebagai berikut :
   a. Meningkatkan meningkatnya respon penanganan, dengan Indikator “Respon tanggap darurat, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja”. Pada tahun 2023 adalah sebesar 100%;
   b. Meningkatkan Kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat, dengan Indikator “Angka kejadian konflik sosial ”.Pada tahun 2023, realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100%.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BPBD Kesbangpol

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagaian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang penanggulamngan bencana dan kesatuan bangsa dan politik disadari bahwa BPBD Kesbangpol belum melaksanakan fungsinya secara optimal.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 8 Menyebutkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penaggulangan bencana meliputi:

a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b. Pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
c. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Selanjutnya dalam Pasal 9 menjelaskan bahwa wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras

dengan kebijakan pembangunan daerah;

b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
f. Penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Dan dalam fungsi sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, BPBD Kesbangpol berpedoman pada Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatauan Bangsa dan Politik. Dimana dalam Pasal 6 ayat (2) dijelaskan bahwa Badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi,

sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;dan
f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota.

Seiring dengan dinamika lingkungan strategis, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal serta memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan mempedomani kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD Kesbangpol, terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam melaksanakan tugas dan wewenang seperti yang yang diamanatkan Undang-undang dan Permendagri tersebut.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat tersebut, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut

1. Menciptakan keterpaduan dan kesatuan gerak/sinergi seluruh stakeholder dalam upaya penanggulangan bencana;
2. Meningkatkan kualitas aparatur BPBD Kesbangpol dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, khususnya bidang penanggulangan bencana;
3. Memaksimalkan ketersediaan dan penataan peralatan, penyimpanan dan logistik kebencanaan;
4. Dibentuknya Kelurahan Tangguh Bencana;
5. Menyediakan dokumen-dokumen Rencana penanggulangan bencana;
6. Mengoptimalkan pemahaman, pengetahuan dan implementasi stakeholder terhadap kebencanaan;
7. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam menjaga stabilitas daerah di kota Padang Panjang;
8. Mengoptimalkan penanganan konflik sosial di Kota Padang Panjang;
9. Meningkatkan rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan bela negara.

Belum terlaksananya tugas dan fungsi BPBD Kesbangpol secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

Tabel 2.4

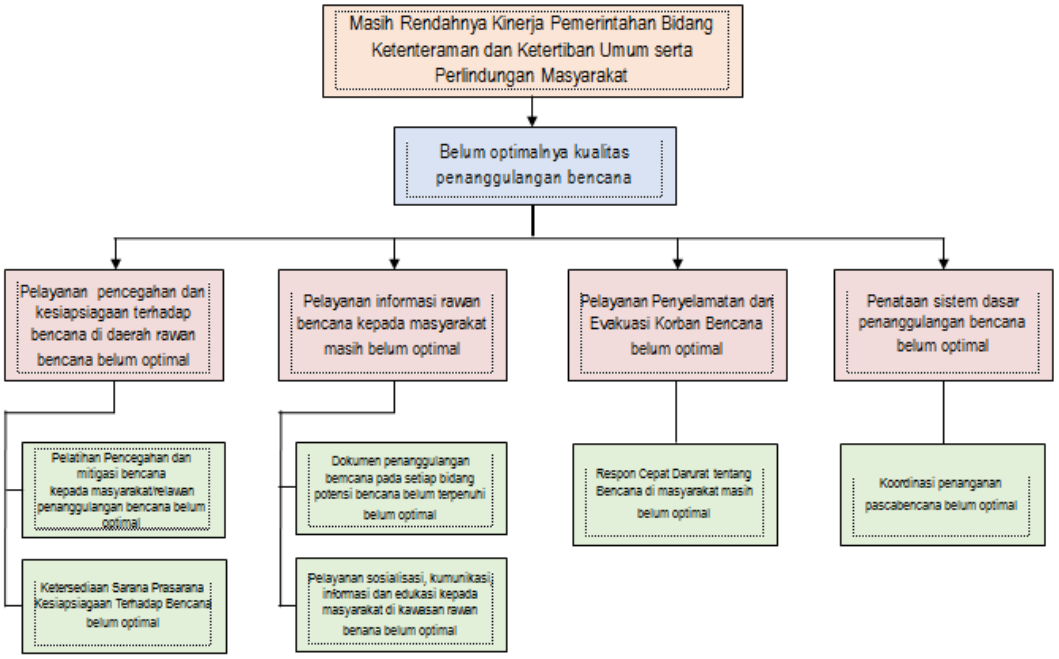
Pemetaan Permasalahan
BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang

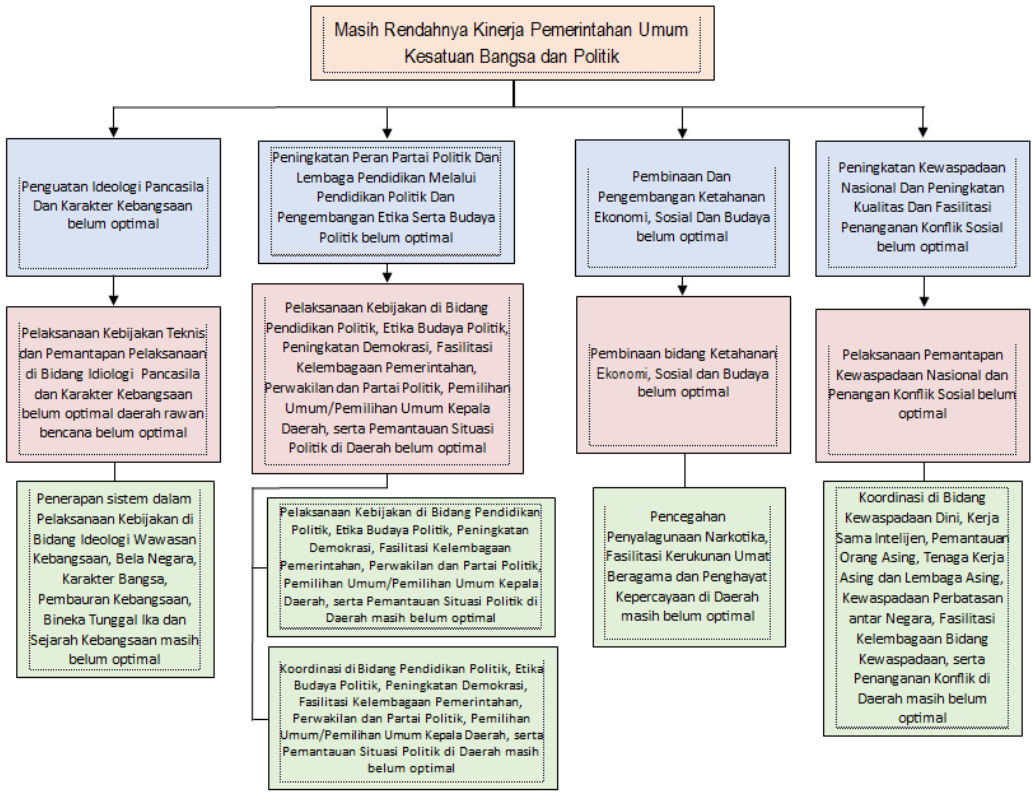
No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket.
1.	Penanggulangan Bencana	Pelayanan informasi rawan bencana kepada masyarakat masih belum optimal	Dokumen penanggulangan bemcana pada setiap bidang potensi bencana belum terpenuhi	
			Pelayanan sosialisasi , kumunikasi , informasi dan edukasi kepada masyarakat di kawasan rawan benana belum optimal	
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di daerah rawan bencana belum optimal	Pelatihan Pencegahan dan mitigasi bencana kepada masyarakat/relawan penanggulangan bencana belum optimal	
			Ketersediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana belum optimal	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana belum optimal	Respon Cepat Darurat tentang Bencana di masyarakat masih belum optimal	
		Penataan sistem dasar penanggulangan bencana belum optimal	Koordinasi penanganan pascabencana belum optimal	
2.	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan belum optimal	pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan belum optimal	Penerapan sistem dalam Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan masih belum optimal	
3	Peningkatan Peran Partai Politik Dan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket.
	Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik belum optimal	Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah belum optimal	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah masih belum optimal Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah masih belum optimal	
5	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya belum optimal	Pembinaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya belum optimal	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah masih belum optimal	
6	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial belum optimal	Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial belum optimal	Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah masih belum optimal	

Tabel 2.5

POHON MASALAH
BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang





Isu strategis pembangunan Kota Padang Panjang untuk penentuan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel tabel berikut:

Tabel 2.6
Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Isu Utama	Isu Strategis
1	Isu Pembangunan Manusia	a. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat c. kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami perempuan dalam merasakan manfaat pembangunan d. Peningkatan daya saing kepemudaan dan prestasi keolahragaan
2	Isu Tata Kelola Pemerintahan	a. implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi
3	Isu Pembangunan Ekonomi	a. Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan daerah b. Masih rendahnya nilai Investasi c. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran d. rendahnya pendapatan masyarakat
4	Isu Tatanan Kehidupan Masyarakat	a. Mulai lunturnya nilai-nilai Adat dan Budaya di tengah masyarakat b. Masih terbatas pemahaman masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai keagamaan c. Belum optimalnya layanan ketentraman dan ketertiban umum d. penyelenggaran layanan kesejahteraan sosial
5	Isu kualitas infrastrutur dan lingkungan hidup	a. layanan infrastruktur dasar b. kesesuaian pemanfaatan ruang c. kualitas air, udara, tutupan lahan

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Secara umum isu utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kesbangpol adalah dengan Tata Kelola Pemerintahan khususnya terkait Implementasi 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan reviu penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kesbangpol selama periode sebelumnya, serta berdasarkan permasalahan dan hambatan yang ada, dapat diidentifikasi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menciptakan keterpaduan dan kesatuan gerak/sinergi seluruh stakeholder dalam upaya penanggulangan bencana;

2. Meningkatkan kualitas aparatur BPBD Kesbangpol dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, khususnya bidang penanggulangan bencana;
3. Memaksimalkan ketersediaan dan penataan peralatan, penyimpanan dan logistik kebencanaan;
4. Dibentuknya Kelurahan Tangguh Bencana;
5. Menyediakan dokumen-dokumen Rencana penanggulangan bencana;
6. Mengoptimalkan pemahaman, pengetahuan dan implementasi stakeholder terhadap kebencanaan;
7. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam menjaga stabilitas daerah di kota Padang Panjang;
8. Mengoptimalkan penanganan konflik sosial di Kota Padang Panjang;
9. Meningkatkan rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan bela negara.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan 2025

Renja Perubahan BPBD Kesbangpol disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan awal RKPD, maka ada beberapa program dan kegiatan pada Renja BPBD Kesbangpol dijadikan program dan kegiatan prioritas kedua. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal RKPD Perubahan Tahun 2025 Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dengan Renja Perubahan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD 2025 (Sesuai Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan tahun 2025 (Sesuai PI yang telah dibagikan tahun 2025)					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	***12=11-6***	*13*
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK				**8.176.689.995**					**9.471.364.248**	**1.294.674.253**	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN LAYANAN DASAR				**8.176.689.995**					**9.471.364.248**	**1.294.674.253**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				**8.176.689.995**					**9.471.364.248**	**1.294.674.253**	
X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kota Padang Panjang**	**Persentase Realisasi Urusan Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa Politik**	**100%**	**5.162.290.105**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah**	**100%**	**5.041.271.812**	**-121.018.293**	
X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	4.281.750.289	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**4.192.595.326**	**-89.154.963**	
X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518 Orang/bulan	4.281.750.289	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/bulan	4.192.595.326	-89.154.963	
X.XX.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	**33.150.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**	**0%**	**-**	**-**	
X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	35 Paket	33.150.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	-	
X.XX.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**90%**	**367.873.900**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**100%**	**257.331.470**	**-110.542.430**	
X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.805.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.805.200	**-400**	
X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	45.892.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.466.570	**-5.425.930**	
X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.494.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	15.494.700	**200**	
X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	300.681.050	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	195.567.000	**-105.114.050**	
X.XX.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	**100%**	**80.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	**100%**	**25.994.000**	**-54.006.000**	
X.XX.01.2.07.0001	Pengadaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah unit Mebel yang Disediakan	20 Unit	30.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 paket	-	**-30.000.000**	
X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	**25.994.000**	**-24.006.000**	
X.XX.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**90%**	**178.856.100**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	**100%**	**182.042.116**	**3.186.016**	

No	Rancangan Awal RKPD 2025 (Sesuai Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan tahun 2025 (Sesuai PI yang telah dibagikan tahun 2025)					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	**3.494.400**	**-5.600**	
X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	34.998.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	**34.997.716**	**-784**	
X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	140.357.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	**143.550.000**	**3.192.400**	
X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100%**	**371.840.753**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kota Padang Panjang	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100%**	**383.308.900**	**11.468.147**	
X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	339.238.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	341.778.400	**2.539.600**	
X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	17.310.133	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	26.241.000	**8.930.867**	
X.XX.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.291.820	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.289.500	**-2.320**	
5.01.02	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Kota Padang Panjang	**Persentase Warga yang mendapat Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**100%**	**1.288.440.000**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Kota Padang Panjang	**Persentase Warga yang mendapat Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**	**100%**	**1.288.694.470**	**254.470**	
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Kota Padang Panjang	**Persentase warga yang mendapat pelayanan informasi rawan bencana**	**100%**	**50.000.000**	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Kota Padang Panjang	**Persentase warga yang mendapat pelayanan informasi rawan bencana**	**100%**	**49.999.960**	**-40**	
1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	-	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	-	**-**	
1.05.03.2.01.0003	Sosialsasi,Komunisasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kota Padang Panjang	Jumlah Warga Negara Termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggal selama 1 tahun	160 Orang	50.000.000	Sosialsasi,Komunisasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Kota Padang Panjang	Jumlah Warga Negara Termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggal selama 1 tahun	160 Orang	49.999.960	**-40**	
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Kota Padang Panjang	**Persentase kesiapsiagaan Masyarakat terhadap risiko bencana**	**100%**	**1.052.440.000**	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Kota Padang Panjang	**Persentase kesiapsiagaan Masyarakat terhadap risiko bencana**	**100%**	**1.025.854.450**	**-26.585.550**	
1.05.03.2.02.04	Penyedian Peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan Penyelamatan diri bagi individu warga negara,keluarga,maupun petugas	105 unit	30.000.000	Penyedian Peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan Penyelamatan diri bagi individu warga negara,keluarga,maupun petugas	105 unit	-	**-30.000.000**	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten /Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Warga Negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	175 0rang	120.000.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten /Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Warga Negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	175 0rang	119.999.450	**-550**	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasioanal dan Penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyedian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	12 Dokumen	872.440.000	Pengendalian Operasioanal dan Penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyedian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	12 Dokumen	905.855.000	**33.415.000**	

No	Rancangan Awal RKPD 2025 (Sesuai Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan tahun 2025 (Sesuai PI yang telah dibagikan tahun 2025)					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1.05.03.2.02.0006	Pengutan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan Kapasitas dalam pencegahan dan kesiap siagaan bencana	1 Kawasan	20.000.000	Pengutan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan Kapasitas dalam pencegahan dan kesiap siagaan bencana	1 Kawasan		**-20.000.000**	
1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penangulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	JUmlah Dokumen rencana penanggulangan Bencan (RPB) Kabupaten/Kota sampai dinyatakan sah legal	1 dokumen	10.000.000	Penyusunan Rencana Penangulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	JUmlah Dokumen rencana penanggulangan Bencan (RPB) Kabupaten/Kota sampai dinyatakan sah legal	1 dokumen	-	**-10.000.000**	
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Kota Padang Panjang	**Persentase warga yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**100%**	**90.000.000**	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Kota Padang Panjang	**Persentase warga yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**100%**	**89.997.000**	**-3.000**	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Sk Penetapan Status Darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 Dokumen	90.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Sk Penetapan Status Darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 Dokumen	**89.997.000**	**-3.000**	
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Kota Padang Panjang	**Persentase Jumlah Kerusakan yang tertangani**	**1 Dokumen**	**96.000.000**	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Kota Padang Panjang	**Persentase Jumlah Kerusakan yang tertangani**	**1 Dokumen**	**122.843.060**	**26.843.060**	
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan pemamfaatan system informasi dan kebencanaan	Kota Padang Panjang	Jumlah data informasi kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	53.480.000	Pengelolaan dan pemamfaatan system informasi dan kebencanaan	Kota Padang Panjang	Jumlah data informasi kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	-	**-53.480.000**	
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan pascabencana kabupaten kota	Kota Padang Panjang	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana disemua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekontrulsi pascabencana (R3P) Kabupaten kota yang dilegalkan	4 Kegiatan	42.520.000	Koordinasi penanganan pascabencana kabupaten kota	Kota Padang Panjang	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana disemua sektor sesuai berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekontrulsi pascabencana (R3P) Kabupaten kota yang dilegalkan	4 Kegiatan	**122.843.060**	**80.323.060**	
08.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**	**80%**	**605.000.000**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Kota Padang Panjang	**Persentase pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**	**80%**	**711.022.000**	**106.022.000**	
8.01.02.2.01	**Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**	Kota Padang Panjang	**Persentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar ideologi dan isu-isu di daerah**	**80%**	**605.000.000**	**Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**	Kota Padang Panjang	**Persentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar ideologi dan isu-isu di daerah**	**80%**	**711.022.000**	**106.022.000**	
8.01.02.2.01.0003	Pelaksaaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan,bela negara,karakter bangsa,pembauran kebangsaan,bineka Tunggal ika dan Sejarah kebangsaan	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan,bela negara,karakter bangsa,pembauran kebangsaan,bineka Tunggal ika dan Sejarah kebangsaan	80 orang	605.000.0000	Pelaksaaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan,bela negara,karakter bangsa,pembauran kebangsaan,bineka Tunggal ika dan Sejarah kebangsaan	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan,bela negara,karakter bangsa,pembauran kebangsaan,bineka Tunggal ika dan Sejarah kebangsaan	80 orang	**711.022.000**	**106.022.000**	
08.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Kota Padang Panjang	**Persentase peningkatan stabilitas daerah**	**100%**	**1.072.140.600**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Kota Padang Panjang	**Persentase peningkatan stabilitas daerah**	**100%**	**1.816.083.966**	**743.943.366**	
8.01.032.01	**Perumusan kebijakan teknis pemantapan pelaksanaan bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan dmoktrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum**	Kota Padang Panjang	**Persentase pencegahan terhadap perkembangan politik didaerah yang sesuai dengan etika dan budaya**	**23%**	**1.072.140.600**	**Perumusan kebijakan teknis pemantapan pelaksanaan bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan dmoktrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan partai**	Kota Padang Panjang	**Persentase pencegahan terhadap perkembangan politik didaerah yang sesuai dengan etika dan budaya**	**23%**	**1.816.083.966**	**743.943.366**	

No	Rancangan Awal RKPD 2025 (Sesuai Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan tahun 2025 (Sesuai PI yang telah dibagikan tahun 2025)					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
	kepala daerah serta pemantauan situasi politik					**politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik**						
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demoktrasi,fasilitasi kelmbagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demoktrasi,fasilitasi kelmbagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	45 orang 8 partai politik	600.000.0000	Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demoktrasi,fasilitasi kelmbagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demoktrasi,fasilitasi kelmbagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	45 orang 8 partai politik	**812.999.966**	**212.9999.966**	
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan koordinasidi bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demoktrasi,fasilitasi kelmbagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi di bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demoktrasi,fasilitasi kelmbagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	15 orang 2 lembaga	403.084.0000	Pelaksanaan koordinasidi bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demoktrasi,fasilitasi kelmbagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan koordinasi di bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demoktrasi,fasilitasi kelmbagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	15 orang 2 lembaga	**1.003.084.000**	**600.000.000**	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan monitoring di bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demoktrasi,fasilitasi kelmbagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah laporan hasil monitoring di bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demoktrasi,fasilitasi kelmbagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	1 laporan	69.056.600	Pelaksanaan monitoring di bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demoktrasi,fasilitasi kelmbagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah laporan hasil monitoring di bidang Pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demoktrasi,fasilitasi kelmbagaan pemerintahan,perwakilan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	1 laporan	**-**	**-69.056.600**	
08.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Kota Padang Panjang	**Persentase pencegahan terhadap aktifitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku**	**100%**	**50.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Kota Padang Panjang	**Persentase pencegahan terhadap aktifitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku**	**100%**	**-**	**-50.000.000**	
8.01.04.2.01	**Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**	Kota Padang Panjang	**Jumlah organisasi Masyarakat yang diberdayakan dan diawasi**	**55 organisasi masyarakat**	**50.000.000**	**Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**	Kota Padang Panjang	**Jumlah organisasi Masyarakat yang diberdayakan dan diawasi**	**55 organisasi masyarakat**	**-**	**-50.000.000**	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksaaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas,pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sangketa ormas,pengawasan ormas,dan ormas asing di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas,pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sangketa ormas,pengawasan ormas,dan ormas asing di daerah	80 orang	**50.000.000**	Pelaksaaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas,pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sangketa ormas,pengawasan ormas,dan ormas asing di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas,pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sangketa ormas,pengawasan ormas,dan ormas asing di daerah	80 orang	**-**	**-50.000.000**	
08.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL DAN BUDAYA**	Kota Padang Panjang	**Persentase konflik yang tertangani**	**100%**	**175.900.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL DAN BUDAYA**	Kota Padang Panjang	**Persentase konflik yang tertangani**	**100%**	**113.950.000**	**-61.950.000**	
8.01.05.2.01	**Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial,dan budaya**	Kota Padang Panjang	**Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi,masalah sosial dan budaya dikalangan masyarakat**	**100%**	**175.900.000**	**Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial,dan budaya**	Kota Padang Panjang	**Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi,masalah sosial dan budaya dikalangan Masyarakat**	**100%**	**113.950.000**	**-61.950.000**	
8.01.05.2.01.0003	Pelaksaaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebiajakn dibidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat di daerah	43 orang	**135.000.000**	Pelaksaaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebiajakn dibidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat di daerah	43 orang	113.950.000	**-61.950.000**	

No	Rancangan Awal RKPD 2025 (Sesuai Renstra 2024-2026)					Hasil Analisis Kebutuhan Perubahan tahun 2025 (Sesuai PI yang telah dibagikan tahun 2025)					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
8.01.05.2.01.0004	Pelaksaaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat di daerah	43 orang	**40.900.000**	Pelaksaaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang ketahanan ekonomi,sosial,budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat di daerah	43 orang			
08.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Kota Padang Panjang	**Ppersentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah**	**100%**	**555.750.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Kota Padang Panjang	**Ppersentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daerah**	**100%**	**500.342.000**	**-55.408.000**	
8.01.06.2.01	**Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial**	Kota Padang Panjang	**Persentase pencegahan konflik yang berkembang ditengah Masyarakat**	**100%**	**555.750.000**	**Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial**	Kota Padang Panjang	**Persentase pencegahan konflik yang berkembang ditengah masyarakat**	**100%**	**500.342.000**	**-55.408.000**	
8.01.06.2.01.0003	Pelaksaaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,Kerjasama intelijen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan Lembaga asing ,kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebiajakn dibidang kewaspadaan dini,Kerjasama intelijen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan Lembaga asing ,kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	59 orang	**55.750.000**	Pelaksaaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini,Kerjasama intelijen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan Lembaga asing ,kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebiajakn dibidang kewaspadaan dini,Kerjasama intelijen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan Lembaga asing ,kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah	59 orang	500.342.000	**-55.408.000**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BPBD Kesbangpol dalam proses penyusunan perencanaan telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun BPBD Kesbangpol juga memiliki tanggung jawab dalam meakomodir usulan-usulan tersebut dalam Anggaran BPBD Kesbangpol

Pada Musrenbang RKPD Tahun 2025 ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BPBD Kesbangpol selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BPBD KESBANGPOL

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditujukan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.1.1. Tujuan, Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi COVID-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu ***"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".*** Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian

target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta (8) pelaksanaan pemilu 2024.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu ***"Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan"***, dengan penjabaran misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara'–Syara'	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Misi	Tujuan	Sasaran
Basandi Kitabullah		
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdaganga
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang Sejahtera
		Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sector
		Meningkatnya pertumbuhan Investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan public

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu: ***"Peningkatan Daya Saing Daerah".***

3.1.2. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta nantinya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah maupun perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Target dari tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 dirumuskan dengan berdasarkan sasaran RPJMD Kota Padang Panjang 2025-2029, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, serta kebijakan pembangunan nasional tahun 2025. Berikut dijelaskan penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
1	**Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing**			**Indeks Pembangunan Manusia**	**78,78**	**78,97**	**79,02**	**79,38**	**79,73**	**79,73**
		1	Meningkatnya kualitas pendidikanmasyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	11,92	11,93	11,94	11,96	11,98	11,98
				Harapan Lama Sekolah	15,07	15,08	15,09	15,10	15,11	15,11
		2	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Umur HarapanHidup	73,02	73,03	73,04	73,05	73,06	73,06
				Prevelansi Stunting	16,80	15,40	14,00	12,60	11,20	11,20
		3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan gender	69,44	70,84	71,44	73,05	74,06	74,06
				Predikat Kota Layak Anak	nindya	Nindya	Utama	Utama	Utama	utama
		4	Meningkatnya daya saingk kepemudaan dan keolahragaan	Status Kota layak pemuda	-	-	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Pratama	Pratama
				Rasio daya saing keolahragaan	-	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30
2	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan Akuntabel**			**Indeks Reformasi Birokrasi**	**59,40**	**56,42**	**57,62**	**58,82**	**60,02**	**60,02**
		5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	62,91	63,10	63,98	64,86	65,74	65,74
				IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	70,61	70,85	71,00	71,50	72,00	72
				Nilai Sistem Merit	Sangat Baik (325)	Sangat Baik (328)	Sangat Baik (330)	Sangat Baik (335)	Sangat Baik (340)	Sangat Baik (340)
				Maturitas SPIP	2+	2+	3 (3.1)	3 (3.2)	3 (3.3)	3 (3.3)

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
				Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	85	88	90	93	95	95
				Indeks SPBE	2,09	2,40	2,70	2,85	3,00	3,00
3	**Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan Ketimpangan**			**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**4,39**	**4,79**	**5,20**	**5,60**	**6,00**	**6,00**
		6	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	LPE sektorPerdagangan	5,28	5,82	6,36	6,90	7,44	7,44
				LPE sektor pertanian	5,54	5,59	5,64	5,69	5,74	5,74
				LPE sektor akomodasi makandan minum	10,47	10,71	10,95	11,19	11,43	11,43
		7	Meningkatnya investasi	Persentase pertumbuhan nilai investasi	6	6	6	6	100	100
		8	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Tingkat kemiskinan	5,14	4,69	4,24	3,79	3,34	3,34
				Tingkat Pengangguran Terbuka	4,84	4,72	4,60	4,48	4,36	4,36
		9	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Pengeluaran per Kapita	11,15	11,228	11,328	11,378	11,453	11,453
				Indeks Gini	0,296	0,294	0,292	0,290	0,288	0,288
4	**Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis**			**Indeks Rasa Aman**	**Aman (86,04)**	**Aman (86,20)**	**Aman (86,39)**	**Aman (89,09)**	**Aman (91,78)**	**Aman (91, 78)**
		10	Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase Pemajuan Kebudayaan	65,42	68,00	71,00	74,00	77,00	77,00
				Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	75	80	85	90	95	95
		11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran	100	100	100	100	100	100
				Ketentraman dan Ketertiban Umum						
		12	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	Angka PPKS	5,68	4,87	4,68	4,49	4,30	4,30

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
5	**Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas**			**Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)**	**90,96**	**91,16**	**91,36**	**91,56**	**91,76**	**91,76**
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	**66,61**	**66,80**	**67-68**	**66,76**	**69-70**	**69-70**
		13	Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	IKLI kePUan	89,66	89,86	90,06	90,26	90,46	90,46
				IKLI perkim	96,8	96,85	96,90	96,92	96,95	96,95
				IKLI perhubungan	96,62	96,69	96,76	96,83	96,90	96,90
		14	Meningkatnya konsistensi penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82	82,5	83	83,5	84	84
		15	Meningkatnya kualitas udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	46,07	46,5	45,75	46,5	47,25	47,25
				Indeks Kualitas Udara	91,29	91,5	90,05	90,10	90,15	90,15
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,18	56,18	57,00	57,50	58,00	58,0

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Padang Panjang, BPBD Kesbangpol berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan yang ada dalam Renstra BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang 2025-2029.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai lembaga teknis perencanaan, BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Dengan adanya kontribusi tersebut, diharapkan dari aspek perencanaan dan aspek penelitian dan pengembangan, dapat diwujudkan bersama seluruh *stakeholder*.

3.1.3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis BPBD Kesbangpol yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD KESABANGPOL Tahun 2025-2029 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana dan kesatuan bangsa politik.

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

Tabel. 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
BPBD Kesbangpol Tahun 2024-2026

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum melalui layanan kebencanaan daerah, impelementasi nilai-nilai ideologi pancasila, karakter kebangsaan dan pendidikan politik									
NSPK : - RPJMD: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum			Indeks Harmoni	70	72	74	76	78	80	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Kapasitas adaptasi Masyarakat terhadap ideologi pancasila, karakter kebangsaan, dan pendidikan Politik	Persentase Konflik Tertangani	100	100	100	100	100	100	
NSPK : - RPJMD: Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim			Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.32	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	
		Meningkatnya Kapasitas Adaptasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana	Cakupan Wilayah Dengan Sistem Penagulangan Bencana Terpadu	88	90	93	95	98	100	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP BPBD Kesbangpol	64,15	64,25	64,45	64,75	64,95	65	

Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan BPBD Kesbangpol Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.
2. Penetapan Renstra BPBD Kesbangpol Tahun 2024- 2026.
3. Evaluasi Pelaksanaan Renstra tahun kelima, serta Renja BPBD Kesbangpol sampai dengan Tahun 2024.
4. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan BPBD Kesbangpol.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPBD Kesbangpol Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   1) Pengadaan Pakaian Dinas Atribut Kelengkapannya
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   1) Pengadaan Mebel
   2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
a. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
b. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana

3 Program Penanggulangan Bencana
a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota
   1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
   2) Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Ancaman Bencana)
   3) Pengendalian Operasi dan Penyedian Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota
b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
   1) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
c. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
   1) Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

4 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
   1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Pembauran Kebangsaan,Bhineka Tungal Ika dan Sejarah Kebangsaan

5 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum

Kepala Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik.

1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

6 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
   1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan Mediasi Sangketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

7 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

8 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
   1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,serta Penangangan Konflik di Daerah

Program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Perubahan Tahun 2025 Kota Padang Panjang

BPBD Kesbangpol

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perubahan 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK					**9.471.364.248**				**8.675.102.893**
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					**9.471.364.248**				**8.675.102.893**
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					**9.471.364.248**				**8.675.102.893**
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah**	Kota Padang Panjang	**100,00%**	**5.041.271.812**			**100,00%**	**4.783.997.667**
1 .05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**Kota Padang Panjang**	**100%**	**4.192.595.326**	**DAU**		**100%**	**4.171.597.345**
1 .05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	518 Orang/bulan	4.192.595.326	DAU		518 Orang/bulan	4.171.597.345
1 .05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah**	**Kota Padang Panjang**	**100%**	**257.331.470**	**DAU**		**100%**	**156.645.050**
1 .05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Paket	5.805.200	DAU		1 Paket	3.126.800
1 .05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Paket	40.464.570	DAU		1Paket	19.495.050
1 .05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	2 Paket	15.494.700	DAU		2 Paket	12.783.200
1 .05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	150 Laporan	195.567.000	DAU		150 Laporan	121.240.000
1 .05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan**	Kota Padang	**100%**	**25.994.000**	**DAU**		**100%**	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perubahan 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Daerah	**Perencanaan**	Panjang						
1 .05.01.2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Padang Panjang	5 uni	-	DAU		5 unit	-
1 .05.01.2.07 0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang	3 unit	25.994.000	DAU		3 Unit	-
1 .05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi**	Kota Padang Panjang	**100%**	**182.042.116**	**DAU**		**100%**	**142.830.072**
1 .05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	3 Laporan	3.494.400	DAU		3 Laporan	1.747.200
1 .05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang	36 Laporan	34.997.716	DAU		36 Laporan	27.194.872
1 .05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	4 Laporan	143.550.000	DAU		4 Laporan	113.888.000
1 .05.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	Kota Padang Panjang	**100%**	**383.308.900**	**DAU**		**100%**	**312.925.200**
1 .05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Padang Panjang	20 Unit	341.778.400	DAU		20 Unit	270.416.000
1 .05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang	1 Unit	26.241.000	DAU		1 Unit	37.110.000
1 .05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang	1 Unit	15.289.500	DAU		1 Unit	5.399.200
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BNECANA**	**Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan**	Kota Padang Panjang	**100%**	**1.228.694.470**			**100 %**	**814.733.760**
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase warga yang mendapatkan pelauanan dan pencegahan dan kesiapsiagaan**	Kota Padang Panjang	**100 %**	**49.999.960**	**PAD**		**100 %**	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perubahan 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		terhadap bencana							
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi,Komunikasi,Informasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang termasuk kelompok rentan di Kawasan rawan becana kabupaten/kota	Kota Padang Panjang	160 orang	49.999.960	PAD		-	-
1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risko Bencana Kabupaten/kota	Jumlah dokumen kajian risiko bencana (KRB) sampai dinyatakan sah dan legal	Kota Padang Panjang	1 dokumen	-	PAD		1 Dokumen	-
1.05.03.2.02.	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana**	**Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	Kota Padang Panjang	**160 orang**	**1.025.854.450**	**PAD**		**198 orang**	**769.887.600**
1.05.03.2.02..0015	Penyedian peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara keluarga,maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di Kawasan tempat tinggal	Kota Padang Panjang	15 unit	-	PAD		-	-
1.05.03.2.02..0026	Pengendalian operasi penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal	Kota Padang Panjang	12 laporan	905.855.000	PAD			769.887.600
1.05.03.2.02..0027	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten kota	Jumlah laporan layanan pusat jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) kabupaten/kota sampai dinyatakan sah dan legal	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	-	PAD			-
1.05.03.2.02..0028	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana kabupaten /kota yang mengikurti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Padang Panjang	22 kawasan	119.999.450	PAD			-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perubahan 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana**	Kota Padang Panjang	**100 %**	**89.997.000**	**PAD**		**100 %**	**22.005.000**
1.05.03.2.03.0002	Resppon cepat darurat bencana kabupaten /kota	Jumlah dokumen sk penetapan status darurat bencana dan skpdb yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil laporan kaji cepat	Kota Padang Panjang	1 dokumen	89.997.000	PAD		1 dokumen	22.005.000
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Jumlah Dokumen yang disusun**	Kota Padang Panjang	**1 Dokumen**	**122.843.060**	**PAD**		**-**	**22.841.160**
1.05.03.2.04.0010	Pengelolaan Data dalam Sistem koordinasi penangganan pascabencana kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana disemua sektor	Kota Padang Panjang	1 kegiatan	122.843.060	PAD		1 Dokumen	22.841.160
8.01	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**3.141.397.966**				**3.076.371.466**
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANG SAAN**	**Persentase pemahamanterhadap ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**	Kota Padang Panjang	**80%**	**711.022.000**			**80%**	**635.440.750**
8.01.02 2.01	**Perumusan kebiajakn teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan**	**Persentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang ideologi radikal dan isu-isu di daerah**	Kota Padang Panjang	**80%**	**711.022.000**	**PAD**		**80%**	**635.440.750**
8.01.02 2.01.0003	Pelaksanaan kebijakan dibidang ideolgi wawasan kebangsaan,bela negara,karakter bangsa pembauran kebangsaan bineka tungal ika dan Sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelkasanaan kebijakan dibidang ideolgi wawasan kebangsaan,bela negara,karakter bangsa pembauran kebangsaan bineka tungal ika dan Sejarah kebangsaan	Kota Padang Panjang	80 orang	711.022.000	PAD		80 orang	635.440.750
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase peningkatan stabilitas daerah**	Kota Padang Panjang	**100%**	**1.816.083.966**			**80%**	**2.308.314.716**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perubahan 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
8.01.02 3.01	**Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang penididikan politik etika budaya politik,peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umumkepala daerah serta pemantauan situasi politik**	**Persentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya**	Kota Padang Panjang	**23%**	**1.816.083.966**	**PAD**		**23%**	**2.308.314.716**
8.01.02 3.01.003	**Pelaksanaan kebijakan di bidang penididikan politik etika budaya politik,peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umumkepala daerah serta pemantauan situasi politik**	**Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang penididikan politik etika budaya politik,peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umumkepala daerah serta pemantauan situasi politik**	Kota Padang Panjang	**45 Orang**	**812.999.966**			**45 Orang**	**796.294.916**
8.01.02 3.01.003	**Pelaksanan koordinasi penididikan politik etika budaya politik,peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umumkepala daerah serta pemantauan situasi politik**	**Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang penididikan politik etika budaya politik,peningkatan demokrasi fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan partai politik pemilihan umum/pemilihan umumkepala daerah serta pemantauan situasi politik**	Kota Padang Panjang	**15 orang**	**1.003.084000**			**15 orang**	**1.512.019.800**
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase pencegahan terhadap aktivitas ormas yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku**	Kota Padang Panjang	**100%**	**-**			**100%**	**-**
8.01.04.2.01	**Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan**	**Jumlah organisasi Masyarakat yang diperdayakan dan diawasi**	Kota Padang Panjang	**55 ormas**	**-**	**PAD**		**80%**	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perubahan 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftran ormas,pemberdayaan ormas,evaluasi ormas dan pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sangketa ormas pengawasan ormas.	Kota Padang Panjang	55 orang	-	PAD		55 orang	-
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA**	**Persentase konflik tertangani**	Kota Padang Panjang	**100%**	**113.950.000**			**100%**	**-**
8.01.05.2.01	**Perumusan kebijakan teknis pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya**	**Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi,masalah sosial dan budaya dikalangan masyarakat**	Kota Padang Panjang	**100%**	**113.950.000**	**PAD**		**100%**	**-**
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya fasiliatasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah orang yang mengikjuti pelaksanaan kebijakan dibidang ketahan ekonomi sosial budaya da fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Kota Padang Panjang	43 orang	113.950.000	PAD		43 orang	**-**
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Perpersentase kewaspadaan nasional yang tertangani di daedrah**	Kota Padang Panjang	**100%**	**500.342.000**			**100%**	**132.616.000**
8.01.06.2.01	**Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial**	**Persentase pencegahan konflik sosial yang berkembang ditengah masyarakat**	Kota Padang Panjang	**100%**	**500.342.000**	**PAD**		**100%**	**132.616.000**
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini,Kerjasama intelijen pemantauan orang asing tenaga kerja dan Lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara fasilitasi bidang kewaspadaan	Jumlah orang yang mengikjuti pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini,Kerjasama intelijen pemantauan orang asing tenaga kerja dan Lembaga asing kewaspadaan perbatasan antar negara fasilitasi bidang kewaspadaan	Kota Padang Panjang	59 orang	500.342.000	PAD		43 orang	132.616.000

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Perubahan BPBD Kesbangpol sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

b. Mempedomani RKPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 serta Review Renstra BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
c. Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Daerah Kota Padang Panjang tahun 2024 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025. Secara umum BPBD Kesbangpol bertugas menkoordinasikan pencapaian seluruh 1 (satu) indikator tujuan dan 2 (dua) indikator sasaran pembangunan daerah.

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja BPBD KESABANGPOL sebagaimana table 3.5 berikut :

Tabel 3.5 Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK							**8.182.482.589**	**9.471.364.248**	**8.675.110.132**							**8.499.838.783,00**	
	1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**8.182.482.589**	**9.471.364.248**	**8.675.110.132**							**6.100.732.783,00**	
	1.05.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MA**							**8.182.482.589**	**9.471.364.248**	**8.675.110.132**							**6.100.732.783,00**	
##	**1.05.03.**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Cakupan Penyebaran Informasi Dan Edukasi Rawan Bencana**	**93 Persen**		**85 Persen**	**100 %**	***88 Persen***	**1.595.301.900**	**1.288.694.470**	**817.577.110**							**1.614.100.488,00**	
	1.05.03.2.01.	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Masyarakat yang mendapatkan layanan Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana**	**100 Persen**		**70 Persen**		**75 Persen**	**155.078.000**	**49.999.960**	**-**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**masyarakat padang panjang**		**155.078.000,00**	**BPBD**
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	26734,58865 Orang		3150 Orang	160 Orang	3465 Orang	50.000.000	49.999.960	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			50.000.000,00	BPBD
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	105.078.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			105.078.000,00	BPBD
	1.05.03.2.02.	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase Kesiapan Masyarakat Terhadap Risiko Bencana**	**100 Persen**		**100 Persen**		***100 Persen***	**1.287.440.000**	**1.025.854.450**	**779.660.950**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**1.287.440.000,00**	**BPBD**
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	120 Unit		NA Unit	15 Unit	0 Unit	30.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			30.000.000,00	BPBD
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	72 laporan		12 laporan	12 laporan	12 laporan	872.440.000	905.855.000	779.660.950	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			872.440.000,00	BPBD
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen		N.A Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	265.000.000	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			265.000.000,00	BPBD

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	96 Kawasan		16 Kawasan	22 Kawasan	16 Kawasan	120.000.000	119.999.450	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			120.000.000,00	BPBD
	1.05.03.2.03.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 %**	***100 Persen***	**90.000.000**	**89.997.000**	**15.075.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**100.000.000,00**	**BPBD**
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	89.997.000	15.075.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			100.000.000,00	BPBD
	1.05.03.2.04.	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase Penanganan Pasca Bencana**	**100 Persen**		**100 Persen**	**1 dokumen**	***100 Persen***	**62.783.900**	**122.843.060**	**22.841.160**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**71.582.488,00**	**BPBD**
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	6 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	62.783.900	122.843.060	22.841.160	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			71.582.488,00	BPBD
##	**1.05.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 %**	***100 Persen***	**4.697.290.105**	**5.041.271.812**	**4.635.761.556**							**4.486.632.295,00**	
	1.05.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	***100 Persen***	**3.816.750.289**	**4.192.595.326**	**4.037.233.984**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**3.483.076.982,00**	**BPBD**
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3108 Orang/bulan		406 Orang/bulan	518 Orang/bulan	518 Orang/bulan	3.816.750.289	4.192.595.326	4.037.233.984	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			3.483.076.982,00	BPBD
	1.05.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah presentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur**	100 Persen		100 Persen		***0 Persen***	**-**	**-**	**-**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**35.000.000,00**	**BPBD**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111 Paket		37 Paket		0 Paket	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			35.000.000,00	BPBD
	1.05.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**		***100 Persen***	**257.333.900**	**257.331.470**	**119.901.500**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**229.951.380,00**	**BPBD**
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.805.500	5.805.200	1.484.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			7.160.780,00	BPBD
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	1 Paket	2 Paket	40.466.400	40.464.570	15.428.550	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			22.348.700,00	BPBD
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		2 Paket	2 Paket	2 Paket	15.495.000	15.494.700	5.257.650	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			12.901.900,00	BPBD
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan		189 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	195.567.000	195.567.000	97.731.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			187.540.000,00	BPBD
	1.05.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan**	**100 Persen**		**100 Persen**		***0 Persen***	**88.495.600**	**25.994.000**	**-**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**140.000.000,00**	**BPBD**
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit		45 Unit	5 Unit	0 Unit	50.495.600	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			70.000.000,00	BPBD
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit		6 Unit	3 Unit	0 Unit	38.000.000	25.994.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			70.000.000,00	BPBD
	1.05.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpenuhi**	**100 Persen**		**100 Persen**		***100 Persen***	**162.847.816**	**182.042.116**	**164.160.072**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**181.976.470,00**	**BPBD**
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	3.496.500	3.494.400	1.747.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			4.950.000,00	BPBD
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30 Laporan	34.997.716	34.997.716	26.644.872	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			32.299.080,00	BPBD

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36 Laporan	124.353.600	143.550.000	135.768.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			144.727.390,00	BPBD
	1.05.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 Persen**		**100 Persen**		***100 Persen***	**371.862.500**	**383.308.900**	**314.466.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**416.627.463,00**	**BPBD**
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit		17 Unit	20 Unit	20 Unit	339.238.800	341.778.400	278.816.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			373.025.510,00	BPBD
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit		20 Unit	62 Unit	62 Unit	17.333.800	26.241.000	35.650.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			23.310.133,00	BPBD
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	15.289.900	15.289.500	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			20.291.820,00	BPBD
	8.	**NON URUSAN**							**-**	**-**	**-**							**2.399.106.000,00**	
	8.01.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**-**	**-**	**-**							**2.399.106.000,00**	
##	**8.01.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Kesatuan Bangsa Politik**	**100 Persen**		**100 Persen**		***100 Persen***	**-**	**-**	**-**							**4.486.632.295,00**	
	8.01.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**		***0 Persen***	**-**	**-**	**-**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**35.000.000,00**	**BPBD**
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	111 Paket		37 Paket	0 Paket	0 Paket	-	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			0,00	BPBD
	8.	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**1.889.890.584**	**3.141.397.966**	**3.221.771.466**							**2.399.106.000,00**	
	8.01.	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**1.889.890.584**	**3.141.397.966**	**3.221.771.466**							**2.399.106.000,00**	
##	**8.01.02.**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**	**80 Persen**		**80 Persen**	**80 %**	***80 Persen***	**605.000.000**	**711.022.000**	**635.440.750**							**711.022.000,00**	
	8.01.02.2.01.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Pencegahan Terhadap Peristiwa Gangguan Keamanan Berlatar Belakang Ideologi Radikal Dan Isu-Isu Di Daerah**	**100 Persen**		**80 Persen**	**80 %**	***80 Persen***	**605.000.000**	**711.022.000**	**635.440.750**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**711.022.000,00**	**BPBD**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	280 Orang		65 Orang	80 Orang	80 Orang	605.000.000	711.022.000	635.440.750	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			711.022.000,00	BPBD
##	**8.01.03.**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 %**	***100 Persen***	**1.003.084.000**	**1.816.083.966**	**2.333.714.716**							**1.003.084.000,00**	
	8.01.03.2.01.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase Pencegahan Terhadap Perkembangan Politik Di Daerah Yang Tidak Sesuai Dengan Etika Dan Budaya**	**100 Persen**		**100 Persen**		***100 Persen***	**1.003.084.000**	**1.816.083.966**	**2.333.714.716**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**1.003.084.000,00**	**BPBD**
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	270 Orang		45 7 Hibah Orang	45 Orang	45 Orang	600.000.000	812.999.966	796.294.916	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			600.000.000,00	BPBD
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	115 Orang		15 5 Hibah Orang	15 Orang	15 Orang	403.084.000	1.003.084.000	1.537.419.800	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			403.084.000,00	BPBD

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
##	**8.01.04.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 %**	***100 Persen***	**81.806.584**	**-**	**-**							**50.000.000,00**	
	8.01.04.2.01.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah Organisasi Masyarakat Yang Diberdayakan Dan Diawasi**	**55 Ormas**		**55 Ormas**	**55 ormas**	***0 Ormas***	**81.806.584**	**-**	**-**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**50.000.000,00**	**BPBD**
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	14 Orang		55 Orang	55 Orang	0 Orang	81.806.584	-	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			50.000.000,00	BPBD
##	**8.01.05.**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah Yang Dilaksanakan**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 %**	***100 Persen***	**100.000.000**	**113.950.000**	**-**							**135.000.000,00**	
	8.01.05.2.01.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase Pencegahan Potensi Konflik Akibat Gejolak Ekonomi, Masalah Sosial Dan Budaya Dikalangan Masyarakat**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100%**	***100 Persen***	**100.000.000**	**113.950.000**	**-**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**135.000.000,00**	**BPBD**
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	164 Orang		43 Orang	43 Orang	43 Orang	100.000.000	113.950.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			135.000.000,00	BPBD
##	**8.01.06.**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 %**	***100 Persen***	**100.000.000**	**500.342.000**	**252.616.000**							**500.000.000,00**	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	8.01.06.2.01.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Pencegahan Konflik Yang Berkembang Ditengah Masyarakat**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 %**	***100 Persen***	**100.000.000**	**500.342.000**	**252.616.000**			-	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	-		**500.000.000,00**	**BPBD**
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	204 Orang		43 Orang	59 Orang	59 Orang	100.000.000	500.342.000	252.616.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			500.000.000,00	BPBD

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja Perubahan) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD*) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku *(stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Perubahan BPBD Kesbangpol merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Renja Perubahan BPBD Kesbangpol disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Renja Perubahan BPBD Kesbangpol yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang selama tahun 2025. Terlaksananya Renja Perubahan BPBD Kesbangpol sesuai dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait pada BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Juni 2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Padang Panjang



I PUTU VENDA, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda Nip. 197705221995111001

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025

Disusun Oleh :

INSPEKTORAT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika Penulisan 3
Bab I Pendahuluan 3
Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun Berkenaan 3
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2025 4
Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah 4
Bab V Penutup 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD Tahun Berjalan **5**
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2025 dan Capaian Renstra Tahun 2024-2026. 5
2.2. Analisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 15
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **18**
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 18
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 18
3.3. Program dan Kegiatan 200
BAB IV PENUTUP **30**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Renja-PD merupakan acuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah dan merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) OPD. Renja-PD Perubahan memuat hasil evaluasi Renja tahun berkenaan sampai dengan Triwulan I, dan memuat tujuan dan sasaran Renja-PD serta program dan kegiatan perubahan pada tahun berkenaan.

Dengan demikian Renja-PD Perubahan pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra dan salah satu dari komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja-PD Perubahan dalam tahun berkenaan dilakukan pengukuran kinerja triwulan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja..

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-PD sebagaimana diamanatkan dalam pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Renja-PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berkenaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :

a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD dan/atau
b) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berkenaan, maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025 ini didasarkan atas hasil evaluasi Renja-PD pada Triwulan II yang meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, Renstra Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dan menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi terkait pelaksanaan program/kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah :

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962
b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
f) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
g) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

h) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kota Padang Panjang;
i) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 60 Tahun 2022;
j) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
k) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Lembaran Negara Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 9);
l) Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun berkenaan, guna menyikapi perkembangan keadaan yang yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD sesuai dengan Renja sebelumnya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah guna mengarahkan kembali seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2025 dapat terencana dan berkenaan dengan baik sesuai dengan perkembangan keadaan yang terjadi, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencapai sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sertasistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun Berkenaan

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berkenaan serta keterkaitan dengan pencapaian Renstra-PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun berkenaan, analisis kinerja pelayanan, serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2025

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja-PD, serta program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat tabel rencana kerja dan pendanaan pada Inspektorat daerah Kota Padang Panjang untuk Anggaran Perubahan Tahun 2025.

Bab V Penutup

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun berjalan adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi pada tahun 2025.

Secara umum pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sudah disusun berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan keuangan daerah. Pada Insepktorat Daerah Kota Padang Panjang tahun anggaran 2025 yang terdiri dari 3 (tiga) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2025 adalah sebagaimana terlampir dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan I Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

No	Sasaran	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Pengawasan yang Tuntas Dilaksanakan**	**95%**	Rp 1.340.000.000	100%	Rp 516.038.800		Rp 672.172.000		Rp 111.850.000							100%	Rp 111.850.000	100%	Rp 627.888.800	46,86%	Rp 627.888.800	ITDA
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditan**	**80%**	Rp 1.185.000.000	100%	Rp 459.108.800		Rp 585.922.000		Rp 111.850.000							100%	Rp 111.850.000	100%	Rp 570.958.800	48,18%	Rp 570.958.800	ITDA
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah	18 Laporan	Rp 170.000.000	6 Laporan	Rp 30.250.000	6 Laporan	Rp 65.100.000									6 Laporan	Rp	6 Laporan	Rp 30.250.000	17,79%	Rp 30.250.000	ITDA
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah	375 Laporan	Rp 675.000.000	194 Laporan	Rp 344.265.000	120 Laporan	Rp 406.800.000	31 Laporan	Rp 78.665.000							194 Laporan	Rp 78.665.000	194 Laporan	Rp 422.930.000	62,66%	Rp 422.930.000	ITDA
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan	Rp 80.000.000	2 Laporan	Rp 17.690.000	2 Laporan	Rp 22.200.000	1 Laporan	Rp 18.225.000							2 Laporan	Rp 18.225.000	2 Laporan	Rp 35.915.000	44,89%	Rp 35.915.000	ITDA
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan	3 Laporan	Rp 75.000.000	1 Laporan	Rp 15.365.000	1 Laporan	Rp 16.650.000	1 Laporan	Rp 14.960.000							1 Laporan	Rp 14.960.000	1 Laporan	Rp 30.325.000	40,43%	Rp 30.325.000	ITDA
		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Joint Audit dan Laporan Kerjasama dengan APH yang	4 Laporan	Rp 40.000.000	0%	Rp -	-											Rp		Rp	0,00%	Rp	ITDA
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil	13 Laporan	Rp 145.000.000	6 Laporan	Rp 51.538.800	4 Laporan	Rp 75.172.000									6 Laporan	Rp	6 Laporan	Rp 51.538.800	35,54%	Rp 51.538.800	ITDA
		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	**Persetnase Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang Tuntas Dilaksanakan**		Rp 155.000.000	100%	Rp 56.930.000	**100%**	Rp 86.250.000		Rp -							100%	Rp	100%	Rp 56.930.000	36,73%	Rp 56.930.000	ITDA
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah yang ditangani	3 Laporan	Rp 7.500.000	1 Laporan	Rp -	1 Laporan	Rp 22.050.000									1 Laporan	Rp	1 Laporan	Rp	0,00%	Rp	ITDA
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	18 Laporan	Rp 147.500.000	6 Laporan	Rp 56.930.000	6 Laporan	Rp 64.200.000									6 Laporan	Rp	6 Laporan	Rp 56.930.000	38,60%	Rp 56.930.000	ITDA
	Meningkatnya Kepuasan Stakeholder	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Persetnase Capaian Aksi pada Aplikasi MCP**	**93%**	Rp 630.280.000	100%	Rp 138.759.595	**91%**	Rp 372.298.200		Rp 11.880.000							100%	Rp 11.880.000	100%	Rp 150.639.595	23,90%	Rp 150.639.595	ITDA
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	**Persentase Pendampingan dan Asistensi yang Tuntas Dilaksanakan**	**75%**	Rp 40.000.000	100%	Rp -	**50%**	Rp -		Rp -							100%	Rp	100%	Rp	0,00%	Rp	ITDA

		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	Rp 40.000.000	0%	Rp												Rp		Rp	0,00%	Rp	ITDA
		Pendampingan dan Asistensi	**Persentase Pendampingan dan Asistensi yang Tuntas Dilaksanakan**	**90%**	Rp 590.280.000	100%	Rp 138.759.595	**87%**	Rp 372.298.200		Rp 11.880.000						100%	Rp 11.880.000	100%	Rp 150.639.595	25,52%	Rp 150.639.595	ITDA
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah	69 Perangkat Daerah	Rp 172.280.000	23 Perangkat Daerah	Rp 60.770.000	23 Perangkat Daerah	Rp 106.725.000	23 Perangkat Daerah	Rp 11.880.000						23 Perangkat Daerah	Rp 11.880.000	23 Perangkat Daerah	Rp 72.650.000	42,17%	Rp 72.650.000	ITDA
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikai dan Penilaian Reformasi	69 Perangkat Daerah	Rp 35.000.000	23 Perangkat Daerah	Rp 3.885.000	23 Perangkat Daerah	Rp 19.000.000								23 Perangkat Daerah	Rp	23 Perangkat Daerah	Rp 3.885.000	11,10%	Rp 3.885.000	ITDA
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	6 Kegiatan	Rp 208.000.000	3 Kegiatan	Rp 14.289.125	2 Kegiatan	Rp 122.148.800								3 Kegiatan	Rp	3 Kegiatan	Rp 14.289.125	6,87%	Rp 14.289.125	ITDA
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	69 Perangkat Daerah	Rp 175.000.000	23 Perangkat Daerah	Rp 59.815.470	23 Perangkat Daerah	Rp 124.424.400								23 Perangkat Daerah	Rp	23 Perangkat Daerah	Rp 59.815.470	34,18%	Rp 59.815.470	ITDA
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/**	**Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat Daerah**	**95%**	Rp 14.436.828.880	100%	Rp 6.286.034.267	**90%**	Rp 6.173.076.299		Rp 1.285.800.008						100%	Rp 1.285.800.008	100%	Rp 7.571.834.275	52,45%	############	ITDA
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	Rp 12.450.000.000	100%	Rp 5.068.934.189	**100%**	Rp 4.748.304.519		Rp 1.199.922.038						100%	Rp 1.199.922.038	100%	Rp 6.268.856.227	50,35%	############	ITDA
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	1442/ Orang	Rp 12.450.000.000	31 Orang/ Bulan	Rp 5.068.934.189	31 Orang/ Bulan	Rp 4.748.304.519	31 Orang/ Bulan	Rp 1.199.922.038						31 Orang/ Bulan	Rp 1.199.922.038	31 Orang/ Bulan	Rp 6.268.856.227	50,35%	############	ITDA
		Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	Rp 148.000.000	100%	Rp 327.377.550	**100%**	Rp 200.000.000		Rp 9.350.000						100%	Rp 9.350.000	100%	Rp 336.727.550	227,52%	Rp 336.727.550	ITDA
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Attribut Kelengkapan	40 Paket	Rp 40.000.000	40 Paket	Rp 15.500.000										40 Paket	Rp	40 Paket	Rp 15.500.000	38,75%	Rp 15.500.000	ITDA
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimtek Pemeriksa yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan	1 Orang	Rp 10.000.000	0%	Rp	-										Rp		Rp	0,00%	Rp	ITDA
		Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan	Jumlah Aparatur Pemeriksa yang terlatih dan studi Komparatif	112 Orang	Rp 98.000.000	40 Orang	Rp 311.877.550	31 Orang	Rp 200.000.000	31 Orang	Rp 9.350.000						40 Orang	Rp 9.350.000	40 Orang	Rp 321.227.550	327,78%	Rp 321.227.550	ITDA

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**00%**	Rp 681.828.880	100%	Rp 308.766.508	**100%**	Rp 315.717.580		Rp 20.042.985							100%	Rp 20.042.985	100%	Rp 328.809.493	48,22%	Rp 328.809.493	ITDA
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor yang	12 Paket	Rp 9.300.000	1 Paket	Rp 2.007.000	4 Paket	Rp 1.201.100									1 Paket	Rp	1 Paket	Rp 2.007.000	21,58%	Rp 2.007.000	ITDA
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan da n Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 30.000.000	1 Paket	Rp 2.050.000	1 Paket	Rp 1.958.800									1 Paket	Rp	1 Paket	Rp 2.050.000	6,83%	Rp 2.050.000	ITDA
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	12 Paket	Rp 87.528.880	1 Paket	Rp 40.594.900	4 Paket	Rp 49.696.280									1 Paket	Rp	1 Paket	Rp 40.594.900	46,38%	Rp 40.594.900	ITDA
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Jumlah Paket Bararng Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket	Rp 75.000.000	2 Paket	Rp 12.454.450	12 Paket	Rp 16.723.400	1 Paket	Rp 225.000							2 Paket	Rp 225.000	2 Paket	Rp 12.679.450	16,91%	Rp 12.679.450	ITDA
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	Rp 30.000.000	0%	Rp -	-											Rp		Rp	0,00%	Rp	ITDA
		Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	430 Laporan	Rp 450.000.000	83 Laporan	Rp 251.660.158	150 Laporan	Rp 246.138.000	22 Laporan	Rp 19.817.985							0	Rp 19.817.985	0	Rp 271.478.143	60,33%	Rp 271.478.143	ITDA
		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai dengan	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusanan Pemerintah Daerah**	**100%**	Rp 80.000.000	100%	Rp 163.750.000	**100%**	Rp 168.444.600		Rp -							100%	Rp	100%	Rp 163.750.000	204,69%	Rp 163.750.000	ITDA
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainya yang Disediakan	6 Unit	Rp 80.000.000	2 Unit	Rp 163.750.000	10 Unit	Rp 168.444.600									2 Unit	Rp	2 Unit	Rp 163.750.000	204,69%	Rp 163.750.000	ITDA
		Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi**	**100%**	Rp 657.000.000	100%	Rp 216.000.150	**80%**	Rp 219.023.600		Rp 42.206.435							100%	Rp 42.206.435	100%	Rp 258.206.585	39,30%	Rp 258.206.585	ITDA
		Jumlah Lapora n Penyediaan Jasa surat menyurat	Penyediaan Jasa surat menyurat	36 Laporan	Rp 6.000.000	1 Laporan	Rp 500.000	12 Laporan	Rp 1.040.000									1 Laporan	Rp	1 Laporan	Rp 500.000	8,33%	Rp 500.000	ITDA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Laporan	Rp 81.000.000	1 Laporan	Rp 12.956.592	48 Laporan	Rp 17.808.400	1 Laporan	Rp 2.748.615							1 Laporan	Rp 2.748.615	1 Laporan	Rp 15.705.207	19,39%	Rp 15.705.207	ITDA
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	Rp 570.000.000	1 Laporan	Rp 202.543.558	12 Laporan	Rp 200.175.200	1 Laporan	Rp 39.457.820							1 Laporan	Rp 39.457.820	1 Laporan	Rp 242.001.378	42,46%	Rp 242.001.378	ITDA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik**	100%	Rp 420.000.000	100%	Rp 201.205.870	100%	Rp 521.586.000		Rp 14.278.550							100%	Rp 14.278.550	100%	Rp 215.484.420	51,31%	Rp 215.484.420	ITDA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	Rp 265.000.000	8 Unit	Rp 165.017.170	8 Unit	Rp 184.406.000	8 Unit	Rp 11.398.550							8 Unit	Rp 11.398.550	8 Unit	Rp 176.415.720	66,57%	Rp 176.415.720	ITDA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	Rp 90.000.000	1 Unit	Rp 22.392.700	1 Unit	Rp 30.100.000	1 Unit	Rp 2.880.000							1 Unit	Rp 2.880.000	1 Unit	Rp 25.272.700	28,08%	Rp 25.272.700	ITDA
		Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Rp 5.000.000	5 Unit	Rp											5 Unit	Rp	5 Unit	Rp	0,00%	Rp	ITDA

		Pemeliharaan/Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara	30 Unit	Rp 30.000.000	20 Unit	Rp 8.893.000	20 Unit	Rp 9.790.000								20 Unit	Rp	20 Unit	Rp 8.893.000	29,64%	Rp 8.893.000	ITDA
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan	Jumlah Gedung Kantor yang Selesai Direhab sedang/Best	3 Unit	Rp 30.000.000	1 Unit	Rp 4.903.000	1 Unit	Rp 297.290.000								1 Unit	Rp	1 Unit	Rp 4.903.000	16,34%	Rp 4.903.000	ITDA
Rata -rata capaian kinerja (%											Rp 1.409.530.008		##		##		##		Rp 1.409.530.008		Rp 8.350.362.670		############		

2.2. Analisis Kinerja Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang

Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata cara Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk Tahun Anggaran 2025 realisasi program dan kegiatan pada urusan pemerintahan umum bidang Inspektorat tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan;

1. **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sebesar Rp. 4.748.304.519,-**

   Kegiatan ini bertujuan untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan seluruh ASN di Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai **26%** sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp**.** 1.199.922.038,- (%). Dari kegiatan ini telah dilakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 5 bulan termasuk gaji ke 13 dan ke 14.

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 200.000.000**

   Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan serta pengetahuan APIP dengan dilaksanakanya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Realisasi Fisik dari kegiatan ini telah mencapai **17%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 9.350.000,- (5%).**

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan;

1. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sebesar Rp. 1.201.100,-**

   Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini masih 0**%** sedangkan realisasi Keuangan sebesar **Rp. 0,- (0%).** Dari Kegiatan ini dihasilkan perlengkapan penerangan kantor seperti bola lampu, kabel-kabel listrik dan peralatan listrik lainnya.

2. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 1.958.800**

   Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah **0%** sedangkan realisasi keuangan masih sebesar **Rp. 0,- (0%)**

3. **Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sebesar Rp. 49.696.280,-**

   Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya alat-alat kebersihan dan alat tulis kantor. Realisasi fisik kegiatan ini adalah jumlah alat kebersihan yang tersedia

mencapai **11%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 0,-(0%)**. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dihasilkan alat kebersihan kantor dan alat tulis kantor sehingga kebersihan kantor dapat terjaga dan terpelihara.

4. **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sebesar Rp. 16.723.400,-**
   Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya barang cetakan dan pengadaan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **25%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 225.000,-(1%)**. Dalam kegiatan ini dihasilkan barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan dalam menunjang kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, seperti cetak map, kulit Laporan Hasil Pemeriksaan, dan fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan.
5. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sebesar Rp. 246.138.000,-**
   Kegiatan ini bertujuan untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam kota dan di luar kota dan tersedianya anggaran makan minum rapat untuk menunjang pelaksanaan rapat. Realisasi fisik dari pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar **19%**. Sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 19.817.985,-(8%)**. Dalam pelaksanaan kegiatan dapat dihasilkan keikutsertaan pengawai Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan di luar daerah dan juga dapat dihasilkan penyelenggaraan rapa-rapat internal kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub Kegiatan;

1. **Penyediaan Jasa Surat menyurat Sebesar Rp. 1.040.000,-**
   Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa surat menyurat. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai **29%** sedangkan realisasi Keuangan **Rp. 0,-(0%).** Kegiatan ini ditujukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan terutama dalam hal surat menyurat.
2. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sebesar Rp. 17.808.400,-**
   Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **25%** sedangkan realisasi keuangan **Rp. 2.748.615,-(15%) .**Kegiatan ini ditujukan untuk pembayaran jasa komunikasi, mumber daya air dan listrik untuk menunjang urusan kantor.
3. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sebesar Rp. 200.175.200,-**
   Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Realisasi fisik dari subkegiatan ini adalah sebesar **25%** sedangkan realisasi

keuangan **Rp. 39.457.820,-(20%).** Kegiatan ini untuk membayar jasa pegawai honorer, tenaga keamanan, tenaga kebersihan dan tenaga sopir yang menunjang kinerja ASN di lingkungan Inspektorat.

e. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya sebesar, Rp. 168.444.600,-**

   Kegiatan ini bertujuan agar terawatnya kendaraan operasional yang akan menunjang kelancaran transportasi kegiatan kantor dan dinas. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **0%** sedangkan realisasi keuangan hanya sebesar **Rp. 0,-(0%).** Dari kegiatan ini dihasilkan antara lain pembayaran jasa service perbaikan kendaraan dinas baik kendaraan dinas roda empat, dan untuk penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak/gas, serta pembayaran STNK kendaraan dinas.

f. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp. 184.406.000,-**

   Kegiatan ini bertujuan agar terawatnya kendaraan operasional yang akan menunjang kelancaran transportasi kegiatan kantor dan dinas. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **15%** sedangkan realisasi keuangan hanya sebesar **Rp. 11.398.550,-(6%).** Dari kegiatan ini dihasilkan antara lain pembayaran jasa service perbaikan kendaraan dinas baik kendaraan dinas roda empat, dan untuk penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak/gas, serta pembayaran STNK kendaraan dinas.

2. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan sebesar Rp. 30.100.000,-**

   Kegiatan ini bertujuan agar terawatnya kendaraan operasional yang akan menunjang kelancaran transportasi kegiatan kantor dan dinas. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **20%** sedangkan realisasi keuangan hanya sebesar **Rp. 2.880.000,-(10%).** Dari kegiatan ini dihasilkan antara lain pembayaran jasa service perbaikan kendaraan dinas baik kendaraan dinas roda empat, dan untuk penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak/gas, serta pembayaran STNK kendaraan dinas.

3. **Pemeliharaan/Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.9.790.000,-**

   Kegiatan ini dimaksudkan sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor.

Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai **15%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 0,-(0%).**

4. **Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya 297.290.000,-**

   Kegiatan ini dimaksudkan sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor berupa Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai **5%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 0,-(0%).**

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan;

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;

1. **Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Sebesar Rp. 65.100.000,-**

   Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai **0%** dengan Realisasi Keuangan sebesar **Rp. 0,-(0%).** Kegiatan ini dalam rangka melaksanakan Pengawan Kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2024.

2. **Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Sebesar Rp.406.800.000,-**

   Realisasi Fisik dari Kegiatan ini mencapai **20%** dengan realisasi Keuangan sebesar **Rp. 78.665.000,-(40,79%).** Kegiatan ini dalam rangka melaksanakan pengawasan internal berupa audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan pendampingan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2025.

3. **Reviu Laporan Kinerja Sebesar Rp. 22.200.000,-**

   Kegiatan ini bertujuan agar Laporan Kinerja Pemerintah Kota Padang Panjang yang telah disusun sebelum disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Realisasi fisik dari sub kegiatan ini adalah **100%** namun terkait realisasi keuangan sudah terealisasi **Rp.18.225.000,-(82%).**

4. **Reviu Laporan Keuangan Sebesar Rp. 16.650.000,-**

   Kegiatan ini bertujuan agar laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Padang Panjang telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Realisasi Fisik dari kegiatan ini mencapai **100%** dengan realisasi Keuangan sebesar **Rp. 14.960.000,- (90%)**.

5. **Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Sebesar Rp. 81.022.000,-**

   Kegiatan ini bertujuan agar seluruh temuan hasil pemeriksaan baik hasil pemeriksaan internal maupun hasil pemeriksaan eksternal dapat ditindaklanjuti oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, dengan realisasi fisik sebesar **10%** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 0- (0%).**

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu;

1. **Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah Sebesar Rp. 22.050.000,-**

   Kegiatan ini bertujuan agar terselenggaranya penanganan penyelesaian kerugian negara/ daerah. Realisasi Fisik dari Kegiatan ini masih **0%** sedangkan realisasi keuangan sebesar **Rp. 0,-(0%)**.

2. **Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Sebesar Rp. 64.200.000,-**

   Kegiatan ini bertujuan agar terselenggaranya pemeriksaan dengan tujuan tertentu berjalan dengan baik. Realisasi Fisik dari Kegiatan ini mencapai **50%** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 0,- (18,07%).**

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;

a. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

1. **Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Sebesar Rp. 106.725.000,-**

   Kegiatan ini bertujuan agar pendampingan dan asistensi dapat terlaksana dengan baik pada tiap OPD dalam menyusun SAKIP, pendampingan bagi ASN dalam pengisian LHKASN dan LHKPN, peningkatan kapabilitas AIP menuju level 3 serta melakukan evaluasi pelaksanaan SPIP pada Perangkat Daerah. Realisasi Fisik dari kegiatan ini **Daerah Sebesar 35%**. Realisasi keuangan dalam kegiatan ini mencapai **Rp. 11.880.000,-(11%)**.

2. **Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Sebesar Rp. 19.000.000,-**

   Realisasi Fisik dari kegiatan ini sudah 20% dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 0,- (0%).**

3. **Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi Sebesar Rp. 122.148.800,-**

   Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **10%** sedangkan Realisasi Keuangan sebesar **Rp. 0,-(0%)**.

4. **Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Sebesar Rp. 124.424.400**

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai **10%** sedangkan Realisasi Keuangan sebesar **Rp. 0,-(0%)**.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis .

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Padang Panjang. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Pemerintahannya. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain). Skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan dalam isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang;
3. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan Kota Padang Panjang;
4. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola menjadi peluang atau kekuatan organisasi;

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu- isu strategis, maka yang menjadi isu strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang 1 (satu) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

2.3.1.1.1. Peningkatan kuantitas, Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

Jumlah personil auditor dan tenaga staf lainnya yang ada pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang jauh dari memadai, maka perlu dilakukan penambahan jumlah APIP.

2.3.1.1.2. Peningkatan kapasitas dan kualitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang menyadari dengan sepenuhnya bahwa tantangan dan permasalahan dibidang pengawasan semakin hari semakin komplek, maka APIP yang ada pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang setiap saat perlu ditingkatnya kapasitas dan kualitasnya melalui diklat, studi komparatif, workshop, dan bimbingan teknis lainnya.

2.3.1.1.3. Perubahan paradigma Pengawasan dari Watchdogs menjadi Mitra PERANGKAT DAERAH/unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi.

Tugas Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sebagai Perangkat Daerah pengawasan masih dianggap sebagai Perangkat Daerah yang suka mencari kesalahan Perangkat Daerah lainnya. Masih kurangnya pemahaman kebanyakan entitas pada Pemerintah Kota Padang Panjang tentang tugas APIP sebagai auditor intern harus menjadi perhatian serius bagi Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka merubah paradigma yang salah tersebut. Kedepan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang harus menjadi mitra kerja bagi Perangkat Daerah, bukan lagi sebagai hubungan subjek dan objek dalam hal pemeriksaan.

2.3.1.1.4. Peningkatan Hubungan Kerja dengan BPK RI dan BPKP RI.

Peningkatkan hubungan kerja dengan BPK RI dan BPKP RI menjadi isu yang sangat startegis kedepan. Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang harus meningkatkan hubungan kerja dengan BPK RI sebagai auditor ekstern pemerintahan baik dalam hal pendampingan pemeriksaan maupun dalam hal penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. BPKP RI sebagai lembaga yang salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan kepada seluruh APIP, juga harus dilakukan peningkatan hubungan kerja terutama dalam hal peningkatan kapasitas APIP melalui diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP RI.

2.3.1.1.5. **Pemanfaatkan Komitmen Pimpinan dan APIP Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam rangka Good Goverment.**

Komitmen pimpinan dan APIP pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang sangatlah perlu, karena tanpa komitmen yang tinggi dalam rangka penegakan aturan dari seluruh *stakeholder* yang ada, akan sangat sulit dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik/ *good goverment* tersebut.

2.3.1.1.6. Koordinasi dan Konsolidasi dalam Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dengan Aparat Penegak Hukum.

Tidak bisa kita pungkiri bahwa Inspektorat Daerah secara nasional juga dituntut untuk berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan Aparat Penegak Hukum di daerah dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Yang menjadi arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan Tugas Pokok dan fungsi Inspektorat adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan sasaran Tahun 2025, Terselenggaranya pengawasan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan :

1. Penilaian Kinerja Perangkat Daerah mencapai nilai Sangat Baik.
2. 95% Perangkat Daerah menyusun LKjIP secara benar dan tepat.
3. Renstra Perangkat Daerah yang sinkron dengan RPJMD 100%.
4. Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi terlaksana 100 %.

Selain hal tersebut diatas Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang juga diperintahkan untuk mengawal kebijakan nasional dalam rangka pemulihan ekonomi nasional antara lain pengawasan vaksinsasi dan monitoring Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Inspektorat juga diminta untuk melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden ini. Hal ini semakin menegaskan fungsi dan peran Inspektorat yang sangat *vital* dalam rangka mengawal kebijakan nasional maupun kebijakan Pemerintah Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam periode tertentu. Sedangkan sasaran adalah bagian dari tujuan atau outcome (yang telah dirancang) yang diinginkan untuk pencapaian tujuan. Sasaran harus dapat dicapai dan memungkinkan dalam jangka waktu tertentu dan bersifat jangka pendek, kurang permanen dari pada tujuan.

Adapun tujuan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Sektor Pengawasan Intern Pemerintahan”, dengan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	BASELINE (2024)	TARGET		KET
						RENSTRA 2025-2029 (2025)	RENJA 2025	
1	2	3	4	7	8	9	10	14
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Sektor Pengawasan Intern Pemerintah		Nilai Integritas (Survey Peniliaian Integritas KPK)	Nilai	78,03	76,05	76,05	
			Nilai AKIP Kota	Nilai	64,22	65	65	
		1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level	Level 3	Level 3	Level 3	
			Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada AKIP Kota	Nilai	16,05	16,25	16,25	
		2. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat	Angka	71,70	72	72	

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

Pada Tahun 2025 terdapat 2 (dua) target Indikator Kunci (IKK) yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang dalam mewujudkannya yaitu :

No.	Indikator Kerja Pembangunan Daerah	Rumus	Baseline (2024)	Target		Sumber Data
				RENSTRA 2025-2029 (2025)	RENJA 2025	
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (Level 1/2/3/4/5) berdasarkan laporan QA oleh BPKP RI	Level 3	Level 3	Level 3	BPKP RI
2.	Nilai Integritas (Survei Penilaian Integritas KPK)	= 0,305X1 + 0,328X2 – 0,20 0,58X4 + 0,42X5Keterangan :X1 = Indeks Penilaian InternalX2 = Indeks Penilaian EksternalX3 = Indeks Penilaian EksperX4 = Prevalensi KorupsiX5 = Integritas Pelaksanaan SPI	78,03	76,05	76,05	KPK

Namun demikian, target IKK tersebut tentu tidak bisa hanya dilaksanakan oleh Inspektorat saja, namun perlu dukungan dari seluruh stakeholder di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang terutama terkait dengan capaian Maturitas SPIP.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan kegiatan pada Tahun 2025 yang bersumber dari APBD Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 Kegiatan yaitu :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
   a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor.
   b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
   c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
   d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
   a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
   b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
   b) Pemiliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   c) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya

b. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan:
   a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
   b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
   c) Reviu Laporan Kinerja
   d) Reviu Laporan Keuangan
   e) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu., dengan sub kegiatan:
   a) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
   b) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
   c) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

   Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terdiri 1 kegiatan yaitu :
3. Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan:
   a) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
   b) Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
   c) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
   d) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Tabel 3. 2

RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		INSPEKTORAT DAERAH							**8.119.141.135**	**8.364.110.479**	**5.796.672.161**							**6.983.354.635,00**	
	6.	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**8.119.141.135**	**8.364.110.479**	**5.796.672.161**							**6.983.354.635,00**	
	6.01.	**INSPEKTORAT DAERAH**							**8.119.141.135**	**8.364.110.479**	**5.796.672.161**							**6.983.354.635,00**	
##	**6.01.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat**	**100 %**		**100 %**	**93 %**	**100 %**	**5.172.316.135**	**5.267.181.999**	**4.608.843.851**							**5.919.057.233,00**	
	6.01.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**4.650.723.135**	**4.748.304.519**	**4.580.017.451**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**4.650.716.833,00**	**INSPEKTORAT DAERAH**
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	186 Orang/bulan		31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4.650.723.135	4.748.304.519	4.580.017.451	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			4.650.716.833,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**200.000.000**	**200.000.000**	**27.250.000**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**263.589.800,00**	**INSPEKTORAT DAERAH**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	186 Orang		31 Orang	31 Orang	31 Orang	200.000.000	200.000.000	27.250.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			263.589.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Dilaksanakan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**318.103.100**	**315.717.580**	**1.576.400**			**-**	**-**	**-**		**295.312.900,00**	**INSPEKTORAT DAERAH**
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	3.489.900	1.201.100	597.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.553.700,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	1.958.800	979.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			9.094.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.	**NON URUSAN**							**-**	**-**	**-**							**6.983.354.635,00**	
	6.01.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**-**	**-**	**-**							**6.983.354.635,00**	
##	**6.01.01..**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat**	**100 %**		**100 %**	**93 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**							**5.919.057.233,00**	
	6.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Dilaksanakan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**295.312.900,00**	**INSPEKTORAT DAERAH**
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
	6.	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**997.068.400**	**924.321.880**	**624.167.910**							**6.983.354.635,00**	
	6.01.	**INSPEKTORAT DAERAH**							**997.068.400**	**924.321.880**	**624.167.910**							**6.983.354.635,00**	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
##	**6.01.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat**	**100 %**		**100 %**	**93 %**	**100 %**	**997.068.400**	**924.321.880**	**624.167.910**							**5.919.057.233,00**	
	6.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Dilaksanakan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**997.068.400**	**924.321.880**	**624.167.910**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**295.312.900,00**	**INSPEKTORAT DAERAH**
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		4 Paket	4 Paket	4 Paket	49.698.800	49.696.280	24.339.310	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			47.784.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket		12 Paket	12 Paket	12 Paket	16.723.400	16.723.400	6.908.300	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			13.656.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	246.138.000	246.138.000	92.809.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			222.224.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**182.101.000**	**168.444.600**	**168.444.600**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**91.790.500,00**	**INSPEKTORAT DAERAH**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		10 Unit	10 Unit	10 Unit	182.101.000	168.444.600	168.444.600	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			91.790.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Kegiatan Penunjang yang Tuntas Dilaksanakan**	**100 %**		**80 %**	**90 %**	**90 %**	**248.637.200**	**219.023.600**	**215.993.700**			**-**	**-**	**-**		**248.117.200,00**	**INSPEKTORAT DAERAH**
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.040.000	1.040.000	520.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			520.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	17.808.400	17.808.400	15.298.500	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			17.808.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	229.788.800	200.175.200	200.175.200	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			229.788.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**253.770.000**	**224.296.000**	**115.673.000**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**369.530.000,00**	**INSPEKTORAT DAERAH**

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	43 Unit		8 Unit	8 Unit	8 Unit	221.750.000	184.406.000	87.590.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			221.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	32.020.000	30.100.000	24.348.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			32.020.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit		20 Unit	20 Unit	20 Unit	-	9.790.000	3.735.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			16.560.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.	**NON URUSAN**							**-**	**-**	**-**							**6.983.354.635,00**	
	6.01.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**-**	**-**	**-**							**6.983.354.635,00**	
##	**6.01.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat**	**100 %**		**100 %**	**93 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**							**5.919.057.233,00**	
	6.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Kegiatan Pemeliharaan yang Tuntas Dilaksanakan**	**-**			**100 %**	**100 %**	**-**	**-**	**-**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**369.530.000,00**	**INSPEKTORAT DAERAH**
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	6.	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.949.756.600**	**2.172.606.600**	**563.660.400**							**6.983.354.635,00**	
	6.01.	**INSPEKTORAT DAERAH**							**1.949.756.600**	**2.172.606.600**	**563.660.400**							**6.983.354.635,00**	

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
##	**6.01.01.**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Inspektorat**	**100 %**		**100 %**	**93 %**	**100 %**	**103.540.000**	**297.290.000**	**-**							**5.919.057.233,00**	
	6.01.01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**103.540.000**	**297.290.000**	**-**			**-**	**-**	**-**		**369.530.000,00**	**INSPEKTORAT DAERAH**
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	103.540.000	297.290.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			99.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
##	**6.01.02.**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran n 1**	**85 %**		**85 %**	**90 %**	**85 %**	**729.322.000**	**758.422.000**	**480.896.000**							**707.383.200,00**	
	6.01.02.2.01.	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal yang Ditindaklanjuti oleh Auditan**	**81 %**		**75 %**	**75 %**	**76 %**	**556.822.000**	**585.922.000**	**433.126.000**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**OPD**		**593.201.000,00**	**INSPEKTORAT DAERAH**
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	36 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	37.200.000	65.100.000	29.925.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			39.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	750 Laporan		125 Laporan	120 Laporan	125 Laporan	405.600.000	406.800.000	336.430.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			405.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8 Laporan		2 Laporan	2 Laporan Laporan	2 Laporan	22.200.000	22.200.000	18.225.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			23.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	16.650.000	16.650.000	14.960.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			43.179.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	26 Laporan		5 Laporan	4 Dokumen	4 Laporan	75.172.000	75.172.000	33.586.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			81.022.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tuntas dilaksanakan**	**100 %**		**100 %**	**100 %**	**100 %**	**86.250.000**	**86.250.000**	**47.770.000**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**114.182.200,00**	**INSPEKTORAT DAERAH**
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	22.050.000	22.050.000	-	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			49.982.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	36 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	64.200.000	64.200.000	47.770.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			64.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
##	**6.01.03..**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**	**Level 4**		**Level 3**		**Level 3**	**372.298.200**	**372.298.200**	**82.764.400**							**356.914.202,00**	
			Kapabilitas APIP	**Level 4**		**Level 3**		**Level 3**											

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	6.01.03.2.02.	**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase Pendampingan dan Asistensi yang tuntas dilakukan**	**100 Persentase**		**100 Persentase**	**88 %**	**100 Persentase**	**372.298.200**	**372.298.200**	**82.764.400**			**-**	**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif**	**-**		**356.914.202,00**	**INSPEKTORAT DAERAH**
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	138 Perangkat Daerah		23 Perangkat Daerah	23 perangkat daerah	23 Perangkat Daerah	106.725.000	106.725.000	30.970.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			123.755.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	138 Perangkat Daerah		23 Perangkat Daerah	23 perangkat daerah	23 Perangkat Daerah	19.000.000	19.000.000	10.440.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			10.700.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	122.148.800	122.148.800	19.004.400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			109.207.600,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	138 Perangkat Daerah		23 Perangkat Daerah	23 perangkat daerah	23 Perangkat Daerah	124.424.400	124.424.400	22.350.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			113.251.602,00	INSPEKTORAT DAERAH

Sumber: Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, 2025

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dalam hal ini terkait realisasi dan capaian pada triwulan I serta mengacu pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025. Dalam hasil evaluasi dan capaian pada triwulan I menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan diperkirakan akan berpengaruh terhadap hasil target pelaksanaan program/kegiatan dan berakibat terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran.

Berdasarkan evaluasi tersebut, maka untuk perubahan anggaran tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan 3 (tiga) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan. Pedoman perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dan acuan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, Juni 2025

INSPEKTUR
KOTA PADANG PANJANG

Dr. SYAHRIL, SH., MH., CGCAE
Pembina Utama Muda / NIP. 19700405 199703 1 004